Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

PERUM JAMKRINDO

Laporan Tahunan I 2014 I Annual Report



UMKMK

UNTUK INDONESIA HEBAT

Daftar Isi
Table of Content

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB
DISCLAIMER

TENTANG LAPORAN TAHUNAN PERUM JAMKRINDO 2014
ABOUT 2014 ANNUAL REPORT OF PERUM JAMKRINDO

01
KILAS KINERJA 2014
FLASHBACK PERFORMANCE OF 2014
6 Jejak Langkah
Milestones
7 Peristiwa Penting
Event Highlights
14 Jalinan Kerja Sama
Partnership in 2014
27 Ikhtisar Data Keuangan
Financial Highlights
30 Grafik Ikhtisar Kinerja Keuangan
Charts of Financial Highlights
30 Grafik Ikhtisar Kinerja Operasional
Charts of Operational Performance Highlights
31 *Key Performance Indicator*
Key Performance Indicator
34 Penilaian GCG 2014
GCG 2014 Assessment
35 Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications

02
LAPORAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
BOARD OF SUPERVISORS AND BOARD OF DIRECTORS REPORT
38 Laporan Dewan Pengawas
Board of Supervisors Report
44 Laporan Direktur Utama
Board of Directors Report
54 Surat Pernyataan Anggota Dewan Pengawas dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2014 Perum Jamkrindo
Statement of Members of Board of Supervisors and Directors on the Responsibility for the 2014 Annual Report of Perum Jamkrindo

03
PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE
58 Identitas Perusahaan
Corporate Identity
59 Selayang Pandang Perum Jamkrindo
Perum Jamkrindo at a Glance
61 Bidang Usaha
Line of Business
66 Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan
Vision, Mission, and Corporate Culture
68 Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU Perum Jamkrindo)
Implementation of Perum Jamkrindo Assessment Criteria on Excellent Performance (KPKU)
69 Kompetensi Inti
Core Competency
71 Struktur Organisasi Perusahaan
Organization Structure of the Company
76 Profil Dewan Pengawas
Board of Supervisors Profile
81 Profil Dewan Pengawas Syariah
Board of Sharia Supervisors Profile
84 Profil Direksi
Board of Directors' Profile
94 Profil Pejabat dan Kepala Cabang Perum Jamkrindo
Perum Jamkrindo Officers and Heads of Branch Profile
96 Informasi Kepemilikan Saham
Share Ownership Information
96 Kronologi Pencatatan Saham
Share Listing Chronology
96 Kronologi Pencatatan Efek Lainnya
Other Securities Listing Chronology
97 Lembaga Profesi Penunjang Perusahaan
Professional Institution Supporting Company
98 Informasi Entitas Anak Perusahaan
Information on Subsidiaries Entity
99 Jaringan Kerja Perum Jamkrindo
Perum Jamkrindo Network Services
102 Peta Operasional
Operational Map

04
TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS
TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS
106 Laporan Direktur SDM dan Umum
Human Resource and General Affair Report
108 Sumber Daya Manusia
Human Resources
139 Teknologi Informasi
Information Technology
145 PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

05
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
164 Tinjauan Umum
Overview
166 Laporan Direktur Keuangan, Investasi dan TI
Director of Finance, Investment and Information Technology's Report
169 Laporan Direktur Penjaminan Bank
Director of Bank Guarantee's Report
171 Laporan Direktur Penjaminan Non Bank
Director of Non-Bank Guarantee's Report
173 Tinjauan Operasi per Segmen Usaha
Operational Overview per Business Segment
188 Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan
Analysis of Company's Financial Performance
197 Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2014
Company's Health Index in 2014
198 Peningkatan atau Penurunan yang Material dari Penjualan/Pendapatan Bersih
Material Increase and Decrease from Revenue/Net Sales
198 Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa
Financial Information Containing Extraordinary Event

198 Perbandingan Realisasi dengan RKAP 2014
Comparison Between Realization and RKAP 2014
201 Proyeksi Keuangan Tahun 2015
Financial Projection for 2015
202 Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang
Solvency and Receivables Collectibility Rate
203 Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal
Capital Structure and Management Policy on Capital Structure
204 Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Material Information and Fact Subsequent to Balance Sheet Date
204 Kebijakan Dividen
Dividend Policy
205 Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen
Management and/or Employee Stock Ownership Program
205 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Use of Proceeds From Public Offering
205 Informasi Transaksi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi Utang/Modal
Information of Material Transacton on Investment, Expansion, Divestment, Business Merger, Acquisition of Debt/Capital Restructuring
207 Investasi Barang Modal yang Direalisasikan pada Tahun Buku Terakhir
Capital Goods Investment Realized In the Last Fiscal Year
207 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan Transaksi dengan Pihak Afiliasi
Information on Material Transaction with Conflict of Interest and Transaction with Affiliated Parties
207 Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh
Changes in Regulations That Have Significant Impact
207 Kebijakan Akuntansi
Accounting Policy
207 Perpajakan Perusahaan
Corporate Taxation
209 Aspek Pemasaran
Marketing Aspects
214 Prospek Usaha Perusahaan
Business Outlook
216 Rencana Jangka Panjang Perusahaan
Company Long-Term Plan

06
TATA KELOLA PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

222 Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Basis of Corporate Governance Implementation
223 Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance Implementation
229 Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
Mechanism of Corporate Governance
230 Road Map Tata Kelola Perusahaan
Roadmap of Corporate Governance
232 Implementasi Tata Kelola Perusahaan
Implementation of Good Corporate Governance
234 Pengukuran Implementasi Praktik Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Implementation Measurements
235 Assessment Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Implementation Assessment
240 Struktur Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Structure
240 Rapat Pembahasan Bersama (RPB)
Discussion of Joint Meeting (RPB)
244 Dewan Pengawas
Board of Supervisors
248 Komisaris Independen
Independent Commissioners
248 Direksi
Board of Directors
267 Assessment Dewan Pengawas dan Direksi
Assessment on Board of Supervisors and Board of Directors
269 Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi
Board of Supervisors and Board of Directors Composition
270 Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali, Baik Langsung Maupun Tidak Langsung, Sampai Kepada Pemilik Individu
Information on Major and Controlling Shareholders, Either Directly or Indirectly, to Individual Owners
270 Hubungan Afiliasi antara Anggota Direksi, Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali
Relationship between Affiliated Board of Directors, Supervisory Board, and Major and/or Controlling Shareholders
270 Komite-Komite yang Berada Di Bawah Dewan Pengawas
Committees Under Board of Supervisors
281 Komite-Komite Di Bawah Direksi
Committees Under Board of Directors
289 Manajemen Risiko
Risk Management
303 Sekretaris Dewan Pengawas
Board of Supervisors Secretary
305 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
312 Satuan Pengawasan Intern
Internal Audit
321 Sistem Pengendalian Intern
Internal Control System
323 Audit Eksternal
External Audit
326 Perkara Penting yang Dihadapi
Legal Case
326 Sanksi Administrasi
Administrative Sanction
327 Praktik Bad Governance
Bad Governance Practice
327 Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Information and Data of The Company
330 Kode Etik Perusahaan
Code of Ethics
338 Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System
344 Kebijakan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policy
345 Kepatuhan Terhadap Pajak
Tax Compliance

07
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM

344 Filosofi dan Dasar Kebijakan Tanggung Jawab
Philosophy and Basic Policy of Responsibility
249 Program Kemitraan
Partnership Program
355 Program Bina Lingkungan
Community Development Program

08
LAPORAN KEUANGAN
FINANCIAL REPORT

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer

Laporan tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan Perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

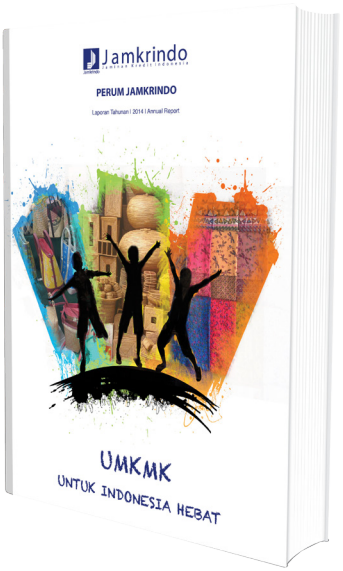
Pernyataan-pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang Perusahaan serta lingkungan bisnis di mana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan tahunan ini memuat kata "Perusahaan" yang didefinisikan sebagai Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) yang menjalankan bisnis dalam bidang penjaminan kredit UMKMK. Adakalanya kata "Perusahaan" juga digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut Perum Jamkrindo secara umum.

This annual report contains financial condition, operation results, projections, plans, strategies, policy, as well as the Company's objectives, which is classified as forward-looking statements in the implementation of the applicable laws, prevailing regulations, excluding historical matters. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks (prospective), uncertainties, and other factors that could cause actual results to differ materially from expected results.

Prospective statements in this annual report are prepared based on numerous assumptions concerning current conditions and future events of the Company and the business environment where the Company conducts business. The Company shall have no obligation to guarantee that the entire valid document presented will bring specific results as expected.

This annual report contains the word "Company" which is defined as Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo), which conducts business in MSME and Cooperative credit guarantee. The word "Company" is also used to simply refer to Perum Jamkrindo in general.



Tentang Laporan Tahunan Perum Jamkrindo 2014

About 2014 Annual Report of Perum Jamkrindo

Laporan Tahunan Perum Jamkrindo yang berakhir pada 31 Desember 2014 ini diterbitkan sesuai dengan PP. No. 41 Tahun 2008 tentang Perum Jamkrindo.

Laporan Tahunan Perum Jamkrindo2014 disajikan dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di website resmi Perum Jamkrindo yaitu www.jamkrindo.com.

The Annual Report of Perum Jamkrindo for the year ended on December 31, 2014 is published pursuant to the Government's Regulation (PP) No. 41 Year 2008 regarding Perum Jamkrindo.

Annual Report of 2014 Perum Jamkrindo is presented bilingually, namely in Bahasa Indonesia and English by using font type and size that is easily read and printed with good quality. This Annual Report can be seen and downloaded in the official website of Perum Jamkrindo, namely www.jamkrindo.com


Jamkri
SERTIFIKAT PE
Perusahaan Umum Jaminan
mengikatkan diri untuk
PT. Bank Rakyat Indonesi
Komp. R
MKR 2014
QS. Yusuf [12
IKAT K



KILAS KINERJA 2014

FLASHBACK PERFORMANCE OF 2014

Jejak Langkah
Milestones

1970-1981

- Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK)
  Skim kredit yang dijamin TRI, Kredit Padi Palawija, Kredit Pengadaan Pupuk.

  Credit Guarantee Scheme: TRI, Loan for rice and crops, fertilizer credit.

1981-2000

- **Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK)**
  Skim kredit yang dijamin: TRI, GLP & GLK, Kopelra, RMU, Kredit Sapi Perah, Kredit Padi Palawija Cengkeh, Kredit Pengadaan Pupuk, KUT (Kredit Usaha Tani).

  Credit Guarantee Scheme: TRI, GLP & GLK, Kopelra, RMU, dairy cow credit, Loan for rice and crops, fertilizer credit, Loan for Farmer (KUT).

2000-2008

- **Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (SPU)**
  Penjaminan Kredit dengan orientasi bisnis untuk pengembangan UMKM, Pemberian Pinjaman Bagi Hasil, peluncuran Produk Penjaminan Syariah.

  Credit guarantee with business orientation for MSMEs development, direct loans on profit sharing, and the launching of sharia guarantee products.

2008-sekarang/now

- **Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia(Perum Jamkrindo)**
  Penjaminan Kredit untuk UMKMK yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah antara lain kredit umum, mikro, konstruksi, Penjaminan Bank Garansi, penjaminan distribusi dan *Surety Bond*.

  Credit Guarantee for MSMEs & Cooperative was offered in conventional and sharia scheme such as commercial credit, micro, constructions, bank guarantee, guarantee for distribution, and Surety Bond.

2014

- Pembentukan anak perusahaan PT Penjamin Pembiayaan Jamkrindo Syariah (PT Jamsyar).

  Establishment of subsidiary of PT Penjamin Pembiayaan Jamkrindo Syariah (PT Jamsyar).

Peristiwa Penting
Event Highlights



27 Januari / January

Jamkrindo-PMI Berikan Bantuan Peduli Banjir
Direksi Perum Jamkrindo memberikan sejumlah bantuan kepada Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta. Bantuan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Perusahaan terhadap kejadian bencana banjir yang melanda Jakarta.

Jamkrindo-Indonesia Red Cross (PMI) Provided Aid for Flood Victims
Board of Directors of Perum Jamkrindo provided aid to Indonesia Red Cross (PMI) of DKI Jakarta. These aid are forms of Company's concern on flood victims in Jakarta.



20 Februari / February

Penandatanganan PKS dengan PT Brantas Abipraya
Perum Jamkrindo melakukan kerja sama penandatangan MoU tentang penerbitan surety bond bersama PT Brantas Abipraya di Gedung Jamkrindo Jakarta. PKS ini merupakan perjanjian baru untuk lebih meningkatkan kinerja masing masing pihak.

The Signing of Cooperation Agreement with PT Brantas Abipraya
Perum Jamkrindo cooperated and signed MoU regarding the issuance of surety bond with PT Brantas Abipraya in Jamkrindo building, Jakarta. This Cooperation Agreement is a new agreement to increase each party's performance.



21 Maret / March

Penandatanganan PKS dengan Bank Aceh
Penandatangan MoU dengan Bank Aceh meliputi empat jenis penjaminan kredit dan pembiayaan. Yakni penjaminan untuk kredit dan pembiayaan komersil. Termasuk juga kredit konstruksi pengadaan barang dan jasa, bank garansi serta kredit konsumtif.

The Signing of Cooperation Agreement with Bank Aceh
The signing of MoU with Bank Aceh covers four types of credits and financing guarantees, which are credit and commercial financing, goods and services procurement construction credit, bank guarantee as well as consumer loan.

30 April / April

Penandatanganan PKS dengan LPEI
Perum Jamkrindo menandatangani kerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam hal pemberian jaminan pembiayaan Kontra Garansi. Kerja sama ini menguntungkan bagi masyarakat yang memanfaatkan skim pembiayaan LPEI karena Jamkrindo akan memberikan jaminan atas pembiayaan tersebut.

The Signing of Cooperation Agreement with LPEI
Perum Jamkrindo signed a cooperation agreement with Indonesian Export Financing Agency (LPEI) in providing Counter Guarantee financing. This cooperation is beneficial for the community who utilizes LPEI financing scheme as Jamkrindo will provide a guarantee for the financing.



28-30 April / April

Rapimnas Evaluasi Kinerja Triwulan I tahun 2014
Perum Jamkrindo menggelar Rapat Pimpinan Nasional yang diikuti seluruh kepala cabang dan jajaran pejabat di kantor pusat. Tujuan Rapimnas ini dalam rangka evaluasi dan peningkatan kinerja perusahaan di triwulan berikutnya.

National Executive Meeting Evaluated 1st Quarter Performance in 2014
Perum Jamkrindo held National Executive Meeting attended by all heads of branch offices and managements in the head office. National Executive Meeting aims to evaluate and develop the Company's performance in the next quarter.



5 Mei / May

Penandatanganan PKS dengan BTN-FLPP
Perum Jamkrindo dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjalin kerja sama penjaminan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2014. Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Utama BTN Maryono dan Direktur Utama Perum Jamkrindo Diding S. Anwar. Dirut BTN Maryono mengungkapkan Kerja sama akan sangat menguntungkan bagi masyarakat yang memanfaatkan KPR FLPP.

The Signing of Cooperation Agreement with BTN-FLPP
Perum Jamkrindo cooperated with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) for Mortgage loan (KPR) guarantee with Housing Finance Liquidity Facility (FLPP) program in 2014. The signing was conducted by President Director of BTN, Maryono, and President Director of Perum Jamkrindo, Diding S. Anwar. The President Director of BTN, named Maryono, stated that the cooperation was beneficial for the community who utilized KPR from FLPP.





19 Mei / May

Penandatanganan PKS dengan PT POS, PT LEN dan PT INTI
Perum Jamkrindo melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan perjanjian kerja sama dengan beberapa BUMN, yaitu PT Pos Indonesia, PT Len Industri, dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti) di Bandung, Jawa Barat. Pelaksanaan penandatanganan tersebut merupakan implementasi dari sinergi antar BUMN yang saling memberikan kontribusi bagi masing-masing BUMN dalam optimalisasi kinerja dan target yang telah ditetapkan.

The Signing of Cooperation Agreement with PT POS, PT LEN, and PT INTI
Perum Jamkrindo signed Memorandum of Understanding (MoU) and cooperation agreement with several State Owned Enterprises, namely PT Pos Indonesia, PT Len Industri, and PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti) in Bandung, West Java. The signing is an implementation of synergy among SOEs that provides contribution for each SOE in optimizing the performance and target that has been determined.



10 Juni / June

Penandatanganan PKS dengan Bank Papua
Perum Jamkrindo melakukan penandatanganan kerja sama dengan Bank Papua. Kerja sama ini dilakukan guna meningkatkan akses kredit di sektor UMKMK di wilayah Indonesia Timur.

The Signing of Cooperation Agreement with Bank Papua
Perum Jamkrindo signed cooperation agreement with Bank Papua. This coordination was conducted to improve credit access in MSMEs & Cooperative sectors in Eastern Indonesia areas.



23 Juni / June

Peresmian 7 Cabang di Denpasar
Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan serta keterjangkauan akses kepada UMKMK, Perum Jamkrindo meresmikan tujuh cabang. Ketujuh cabang itu tersebar di Banda Aceh, Bengkulu, Kendari, Padang, Palu, Serang, dan Tanjung Pinang.

Formal Ceremony of 7 Branch Offices in Denpasar
To increase the performance and service as well as access accessibility for UMKMK, Perum Jamkrindo conducted formal ceremony of seven branch offices. These seven branch offices are located in Aceh, Bengkulu, Kendari, Padang, Palu, Serang, and Tanjung Pinang.



24 Juni / June

Penandatanganan PKS dengan Jamkrida Bali
Perum Jamkrindo bekerja sama dengan Jamkrida Bali meningkatkan akses keuangan kepada masyarakat khusunya di sektor UMKMK. Penandatanganan ini dilakukan di Kantor Gubernur Bali dengan dihadiri Gubernur Bali dan segenap jajaran direksi Jamkrida Bali Mandara.

The signing between PKS and Jamkrida Bali
Perum Jamkrindo cooperated with Jamkrida Bali to develop financial access for the community, particularly in UMKMK sector. The signing was conducted in Bali Governor's Office and attended by Governor of Bali and Board of Directors of Jamkrida Bali Mandara.

26 Juni / June

Penandatanganan PKS dengan PT Bina Griya
Jamkrindo dengan PT Asuransi Binagriya Upakara melakukan kerja sama untuk pertanggungan asuransi properti bagi nasabah bank yang dibiayai dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Penandatangan perjanjian tersebut merupakan sinergi antara BUMN dan perusahaan asuransi swasta.

The Signing of Cooperation Agreement and PT Bina Griya
Jamkrindo coordinated with PT Asuransi Binagriya Upakara for property insurance coverage intended for bank customers that was paid with Housing Finance Liquidity Facility (FLPP) scheme. This agreement signing is a synergy between SOE and private insurance companies.



11 Juli / July

Ucapan Selamat Idul Fitri 1435 H
Menjelang Hari Raya Idul Fitiri 1435 H, segenap Direksi Perum Jamkrindo memberikan ucapan selamat dan mohon maaf kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

Eid Al-Fithr 1435 H Greeting
To welcome Eid Al-Fithr 1435 H, Board of Directors of Perum Jamkrindo would like to wish you happy Eid Al-Fithr and apologize to all stakeholders and society.



17 Agustus / August

Kegiatan Upacara Bendera 17 Agustus 2014
Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-69 , Perum Jamkrindo bersama seluruh karyawan melaksanakan upacara bendera. Diharapkan dengan upacara bendera ini seluruh karyawan Jamkrindo mampu menumbuhkan rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap bangsa dan negara.

Flag Ceremony in August 17, 2014
In commemorating the 69th Independence Day of the Republic of Indonesia, Perum Jamkrindo together with all employees implemented a flag ceremony. With this ceremony, Jamkrindo is expected to develop its sense of nationalism and love towards the country.





29 September / September

Launching Buku Ade Komarudin
Menteri Koperasi/UKM Syarif Hasan, Ketua DK OJK Muliaman D. Hadad, dan Direktur Utama Perum Jamkrindo Diding S. Anwar menjadi pembicara dalam acara peluncuran dan bedah buku "Politik Hukum Integratif UMKM" di Jakarta. Buku karya Politisi Partai Golkar DPR Ade Komaruddin ini membedah perspektif politik dan hukum serta pandangan negara terhadap perkembangan dan kemajuan sektor tulang punggung negara UMKMK.

Launching of Book by Ade Komarudin
The Minister of Cooperative/SME, Syarif Hasan, the Chairman of Board of Commissioners of OJK, Muliaman D. Hadad, and President Director of Perum Jamkrindo, Diding S. Anwar, became keynote speakers at the launching and review of "Politik Hukum Integratif UMKM" book in Jakarta. The book written by Golkar Party Politician, Ade Komarudin, reviews the politics and law perspective as well as the nation's view towards the development and progress of the backbone sector of MSMEs & Cooperative.



17 September / September

Penandatanganan PKS dengan PT Indofarma
Penandatangan MoU dan Perjanjian kerja sama ini diharapkan akan meningkatkan pengajuan aplikasi penjaminan *Invoice Financing* melalui penerbitan SP3 (Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan) dari Perum Jamkrindo atas pengajuan secara *case by case* oleh PT Indofarma (Persero) Tbk, sehingga kerja sama tersebut saling memberikan kontribusi dan sinergitas bagi masing-masing Perusahaan dalam optimalisasi kinerja dan target yang telah ditetapkan.

The Signing of Cooperation Agreement with PT Indofarma
The signing of MoU and Cooperation agreement is expected to improve the guarantee application submission of Invoice Financing through SP3 issuance (Letter of In Principle Approval) from Perum Jamkrindo for the proposal on case-by-case basis by PT Indofarma (Persero) Tbk. Thus, the cooperation gives contribution and synergy for each Company in optimizing the performance and target that has been set.



19 September / September

Pendirian Anak Perusahaan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah merupakan anak usaha Perusahaan Umum Penjaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). Segenap Direksi Perum Jamkrindo mengapresiasi hangat berdirinya Jamkrindo Syariah dan berharap mampu lebih menjangkau segmen yang lebih luas. Penandatangan dilakukan Direktur Utama Perum Jamkrindo Diding S. Anwar, selaku pemegang saham mayoritas PT Jamkrindo Syariah dan Ketua Koperasi sebagai pemegang saham.

The Establishment of Subsidiary of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah is a subsidiary of Perum Jamkrindo. All Directors of Perum Jamkrindo appreciate the establishment of Jamkrindo Syariah and is expected to reach wider segment. The sign is done by President Director of Perum Jamkrindo, Diding S. Anwar, as the majority shareholder of PT Jamkrindo Syariah and the Chairman of Cooperation as the shareholder.

8 Oktober / October

Penandatanganan PKS dengan BRI Agro
Direktur Utama Perum Jamkrindo Diding S. Anwar bersama Dirut PT BRI Agro Tbk, Heru Sukanto didampingi Direktur Bisnis BRI Agro Zuhri Anwar dan Direktur Penjaminan Bank, Bakti Prasetyo melakukan penandatanganan kerja sama penjaminan kredit kontruksi di Jakarta, Rabu (8/10). Kerja sama ini merupakan perjanjian baru untuk lebih meningkatkan kinerja masing masing pihak baik peningkatan realisasi kredit/pembiayaan oleh BRI Agroniaga.

The Signing of Cooperation Agreement with BRI Agro
President Director of Perum Jamkrindo, Diding S. Anwar, together with President Director of PT BRI Agro Tbk, Heru Sukanto, accompanied by Director of Business of BRI Agro, Zuhri Anwar, and Director of Bank Guarantee of Jamkrindo, Bakti Prasetyo, signed a construction credit guarantee contract in Jakarta, Wednesday (8/10). The cooperation is a new agreement to improve the performance of each party, both loan/financing realization by BRI Agroniaga.



9 Oktober / October

Penandatanganan PKS dengan UNJ
Perum Jamkrindo melakukan penandatangan nota kesepahaman bersama (MoU) dengan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tentang Program Penguatan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat bagi dosen dan mahasiswa UNJ. Kerja sama ini bertujuan mendukung peran BUMN untuk meningkatkan inovasi dan daya saing bangsa.

The Signing of PKS with UNJ
Perum Jamkrindo signed Memorandum of Understanding (MoU) with State University of Jakarta (UNJ) regarding Research Strengthening Program, Scientific Publication, and Community Dedication to UNJ's lecturers and students. This cooperation is intended to support the role of SOE in improving the innovation and competitiveness of the nation.



6 November / November

Peringatan Hari Raya Idul adha
Direktur Utama Perum Jamkrindo menyerahkan sapi qurban kepada Ketua Serikat Karyawan Perum Jamkrindo. Perum Jamkrindo memberikan lima sapi dan dua kambing hewan qurban seberat total 1.580 kg.

Eid Al-Adha Celebration
President Director of Perum Jamkrindo, Diding S. Anwar, donated sacrificial animal to the Chairman of Employee Union of Perum Jamkrindo. Perum Jamkrindo donated five cows and two goats with the total of 1,580 kg.



6 November / November

Peningkatan Status 7 Kantor Cabang di Manado
Dalam rangka meningkatkan potensi pertumbuhan UMKMK di wilayah Indonesia Timur, Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) meningkatkan status tujuh kantornya di kawasan ini menjadi kantor cabang dari sebelumnya sebagai Kantor Unit Pelayanan (KUP).

Status Upgrade of 7 Branch Offices in Manado
In order to improve the MSMEs & Cooperative growth potential in East Indonesia, Perum Jamkrindo upgrade the status of seven offices in the area to branch office, which was previously known as service unit office (KUP).





7 November / November

Rakernas Asippindo
Pada tanggal 7 November 2014 telah dilaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) yang dihadiri oleh perusahaan-perusahaan penjaminan di seluruh Indonesia, OJK dan Kementerian Koordinator Perekonomian.

Asippindo National Working Meeting
On November 7, 2014, National Working Meeting (Rakernas) of Indonesia Guarantee Company Association (Asippindo) was held and attended by guarantee companies from all over Indonesia, OJK and Ministry of Coordinating Ministry for Economic Affairs.



24 November / November

Kegiatan PORSENI BUMN 2014
Dalam rangka mempererat silaturahmi dan sinergi diantara sesama Karyawan BUMN, Kementerian BUMN dan Forum Humas BUMN menyelenggarakan Pertandingan Olahraga dan Kesenian (PORSENI) BUMN 2014. Acara PORSENI BUMN 2014 diselenggarakan di GOR Soemantri Brodjonegoro yang dihadiri oleh Direktur Utama Perum Jamkrindo, Diding S. Anwar.

2014 PORSENI BUMN Event
In order to strengthen the relationship and synergy among SOE employees, the Ministry of SOE and Forum of Public Relations of SOE organized a Sports and Arts Competition (PORSENI) of SOE in 2014. The 2014 PORSENI BUMN event was organized at GOR Soemantri Brodjonegoro, attended by President Director of Perum Jamkrindo, Diding S. Anwar.



2 Desember / December

Penandatanganan PKS dengan Jamdatun
Direktur Utama Perum Jamkrindo Diding S. Anwar bersama Jamdatun Kejaksaan Agung RI Nur Rochmad menandatangani kesepakatan bersama antara Perum Jamkrindo dengan tujuh Kejaksaan Tinggi RI di Gedung Perum Jamkrindo, Jakarta. Kesepakatan tersebut dilakukan untuk bantuan hukum bagi tujuh kantor cabang baru Perum Jamkrindo yakni Ambon, Gorontalo, Mamuju, Pangkal Pinang, Tarakan dan Ternate.

The Signing of Cooperation Agreement with Junior Attorney General for Civil and State Administration (Jamdatun)
President Director of Perum Jamkrindo, Diding S. Anwar, together with Jamdatun of Attorney Genera of the Republic of Indonesia, Nur Rochmad, signed a contract with seven High Court of the Republic of Indonesia at Perum Jamkrindo Building, Jakarta. The contract was made in terms of legal support for seven new branches of Perum Jamkrindo, namely Ambon, Gorontalo, Mamuju, Pangkal Pinang, Tarakan, and Ternate.

Jalinan Kerja Sama 2014

Partnership in 2014

PERJANJIAN PENJAMINAN KREDIT/PEMBIAYAAN /
CREDIT GUARANTEE AGREEMENT/FINANCING OF:
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA DENGAN MITRA KERJA 2014 / PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA WITH PARTNERS IN 2014

No	Nama Instansi Name of Institution	Bentuk Kerja Sama Cooperation	Nomor Number	Tanggal Date
1	PT Bank Syariah Mandiri	Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam Rangka Pelaksanaan Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan Produktif bagi UMKMK / Cooperation Agreement regarding Information Technology (IT) Utilization for Guarantee Implementation (Kafalah) of Productive Financing for UMKMK	01/Jamkrindo/I/2014 16/003-PKS/DIR6	6 Januari 2014 / January 6, 2014
2	PT Bank Syariah Mandiri	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan (Kafalah) Bank Garansi / Cooperation Agreement regarding Guarantee (Kafalah) of Bank Guarantee	02/Jamkrindo/I/2014 16/005-PKS/DIR	7 Januari 2014 / January 7, 2014
3	PT BRI (Persero)	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan Bank Garansi / Cooperation Agreement regarding Guarantee (Kafalah) of Bank Guarantee	03/Jamkrindo/I/2014 B.55-DIR/BRM/01/2014	28 Januari 2014 / January 28, 2014
4	PT Asuransi Syariah Al Amin	Perjanjian Kerja Sama tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Bank/Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/Pembiayaan Multiguna / Coordination Agreement regarding the Closing of Credit Life Insurance for Bank Debtor/Other Financial Institution from Guarantee Recipients /Multipurpose Financing	05/Jamkrindo/II/2014 006/PKS-ALAMIN/DIR/II/2014	7 Februari 2014 / February 7, 2014
5	PT Heksa Eka Life Insurance	Perjanjian Kerja Sama tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/Pembiayaan Multiguna / Coordination Agreement regarding the Closing of Credit Life Insurance for Bank Debtor/Other Financial Institution from Guarantee Recipients /Multipurpose Financing	06/Jamkrindo/II/2014 PKS.001/HELI/I/2013	7 Februari 2014 / February 7, 2014

No	Nama Instansi Name of Institution	Bentuk Kerja Sama Cooperation	Nomor Number	Tanggal Date
6	PT Jiwasraya	Perjanjian Kerja Sama tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/Pembiayaan Multiguna / Coordination Agreement regarding the Closing of Credit Life Insurrance for Bank Debtor/Other Financial Institution from Guarantee Recipients /Multipurpose Financing	07Jamkrindo/II/2014 035.SJ.U.0214	7 Februari 2014 / February 7, 2014
7	PT Brantas Abipraya (Persero)	Perjanjian Kerja Sama tentang Penerbitan Surety Bond Jamkrindo / Coordination Agreement regarding the Issuance of Jamkrindo Surety Bond	12/Jamkrindo/II/2014 003/MOU/BA/DIR/II/2014	19 Februari 2014 / February 19, 2014
8	PT Bank Aceh	Perjanjian Kerja Sama Induk / Parent Cooperation Agreement	13/Jamkrindo/II/2014 008/BA/PK/II/2014	20 Februari 2014 / February 20, 2014
9	PT Bank Aceh	Perjanjian Kerja Sama Turunan tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan Umum(Komersial) / Derivative Cooperation Agreement regarding Credit Guarantee/ Commercial Financing	14/Jamkrindo/II/2014 009/BA/PK/II/2014	20 Februari 2014 / February 20, 2014
10	PT Bank Aceh	Perjanjian Kerja Sama Turunan tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan Konstuksi/Pengadaan Barang dan Jasa / Derivative Cooperation Agreement regarding Credit Guarantee/Construction Financing/Goods and Services Procurement	15/Jamkrindo/II/2014 009/BA/PK/II/2014 010/BA/PK/II/2014	20 Februari 2014 / February 20, 2014
11	PT Bank Aceh	Perjanjian Kerja Sama Turunan tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan Konsumer / Derivative Cooperation Agreement regarding Credit Guarantee/Consumers Financing	16/Jamkrindo/II/2014 011/BA/PK/II/2014	20 Februari 2014 / February 20, 2014
12	PT Bank Aceh	Perjanjian Kerja Sama Turunan tentang Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi) / Derivative Cooperation Agreement regarding Guarantee for Bank Guarantee (Counter Bank Guarantee)	17/Jamkrindo/II/2014 012/BA/PK/II/2014	20 Februari 2014 / February 20, 2014

No	Nama Instansi Name of Institution	Bentuk Kerja Sama Cooperation	Nomor Number	Tanggal Date
13	PT BPD Kalteng	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan Kredit Umum (Komersial) / Cooperation Agreement regarding Commercial Credit Guarantee	014/Jamkrindo/III/2014 DPT.11/PKS-0251/III-14	07 Maret 2014 / March 07, 2014
14	PT BPD Kalteng	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan Kredit Mikro / Coordination Agreement regarding Micro Credit Guarantee	015/Jamkrindo/III/2014 DPT.11/PKS-0252/III-14	07 Maret 2014 / March 07, 2014
15	PT BPD Kalteng	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan Kredit Konstruksi/ Pengadaang Barang dan Jasa / Coordination Agreement regarding Construction Credit Guarantee/ Goods and Services Procurement	016/Jamkrindo/III/2014 DPT.11/PKS-0253/III-14	07 Maret 2014 / March 07, 2014
16	PT BPD Kalteng	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan Kredit Pegawai / Cooperation Agreement regarding Employee Credit Guarantee	017/Jamkrindo/III/2014 DPT.11/PKS-0254/III-14	07 Maret 2014 / March 07, 2014
17	PT BRI (Persero)	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan Bank Garansi / Cooperation Agreement regarding Guarantee for Bank Guarantee	18/Jamkrindo/III/2014 B.220-DIR/BRM/03/2014	24 Maret 2014 / March 24, 2014
18	Perum Perumnas	Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Usaha untuk Optimalisasi Bisnis Masing-Masing Pihak dalam Kerangka Sinergi BUMN / Memorandum of Understanding regarding Business Cooperation for the Optimization of Each Party's Business for SOE Synergy	20/Jamkrindo/IV/2014 DIRUT/0380/X/IV/2014	16 April 2014 / April 16, 2014
19	Perum Perumnas	Perjanjian Kerja Sama tentang Penerbitan *Surety Bond* / Coordination Cooperation regarding the Issuance of Surety Bond	21/Jamkrindo/IV/2014 Dir.Keu.SDM/461/X/ IV/2014	16 April 2014 / April 16, 2014
20	PT Hutama Karya (Persero)	Nota Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama Usaha untuk Optimalisasi Bisnis dalam Rangka Sinergi antar BUMN / Memorandum of Understanding regarding Business Cooperation for the Optimization of Business for the Synergy among SOEs	23/Jamkrindo/IV/2014 946/MoU/09/2014	17 April 2014 / April 17, 2014
21	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia EXIMBANK)	Perjanjian Kerja Sama tentang Kontra Garansi / Cooperation Agreement regarding Counter Guarantee	25/Jamkrindo/IV/2014 131/PKS/04/2014	30 April 2014 / April 30, 2014

No	Nama Instansi Name of Institution	Bentuk Kerja Sama Cooperation	Nomor Number	Tanggal Date
22	PT BTN (Persero) Tbk	Nota Kesepahaman Bersama tentang Penjaminan *Cash Loan* dan *Non Cash Loan* / Memorandum of Understanding regarding Cash Loan and Non Cash Loan Guarantee	08/MoU/PKS/2014 26/Jamkrindo/V/2014	05 Mei 2014 / May 05, 2014
23	PT BTN (Persero) Tbk	Penjaminan Bank Garansi / Guarantee for Bank Guarantee	72/DIR/PKS/2014 27/Jamkrindo/V/2014	05 Mei 2014 / May 05, 2014
24	PT BTN (Persero) Tbk	Penjaminan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera / Sejahtera Mortgage Loan (KPR) Guarantee	71/DIR/PKS/2014 28/Jamkrindo/V/2014	05 Mei 2014 / May 05, 2014
26	PT LEN Industri (Persero)	Nota Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama Usaha untuk Operasi Bisnis dalam Rangka Sinergi antar BUMN / Memorandum of Understanding regarding Business Operation for the Optimization of Business for the Synergy among SOEs	31/Jamkrindo/V/2014 004/MOU/Len/DU/V/2014	19 Mei 2014 / May 19, 2014
27	PT LEN Industri (Persero)	Perjanjian Kerja Sama tentang Penerbitan *Surety Bond* Perum Jamkrindo / Cooperation Agreement regarding the Issuance of Perum Jamkrindo Surety Bond	32/Jamkrindo/V/2014 037/SPERJ/Len/DU/V/2014	19 Mei 2014 / May 19, 2014
28	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI)	Naskah Kesepahaman tentang Penyediaan *Surety Bond* / Memorandum of Understanding regarding Surety Bond Procurement	33/Jamkrindo/V/2014 0097/HK.02/042600/2014	19 Mei 2014 / May 19, 2014
29	Gapeksindo Sumatera Utara	Perjanjian Kerja Sama tentang Penerbitan *Surety Bond* Jamkrindo / Cooperation Agreement regarding the Issuance of Jamkrindo Surety Bond	35/Jamkrindo/V/2014 28/DPD-GPS/SU/2014	20 Mei 2014 / May 20, 2014
30	Gapensi Nias Cabang Medan	Perjanjian Kerja Sama tentang Penerbitan *Surety Bond* Jamkrindo / Cooperation Agreement regarding the Issuance of Jamkrindo Surety Bond	36/Jamkrindo/V/2014 105/MOU/BPD.13/V/2014	23 Mei 2014 / May 23, 2014
31	PT BPD Papua	Nota Kesepahaman Bersama / Memorandum of Understanding	39/Jamkrindo/VI/2014 127/PKS-BPD/VI/2014	10 Juni 2014 / June 10, 2014
32	PT BPD Jateng	Nota Kesepahaman Bersama tentang Penjaminan *Cash Loan* dan *Non Cash Loan* / Memorandum of Understanding regarding Cash Loan and Non Cash Loan Guarantee	40/Jamkrindo/VI/2014 4791/HT.01.04/KRD/2014	16 Juni 2014 / June 16, 2014

No	Nama Instansi Name of Institution	Bentuk Kerja Sama Cooperation	Nomor Number	Tanggal Date
33	PT BPD Jateng	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan Kredit Konsumstif / Cooperation Agreement regarding Consumer Loan Guarantee	41/Jamkrindo/VI/2014 4792/HT.01.04/KRD/2014	16 Juni 2014 / June 16, 2014
34	PT BPD Jateng	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan Kredit Produktif / Cooperation Agreement regarding Productive Loan Guarantee	42/Jamkrindo/VI/2014 4793/HT.01.04/KRD/2014	16 Juni 2014 / June 16, 2014
35	PT BPD Jateng	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa / Cooperation Agreement regarding Construction Credit Guarantee and Procurement of Goods/ Services	43/Jamkrindo/VI/2014 4794/HT.01.04/KRD/2014	16 Juni 2014 / June 16, 2014
36	PT BPD Jateng	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan Bank Garansi / Cooperation Agreement regarding Guarantee for Bank Guarantee	44/Jamkrindo/VI/2014 4795/HT.01.04/KRD/2014	16 Juni 2014 / June 16, 2014
37	PT BPD Jateng	Nota Kesepahaman Bersama tentang Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan / Memorandum of Understanding regarding Financing Guarantee (Kafalah)	45/Jamkrindo/VI/2014 4849/ht.01.04/SYAR/2014	16 Juni 2014 / June 16, 2014
38	PT BPD Jateng	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan Umum / Cooperation Agreement regarding Commercial Financing Guarantee (Kafalah)	46/Jamkrindo/VI/2014 4850//HT.01.04/SYAR/2014	16 Juni 2014 / June 16, 2014
39	PT BPD Jateng	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan Mikro / Cooperation Agreement on Microfinancing Guarantee (Kafalah)	47/Jamkrindo/VI/2014 4851//HT.01.04/SYAR/2014	16 Juni 2014 / June 16, 2014
40	PT BPD Jateng	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan Konsumtif / Cooperation Agreement on Consumptive Financing Gurantee (Kafalah)	48/Jamkrindo/VI/2014 4852//HT.01.04/SYAR/2014	16 Juni 2014 / June 16, 2014
41	PT BPD Jateng	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/ Jasa / Cooperation Agreement on Construction Financing and Goods/ Services Procurement Guarantee (Kafalah)	49/Jamkrindo/VI/2014 4853//HT.01.04/SYAR/2014	16 Juni 2014 / June 16, 2014
42	PT BPD Jateng	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan (Kafalah) Bank Garansi / Cooperation Agreement on Bank Guarantee	50/Jamkrindo/VI/2014 4854//HT.01.04/SYAR/2014	16 Juni 2014 / June 16, 2014

No	Nama Instansi Name of Institution	Bentuk Kerja Sama Cooperation	Nomor Number	Tanggal Date
43	PT Jamkrida Bali Mandara	Nota Kesepahaman Bersama / Memorandum of Understanding	51/Jamkrindo/VI/2014	24 Juni 2014 / June 24, 2014
44	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan Pembiayaan *Invoice* BBC Jakarta Fakhrudin / Cooperation Agreement regarding BBC Jakarta Invoice Financing Guarantee of Fakhrudin	52/Jamkrindo/VI/2014 CBB. BB1/PKS/SM.003/2014	25 Juni 2014 / June 25, 2014
45	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan Pembiayaan *Invoice* BBC Bekasi / Cooperation Agreement regarding BBC Bekasi Invoice Financing Guarantee	53/Jamkrindo/VI/2014 CBB. BB1/PKS/SM.004/2014	25 Juni 2014 / June 25, 2014
46	PT Asuransi Binagriya Upakara	Perjanjian Kerja Sama tentang Penempatan Asuransi Kebakaran Rumah Tinggal Bagi Nasabah Bank yang Dibiayai dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) / Cooperation Agreement on Placement of Fire Insurance for the Bank Customers Funded by Housing Finance Liquidity Facility (FLPP)	54/Jamkrindo/VI/2014 15/PKS/DIR-BINAGRIYA/062014	26 Juni 2014 / June 25, 2014
47	Kementerian Koperasi / The Ministry of Cooperatives	Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Dana Penjaminan / Cooperation Agreement regarding Guarantee Fund Management	05/PKS/Dep.6/VI/2014 55/ Jamkrindo/VI/2014	30 Juni 2014 / June 30, 2014
48	Kejaksaan Tinggi Aceh / Aceh High Prosecutor's Office	Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara / Joint Agreement on the Handling of Legal Issues of Civil and State Administration	57/Jamkrindo/VII/2014 B-05/N.1/Gs/07/2014	17 Juli 2014 / July 17, 2014
49	Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat / West Sumatera High Prosecutor's Office	Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara / Joint Agreement on the Handling of Legal Issues of Civil and State Administration	58/Jamkrindo/VII/2014 B-1500/N.3/Gs.1/07/2014	17 Juli 2014 / July 17, 2014
50	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau / Kepulauan High Prosecutor's Office	Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara / Joint Agreement on the Handling of Legal Issues of Civil and State Administration	59/Jamkrindo/VII/2014 B-529/N.10/G/GS/07/2014	17 Juli 2014 / July 17, 2014
51	Kejaksaan Tinggi Bengkulu / Bengkulu High Prosecutor's Office	Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara / Joint Agreement on the Handling of Legal Issues of Civil and State Administration	60/Jamkrindo/VII/2014 B-1406/N.7/Gs.1/07/2014	17 Juli 2014 / July 17, 2014

No	Nama Instansi Name of Institution	Bentuk Kerja Sama Cooperation	Nomor Number	Tanggal Date
52	Kejaksaan Tinggi Serang / Serang High Prosecutor's Office	Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara / Joint Agreement on the Handling of Legal Issues of Civil and State Administration	61/Jamkrindo/VII/2014	17 Juli 2014 / July 17, 2014
53	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara / Southeast Sulawesi High Prosecutor's Office	Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara / Joint Agreement on the Handling of Legal Issues of Civil and State Administration	62/Jamkrindo/VII/2014 B-1129/R.3/Gs/07/2014	17 Juli 2014 / July 17, 2014
54	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah / Central Sulawesi High Prosecutor's Office	Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara / Joint Agreement on the Handling of Legal Issues of Civil and State Administration	63/Jamkrindo/VII/2014 B-1018/R.2/Gs/07/2014	17 Juli 2014 / July 17, 2014
55	PT Propernas Griya Utama	Nota Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama Usaha untuk Optimalisasi Bisnis Para Pihak / Memorandum of Understanding on Business Partnership for Business Optimization of the Parties	64/Jamkrindo/VII/2014 Properanas/392/VII/2014	23 Juli 2014 / July 23, 2014
56	PT Hutama Karya (Persero)	Perjanjian Kerja Sama tentang Penerbitan *Surety Bond* Jamkrindo dan Penjaminan (Kontra) Garansi / Cooperation Agreement of Issuance of Jamkrindo Surety Bond and (Contra) Guarantee	65/Jamkrindo/VII/2014 1618/S.Perj/20-2014	22 Juli 2014 / July 22. 2014
57	PT BPD Kalsel	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan Bank Garansi / Cooperation Agreement on Guarantee for Bank Guarantee	66/Jamkrindo/VIII/2014 66/PKS/KRD/BKS/2014	04 Agustus 2014 / August, 4, 2014
58	Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO) Provinsi DKI Jakarta / The Union of National Indonesia Construction Companies of DKI Jakarta Province	Nota Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama Mitra Keagenan / Memorandum of Understanding on Agency Partner Cooperation	67/Jamkrindo/VIII/2014 012/EKS/DPD-GPS/DKI/VIII/2014	11 Agustus 2014 / August 11, 2014
59	PT BPD Riau Kepri	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan Kredit Mikro dan Kecil / Cooperation Agreement on Micro and Small Credit Guarantee	68/Jamkrindo/VIII/2014 113/PKS/2014	14 Agustus 2014 / August 14, 2014

No	Nama Instansi Name of Institution	Bentuk Kerja Sama Cooperation	Nomor Number	Tanggal Date
60	PT BPD Riau Kepri	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan Kredit Konsumer / Cooperation Agreement on Consumers' Credit Guarantee	69/Jamkrindo/VIII/2014 112/PKS/2014	14 Agustus 2014 / August 14, 2014
61	PT BPD NTB	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan Bank Garansi / Cooperation Agreement on Guarantee for Bank Guarantee	70/Jamkrindo/VIII/2014 PJ/01.17/60.27/0095/2014	14 Agustus 2014 / August 14, 2014
62	PT BPD BALI	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/ Jasa / Cooperation Agreement on Construction Financing and Goods/ Services Procurement Guarantee	72/Jamkrindo/VIII/2014 0673/SPK/DIR/KRD/2014	18 Agustus 2014 / August 18, 2014
63	PT BPD BALI	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan Kredit Umum / Cooperation Agreement on General Credit Guarantee	73/Jamkrindo/VIII/2014 0674/SPK/DIR/KRD/2014	18 Agustus 2014 / August 18, 2014
64	PT BPD BALI	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan Kredit Mikro dan Kecil / Cooperation Agreement on Micro and Small Credit Guarantee	74/Jamkrindo/VIII/2014 0675/SPK/DIR/KRD/2014	18 Agustus 2014 / August 18, 2014
65	Pusat Studi Sumber Daya Manusia	Layanan Jasa Sumber Daya Manusia / Human Resource Services	75/Jamkrindo/VIII/2014	18 Agustus 2014 / August 18, 2014
66	PT PEGADAIAN	Penjaminan (Kafalah) untuk Produk Pegadaian Arrhn untuk Usaha Mikro (ARRUM) dan Pegadaian Amanah / Guarantee (Kafalah) for Arrhn Mortgage Product for Micro Business (ARRUM) and Amanah Mortgage	216a-S/005401/20141 76/ Jamkrindo/VIII/2014	18 Agustus 2014 / August 18, 2014
67	PT Propernas	Perjanjian Kerja Sama tentang Penerbitan *Surety Bond* Jamkrindo dan Penjaminan (Kontra) Garansi / Cooperation Agreement of Jamkrindo Surety Bond Issuance and (Contra) Guarantee	79/Jamkrindo/IX/2014	1 September 2014 / September 1, 2014
68	PT BPD Kalsel	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan Kredit Umum (Komersial) / Cooperation Agreement on General Credit Guarantee (Commercial)	82/Jamkrindo/IX/2014 72/PKS/KRD/BPD/2014	2 September 2014 / September 2, 2014
69	PT BPD Kalsel	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan Kredit Mikro dan Kecil / Cooperation Agreement on Micro and Small Credit Guarantee	83/Jamkrindo/IX/2014 73/PKS/KRD/BPD/2014	2 September 2014 / September 2, 2014

No	Nama Instansi Name of Institution	Bentuk Kerja Sama Cooperation	Nomor Number	Tanggal Date
70	PT BPD Kalsel	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan Kredit Multiguna / Cooperation Agreement on Multipurpose Credit Guarantee	84/Jamkrindo/IX/2014 74/PKS/KRD/BPD/2014	2 September 2014 / September 2, 2014
71	PT BPD Kalsel	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/ Jasa / Cooperation Agreement on Construction Financing and Goods/ Services Procurement Guarantee	85/Jamkrindo/IX/2014 75/PKS/KRD/BPD/2014	2 September 2014 / September 2, 2014
72	PT Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN	Penjaminan (Kafalah) dan Pemasaran Produk Bersama / Joint Products Guarantee (Kafalah) and Marketing	87/Jamkrindo/IX/2014 014/PKS-ALAMIN/DIR/ IX/2014	3 September 2014 / September 3, 2014
73	Sekarya Jamkrindo	Perjanjian Kerja Sama dengan Serikat Karyawan Perum Jamkrindo / Cooperation Guarantee with Labor Union of Perum Jamkrindo	88/Jamkrindo/IX/2014 01/SKJ/PKB/IX/2014	3 September 2014 / September 3, 2014
74	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan Distribusi Semen / Cooperation Agreement on Cement Distribution Guarantee	91/Jamkrindo/IX/2014	3 September 2014 / September 3, 2014
75	PT BPD DKI	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan Kredit Modal Kerja Pengadaan Barang/Jasa / Cooperation Agreement on Working Capital Loan and Goods/Services Procurement Guarantee	93/Jamkrindo/IX/2014 46/ SP/DIR/IX/2009	5 September 2014 / September 5, 2014
76	PT Indofarma (Persero) Tbk	Nota Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama Usaha untuk Optimalisasi Bisnis dalam Rangka Sinergi antar BUMN/ Memorandum of Understanding on Business Cooperation for Business Optimization for the Synergy among SOEs	102/Jamkrindo/IX/2014 1476/DIR/IX/2014	17 September 2014 / September 17, 2014
77	PT Indofarma (Persero) Tbk	Perjanjian Kerja Sama tentang Penerbitan *Surety Bond* Jamkrindo / Cooperation Aggrement on the Issuance of Surety Bond Jamkrindo	103/Jamkrindo/IX/2014 1477/DIR/IX/2014	17 September 2014 / September 17, 2014
78	PT BPD Lampung	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan/Kontra Garansi Bank / Cooperation Agreement on the Guarantee/Counter Bank Guarantee	104/Jamkrindo/IX/2014 55/PKS/DIU/IX/2014	18 September 2014 / September 18, 2014
79	PT Nindya Karya (Persero)	Nota Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama Usaha untuk Optimalisasi Bisnis Para Pihak / Memorandum of Understanding on Business Cooperation for Business Optimization of Parties Business	106/Jamkrindo/IX/2014 55/PKS/DIU/IX/2014	22 September 2014 / September 22, 2014

No	Nama Instansi Name of Institution	Bentuk Kerja Sama Cooperation	Nomor Number	Tanggal Date
80	PT Nindya Karya (Persero)	Perjanjian Kerja Sama tentang Penerbitan *Surety Bond* Jamkrindo dan Penjaminan (Kontra) Garansi / Cooperation Agreement on the Issuance of Jamkrindo Surety Bond and Guarantee (Counter)	107/Jamkrindo/IX/2014 55/PKS/DIU/IX/2014	23 September 2014 / September 23, 2014
81	PT Sahid Inti Dinamika	Nota Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama Usaha untuk Optimalisasi Bisnis Para Pihak / Memorandum of Understanding on Business Cooperation for Business Optimization of Parties	108/Jamkrindo/IX/2014 016/SID/EBS/2014	26 September 2014 / September 26, 2014
82	PT Sahid Inti Dinamika	Perjanjian Kerja Sama tentang Penerbitan *Surety Bond* Jamkrindo dan Penjaminan (Kontra) Garansi / Cooperation Agreement on the Issuance of Jamkrindo Surety Bond and Guarantee (Counter)	109/Jamkrindo/IX/2014 017/SID/EBS/2014	26 September 2014 / September 26, 2014
83	PT BRI Agroniaga, Tbk	Nota Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama Penjaminan Kredit / Memorandum of Understanding on Loan Guarantee Cooperation	111/Jamkrindo/X/2014 BRI AGRO/SP-16/ BRK/10/24	8 Oktober 2014 / October 8, 2014
84	PT BRI Agroniaga, Tbk	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa / Cooperation Agreement on Construction Loan Guarantee and Procurement of Goods/Services	112/Jamkrindo/X/2014 BRI AGRO/SP-17/ BRK/10/24	8 Oktober 2014 / October 8, 2014
85	PT BRI Agroniaga, Tbk	Perjanjian Kerja Sama tentang Penjaminan Bank Garansi / Cooperation Agreement on Bank Guarantee	113/Jamkrindo/X/2014 BRI AGRO/SP-18/ BRK/10/2014	9 Oktober 2014 / October 9, 2014
86	Universitas Negeri Jakarta	Program Penguatan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa Universitas Negeri Jakrta dalam Rangka Mendukung Peran BUMN untuk Meningkatkan Inovasi dan Daya Saing Bangsa / Strengthening Program for Research, Scientific Publication and Community Service for Lecturers and Students of State University of Jakarta in order to Support the Role of SOEs to Improve the Nation's Innovation and Competitiveness	114/Jamkrindo/X/2014 45/UN39/DN/2014	9 Oktober 2014 / October 9, 2014

No	Nama Instansi Name of Institution	Bentuk Kerja Sama Cooperation	Nomor Number	Tanggal Date
87	PT BRI (Persero)	Penjaminan Kredit Usaha Rakyat kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi / Business Loan Guarantee for Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives	B.824-DIR/PRG/10/2014 115/Jamkrindo/X/2014	9 Oktober 2014 / October 9, 2014
88	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Jasa Manajemen / Management Service	116/Jamkrindo/X/2014 001/KSM/KP/X/2014	9 Oktober 2014 / October 9, 2014
89	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	Penyaluran Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan / Distribution of Partnership and Community Development Program Funds	118/Jamkrindo/X/2014 20/MOU/KBI/X/2014	16 Oktober 2014 / October 16, 2014
90	PT CIMB Niaga Tbk	Penjaminan Kredit Multiguna / Multipurpose Loan Guarantee	119/Jamkrindo/X/2014 6/PER/IB-CB/KP/X/2014	16 Oktober 2014 / October 16, 2014
91	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Penjaminan Bank Garansi / Bank Guarantee	120/Jamkrindo/X/2014 176/DIR/P/2014	21 Oktober 2014 / October 21, 2014
92	PT Paragon Reinsurance Brokers	Jasa Konsultasi dan Keperantaraan Pertanggungan Ulang (Reasuransi) untuk Produk Penjaminan/Kafalah Perum Jamkrindo / Consulting Service and Reassurance for Guarantee Products/Kafalah of Perum Jamkrindo	125/Jamkrindo/X/2014 052PKS/PRG/X/2014	30 Oktober 2014 / October 30, 2014
93	PT Igna Asia Reinsurance Brokers	Jasa Konsultasi dan Keperantaraan Pertanggungan Ulang (Reasuransi) untuk Produk Penjaminan/Kafalah Perum Jamkrindo / Consulting Service and Reassurance for Guarantee Products/Kafalah of Perum Jamkrindo	126/Jamkrindo/X/2014 005/PKS/JK/10.2014	30 Oktober 2014 / October 30, 2014
94	PT Best One Asia Reinsurance Brokers	Jasa Konsultasi dan Keperantaraan Pertanggungan Ulang (Reasuransi) untuk Produk Penjaminan/Kafalah Perum Jamkrindo / Consulting Service and Reassurance for Guarantee Products/Kafalah of Perum Jamkrindo	127/Jamkrindo/X/2014 098/DIR-PKS/ BOARE/X/2014	30 Oktober 2014 / October 30, 2014
95	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Pengelolaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan / Fund Management of Partnership and Community Development Program	No.0690/MoU/PNM/XI/14 128/Jamkrindo/XI/2014	19 November 2014 / November 16, 2014

No	Nama Instansi Name of Institution	Bentuk Kerja Sama Cooperation	Nomor Number	Tanggal Date
96	PT BRI (Persero)	Jasa Kustodian / Custodian Service	129/Jamkrindo/XI/2014 B.1955-DIR/TRY/11/2014	21 November 2014 / November 21, 2014
97	Kejaksaan Tinggi Gorontalo / Gorontalo High Prosecutor's Office	Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara / Handling of Legal Issues of Civil and State Administration	136/Jamkrindo/XII/2014 B-1413/R.5.1/GS/12/2014	2 Desember 2014 / December 2, 2014
98	Kejaksaan Maluku Utara / North Maluku Prosecutor's Office	Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara / Handling of Legal Issues of Civil and State Administration	137/Jamkrindo/XII/2014 B-1804/S.2/GS/12/2014	2 Desember 2014 / December 2, 2014
99	Kejaksaan Bangka Belitung / Bangka Belitung Prosecutor's Office	Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara / Handling of Legal Issues of Civil and State Administration	138/Jamkrindo/XII/2014 B-06/N.9/Gs.1/12/2014	2 Desember 2014 / December 2, 2014
100	Kejaksaan Kalimatan Timur / East Kalimantan Prosecutor's Office	Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara / Handling of Legal Issues of Civil and State Administration	139/Jamkrindo/XII/2014 B-177/Q.4/GS/12/2014	2 Desember 2014 / December 2, 2014
101	Kejaksaan Sulawesi Selatan / South Sulawesi Prosecutor's Office	Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara / Handling of Legal Issues of Civil and State Administration	141/Jamkrindo/XII/2014 B-2681/R.4/GS/12/2014	2 Desember 2014 / December 2, 2014
102	Kejaksaan Maluku Utara / North Maluku Prosecutor's Office	Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara / Handling of Legal Issues of Civil and State Administration	142/Jamkrindo/XII/2014 B-1961/S.1/Gs.1/12/2014	2 Desember 2014 / December 2, 2014
103	PT BRI (Persero)	Penjaminan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) / Energy and Food Security Loan Guarantee	B.966-DIR/PRG/12/2014 144/Jamkrindo/XII/2014	4 Desember 2014 / December 4, 2014
104	PT BPD Sulawesi Utara	Penjaminan Kredit Usaha Mikro Sejahtera / Micro Business Loan Guarantee	145/Jamkrindo/XII/2014 152/PKS/KRD-PRD/DIR/XII/2014	4 Desember 2014 / December 4, 2014
105	PT BPD Sulawesi Utara	Penjaminan Kredit Modal Kerja Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa / Construction Working Capital and Procurement of Goods/Services Loan Guarantee	146/Jamkrindo/XII/2014 153/PKS/KRD-PRD/DIR/XII/2014	4 Desember 2014 / December 4, 2014
106	PT BPD Sulawesi Utara	Penjaminan Bank Garansi / Bank Guarantee	147/Jamkrindo/XII/2014 154/PKS/KRD-PRD/DIR/XII/2014	4 Desember 2014 / December 4, 2014
107	PT Jamkrida Kalimantan Selatan	Penjaminan Bersama / Co-Guarantee	148/Jamkrindo/XII/2014 06/JAMKRIDA/XII/2014	9 Desember 2014 / December 9, 2014

No	Nama Instansi Name of Institution	Bentuk Kerja Sama Cooperation	Nomor Number	Tanggal Date
108	PT BRI (Persero)	Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) / Indonesian Workers Business Loan Guarantee	B.976-DIR/PRG/12/2014 149/Jamkrindo/XII/2014	11 Desember 2014 / December 11, 2014
109	PT Semen Bosowa Indonesia	Penjaminan Distribusi Semen / Cement Distribution Guarantee	150/Jamkrindo/XII/2014 070/PKS/JKI-SBI/XII/2014	19 Desember 2014 / December 19, 2014
110	PT BRI (Persero)	Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan / Utilization of Banking Service	151/Jamkrindo/XII/2014 B.992-DIR/HBL.2/12/2014	22 Desember 2014 / December 22, 2014
111	Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)	Nota Kesepahaman Bersama / Memorandum of Understanding	152/Jamkrindo/XII/2014 021/MOU/LPDB/2014	22 Desember 2014 / December 22, 2014
112	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Penjaminan Kredit Usaha Mikro / Micro Business Loan Guarantee	155/Jamkrindo/XII/2014 DIR.PKS/114/2014	24 Desember 2014 / December 24, 2014
113	PT Bank Bukopin Tbk	Penjaminan Bank Garansi / Bank Guarantee	PKS.2206/DIR-DPPK/XII/2014 156/Jamkrindo/XII/2014	24 Desember 2014 / December 24, 2014
114	Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) DKI Jakarta	Penerbitan *Custom Bond* / Issuance of Custom Bond	173/DPW.ALFI/DKI-JAYA/XII/14 157/Jamkrindo/XII/2014	29 Desember 2014 / December 24, 2014

Ikhtisar Data Keuangan
Financial Highlights

(Disajikan dalam Rupiah) / (Expressed in Rupiah)

ASET / ASSETS	2014	2013	2012
Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalent	5.196.592.537.763	4.711.774.750.747	4.279.058.647.035
Investasi Deposito dan Efek / Deposit and Securities Investment	2.700.063.608.834	1.454.002.402.330	1.013.771.189.425
Piutang IJP / IJP Receivable	1.075.355.409.006	1.206.227.439.791	309.836.402.176
Piutang Penjaminan Ulang / Co-Guarantee Receivable	69.936.879.275	120.583.795.519	25.408.715.226
Piutang yang diberikan / Loans	973.438.042	1.297.400.099	1.672.066.476
Piutang lain-lain / Other Receivables	132.731.655.583	27.596.443.977	13.508.306.435
Beban Dibayar Dimuka / Prepaid Expenses	598.764.321.798	553.068.468.726	533.717.383.806
Properti Investasi / Investment Property	14.590.120.099	14.981.219.414	15.327.182.736
Aset Tetap / Fixed Assets	54.425.199.204	37.840.551.952	36.141.076.104
Aset Pajak Tangguhan / Deferred tax Assets	119.400.366.323	141.500.601.350	128.426.955.968
Aset Lain-lain / Other Assets	57.811.014.608	24.508.628.027	304.209.015.035
JUMLAH ASET / TOTAL ASSETS	**10.020.644.550.535**	**8.293.381.701.932**	**6.661.076.940.422**

LIABILITAS / LIABILITIES	2014	2013	2012
Hutang Klaim / Claim Payable	10.197.458.677	45.180.582.714	22.056.514.565
Cadangan Klaim / Claim Reserve	396.378.923.053	452.121.969.352	395.874.829.797
Hutang Penjaminan Ulang / Re-Guarantee Payable	35.821.598.160	41.712.936.083	2.607.675.669
Pendapat ditangguhkan / Deferred Revenue	1.019.707.762.478	1.103.427.896.654	1.120.831.984.142
Hutang Pajak / Tax Payable	3.524.726.162	24.242.476.126	32.008.718.569
Hutang Lain-Lain / Other Liabilities	137.762.152.984	76.557.601.893	38.066.682.982
JUMLAH LIABILITAS / TOTAL LIABILITIES	**1.603.392.621.514**	**1.743.243.462.822**	**1.611.446.405.724**

EKUITAS / EQUITY	2014	2013	2012
Penyertaan Modal Pemerintah / Government's Share Placement	6.638.733.365.160	5.338.733.365.160	4.218.733.365.160
Cadangan-Cadangan / Appropriate Retained Earnings	1.125.586.279.252	757.940.218.914	313.055.484.298
Komponen Ekuitas Lainnya / Other Equity Components	(11.219.183.476)	(71.744.405.302)	8.324.950.625
Hak Non Pengendali / Non Controlling Rights	12.512.606	-	-
Saldo Laba / Retained Earnings	664.138.955.479	525.209.060.338	509.516.734.615
JUMLAH EKUITAS / TOTAL EQUITY	**8.417.251.929.021**	**6.550.138.239.110**	**5.049.630.534.698**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	**10.020.644.550.535**	**8.293.381.701.932**	**6.661.076.940.422**

LAPORAN LABA/RUGI KOMPREHENSIF
COMPREHENSIVE INCOME STATEMENT

(Disajikan dalam Rupiah) / (Expressed in Rupiah)

URAIAN DESCRIPTION	2014	2013	2012
PENDAPATAN PENJAMINAN / GUARANTEE REVENUES			
Imbal Jasa Penjaminan Bruto / Gross Guarantee Fee	1.686.271.021.628	1.600.961.372.287	1.399.062.673.556
Pendapatan Komisi Reasuransi / Re Insurance Comission Fee	5.509.491.735	844.526.272	-
Premi Co Guarantee / Co Guarantee Premium	(220.685.464.885)	(253.402.175.909)	(230.775.492.171)
Premi Reasuransi / Re Insurance Premium	(24.181.507.239)	(4.204.367.559)	-
Restitusi IJP / Guarantee Restitution	(4.343.792.787)	(4.560.059.814)	-
Imbal Jasa Penjaminan Bersih / Net Guarantee Revenues	**1.442.569.748.452**	**1.339.639.295.277**	**1.168.287.181.385**
BEBAN KLAIM / CLAIM EXPENSES			
Beban Klaim / Claim Expenses	1.071.911.769.047	898.582.003.777	618.015.662.668
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim / Increase (Decrease) in Reserve Claim	(50.854.144.341)	39.541.500.471	89.820.948.419
Kerugian Penurunan Nilai Piutang Co Guarantee / Impairment Losses on Co Guarantee Receivable	-	8.563.736.757	62.405.502.284
Provisi Kerugian Klaim Co Guarantee / Provision for Claim Losses Co Guarantee	-	16.705.639.084	-
Jumlah Beban Klaim / Total Claim Expenses	**1.021.057.624.706**	**963.392.880.089**	**770.242.113.371**
Penjaminan Bersih / Net Guarantee Income	**421.512.123.746**	**376.246.415.188**	**398.045.068.014**
Pendapatan Investasi Bersih / Investment Income - Net	531.363.555.447	347.674.270.928	205.802.142.173
Pendapatan Lain-Lain Bersih / Others Income - Net	222.491.534.555	162.646.571.794	110.504.205.512
BEBAN USAHA / OPERATING EXPENSES			
Beban Operasional / Operating Expenses	70.562.048.384	44.912.056.035	26.996.066.332
Beban Sumber Daya Manusia / Human Resources Expenses	168.091.609.431	115.761.687.179	88.588.657.630
Beban Administrasi dan Umum / General and Administrative Expenses	70.196.530.879	64.212.211.219	36.288.146.414
Beban Sistem, Teknologi, & Pengembangan Usaha / Technology, System, & Development Expense	19.573.686.082	4.714.770.785	204.950.000
Jumlah Beban Usaha / Total Operating Expenses	**328.423.874.776**	**229.600.725.218**	**152.077.820.376**
Laba Sebelum Pajak / Income Before Tax	**846.943.338.972**	**656.966.532.692**	**562.273.595.323**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN / INCOME TAX EXPENSES			
Beban Pajak Kini / Current Income Tax	160.695.448.207	144.831.117.735	89.980.684.750
Manfaat Pajak Tangguhan / Deferred Tax Benefit	22.108.922.679	(13.073.645.381)	(37.223.824.042)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan / Total Tax Expenses	**182.804.370.886**	**131.757.472.354**	**52.756.860.708**
Laba Tahun Berjalan / Profit for the Year	**664.138.968.086**	**525.209.060.338**	**509.516.734.615**

URAIAN DESCRIPTION	2014	2013	2012
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA: / OTHER COMPREHENSIVE INCOME :			
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual / Available for Sale Financial Assets	**60.525.221.825**	**(80.069.355.927)**	**8.152.526.472**
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Income for the Year	**724.664.189.911**	**445.139.704.411**	**517.669.261.087**

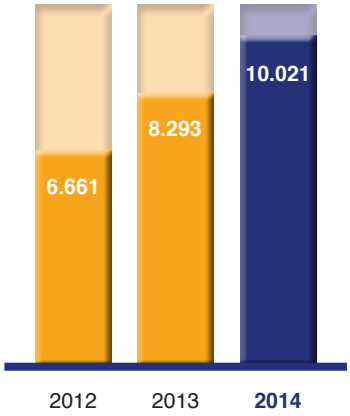
RASIO KEUANGAN
FINANCIAL RATIO

URAIAN DESCRIPTION	2014	2013	2012
LIKUIDITAS / LIQUIDITY			
Current ratio / Current ratio	1399,23%	1010,06%	956,94%
SOLVABILITAS / SOLVABILITY			
Hutang Terhadap Ekuitas / Debt to equity	19,05%	26,61%	31,91%
RENTABILITAS / RENTABILITY			
Margin Laba Kotor / Gross profit margin	31,63%	26,78%	32,94%
Margin Laba Penjualan / Profit margin on sales	42,91%	36,84%	40,99%
Return on assets / Return on Assets	9,25%	7,97%	9,70%
Return on equity / Return on equity	7,89%	8,02%	10,09%
AKTIVITAS / ACTIVITIES			
Perputaran aset / Assets Turnover	21,56 kali / times	21,64 kali / times	23,67 kali / times
Jumlah investasi pada entitas asosiasi / Total investments in associate entities	**531.363.555.447**	**347.674.270.928**	**205.802.142.173**

Grafik Ikhtisar Data Keuangan
Charts of Financial Highlights

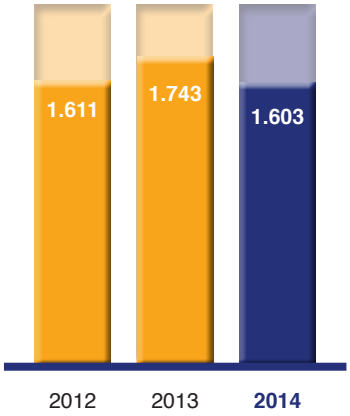
JUMLAH ASET /
TOTAL ASSETS
Dalam miliar Rupiah / In billion Rupiah

▲ 20,83%



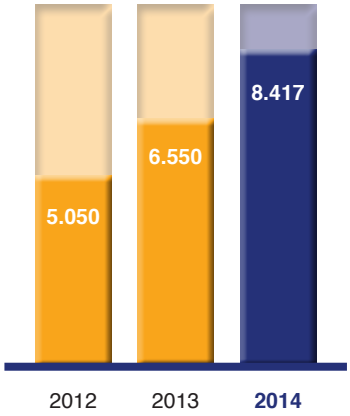
JUMLAH LIABILITAS /
TOTAL LIABILITIES
Dalam miliar Rupiah / In billion Rupiah

▲ (8,02%)



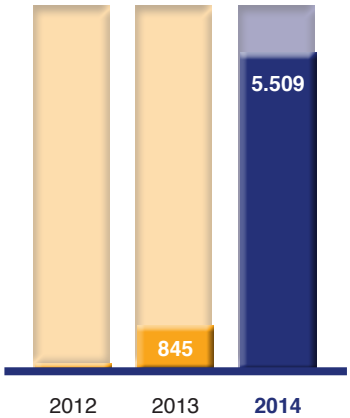
JUMLAH EKUITAS /
TOTAL EQUITY
Dalam miliar Rupiah / In billion Rupiah

▲ 28,50%

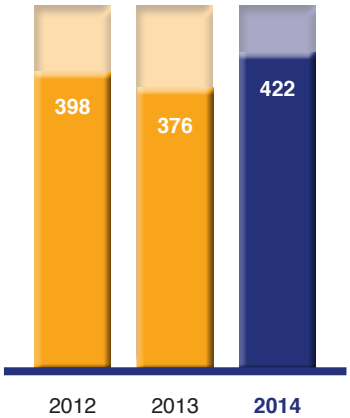


Grafik Ikhtisar Kinerja Operasional
Charts of Operational Performance Highlights

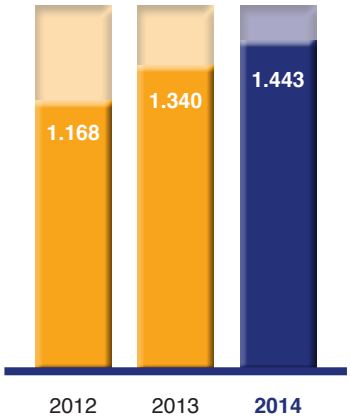
Pendapatan Komisi Reasuransi /
Reinsurance Comission Fee
Dalam juta Rupiah / In million Rupiah



Penjaminan Bersih /
Net Guarantee Income
Dalam miliart Rupiah / In billion Rupiah



Imbal Jasa Penjaminan Bersih /
Net Guarantee Revenues
Dalam miliar Rupiah / In billion Rupiah



Key Performance Indicators

NO	PERSPEKTIF / INDIKATOR / SUB INDIKATOR PERSPECTIVE/INDICATOR/ SUB INDICATOR	SATUAN UNIT	FORMULA	RKAP 2014		s/d DESEMBER 2014 AS OFDECEMBER 31, 2014	
				BOBOT POINT	TARGET TARGET	REALISASI REALIZATION	NILAI VALUE
I	**PERSPEKTIF KEUANGAN / FINANCIAL PERSPECTIVE**			**22**			**25**
1	Laba Sebelum Pajak / Income Before Tax	Rp	Tercapai Sesuai RKAP / Achieved based on RKAP	4,84	Rp705,68 miliar / billion	Rp846,94 miliar / billion	5,81
2	Return on Asset	%	Laba Sebelum Pajak / Income Before Tax ÷ Rata - Rata Total Aset / Average of Total Assets	4,40	7,60%	9,96%	5,77
3	Return on Equity	%	Laba Setelah Pajak / Income After Tax ÷ Rata - Rata Total Ekuitas / Average of Total Equities	4,40	8,82%	9,72%	4,85
4	Pertumbuhan Pendapatan Usaha (IJP + Investasi) / Operation Income Growth (IJP + Investment)	%	Pendapatan Usaha (n) - Pendapatan Usaha (n - 1) / Operation Income (n) - Operation Income (n-1) ÷ Pendapatan Usaha (n - 1) / Operation Income (n-1)	4,40	25,72%	26,84%	4,59
5	Yield on Investment	%	Hasil Investasi / Investment Result ÷ Rata - Rata Total Investasi / Average of Total Investments	3,96	7,64%	7,80%	4,05
II	**PERSPEKTIF FOKUS PELANGGAN DAN PASAR / COSTUMERS' FOCUS PERSPECTIVE**			**22**			**46**
1	Pertumbuhan Pasar / Market Growth	%	Volume Penjaminan (n) - Volume Penjaminan (n - 1) / Guarantee Volume (n) - Guarantee Volume (n-1) ÷ Volume Penjaminan (n - 1) / Guarantee Volume (n-1)	7,15	32,44%	-6,09%	0,00
2	Perolehan Pelanggan Baru / New Customer Result	PKS	Σ Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani Dengan Penerima Jaminan / Σ Agreement Signed by Guarantee Receiver	7,15	15	40	19,07
3	Penambahan Kantor Pelayanan / Branch Office Addition	Unit	Σ Penambahan Kantor Pelayanan / Σ Branch Office Addition	7,70	10	35	26,95
III	**PERSPEKTIF EFEKTIVITAS PRODUK DAN PROSES / PERSPECTIVE OF PRODUCT AND PROCESS EFFECTIVENESS**			**20**			**29**
1	Pertambahan Jumlah Produk Baru / New Product Total Addition	Unit	Σ Pertambahan Jumlah Produk Baru / Σ New Product Total Addition	6,50	2	5	16,25
2	Pertambahan Jumlah Bank Online / Bank Online Total Additon	Unit	Σ Pertambahan Jumlah Bank Online / Σ Bank Online Total Additon	7,00	5	2	2,80
3	Produktifitas Pegawai / Employees' Productivity	Rp/ Orang / Rp/ Person	Laba Usaha / Business Income ÷ Jumlah SDM / Total HR	6,50	Rp842,68 juta / million	Rp1.245,93 juta / million	9,61

NO	PERSPEKTIF / INDIKATOR / SUB INDIKATOR PERSPECTIVE/INDICATOR/ SUB INDICATOR	SATUAN UNIT	FORMULA	RKAP 2014		s/d DESEMBER 2014 AS OFDECEMBER 31, 2014	
				BOBOT POINT	TARGET TARGET	REALISASI REALIZATION	NILAI VALUE
IV	**PERSPEKTIF FOKUS TENAGA KERJA / EMPLOYEES PERSPECTIVES**			**18**			**60**
1	Jumlah Orang yang Disertakan Mengikuti Diklat / Total Registered Training Participants	Orang / Person	Σ Realisasi Orang yang Mengikuti Diklat / Σ Realization of Participants Σ Target Orang yang Direncanakan Mengikuti Diklat / Σ Target of Participants in Plan	6,30	400	1,786	28,13
2	Jumlah Diklat Keprofesian / Total Profession Training	Diklat / Training	Σ Realisasi Jenis Diklat Keprofesian / Σ Realization of Profession Training type Σ Rencana Jenis Diklat Keprofesian / Σ Target of Participants in Plan	6,30	30	112	23,52
3	Penugasan Belajar (S2) Dalam Negeri atau Luar Negeri / Study Assignment (S2) Domestic and Overseas	Orang / Person	Σ Realisasi Orang yang Dikirim / Σ Realization of Participants Σ Target Orang yang Direncanakan Dikirim / Σ Target of Participants in Plan	5,40	8	12	8,10
V	**PERSPEKTIF KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA, DAN TANGGUNG JAWAB KEMASYARAKATAN / PERSPECTIVE OF LEADERSHIP, CORPORATE GOVERNANCE AND SOCIAL RESPONSIBILITY**			**14**			**16**
1	Tingkat Pengendalian Risiko / Risk Control Level	%	Σ Penyelesaian Opini Risiko / Σ Risk opinion Settlement Σ Permintaan Opini Risiko / Σ Risk Opinion Request	4,50	81,00%	100,00%	5,56
2	Penerapan GCG / GCG implementation	Skor / Score	Sesuai Target Skor / Based on Score Target	2,50	77,00	91,51%	2,97
3	Pemenuhan Portal BUMN / BUMN gate Fulfillment	%	Terpenuhi / Fulfilled	4,50	100,00%	100,00%	4,50
4	Score KPKU / KPKU Score	Skor / Score	Early Improvement (Rentang Skor : 376 - 475) / Early Improvement (Score Difference : 376-475)	2,50	380	380	2,50
VI	**PERSPEKTIF PERENCANAAN STRATEGIS / STRATEGIC PLAN PERSPECTIVES**			**4**			**3**
1	Perbaikan dan Penyempurnaan Sisdur (SOP) / SOP Enhancement	Unit	Σ Perbaikan dan Penyempurnaan Sisdur (SOP) / SOP Enhancement	2,00	5	2	0,80
2	RJPP / Long Term Corporate Plan (RJPP)	%	Evaluasi RJPP / RJPP Evaluation	2,00	100,00%	100,00%	2,00
	TOTAL BOBOT / TOTAL WEIGHT			**100**			**178**

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) PERUM JAMKRINDO
TAHUN 2014 /
KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) OF PERUM JAMKRINDO IN 2014

NO	**INDIKATOR /** INDICATOR	**BOBOT /** POINT
1	PERSPEKTIF KEUANGAN / FINANCIAL PERSPECTIVE	22
2	PERSPEKTIF FOKUS PELANGGAN DAN PASAR / COSTUMERS' FOCUS PERSPECTIVE	22
3	PERSPEKTIF EFEKTIVITAS PRODUK DAN PROSES / PERSPECTIVE OF PRODUCT AND PROCESS EFFECTIVENESS	20
4	PERSPEKTIF FOKUS TENAGA KERJA / EMPLOYEES PERSPECTIVES	18
5	PERSPEKTIF KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA, DAN TANGGUNG JAWAB KEMASYARAKATAN / PERSPECTIVE OF LEADERSHIP, CORPORATE GOVERNANCE AND SOCIAL RESPONSIBILITY	14
6	PERSPEKTIF PERENCANAAN STRATEGIS / STRATEGIC PLAN PERSPECTIVES	4
	JUMLAH / TOTAL	100

Penilaian GCG 2014

2014 GCG Assessment

	Aspek / Aspect	Bobot / Point	2014		2013	
			Nilai / Score	Pencapaian / Achievement (%)	Nilai / Score	Pencapaian / Achievement (%)
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan / Commitment on sustainable implementation of Good Corporate Governance	7,00	6,95	99,35	6,361	90,862
II	Pemegang Saham dan RPB/Pemilik Modal / Shareholders and GMS/ Investor	9,00	8,12	90,19	8,463	94,039
III	Dewan Pengawas / Board of Supervisors	35,00	31,59	90,26	31,308	89,453
IV	Direksi / Board of Directors	35,00	32,93	94,09	32,312	92,319
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi / Information and Transparency Disclosure	9,00	7,91	87,90	7,890	87,663
VI	Aspek Lainnya / Other Aspects	5,00	4,00	80,00	3,750	75,000
SKOR KESELURUHAN / TOTAL SCORE		**100,00**	**91,51**	**91,51**	**90,084**	**90,084**
KLASIFIKASI PERINGKAT KUALITAS PENERAPAN GCG / CLASSIFICATION OF GCG IMPLEMENTATION QUALITY RANK			**SANGAT BAIK / EXCELLENT**		**SANGAT BAIK / EXCELLENT**	

Tingkat / Grade	Capaian / Achievement	Peringkat / Rate
1	Nilai di atas 85 / Value above 85	Sangat Baik / Excellent
2	75 < Nilai ≤ 85 / 75 < Value ≤ 85	Baik / Good
3	60 < Nilai ≤ 75 / 60 < Value ≤ 75	Cukup Baik / Fair
4	50 < Nilai ≤ 60 / 50 < Value ≤ 60	Kurang Baik / Poor
5	Nilai ≤ 50 / Value ≤ 50	Tidak Baik / Very Poor

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications





No	Penghargaan dan Sertifikasi / Awards and Certifications	Tanggal Diberikan / Issued Date	Badan yang Memberikan / Certification Agency
1.	INFOBANK BUMN AWARD 2014	30 Oktober 2014 / October 30, 2014	INFOBANK
2.	BUMN WEB AWARD 2014 (NOMINATOR)	15 Oktober 2014 / October 15, 2014	BERITA SATU.COM


Usaha
dengan



LAPORAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

BOARD OF SUPERVISORS AND BOARD OF DIRECTORS REPORT

Laporan Dewan Pengawas
Board of Supervisors Report

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Dear Stakeholders,

Berkat rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pengawas dapat melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan selama tahun 2014 dengan baik sebagaimana yang diamanahkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) serta pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas. Bersama ini kami laporkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pemberian saran atau rekomendasi terhadap pengelolaan Perusahaan Umum Penjaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) selama tahun 2014.

Secara keseluruhan, Rapat Pembahasan Bersama (RPB) merupakan pihak yang melakukan penilaian atas kinerja Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam tahun yang bersangkutan. Berdasarkan hasil *self assessment* evaluasi capaian *Key Perfomance Indicator* (KPI) Dewan Pengawas tahun 2014, skor yang dicapai sebesar 31,59 dari bobot 35,00 atau setara persentase pencapaian sebesar 90,26% dari 12 indikator penilaian. Kinerja positif ini tercapai berkat kerja sama yang baik antara Dewan Pengawas dengan Direksi beserta jajaran manajemen dan staf Perusahaan.

Praise to God Almighty for His blessings and divine guidance, the Board of Supervisors has been able to fulfill their supervisory duties and functions during 2014 as mandated in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and in the guidelines and work rules of the Board of Supervisors. In this opportunity, we would like to deliver our report on the performance of supervisory duties and contribution of suggestions or recommendations towards the management of Perum Jamkrindo throughout 2014.

Overall, the Joint Discussion Meeting (RPB) is the one who evaluates the performance of the Company's Board of Supervisors and Board of Directors in relation with the fulfillment of duties and responsibilities in the concerned year. Based on the self-assessment results of the Key Performance Indicator (KPI) achievements of the Board of Supervisors in 2014, the score was 31.59 from 35.00 or equivalent to 90.26% from 12 assessment indicators. This positive performance was due to good cooperation between the Board of Supervisors and the Board of Directors as well as the Company's management and staff.



Dewan Pengawas berpandangan bahwa Direksi telah melakukan pengelolaan Perusahaan dengan baik pada tahun 2014.

The Board of Supervisors believes that the Board of Directors performed excellent company management in 2014.

Braman Setyo

Ketua Dewan Pengawas
Chairman of Board Supervisors

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Dinilai dari target yang dicanangkan dalam RKAP 2014, Dewan Pengawas menilai kinerja Direksi telah sesuai dengan apa yang telah di tetapkan. Kinerja individual Direksi sesuai direktoratnya masing-masing berdasarkan hasil *self assessment* memperoleh skor sebesar 32,93 dari bobot 35,00 atau setara persentase pencapaian sebesar 94,09% dari 13 indikator penilaian. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Dewan Pengawas berpandangan bahwa Direksi telah melakukan pengelolaan Perusahaan dengan baik pada tahun 2014.

Seperti yang kita ketahui bersama, Perum Jamkrindo merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) satu-satunya yang diamanahkan untuk memberikan penjaminan kredit terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Kegiatan penjaminan dilakukan melalui lembaga perbankan dan lembaga non bank. Pada 2014, mayoritas penjaminan kredit dilakukan melalui perbankan karena sebagian besar mitra Perusahaan adalah bank BUMN, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan bank swasta. Untuk ke depannya, Dewan Pengawas mendorong upaya yang dilakukan Direksi untuk meningkatkan kegiatan usaha penjaminan non bank. Saat ini, peningkatan jumlah kerja sama dengan lembaga non bank sedang dilakukan.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI

Seiring dengan rencana Perusahaan untuk mengembangkan diri agar dapat merangkul lebih banyak pelaku UMKMK di Indonesia, pengembangan sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun kualitas serta penerapan teknologi informasi (TI) yang tepat guna akan terus dilakukan.

Sebagai upaya untuk mendorong pengembangan di bidang SDM dan TI, Dewan Pengawas secara rutin mengikuti rapat gabungan dengan Direksi setiap satu bulan sekali dan memberikan rekomendasi secara tertulis. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas

ASSESSMENT ON COMPANY PERFORMANCE

By referring to the the target set in RKAP 2014, the Board of Supervisors assessed that the performance of the Board of Directors has been in accordance with what has been set. Based on the self-assessment result, individual performance of the Board of Directors in their respective directorate obtained the score of 32.93 from 35.00 or equivalent to 94.09% from 13 assessment indicators. Based on the assessment results, the Board of Supervisors believes that the Board of Directors performed excellent company management in 2014.

As it has been known, Perum Jamkrindo is the only State Owned Enterprise (SOE) mandated to provide credit guarantee to the businesspeople of Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK). Guarantee activities are conducted through banking and non banking institutions. In 2014, the majority of credit guarantee are conducted through banking institutions, provided that most of the Company's partners are State-Owned Banks, Regional Development Bank (BPD), and private banks. In the long run, the Board of Supervisors will support the effort of the Board of Directors to enhance non bank guarantee business activity. Currently, the amount of cooperation with non bank institutions is being enhanced.

VIEW ON BUSINESS PROSPECTS PREPARED BY THE BOARD OF DIRECTORS

Along with the Company's plan to develop so that it can reach more businesspeople of MSMEs & Cooperative in Indonesia, the development of human resources, (HR) both in terms of quality and quantity, and the implementation of a proper information technology (IT), will be carried out continuously.

As an effort to boost the development of HR and IT, the Board of Supervisors regularly attend joint meeting with the Board of Directors every once a month and give written recommendation. These steps were intended to increase the effectivity of supervision of the Board of Supervisors

pengawasan Dewan Pengawas sekaligus mempercepat realisasi dan tindak lanjut terhadap saran, masukan dan rekomendasi Dewan Pengawas terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN PENGAWAS

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Pengawas dibantu oleh Komite Audit serta Komite Investasi dan Risiko Usaha untuk memberikan pendapat dan pandangan terhadap pengelolaan Perusahaan yang dijalankan Direksi.

Pada 2014, Komite Audit telah merealisasikan seluruh program kerja yang telah disusun. Program-program yang telah dijalankan tersebut telah membantu tercapainya tugas dan fungsi Dewan Pengawas untuk melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian internal perusahaan, Satuan Pengawasan Internal (SPI), dan auditor eksternal.

Sementara itu, Komite Investasi dan Risiko Usaha juga telah menjalankan program kerja dengan baik dalam rangka melakukan pengawasan atas investasi, pemantauan terhadap penanganan beberapa risiko usaha, dan *monitoring* tindak lanjut saran/nasihat Dewan Pengawas. Komite Investasi dan Risiko Usaha melaksanakan rapat setiap bulan dengan Dewan Pengawas untuk membahas kinerja usaha Perusahaan dan memberikan saran kepada Direksi. Di samping itu, Komite Investasi dan Risiko Usaha juga melakukan rapat pada setiap bulannya baik secara internal, dengan Komite Audit, maupun dengan Kepala Divisi/staf terkait dengan tugas Komite Investasi dan Risiko Usaha dan tugas-tugas lain dari Dewan Pengawas.

PERUBAHAAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS

Pada 2014, terjadi perubahan komposisi Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-199/MBU/10/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan

as well as to speed up the realization and follow up on suggestions, feedback and reccommendation of the Board of Supervisors towards various problems faced by the Company.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF SUPERVISORS

In performing their duties and functions, the Board of Supervisors is assisted by the Audit Committee and Investment and Business Risk Committee to give opinions and views on the Company's management conducted by the Board of Directors.

In 2014, the Audit Committee has implemented the entire work program which had been prepared previously. The programs have helped the Board of Supervisors fulfill their duties and functions to evaluate the company's internal control system, Internal Audit Unit (SPI), and external auditor.

Meanwhile, the Investment and Business Risk Committee has also succeeded in carrying out the work program in order to perform supervision on investment, monitor the management of some business risks, and monitor the follow up/advice of the Board of Supervisors. The Investment and Business Risk Committee holds monthly meeting with the Board of Supervisors to discuss the Company's business performance and to give suggestions to the Board of Directors. Moreover, the Investment and Business Risk Committee also holds monthly internal meeting, meeting with Audit Committee or with Head of Division/staff concerning the duties of Investment and Business Risk Committee and other duties from the Board of Supervisors.

CHANGE OF COMPOSITION OF THE BOARD OF SUPERVISORS

In 2014, there was a change in the composition of the Board of Directors pursuant to the Decree of the Minister of SOE as the Investor of Perum Jamkrindo No. SK-199/MBU/10/2014 dated October 7, 2014 concerning the Dismissal and Appointment of the Chairman of the Board

Pengawas Perum Jamkrindo. Saya diangkat untuk menggantikan bapak Choirul Djamhari sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Saya ucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan bapak Choirul Djamhari selama ini.

APRESIASI

Saya mewakili Dewan Pengawas mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dicapai Perusahaan sepanjang tahun 2014. Dewan Pengawas menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kerja keras, semangat dan dedikasi kepada segenap jajaran Direksi, manajemen dan staf Perum Jamkrindo. Selain itu, kami pun menyampaikan terima kasih kepada pemangku kepentingan yang selama ini telah memberikan kepercayaan dan dukungan, besar harapan kami hubungan yang selama ini telah terjalin dengan baik akan terus terpelihara di masa yang akan datang serta besar optimisme kami untuk dapat merangkul para pelaku UMKMK demi masa depan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik.

of Supervisors of Perum Jamkrindo. I was appointed to replace Mr. Choirul Djamhari as the Chairman of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo. I would like to thank Mr. Choirul Djamhari for his contribution to the Company until this time.

APPRECIATION

On behalf of the Board of Supervisors, I would like to express our deepest gratitude for the Company's achievements in 2014. The Board of Supervisors highly appreciates the hard work, spirit, and dedication of the Board of Directors, management and staff of Perum Jamkrindo. Furthermore, we would also like to thank our stakeholders who have put their trust on us and have supported us. We sincerely hope that the relationship that have been established will continue to be maintained in the future, and we are optimistic that we can reach more businesspeople of MSMEs & Cooperative for a better future of Indonesia's economic growth.

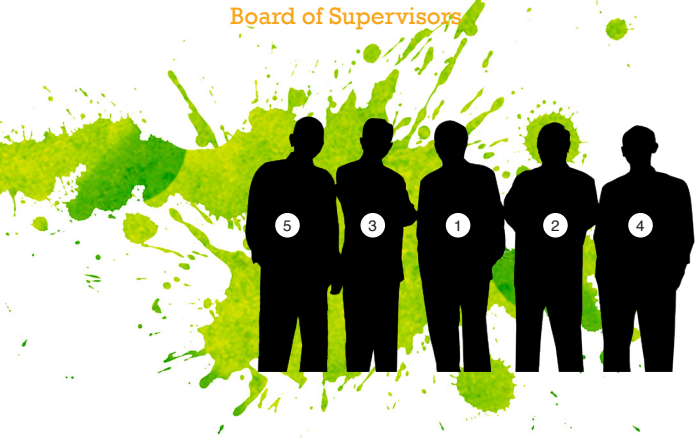
Jakarta, Mei/May 2015
Atas Nama Dewan Pengawas Perum Jamkrindo
On Behalf of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo



Braman Setyo
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of the Board of Supervisors



Dewan Pengawas
Board of Supervisors



1 **Braman Setyo**
Ketua / Chairman

2 **Subandriyo**
Anggota / Member

3 **Nasaruddin Umar**
Anggota / Member

4 **Ony Suprihartono**
Anggota / Member

5 **Dahlan Siamat**
Anggota / Member

Laporan Direksi
Board of Directors Report

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Dear Stakeholders,

Pertumbuhan ekonomi dunia yang belum sesuai dengan harapan, juga pertumbuhan ekonomi negara-negara maju yang tidak merata, menjadi pemicu lambatnya perbaikan ekonomi nasional. Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia, dibutuhkan sejumlah instrumen besar seperti pembangunan infrastruktur dalam jangka panjang dan efektivitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bisa menjadi solusi dalam waktu dekat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui aktivitas bisnis sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Melalui Laporan Tahunan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) pada tahun buku 2014 ini, saya mewakili jajaran Direksi ingin menyampaikan segenap pencapaian Perusahaan yang membanggakan selama tahun berjalan. Ini merupakan sebuah pembuktian bahwa sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan Pemerintah sebagai lembaga penjaminan kredit, Perum Jamkrindo dapat menorehkan prestasi dan mengembangkan sayap UMKMK di Indonesia demi terwujudnya perekonomian nasional yang lebih baik.

Global economic growth, which is not yet as expected, as well as uneven economic growth among developed countries, has triggered the slow improvement of national economy. To improve the economic growth in Indonesia, it takes a large number of instruments such as long-term infrastructure development and the effectiveness of micro credit program (KUR), which could be a solution to support Indonesia's economic growth through business activities in Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK).

Through Perum Jamkrindo's Annual Report for fiscal year 2014, on behalf of Board of Directors, I would like to present impressive achievement of the Company during the year. It proves that as the only State-Owned Enterprises (SOEs) which is assigned by the Government as a credit guarantee agency, Perum Jamkrindo was capable of attaining achievements and improving the growth of MSMEs & Cooperatives in Indonesia to achieve better national economy.



Untuk memperluas jangkauan penjaminan kredit sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKMK, Perum Jamkrindo mengambil langkah strategis dengan mendirikan anak perusahaan.

To extend the outreach of credit guarantee that cater to the needs of MSMEs & Cooperatives, Perum Jamkrindo takes strategic steps to establish a subsidiary

Diding S. Anwar

Direktur Utama
President Director

UMKMK, SALAH SATU PILAR UTAMA PEREKONOMIAN

UMKMK memiliki peran yang penting dan strategis dalam perekonomian nasional. Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai data yang mendukung bahwa eksistensi UMKMK cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Ketiga, kontribusi UMKMK dalam pembentukan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang cukup signifikan. Namun, masih banyak pelaku UMKMK yang *feasible* tapi dinilai tidak *bankable* atau tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan suntikan dana dari perbankan karena memiliki risiko yang tinggi. Di sinilah peran Perum Jamkrindo sebagai lembaga yang memberikan jaminan kepada bank untuk menyalurkan dana kepada pelaku UMKMK.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2014, jumlah UMKMK di Indonesia sebanyak 57,9 juta. Sedangkan jumlah UMKMK yang terjamin baru sebanyak 7,8 juta. Artinya, baru sekitar 13% UMKMK yang terjamin oleh Perum Jamkrindo. Untuk itu, Perusahaan telah menyusun sejumlah rencana dan strategi agar dapat merangkul lebih banyak UMKMK yang ada di Indonesia.

KINERJA PERUSAHAAN 2014

Selama 2014, total kredit yang dijamin Perum Jamkrindo sebesar Rp40,74 triliun atau mencapai 66,87% dari target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2014 sebesar Rp60,92 triliun. Total kredit yang dijamin tersebut terdiri dari kredit penjaminan bank konvensional sebesar Rp36,25 triliun, kredit penjaminan bank syariah sebesar Rp2,17 triliun, kredit penjaminan bukan bank konvensional sebesar Rp2,21 triliun dan kredit penjaminan bukan bank syariah sebesar Rp102,63 miliar. Sedangkan realisasi Imbal Bagi Hasil selama 2014 sebesar Rp244,38 juta atau mencapai 131,82% dari RKAP 2014.

Perusahaan berhasil mencatatkan total pendapatan tahun 2014 sebesar Rp2,45 triliun yang terdiri dari pendapatan

MSMES & COOPERATIVES, ONE OF THE MAIN PILLARS OF ECONOMY

MSMEs & Cooperatives have an important and strategic role in the national economy. This condition can be seen from various data that shows dominance of MSMEs & Cooperatives in Indonesian economy. First, the number of the industry is great and exists in every sector of the economy. Second, its has large potential for labor absorption. Third, MSMEs & Cooperatives have significant contribution to Gross Domestic Product (GDP). However, there are many MSMEs & Cooperatives that are feasible but not bankable nor eligible to obtain funds from banks due to its high risk. This is exactly when Perum Jamkrindo exercises its role, as an institution that provides banks the guarantees to distribute funds to the MSMEs & Cooperatives.

Based on the Ministry of Cooperatives and MSME data in 2014, the number of cooperatives in Indonesia was recorded at 57.9 million, while the number of new guaranteed MSMEs & Cooperatives was recorded at 7.8 million. It means that only about 13% of MSMEs & Cooperatives were guaranteed by Perum Jamkrindo. Therefore, the Company has prepared a number of plans and strategies to reach more MSMEs & Cooperatives in Indonesia.

COMPANY PERFORMANCE IN 2014

During 2014, total loans guaranteed by Perum Jamkrindo were Rp40.74 trillion or 66.87% of the Work Plan and Budget (RKAP) target in 2014 which amounted to Rp60.92 trillion. Total credits guaranteed consists of guarantee credit of conventional bank at Rp36.25 trillion, of sharia bank at Rp2.17 trillion, of non-conventional bank at Rp2.21 trillion and non-sharia bank at Rp102.63 billion. Whereas the realization of returns in 2014 reached Rp244.38 million or 131.82% of 2014 RKAP.

The Company's revenues were recorded at Rp2.45 trillion in 2014, consisting of operating income that amounted to

operasional sebesar Rp2,22 triliun atau mencapai 96,83% dari RKAP 2014 dan pendapatan lain-lain sebesar Rp222,49 miliar atau mencapai 112,08% dari RKAP 2014.

Total biaya tahun 2014 sebesar Rp1,60 triliun, terdiri dari biaya klaim sebesar Rp1,02 triliun atau mencapai 100,11% dari RKAP 2014, biaya premi *co-Guarantee*, reasuransi dan restitusi IJP sebesar Rp249,21 miliar atau mencapai 99,45% dari RKAP 2014, serta biaya usaha sebesar Rp328,42 miliar atau mencapai 77,58% dari RKAP 2014. Dengan demikian, jumlah laba sebelum pajak perusahaan tahun 2014 sebesar Rp846,94 miliar atau mencapai 120% dari RKAP 2014.

KEBIJAKAN STRATEGIS

Selama 2014, Perum Jamkrindo bersinergi dengan lembaga penjaminan kredit lainnya baik pihak swasta maupun Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) yang dimiliki pemerintah daerah. Dengan meningkatkan kerja sama dengan pihak bank, lembaga keuangan non bank, pemerintah maupun lembaga penjaminan kredit lainnya, diharapkan potensi UMKMK dapat lebih dioptimalkan.

Untuk memperluas jangkauan penjaminan kredit sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKMK, Perum Jamkrindo mengambil langkah strategis dengan mendirikan Anak Perusahaan, yaitu PT Jamkrindo Syariah yang sebelumnya merupakan Divisi Penjaminan Syariah yang bergerak dalam layanan penjaminan pembiayaan syariah. Hal ini dilatarbelakangi kinerja penjaminan syariah dalam lima tahun terakhir yang mencatatkan pertumbuhan positif dengan rata-rata kontribusi penjaminan syariah terhadap korporat mencapai 9,35% dengan kontribusi Imbal Jasa Kafalah sebesar 7,22%.

Selain itu, seiring dengan produk dan jasa layanan keuangan syariah yang terus berkembang dari waktu ke waktu, fitur penjaminan pun terus beradaptasi mengikuti kebutuhan dan ekspektasi mitra kerja baik Industri Keuangan Bank (IKB) maupun Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah terhadap kemurnian sistem yang berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Rp2,22 trillion or 96.83% of 2014 RKAP and other income which amounted to Rp222.49 billion or 112.08% of 2014 RKAP.

Total expenses in 2014 amounted to Rp1.60 trillion, consisting of claim cost of Rp1.02 trillion or 100.11% of 2014 RKAP, co-Guarantee premium costs, re insurance and IJP restitution that amounted to Rp249,21 billion or 99.45% of 2014 RKAP, as well as its operating costs of Rp328,42 billion or 77.58% of 2014 RKAP. Thus, the Company's total income before tax in 2014 amounted to Rp846.94 billion or 120% of 2014 RKAP.

STRATEGIC POLICY

During 2014, Perum Jamkrindo synergized with other credit guarantee institutions, both private party and Regional Credit Guarantee (Jamkrida) owned by local governments. By enhancing the cooperation with banks, non-bank financial institutions, government and other credit guarantee institutions, MSMEs & Cooperatives potential is expected to be more optimized.

To extend the outreach of credit guarantee that cater to the needs of MSMEs & Cooperatives, Perum Jamkrindo takes strategic steps to establish a subsidiary, namely PT Jamkrindo Syariah, which was previously Sharia Guarantee Division engaged in the sharia financing guarantee service. Such establishment is trigerred by sharia guarantee performance in the last five years, which recorded positive growth with an average contribution of sharia guarantee to the Company of 9.35% with the Kafalah Fee contribution of 7.22%.

In addition, along with the continuously growing products and services of sharia financial services, the guarantee feature continuously adapts to the needs and expectations of partners, both Bank Financial Industry (IKB) and the Non-Bank Financial Industry (IKNB) regarding the purity of system that adheres to sharia principles.

Kami menyempurnakan perangkat GCG Perusahaan dengan menetapkan *roadmap* GCG berdasarkan imbauan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan penyempurnaan *whistleblowing system* dalam suatu dokumen tersendiri yang terpisah dari GCG *Code*

We enhanced the Company's GCG instrument by establishing GCG roadmap based on suggestion from Financial Services Authority (OJK) and whistleblowing system improvement in a separate document from GCG Code

KENDALA DAN TANTANGAN SELAMA 2014

Di era modern yang erat kaitannya dengan kemajuan teknologi informasi, keunggulan di bidang TI menjadi perhatian kami. Peningkatan akselerasi pada *software* dan *hardware* sedang dilakukan guna mendukung kegiatan usaha yang dijalani. Dengan adanya investasi dalam bidang TI, khususnya pada *tracking system* yang sedang diproses, kami harap segala kendala umum yang dialami dapat terselesaikan pada tahun mendatang.

Dalam rangka menunjang kegiatan usaha dan kebutuhan bisnis Perum Jamkrindo, kami mengevaluasi *Information Technology Master Plan* (ITMP) yang ada, agar pengembangan Teknologi Informasi dapat selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2014-2018.

Selain meningkatkan pemanfaatan TI, kami juga tengah berupaya menambah kuantitas serta kualitas SDM dalam rangka meningkatkan pelayanan. Melalui program tugas belajar atau beasiswa S2, beberapa karyawan melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Selain itu, dalam melakukan perekrutan karyawan-karyawan profesional berpengalaman, Perusahaan mengutamakan tingkat pendidikan terakhir sekurang-kurangnya S2.

Dari sisi operasional Perusahaan, untuk mengurangi keterbatasan jaringan pelayanan yang saat ini baru sampai di tingkat provinsi, kami berencana akan menambah kantor

OBSTACLES AND CHALLENGES IN 2014

In the modern era that was closely associated with the information technology advancement, the excellence in IT field becomes our concerns. The acceleration improvement on software and hardware is being carried out to support the Company's business activities. With the investment in IT, especially in tracking system which is being worked on, we hope that all common obstacles that the Company faces can be resolved in the coming years.

In order to support business activities and needs of Perum Jamkrindo, we evaluate the existing Information Technology Master Plan (ITMP) in order to align the Information Technology with 2014-2018 Long Term Corporate Plan (RJPP).

In addition to improve the utilization of IT, we are also attempting to increase the quantity and quality of human resources in improving service. Through postgraduate scholarship program, several employees can continue their education. In addition, in recruiting experienced and professional employees, the Company prioritizes those having Master's degree at the least.

From the Company's operational side, in order to reduce the limitations of service coverage which currently only reaches the provincial level, we plan to expand regional

wilayah sampai ke tingkat kabupaten yang nantinya sangat mudah dijangkau oleh pelaku UMKMK di daerah.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK *(GOOD CORPORATE GOVERNANCE /* GCG*)*

Kami senantiasa memastikan bahwa praktik GCG yang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan GCG secara konsisten dan berkomitmen tinggi kami buktikan dengan ditetapkannya Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo Nomor 88/Kep-Dir/XII/2012KEP-06/DP-JAMKRINDO/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 mengenai Pedoman GCG. Di dalamnya mengatur tentang GCG *Code*, *Code of Conduct* serta *Board Manual* Dewan Pengawas dan Direksi yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Pada 2014, kami menyempurnakan perangkat GCG Perusahaan dengan menetapkan *roadmap* GCG berdasarkan imbauan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan penyempurnaan *Whistleblowing System* dalam suatu dokumen tersendiri yang terpisah dari GCG *Code*.

Buah komitmen kami dalam penerapan GCG mendapat apresiasi dalam proses *assessment* yang dilakukan *assessor independent* yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali dengan capaian skor 91,51 dengan klasifikasi peringkat kualitas penerapan GCG “Sangat Baik”.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Direksi memiliki tugas penting dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan, tidak hanya dalam hal kinerja keuangan tetapi juga dalam tata kelola yang baik secara keseluruhan. Untuk tujuan ini, kami dibantu oleh 2 (dua) komite yaitu Komite Penjaminan Kredit (KPK) serta Komite Manajemen Risiko (KMR).

offices to the district level that will be very easy to reach by MSMEs & Cooperatives in the region.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE/GCG IMPLEMENTATION

We always ensure that GCG practices are carried out in accordance with the provisions of prevailing legislation. We prove our consistent implementation of GCG, which is done with high commitment, through Joint Decree of Board of Directors and Board of Supervisors of Perum Jamkrindo Number 88/Kep-Dir/XII/2012KEP-06/DP-Jamkrindo/XII/2012 dated December 3, 2012 on the GCG Guidelines. It regulates GCG Code, Code of Conduct, Board Manual of Board of Supervisors and Board of Directors that have been adapted to the GCG principles issued by National Committee on Corporate Governance (KNKG).

In 2014, we enhanced the Company’s GCG instrument by establishing GCG roadmap based on suggestion from Financial Services Authority (OJK) and Whistleblowing System improvement in a separate document from GCG Code.

Our commitment in the GCG implementation received appreciation in the assessment process conducted by independent assessor, namely Public Accounting Firm (KAP) of Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang and Ali with a score of 91.51 and “Excellent” rating for the quality of GCG implementation.

ASSESSMENT ON PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

Board of Directors has important duties in running the Company’s operations, not only in terms of financial performance but also in good corproate governance as a whole. To this end, we were assisted by two (2) committees, namely Credit Guarantee Committee (KPK) and Risk Management Committee (KMR).

Sepanjang 2014, kedua komite telah menunjukkan kinerja yang baik dan telah memberikan kontribusi besar terhadap kinerja Perusahaan. Selain melalui implementasi program kerja yang tepat, fungsi masing-masing komite juga senantiasa ditingkatkan untuk lebih mendukung tugas dan tanggung jawab Direksi.

Throughout 2014, both committees have shown good performance and contributed greatly to the Company 's performance. Besides, through proper work program implementation, the functions of each committee are also constantly improved to better support the duties and responsibilities of the Board of Directors.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN *(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY / CSR)*

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Wujud program CSR Perum Jamkrindo dalam bidang lingkungan hidup serta pengembangan sosial dan kemasyarakatan dituangkan dalam Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Perum Jamkrindo's CSR program in the field of environment and social community development is set forth in the Partnership and Community Development Program (PKBL) which is carried out consistently and continuously.

Pembinaan yang diperuntukkan bagi Mitra Binaan Perum Jamkrindo diberikan dalam bentuk bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, pengkajian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas Mitra Binaan.

The development for Perum Jamkrindo's Development Partners is given in the form of educational donation, training, internship, marketing, promotion, assessment and other matters related to the productivity improvement of the Partners.

Selanjutnya untuk Program Bina Lingkungan, Perusahaan berpartisipasi dalam kegiatan penanaman 3.000 bibit pohon di sepanjang area Banjir Kanal Timur, Jakarta Timur yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN dan seluruh keluarga besar BUMN. Kami juga turut serta dalam penanaman *mangrove* di Kawasan Hutan Kapuk, Jakarta Utara dalam rangka menyambut HUT KAHMI ke-48. Kegiatan CSR yang terintegrasi juga dilaksanakan oleh Kantor Pusat dan seluruh Kantor Cabang dengan membagikan lebih dari 3.500 sembako gratis dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1435 H.

Furthermore, for the Community Development Program, the Company has participated in the planting of 3,000 trees activity along the Banjir Kanal Timur area, East Jakarta, which was organized by the Ministry of SOE and the whole family of SOE. We also participated in the planting of mangrove in Kapuk Forest Area, North Jakarta, to celebrate KAHMI's 48th anniversary. The integrated CSR activities are also carried out by the Head Office and all Branch Offices by distributing 3,500 free staple foods to celebrate Eid Al-Fithr of 1435 H.

Kami berkomitmen untuk terus melakukan kegiatan CSR yang berkelanjutan dalam rangka mengimplementasikan strategi CSR berbasis ISO 26000 yang terintegrasi dengan strategi bisnis. Kami berharap bahwa kegiatan CSR tersebut dapat membangun hubungan baik dengan para pemangku kepentingan, masyarakat, dan lingkungan sekitar.

We are committed to continuously carry out CSR activities in implementing ISO 26000-based CSR strategy, which is integrated with business strategy. We hope that the CSR activities can build good relations with stakeholders, community and surrounding environment.

PROSPEK USAHA

Seperti telah disampaikan sebelumnya, jumlah UMKMK di Indonesia sebanyak 57,9 juta sedangkan baru sekitar 13% yang terjamin oleh Perum Jamkrindo. Untuk itu, melihat potensi dan semangat yang dimiliki pelaku UMKMK di Indonesia, kami optimis bahwa kami dapat merangkul sebagian besar pelaku UMKMK dan membawa perbaikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Memasuki babak baru yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015, kami selaku BUMN yang mendapatkan amanat dari pemerintah untuk memberikan penjaminan kepada UMKMK, akan terus memberikan dukungan khususnya dalam akses kepada sumber pembiayaan serta meningkatkan *coverage* penjaminan. Hal ini bertujuan untuk menambah keyakinan kepada bank dan lembaga keuangan non bank.

RENCANA KE DEPAN

Untuk mengoptimalkan peran Perusahaan bagi UMKMK di Indonesia, sejumlah rencana yang akan dijalankan, antara lain meningkatkan pelayanan dengan membuat layanan mobil keliling yang direncanakan berjalan sebanyak lima hingga 10 mobil yang akan disebar di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Indonesia bagian timur. Mobil keliling ini akan memberikan layanan konsultasi atau asistensi bagi UMKMK.

Selain itu, kami akan mengembangkan aset yang berada di Bandung sesuai dengan bisnis utama yang diajalankan. Untuk itu, kami bekerja sama dengan BUMN karya untuk membuat sentral klinik bisnis UMKMK seperti Gedung SMESCO yang telah dibangun di Jakarta. Di tempat tersebut akan diadakan *coaching clinic*, pameran serta kegiatan lain yang dapat mengakomodir kebutuhan pelaku UMKMK yang ada di daerah Bandung dan sekitarnya.

Selanjutnya, untuk memperluas jaringan pelayanan sampai ke tingkat kabupaten, kami berupaya untuk meningkatkan kuantitas serta kualitas SDM dan penguasaan TI agar cita-cita kami menjadikan UMKMK hebat untuk Indonesia hebat dapat terwujud.

BUSINESS PROSPECTS

As noted earlier, the number of MSMEs & Cooperatives in Indonesia totaled 57.9 million and only about 13% is guaranteed by Perum Jamkrindo. Therefore, considering the potential and spirit of MSMEs & Cooperatives businesspeople in Indonesia, we are optimistic that we can embrace a large number of them and bring the improvement to Indonesia's economic growth.

Entering a new phase of ASEAN Economic Community (MEA) at the end of 2015, as an SOE that obtained a mandate from the government to provide guarantees to MSMEs & Cooperatives, we will continuously provide supports, especially access to financing sources, as well as improve our guarantee coverage. It aims to increase trust to banks and non-bank financial institutions.

FUTURE PLAN

To optimize the Company's role in MSMEs & Cooperatives industry in Indonesia, a number of plans will be executed, among others, to improve services by providing five up to ten patrol cars which will operate in Java, Sumatra, Kalimantan and eastern Indonesia. The cars is used as a facility to provide advisory services or assistance for MSMEs & Cooperatives.

Moreover, we will develop the assets located in Bandung in accordance with the main business undertaken. Therefore, we are cooperating with SOE to build MSMEs & Cooperatives business clinic center, like SMESCO Building that has been established in Jakarta. Coaching clinics, exhibitions, and other activities that can accommodate the needs of MSMEs & Cooperatives, will be held in Bandung and surrounding areas.

Furthermore, to expand the service coverage up to the district level, we strive to improve the quantity and quality of human resources and IT mastery in order to create the great MSMEs & Cooperatives for Indonesia.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Sampai dengan 31 Desember 2014, tidak terdapat perubahan pada komposisi Direksi Perusahaan. Namun, untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja perusahaan serta untuk menghadapi persaingan yang semakin kompetitif di bidang penjaminan, maka Perusahaan melakukan perubahan nomenklatur anggota-anggota Direksi berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-44/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 dan menyesuaikan struktur organisasi berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 46/Kep-Dir/III/2014 tanggal 10 Maret 2014.

APRESIASI

Dengan komitmen untuk memajukan UMKMK di Indonesia, kami optimis kinerja Perusahaan di tahun mendatang akan terus membaik dan pelaku UMKMK akan semakin menunjukkan prestasinya di mata dunia. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada seluruh karyawan, mitra usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya, terutama kepada seluruh mitra binaan dan pelaku UMKMK di Indonesia atas kontribusinya dalam pencapaian kinerja yang baik selama 2014.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia-Nya kepada kita semua.

CHANGES OF BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

As of December 31, 2014, there were no changes in the Board of Directors' composition. However, to improve the company's services and performance, as well as to be able to compete in the increasingly competitive guarantee business, the Company made changes in nonmenclature of Board of Directors members based on Decision of the Minister of SOE Number SK-44/MBU/2014 dated March 10, 2014 and adjusted the organizational structure based one Decision of Board of Directors Number: 46/Kep-Dir/III/2014 dated March 10, 2014.

APPRECIATION

With a commitment to promote MSMEs & Cooperatives in Indonesia, we are optimistic that the Company's performance in the coming year will continue to improve and MSMEs & Cooperatives will show more achievements in the global stage. We also extend our gratitude to all employees, business partners, and other stakeholders, especially to all partners and MSMEs & Cooperatives in Indonesia for contributing to the Company's excellent performance during 2014.

May God Almighty give us His grace.

Jakarta, Mei/May 2015
Atas Nama Direksi Perum Jamkrindo
On Behalf of the Board of Directors of Perum Jamkrindo

Diding S. Anwar
Direktur Utama
President Director





1 **Diding S. Anwar**
Direktur Utama / President Director

2 **Bakti Prasetyo**
Direktur Penjaminan Bank / Director of Bank Guarantee

3 **Nanang Waskito**
Direktur Penjaminan Non Bank / Director of Non Bank Guarantee

4 **Herry Sidharta**
Direktur SDM & Umum / Director of HR & General Affairs

5 **I. Rusdonobanu**
Direktur Keuangan, Investasi dan Teknologi Informasi / Director of Finance, Investment and Information Technology

Surat Pernyataan Anggota Dewan Pengawas dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2014 Perum Jamkrindo

Statement of Members of Board of Supervisors and Directors on the Responsibility for the 2014 Annual Report of Perum Jamkrindo

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Perum Jamkrindo tahun 2014 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan Perusahaan.

We, the undersigned, testify that all information in the Annual Report of Perum Jamkrindo for 2014 is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in the annual report and financial report of the Company.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, Mei 2015
Jakarta, May 2015

Dewan Pengawas
Board of Supervisors



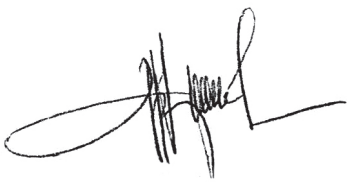
Braman Setyo
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of the Board of Supervisors



Subandriyo
Anggota Dewan Pengawas
Member of the Board of Supervisors



Ony Suprihartono
Anggota Dewan Pengawas
Member of the Board of Supervisors

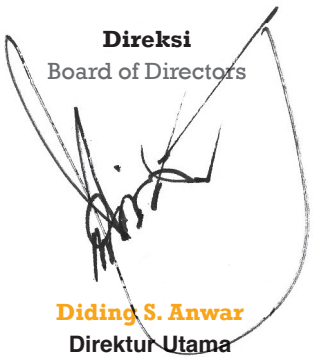


Nasaruddin Umar
Anggota Dewan Pengawas
Member of the Board of Supervisors



Dahlan Siamat
Anggota Dewan Pengawas
Member of the Board of Supervisors

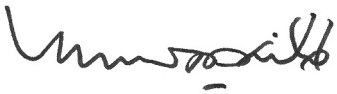
Direksi
Board of Directors



Diding S. Anwar
Direktur Utama
President Director



Bakti Prasetyo
Direktur Penjaminan Bank
Director of Bank Guarantee



Nanang Waskito
Direktur Penjaminan Non Bank
Director of Non Bank Guarantee



Herry Sidharta
Direktur SDM & Umum
Director of HR & General Affairs



I. Rusdonobanu
Direktur Keuangan, Investasi dan Teknologi Informasi
Director of Finance, Investment and Information Technology





PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

Identitas Perusahaan
Corporate Identity

Nama Perusahaan **Company Name**	**Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)**
Tanggal Pendirian Establishment	1 Juli 1970 July 1, 1970
Status Perusahaan Company Status	Perusahaaan Umum (Perum) Public Corporation
Alamat Lengkap Perusahaan Office Address	Gedung Jamkrindo, Jalan Angkasa Blok B - 9 Kav. 6, Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10610, Indonesia Telp. (62 21) 6540335, Fax. (62 21) 6540344,6540348 E-mail: info@jamkrindo.com; www.jamkrindo.com
Pemegang Saham Shareholders	Pemerintah Indonesia (BUMN) 100% Indonesian Government (SOE) 100%
Penyertaan Modal Negara State Capital	Rp6.638.733.365.160 Rp6,638,733,365,160
Dasar Hukum Legal Basis	• UU Nomor: 19 Tahun 2003 Tentang BUMN • PP Nomor: 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara • PP Nomor: 41 Tahun 2008 Tentang Perum Jaminan Kredit Indonesia • Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan • Kep Men no. 77 Tahun 2011 tentang Penetapan / ijin Sebagai Perusahaan Penjaminan • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 5/POJK.05/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Perizinan Usaha dan Lembaga Penjaminan • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 6/POJK.05/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 7/POJK.05/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Pemeriksaan Lembaga Penjaminan • Act No. 19/2003 on State Owned Enterprises (SOEs) • Government Regulation No. 45/2005 on establishment, management, supervision and dissolution of SOE • Government Regulation No. 41/2005 on Perum JAMKRINDO • Presidential decree No. 2/2008 on Guarantee Agency • Ministry Decree No. 77 year 2011 on the Determination/Permit as Guarantee Company • Financial Service Authority Regulation No: 5/POJK.05/2014 dated April 17, 2014 on Business License and Guarantee Agency • Financial Service Authority Regulation No: 6/POJK.05/2014 dated April 17, 2014 on Business Operation of Guarantee Agency • Financial Service Authority Regulation No: 7/POJK.05/2014 dated April 17, 2014 on Examination of Guarantee Agency.

Selayang Pandang Perum Jamkrindo
Perum Jamkrindo at a Glance



Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berfokus pada penjaminan kredit, baik konvensional maupun syariah. Perum Jamkrindo secara konsisten turut serta dalam melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Pelaksanaan kegiatan penjaminan kredit yang dimaksud bersifat tunai dan non tunai, yang diberikan oleh Bank atau Badan Usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan memudahkan aksesibilitas, Perum Jamkrindo terus melakukan pengembangan jaringan kerja hingga ke pelosok negeri.

Berawal pada 1970, Pemerintah mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang dilandasi oleh kondisi riil perkembangan koperasi yang masih tertinggal dibandingkan dengan perusahaan milik negara dan perusahaan swasta. Dalam perkembangannya, LJKK kemudian diubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tanggal 23 Desember 1981 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tanggal 31 Mei 1985 tentang Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi.

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) is a State-Owned Enterprise (SOE) which focuses on the credit guarantee service, both conventional and sharia. Perum Jamkrindo sustainably provides contribution to implement and support government's policies and programs in economy and national development. The abovementioned activity of credit guarantee, both cash and non-cash, is given by Bank or Enterprises to Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (SMEs/ UMKMK). In the effort to empower the economy and easing accessibility, Perum Jamkrindo continues to expand network services across the country.

The history of the Company began in 1970 when the Government established Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) as a response to the sagging cooperative development at that time compared with the state-owned or private companies. In its development, LJKK transformed into Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) pursuant to the Government Regulation No. 51 dated December 23, 1981, amended by the Government Regulation No. 27 dated May 31, 1985 concerning Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi.

Keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas Perum PKK dalam mengembangkan koperasi melalui kegiatan penjaminan kredit, membuat Pemerintah memperluas jangkauan pelayanan Perum PKK menjadi tidak hanya terbatas pada koperasi, tetapi juga mencakup Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal tersebut diperkuat dengan terbitnya legalitas Pemerintah melalui PP No. 95 tanggal 7 November tahun 2000 sekaligus mengubah nama Perum PKK menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU).

Pada 2008, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 2 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Terkait dengan perubahan bisnis perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada UMKMK melalui pola bagi hasil, tetapi berfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKMK, Perum SPU diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tanggal 19 Mei 2008.

Guna melaksanakan Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan, mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222/PMK.010/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Dengan regulasi tersebut, Perum Jamkrindo wajib memiliki izin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit. Menindaklanjuti PMK tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Nomor: KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 yang menetapkan izin usaha Perum Jamkrindo sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit.

The success of Perum PKK in performing its functions and duties to develop cooperative through credit guarantee activity spurred the Government to expand the outreach of Perum PKK's service to, not only limited to cooperative matters, but also encompassed Micro, Small and Medium Enterprises. This is reinforced by the issuance of legal regulation, namely Government Regulation No. 95 dated November 7, 2000, which also transformed the name of Perum PKK into Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU).

In 2008, the government issued Presidential Regulation no. 2 dated January 26, 2008 regarding the Guarantee Institution. Related to the transformation in line of business of the Company in which it only focused on credit guarantee business for SMEs instead of providing direct credit to SMEs through profit and loss sharing, the name of Perum SPU was changed again into Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) based on the Government Regulation No. 41, dated May 19, 2008.

As an enactment of the Presidential Regulation, the Government, in this case the Department of Finance, issued the Regulation of Ministry of Finance No. 222/PMK.010/2008 dated December 16, 2008, concerning Credit Guarantee Company and Credit Re-Guarantee Company. With the regulation in effect, Perum Jamkrindo needed to have a license as a Credit Guarantee Company. Therefore, the Ministry of Finance through the Ministerial Decree Number: KEP-77/KM.10/2009 dated April 22, 2009, declared that Perum Jamkrindo has a business license as a Credit Guarantee Company.

Bidang Usaha
Line of Business

KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2008 yang menjadi Anggaran Dasar Perusahaan, dalam pasal 6, 7, dan 8 disebutkan bahwa Perum Jamkrindo memiliki sifat, maksud, dan tujuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku.
2. Maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, dengan melaksanakan kegiatan penjaminan kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Koperasi.

Guna mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud, Perum Jamkrindo menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut:

BUSINESS ACTIVITIES

Pursuant to the Government Regulation No. 41 year 2008, which had been set as the Articles of Association of the Company, articles 6, 7, and 8, Perum Jamkrindo has the following characteristics, purposes, and objectives:

1. To provide service for the benefit of public and increase profit based on the applicable good corporate governance principles.
2. To conduct and support the Government policies and programs, as its purposes and objectives, in national economic development through credit guarantee activities for Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives.

To achieve the abovementioned purposes and objectives, Perum Jamkrindo conducts business activities as follows:

No	Kegiatan	Keterangan
1	Penjaminan kredit baik bersifat tunai maupun non tunai / Credit guarantee both for cash and non-cash	Diberikan bank atau badan usaha kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi / Given by banks or non-banks to Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives
2	Penjaminan pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan pembiayaan pola bagi hasil / Guarantee for lease financing, factoring, consumer finance, and funding patterns	Diberikan oleh lembaga pembiayaan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi / Given by financial institutions to Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives
3	Penjaminan pembelian barang secara angsuran / Guarantee for the purchase of goods through installment method	Dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi / Conducted by Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives
4	Melakukan Penjaminan Syariah melalui anak perusahaan PT Penjaminan Pembiayaan Jamkrindo Syariah (PPJS) atas pembiayaan baik bersifat tunai maupun non tunai / Sharia Guarantee through the subsidiary of the Company, PT Penjaminan Pembiayaan Jamkrindo Syariah (PPJS) for financing both cash and non-cash	Diberikan Bank atau Badan Usaha Syariah kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi / Given by Sharia Banks or Sharia Units to Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives
5	Penjaminan atas transaksi kontrak jasa / Guarantee for service contract transaction	Dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi / Conducted by Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives
6	Kegiatan usaha lainnya / Other business activities	Penjaminan kredit perorangan, jasa konsultasi, dan jasa manajemen kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan / Penjaminan kredit perorangan, jasa konsultasi, dan jasa Guarantee for personal loans, and consultation and management services to Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives in accordance with the purposes and objectives of the Company

Sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 99/PMK.010/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, sebagai perusahaan penjamin, Perum Jamkrindo mempunyai peluang untuk memperluas kegiatan usaha yang dijalankan dan tidak terbatas pada kegiatan usaha pemberian jasa penjaminan kredit, antara lain:

1. Penjaminan Pinjaman yang disalurkan koperasi kepada anggotanya;
2. Penjaminan Kredit dan/atau Pinjaman Program Kemitraan yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
3. Penjaminan Penyaluran Uang Pinjaman dengan Jaminan Gadai dan Fidusia;
4. Penjaminan atas Surat Utang;
5. Penjaminan Transaksi Dagang;
6. Penjaminan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*surety bond*);
7. Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi);
8. Penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
9. Penjaminan *Letter of Credit* (L/C);
10. Penjaminan Kepabeanan;
11. Jasa Konsultasi Manajemen terkait dengan Kegiatan Usaha Penjaminan;
12. Penyediaan informasi/*database* terjamin terkait dengan Kegiatan Usaha Penjaminan;
13. Penjaminan lainnya setelah memperoleh persetujuan Menteri.

PRODUK USAHA PENJAMINAN

Penjaminan Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit (Terjamin) kepada Penerima Jaminan.

Proses Penjaminan Kredit melibatkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) pihak, yaitu badan usaha pemberi kredit yang disebut Penerima Jaminan, debitur kredit yang disebut Terjamin, dan Perusahaan Penjamin kredit yang disebut Penjamin.

As stipulated in the Regulation of Ministry of Finance Number 99/PMK.010/2011 dated July 8, 2011 regarding the Amendment of the Regulation of Ministry of Finance Number 222/PMK.010/2008 on Credit Guarantee Company and Credit Re-Guarantee Company, Perum Jamkrindo, with its status as a surety company, has an opportunity to expand its business activities without limiting to credit guarantee services, such as:

1. Guarantee for loans distributed by cooperative to its members;
2. Credit Guarantee and/or Loans for Partnership Program distributed by SOE for Partnership and Community Development Program (PKBL);
3. Guarantee for Loans Disbursement with Lien and Fiduciary Guarantees;
4. Guarantee for Bonds;
5. Guarantee for Trade/Commerce Transactions;
6. Guarantee for Goods and/or Services Procurement (surety bond);
7. Guarantee for Bank Guarantee (Counter Bank Guarantee);
8. Guarantee for Domestic Letter of Credit (SKBDN);
9. Guarantee for Letter of Credit (L/C);
10. Customs Bond;
11. Management Consulting Service related to Business Activity of Guarantee;
12. Provision of guaranteed information/database related to Business Activity of Guarantee;
13. Other Guarantee Activities upon the approval from the Minister of Finance.

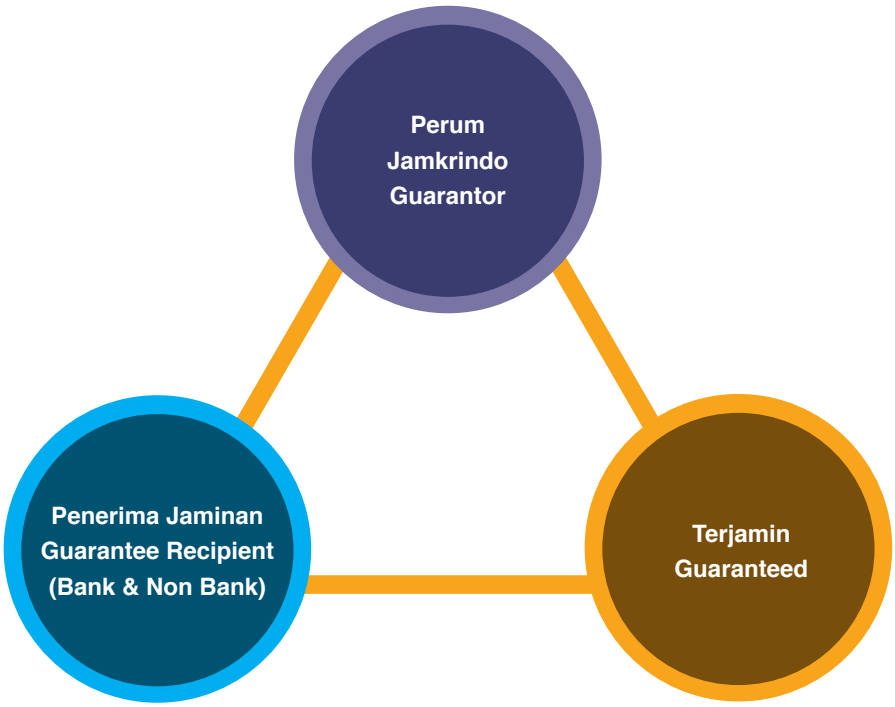
CREDIT GUARANTEE PRODUCTS

Credit Guarantee is a service to provide guarantee for the fulfillment of financial obligations of the Borrower (Guaranteed) to the Guarantee Recipients.

Its process involves, at the minimum, 3 (three) parties, namely the lender or known as Guarantee Recipients, the borrower/debtors or known as Guaranteed, and Credit Guarantee company or known as Guarantor.

Proses Penjaminan Kredit

Credit Guarantee Process



Prinsip dasar Penjaminan Kredit adalah pengambilalihan atas risiko kegagalan Terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada Penerima Jaminan, namun tidak menghilangkan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan sampai Penerima Jaminan menyatakan Kredit Terjamin tersebut lunas.

Penjaminan Kredit diperlukan oleh Penerima Jaminan pada saat permohonan kredit dari Terjamin dinyatakan layak oleh Penerima Jaminan akan tetapi belum memenuhi syarat administrasi perkreditan perbankan, khususnya dari sisi pemenuhan kecukupan agunan (*unbankable*).

The basic principle of Credit Guarantee activities is the acquisition of credit risks (credit failure) of the Guaranteed to meet its financial obligations to the Guarantee Recipient, but does not eliminate the financial obligations of the Guaranteed to Guarantee Recipients until the Guarantee Recipients declared that the loan is settled.

Credit Guarantee is required by Guarantee Recipients at the time loan application is submitted by the Guaranteed and approved by the Guarantee Recipients, yet it has not met the banking credit administration requirements, especially the fulfillment of collateral adequacy (unbankable).

Jenis-jenis Produk Usaha Penjaminan antara lain sebagai berikut:

Types of Guarantee Credit Products are as follows:

No	Produk Usaha Products	Uraian Deskripsi	
1	Penjaminan Kredit Umum Commercial Credit Guarantee	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan Modal Kerja dan/atau Investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin (Proses penjaminan dilakukan secara kasus per kasus).	Guarantee over credit/financing given by the Guarantee Recipients to the Guaranteed for additional Working Capital and/or Investment in order to increase and develop its business (guarantee process is done on a case-by-case basis).
2	Penjaminan Kredit Mikro Micro Credit Guarantee	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin, Pengusaha Mikro dan Kecil, untuk keperluan Modal Kerja dan/atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin, dengan jumlah *plafond* kredit atau pembiayaan disesuaikan ketentuan kredit mikro yang berlaku di Penerima Jaminan (proses penjaminan dilakukan secara Otomatis Bersyarat).	Guarantee over credit/financing given by the Guarantee Recipients to the Guaranteed - Micro and Small Entrepreneurs - for additional Working Capital and/or Investment in order to increase and develop their business. Total credit or financing platforms shall be adjusted to the prevailing micro credit stipulations of the Guarantee Recipients (guarantee process is conducted in a Conditional Automatic manner).
3	Penjaminan Bank Garansi/Kontra Garansi Guarantee for Bank Guarantee/Counter Guarantee	Pemberian jaminan dalam bentuk kontra garansi atas fasilitas Bank Garansi yang diterbitkan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin (*Principle*).	Provision of guarantee in the form of counter guarantee over Bank Guarantee's facilities issued by the Guarantee Recipients to the Guaranteed.
4	Penjaminan Kredit Konstruksi & Pengadaan Barang/Jasa Credit Guarantee for Construction and Procurement of Goods/ Services	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kontrak kerja antara Terjamin dengan *Bowheer* (pemilik proyek), yang sumber pengembaliannya berasal dari dana APBN/APBD/ BUMN atau swasta nasional.	Guarantee over credit/financing given by the Guarantee Recipients to the Guaranteed for additional Working Capital of construction services and procurement of goods/services in accordance with the contract agreed between the Guaranteed and Bowheer (project owner). Sources of repayment are from the State Budget, Regional Budget, SOE, or private sectors.
5	Penjaminan Distribusi Barang Guarantee for Goods Distribution	Penjaminan atas kredit penyaluran barang dari Penerima Jaminan (produsen barang) kepada Terjamin yang mewajibkan Terjamin untuk melunasi pembayaran dalam jangka waktu tertentu.	Guarantee over goods distribution credit from Guarantee Recipients (producers) to the Guaranteed which obliged the Guaranteed to settle the payment within a specific period.
6	Penjaminan Kredit Multiguna Multipurpose Credit Guarantee	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin, perorangan(CPNS, PNS, pegawai tetap suatu Perusahaan Swasta/instansi Pemerintah) baik yang penyalurannya dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga *channeling*, yang sumber pengembaliannya berasal dari gaji tetapTerjamin dengan cara memotong gaji tetap Terjamin (Proses Penjaminan dilakukan secara Otomatis Bersyarat).	Guarantee over credit/financing given by the Guarantee Recipients to the Guaranteed - Individuals (candidate of Civil Servants/CPNS, Civil Servants/ PNS, permanent employees of a private companies/Government institutions). The disbursement of loans is conducted either directly or through a channeling institution with source of repayment comes from the salary of the Guaranteed (guarantee process is conducted in a Conditional Automatic manner).

No	Produk Usaha Products	Uraian Deskripsi	
7	Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Guarantee for Micro Credit Program (Kredit Usaha Rakyat - KUR)	Kredit/pembiayaan modal kerja dan/ atau investasi kepada UMKMK untuk usaha produktif dan layak, namun belum *bankable*. Penjaminan Perum Jamkrindo untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan *plafond* sampai dengan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) termasuk dalam kategori KUR Mikro sedangkan untuk *plafond* kredit lebih dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) termasuk dalam kategori KUR Ritel.	Credit/Financing for working capital and/or investment to MSMEs & Cooperatives of feasible and productive business but has not met the banking credit administration requirements (unbankable). Perum Jamkrindo offers Micro Credit Program with platform up to Rp20,000,000, which is included in the Micro KUR category, and with platform of more than Rp20,000,000 up to Rp500,000,000, which is included in the Retail KUR category.
8	*Surety Bond*	Suatu perjanjian 3 pihak antara *Surety* (pihak pertama) atas dasar keyakinannya kepada *Principal* (Pihak Kedua) secara bersama-sama berjanji kepada *Obligee* (Pihak Ketiga) bahwa apabila *Principal* oleh sebab suatu hal menjadi lalai atau gagal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan *Obligee*, maka *Surety* akan bertanggung jawab terhadap *Obligee* untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban *Principal* tersebut.	A three-party agreement among the Surety (first party) on the basis of their trust to the Principal (Second Party), in which both parties accordingly promise to the Obligee (third party). The agreement stated that, should the Principal neglect or fail to perform their duty as stipulated in the agreement due to any reason, the Surety is responsible to the Obligee for fulfilling the Principal's obligations.
9	Penjaminan Kredit BPR/ BPRS BPR/BPRS Credit Guarantee	Penjaminan atas kredit yang disalurkan perbankan dan/atau badan usaha lainnya kepada BPR	Guarantee on credit which is distributed by the Bank and/or other business entities to BPR
10	Penjaminan KPR Sejahtera FLPP KPR Sejahtera FLPP Guarantee	Kegiatan penjaminan terhadap penyaluran kredit pemilikan rumah yang merupakan program kerja sama antara Pihak Perbankan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan suku bunga rendah, cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Guarantee activities on housing loan distribution, which is a coordination program between the Bank and Ministry of Public Works and Public Housing of Republic of Indonesia with low interest, light installment, and long period of credit for low-income communities.
11	*Customs Bond*	Perikatan penjaminan antara tiga pihak, pihak pertama (Penjamin/Customs Company) terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul dari pihak kedua (Terjamin/Principal) terhadap pihak ketiga (Penerima Jaminan/Oblige)	Guarantee engagement among three parties; the first party (Guarantor/ Customs Company) is engaged to fulfill its obligations from the second party (Guaranteed/Principal) to the third party (Guarantee Recipient/Obligee)
12	Penjaminan Keagenan Kargo Cargo Agency Guarantee	Penjaminan yang diberikan kepada Penerima jaminan/Obligee (Perusahaan Penyedia Jasa Pengangkutan) atas kewajiban Terjamin/Principal (Agen Kargo) dalam melakukan pembayaran ongkos angkut barang kepada Penerima Jaminan/ *Obligee*.	Guarantee provided to Guarantee Recipient/obligee (Transportation Services Provider Company) on Guaranteed/ Principal's obligation to pay transportation cost to Guarantee Recipient/Obligee
13	Penjaminan Invoice Financing Invoice Financing Guarantee	Adalah fasilitas penjaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan kepada *Obligee* terkait dengan tagihan *Supplier* dari *Obligee*. Penjaminan Keagenan Kargo merupakan salah satu bentuk *Payment Bond* atau Jaminan Pembayaran lainnya.	Guarantee facility on financing provided by Financial Institutions to Obligee related to supplier bills from Obligee. Cargo Agency Guarantee is a form of payment bond or other financing guarantees

Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan
Vision, Mission, and Corporate Culture

Dalam rangka pelaksanaan peran serta dan fungsi Perum Jamkrindo dalam perekonomian nasional dan berdasarkan Surat Pengesahan dari Kementerian BUMN Nomor: S-34/MBU/2014 tentang Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), maka Dewan Pengawas dan Direksi Perum Jamkrindo menetapkan Visi, Misi dan Budaya Perusahaan sebagai berikut:

In the implementation of role and function of Perum Jamkrindo in the national economy and pursuant to Validation Letter from the Ministry of SOE Number: S-34/MBU/2014 regarding the Long Term Corporate Plan, Perum Jamkrindo's Vision, Mission, and Corporate Culture are as follows:

Visi Vision

Menjadi Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian Nasional.

Being a leading Credit Guarantee Company that can support the development of national economy.

Misi Mission

Visi Perusahaan dijabarkan ke dalam misi-misi yang merupakan Tridharma Jamkrindo sebagai berikut:

1. **Dharma Pertama**
   Melakukan kegiatan penjaminan bagi pengembangan bisnis UMKM dan Koperasi
2. **Dharma Kedua**
   Memberikan pelayanan yang luas dan berkualitas
3. **Dharma Ketiga**
   Memberikan manfaat bagi *stakeholders* sesuai prinsip bisnis yang sehat

The Company's vision described into missions that are Tridharma Jamkrindo as follows:

1. **First Dharma**
   Conducting credit guarantee business activities and management consulting support for business development of Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK).
2. **Second Dharma**
   Providing wider and qualified services.
3. **Third Dharma**
   Providing interests to stakeholders in accordance with sound business principles.

Kredo Perusahaan

Kredo perusahaan Perum Jamkrindo terdiri dari 5 (lima) butir, sebagai berikut:

1. Terpercaya dalam melaksanakan usaha penjaminan
2. Responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis
3. Unggul dan Profesional dalam pelayanan
4. Sehat dalam tata kelola perusahaan
5. Terkemuka dalam memberikan kepuasaan pelanggan

Corporate Credo

Perum Jamkrindo's Corporate Credo consists of 5(five) points of company's cultural values, namely TRUST, as follows:

1. Trusworthy in conducting business guarantee
2. Responsive to the changes of the environment
3. Excellent and Professional in service
4. Healthy in corporate governance
5. Reputable in providing customers' satisfaction

Budaya Perusahaan

Budaya perusahaan Perum Jamkrindo terdiri dari 5 (lima) butir nilai-nilai budaya yang dianut perusahaan, yaitu budaya **TRUST.**

Corporate Culture

Corporate culture of Perum Jamkrindo comprised of 5 (five) points of cultural values held by the Company, namely **TRUST** culture.

T

Terpercaya

Bekerja jujur dengan integritas tinggi.
Working honestly with high integrated.

R

Responsif

Tanggap menghadapi kebutuhan mitra usaha dan segenap *stakeholder*.
Responsive to meet the needs of business partners and all stakeholders.

U

Unggul

Selalu meningkatkan profesionalisme demi pencapaian nilai tambah bagi perusahaan.
Sustainably improving professionalism to reach extra value for the company.

S

Sehat

Selalu bekerja dengan tekun untuk mendukung tata kelola perusahaan yang sehat.
Always work diligently to support a healthy corporate governance.

T

Terkemuka

Selalu terdepan dalam memberikan pelayanan dan kinerja untuk menjadi pemimpin dalam industri penjaminan.
Always in the forefront in providing services and performances to become the industry leader in assurance.

Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU Perum Jamkrindo)

Implementation of Perum Jamkrindo's Assessment Criteria on Excellent Performance (KPKU Perum Jamkrindo)

Pada 2014, Perum Jamkrindo sudah mengimplementasikan dan melakukan assessment KPKU, baik self *assesment* maupun evaluasi mandiri.

In 2014, Perum Jamkrindo had implemented and conducted an assessment on KPKU, both self assessment and independent evaluation.



Hasil evaluasi mandiri atas implementasi KPKU Perum Jamkrindo memperoleh skor KPKU pada tahun 2014 sebesar 408,75 (*early improvement*).

Based on the independent evaluation on KPKU implementation, Perum Jamkrindo obtained the score of 408.75 in 2014 (early improvement).

Kompetensi Inti
Core Competency

Kompetensi inti berpotensi besar dalam memperkuat *competitive advantage*. Namun demikian, *competitive advantage* yang kuat masih dapat terhalangi oleh faktor-faktor dinamis dalam persaingan pasar, seperti kurangnya kesetiaan pelanggan dan tidak adanya *customer relationship*. Saat ini dan masa yang akan datang, Perum Jamkrindo memiliki beberapa tantangan strategis berkaitan dengan faktor-faktor dinamika persaingan pasar yang terkait dengan potensi *moral hazard* pada *customer*.

Core competency may bring massive potential to the improvement of competitive advantage. However, strong competitive advantage may still be obstructed by dynamic factors in market competition, such as the lack of customers' loyalty and lack of customer relationship. In both the present and the future, Perum Jamkrindo has several strategic challenges related to the dynamic factors of market competition regarding the moral hazard potential on customers.

Kriteria Identifikasi Identification Criteria		**Risiko** Risk		**Kendala** Obstacle	
Accessibility	Kemampuan mengakses berbagai pasar potensial / Ability to access various potential markets	1	Peluang untuk pertumbuhan terabaikan / Opportunity for growth is neglected	1	Kerugian akibat melemahnya *core competency* hanya sebagian kecil saja yang dapat dihitung dimuka / Loss as the result of weakened core competency in which only small amount can be calculated in advance
Unik/langka Unique/rare	Peniruan oleh kompetitor sulit dilakukan / Imitation by competitors will be hard to do	2	Re-organisasi perusahaan menjadi unit-unit bisnis yang lebih kecil dapat mengakibatkan kompetensi terpecah dan lemah / Reorganization of company into smaller business units may result in weakened competency		
Value creation	Memberi kontribusi besar terhadap manfaat produk, terutama dari perspektif pelanggan / Immense contribution on product benefits, particularly from the customers' perspective`	3	Kurangnya sensitifitas terhadap tumbuhnya peluang lain yang terkait / Lack of sensitivity regarding the growth of other relevant opportunities	2	Tingginya pertumbuhan pasar menimbulkan kinerja cukup bagus yang dapat mengaburkan potensi yang lebih besar jika *core competency* diperhatikan sepenuhnya / High market growth which results in fairly good performance may obscure bigger potential should the core competency is fully considered
		4	Investasi dapat menjadi kurang optimal / Less optimum investment		
		5	Terlalu fokus kepada kinerja periodik, yang sangat dipengaruhi oleh harga jual dan kompetisi pasar. Akibatnya, *core competency* kurang mendapatkan perhatian / Neglected core competency due to the over-emphasis on periodical work which is highly affected by selling price and market competition		

Sesuai kriteria identifikasi di atas dan hasil pengembangan model bisnis Perusahaan, kompetensi inti Perum Jamkrindo adalah sebagai berikut:

Based on the identification criteria and the result of improvement on the Company's business model, the core competency of Perum Jamkrindo is as follows:



Memiliki keahlian dan reputasi yang baik dalam bidang penjaminan kredit UMKMK.
- Kecepatan pembayaran klaim penjaminan kredit.
- Melayani produk sesuai dengan kebutuhan mitra kerja (*customized product*).

Possessing skills and good reputation in credit guarantee for MSMEs & Cooperatives.
- Fast claim payment for credit guarantee.
- Providing products in accordance with partner's necessities (customized product).



Sistem informasi yang terintegrasi secara internal maupun eksternal dengan mitra kerja.

Possessing information system integrated internally and externally to business partners.



Memiliki modal yang besar dan dukungan yang besar dari Pemerintah.

Possessing strong capital and support from Government.

Struktur Organisasi Perusahaan
Organization Structure of The Company

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perum Jamkrindo senantiasa patuh untuk mencapai kemajuan bangsa, dalam hal ini penerapan pengelolaan organisasi yang efektif melalui reformasi birokrasi sangat diperlukan. Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan sekali dalam satu periode tertentu dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dalam satu periode dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

As one of the State-Owned Enterprises (SOE), Perum Jamkrindo continues to provide contribution to the nation. One of the contributions given is by implementing an effective organization management through Bureaucratic Reformation which is a form of operation composed and executed once in a certain period. It is also a detailed plan to reform bureaucracy from one phase to another in one period with clear target per year. Targets set in the first year will be the basis for determination of next year's targets and so on.

Setiap organisasi selalu menghadapi dinamika perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Untuk menghadapi dinamika perubahan lingkungan tersebut diperlukan tata kelola perusahaan yang efektif dalam meningkatkan dan pengembangan Perum Jamkrindo. Efektifitas pengelolaan perusahaan sangat ditentukan oleh struktur organisasi yang jelas dan berkesinambungan.

Each organization will always face environmental changes, both internally and externally. In order to face such dynamics, effective corporate governance is required so that the Company will be able to develop and improve its business. The effectiveness of corporate management is determined by a clear and sustainable organization structure.

Dalam merespon perubahan-perubahan lingkungan Perusahaan dan pencapaian arah bisnis jangka panjang, maka pada 2014, Perum Jamkrindo telah melakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi Perusahaan.

To respond to the environmental changes in and outside the Company as well as to achieve its long-term plan, Perum Jamkrindo had conducted an adjustment in its organization structure in 2014.

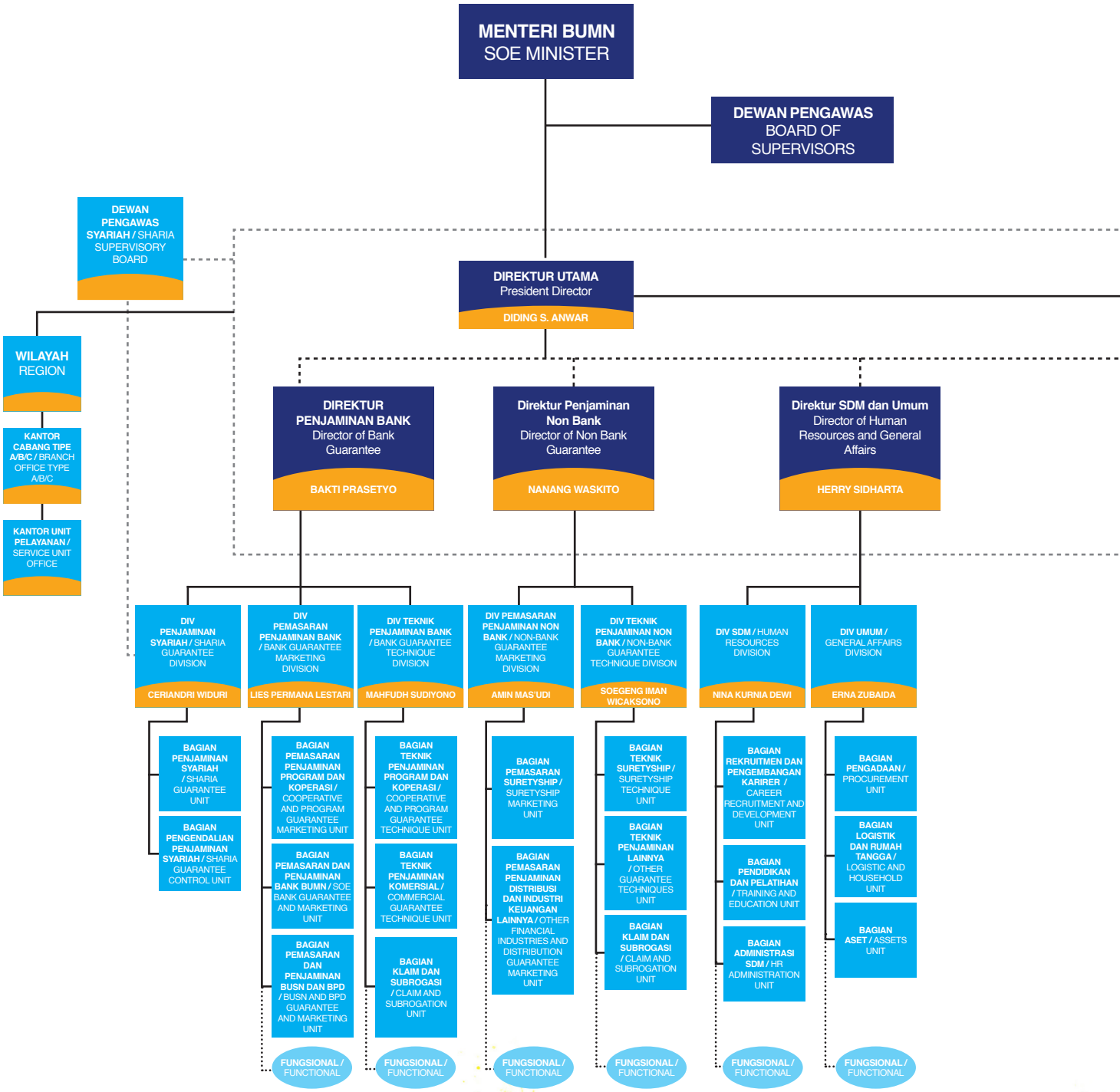
Berikut Struktur Organisasi Perum Jamkrindo sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 46/Kep-Dir/III/2014 tanggal 10 Maret 2014, yang terdiri dari:

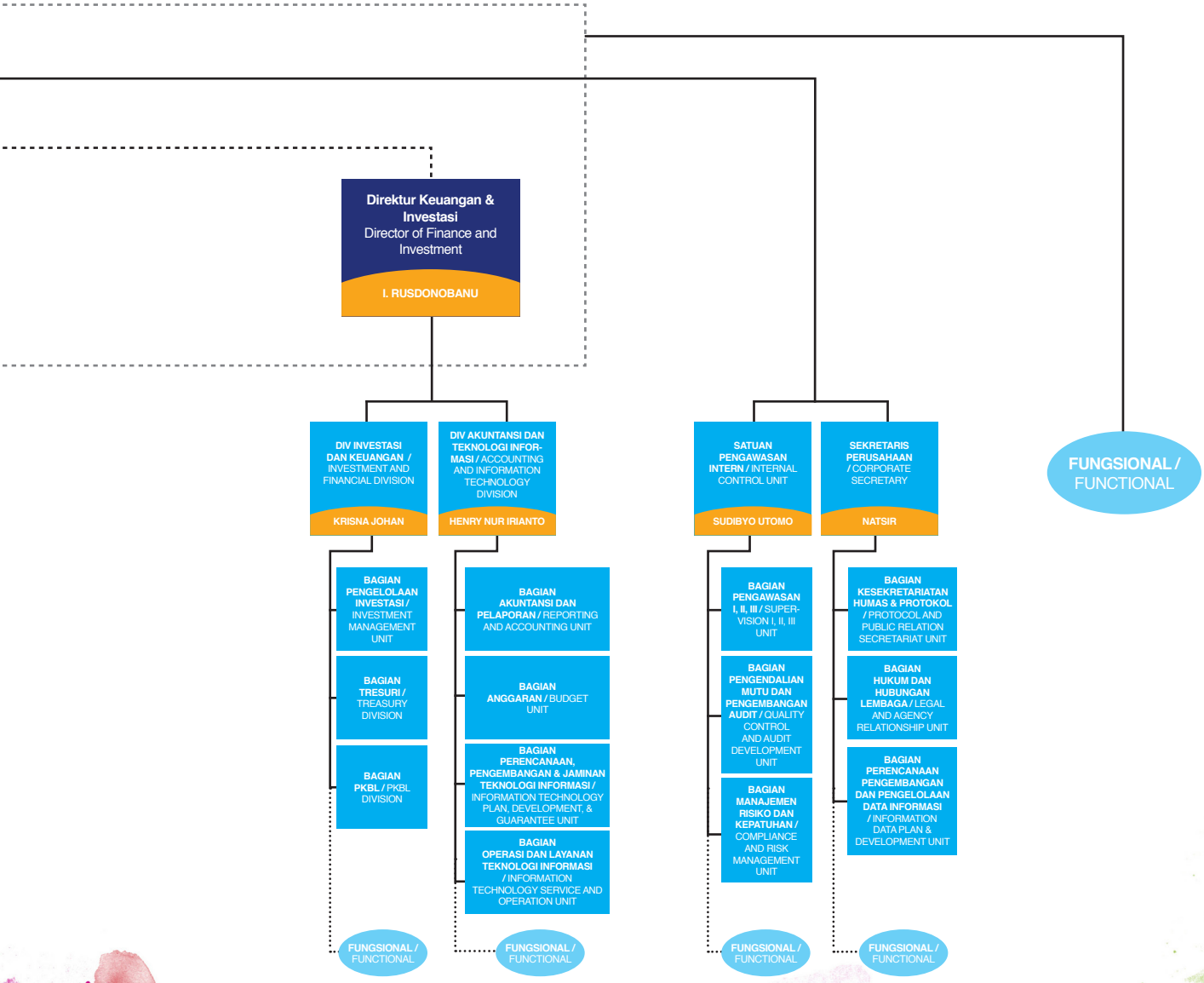
1. Struktur Organisasi Kantor Pusat
2. Struktur Organisasi Kantor Cabang Tipe A
3. Struktur Organisasi Kantor Cabang Tipe B
4. Struktur Organisasi Kantor Cabang Tipe C
5. Struktur Organisasi Kantor Unit Pelayanan (KUP)

As stipulated in the Decree of Board of Directors Number 46/Kep-Dir/III/2014 dated March 10, 2014, Perum Jamkrindo's organization structure is as follows:

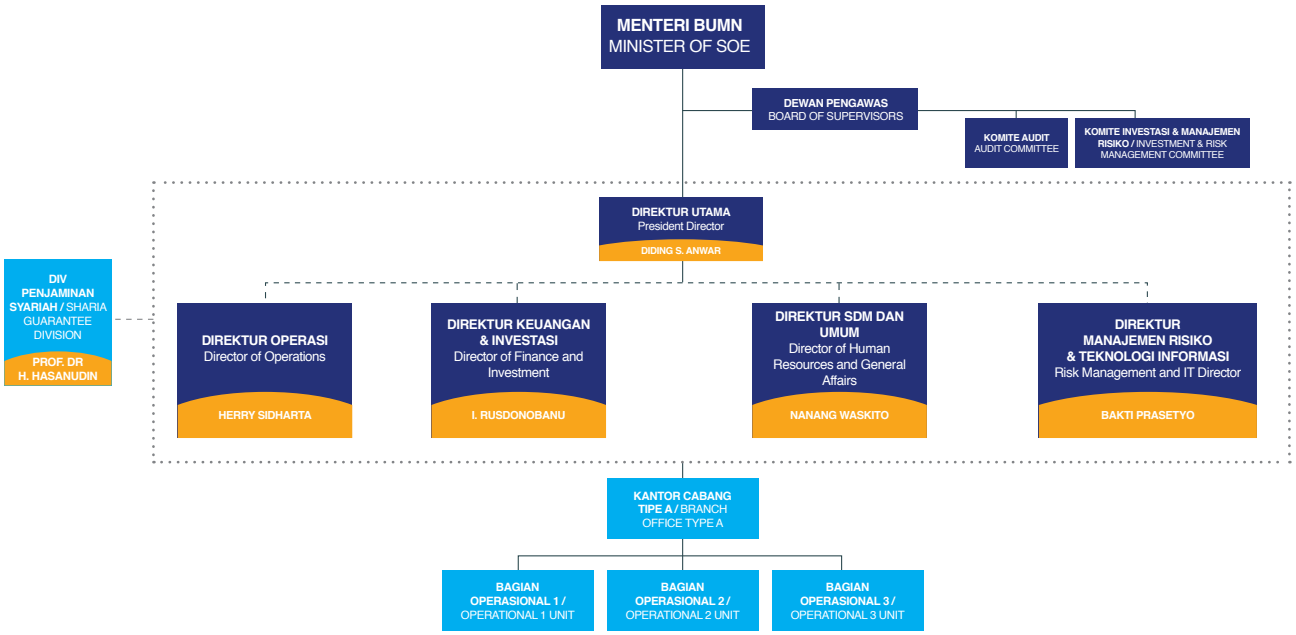
1. Organization Structure in Main Office
2. Organization Structure in Branch Office Type A
3. Organization Structure in Branch Office Type B
4. Organization Structure in Branch Office Type C
5. Organization Structure in Service Unit Office

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PUSAT
ORGANIZATION STRUCTURE IN HEAD OFFICE

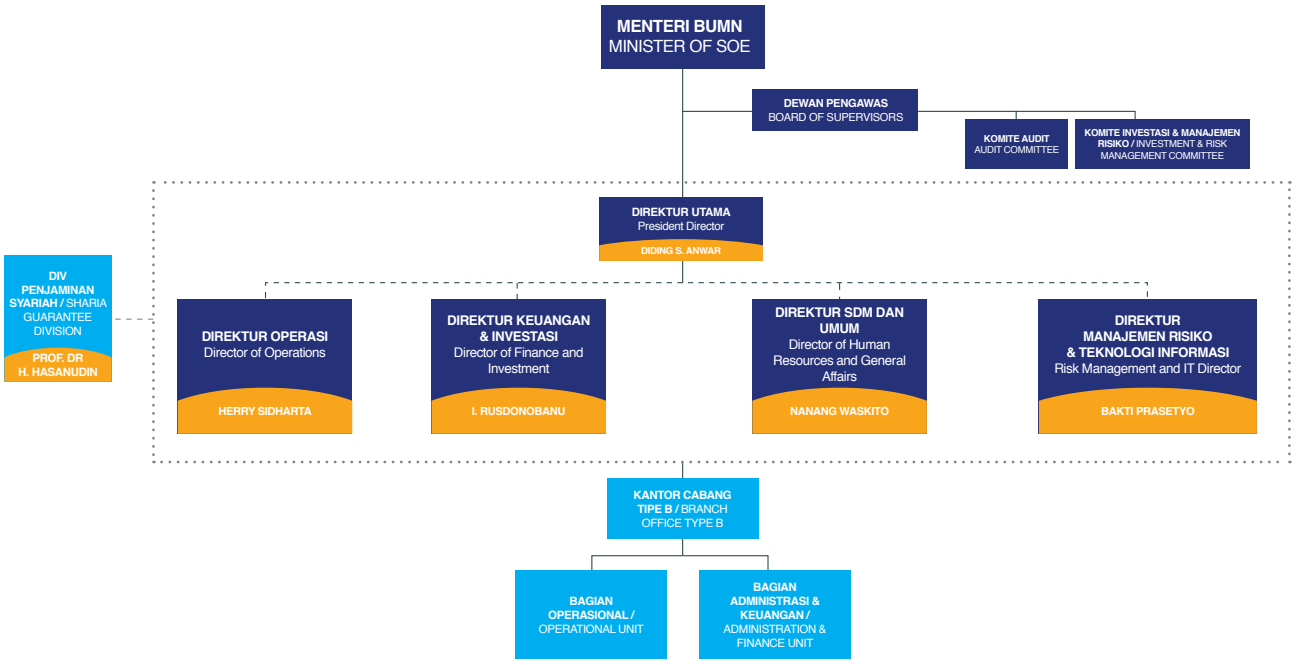



Direktur Keuangan & Investasi
Director of Finance and Investment
I. RUSDONOBANU
DIV INVESTASI DAN KEUANGAN / INVESTMENT AND FINANCIAL DIVISION
KRISNA JOHAN
DIV AKUNTANSI DAN TEKNOLOGI INFORMASI / ACCOUNTING AND INFORMATION TECHNOLOGY DIVISION
HENRY NUR IRIANTO
SATUAN PENGAWASAN INTERN / INTERNAL CONTROL UNIT
SUDIBYO UTOMO
SEKRETARIS PERUSAHAAN / CORPORATE SECRETARY
NATSIR
FUNGSIONAL / FUNCTIONAL
BAGIAN PENGELOLAAN INVESTASI / INVESTMENT MANAGEMENT UNIT
BAGIAN TRESURI / TREASURY DIVISION
BAGIAN PKBL / PKBL DIVISION
FUNGSIONAL / FUNCTIONAL
BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN / REPORTING AND ACCOUNTING UNIT
BAGIAN ANGGARAN / BUDGET UNIT
BAGIAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN & JAMINAN TEKNOLOGI INFORMASI / INFORMATION TECHNOLOGY PLAN, DEVELOPMENT, & GUARANTEE UNIT
BAGIAN OPERASI DAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI / INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE AND OPERATION UNIT
FUNGSIONAL / FUNCTIONAL
BAGIAN PENGAWASAN I, II, III / SUPERVISION I, II, III UNIT
BAGIAN PENGENDALIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN AUDIT / QUALITY CONTROL AND AUDIT DEVELOPMENT UNIT
BAGIAN MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN / COMPLIANCE AND RISK MANAGEMENT UNIT
FUNGSIONAL / FUNCTIONAL
BAGIAN KESEKRETARIATAN HUMAS & PROTOKOL / PROTOCOL AND PUBLIC RELATION SECRETARIAT UNIT
BAGIAN HUKUM DAN HUBUNGAN LEMBAGA / LEGAL AND AGENCY RELATIONSHIP UNIT
BAGIAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA INFORMASI / INFORMATION DATA PLAN & DEVELOPMENT UNIT
FUNGSIONAL / FUNCTIONAL

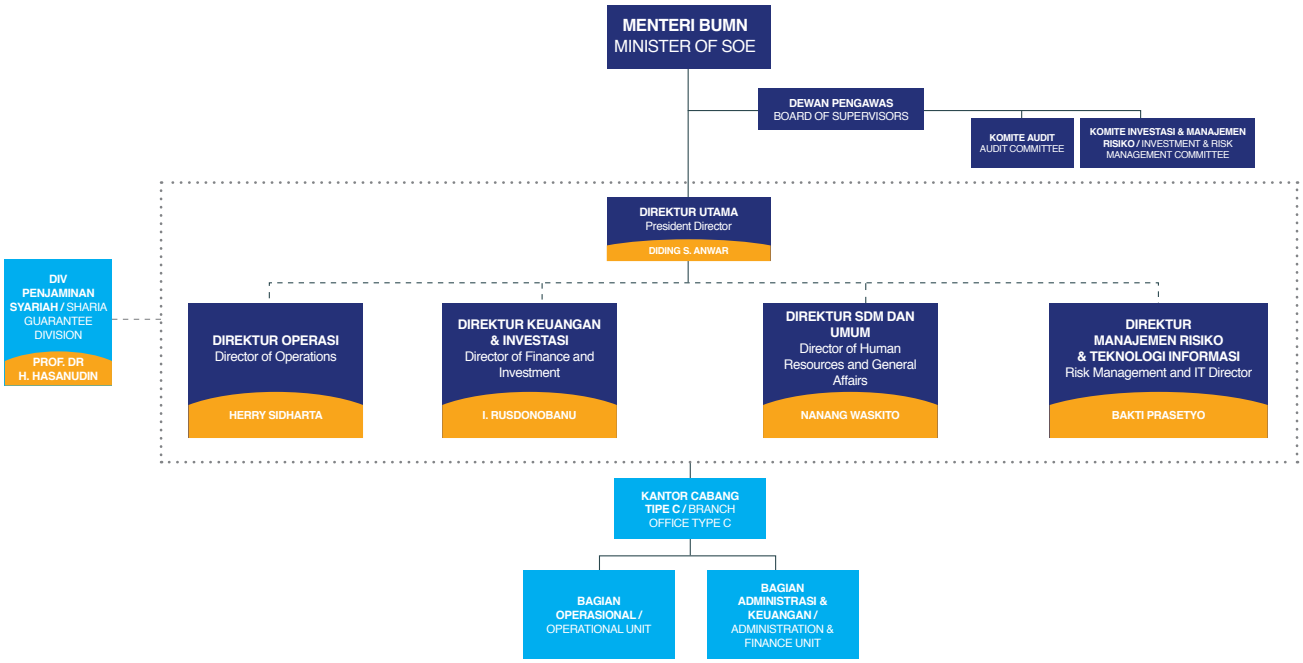
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CABANG TIPE A
ORGANIZATION STRUCTURE IN BRANCH OFFICE TYPE A



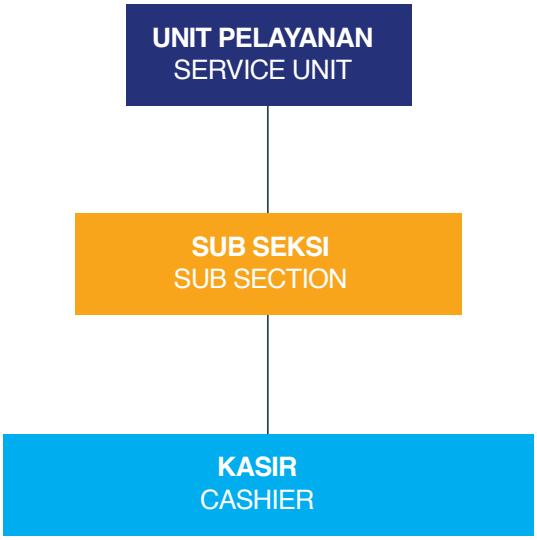
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CABANG TIPE B
ORGANIZATION STRUCTURE IN BRANCH OFFICE TYPE B



STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CABANG TIPE C
ORGANIZATION STRUCTURE IN BRANCH OFFICE TYPE C



STRUKTUR ORGANISASI KANTOR UNIT PELAYANAN (KUP)
ORGANIZATION STRUCTURE IN SERVICE UNIT OFFICE



Profil Dewan Pengawas
Board of Supervisors Profile



Braman Setyo
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of the Board of Supervisors

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-199/MBU/10/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo / Decree of the Minister of State Owned Enterprises (BUMN) as the Shareholder of Perum Jamkrindo No. SK-199/MBU/10/2014 dated October 7, 2014 on the Dismissal and Appointment of the Chairman of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo.
Umur / Age	57 tahun / years old
Warga Negara / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Pendidikan / Education	Magister Ilmu Administrasi Universitas 17 Agustus 1945 pada 1998 / Master's Degree in Administration from 17 Agustus 1945 University in 1998
	Sarjana Ekonomi (Manajemen Perusahaan) Universitas Jember pada 1984 / Bachelor's Degree in Economics, majoring in Corporate Management from Jember University in 1984
Riwayat Pekerjaan / Career History	
2014 - sekarang	Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo / Chairman of the Board of Supervisors, Perum Jamkrindo
2013 - sekarang	Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM RI / Deputy of Business Development and Restructuring Division, Ministry of Cooperatives, Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia
2012-2013	Deputi Bidang Produksi, Kementerian Koperasi dan UKM RI / Deputy of Production Division, the Ministry of Cooperatives, Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia
2006-2011	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur / Head of Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises Department of East Java Province
2005-2006	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jawa Timur / Head of General Affairs Bureau of Regional Secretariat of East Java Province
2005	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Timur / Head of Public Welfare Bureau of Regional Secretariat of East Java Province
2001-2005	Pj. Kepala Bagian Penyusunan Program Setda Provinsi Jawa Timur / Acting Head of Program Planning Division of Regional Secretariat of East Java Province
1994-2001	Kepala Bagian Penyusunan Program Provinsi Jawa Timur / Head of Program Planning Division of Regional Secretariat of East Java Province
1992-2994	Kasubag Penyusunan Rencana Provinsi Jawa Timur / Head of Planning Sub-Division of Regional Secretariat of East Java Province
1991-1992	Kasubag Perhubungan Provinsi Jawa Timur / Head of Transportation Sub-Division of Regional Secretariat of East Java Province



Nasaruddin Umar
Anggota Dewan Pengawas
Member of The Board of Supervisors

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-409/MBU/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo, mengangkat Nasaruddin Umar sebagai Anggota Dewan Pengawas / Decree of the Minister of SOE as the Shareholder of Perum Jamkrindo No. SK-409/MBU/2012 dated November 19, 2012 on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo, appointed Nasaruddin Umar as a Member of the Board of Supervisors.
Umur / Age	56 tahun / years old
Warga Negara / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Pendidikan / Education	S3 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1999 / Doctoral Degree from IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta in 1999
	S2 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1992 / Master's Degree from IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta in 1992
	S1 Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ujung Pandang pada 1984 / Bachelor's Degree in Sharia Education from IAIN Alauddin Ujung Pandang in 1984
Visiting Student	Islamic Study Center Bellagio Milan, Italia / Italy (2005)
	Georgetown University Washington USA (2004)
	Paris University Perancis (1995), SOAS University London (2002)
	Leiden University Belanda (1995)
	Mc.Gill University Canada (1994
Riwayat Pekerjaan / Career History	
2012-sekarang / present	Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo / Member of the Board of Supervisors, Perum Jamkrindo
2011-sekarang / present	Wakil Menteri Agama RI / Vice Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia
2006-2011	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI / General Director of Guidance for Moslem Society (Bimas Islam), Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia
2006-sekarang / present	Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta / Rector of the Institute of Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Jakarta
2004-sekarang / present	Wakil Direktur Pusat Studi Al-Quran (PSQ) / Vice Director of Center for Quranic Studies (PSQ)
2002-sekarang / present	Guru Besar dalam bidang Ilmu Tafsir Pada Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta / Professor of Al-Quran Interpretation (Ilmu Tafsir) of Ushuluddin Faculty of Islamic State University (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta



Ony Suprihartono
Anggota Dewan Pengawas
Member of The Board of Supervisors

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-435/MBU/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo / Decree of the Minister of SOE as the Shareholder of Perum Jamkrindo No. SK-435/MBU/2013 dated December 31, 2013 on the Dismissal and Appointment of Member of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo.
Umur / Ag	45 tahun / years old
Warga Negara / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Pendidikan / Education	Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada pada 2002 / Master of Management from Gadjah Mada University in 2002
	Sarjana Akuntansi Universitas Jenderal Sudirman pada 1995 / Bachelor's Degree in Accounting from Jenderal Soedirman University in 1995
Riwayat Pekerjaan / Career History	
2013-sekarang / present	Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo / Member of the Board of Supervisors, Perum Jamkrindo
2013-sekarang / present	Kepala Biro Perencanaan dan SDM / Head of Planning and HR Bureau
2012-2013	Kabag Perencanaan Kementerian BUMN / Head of Planning Section, Ministry of SOE
2012-2013	Dewan Komisaris PT Jasaraharja Putera / Member of Board of Commissioners, PT Jasaraharja Putera
2010-2012	Direktur Keuangan PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam / Finance Director, PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam
2010-2012	Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun PT Persero Batam / Chairman of Board of Supervisors of Retirement Fund, PT Persero Batam



Subandriyo
Anggota Dewan Pengawas
Member of The Board of Supervisors

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-435/MBU/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo / Decree of the Minister of SOE as the Shareholder of Perum Jamkrindo No. SK-435/MBU/2013 dated December 31, 2013 on the Dismissal and Appointment of Member of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo.
Umur / Age	59 tahun / years old
Warga Negara / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Pendidikan / Education	Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada pada 1981 / Bachelor's Degree in Agriculture from Gadjah Mada University in 1981
Riwayat Pekerjaan / Career History	
2013-sekarang / present	Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo / Member of the Board of Supervisors, Perum Jamkrindo
2008-sekarang / present	Direktur Utama PT Jagadtara Unggul Kreasi / President Director, PT Jagadtara Unggul Kreasi
1991-1997	Direktur Utama PT Kogas Diryap Konsultan / President Director, PT Kogas Diryap Konsultan
1986-1990	Marketing Manager PT Kampsax International, Denmark / Marketing Manager at PT Kampsax International, Denmark
Pengalaman Organisasi / Organization Experience	
2013-sekarang / present	Sekretariat Jenderal Majelis Nasional KAHMI / General Secretary, Majelis Nasional KAHMI
2011-sekarang / present	Salah satu dari tujuh Deklarator pendirian Himpunan Pengusaha KAHMI dan Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI / One of the seven Founders of Himpunan Pengusaha KAHMI and Vice General Chairman of the Central Committee of Himpunan Pengusaha KAHMI
2010-sekarang / present	Wakil Sekretariat Jenderal PP KAGAMA (Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada) / Vice General Secretary, Central Committee of KAGAMA (Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada)
2002-sekarang / present	Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Masyarakat Pengguna Pupuk Organik Indonesia (MAPORINA) / Head of Relations Division, Organic Farming Society of Indonesia (MAPORINA)
2006-sekarang / present	Bendahara Yayasan Yayasan Amal Insani / Treasurer, Amal Insani Foundation



Dahlan Siamat
Anggota Dewan Pengawas
Member of The Board of Supervisors

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-297/MBU/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo, mengangkat Dahlan Siamat sebagai Anggota Dewan Pengawas / Decree of the Minister of SOE as the Shareholder of Perum Jamkrindo No. SK-297/MBU/2013 dated June 28, 2013 on the Dismissal and Shareholder of Member of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo, appointed Dahlan Siamat as a Member of the Board of Supervisors.
Umur / Age	61 tahun / years old
Warga Negara / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Pendidikan / Education	Magister Manajemen Keuangan, STIE IPWI, Jakarta pada 1999 / Master of Financial Management from STIE IPWI, Jakarta in 1999
	Postgraduate Diploma in International Banking and Financial Studies, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland, UK pada 1986 / Postgraduate Diploma in International Banking and Financial Studies from Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland, UK in 1986
	Sarjana Muda Akuntansi di Universitas Jayabaya Jakarta pada 1978 / Baccalaureate Degree in Accounting from Jayabaya University, Jakarta in 1978
Riwayat Pekerjaan / Career History	
2013-sekarang / present	Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo / Member of the Board of Supervisors, Perum Jamkrindo
	Direktur Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan / Director of Sharia Financing, General Directorate of Debt Management of the Ministry of Finance
2004-2006	Salah satu dari tujuh Deklarator pendirian Himpunan Pengusaha KAHMI dan Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI / One of seven declarators of KAHMI Bussinessmen Association establishment and Vice Chairman of Central Governing Body of KAHMI Businessmen Association
2001-2003	Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) / General Directorate of Debt Management (DJPU)
	Pusat Manajemen Obligasi Negara / State Bond Management Center
2000-2001	Unit Manajemen Penagihan Utang / Debt Management Unit
1979-2000	Direktorat Jenderal lembaga Keuangan / General Directorate of Financial Institution
Pengalaman Organisasi / Organization Experience	
2012	Anggota Pleno Dewan Syariah Nasional MUI / Plenary Member of National Sharia Board, MUI
2012	Wakil Ketua Bidang Pengembangan Moneter, Fiskal dan Publik Islami pada Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) / Deputy Head of Islamic Monetary, Fiscal, and Public Development Division, Islamic Economic Society (Masyarakat Ekonomi Syariah - MES)
2012	Anggota Dewan Pembina Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) / Member of Consultative Board, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)
2005	Anggota Finance and Treasury Association (FTA) Australia / Member, Finance and Treasury Association (FTA) Australia

Profil Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board Profile



Hasanudin
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of Sharia Supervisory Board

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Akta Nomor 9 tanggal 26 November 2014 / Deed No. 9 dated November 26, 2014
Umur / Age	70 tahun / years old
Warga Negara / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Pendidikan / Education	S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta / Doctoral Degree from Islamic State University (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta
	S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta / Master's degree from Islamic State University (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta
	S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta / Bachelor's Degree from Islamic State University (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta
Riwayat Pekerjaan / Career History	
2006-sekarang / present	Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perum Jamkrindo (d/h Perum SPU) / Chairman of Sharia Supervisory Board, Perum Jamkrindo (formerly Perum SPU)
2010-sekarang / present	Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indoneisa (MUI) / Chairman of Fatwa Commission, Majelis Ulama Indonesia (MUI)
2000-sekarang / present	Anggota Dewan Syariah Nasional MUI / Member of National Sharia Board, MUI
1998-sekarang / present	Anggota DPS Bank Niaga Syariah / Member of DPS, Bank Niaga Syariah
	Ketua DPS Bank Victoria Syariah / Chairman of DPS, Bank Victoria Syariah
1998-sekarang / present	Guru Besar Tetap Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta / Full-time Professor at Faculty of Sharia, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta



Muhammad Syakir Sula
Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of Sharia Supervisory Board

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Akta Nomor 9 tanggal 26 November 2014 / Deed No. 9 dated November 26, 2014
Umur / Age	51 tahun / years old
Warga Negara / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Pendidikan / Education	Sarjana di bidang Pertanian di Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung / Bachelor's Degree in Agriculture from Padjajaran University (Unpad), Bandung
Riwayat Pekerjaan / Career History	
	Program S2 dan S3 IEF (Islamic Economic & Finance) Universitas Trisakti dan IIIS (International Islamic Insurance Society) / Master and Doctoral Programs of Islamic Economic & Finance (IEF) from Trisakti University and International Islamic Insurance Society (IIIS)
2006-sekarang / present	Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perum Jamkrindo (d/h Perum SPU) / Chairman of Sharia Supervisory Board (DPS) Perum Jamkrindo (formerly Perum SPU)
2010-sekarang / present	Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indoneisa (MUI) / Chairman of Fatwa Commission, Majelis Ulama Indonesia (MUI)
2000-sekarang / present	Anggota Dewan Syariah Nasional MUI / Member of National Sharia Board of MUI
1998-sekarang / present	Anggota DPS Bank Niaga Syariah, Ketua DPS Bank Victoria Syariah / Member of DPS at Bank Niaga Syariah, Chairman of DPS at Bank Victoria Syariah
1998-sekarang / present	Guru Besar Tetap Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta / Full-time Professor at Faculty of Sharia, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
Pengalaman Organisasi / Organization Experience	
	Sekjen MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) / General Secretary, Islamic Economic Society (Masyarakat Ekonomi Syariah - MES)
	Wakil Ketua Umum IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam) / Vice General Chairman, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)
	Ketua III PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah) / Chairman III, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES)
	Ketua Umum IIIS (Internasional Islamic Insurance Society) / General Chairman, International Islamic Insurance Society (IIIS)
	Anggota Pleno DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-MUI) / Plenary Member of National Sharia Board, MUI
	Deputi Ketua Divisi Humas BWI (Badan Wakaf Indonesia) / Deputy Head of Public Relations Division, Badan Wakaf Indonesia (BWI)



Gunawan Yasni
Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of Sharia Supervisory Board

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Akta Nomor 9 tanggal 26 November 2014 / Deed No. 9 dated November 26, 2014
Umur / Age	46 tahun / years old
Warga Negara / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Pendidikan / Education	Magister Manajemen di Prasetiya Mulya pada 1995 / Master of Management from Prasetiya Mulya Business School in 1995
	S1 bidang Ekonomi Akuntansi di Universitas Indonesia pada 1993 / Bachelor's Degree in Accounting from the University of Indonesia in 1993
Riwayat Pekerjaan / Career History	
2006-sekarang / present	Anggota Dewan Pengawas Syariah Perum Jamkrindo / Member of Sharia Supervisory Board, Perum Jamkrindo
	Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Ekspor Indonesia / Member of Sharia Supervisory Board, Bank Ekspor Indonesia
	Anggota Dewan Pengawas Syariah Deutsche Bank Indonesia / Member of Sharia Supervisory Board, Deutsche Bank Indonesia
	Anggota Dewan Pengawas Syariah Asuransi Astra Buana / Member of Sharia Supervisory Board, Astra Buana Insurance
	Anggota Masyarakat Ekonomi Syariah / Member of Islamic Economic Society (Masyarakat Ekonomi Syariah - MES)
	Anggota Pokja Pasar Modal & Program Dewan Syariah Nasional / Member of Capital Market and Program Working Team, National Sharia Board

Profil Direksi
Board of Directors' Profile



Diding S. Anwar
Direktur Utama
President Director

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-316/MBU/2012 tanggal 7 September 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo, mengangkat Diding S. Anwar sebagai Direktur Utama j.o Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-44/MBU/2014 tentang Perubahan Nomenklatur Anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia / Decree of the Minister of SOE as the Shareholder of Perum Jamkrindo No. SK-316/MBU/2012 dated September 7, 2012 on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo, Appointed Mr. Diding S. Anwar as the President Director in conjunction with Decree of the Minister of SOE as the Shareholder of Perum Jamkrindo No. SK-44/MBU/2014 on Change in Nomenclature of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo.
Umur / Age	61 tahun / years old
Warga Negara / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Pendidikan / Education	Doktor Manajemen Pendidikan pada Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Jakarta pada 2002 / Doctoral Degree in Education Management from State University of Jakarta (UNJ), Jakarta in 2002
	Magister Manajemen Keuangan pada Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang pada 1996 / Master of Financial Management from Sriwijaya University (Unsri), Palembang in 1996
	Sarjana Ekonomi di Universitas Pasundan (Unpas) Bandung pada 1989 / Bachelor's Degree in Economics from Pasundan University (Unpas), Bandung in 1989

Riwayat Pekerjaan / Career History	
2012-sekarang / present	Direktur Utama Perum Jamkrindo / President Director, Perum Jamkrindo
2008-2012	Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) / President Director, PT Jasa Raharja (Persero)
2000-2008	Direktur SDM & Umum PT Jasa Raharja (Persero) / HR & General Affairs Director, PT Jasa Raharja (Persero)
1996-2000	Kepala Divisi Litbang PT Jasa Raharja (Persero) / Head of R&D Division, PT Jasa Raharja (Persero)
1994-1996	Kepala Cabang Palembang PT Jasa Raharja (Persero) / Head of Palembang Branch, PT Jasa Raharja (Persero)
Pengalaman Organisasi / Organization Experience	
2012-sekarang / present	Ketua Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) / Chairman, Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo)
2011-sekarang / present	Dewan Pengurus Pusat Kamar Dagang dan Industri (KADIN) / Member of Central Management Board, Chamber of Commerce and Industry (KADIN)
2011-sekarang / present	Dewan Pembina Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) / Member of Consultative Board, Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI)
Pelatihan / Training	
2011	Studi banding ke Bournemouth University di Inggris / Comparative Study to Bournemouth University, UK
2011	The International Insurance Society Annual Seminar di Toronto, Canada / The International Insurance Society Annual Seminar in Toronto, Canada
2011	The University of New South Wales Australia
2003	The Malaysian Insurance MII Institute Malaysia



Bakti Prasetyo
Direktur Penjaminan Bank
Director of Bank Guarantee

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-316/MBU/2012 tanggal 7 September 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo, mengangkat Diding S. Anwar sebagai Direktur Utama j.o Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-44/MBU/2014 tentang Perubahan Nomenklatur Anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. / Decree of the Minister of SOE as the Shareholder of Perum Jamkrindo No. SK-316/MBU/2012 dated September 7, 2012 on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors in conjunction with Decree of the Minister of SOE as the Shareholder of Perum Jamkrinido No. SK-44/MBU/2014 on Change in Nomenclature of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo.
Umur / Age	57 tahun / years old
Warga Negara / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Pendidikan / Education	Magister Manajemen pada Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta pada 2000 / Master of Management from Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta in 2000
	Sarjana Perikanan pada Institut Pertanian Bogor pada 1982 / Bachelor's Degree in Fisheries Science from Bogor Institute of Agriculture in 1982
Riwayat Pekerjaan / Career History	
2013-sekarang / present	Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi Perum Jamkrindo / Director of Risk Management and Information Technology Director, Perum Jamkrindo
2007-2013	Direktur Pengembangan Perum Jamkrindo (d/h Perum SPU) / Development Director, Perum Jamkrindo (formerly Perum SPU)
	Kepala Divisi Pembiayaan Usaha Perum Jamkrindo (d/h Perum SPU) / Head of Business Financing, Perum Jamkrindo (formerly Perum SPU)
	Kepala Divisi Pengembangan dan Perencanaan Usaha Perum Jamkrindo (d/h Perum SPU) / Head of Business Development and Planning, Perum Jamkrindo (formerly Perum SPU)

	Kepala Divisi Penjaminan Bank Perum Jamkrindo (d/h Perum SPU) / Head of Guarantee for Bank Division, Perum Jamkrindo (formerly Perum SPU)
	Kepala Divisi Bisnis Kredit Umum Perum Jamkrindo (d/h Perum SPU) / Head of General Credit Business Division, Perum Jamkrindo (formerly Perum SPU)
	Kepala Biro Usaha I Perum Jamkrindo (d/h Perum SPU) / Head of Business Bureau I, Perum Jamkrindo (formerly Perum SPU)
	Kepala Perum Jamkrindo (d/h Perum SPU) Cabang Semarang / Head of Semarang Branch, Perum Jamkrindo (formerly Perum SPU)
	Kepala Perum Jamkrindo (d/h Perum SPU) Cabang Bandung / Head of Bandung Branch, Perum Jamkrindo (formerly Perum SPU)
Pengalaman Organisasi / Organization Experience	
2012-sekarang / present	Wakil Ketua Asippindo (Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia) / Deputy Chairman, Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo)
	Anggota Komite Harian Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) / Committee Member, Micro Credit Program (Kredit Usaha Rakyat - KUR)
2000	Wakil Sekretaris Jenderal Konferensi ACSIC di Bali / Deputy General Secretary for Conference of Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC) in Bali
	Dewan Pusat Pengembangan Pendampingan Usaha Kecil dan Menengah / Member of the Board of Development and Partnership Center for Small and Medium-sized Enterprises
Pelatihan / Training	
2013	Ceritified Risk Government Professional (CRGP)
	Training dan Konferensi Asian Credit Suplementation Institutions Confederation (ACSIC) di Taiwan, Filipina, dan Jepang / Training and Conference of Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC) in Taiwan, Philippines, and Japan



Nanang Waskito
Direktur Penjaminan Non Bank
Director of Non Bank Guarantee

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-12/MBU/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pemberhentian,Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo, mengangkat Sdr. Nanang Waskito sebagai Direktur SDM dan Umum, Sdr.I Rusdonobanu sebagai Direktur Keuangan dan Investasi Utama j.o Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-44/MBU/2014 tentang Perubahan Nomenklatur Anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia / Decree of the Minister of SOE as the Shareholder of Perum Jamkrindo No. SK-12/MBU/2013 dated January 15, 2013 on the Dismissal, Change in Nomenclature, and the Appointment of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo, appointed Mr. Nanang Waskito as the Director of Human Resources and General Affairs, Mr. Rusdonobanu as the Director of Finance and Investment in conjunction with Decree of the Minister of SOE as the Shareholder of Perum Jamkrindo No. SK-44/MBU/2014 on Change in Nomenclature of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo.
Umur / Age	57 tahun / years old
Warga Negara / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Pendidikan / Education	Magister Manajemen pada Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta pada 2000 / Master's Degree in Management from Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta, 2000
	Sarjana Peternakan pada Institut Pertanian Bogor pada 1981 / Bachelor's Degree in Animal Husbandry from Bogor Institute of Agriculture in 1981.
Riwayat Pekerjaan / Career History	
2013-sekarang / present	Direktur SDM dan Umum Perum Jamkrindo / Director of HR & General Affairs, Perum Jamkrindo
2008-2013	Direktur Perum Jamkrindo / Director, Perum Jamkrindo
2006-2008	Kepala Divisi Hukum, Klaim dan Subrogasi Perum Jamkrindo (d/h Perum SPU) / Head Legal, Claim, and Subrogation Division, Perum Jamkrindo (formerly Perum SPU)
	Sekretaris Perusahaan Perum Jamkrindo (d/h Perum SPU) / Corporate Secretary, Perum Jamkrindo (formerly Perum SPU)

	Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Perum Jamkrindo (d/h Perum SPU) / Head of Business Planning and Development, Perum Jamkrindo (formerly Perum SPU)
	Kepala Divisi Operasional I Perum Jamkrindo (d/h Perum SPU) / Head of Operations Division I, Perum Jamkrindo (formerly Perum SPU)
	Kepala Divisi Penjaminan Bank Perum Jamkrindo (d/h Perum SPU) / Head of Guarantee for Bank Division, Perum Jamkrindo (formerly Perum SPU)
	Kepala Satuan Pengawas InternBank Perum Jamkrindo (d/h Perum SPU) / Head of Internal Audit, Perum Jamkrindo (formerly Perum SPU)
	Kepala Divisi Pengkajian dan Pengembangan Usaha Perum Jamkrindo (d/h Perum SPU) / Head of Business Review and Development, Perum Jamkrindo (formerly Perum SPU)
Pengalaman Organisasi / Organization Experience	
2012-sekarang / present	Sekretaris Jenderal Asippindo (Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia) / General Secretary, Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo)
2012-sekarang / present	Anggota Komite Bidang Asuransi, Pasar Modal, Bursa Berjangka, Broker dan Penjaminan Syariah pada Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) / Committee Member of Insurance, Capital Market, Future Exchange, Brokerage, and Sharia Guarantee Division, Islamic Economic Society (Masyarakat Ekonomi Syariah - MES)
2007	Sekretaris Jenderal Konferensi ACSIC di Bali / General Secretary of Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC) Conference in Bali
Pelatihan / Training	
2013	Ceritified Risk Government Professional (CRGP)
2001-2006	Qualified Internal Auditor (QIA)
	Training dan Konferensi Asian Credit Suplementation Institution Confederation (ACSIC) di Malaysia, Taiwan, Filipina dan Thailand / Training and Conference of Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC) in Malaysia, Taiwan, Philippines, and Thailand
	Penjaminan Syariah (Kafalah) / Sharia Guarantee
	Enterprise Risk Management



Herry Sidharta
Direktur SDM & Umum
Director of HR & General Affairs

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-78/MBU/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Pemberhentian, dan Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo, mengangkat Sdr. Herry Sidharta sebagai Direktur Keuangan j.o Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-44/MBU/2014 tentang Perubahan Nomenklatur Anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia / Decree of the Minister of SOE as the Shareholder of Perum Jamkrindo No. SK-78/MBU/2011 dated March 30, 2011 on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo, appointed Mr. Herry Sidharta as the Shareholder of Finance in conjunction with Decree of the Minister of SOE as the Shareholder of Perum Jamkrindo No. SK-44/MBU/2014 on the Change in Nomenclature of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo
Umur / Age	58 tahun / years old
Warga Negara / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Pendidikan / Education	Master jurusan Manajemen Keuangan di Rensselaer Polytechnic Institute, New York, USA pada 1995 / Master's of Financial Management from Rensselaer Polytechnic Institute, New York, US in 1995
	S1 Jurusan Manajemen Keuangan di Universitas Pancasila Jakarta pada 1982 / Bachelor's Degree in Financial Management from Pancasila University, Jakarta in 1982
Riwayat Pekerjaan / Career History	
2011-sekarang / present	Direktur Operasi dan Umum Perum Jamkrindo / Director of Operations and General Affairs
2010-2011	Senior Vice President for Network & Services PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk / Senior Vice President for Network & Services, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

2009-2010	General Manager (GM) Commercial Division PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk / General Manager (GM) of Commercial Division, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
2008-2009	GM Corporate Division PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk / GM of Corporate Division, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
2006-2008	DGM Commercial Division PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk / Deputy General Manager (DGM) of Commercial Division, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
2005	GM East Java Area PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk / GM of East Java Area PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
2004	GM West Java Area PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk / GM of West Java Area PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
2003	GM Lending Central Java Area & Yogyakarta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk / GM of Lending Central Java Area & Yogyakarta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Pelatihan / Training	
2011	Konferensi Asian Credit Supplementation System Confederation di India / Conference of Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC) in India
2007	Six Sigma Champion Training di Jakarta / Six Sigma Champion Training in Jakarta
2007	Syndicated Master Class, Hong Kong
2007	Risk Management Certifiation Level III Jakata
2005	Advanced Credit



I. Rusdonobanu
Direktur Keuangan, Investasi dan Teknologi Informasi
Director of Finance, Investment and Information Technology

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-12/MBU/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pemberhentian,Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo, mengangkat Sdr. Nanang Waskito sebagai Direktur SDM dan Umum, Sdr.I Rusdonobanu sebagai Direktur Keuangan dan Investasi Utama j.o Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-44/MBU/2014 tentang Perubahan Nomenklatur Anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia / Decree of the Minister of SOE as the Shareholder of Perum Jamkrindo No. SK-12/MBU/2013 dated January 15, 2013 on the Dismissal, Change in Nomenclature, and Appointment of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo, appointed Mr. Nanang Waskito as the Director of Human Resources and General Affairs, Mr. I Rusdonobanu as the Director of Finance and Investment in conjunction with Decree of the Minister of SOE as the Shareholder of Perum Jamkrindo No. SK-44/MBU/2014 on Change in Nomenclature of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo
Umur / Age	56 tahun / years old
Warga Negara / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Pendidikan / Education	Master of Science pada Jurusan Ekonomi North Eastern University Boston USA pada 1995 / Master of Economic Science from North Eastern University, Boston, US, in 1995
	Sarjana bidang Manajemen Perusahaan di Universitas Pancasila pada 1988 / Bachelor's Degree in Business Management from Pancasila University in 1988
Riwayat Pekerjaan / Career History	
2013-sekarang / present	Direktur Keuangan dan Investasi Perum Jamkrindo / Director of Finance and Investment, Perum Jamkrindo
2011	Anggota Komisaris PT Krakatau Steel (Persero) Tbk / Member of the Board of Commissioners, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

2010-sekarang / present	Asisten Deputi Usaha Jasa II Kementerian BUMN / Deputy Assistant of Service Business II, Ministry of SOE
2008-2011	Anggota Komisaris PT Perkebunan Indonesia X / Member of the Board of Commissioners, PT Perkebunan Indonesia X
2006-2010	Asisten Deputi Usaha Perkebunan II Kementerian BUMN / Deputy Assistant of Plantation Business II, Ministry of SOE
2006	Kepala Bidang Usaha Perkebunan IIA Kementerian BUMN / Head of Plantation Business Division IIA, Ministry of SOE
2002-2006	Kepala Bidang Usaha Sarana Produksi Pertanian Kementerian BUMN / Head of Business Division of Agriculture and Production Facilities, Ministry of SOE
	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
	PT Sang Hyang Seri (Persero)
Pelatihan / Training	
2004	Macro Economics of Competitiveness UI/Harvard University
2004	Equity Capital Market di UBS Investment Bank of Hong Kong / Equity Capital Market in UBS Investment Bank of Hong Kong
	Corporate Directors Training Programs
	Peranan Komite Audit / Roles of Audit Committee
	Finance Market & Securities Market, Merril Lynch New York USA
	The Economic Institute Colorado, USA

Profil Pejabat dan Kepala Cabang Perum Jamkrindo

Perum Jamkrindo Officers and Heads of Branch Profile

PEJABAT PERUM JAMKRINDO
OFFICERS OF PERUM JAMKRINDO

No	Jabatan Position	Nama Pejabat Officer Name
1.	Kepala SPI / Head of Internal Audit	Achmad Sonhadji
2.	Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary	M. Natsir Rahamdi
3.	Kepala Divisi Pemasaran Penjaminan Bank / Head of Bank Guarantee Marketing Division	Lies Permana Lestari
4.	Kepala Divisi Teknik Penjaminan Bank / Head of Bank Guarantee Technique Division	Mahfudh Sudiyono
5.	Kepala Divisi Pemasaran Penjaminan Non Bank / Head of Non-Bank Guarantee Marketing Division	Amin Mas'udi
6.	Kepala Divisi Teknik Penjaminan Non Bank / Head of Non-Bank Guarantee Technique Division	Soegeng Iman Wicaksono
7.	Kepala Divisi Penjaminan Syariah / Head of Sharia Guarantee Division	Ceriandri Widuri
8.	Kepala Divisi SDM / Head of HR Division	Nina Kurnia Dewi
9.	Kepala Divisi Umum / Head of General Affairs Division	Erna Zubaida
10.	Kepala Divisi Investasi dan Keuangan / Head of Investment and Finance Division	Krisna Johan
11.	Kepala Divisi Akuntan dan Teknologi Informasi / Head of Accountant and Information Technology Division	Henry Nur Irianto

KEPALA CABANG PERUM JAMKRINDO
HEAD OF BRANCH OFFICES OF PERUM JAMKRINDO

No	Jabatan Position	Nama Pejabat Officer Name
1.	Kepala Kantor Cabang Bandung / Head of Bandung Branch Office	Yanti Rachmawati
2.	Kepala Kantor Cabang Semarang / Head of Semarang Branch Office	Sugeng
3.	Kepala Kantor Cabang Surabaya / Head of Surabaya Branch Office	Hamim Bugi A
4.	Kepala Kantor Cabang Denpasar / Head of Denpasar Branch Office	M. Solihin
5.	Kepala Kantor Cabang DKI Jakarta / Head of DKI Jakarta Branch Office	Suwarsito
6.	Kepala Kantor Cabang Khusus DKI Jakarta / Head of DKI Jakarta Special Branch Office	Aribowo
7.	Kepala Kantor Cabang Medan / Head of Medan Branch Office	Loesdarwanto

No	Jabatan Position	Nama Pejabat Officer Name
8.	Kepala Kantor Cabang Palembang / Head of Palembang Branch Office	Trio Witarko
9.	Kepala Kantor Cabang Makassar / Head of Makassar Branch Office	Untung Heri S.
10.	Kepala Kantor Cabang Pontianak / Head of Pontianak Branch Office	Dadang Iwan Setiawan
11.	Kepala Kantor Cabang Samarinda / Head of Samarinda Branch Office	Achmad Muchlison
12.	Kepala Kantor Cabang Pekanbaru / Head of Pekanbaru Branch Office	Dwi Priyambodo
13.	Kepala Kantor Cabang Palangkaraya / Head of Palangkaraya Branch Office	Dody Novarianto
14.	Kepala Kantor Cabang Kupang / Head of Kupang Branch Office	Wakhyu Hidayattulloh
15.	Kepala Kantor Cabang Mataram / Head of Mataram Branch Office	Arif Aviansyah
16.	Kepala Kantor Cabang Banjarmasin / Head of Banjarmasin Branch Office	Agus Supriadi
17.	Kepala Kantor Cabang Manado / Head of Manado Branch Office	Iwan Hermawan
18.	Kepala Kantor Cabang Jayapura / Head of Jayapura Branch Office	Deden Wahyudi
19.	Kepala Kantor Cabang Jambi / Head of Jambi Branch Office	Juli Sumartana
20.	Kepala Kantor Cabang Yogyakarta / Head of Yogyakarta Branch Office	Sugiyono
21.	Kepala Kantor Cabang Bandar Lampung / Head of Bandar Lampung Branch Office	M. Rinanto Deddy
22.	Kepala Kantor Cabang Aceh / Head of Aceh Branch Office	Abdillah Putra
23.	Kepala Kantor Cabang Tanjung Pinang / Head of Tanjung Pinang Branch Office	Erwin Sugriarta
24.	Kepala Kantor Cabang Padang / Head of Padang Branch Office	Yusra Tanjung
25.	Kepala Kantor Cabang Bengkulu / Head of Bengkulu Branch Office	Alexandry
26.	Kepala Kantor Cabang Serang / Head of Serang Branch Office	M. Robith
27.	Kepala Kantor Cabang Palu / Head of Palu Branch Office	Edi Bangun Susilo
28.	Kepala Kantor Cabang Kendari / Head of Kendari Branch Office	Ilham Prasojo
29.	Kepala Kantor Cabang Pangkal Pinang / Head of Pangkal Pinang Branch Office	Warih Nugroho
30.	Kepala Kantor Cabang Tarakan / Head of Tarakan Branch Office	Eko Sudarto
31.	Kepala Kantor Cabang Gorontalo / Head of Gorontalo Branch Office	Abdul Qadir
32.	Kepala Kantor Cabang Mamuju / Head of Mamuju Branch Office	Heri Surya
33.	Kepala Kantor Cabang Ambon / Head of Ambon Branch Office	Syamsir Syarif
34.	Kepala Kantor Cabang Ternate / Head of Ternate Branch Office	Heryanto Nugroho
35.	Kepala Kantor Cabang Manokwari / Head of Manokwari Branch Office	Diki Achadiyat

Informasi Kepemilikan Saham
Share Ownership Information

Perum Jamkrindo merupakan satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perusahaan Umum (Perum). Oleh karenanya, Perusahaan belum dapat melakukan penawaran saham perdana (*Initial Public Offering* / IPO), sehingga kepemilikan saham 100% ada pada Pemerintah Republik Indonesia.

Perum Jamkrindo is a State-Owned Enterprise (SOE) in the form of Public Corporation (Perusahaan Umum/ Perum). Therefore, the Company has not conducted any Initial Public Offering (IPO); hence, the share ownership of the Company is 100% held by the Government of Republic of Indonesia.

Kronologi Pencatatan Saham
Share Listing Chronology

Dengan status Perum, Perum Jamkrindo belum melakukan IPO sehingga informasi mengenai kronologi pencatatan saham tidak dapat disajikan dalam laporan tahunan ini.

With its status as an Perum, Perum Jamkrindo has not conducted an IPO. Thus, information on share listing chronology cannot be presented in this annual report.

Kronologi Pencatatan Efek Lainnya
Other Securities Listing Chronology

Perum Jamkrindo tidak memiliki pencatatan efek lainnya, sehingga data mengenai kronologis pencatatan efek lainnya tidak dapat ditampilkan.

Perum Jamkrindo does not own any other securities listings. Thus, data on other securities listing chronology cannot be presented.

Lembaga Profesi Penunjang Perusahaan
Professional Institution Supporting Company

Atas Lembaga Profesi Penunjang Perusahaan, kami sampaikan tanggapan mengenai lembaga Pemeringkat Efek.

For Company Supporting Professional Institution, we deliver feedback on the Securities Rating agency.

Notaris / Notary
Yualita Widyadhari, SH.
Gedung TCC Batavia Tower One
Lantai 9 Suite 9,
Jl. KH. Mas Mansur Kav. 126 Jakarta Pusat.
Telp: 021-29529440 / 29529441

Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm
Husni, Mucharam & Rasidi
Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH, No. 178A
Jakarta Selatan 12870
Telp : 021-8351868 / 8313413
Fax : 021-8351978

Pemeringkat Efek / Rating Agency
PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
Panin Tower Senayan City, 17th Floor
Jl. Asia Afrika Lot. 19
Jakarta 10270, Indonesia
Telp: 021-7278 2380
Fax: 021-7278 2370

Konsultan Hukum / Legal Consultant
JAMDATUN
KEJAKSAAN AGUNG R.I
Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia
Telp: 021-7221269

Lembaga Penilai / Rating Agency
Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali
Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat
Telp : 021-310 3768
Fax : 021-310 3230

Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja
Jl. Anggrek III No. 28, Larangan Indah, Cileduk,
Kebayoran Lama – Jakarta Selatan
Telp : 021-587 4378
Fax : 021-584 8635

PT. LAPI-ITB
Gedung B ITB Jl. Ganesha No.15 B Bandung 40132



Informasi Entitas Anak Perusahaan
Information on Subsidiaries Entity

Nama Perusahaan / Company Name	**PT Penjaminan Jamkrindo Syariah**
Tanggal Pendirian / Date of Establishment	16 September 2014 September 16, 2014
Izin Operasional / Operational License	7 November 2014 November 7, 2014
Status Operasional / Operational Status	Beroperasi / Operating
Bidang Usaha / Business Field	Jasa Penjaminan Syariah / Sharia Guarantee Service
Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Perum Jamkrindo **(99,99%)** Koperasi Sarana Sejahtera / Sarana Sejahtera Cooperative **(0,01%)**
Dasar Hukum Pendirian / Legal Basis of Establishment	1. Persetujuan Definitif Kementerian BUMN Surat Nomor: S-536/MBU/2014 tanggal 16 September 2014 tentang Persetujuan Definitif Pendirian Anak Perusahaan PT Jamkrindo Syariah; Definitive Agreement from Ministry of SOE Letter No: S-536/MBU/2014 dated September 16, 2014 regarding Definitive Agreement on the Establishment of PT Jamkrindo Syariah's Subsidiary; 2. Akta Notaris Nomor 68 oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. tanggal 19 September 2014; Notarial Deed No. 68 by Notary Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. dated September 19, 2014; 3. Secara resmi telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-26462.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tanggal 24 September 2014; Has been registered officially in Ministry of Justice and Human Rights No. AHU-26462.40.10.2014 regarding Ratification of the Establishment of Limited Liability Company Law Firm of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dated September 2014; 4. Izin operasional dari OJK melalui surat nomor: KEP-134/D.05/2014 tanggal 07 November 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Syariah Kepada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah; Operational license from OJK through a letter no. KEP-134/D.05/2014 dated November 7, 2014 regarding Business License Granting of Sharia Guarantee Company to PT Penjaminan Jamkrindo Syariah; 5. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-34/NB.223/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pencatatan Produk Baru PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Financial Service Authority letter No. S-34/NB.223/2015 dated January 15, 2015 regarding New Product Listing of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
Alamat Kantor Pusat / Head Office Address	Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Lt.7 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10610
Telepon / Telephone	+6221 6540386
Faksimili / Facsimile	+6221 6540389
Email	info@jamkrindosyariah.com
Website	www.jamkrindosyariah.com
Tagline	"Jamsyar Progresif: Profesional, Gesit, Responsif, dan Inovatif".

Jaringan Kerja Perum Jamkrindo
Perum Jamkrindo Network Services

KANTOR PUSAT
HEAD OFFICE

Wilayah Region	Alamat Address
DKI Jakarta	Gedung Jamkrindo, Jl. Angkasa Blok B-9 Kavling 6 Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10720 Indonesia Telp : (62-21)-6540335 (*hunting*) Fax : (62-21)-6540344,6540348 Website : www.jamkrindo.com E-mail : info@jamkrindo.com

KANTOR CABANG
BRANCH OFFICES

Wilayah Region	Alamat Address
DKI Jakarta	Gedung Jamkrindo, Jl. Angkasa Blok B-9 Kavling 6 Lantai Dasar Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10720 Telp: (021) 6540409 Fax: (021) 6540410 E-mail: jkt@jamkrindo.com
Denpasar	Jl. Hang Tuah No.76 Denpasar, Bali 80228 Telp: (0361) 286 854 Fax: (0361) 286 709 E-mail: dps@jamkrindo.com
Medan	Jl. Sei Serayu No.40 Medan 20121 Telp: (061) 4155 767 Fax: (061) 4156 775 E-mail: mdn@jamkrindo.com
Pekanbaru	Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Komp. Perkantoran Sudirman Raya Blok D-9, Pekanbaru 28282 Telp: (0761) 854311 Fax: (0761) 848801

Wilayah Region	Alamat Address
Samarinda	Jl. Suwondo Parman, Komp. Mall Lembuswana Blok C-6 Samarinda 75123 Telp: (0541) 747 608 Fax: (0541) 206 578 E-mail: smd@jamkrindo.com
Semarang	Jl. Pamularsih No. 68 A Semarang 50148 Telp: (024) 7614136, 7610129 Fax: (024) 7614138 E-mail: smg@jamkrindo.com
Jayapura	Pusat Bisnis Jayapura Ruko Pasifik Permai H No. 17 Dok II Bawah, Jayapura Telp: (0967) 524 424 Fax: (0967) 524 423 E-mail: jyp@jamkrindo.com
Mataram	Komplek Ruko Airlangga Square No. 3 Jl. Airlangga Mataram NTB 83125 Telp: (0370) 644 573 Fax: (0370) 644 572 E-mail: mtm@jamkrindo.com

Wilayah Region	Alamat Address
Palangkaraya	Jl. Christopel Mihing No. 31 Palangka Raya 73111 Telp : (0536) 3226 895 Fax : (0536) 3242 394 E-mail : plk@jamkrindo.com
Yogyakarta	Jl. Parangtritis KM 1 No. 96 Kel. Brontokusuman, Kec. Mergansan Yogyakarta 55221 Telp: (0274) 375 989 Fax: (0274) 377 965 E-mail: ygy@jamkrindo.com
Bandung	Jl. Soekarno Hatta Km. 12 No. 722, Gedebage, Bandung - 40294 Telp: (022) 781 6267/68 Fax: (022) 780 1890 E-mail: bdg@jamkrindo.com
Makassar	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 140 Makassar 90125 Telp: (0411) 873 031 Fax: (0411) 872 707 E-mail: mks@jamkrindo.com
Palembang	Jl. Residen Abdul Razak No.188-189 Kel. Kalidoni, Palembang 30114 Telp: (0711) 720 996 Fax: (0711) 720 995 E-mail: plb@jamkrindo.com
Pontianak	Jl. Teuku Umar, Komp. Perkantoran Pontianak Mall Blok B/24, Pontianak Telp: (0562) 749 095 Fax: (0562) 746 148 E-mail: ptk@jamkrindo.com
Surabaya	Jl. Raya Bandara Juanda Km. 2-3 Surabaya 60292 Telp: (031) 867 3827, 867 3828 Fax: (031) 867 3826 E-mail: sby@jamkrindo.com

Wilayah Region	Alamat Address
Banjarmasin	Jl. A. Yani Km. 4,6 No. 56 Banjarmasin 70235 Telp: (0511) 327 3345 Fax: (0511) 327 3435 E-mail: bjm@jamkrindo.com
Kupang	Ruko Oebufu Permai K Jl. Perintis Kemerdekaan II, Oebufu Kupang, NTT - 85111 Telp: (0380) 855 3899 Fax: (0380) 855 4088 E-mail: kpg@jamkrindo.com
Manado	Jl. RE. Marthadinata No. 6 Manado Telp: (0431) 865 194, 865 198 Fax: (0431) 873 758 E-mail: mnd@jamkrindo.com
Jambi	Jl. Prof. Dr. M. Yamin no.30 Kel. Payo Lebar, Kec. Jelutung Jambi 36136 Telp: (0741) 668 707 Fax: (0741) 668 115 E-mail: jmb@jamkrindo.com
Bandar Lampung	Jl. Teuku Umar No. 10 E - F Kedaton, Bandar Lampung 35141 Telp: (0721) 778 511 Fax: (0721) 778 513 E-mail: lmp@jamkrindo.com
Palu	Jl. Dewi Sartika No. 58 C Palu Selatan - Sulawesi Tengah Telp: (0451) 488266 Fax: (0451) 488266
Tanjung Pinang	Komp. Ruko Pamedan No. 6 Jl. Raja Ali Haji Tanjung Pinang 29124 Telp: (0771) 316919 Fax: (0771) 316074

Wilayah Region	Alamat Address
Padang	Jl. Khatib Sulaiman No. 47C Padang- 25136 Telp: (0751) 7050598 Fax: (0751) 447165
Banda Aceh	Jl. T. Nyak Arief No. 166, Jeulingke Banda Aceh Telp: (0651) 7552439 Fax: (0651)7551982
Serang	Jl. Jend Sudirman No. 38C Serang, Banten 42124 Telp: (0254) 228999 Fax: (0254) 229247
Bengkulu	Komp. Ruko Gading Residence City No. 6 Jl. Fatmawati - Kelurahan Penurunan Bengkulu - 38228 Telp: (0736) 344541 Fax: (0736) 344249
Kendari	Jl. Sao Sao No. 285 Kendari, Sulawesi Tenggara 93117 Telp: (0401) 3196780 Fax: (0401) 3196764
Mamuju	Jl. R E Matadinata No. 11 Simboro - Sulawesi Barat Mamuju 91512 Telp: (0426) 2324878 Fax: (0426) 2324979
Gorontalo	Jl. HB Yassin (d/h Jl. Agus Salim) No. 222 Gorontalo 96115 Telp: (0435) 828003 Fax: (0435) 828002

Wilayah Region	Alamat Address
Ternate	Jl Inpres No. 7 Ubo Ubo Tobona - Maluku Utara Ternate - 97728 Telp: (0921) 3122793 Fax: (0921) 3122739
Tarakan	Jl. Cendrawasih RT 004 Karanganyar Pantai - Tarakan Barat Tarakan - 77112 Telp: (0551) 30448 Fax: (0551) 30494
Pangkal Pinang	Jl. R E Martadinata No. 150 B Pangkal Pinang 33127 Telp: (0717) 432837 Fax: (0717) 436816
Manokwari	Jl. Trikors Wosi Papua Barat - Manokwari 98312 Telp: (0986) 214184 Fax: (0986)214185
Ambon	Jl. Dr. J. B Sitanala No. 12 Wainitu - Ambon 97115 Telp: (0911) 351770 Fax: (0911) 351797
Kantor Cabang Khusus DKI Jakarta / Jakarta Special Branch Office	Gedung Jamkrindo Lantai Dasar Jl. Angkasa Blok B-9 Kavling 6 Kota Baru - Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10610 Telp : (021) 6586 8280 Fax : (021) 6586 8278 E-mail : jkk@jamkrindo.com

Peta Operasional

Operational Map



KANTOR CABANG / BRANCH OFFICES:

Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Lampung, Palu, Tanjung Pinang, Padang, Banda Aceh, Serang, Bengkulu, Kendari, Mamuju, Gorontalo, Ternate, Pangkal Pinang, Tarakan, Manokwari, Ambon Yogyakarta, Pekanbaru, Pontianak, Palembang, Samarinda, Medan, Kupang, Jambi, Palangkaraya, Mataram, Banjarmasin, Manado, dan Jayapura.


Manado
Gorontalo
Ternate
Palu
Manokwari
Mamuju
Ambon
Jayapura
Kendari
Makassar
Kupang
N
W
E
S


Usaha
dengan



TINJAUAN UNIT PENDUKUNG BISNIS

OVERVIEW OF SUPPORTING BUSINESS UNIT

Laporan Direktur SDM dan Umum
Report from Director of Human Resources and General Affairs



Herry Sidharta
Direktur SDM & Umum
Director of HR & General Affairs

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Dear Honored Stakeholders,

Sepanjang 2014, Direktorat SDM dan Umum telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendukung pencapaian target perusahaan dengan cukup baik. Hal ini ditandai dengan tercapainya penilaian berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) dalam beberapa sasaran strategis.

Throughout 2014, Directorate of Human Resource and General Affairs had conducted its duties and functions to support the Company's targets achievements. It is proved by the achievement of assessment based on Key Performance Indicators (KPI) in several strategic targets.

Pangsa pasar jasa penjaminan kredit di Indonesia yang masih sangat luas membuat Perusahaan membutuhkan SDM yang kompeten dengan melakukan pelatihan dan pendidikan secara berkesinambungan dan berjenjang. Untuk memenuhi kebutuhan SDM, kami telah melakukan rekrutmen karyawan profesional untuk ditetapkan sebagai pejabat stuktural yang berpengalaman sebanyak 10 orang atau berkontribusi sebesar 2% dari total jumlah karyawan pada 2014. Sedangkan untuk rekrutmen tenaga kerja dengan status tenaga kerja kontrak waktu tertentu (KKWT) profesional untuk melakukan pendampingan dan asistensi yang tersebar di beberapa unit kerja sebanyak

Vast market share of credit guarantee service in Indonesia requires the Company to employ competent human resources by conducting in-tier sustainable training and education. To fulfill the need for human resources, we had recruited 10 professional employees or 2% of total employees to be placed as structural officials who have experiences in their fields in 2014. Meanwhile, the Company had recruited 9 workers with Temporary Contract Worker status to conduct an assistance in several work units, and 21 workers with Temporary Contract Workers status in the head office. Thus, total employees of Perum Jamkrindo in 2014 were 501 employees. This number decreases by

9 orang serta rekrutmen KKWT di kantor pusat sebanyak 21 orang. Maka, jumlah karyawan Perum Jamkrindo pada 2014 sebanyak 501 karyawan. Jumlah tersebut mengalami penurunan 2,39% dibandingkan dengan tahun 2013 yang tercatat sebanyak 513 karyawan. Penurunan ini merupakan dampak dari adanya beberapa karyawan Perum Jamkrindo yang mengalami masa purna tugas/ pensiun dan mengundurkan diri.

2.39% compared with 2013, which was recorded at 513 employees. The decrease is because there were several Employees of Perum Jamkrindo who retired and resigned.

Selain itu, dalam rangka memonitor tingkat kepuasan kerja karyawan untuk mengetahui kinerja dan harapan karyawan, kami melakukan survei kepuasan karyawan yang dilakukan di seluruh wilayah kerja Perusahaan melalui kuisioner kepada 546 responden yang meliputi KKWT, Calon Karyawan, Karyawan Tetap dan *Prohire*. Menurut angka indeks kepuasan dan loyalitas karyawan Perum Jamkrindo dilihat dari tingkat nasional indeks kepuasan karyawan mengalami kenaikan dari tahun 2013 ke tahun 2014, yakni sebesar 66,63 menjadi 67,65 yang termasuk dalam kategori BAIK. Sedangkan indeks loyalitas karyawan secara nasional dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami sedikit penurunan, yakni sebesar 71,19 menjadi 71,07 yang termasuk dalam kategori BAIK.

Furthermore, to monitor satisfaction level of employees' performance, we conducted employee satisfaction survey in all Company's work areas through questioners which were distributed to 546 respondents including KKWT, Prospective Employees, Permanent Employees and Prohire. According to employee satisfaction index and loyalty of Perum Jamkrindo, which is reflected on national employee satisfaction index, the employee satisfaction index increases from the previous year which was 66.63, to 67.65 in 2014, which is in "GOOD" category. Meanwhile, national employee loyaty index slightly decreases, from the previous year which was 71.19, to 71.07 in 2014, categorized as "GOOD".

Kami berkomitmen tinggi untuk selalu meningkatkan kualitas karyawan sebagai salah satu kunci utama penentu keberlangsungan Perusahaan. Salah satu sarana peningkatan kualitas dilakukan melalui program pelatihan dan pendidikan karyawan. Pada 2014, terdapat 1.786 karyawan yang diikutsertakan diklat untuk meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Jumlah ini bertumbuh sebesar 59,18% dari jumlah tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan kualitas SDM yang kami miliki, kamipun menugaskan kepada 12 orang karyawan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang S2 di dalam maupun luar negeri. Jumlah ini bertumbuh sebesar 100% dari tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan kesungguhan kami untuk meningkatkan kemampuan SDM bukan hanya dari segi kuantitas, tapi juga kualitas.

We have high commitment to always improve the quality of our employees as the main determination key of the Company's sustainability. One of the facilities to increase the quality of employees is through training and education. In 2014, there are 1,786 employees that attended education and training program to increase the competency required by the Company. This number grew by 59.18% from the previous year. To improve the quality of human resources in the Company, we assigned 12 employees to continue their studies to postgraduate studies inside or outside the country. This number increases by 100% from the previous year, which proves our commitment to improve human resources' capability, not only its quantity but also quality.

Sumber Daya Manusia
Human Resources

Pengelolaan SDM yang berkesinambungan, diharapkan dapat menciptakan SDM yang unggul dan profesional dalam jumlah yang memadai berdasarkan keahlian.

Continuous HR management is expected to create excellent and professional human resources in adequate number based on their expertise.



Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang menjadi kunci tercapainya pertumbuhan perusahaan yang berkesinambungan. Konsep pengelolaan SDM Perum Jamkrindo senantiasa dikembangkan dalam rangka menciptakan pertumbuhan Perusahaan yang berkelanjutan. Pengembangan kompetensi SDM dilakukan sesuai tingkatan karyawan yang dirancang tidak hanya berfokus pada kompetensi teknis SDM sesuai bisnis Perusahaan semata. Pengembangan yang dilakukan juga mampu mencetak SDM yang dapat menjadi anggota tim yang solid dan dapat melayani masyarakat Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dengan baik.

Pengelolaan SDM yang berkesinambungan, diharapkan dapat menciptakan SDM yang unggul dan profesional dalam jumlah yang memadai berdasarkan keahlian. Dengan terwujudnya hal tersebut, Perum Jamkrindo mampu mewujudkan komitmen perusahaan dalam melakukan yang terbaik bagi pelanggan serta mendukung keberhasilan perusahaan dalam mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan.

PROFIL SDM

Pada 2014, jumlah karyawan Perum Jamkrindo berjumlah 501 karyawan. Jumlah tersebut mengalami penurunan 2,33% dibandingkan dengan 2013 yang tercatat sebanyak 513 karyawan. Penurunan ini merupakan dampak dari adanya beberapa karyawan Perum Jamkrindo

Human resources is one of the elements that become key to achieving continuous growth of the Company. The concept of HR management of Perum Jamkrindo is continuously developed to create sustainable growth for the Company. HR competency development is conducted according to the employee's position level, which is designed not only to focus on HR's technical competency that relates to the Company's business. The development program that is carried out also succeeds to create human resources that can become a solid team member who can serve the community of Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperative (UMKMK).

Continuous HR management is expected to create excellent and professional human resources in adequate number based on their expertise. When this happens, Perum Jamkrindo will be able to realize the Company's commitment to do the best for customers and support the Company's success in implementing the strategy that has been established.

HR PROFILE

In 2014, total employees of Perum Jamkrindo were 501 people, a decrease of 2.33% compared with 2013 at 513 employees. The number decreases because there were several employees who are retired and resigned. To overcome this employee shortage, the Company has

yang mengalami masa purna tugas atau pensiun dan mengundurkan diri. Dalam rangka mengatasi pengurangan karyawan, Perusahaan telah merekrut tenaga-tenaga profesional yang telah memiliki pengalaman di bidang yang dibutuhkan Perusahaan (*prohire*).

recruited professionals that has work experience in the relevant field (prohire).

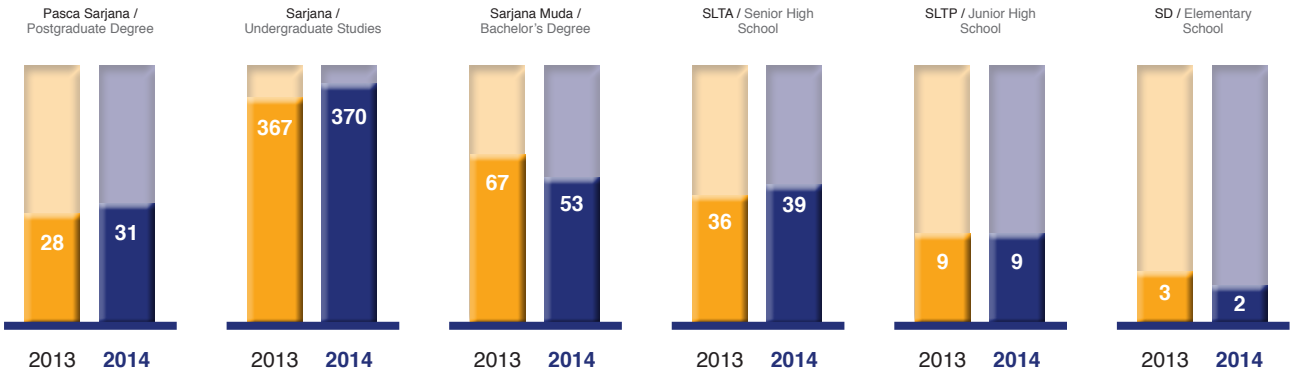
Berikut rincian mengenai perkembangan komposisi karyawan yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan, level jabatan, status kepegawaian dan gender.

The following is detail on the development of employee composition classified based on educational level, position level, employment status, and gender.

Tabel 2.1. Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Table 2.1. Employee Composition Based on Educational Level

Tingkat Pendidikan / Education	2014		2013		**Persentase /** Percentage
	Jumlah / Total	%	**Jumlah /** Total	%	
Pasca Sarjana / Postgraduate Studies	31	6,19%	28	5,46%	10,71%
Sarjana / Undergraduate Studies	370	73,85%	367	71,54%	0,81%
Sarjana Muda / Bachelor's Degree	53	10,58%	67	13,06%	-20,89%
SLTA / Senior High School	36	7,19%	39	7,60%	-7,69%
SLTP / Junior High School	9	1,80%	9	1,75%	0%
SD / Elementary School	2	0,40%	3	0,58%	-33,33%
Jumlah / Total	**501**	**100,00%**	**513**	**100,00%**	



Kebutuhan akan SDM yang berkualitas menjadi tuntutan Perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. Melalui program tugas belajar atau beasiswa S2, Perusahaan menugaskan beberapa karyawan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Selain itu, dalam proses perekrutan karyawan-karyawan profesional berpengalaman, Perusahaan mengutamakan tingkat pendidikan terakhir, sekurang-kurangnya Pasca Sarjana.

The needs for qualified human resources become demand for the Company to develop its business. Through studying program or scholarship for Master's degree, the Company assigns several employees to pursue higher education to obtain Master's degree. In addition, in the process of recruiting professional and experienced employees, the Company prioritizes those with Master's degree as their last degree.

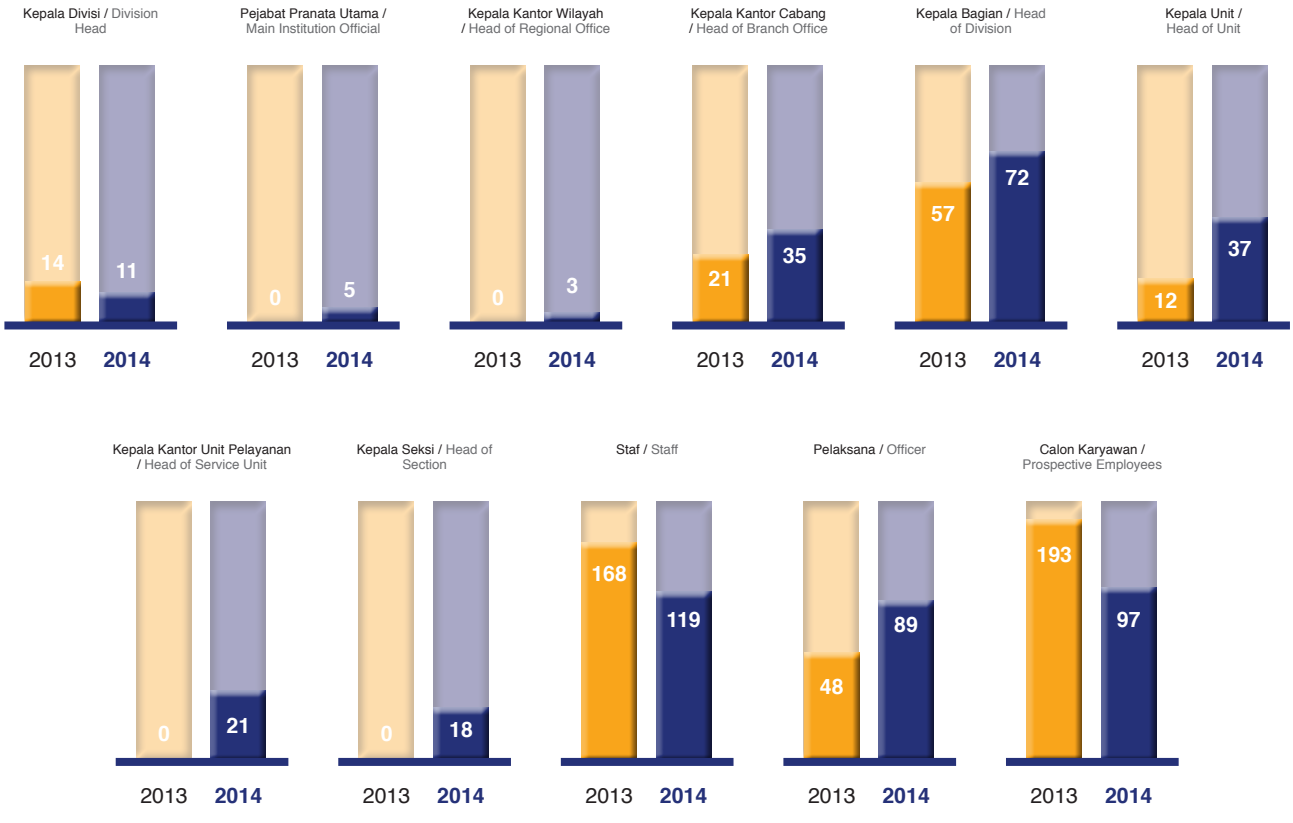
Sebagaimana tabel 2.1. terlihat jumlah karyawan dengan tingkat pendidikan Pasca Sarjana meningkat 10,71% dibandingkan tahun 2013.

As shown in 2.1 table, the number of employees with Master's degree increased 10.71% compared with that of 2013.

Tabel 2.2. Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan

Table 2.2. Employee Composition Based on Position Level

Jabatan / Position	**2014**	**2013**	**Persentase** / Percentage
Kepala Divisi / Division Head	11	14	-27,27%
Pejabat Pranata Utama / Main Institution Official	5	0	100,00%
Kepala Kantor Wilayah / Head of Regional Office	3	0	100,00%
Kepala Kantor Cabang / Head of Branch Office	35	21	40,00%
Kepala Bagian / Head of Division	72	57	20,83%
Kepala Unit / Head of Unit	31	12	61,29%
Kepala Kantor Unit Pelayanan / Head of Service Unit	21	0	100,00%
Kepala Seksi / Head of Section	18	0	100,00%
Staf / Staff	119	168	-41,18%
Pelaksana / Officer	89	48	46,07%
Calon Karyawan / Prospective Employees	97	193	-98,97%
Jumlah / Total	**513**	**501**	



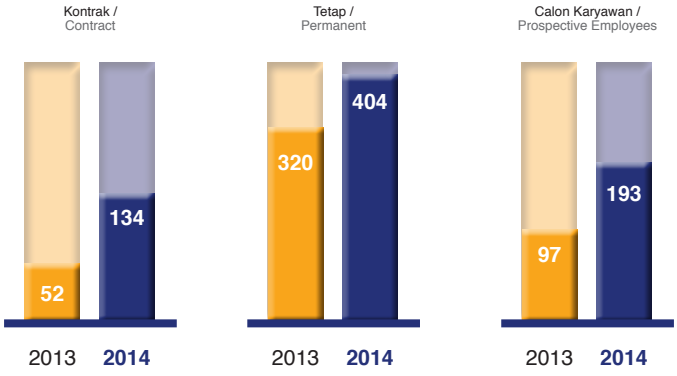
Sebagaimana tabel 2.2. terjadi perubahan yang signifikan terhadap jumlah karyawan yang menduduki jabatan. Hal tersebut terjadi karena pada 2014, terjadi perubahan struktur organisasi melalui Keputusan Direksi Nomor 46/Kep-Dir/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Struktur Organisasi. Selain itu, pada 2014 terjadi pembentukan anak perusahaan dengan nama PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, yang menyebabkan beberapa karyawan ditugaskan pada anak perusahaan tersebut, termasuk 3 (tiga) orang Direksi Anak Perusahaan (Pranata Utama).

As shown in the table 2.2., there was a significant change in the number of employees that fills the position because of organizational structure change in 2014 through Decree of Board of Directors Number 46/Kep-Dir/III/2014 dated March 10, 2014 concerning Organizational Structure. In addition, a subsidiary was formed under the name PT Penjaminan Jamkrindo Syariah in 2014. Consequently, a number of employees were assigned to serve in the subsidiary, including 3 (three) Directors of the Subsidiary.

Tabel 2.3. Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Table 2.3. Employee Composition Based on Employment Status

Status / Status	**2014**	**2013**	**Persentase /** Percentage
Kontrak / Contract	134	52	61,19%
Tetap / Permanent	404	320	20,79%
Calon Karyawan / Prospective Employees	97	193	-98,97%
Jumlah / Total	**635**	**565**	



Pada 2014, jumlah calon karyawan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini karena pada Juli 2014, terjadi peningkatan status calon karyawan menjadi karyawan tetap Perusahaan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai staf. Meningkatnya status karyawan kontrak untuk mendukung percepatan tercapainya program-program kerja pada beberapa unit kerja.

In 2014, the number of prospective employees declined compared with the previous year. This is because in July 2014, there was a change in status of the prospective employees, in which they become a full-time one, both for the officer and staff. Upgrading the status of contract employee to support the acceleration of the completion of work programs in a number of working units.

Tabel 2.4. Komposisi Karyawan Berdasarkan Gender **Table 2.4. Employee Composition based on Gender**

No	Unit Kerja / Work Units	2014			2013		
		L / M	P / F	Jumlah / Total	L / M	P / F	Jumlah / Total
1	Kantor Pusat / Head Office	87	70	157	87	60	147
2	Kantor Wilayah I / Regional Office I	3	0	3	3	0	3
3	Kantor Wilayah II / Regional Office II	5	1	6	5	1	6
4	Kantor Wilayah III / Regional Office III	5	1	6	5	1	6
5	Kantor Cabang Jakarta / Jakarta Branch Office	11	9	20	11	9	20
6	Kantor Cabang Khusus Jakarta / Jakarta Special Branch Office	6	3	9	6	3	9
7	Kantor Cabang Bandung / Bandung Branch Office	15	6	21	15	6	21
8	Kantor Cabang Semarang / Semarang Branch Office	9	9	18	9	9	18
9	Kantor Cabang Surabaya / Surabaya Branch Office	14	6	20	14	6	20
10	Kantor Cabang Jayapura / Jayapura Branch Office	5	1	6	5	1	6
11	Kantor Cabang Denpasar / Denpasar Branch Office	6	11	17	6	11	17
12	Kantor Cabang Mataram / Mataram Branch Office	7	3	10	7	3	10
13	Kantor Cabang Kupang / Kupang Branch Office	10	2	12	10	2	12
14	Kantor Cabang Makasar / Makassar Branch Office	9	5	14	9	5	14
15	Kantor Cabang Manado / Manado Branch Office	7	2	9	7	2	9
16	Kantor Cabang Pontianak / Pontianak Branch Office	7	7	14	7	7	14
17	Kantor Cabang Palangkaraya / Palangkaraya Branch Office	5	4	9	5	4	9
18	Kantor Cabang Samarinda / Samarinda Branch Office	5	7	12	5	7	12
19	Kantor Cabang Banjarmasin / Banjarmasin Branch Office	7	4	11	7	4	11
20	Kantor Cabang Palembang / Palembang Branch Office	9	6	15	9	6	15
21	Kantor Cabang Jambi / Jambi Branch Office	4	3	7	4	3	7
22	Kantor Cabang Pekanbaru / Pekanbaru Branch Office	9	4	13	9	4	13
23	Kantor Cabang Medan / Medan Branch Office	7	6	13	7	6	13

No	Unit Kerja / Work Units	2014			2013		
		L / M	P / F	Jumlah / Total	L / M	P / F	Jumlah / Total
24	Kantor Cabang Yogyakarta / Yogyakarta Branch Office	4	1	5	4	1	5
25	Kantor Cabang Bandar Lampung / Bandar Lampung Branch Office	4	1	5	4	1	5
26	Kantor Cabang Tarakan / Tarakan Branch Office	2	-	2	2	-	2
27	Kantor Cabang Bengkulu / Bengkulu Branch Office	3	-	3	3	-	3
28	Kantor Cabang Pangkal Pinang / Pangkal Pinang Branch Office	3	-	3	3	-	3
29	Kantor Cabang Ternate / Ternate Branch Office	2	-	2	2	-	2
30	Kantor Cabang Serang / Serang Branch Office	2	1	3	2	1	3
31	Kantor Cabang Palu / Palu Branch Office	3	-	3	3	-	3
32	Kantor Cabang Aceh / Aceh Branch Office	2	1	3	2	1	3
33	Kantor Cabang Tanjung Pinang / Tanjung Pinang Branch Office	2	1	3	2	1	3
34	Kantor Cabang Padang / Padang Branch Office	2	1	3	2	1	3
35	Kantor Cabang Gorontalo / Gorontalo Branch Office	2	-	2	2	-	2
36	Kantor Cabang Mamuju / Mamuju Branch Office	2	-	2	2	-	2
37	Kantor Cabang Kendari / Kendari Branch Office	3	-	3	3	-	3
38	Kantor Cabang Ambon / Ambon Branch Office	2	-	2	2	-	2
39	Kantor Cabang Manokwari / Manokwari Branch Office	2	-	2	2	-	2
40	Kantor Unit Pelayanan Kab/ Kota / Service Unit Office at the Regency/City	12	9	21	12	9	21
41	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	6	6	12	6	6	12
Jumlah / Total		**310**	**191**	**501**	**310**	**191**	**501**

Pada 2014, terdapat penambahan karyawan sebesar 10 orang.

In 2014, there was an increase employees at 10 people.

JUMLAH KARYAWAN KELUAR (TURNOVER)

Data jumlah karyawan keluar (turn over) pada 2014 terdiri dari pensiun normal, pensiun dini, mengundurkan diri dan meninggal dunia.

TOTAL EMPLOYEES THAT RESIGNED

Data of total employees that resigned (turnover) in 2014 comprises of employees who had normal pension, early pension, resigned, and passed away.

Tabel 2.5. *Turnover* Karyawan

Table 2.5. Employee Turnover

No	**Karyawan Keluar /** Employees that Resigned	**Jumlah /** Total
1	Pensiun normal / Normal Pension	8
2	Pensiun dini / Early Pension	0
3	Mengundurkan diri / Resigned	15
4	Meninggal dunia / Deceased	0
Jumlah / Total		23

ROTASI DAN MUTASI KARYAWAN

Mutasi jabatan dan/atau mutasi unit kerja dapat diadakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas perusahaan dan pembinaan pegawai, termasuk di dalamnya perencanaan karir.

Kewenangan mutasi dan penempatan karyawan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Kantor Pusat
   a. Mutasi dan penempatan karyawan di lingkungan intern Direktorat dapat dilakukan oleh Kepala Divisi/setingkat untuk diusulkan kepada Divisi yang membidangi SDM.
   b. Mutasi dan penempatan karyawan antar Direktorat dapat diusulkan oleh Kepala Divisi/setingkat untuk diusulkan kepada Direktur yang membidangi SDM.

2. Kantor Cabang
   a. Untuk mutasi dan penempatan karyawan di lingkungan intern kantor cabang ditetapkan oleh Kepala Kantor Cabang dengan memperhatikan kompetensi masing-masing karyawan dan kebutuhan Kantor Cabang.
   b. Khusus untuk penempatan karyawan sebagai kasir agar segera dibuat Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Cabang setempat.

EMPLOYEE ROTATION AND TRANSFER

Job and/or working unit transfer can be conducted for the implementation of duties and employee development, including career development.

The authority of transfer and employee placement is differentiated into 2 (two) things, namely:

1. Head Office
   a. Transfer and employee placement in the internal Directorate can be conducted by Head of Division/ equivalent to be proposed to the Division that manages human resources.
   b. Inter-directorate transfer and employee placement can be proposed by the Head of Division/equivalent to be proposed to the Director that manages human resources.

2. Branch Office
   a. Transfer and employee placement in internal branch office is determined by Head of Branch Office by taking account of the competency of each employee and the needs in Branch Office.
   b. Especially for employee placement in cashier position, Letter of Assignment shall be immediately written and signed by local Head of Branches.

Sebagian besar rotasi dan mutasi karyawan dilakukan dalam rangka memberikan tugas dan tanggung jawab terhadap karyawan yang bersangkutan pada jabatan yang lebih tinggi. Ketentuan terkait rotasi dan mutasi karyawan untuk promosi ditetapkan sesuai dengan ketentuan promosi perusahaan sesuai hasil komite promosi.

Selama 2014, tingkat rotasi dan mutasi karyawan sebesar 46,91%. Tingginya presentase tersebut dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi dan tuntutan perkembangan perusahaan yang harus diimbangi dengan peningkatan SDM yang kompeten sesuai jabatannya.

Most employee rotation and transfer are conducted to provide duties and responsibilities to related employees in higher position. The provision related to employee rotation and transfer for promotion is determined according to the terms of promotion of the company based on results of the promotion committee.

Throughout 2014, employee rotation and transfer rate was 46.91%. This high percentage is due to the change in organizational structure and demand for the development of the company that must be balanced with the increasing number of competent human resources in its position.

Tabel 2.6. Rotasi dan Mutasi Karyawan

Table 2.6. Employee Rotation and Transfer

No	Bulan / Month	Jumlah / Total
1	Januari / January	6
2	Februari / February	34
3	Maret / March	125
4	April / April	0
5	Mei / May	3
6	Juni / June	0
7	Juli / July	0
8	Agustus / August	0
9	September / September	20
10	Oktober / October	6
11	November / November	34
12	Desember / Desember	7
Jumlah / Total		**235**

PROSES REKRUTMEN DAN PENGEMBANGAN KARIER

Rekrutmen SDM

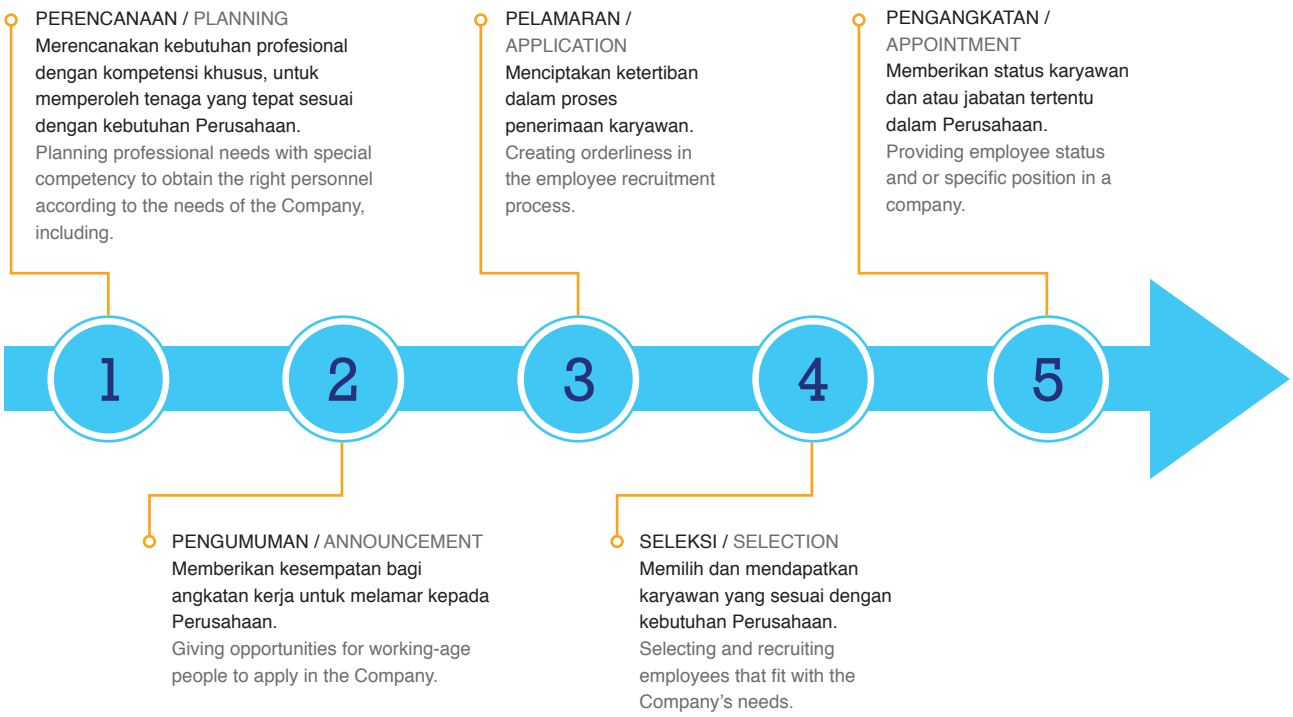
Rekrutmen SDM yang dilakukan Perum Jamkrindo dilaksanakan berdasarkan asas Terbuka, Selektif, Daya Guna dan Hasil Guna, serta Kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dalam menghadapi tantangan dalam bisnis. Rekrutmen dilakukan melalui beberapa ruang lingkup pengadaan karyawan sebagai berikut:

RECRUITMENT PROCESS AND CAREER DEVELOPMENT

HR Recruitment

HR Recruitment conducted by Perum Jamkrindo is carried out based on Transparent, Selective, Useful and Fruitful, and Needs. This is performed to obtain qualified human resources according to the Company's needs in facing business challenge. The recruitment is conducted through several scope of employee recruitment as follows:

Gambar 2.1. Ruang Lingkup Pengadaan Karyawan **Picture 2.1 Scope of Employee Recruitment**



Sumber pengadaan karyawan berasal dari dalam perusahaan dan atau dari luar perusahaan apabila dibutuhkan oleh perusahaan, untuk pengisian format tertentu dan atau memerlukan keahlian/keterampilan tertentu.

Source of employee recruitment comes from the company and or outside the company if required by the company in order to fill in specific format and or require specific expertise/skills.

Perusahaan dapat melakukan pengadaan/ rekrutmen tenaga kerja berpengalaman/tenaga profesional untuk pengisian posisi tertentu dan/atau untuk kebutuhan keahlian/keterampilan tertentu berupa:

a. Karyawan/staf berpengalaman
   Karyawan yang diangkat perusahaan dengan memperhitungkan pengalaman kerja, masa kerja, keahlian dan kompetensi yang dimilikinya sesuai kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
b. Pejabat struktural/fungsional
   Karyawan yang diangkat perusahaan perusahaan dengan memperhitungkan pengalaman kerja, masa kerja, keahlian dan kompetensi yang dimilikinya sesuai kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk menduduki jabatan struktural/ fungsional.

The Company can carry out procurement/recruitment of experienced/professional manpower and/or for the needs of specific expertise/skills in the form of:

a. Experienced Employee/staff
   Employees appointed by the company by taking into account their working experience, term of office, expertise, competency based on the qualification that fits with the company's needs.
b. Structural/functional officers
   Employees appointed by the company by taking into account their working experience, term of office, expertise, competency based on the qualification that fits with the company's needs to fill structural/functional position.

c. Tenaga kerja profesional (*Prohire*)
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu yang direkrut berdasarkan pengalaman kerja, keahlian dan kompetensi yang dimilikinya sesuai kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan untuk melakukan pendampingan dan asistensi pada unit kerja terkait atau untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dan/atau dengan target tertentu dan jangka waktu tertentu.

Pada 2014, Perusahaan telah melakukan rekrutmen karyawan profesional untuk ditetapkan sebagai Pejabat sturktural yang memiliki pengalaman sesuai kebutuhan Perusahaan sebanyak 10 orang sehingga memiliki kontribusi sebesar 2% dari total jumlah karyawan pada 2014.

c. Professional manpower (Prohire)
Certain Work Contract Employees recruited based on working experience, expertise and competency based on the qualification that fits with the company's needs to guide and provide assistance in the related working unit or to implement certian work and/or with certain target and period.

In 2014, the Company recruited 10 professional employees to be appointed as structural employees that have experience that meets the Company's needs. Thus, they contributed 2% to the total employees in 2014.

Tabel 2.7. Rekrutmen Karyawan Profesional/ Berpengalaman pada 2014

Table 2.7. Recruitment of Professional/Experienced Employees in 2014

No	**Rekrutmen /** Recruitment	**Jumlah /** Total
1	Bidang Pemasaran / Marketing Field	4
2	Bidang Investasi / Investment Field	2
3	Bidang Anggaran / Budget Field	1
4	Bidang Kesekretariatan, Humas dan Protokoler / Secretariat, Public Relation, and Protocols	1
5	Bidang SDM / Human Resources Field	2
Jumlah / Total		**10**

Selain hal tersebut, pada 2014, Perusahaan juga melakukan rekrutmen tenaga kerja waktu tertentu profesional untuk melakukan pendampingan dan asistensi sebanyak 9 orang yang tersebar di beberapa unit kerja. Perekrutan tenaga profesional tersebut diharapkan dapat membantu percepatan tercapainya program-program kerja perusahaan serta *transfer knowledge* kepada karyawan tetap pada unit kerja tersebut.

In addition, in 2014, the Company also recruited professional certain-time workers to guide and provide assistance to 9 people spread in several working units. Professional support recruitment is expected to be able to help accelerate the achievement of working programs and transfer knowledge to permanent employees in the working unit.



Kesuksesan dan keberlanjutan bisnis Perusahaan sangat ditentukan oleh ketersediaan SDM, baik dari sisi pengelolaan internal maupun guna memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.

The success and sustainability of business of the Company is largely determined by the availability of human resources from the internal management to meet the needs of the stakeholders.

Tabel 2.8. Rekrutmen Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) Profesional pada 2014

Table 2.8. Recruitment of Professional Certain-Time Contract Worker (KKWT) in 2014

No	**Rekrutmen /** Recruitment	**Jumlah /** Total
1	Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) Profesional diperuntukan untuk mendukung bidang Teknologi Informasi / Professional Certain-Time Contract Worker (KKWT) to support Information Technology	2
2	Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) Profesional diperuntukan untuk mendukung bidang pemasaran / Professional Certain-Time Contract Worker (KKWT) to support marketing field	2
3	Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) Profesional diperuntukan untuk mendukung bidang investasi / Professional Certain-Time Contract Worker (KKWT) to support investment field	4
4	Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) Profesional diperuntukan untuk mendukung bidang SDM / Professional Certain-Time Contract Worker (KKWT) to support HR field	1
Jumlah / Total		**9**

Selain karyawan tetap, Perum Jamkrindo juga merekrut tenaga kerja dengan status Tenaga Kerja Waktu Tertentu (KKWT) yakni tenaga kerja yang bekerja dalam waktu tertentu untuk mengerjakan pekerjaan pendukung di Perusahaan. Pada 2014, perusahaan juga melakukan perekrutan tenaga KKWT di Kantor Pusat sebanyak 21 orang untuk mendukung percepatan tercapainya program-program kerja pada beberapa unit kerja.

In addition to permanent employees, Perum Jamkrindo also recruited Certain-Time Worker (KKWT), namely workers that work in certain time, to carry out supporting work in the Company. In 2014, the Company also recruited 21 people as KKWT employees to support the acceleration of the achievement of work programs in several working units.

Tabel 2.9. Rekrutmen Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) pada 2014

Table 2.9. Recruitment of Certain-Time Contract Worker in 2014

No	Rekrutmen	Jumlah / Total
1	Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) khusus diperuntukkan untuk mendukung bidang Teknologi Informasi / Certain-Time Contract Worker specially recruited to support Information Technology.	14
2	Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) khusus diperuntukkan untuk mendukung bidang pemasaran / Certain-Time Contract Worker specially recruited to support marketing field.	2
3	Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) khusus diperuntukkan untuk mendukung bidang administrasi umum / Certain-Time Contract Worker specially recruited to support general administration field.	1
4	Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) khusus diperuntukkan untuk mendukung bidang humas / Certain-Time Contract Worker specially recruited to support public relation field.	1
5	Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) khusus diperuntukkan untuk mendukung bidang SDM / Certain-Time Contract Worker specially recruited to support human resources field.	3
Jumlah / Total		**21**

Pengembangan Karier

Pengembangan karier bagi karyawan perusahaan melalui kenaikan posisi jabatan seorang pegawai ke level yang lebih tinggi melalu kegiatan promosi, secara optimal dapat memotivasi karyawan agar bekerja secara maksimal. Kegiatan promosi dilakukan untuk mendapatkan kandidat yang tepat untuk mengisi jabatan yang levelnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan secara tepat waktu.

Karyawan yang telah mendapat penilaian berdasarkan sistem penilaian kinerja dan telah menunjukan prestasi kerja yang baik, jujur dan dapat dipercaya serta berwibawa, dapat diangkat untuk menduduki jabatan struktural apabila memenuhi syarat jabatan yang dimaksud. Sistem penilaian kinerja karyawan diadakan untuk menjamin objektifitas dalam mempertimbangkan dan menetapkan kenaikan pangkat, golongan gaji dan tingkat gaji serta pengangkatan dalam jabatan struktural tertentu pada perusahaan.

Career Development

Career development for the Company's employees through the increase in position level of an employees, namely promotion, which optimally can motivate employees to work optimally. The promotion is conducted to recruit more appropriate candidates to fill higher level position according to the requirement in a timely manner.

Employees that have gained assessment based on performance assessment system and has shown good achievement, besides being honest, trusted, and wise, can fill in structural position if meeting the requirements of hte position. Performance assessment system of the employee is conducted to ensure objectivity in considering and determining promotion, salary, and salaray rate, as well as the appointment in certain structural position in the company.

Tahapan kegiatan pengembangan karir melalui kegiatan promosi adalah sebagai berikut:

Stages of career development activity through promotion are as follows:

Gambar 2.2. Tahapan Kegiatan Pengembangan Karir Melalui Kegiatan Promosi

Picture 2.2 Stages of Career Development Activity through Promotion



PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Kesuksesan dan keberlanjutan bisnis Perusahaan sangat ditentukan oleh ketersediaan SDM, baik dari sisi pengelolaan internal maupun guna memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Perencanaan dan pengembangan SDM merupakan fungsi utama yang senantiasa dilaksanakan oleh Perusahaan. Hal tersebut diselenggarakan oleh Perum Jamkrindo guna menjamin tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai posisi, jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat.

Tujuan perencanaan SDM adalah sebagai berikut:

1. Menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan.
2. Menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya.
3. Menghindari terjadinya *missed* manajemen dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.
4. Mempermudah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sehingga diharapkan produktivitas kerja meningkat.
5. Menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan.
6. Menjadi pedoman dalam menetapkan program rekrutmen, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan kedisiplinan dan pemberhentian karyawan.
7. Menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi (vertikal atau horizontal) dan pensiun karyawan.
8. Menjadi dasar dalam melakukan penilaian pegawai.

PENGEMBANGAN SDM KE DEPAN

1) Penyusunan Direktori Kompetensi dan Profiling Jabatan

Direktori kompetensi dan kompetensi jabatan ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam rekrutmen, pengembangan SDM, pendidikan dan pelatihan, *succesion planning* (pemilihan kandidat pimpinan/ kaderisasi), *talent management*, dan seluruh fungsi SDM.

PLANNING AND DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES

The success and sustainability of business of the Company is largely determined by the availability of human resources, both from the internal management and to meet the needs of the stakeholders. The planning and development of human resources is the main function that is continuously implemented by the Company. This is conducted by Perum Jamkrindo to ensure the availability of appropriate manpower to fill various appropriate positions in the right time.

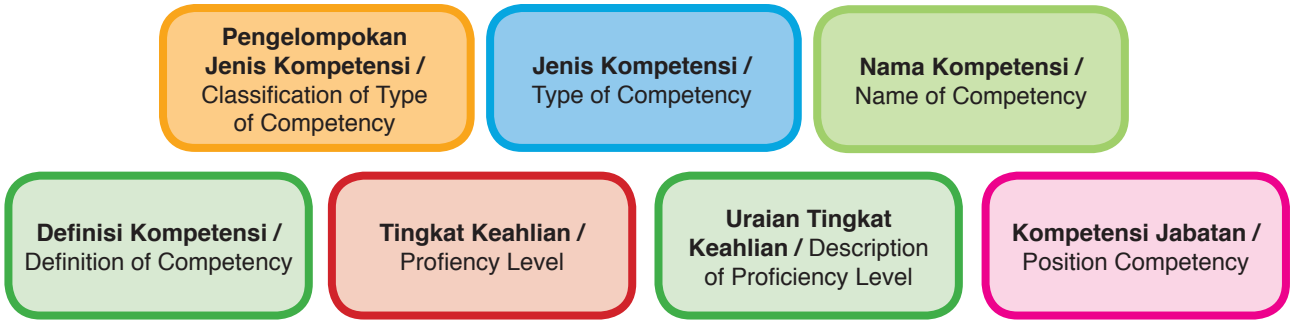
The objective of human resources planning is as follows:

1. Determining quality and quantity of employees that will fill all positions in the company.
2. Ensuring the availability of worker today and in the future, thus each work can be handled.
3. Avoiding missed management and overlapped duty.
4. Facilitating coordination, integration and synchronization to increase work productivity.
5. Avoiding lack or strength of employees.
6. Becoming guideline in determining recruitment program, selection, development compensation, integration, maintenance and discipline, and employment termination.
7. Becoming guideline in conducting transfer (vertical or horizontal) and employee pension.
8. Becoming basis in assessing employee.

HR DEVELOPMENT IN THE FUTURE

1) Preparation of Directory of Competency and Profiling of Position

This directory of competency and position competency will be used as a benchmark in recruitment, development of HR, education and training, succession planning (selection candidates for leader/caderization), talent management and all functions of HR.



2) Implementasi Budaya TRUST

Salah satu rencana kerja Perusahaan sebagaimana tertuang dalam RKAP 2014 dan RJPP 2014-2018 yaitu membangun dan mengembangkan budaya TRUST.

Tujuan kegiatan Penyusunan Program Internalisasi Budaya TRUST antara lain sebagai berikut:

a. Penyusunan buku pedoman budaya TRUST sebagai upaya elaborasi atau pengejawantahan setiap unsur budaya TRUST yaitu Terpercaya Responsif Unggul Sehat dan Terkemuka sesuai kebutuhan tata kelola Perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) yaitu dalam :
   1) Nilai-nilai Perusahaan.
   2) Standar Perilaku Perusahaan.
   3) Standar Perilaku Insan Perusahaan.
b. Program (*grand design*) Internalisasi Budaya TRUST yang berjenjang dan berkelanjutan melalui penyusunan kurikulum, silabus dan modul pengajaran dan sosialisasi TRUST kepada seluruh SDM Perum Jamkrindo di seluruh jenjang yaitu staf/pelaksana dan pejabat termasuk bagi SDM pendukung (*outsourcing*, Karyawan KKWT dan Perusahaan terafiliasi lainnya).
c. Pelaksanaan program *training* budaya TRUST bagi seluruh SDM Perum Jamkrindo. Lebih lanjut training diharapkan menghasilkan daftar SDM terpilih (calon *talent*) di setiap tingkat jabatan yang dipandang dapat berperan sentral/utama bagi pelaksanaan budaya TRUST tersebut.
d. Program internalisasi budaya TRUST tersebut selaras dengan RKAP 2014 dan RJPP 2014-2018 dan tata kelola Perusahaan (*Good Corporate*

2) Implementation of TRUST Culture

One of the Company's work plan, as stated in the 2014-2018 RKAP and RJPP, is to build and develop TRUST culture.

The objective of preparing Internalization program of TRUST culture is as follows:

a. Drawing up of TRUST culture guidelines as an effort of elaboration or implementation of each element of TRUST Culture, namely Trusted, Responsive, Excellent, Healthy, and Leading, according to the needs in implementing good corporate governance, namely:
   1) Corporate values
   2) Corporate behavior standards
   3) Corporate behavior standard for each personnel
b. Internalization program (grand design) of TRUST Culture that is conducted in tier and sustainable manner through the formulation of curriculum, syllabus, and teaching module and socialization of TRUST to all human resources of Perum Jamkrindo in all levels of staff/officer and officials, including for supporting human resources (outsourcing, KKWT employees and other affiliated company).
c. Implementation of TRUST Culture Training program to all human resources of Perum Jamkrindo. Further training is expected to add more selected human resources (prospective talent) in each level of the position considered important/central in the implementation of TRUST culture.
d. Internalization program of TRUST culture is in line with 2014 RKAP and 2014-2018 RJPP and good corporate governance and expected to be

Governance) dan diharapkan secara terjadual dan berkesinambungan dapat dilaksanakan (*executable*).

executable within schedule and sustainably.

3) Management Development Program

Dalam rangka pengembangan SDM, kaderisasi dan menyiapkan kesiapan karyawan menghadapi tantangan dan tanggung jawab yang lebih besar diperlukan pelatihan berjenjang dan berkelanjutan yang disesuaikan dengan pola pertumbuhan managerial (pola managerial stage) yang berlaku di Perusahaan. Peran kepemimpinan di setiap tingkatan/eselonisasi dalam Perusahaan diartikan dalam kompetensi yang harus dimiliki oleh pemimpin di setiap level dalam organisasi yang menggambarkan kualitas perilaku seorang pemimpin yang berkualitas.

3) Management Development Program

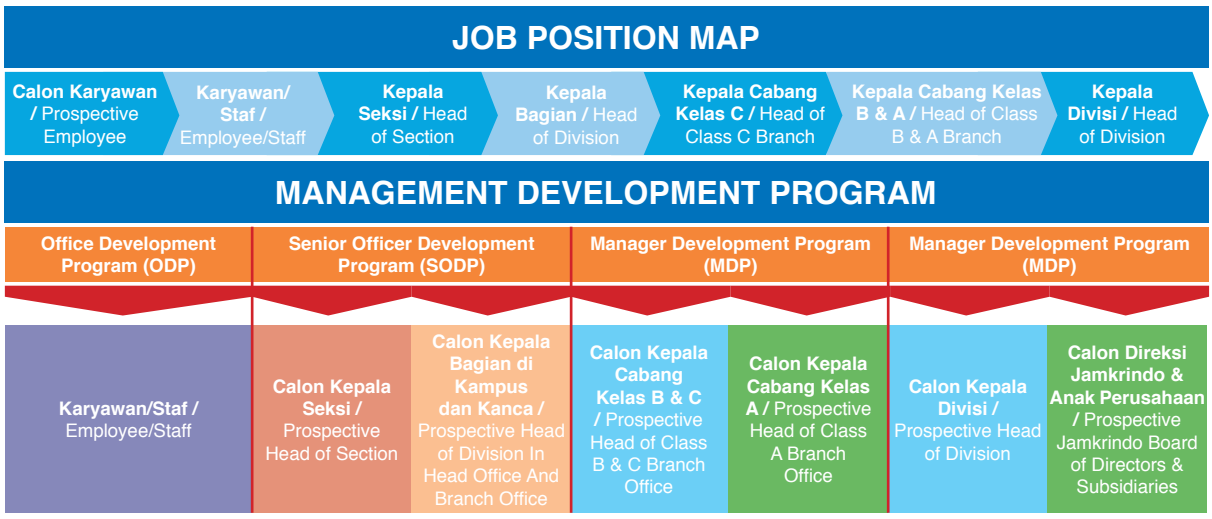
In order to develop human resources, prepare succession plan and make employee well equipped to address challenges and take bigger responsibilities, tiered training that is continuously conducted is necessary, which should be adjusted to the managerial growth pattern (managerial stage pattern) existing in the Company. Leadership role in each level in the Company refers to a competency that must be possessed by leaders in each level in the organization, which reflects the quality of a highly qualified leader.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas maka Perusahaan akan menyelenggarakan program pelatihan *Management Development Program* yang diperuntukan bagi karyawan hingga pejabat secara berjenjang dan berkelanjutan dari tingkat jabatan/ eselonisasi paling bawah hingga paling tinggi.

Given the above explanation, the Company will implement Management Development Training program that is designed for employees and management in tier and sustainable manner, from the bottom to the top level.

Dengan program pelatihan tersebut diharapkan karyawan mendapatkan pemahaman mengenai kepemimpinan secara profesional, memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk jabatan pada level jabatan terkait dan siap untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang.

With such training program, the employee is expected to gain the understanding on professional leadership, have necessary competency for position in the related level and ready to take bigger responsibilities in the future.



PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Perum Jamkrindo mempunyai komitmen yang tinggi untuk selalu meningkatkan kualitas karyawan sebagai salah satu kunci utama penentu keberlangsungan Perusahaan. Salah satu sarana peningkatan kualitas dilakukan melalui program pelatihan dan pendidikan karyawan.

EDUCATION AND TRAINING

Perum Jamkrindo has high commitment to always improve the quality of employees as one of the determining keys to the Company's continuity. One of the platforms to improve quality is training program and employee education.

Tabel 2.10. Data Pengembangan SDM

Table 2.10. HR Development Data

Indikator / Indicator	**2014**	**2013**	**Pertumbuhan /** Growth
Jumlah karyawan yang disertakan mengikuti diklat / Total employees participating in the education and training	1.786	1.122	59,18%
Penugasan belajar (S2) Dalam Negeri atau Luar Negeri / Scholarship for Master's Degree Inside or Outside the Country	12	6	100,00%

Program pelatihan dan pendidikan Perum Jamkrindo dijalankan dengan tetap memperhatikan kemampuan finansial Perusahaan. Program pelatihan dan pendidikan tersebut disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berbasis Kompetensi
   Program pelatihan mengacu pada kebutuhan kompetensi sesuai *job description* masing-masing karyawan.
2. Berjenjang
   Program pelatihan dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatan kebutuhan/tuntutan tugas, tanggung jawab dan jabatan karyawan.
3. Berkelanjutan
   Program pelatihan dilakukan secara berkesinambungan baik dari segi materi (materi level terendah sampai level tertinggi) maupun dari segi kesinambungannya.

Sedangkan jenis pelatihan yang diperuntukan kepada karyawan dibedakan dalam 2 (dua) program sebagai berikut :

1. Program Pelatihan Reguler
   Program pelatihan yang dirancang khusus untuk dilaksanakan secara rutin (tahunan) oleh Perusahaan. Dalam rangka program pelatihan reguler maka dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis pelatihan sebagai berikut:

Training and education program of Perum Jamkrindo are implemented by taking account of the Company's financial ability. The training and education program is prepared by referring to the following principles:

1. Competency-based
   Training program refers to the competency needs according to job description of each employee.
2. Tiered
   Training program is conducted in tiers according to the level of needs/demand on duties, responsibilities, and position of employees.
3. Continuous
   Training program is conducted continuously, both in the form of material (from the lowest to the highest level) and its continuous frequency.

Meanwhile, type of trainings designed for employees is differentiated into 2 (two) programs as follows:

1. Regular Training Program
   Training program specifically designed to be implemented routinely (annually) by the Company. Regular training program is differentiated to 2 (two) types of trainings as follows:

a. Pelatihan Prajabatan

Pelatihan yang harus diikuti karyawan yang akan diangkat menjadi calon karyawan dan karyawan tetap atau yang akan atau telah menduduki suatu tingkat jabatan tertentu. Materi pelatihan prajabatan terdiri dari:

- **Pelatihan pengetahuan Perusahaan**
  Pelatihan-pelatihan tentang pengetahuan perusahaan yang diikuti oleh seluruh karyawan sesuai tingkatan dan jabatan karyawan.

a. Pre-position Training

Training that must be attended by employees to be appointed as prospective employees and permanent employees or that will or have filled certain level of position. The material of the pre-position training is composed of as follows:

- **Training on knowledge related to the Company**
  Trainings on knowledge related to the Company attended by all employees according to the level and position of employees.

Tabel 2.11. Pelatihan Pengetahuan Perusahaan Tahun 2014

Table 2.11. Training on Knowledge related to the Company in 2014

No	Nama Pelatihan / Name of Training	Pelaksana Pelatihan / Training Officer	Tanggal / Date	Jumlah Peserta / Participants	Biaya Pelatihan / Cost of Training
1	Pelatihan Dasar-dasar Perbankan dan Perkreditan/ Pembiayaan Batch 2 / Training on Basic Banking and Credit/ Financing Batch 2	LPPI	2-15 Februari 2014 / February 2-15, 2014	40	450.000.000
2	Pelatihan Dasar-dasar Perbankan dan Perkreditan/ Pembiayaan Batch 3 / Training on Basic Banking and Credit/ Financing Batch 2	LPPI	17-28 Februari 2014 / February 17-28, 2014	91	1.023.750.000
3	Pendidikan dan Pelatihan Penjaminan Syariah Batch I / Education and Training of Sharia Guarantee Batch I	Muamalat Institute	25-26 April 2014 / April 25-26, 2014	35	38.500.000
4	Pendidikan dan Pelatihan Penjaminan Syariah Batch II / Education and Training of Sharia Guarantee Batch II	Muamalat Institute	9-10 Mei 2014 / May 9-10, 2014	35	38.500.000
5	Pendidikan dan Pelatihan Penjaminan Syariah Batch III / Education and Training of Sharia Guarantee Batch III	Muamalat Institute	23-24 Mei 2014 / May 23-24, 2014	36	38.500.000
6	Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Investasi Deposito / Training on Information System of Deposit Investment Management	Perum Jamkrindo	27 - 28 Juni 2014 / June 27-28, 2014	21	-
7	Pemahaman dan Manajemen Pemasaran Surety Bond / Understanding and Marketing Management on Surety Bond	Perum Jamkrindo	28 Juni 2014 / June 28, 2014	28	5.000.000
8	Pelatihan Reasuransi / Reinsurance Training	Perum Jamkrindo	12 Juli 2014 / July 12, 2014	40	-

No	Nama Pelatihan / Name of Training	Pelaksana Pelatihan / Training Officer	Tanggal / Date	Jumlah Peserta / Participants	Biaya Pelatihan / Cost of Training
9	Pelatihan Penjaminan Surety Bond Tingkat Dasar / Basic Level Training on Surety Bond Guarantee	Asippindo	20 - 22 Agustus 2014 / August 20-22, 2014	3	-
10	In House Training Pelayanan Klaim Penjaminan Batch 1 / In House Training on Guarantee Claim Service Batch 1	Perum Jamkrindo	23 - 24 Agustus 2014 / August 23-24, 2014	57	-
11	In House Training Pelayanan Klaim Penjaminan Batch 2 / In House Training on Guarantee Claim Service Batch 1	Perum Jamkrindo	4-5 September 2014 / September 4-5, 2014	79	-
12	Pelatihan Peraturan dan Kebijakan Akuntansi Perusahaan Batch I / Training on Regualtion and Policy of the Company's Accounting Batch I	Perum Jamkrindo	25-27 September 2014 / September 25-27, 2014	30	7.243.750
13	Pelatihan Peraturan dan Kebijakan Akuntansi Perusahaan Batch II / Training on Regualtion and Policy of the Company's Accounting Batch II	Perum Jamkrindo	16-18 Oktober 2014 / October 16-18, 2014	27	-
14	Pelatihan Surety Bond Kantor Wilayah II / Training on Surety Bond at Regional Office II	Perum Jamkrindo	31 Oktober 2014 / October 31, 2014	45	31.720.197
15	Pelatihan Pemahaman Subrogasi Penjaminan Kredit Batch I / Training on Understanding of Subrogation of Credit Guarantee Batch I	Perum Jamkrindo	4 November 2014 / November 4, 2014	34	875.000
16	Pelatihan Pemahaman Subrogasi Penjaminan Kredit Batch II / Training on Understanding of Subrogation of Credit Guarantee Batch II	Perum Jamkrindo	14 November 2014 / November 14, 2014	32	3.990.000
17	Pelatihan Pemahaman Subrogasi Penjaminan Kredit Batch III / Training on Understanding of Subrogation of Credit Guarantee Batch III	Perum Jamkrindo	28 November 2014 / November 28, 2014	33	-
18	Pelatihan Akuntansi Kanwil III / Training on Accounting, Regional Office III	Perum Jamkrindo	15-17 Desember 2014 / December 15-17, 2014	7	14.838.658
19	Sharing Session : Planning and Budgeting System	Perum Jamkrindo	16 Desember 2014 / December 16, 2014	22	5.154.639
20	Outlook Bisnis dan Investasi / Business Outlook and Investment	Perum Jamkrindo	22 Desember 2014 / December 22, 2014	41	13.712.500
	Jumlah / Total			**736**	**1.671.784.744**

- **Pelatihan perilaku**
  Pelatihan-pelatihan yang bertujuan pembentukan untuk dan peningkatan kualitas kepribadian, perilaku dan etika karyawan yang wajib diikuti seluruh karyawan sesuai tingkatan dan jabatan karyawan.

- **Training on Behaviour**
  Trainings aimed to establish and enhance the quality of personal behavior, attitude, and ethics of the employees that are obligatory to be attended by all employees according to their level and position.

Tabel 2.12. Pelatihan Perilaku Tahun 2014 **Table 2.12. Behavior Training in 2014**

No	Nama Pelatihan / Name of Training	Pelaksana Pelatihan / Training of Officer	Tanggal / Date	Jumlah Peserta / Participants	Biaya Pelatihan / Cost of Training
1	Pembinaan Mental dan Fisik Batch 2 / Mental and Physical Development Batch 2	Rindam Jaya	19-25 Januari 2014 / January 19-25, 2014	77	259.490.000
2	Pembinaan Mental dan Fisik Batch 3 / Mental and Physical Development Batch 3	Rindam Jaya	2-8 Februari 2014 / February 2-8, 2014	85	286.450.000
3	IHT Karakter Pancasila dan Intrapreneurship / IHT of Pancasila Character and Intrapreneurship	Perum Jamkrindo	10-11 Februari 2014 / February 10-11, 2014	88	56.500.000
4	IHT Karakter Pancasila dan Intrapreneurship / IHT of Pancasila Character and Intrapreneurship	Perum Jamkrindo	17-18 Februari 2014 / February 17-18, 2014	53	72.757.720
5	Motivasi Leadership / Leadership Motivation	Perum Jamkrindo	28 April 2014 / April 28, 2014	81	-
6	Leading at The Speed of Trust	Mahadibya Nurcahyo Chakrasana	7-8 Juni 2014 / June 7-8, 2014	41	95.000.000
7	Motivasi Dengan Memperkuat Kemampuan Komunikasi Meningkatkan Kinerja Jamkrindo secara Keseluruhan oleh Aqua Dwipayana / Motivation by Strengthening Communication Capability and Improving Jamkrindo Performance by Aqua Dwipayana	Perum Jamkrindo	2 September 2014 / September 2, 2014	67	60.000.000
8	Leading at The Speed of Trust Batch II	Mahadibya Nurcahyo Chakrasana	13 Desember 2014 / December 13, 2014	50	104.500.000
	Jumlah / Total			**543**	**938.597.720**

- **Pelatihan manajerial**
  Pelatihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan karyawan, serta ditujukan bagi karyawan yang akan atau telah menduduki suatu tingkat jabatan struktural.

- **Managerial Training**
  Training aimed to improve managerial capability and employee leadership, which is also designed for employees that will or have filled certain structural position.

Tabel 2.13. Pelatihan Manajerial Tahun 2014 **Table 2.13. Managerial Training in 2014**

No	Nama Pelatihan / Name of Training	Pelaksana Pelatihan / Training of Officer	Tanggal / Date	Jumlah Peserta / Participants	Biaya Pelatihan / Cost of Training
1	Professional Directors Program	IICD	17-18 Februari 2014 / February 17-18, 2014	20	140.000.000
2	Motivasi Leadership / Leadership Motivation	Perum Jamkrindo	28 April 2014 / April 28, 2014	81	-
3	Leading at The Speed of Trust	Mahadibya Nurcahyo Chakrasana	7-8 Juni 2014 / June 7-8, 2014	41	95.000.000
4	Tutorial Executive Peluang dan Tantangan Perkembangan Bisnis Keuangan Syariah untuk Direksi Perum Jamkrindo / Executive Tutorial on the Opportunities and Challenges in the Development of Sharia Financial Business for Jamkrindo's Board of Directors	Muamalat Institute	7 Oktober 2014 / October 7, 2014	15	20.000.000
5	Motivasi Leadership / Leadership Motivation	Perum Jamkrindo	28 April 2014 / April 28, 2014	81	-
	Jumlah / Total			**207**	359.500.000

b. Pelatihan Kompetensi Teknis
   Pelatihan yang harus diikuti karyawan agar mempunyai kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sesuai *job description* masing-masing.

b. Technical Competence Training
   Obligatory training for all employees in order to have the required competences to perform their duties according to each job description.

Tabel 2.14. Pelatihan Kompetensi Teknis Tahun 2014 **Table 2.14. Technical Competence Training in 2014**

No	Nama Pelatihan / Name of Training	Pelaksana Pelatihan / Training of Officer	Tanggal / Date	Jumlah Peserta / Participants	Biaya Pelatihan / Cost of Training
1	Bimbingan Teknis dan Ujian Nasional Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah / Technical Coaching and National Examination for the Certification of Government Goods and Services Procurement Expert	Lembaga Pengembangan & Konsultasi Nasional (LPKN) / LPKN Training & Consulting	3-6 Februari 2014 / February 3-6, 2014	1	3.900.000
2	Certified Risk Management Professional (CRMP)	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR)	24-28 Februari 2014 / February 24-28, 2014	1	10.000.000
3	Pelatihan PKBL: Investasi Sosial melalui kinerja PKBL Strategi dan Value Added / PKBL Training: Social Investment through PKBL Strategic and Value Added performance	Majalah PKBL Action & TSC / PKBL Action Magazine and TSC	5 Maret 2014 / March 5, 2014	2	12.000.000
4	Workshop on Islamic Trade Finance	Iqtishad Consulting	20-21 Maret 2014 / March 20-21, 2014	4	8.000.000
5	Seminar Konsepsi dan Aplikasi Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan / Seminar on Conception and Application of BPJS Kesehatan and BPJS Ketenagakerjaan Programs	Forum Peduli Solidaritas Bangsa	26-27 Maret 2014 / March 26-27, 2014	2	6.500.000
6	Workshop FORTI BUMN Penyusunan Master Plan TI 2014 / Workshop of FORTI SOE on the Drafting of IT Master Plan for 2014	FORTI BUMN / SOE IT Forum (FORTI)	27-29 Maret 2014 / March 27-29, 2014	1	3.500.000
7	Sosialisasi Tugas dan Fungsi serta Layanan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan / Dissemination of Duties, Functions and Services of Education Fund Management Institution	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan / Communication and Information Service Bureau of Finance Ministry	3 April 2014 / April 3, 2014	1	-
8	Sosialisasi Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan / Dissemination of Payment of BPJS Kesehatan Fees	Bank Mandiri	3 April 2014 / April 3, 2014	1	-
9	Diklat Dasar-dasar Audit / Education and Training on Audit Basics	Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPAK) / The Center for Development of Accountancy and Finance (PPAK)	7-17 April 2014 / April 7-17, 2014	4	30.000.000

No	Nama Pelatihan / Name of Training	Pelaksana Pelatihan / Training of Officer	Tanggal / Date	Jumlah Peserta / Participants	Biaya Pelatihan / Cost of Training
10	Seminar Nasional Internal Audit 2014 / 2014 National Seminar on Internal Audit	Yayasan Pendidikan Internal Audit / The Internal Audit Professional Training and Development Center (YPIA)	16-17 April 2014 / April 16-17, 2014	2	10.000.000
11	Diklat Nasional Peningkatan Kemampuan Taktik Teknik Pola Pengungkapan Kasus/ Jaringan dan Anatomi Kejahatan Tertentu / National Education and Training for the Improvement of Tactical Ability in Disclosure Technique and Pattern of Case/Network and Anatomy	Lembaga Diklat Profesi PPNS-RI	17-18 April 2014 / April 17-18, 2014	4	17.000.000
12	Pelatihan Analisis Beban Kerja dan Perhitungan Kebutuhan Jumlah SDM / Training on the Analysis of Work Expense and Calculation of Human Resources Quantity Requirement	PT. Aplikasi Sistem Bisnis	23-25 April 2014 / April 23-25, 2014	2	11.600.000
13	Mediasi di Sektor Jasa Keuangan / Mediation in Financial Services Sector	Otoritas Jasa Keuangan / Financial Services Authority	21-26 April 2014 / April 21-26, 2014	1	-
14	Diklat Dasar-dasar Audit / Education and Training on Audit Basics	Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPAK) / The Center for Development of Accountancy and Finance (PPAK)	5-15 Mei 2014 / May 5-15, 2014	4	30.000.000
15	Manajemen Penggajian Terintegrasi / Integrated Salary Management System	PPM Manajemen / PPM Management	6-7 Mei 2014 / May 6-7, 2014	1	3.750.000
16	Keunggulan Bersaing melalui Pelaporan Strategis / Competitive Excellence through Strategic Reporting	PKBL Action	21 Mei 2014 / May 21, 2014	1	3.500.000
17	Evaluator KPKU / KPKU Evaluator	Forum Ekselen BUMN / SOE Excellent Forum	21-23 Mei 2014 / May 21-23, 2014	1	4.275.000
18	Interpretasi dan Penyusunan Laporan KPKU / Interpretation and Drafting of KPKU Report	Forum Ekselen BUMN / SOE Excellent Forum	21-23 Mei 2014 / May 21-23, 2014	2	3.800.000
19	English Club	Equal	10 Juni 2014 / June 10, 2014	50	12.000.000
20	Withholding Tax	Formasi Lembaga Manajemen / Formasi Management Institution	11-12 Juni 2014 / June 11-12, 2014	2	6.000.000

No	Nama Pelatihan / Name of Training	Pelaksana Pelatihan / Training of Officer	Tanggal / Date	Jumlah Peserta / Participants	Biaya Pelatihan / Cost of Training
21	Menyusun Peraturan Perusahaan dan PKB / Drafting of Company's Regulation and PKB	DHN Consulting	18 Juni 2014 / June 18, 2014	1	1.695.000
22	Pemahaman Aspek Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Perhitungan PPh 21/26 Tahun 2014 / Comprehension of Taxation Aspects, Value Added Tax, and Calculation of Income Tax 21/26 Year 2014	LPIP	19 Juni 2014 / June 19, 2014	2	1.380.000
23	Workshop Penyusunan KPI dalam Peningkatan Daya Saing BUMN / Workshop on the Drafting of KPI to Improve SOE Competitiveness	Media Pekerja BUMN / SOE Worker Media	20 Juni 2014 / June 20, 2014	2	7.000.000
24	Workshop on FORTI BUMN on Pentaho Data Integration	FORTI BUMN / SOE IT Forum (FORTI)	23-27 Juni 2014 / June 23-27, 2014	1	12.500.000
25	Evaluator KPKU / KPKU Evaluator	Forum Ekselen BUMN / SOE Excellent Forum	24-26 Juni 2014 / June 24-26, 2014	2	7.600.000
26	Interpretasi dan Penyusunan Laporan KPKU / Interpretation and Drafting of KPKU Report	Forum Ekselen BUMN / SOE Excellent Forum	24-26 Juni 2014 / June 24-26, 2014	2	7.600.000
27	Teknik dan Strategi Implementasi GCG / Technique and Strategy for GCG Implementation	Pusat Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Indonesia/National Resources Review and Development Center	25-26 Juni 2014 / June 25-26, 2014	3	11.550.000
28	Workshop Memahami Rambu-rambu Gratifikasi Pengadaan Barang dan Jasa BUMN / Workshop on the Comprehension of Gratification Signs in SOE Goods and Services Procurement	Tabloid Media Pekerja BUMN / SOE Worker Media	27 Juni 2014 / June 27, 2014	1	2.500.000
29	Audit Intern Tingkat Dasar I / Basic Level of Internal Audit I	Yayasan Pendidikan Internal Audit / The Internal Audit Professional Training and Development Center (YPIA)	30 Juni - 11 Juli 2014 / June 30 - July 11, 2014	1	6.000.000
30	English for Travel	Equal English Training	7 - 15 Agustus 2014 / August 7-15, 2014	4	1.250.000
31	ATP ke 24 Tahun 2014 / 24th ATP in 2014	ACSIC	17 - 22 Agustus 2014 / August 17-22, 2014	4	12.440.450
32	Pendampingan Migrasi Data / Data Migration Mentoring	Perum Jamkrindo	30 - 31 Agustus 2014 / August 30-31, 2014	33	-

No	Nama Pelatihan / Name of Training	Pelaksana Pelatihan / Training of Officer	Tanggal / Date	Jumlah Peserta / Participants	Biaya Pelatihan / Cost of Training
33	Perekonomian Indonesia secara Makro dan Potensi Perusahaan Penjaminan untuk UKMK oleh Bapak Dr. Ir. Arief Budimanta / Indonesia's Macroeconomy and and Potential of Guarantee Company for SMEs and Cooperative by Ir. Arief Budimanta	Perum Jamkrindo	1 September 2014 / September 1, 2014	67	15.000.000
34	Pelatihan Analis Aktuaria Asuransi Umum / Training for Actuarial Analyst of General Insurance	Persatuan Aktuaris Indonesia - Literasi Prima / The Society of Actuaries of Indonesia - Premium Literacy	3 September 2014 - 15 Oktober 2014 / September 3 - October 15, 2014	3	22.500.000
35	Seminar dan Musyawarah Kerja Nasional FKSPI Tahun 2014 / 2014 Seminar and National Work Deliberation of FKSPI	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern / Internal Audit Communication Forum	17-19 September 2014 / September 17-19, 2014	3	10.000.000
36	Pelatihan Audit Intern Tingkat Lanjutan II / Internal Audit Training: Advance II	YPIA	13-24 Oktober 2014 / October 13-24, 2014	1	7.000.000
37	Pengendalian Gratifikasi dan Whistleblowing System / Gratification Control and Whistleblowing System	JSM Management Consultant	15-16 Oktober 2014 / October 15-16, 2014	1	4.500.000
38	How to Deliver Alpha in All Market Condition	CIMB Principal Asset Management	16 - 17 Oktober 2014 / October 16-17, 2014	2	-
39	Arbitrase Syariah di Sektor Jasa Keuangan / Sharia Arbitrage in Financial Service Sector	OJK	21 - 22 Oktober 2014 / October 21-22, 2014	2	-
40	Pelatihan Analis Aktuaria Asuransi Umum / Training for Actuarial Analyst of General Insurance	Persatuan Aktuaris Indonesia - Literasi Prima / The Society of Actuaries of Indonesia - Premium Literacy	22 Oktober 2014 - 10 Desember 2014 / October 22 - December 10, 2014	4	30.000.000
41	Seminar Penyusunan Audit Charter - Standar IIA / Seminar on Audit Charter Drafting - IIA Standard	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern / Internal Audit Communication Forum	5 Nopember 2014 / November 5, 2014	3	-
42	ACSIC Conference ke 27/ 27th ACSIC Conference	ACSIC	16 - 22 Nopember 2014 / November 16-22, 2014	13	-
43	Financial Shenanigans	LMFEUI	18 - 19 Nopember 2014 / November 18-19, 2014	1	3.600.000

No	Nama Pelatihan / Name of Training	Pelaksana Pelatihan / Training of Officer	Tanggal / Date	Jumlah Peserta / Participants	Biaya Pelatihan / Cost of Training
44	Audit Intern Tingkat Dasar II / Basic Level of Internal Audit II	YPIA	24 Nopember 2014 - 5 Desember 2014 / November 24 - December 5, 2014	1	6.000.000
45	Skema Bisnis BRI Karya / BRI Karya's Business Scheme	Perum Jamkrindo	25 Nopember 2014 / November 25, 2014	10	3.000.000
46	Business Intuition in Managing Corporate	Mahadibya Nurcahyo Chakrasana	27 Nopember 2014 / November 27, 2014	1	6.250.000
47	Pelatihan Mediasi / Mediation Training	Pusat Mediasi Nasional / Indonesian Mediation Center	4 Desember 2014 / December 4, 2014	1	-
48	Pembahasan Skema Bisnis Kreditku BRI / Discussion of BRI's Kreditku Business Scheme	Perum Jamkrindo	5 Desember 2014 / December 5, 2014	8	3.092.784
49	Implementasi PSAK 50,55 dan 60 tentang Instrumen Keuangan / Implementation of PSAK 50, 55 and 60 on Financial Instruments	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Jawa Barat / Indonesian Institute of Accountants (IAI) of West Java	8 - 9 Desember 2014 / December 8-9, 2014	1	2.000.000
50	Audit Operasional / Operational Audit	Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPAK) / The Center for Development of Accountancy and Finance (PPAK)	8 - 17 Desember 2014 / December 8-17, 2014	2	15.500.000
51	Certified Financial Modelling	Clariden Global	10 - 12 Desember 2014 / December 10-12, 2014	4	108.422.988
52	Markplus Conference	Markplus	11 Desember 2014 / December 11, 2014	30	15.000.000
53	Sharing Session : Planning and Budgeting System	Perum Jamkrindo	16 Desember 2014 / December 16, 2014	22	5.154.639
	Jumlah / Total			**323**	**504.360.861**

2. Program Pelatihan Non Reguler

   Program pelatihan di luar program yang tema dan pelaksanaannya bersifat insidentil sesuai kebutuhan Perusahaan. Materi pelatihan diberikan secara komprehensif meliputi semua aspek peningkatan kualitas, baik kualitas perilaku maupun keilmuannya.

Semua pelatihan dilakukan melalui lembaga pendidikan yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan.

2. Non-Regular Training Program

   Training program conducted outside the planned program with the theme and implementation are of incidental nature as required by the Company. The training material is given comprehensively, covering all quality improvement aspects, both behavioral and technical.

All trainings are conducted through educational institutions which are competent in each of their field. Independent

Pelatihan secara mandiri juga dilakukan oleh para pejabat senior perusahaan untuk materi *Corporate and Product Knowledge* sebagai sarana transfer pengetahuan ilmu penjaminan kredit dari pejabat yang telah mempunyai pengalaman di bidang tersebut kepada para staf sebagai generasi penerus Perusahaan.

trainings are also conducted by the senior executive management of the Company on Corporate and Product Knowledge material with the intention of transferring knowledge of credit guarantee from experienced officers to the staffs as the Company's future generation.

Dalam rangka peningkatkan kualitas karyawan, Perusahaan juga telah menjalankan program pemberian beasiswa pendidikan ke jenjang S2 dengan program studi sesuai kebutuhan perusahaan. Seleksi pemberian beasiswa tersebut dengan memperhatikan kinerja dan kontribusi karyawan.

In order to improve the quality of its employees, the Company has conducted a scholarship program for Master's Degree (S2) in which the courses are selected based on the Company's requirement. The selection for the scholarship is organized by taking into account the performance and contribution of the employees.

Guna meningkatkan kompetensi SDM Perusahaan serta pencerminan adanya persamaan kesempatan kepada seluruh SDM di tahun 2014, Perum Jamkrindo telah mengeluarkan dana pendidikan dan pelatihan sebesar Rp8,37 miliar naik 47% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp4,45 miliar.

Related to the allocation of budget for the competency improvement of Company's Human Resources as well as to reflect the equality principle in the opportunity given to all employees, Perum Jamkrindo allocated fund for education and training program in 2014 amounting to Rp8.37 billion, up 47% compared to the budget of 2013 at Rp4.45 billion.

SURVEY KEPUASAN KARYAWAN

Dalam menilai program peningkatan tenaga kerja, Perum Jamkrindo membuat evaluasi dengan menggunakan indeks kepuasan karyawan dan *engagement* karyawan Perusahaan yang dinilai pada 2013 dan 2014. Program kepuasan karyawan dapat digambarkan sebagai program peningkatan kinerja (*performance improvement*) secara efektif, dalam hal ini adalah program yang menyesuaikan dengan kebutuhan para karyawan.

EMPLOYEE SATISFACTION SURVEY

In order to assess the employee's improvement program, Perum Jamkrindo establishes an evaluation system using the method of employee's satisfaction and employee engagement index, which were applied in 2013 and 2014. The employee's satisfaction program is seen as an effective performance improvement program, in which it can be adjusted to the requirements or necessities of the Company's employees.

Survei kepuasan karyawan ini dilakukan di seluruh wilayah kerja Perusahaan dengan cara memberikan jawaban melalui kuisioner yang berjumlah 546 responden meliputi KKWT, calon karyawan, karyawan tetap dan *Prohire*.

The satisfaction survey is conducted in all operational areas of the Company by distributing questionnaires to 546 respondents to Certain-Time Worker Employees (KKWT), potential employees, permanent employees and Prohire.

Hasil dari survei kepuasan karyawan dengan menggunakan indeks kepuasan karyawan dan *engagement* karyawan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerjanya.

Based on the results of employee's satisfaction survey using the employee's satisfaction and employee's engagement index, it is expected that the Company's performance will improve in the future.

Tabel 2.15. Indeks Kepuasan dan Loyalitas Karyawan Perum Jamkrindo

Table 2.15. Employee Satisfaction and Loyalty Index of Perum Jamkrindo

Uraian / Description	**Kepuasan Karyawan /** Employee's Satisfaction		**Loyalitas /** Loyalty	
	2013	**2014**	**2013**	**2014**
Kantor Pusat / Main Office	65.17	66.66	69.03	68.43
Wilayah I / Area I	65.98	66.63	72.39	72.29
Wilayah II / Area II	67.49	68.15	71.61	71.64
Wilayah III / Area III	70.58	72.36	73.15	74.02
Nasional / National	66.63	67.65	71.19	71.07

Indeks kepuasan dan loyalitas karyawan Perum Jamkrindo dilihat dari tingkat nasional indeks kepuasan Karyawan yang mengalami kenaikan dari 66,63 pada 2013 menjadi 67,65 pada 2014, yang termasuk dalam kategori BAIK. Sedangkan indeks loyalitas karyawan secara Nasional mengalami sedikit penurunan dari 71,19 pada 2013 menjadi 71,07 pada 2014, yang termasuk dalam kategori BAIK.

Nationally, the employee satisfaction index in 2014 increased from 66.63 to 67.65 and is classified as GOOD. Meanwhile, the employee loyalty index experienced a slight decrease from 71.19 in 2013 to 71.07. However, it is still classified as GOOD.

Berdasarkan 4 (empat) kategori, yaitu Kantor Pusat, Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III, Indeks Kepuasan dan Loyalitas Karyawan Perum Jamkrindo tertinggi terdapat di Wilayah III sedangkan Indeks Kepuasan dan Loyalitas Karyawan Perum Jamkrindo terendah terdapat di Kantor Pusat.

Based on the 4 (four) categories, namely Head Office, Area I, Area II and Area III, the highest satisfaction and loyalty index is focused in Area III while the lowest level is focused in the Head Office.

TINGKAT KESEJAHTERAAN

Perum Jamkrindo menyadari bahwa tuntutan tugas dan tanggung jawab Perusahaan terus meningkat seiring dengan peningkatan skala dan volume bisnis Perusahaan. Untuk itu, seluruh karyawan dituntut untuk dapat bekerja secara intensif dan optimal sesuai kebutuhan perusahaan.

WELFARE LEVEL

Perum Jamkrindo realized that the demand of the task and responsibility of the Company continues to increase along with the increases in scale and volume of the Company's business. In that respect, all employees are required to work intensively and optimally to meet the Company's needs.

Selain menyediakan lingkungan kerja yang nyaman, baik dan kondusif, Perum Jamkrindo juga berupaya untuk menyempurnakan sistem penggajian karyawan. Sistem penggajian karyawan Perusahaan disusun dengan memperhatikan masa kerja, beban kerja, tanggung jawab serta risiko tugas maupun jabatan masing-masing karyawan.

In addition to providing a convenient, good and conducive atmosphere, Perum Jamkrindo also strives to improve its payroll system. The Company's payroll system is developed by taking into account the tenure, workload, responsibilities, and work risks as well as the position of each employee.

Perusahaan telah menerapkan sistem pemberian insentif baik kepada karyawan maupun unit kerja, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja karyawan. Selain itu, Perum Jamkrindo juga memberikan benefit kepada karyawan berupa jasa produksi sebagai bentuk apresiasi Perusahaan atas kinerja tahunannya.

Berikut rincian pendapatan dan rasio gaji tertinggi dan terendah karyawan Perum Jamkrindo:

1. Pendapatan karyawan Perum Jamkrindo terdiri dari:
   a. Gaji Pokok
   b. Tunjangan kesejahteraan
   c. Tunjangan Jabatan
   d. Tunjangan Wilayah
   e. Tunjangan Uang Makan
   f. Tunjangan Komunikasi
   g. Tunjangan Cuti Tahunan
   h. Tunjangan Hari Raya

2. Rasio Gaji (Upah) tertinggi dan terendah
   a. Rasio Gaji Karyawan Terendah dan Tertinggi = 1 : 5,43
   b. Rasio Gaji Direksi Terendah dan Tertinggi = 1 : 1,08
   c. Rasio Honorarium Dewas Terendah dan Tertinggi = 1 : 1,11
   d. Rasio Gaji Direksi Terendah dan Karyawan Tertinggi = 1 : 4,27

The Company has implemented an incentive provision system to both employees and working unit as a token of appreciation on their performance. Moreover, Perum Jamkrindo also provided benefits to employees in the form of production service as an appreciation of the Company's for their annual performance.

Here are the details of income and the ratio of the highest and lowest salaries of employees of Perum Jamkrindo:

1. Employee Revenue of Perum Jamkrindo consists of:
   a. Basic Salary;
   b. Welfare allowances;
   c. Position Allowances:
   d. Regional Allowances;
   e. Meals Allowances;
   f. Communication Allowances;
   g. Annual Leave Allowances;
   h. Religious Holiday Allowance;

2. Ratio of the highest and lowest Salary (wage)
   a. Ratio of the Highest and Lowest Employees' Salary = 1 : 5.43
   b. Ratio of the Highest and Lowest Directors' Salary = 1 : 1.08
   c. Ratio of the Highest and Lowest Board of Supervisors' Honorarium = 1 : 1.11
   d. Ratio of the Lowest Director's Salary and the Highest Employee's Salary= 1 : 4.27

Tabel 2.16. Rasio Gaji 2014

Table 2.16. Salary Ratio in 2014

Gaji / Salary	**GG/TG**	**Gaji + Tunjangan Tetap /** Salary + Permanent Allowances	**Jabatan /** Position
Gaji Tertinggi 2014 / Highest Salary in 2014	XI/16.3	28.057.143	Kepala Kantor Wilayah / Head of Regional Office
Gaji Terendah 2014 / Lowest Salary in 2014	II/3	5.181.835	Pelaksana / Staff

Penilaian Kinerja Karyawan

Penilaian kinerja karyawan adalah untuk mengetahui tingkat pelaksanaan pekerjaan dan potensi karyawan serta sarana untuk penetapan kebijaksanaan imbalan jasa dan pembinaan karyawan. Periode penilaian terdiri dari periode

Evaluation on Employee's Performance

An evaluation on employee's performance is conducted to understand the rate of duty implementation and potency of the employees, and as a medium to determine the policy for employee's remuneration and development.

penilaian semesteran dan periode penilaian tahunan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Periode penilaian semesteran
b. Periode penilaian tahunan

The evaluation period covers the semester evaluation and annual evaluation with the following explanation:

a. Semester evaluation period
b. Annual evaluation period

Untuk periode Penilaian Tahunan Kinerja Pegawai (PTKP) dilakukan setiap bulan pertama tahun berikutnya dengan perhitungan sebagai berikut:

The Annual Evaluation period of Employees' Performance (PTKP)is conducted in the first month of the following year with the calculation as follows:

PTKP = Nilai Kinerja Semester I / Result of the First Semester Performance + Nilai Kinerja Semester II / Result of the Second Semester Performance

Penilaian ini digunakan sebagai dasar untuk perhitungan pemberian penghargaan, penetapan kenaikan gaji karyawan, serta sebagai salah satu pertimbangan untuk kebijakan pembinaan karyawan.

This evaluation is used as the basis for the calculation of award provision, salary rise, and as one of the consideration for the determination of employee's development policy.

Unsur-unsur penilaian kinerja karyawan bagi Pejabat adalah sebagai berikut:

Meanwhile, the elements of employee's performance evaluation for the officers are as follows:

Tabel 2.17. Unsur Penilaian Kinerja Karyawan

Table 2.17. Elements of Employee's Performance Evaluation

No	Unsur / Element	
1	Prestasi kerja / Performance	a. Produktivitas / Productivity b. Kualitas hasil kerja / Quality of work result c. Inisiatif / Initiative d. Penguasaan pekerjaan / Work control e. Penyesuaian diri terhadap tuntutan tugas disiplin / Conformity to duty demands and discipline
2	Kepribadian / Personality	a. Tanggung jawab / Responsibility b. Kemauan belajar / Will to learn c. Kreativitas / Creativity d. Komitmen / Commitment e. Loyalitas / Loyalty f. Kerjasama / Cooperation
3	Kepemimpinan / Leadership	a. Merencana / Planning b. Mengorganisir / Organizing c. Mendelegasikan tugas / Duty delegation d. Mengendalikan / Control e. Mengambil keputusan / Decision-making process f. Memotivasi / Motivating g. Mengembangkan bawahan / Subordinates' development h. Membina kelompok kerja / Work units' development

SERIKAT KARYAWAN PERUM JAMKRINDO

Serikat Karyawan Perum Jamkrindo dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar yang tercatat pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan bukti pencatatan Nomor 03/Sekarsa/X/2005 tanggal 17 Oktober 2005 yang kemudian dilakukan perubahan pencatatan dengan bukti perubahan nama dan/atau lambang SP/SB melalui surat nomor 1043/-1.8343 tanggal 19 Juni 2013, berikut perubahannya.

Hubungan kerja di Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dilandasi semangat kemitraan dan kebersamaan dengan asas kekeluargaan yang membangkitkan jiwa persatuan bagi semua Karyawan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia untuk bersinergi menyumbangkan pikiran dan tenaganya secara optimal ke arah pencapaian tujuan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dalam suasana kerja yang harmonis.

Landasan tersebut sejalan dengan tujuan dasar hubungan industrial yaitu terwujudnya produktivitas kerja yang tinggi dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat, terwujudnya kedisiplinan, sikap dan etos kerja yang menjamin kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja karyawan serta kepastian jalannya Perusahaan.

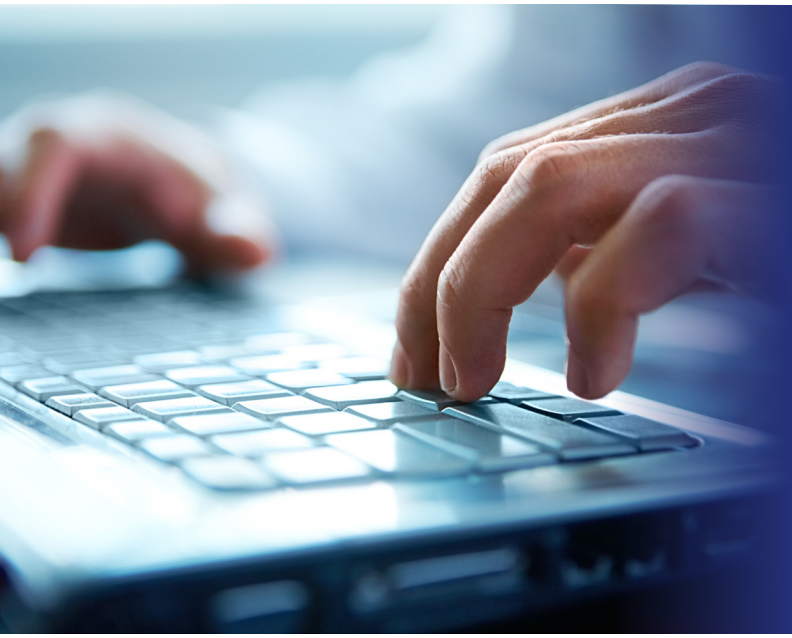
EMPLOYEE UNION OF PERUM JAMKRINDO

Employee Union of Perum Jamkrindo is established based on Articles of Association recorded in the Manpower and Transmigration Department Office, Central Jakarta, Administration City, with recording proof Number 03/Sekarsa/X/2005 dated October 17, 2005, which is later changed with the recording with proof of change of name and/or logo of SP/SB through letter number 1043/-1.8343 dated June 19, 2013, along with the changes.

Work relationship in Perusahaan Umum (Perum) of Jaminan Kredit Indonesia is based on the spirit of partnership and togetherness with family principles that arises unity spirit for all Employees of Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia in order to synergyze in contributing thoughts and energy optimally. This aims to achieve the objective of Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia in a harmonious working condition.

This foundation is in line with the basic objective of industrial relation, namely high work productivity in a safe and healthy working environment, discipline, behaviour and working ethos to ensure welfare, occupational health and safety of employees, and assurance of the Company's running operation.

Teknologi Informasi (TI)
Information Technology (IT)



Dalam rangka menunjang kegiatan usaha Perum Jamkrindo, khususnya dukungan dalam penyediaan aplikasi perangkat lunak kegiatan operasional penjaminan kredit

As an effort to support business activities of the Company, particularly in supporting the procurement of software application of Credit Guarantee operational activities

IMPLEMENTASI TI

Dalam rangka menunjang kegiatan usaha Perum Jamkrindo, khususnya dukungan dalam penyediaan aplikasi perangkat lunak kegiatan operasional penjaminan kredit, maka perusahaan telah melakukan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

1. Penyempurnaan aplikasi inti (*core*)
   Untuk menjaga konsistensi dan keakuratan data antara Keuangan (Akuntansi) dengan Operasional, maka perusahaan telah menyediakan aplikasi *middleware* yang berfungsi untuk mengintegrasikan input data Aplikasi Operasional dengan Aplikasi Akuntansi melalui mekanisme *single entry*. Perusahaan juga menerapkan mekanisme Klaim Register pada aplikasi operasional penjaminan, sehingga pengajuan klaim yang tidak layak proses ke tahap selanjutnya dapat dikembalikan ke Bank dan tidak menjadi *pending matters* Perum Jamkrindo. Hal ini dapat meningkatkan validitas perhitungan rasio tingkat penyelesaian klaim Perum Jamkrindo karena dapat dihitung dari perbandingan antara persetujuan klaim dengan pengajuan klaim yang layak proses.

IT IMPLEMENTATION

As an effort to support business activities of the Company, particularly in supporting the procurement of software application of Credit Guarantee operational activities, the Company has conducted the following activities:

1. Improvement of core application
   To maintain the consistency as well as the accuracy of data between Finance (Accounting) and Operations, the Company has provided a middleware application which functions to integrate the data input between the Operational Application with Accounting Application through single entry mechanism. The Company has also applied Register Claim mechanism on guarantee operational application so that any claim that is infeasible to be processed can be denied; thus, it will help avoiding suspended claims. This eventually leads to the improvement in the calculation validity of claim completion ratio due to the ease in calculating by comparing claim approval to the proposed claim that is feasible to be processed.

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan tingkat pelayanan (SLA) Perum Jamkrindo kepada mitra (Penerima Jaminan) maka perusahaan telah mengupayakan pengembangan mekanisme penerbitan sertifikat penjaminan yang telah dilengkapi dengan sistem penomoran sertifikat secara otomatis dan digitalisasi tandatangan pejabat di sertifikat. Untuk mempermudah proses pemilihan lembaga *co-Guarantee* dan reasuransi maka perusahaan telah menyediakan mekanisme *grading by system* sehingga dapat meningkatkan efesiensi waktu dan sumber daya manusia.

As part of the efforts to improve service level (SLA) to the guarantee recipients, Perum Jamkrindo has made an improvement in the mechanism of guarantee certificate issuance that has been equipped with automatic certificate numbering system and digitalized officer's signature on the certificate. Furthermore, to facilitate the selection process of co-Guarantee and re-insurance institution, the Company has also provided a mechanism of grading by system so as to improve the efficiency of time and human resources involvement.

2. Penyusunan Aplikasi *Surety Bond*
   Seiring dengan dirilisnya produk *Surety Bond* maka Perum Jamkrindo telah menyediakan sarana berupa program aplikasi untuk mengakomodasi kebutuhan akan pengelolaan penjaminan *Surety Bond*, yang terdiri dari:
   a. Jaminan Penawaran
   b. Jaminan Uang Muka
   c. Jaminan Pelaksanaan
   d. Jaminan Pembayaran
   e. Jaminan Pemeliharaan

2. Setting up of Surety Bond Application
   In line with the launching of Surety Bond product, Perum Jamkrindo has provided an application program that will accommodate the necessity of the management of Surety Bond guarantee, which consists of:
   a. Bid Bond
   b. Advanced Payment Bond
   c. Performance Bond
   d. Payment Bond
   e. Maintenance Bond

3. Aplikasi Penjaminan KUR *Online*
   Untuk meningkatkan daya saing dalam melakukan pemasaran produk-produk penjaminan maka perusahaan telah memperluas kerja sama penjaminan KUR *Online*. Dengan kerja sama penjaminan online diharapkan dapat meningkatkan *Service Level Agreement* perusahaan terhadap mitra-mitra kerja yang berdampak terhadap peningkatan daya saing perusahaan.

3. Online KUR Guarantee Application
   As an effort to improve the competitiveness in marketing guarantee products, the Company has expanded the cooperation regarding the Online KUR guarantee. With this cooperation, it was expected that Service Level Agreement between the Company and business partners can be improved which will consequently improve the competitiveness of the Company in the end.

4. Penyusunan Aplikasi Penjaminan KKPE
   Kredit Ketahanan Pangan & Energi (KKPE) adalah kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan dan program pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati. Sejalan dengan program pemerintah tersebut maka Perum Jamkrindo telah menyusun Aplikasi Penjaminan KKPE.

4. Setting up of KKPE Guarantee Application
   Food & Energy Security Credit (KKPE) is a form of investment and/or capital credit given to support the implementation of food security program and development of crops used as the materials for biofuel. In line with this government program, Perum Jamkrindo has set up the KKPE Guarantee Application.

5. Penyusunan Aplikasi Keagenan
   Untuk meluaskan jaringan pemasaran yang telah dibangun selama ini maka Perum Jamkrindo menggunakan salah satu strategi pemasaran, yaitu penggunaan agen. Untuk kebutuhan tersebut perusahaan menggunakan pendekatan jangka pendek dan jangka panjang, yaitu:
   a. Jangka Pendek
      Dengan mengembangkan fasilitas pengisian sistem keagenan di dalam aplikasi operasional yang sudah ada.
   b. Jangka Panjang
      Dengan mengembangkan sistem informasi keagenan terpusat, dimana agen melakukan proses input secara langsung kedalamnya dan Kantor Cabang Perum Jamkrindo dapat melakukan check & verifikasi sebelum data masuk ke dalam sistem aplikasi operasional yang ada.

6. Penyusunan Aplikasi Internal Audit
   Perum Jamkrindo telah menyusun Sistem Informasi manajemen pelaporan Audit Internal yang digunakan oleh Satuan Pengawas Internal dalam menjalankan aktivitasnya untuk melakukan proses pemeriksaan.

7. Penyesuaian Aplikasi Akuntansi PKBL
   Sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Kementerian BUMN tentang Pelaporan Keuangan Berbasis PSAK ETAP untuk PKBL maka perusahaan telah melakukan penyesuaian terhadap Aplikasi Akuntansi PKBL yang ada.

TATA KELOLA TI

Sebagai salah satu perusahaan BUMN, Perum Jamkrindo wajib memenuhi peraturan pemerintah yang berlaku terkait dengan penerapan *good corporate governance* (GCG) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "BUMN wajib menerapkan *good corporate governance* secara konsisten dan berkelanjutan dengan

5. Setting up of Agency Application
   To expand the current marketing network, Perum Jamkrindo utilizes one of the existing marketing strategies, namely through the use of agents. To that end, the Company uses two approaches, short-term and long-term:
   a. Short-Term Approach
      That is by developing the fulfillment facility of agency system within the existing operational application.
   b. Long-Term Approach
      That is by developing an integrated agency information system, in which the agent directly perform the input process into the system while the Branch Office of the Company checks and verifies the data before being input into the operational application system.

6. Setting up of Internal Audit Application
   Perum Jamkrindo has set up an Information System for Internal Audit reporting management that will be used by the Internal Audit of the Company in performing its audit processes and activities.

7. Adjustment of PKBL Accounting Application
   In accordance with the direction and guidance from the Ministry of SOE regarding the PSAK ETAP Based Financial Reporting System for PKBL, the Company has adjusted its policies to the established PKBL Accounting Application.

IT GOVERNANCE

As a State-Owned Enterprise, Perum Jamkrindo is obliged to comply with the government regulations related to the implementation of Good Corporate Governance (GCG), which is a set of principles that act as the foundations of processes and mechanisms of company's governance which is based upon the business regulations, laws, and ethics. This is stipulated in the Regulation of the Minister of SOE Number PER-01/MBU/2011 article 2 paragraph (1) which stated that "SOE is obliged to implement Good Corporate Governance consistently and sustainably by

berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN".

Dengan adanya peraturan tersebut, kewajiban BUMN untuk menerapkan *good corporate governance* berimbas terhadap perlunya BUMN untuk menerapkan *IT Governance* (tata kelola TI) ke dalam Perusahaannya.

Penerapan Tata Kelola TI di Perum Jamkrindo juga dilakukan untuk memastikan bahwa investasi dan perencanaan Teknologi Informasi dapat sejalan dengan visi dan misi perusahaan serta sesuai dengan kebutuhan bisnis dan *best practice* yang berlaku dalam penerapan TI di dunia penjaminan kredit atau industri sejenis.

Dalam upaya mendapatkan pemahaman tentang kondisi TI Perum Jamkrindo terkini, sekaligus dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan inisiatif pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tingkat maturitas level 3 (tiga), maka dengan menggunakan standar acuan COBIT 4.1 Perum Jamkrindo telah melakukan *asssessment* Tata Kelola TI tahun 2014 dengan hasil sebagai berikut:

referring to this Minister Regulation and taking into account the prevailing provisions and norms as well as SOE's articles of association".

With the regulation, SOE's obligation to implement GCG entails another obligation, that is the requirement to implement IT Governance in the Company.

The implementation of IT Governance in Perum Jamkrindo is also conducted to ensure that Information Technology investment and planning are in line with vision and mission of the Company as well as with the business requirement and best practices applicable in the IT implementation in credit guarantee field or similar business.

In an effort to obtain insights on the current IT condition of Perum Jamkrindo, as well as to provide recommendation on the policy and initiative of duty that must be conducted to reach maturity level 3 (three), the Company utilizes COBIT 4.1 reference standards and has performed an assessment on its IT Governance in 2014 with the following results:

Tabel 2.18. Assessment Tata Kelola TI 2014

Table 2.18. 2014 IT Governance Assessment

Cobit *Process*	Jamkrindo		GAP
	Current	Target	
PO (Plan And Organise)	1,89	3,0	1,1
AI (Aqcuire and Implement)	2,1	3,0	0,9
DS (Deliver and Support)	1,5	3,0	1,5
ME (Monitor and Evaluate)	1,5	3,0	1,5
Nilai Total GAP / GAP Total Score			1,26

Berdasarkan hasil penilaian *maturity level* tata kelola TI Perum Jamkrindo tahun 2014, maka rekomendasi kegiatan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan desain struktur organisasi TI.
2. Penetapan kebijakan dan SOP TI

Based on the assessment of maturity level of IT Governance of the Company in 2014, recommendation on activities that must be implemented is as follows:

1. Reinforcement of IT organization structure design.
2. Determination of policy and IT SOP.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TI

Dalam rangka untuk menunjang kegiatan usaha dan kebutuhan bisnis Perum Jamkrindo, maka perusahaan akan melakukan evaluasi *Information Technology Master Plan* (ITMP) yang ada agar pengembangan Teknologi Informasi dapat selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2014-2018.

Selain itu, agar tercipta kondisi sarana dan prasarana TI yang ideal dan selaras dengan kebutuhan bisnis perusahaan serta mengikuti tren TI terkini, maka Perum Jamkrindo akan melakukan beberapa pengembangan dan penyesuaian infrastruktur tersebut dengan tetap memperhatikan skala prioritas dan kemampuan perusahaan, seperti:

- Melakukan sentralisasi sistem penyimpanan dengan memanfaatkan implementasi *cloud storage*.
- Penggunaan *redundant line* untuk koneksi konsolidasi Kantor Cabang ke Kantor Pusat dengan teknologi VPN MPLS.
- Penggunaan *system clustering* dan teknologi *virtual machine* untuk menyediakan "*high availability server*" dalam rangka menjaga ketersediaan layanan operasional TI.
- Pemberian dukungan kepada manajemen dalam menampilkan dan memonitoring pencapaian kinerja perusahaan melalui penyediaan "*cockpit room".*
- Membangun sistem keamanan ruang server dari akses pihak yang tidak berkepentingan, baik secara langsung (fisik) maupun tidak langsung (*remote*).

Perum Jamkrindo juga akan melakukan pengadaan, perbaikan dan penyempurnaan sistem aplikasi perusahaan agar sesuai dengan kebutuhan bisnis terkini, seperti:

- Penambahan fasilitas yang spesifik berhubungan dengan produk hukum di dalam Sistem *Digital Library*.
- Penambahan modul monitoring rencana tindak lanjut dan tingkat risiko, serta penambahan modul pelaporan perhitungan *Default Rate*, Rasio Klaim, *Loss Events* yang terintegrasi dengan aplikasi operasional di dalam SIMR.

TRAINING AND DEVELOPMENT FOR IT

For the purpose of supporting business activities and needs, the Company will evaluate the existing Information Technology Master Plan (ITMP) so that the development of Information Technology is in line with the Long Term Corporate Plan of 2014-2018.

Moreover, to create ideal Information Technology infrastructure and facilities that are in line with the needs of Company's business and that follow the latest IT trend, Perum Jamkrindo will create several developments and adjustments of infrastructure by always taking into account priority scale and the Company's capacity, such as:

- Conducting centralization of storage system by utilizing the implementation of cloud storage.
- Utilizing redundant line for a consolidated connection between the branch offices and main office with the VPN MPLS technology.
- Implementing the clustering system and virtual machine technology to provide a "high ability server" as an effort to maintain the IT operational service availability.
- Providing support to the management in presenting and monitoring the performance of the Company through the development of "cockpit room".
- Developing security system for server room by enlisting assistance from unaffiliated party, either directly (physical) or indirectly (remote).

Perum Jamkrindo will also conduct procurement, maintenance and improvement of application system so as to be in accordance with the current business condition, such as:

- Addition of specific facilities related to the legal products within the Digital Library System.
- Addition of follow-up plan and risk level monitoring modules, as well as the reporting modules of calculation of Default Rate, Claim Ratio, and Loss Events that are integrated in the SIMR operational application.

- Penyempurnaan integrasi Sistem Akuntansi dengan sistem lainnya, pengembangan fitur konsolidasi dengan anak perusahaan, dan pengembangan Sistem Akuntansi Perusahaan Penjaminan Syariah & Dana Pensiun.
- Sistem Aplikasi Operasional, menambahkan fitur kerja sama *online* untuk penjaminan non program (*existing*), penyempurnaan fitur keagenan, *surety bond*, kontra bank garansi, reasuransi, broker, dan *edc system*.

- Pengembangan sistem audit untuk pihak eksternal.
- Pengembangan sistem anggaran.
- Pengembangan Sistem *Monitoring* PKBL.
- Pengembangan manajemen stok barang, *e-procurement* dan inventaris/pengelolaan gedung.

- Improvement of the integration of Accounting System with other systems, development of consolidation feature with the subsidiaries, and development of Accounting System of Sharia and Pension Fund of Guarantee Company.
- Implementation of Operational Application System, addition of online cooperation feature for non-program (existing) guarantee system, improvement of agency features, surety bond, counter guarantee bank, reinsurance, broker, and edc system.
- Development of audit system for external parties
- Development of budgeting system
- Development of PKBL Monitoring System
- Development of inventory management, e-procurement and building management/inventory.

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah



PT Penjaminan Jamkrindo Syariah menjalankan usaha Penjaminan (Kafâlah) Pembiayaan dengan asas kemanfaatan.

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah is engaged in the business of Financing Guarantee (Kafâlah) with the principle of benefits.

SELAYANG PANDANG PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah merupakan Anak Perusahaan (AP) Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang penjaminan kredit atau pembiayaan yang telah didirikan sejak 1970 dengan nama Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK).

Perum Jamkrindo memulai kegiatan penjaminan atas pembiayaan lembaga keuangan syariah pada tahun 1997, melalui kerja sama dengan Bank Muamalat yang merupakan Bank Syariah pertama di Indonesia. Kerja sama tersebut menjadi yang pertama di bidang kafâlah sekaligus menjadi inspirasi terbitnya Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafâlah*, diperbarui dengan fatwa nomor 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah.

PT Jamkrindo Syariah terlahir dari Unit Usaha Syariah berbentuk Divisi Penjaminan Syariah Perum Jamkrindo. Divisi Penjaminan Syariah yang beroperasi sejak 13 Februari 2007, melayani Penjaminan (Kafâlah) Pembiayaan

OVERVIEW OF PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah is a Subsidiary Entity of Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo), a State-Owned Enterprise which engages in the business of credit guarantee or financing that was established in 1970 under the name of Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK).

Perum Jamkrindo began its guarantee activities over the financing of sharia financial institutions in 1997 through cooperation with Bank Muamalat, the first Sharia Bank in Indonesia. The cooperation, then, began to develop to be the first one in the field of kafâlah, as well as be the inspiration for the National Board of Supervisors of MUI to issue Fatwa number 11/DSN-MUI/IV/2000 regarding Kafâlah, and was amended through fatwa number 74/DSN-MUI/I/2009 regarding Sharia Guarantee.

PT Jamkrindo Syariah was established from the Sharia Business Unit under the Division of Sharia Guarantee of Perum Jamkrindo. The Sharia Guarantee Division has been operating since February 13, 2007 and served the

Lembaga Keuangan Syariah, baik Bank maupun Non Bank. Kerja sama Kafâlah pembiayaan terus berkembang. Cikal bakal penjaminan Perum Jamkrindo untuk bank syariah dimulai pada 1997 dengan ditandatanganinya kerja sama penjaminan pembiayaan dengan PT Bank Muamalat, kemudian menjalin kerja sama dengan PT Bank Syariah Mandiri pada 2003, serta diikuti perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia.

Guarantee (Kafâlah) operations for the Financing of Sharia Financial Institutions, both Bank and Non-Bank. Since its initial operation, the Kafâlah cooperation for financing continues to develop. The forerunner of guarantee activities of Perum Jamkrindo for sharia banks began in 1997 with the signing of the financing guarantee cooperation with PT Bank Muamalat. In 2003, the Company signed an agreement with PT Bank Syariah Mandiri, and after that, more sharia financial institutions and banks in Indonesia also cooperated with the Company.

Seiring dengan produk dan jasa layanan keuangan syariah yang terus berkembang dari waktu ke waktu, fitur penjaminan pun terus beradaptasi mengikuti kebutuhan dan ekspektasi mitra kerja dan nasabah terjamin dengan terus berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

In line with the continuous development of sharia financial products and services, the guarantee features also need to be adjusted and follow the necessities and expectations of business partners and customers by always taking into account the sharia principles.

Menyadari tuntutan *stakeholders* yang begitu besar terhadap kemurnian nilai syariah dalam industri keuangan di Indonesia, kinerja Penjaminan Syariah yang cukup meyakinkan, serta komitmen yang kuat untuk memperbesar kapasitas perusahaan serta mengakselerasi pertumbuhan industri keuangan syariah nasional, Perum Jamkrindo mengambil langkah strategis dengan mendirikan Anak Perusahaan, PT Jamkrindo Syariah. Terlahir dengan modal dasar Rp1 triliun dengan modal disetor sebesar Rp250 miliar, PT Jamkrindo Syariah bertekad menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah terdepan dengan tagline "Jamsyar Progresif: Profesional, Gesit, Responsif, dan Inovatif".

Supported with the high demands from stakeholders for the purity of sharia values in the national financial sector, reliable performance of Sharia Guarantee, as well as strong commitment to expand the Company's capacity and accelerate the growth of national sharia financial industry, Perum Jamkrindo has executed a strategic step by establishing a Subsidiary Entity under the name of PT Jamkrindo Syariah. With authorized capital amounting to Rp1 trillion and paid-in capital of Rp250 billion, PT Jamkrindo Syariah is committed to becoming The Leading Sharia Guarantee Company with the tagline of "Jamsyar Progresif: Profesional, Gesit, Responsif, dan Inovatif".

JamSyar
ProGRESIF
Profesional, Gesit, Responsif dan Innovatif

DASAR HUKUM PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah didirikan dan beroperasi berdasarkan izin-izin sebagai berikut:

1. Persetujuan Definitif Kementerian BUMN Surat Nomor: S-536/MBU/2014 tanggal 16 September 2014 tentang Persetujuan Definitif Pendirian Anak Perusahaan PT Jamkrindo Syariah;
2. Akta Notaris Nomor 68 oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. tanggal 19 September 2014;
3. Secara resmi telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-26462.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tanggal 24 September 2014;
4. Izin operasional dari OJK melalui surat nomor: KEP-134/D.05/2014 tanggal 07 November 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Syariah Kepada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah;
5. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-34/NB.223/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pencatatan Produk Baru PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

LEGAL BASIS OF PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah was established and operates on the basis of the following legal permits:

1. Definitive Agreement from the Ministry of SOE with the Letter Number: S-536/MBU/2014 dated September 16, 2014 concerning the Definitive Agreement on the Establishment of PT Jamkrindo Syariah as a Subsidiary;
2. Notarial Act Number 68 drawn up before Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notary on September 19, 2014;
3. Officially listed on the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Decree of the Minister of Justice and Human Rights Number AHU-26462.40.10.2014 concerning the Validation on the Establishment of Legal Entity of Limited Liability Company with the name of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dated September 24, 2014;
4. Permit to Operate from OJK through a letter number KEP-134/D.05/2014 dated November 7, 2014 concerning the Approval for Business Permit of Sharia Guarantee Company to PT Penjaminan Jamkrindo Syariah;
5. A Letter from Financial Services Authority (OJK) Number S-34/NB.223/2015 dated January 15, 2015 concerning the Listing of New Products of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

KEGIATAN USAHA

Akad Pembiayaan

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah menjalankan usaha Penjaminan (Kafâlah) Pembiayaan dengan asas kemanfaatan, selektifitas dan kelayakan usaha. Jenis-jenis Akad Pembiayaan yang dapat dijamin adalah sebagai berikut:

BUSINESS ACTIVITIES

Financing Agreement

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah is engaged in the business of Financing Guarantee (Kafâlah) with the principle of benefits, selectivity and business feasibility. Types of financing agreement that are offered are as follows:

Tabel 2.19 Akad Pembiayaan / **Table 2.19. Financing Agreement**

No	Jenis / Type	Deskripsi / Description
1	Pembiayaan Murâbahah Murâbahah Financing	Pembiayaan dari Penerima Jaminan *(Makfûl Lahu)* berupa jual beli barang antara Penerima Jaminan *(Makfûl Lahu)* dengan Terjamin *(Makfûl 'Anhu)* dengan harga asal (pokok pembiayaan) ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Financing of the Guarantee Recipients (*Makfûl Lahu*) in the form of selling and purchasing of goods between the Guarantee Recipient (*Makfûl Lahu*) and the Guaranteed (*Makfûl 'Anhu*) with the initial price (principal of financing) plus the margin or profit agreed upon.

No	Jenis / Type	Deskripsi / Description
2	Pembiayaan Salâm Salâm Financing	Pembiayaan dari Penerima Jaminan *(Makfûl Lahu)* berupa jual beli barang antara Penerima Jaminan *(Makfûl Lahu)* dengan Terjamin *(Makfûl 'Anhu)* dimana barang yang dibeli Terjamin *(Ashîl)* akan diserahkan di kemudian hari sedangkan pembiayaan dilakukan di muka. Financing of the Guarantee Recipients (*Makfûl Lahu*) in the form of selling and purchasing of goods between the Guarantee Recipient (*Makfûl Lahu*) and the Guaranteed (*Makfûl 'Anhu*) in which the goods that are bought by the Guaranteed (*Ashîl*) will be delivered in the future, while payments are made in advance.
3	Pembiayaan Istishnâ' Istishnâ' Financing	Pembiayaan dari Penerima Jaminan *(Makfûl Lahu)* berupa jual beli barang antara Penerima Jaminan *(Makfûl Lahu)* dengan Terjamin *(Makfûl 'Anhu)* dimana jual beli tersebut berupa pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara Penerima Jaminan *(Makfûl Lahu)* dan Terjamin *(Makfûl 'Anhu),* sedangkan Pembiayaan dapat dilakukan di muka, cicilan atau ditangguhkan pada masa yang akan datang. Financing of the Guarantee Recipients (*Makfûl Lahu*) in the form of selling and purchasing of goods between the Guarantee Recipients (*Makfûl Lahu*) and the Guaranteed (*Makfûl 'Anhu*) in which the sale is in the form of order for the manufacturing of certain goods with specific criteria and requirements that have been agreed upon between the Guarantee Recipients (*Makfûl Lahu*) and the Guaranteed (*Makfûl 'Anhu*), while payments can be made in advance, through installments or can be deferred in the future.
4	Pembiayaan Mudhârabah Mudhârabah Financing	Pembiayaan berupa Kerja Sama Usaha antara Penerima Jaminan *(Makfûl Lahu)* dengan Terjamin *(Makfûl 'Anhu)* dimana Penerima Jaminan *(Makfûl Lahu)* menyediakan seluruh modal, sedangkan Terjamin *(Makfûl 'Anhu)* mengelola Usaha tersebut dengan kesepakatan bahwa keuntungan yangtimbul dari Usaha tersebut akandibagi kepada Penerima Jaminan *(Makfûl Lahu)* dan Terjamin *(Makfûl 'Anhu)* sesuai nishbah bagi hasil yang disepakati. Financing product in the form of Business Cooperation between the Guarantee Recipients (*Makfûl Lahu*) and the Guaranteed (*Makfûl 'Anhu*) in which the Guarantee Recipients (*Makfûl Lahu*) provides the entire capital, while the Guaranteed (*Makfûl 'Anhu*) manages the business with an agreement that the profits arising from business Recipients will be divided between the Guarantee Recipients (*Makfûl Lahu*) and the Guaranteed (*Makfûl 'Anhu*) in accordance with the agreed profit sharing ratio.
5	Pembiayaan Musyârakah Musyârakah Financing	Pembiayaan berupa Kerja Sama Usaha antara Penerima Jaminan (*Makfûl Lahu*) dan Terjamin (*Makfûl 'Anhu*) untuk suatu Usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi kepada Penerima Jaminan (*Makfûl Lahu*) dan Terjamin (*Makfûl 'Anhu*) sesuai nishbah bagi hasil yang disepakati dan risiko ditanggung sesuai dengan kontribusi dana masing-masing. Financing product in the form of Business Cooperation between the Guarantee Recipients (*Makfûl Lahu*) and the Guaranteed (*Makfûl 'Anhu*) for a particular Business, in which each party contributes funds with an agreement that the profit will be divided between the Guarantee Recipients (*Makfûl Lahu*) and the Guaranteed (*Makfûl 'Anhu*) in accordance with the agreed profit sharing ratio, while the risk will be borne according to each fund contribution.

No	Jenis / Type	Deskripsi / Description
6	Pembiayaan Ijârah Ijârah Financing	Pembiayaan berupa Hak Guna (Manfaat) suatu barang atau jasa dari Penerima Jaminan *(Makfûl Lahu)* dalam waktu tertentu melalui Pembayaran Sewa dari Terjamin *(Makfûl 'Anhu)* tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Financing product in the form of the Rights To Use (Benefits) of goods or services of Guarantee Recipients (*Makfûl Lahu*) within a specified period of time through Lease Payments from the Guaranteed (*Makfûl 'Anhu*), without being followed by the transfer of ownership of the goods.
7	Pembiayaan Ijârah Muntahiyah Bit Tamlîk Ijârah Muntahiyah Bit Tamlîk Financing	Pembiayaan berupa Hak Guna (Manfaat) suatu barang atau jasa dari Penerima Jaminan *(Makfûl Lahu)* dalam waktu tertentu melalui Pembayaran Sewa dari Terjamin *(Makfûl 'Anhu),* dengan disertai opsi untuk membeli/tidak membeli barang pada akhir perjanjian Pembiayaan. Financing product in the form of the Rights To Use (Benefits) of goods or services of Guarantee Recipients (Makfûl Lahu) within a specified period of time through Lease Payments from the Guaranteed (Makfûl 'Anhu), with an option to buy/not buy the goods at the end of the Financing agreement.

Produk Kafâlah

Produk Kafâlah PT Penjaminan Jamkrindo Syariah terdiri dari 4 (empat) produk, yaitu sebagai berikut:

Kafâlah Product

Kafâlah Products of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah consist of 4 (four) types of product, namely:

Tabel 2.21.Produk Kafâlah

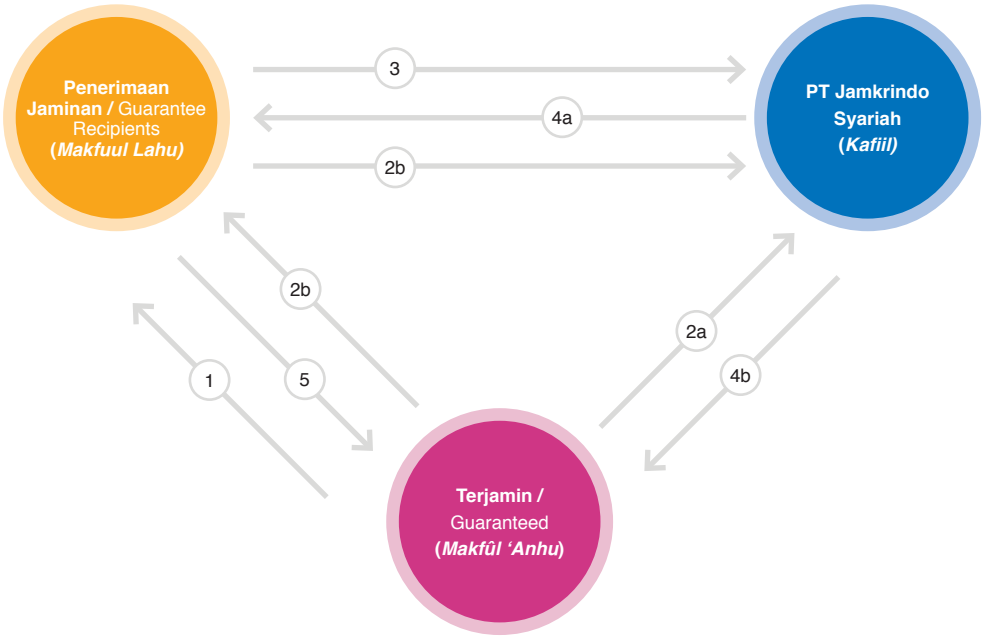
Table 2.21. Kafâlah Product

No	Produk / Product	Deskripsi / Description	Jenis / Kind	*Coverage*
1	Kafâlah Pembiayaan Umum General Financing Kafâlah	Penjaminan Pembiayaan yang diajukan untuk mendukung kelancaran kegiatan Usaha/ Proyek atau Kegiatan Investasi yang dilakukan oleh perorangan, perusahaan atau koperasi dengan tujuan untuk mendapat hasil/*return* dari kegiatan tersebut. / Financing Guarantee product that is offered to support the flow of Business/Project or Investment Activities conducted by an individual, a company, or cooperative with the aim to gain results from the activities.	• Kafâlah Pembiayaan Modal Kerja / Work Capital Financing *Kafâlah* • Kafâlah Pembiayaan Investasi / Investment Financing *Kafâlah*	Persentase Kafâlah maksimal 75% dari Plafond Pembiayaan atau sesuai kesepakatan antara PT Jamkrindo Syariah dengan Penerima Jaminan *(Makfûl Lahu)*. / The maximum percentage of *Kafâlah* is 75% of the Financing Platform or in accordance with the agreement between PT Jamkrindo Syariah and the Guarantee Recipients (*Makfûl Lahu*).

No	**Produk /** Product	**Deskripsi /** Description	**Jenis /** Kind	***Coverage***
2	Kafâlah Pembiayaan Multiguna Multipurpose Financing Kafâlah	Kafâlah Pembiayaan Multiguna adalah Penjaminan atas Pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan *(Makfûl Lahu)* kepada Terjamin *(Makfûl 'Anhu)* dengan sumber pengembalian adalah penghasilan tetap/gaji dan pendapatan lain perbulan yang sah dari tempat Terjamin *(Makfûl 'Anhu)* bekerja. / Multipurpose Financing Kafâlah is a Financing Guarantee product that is given by the Guarantee Recipients (*Makfûl Lahu*) to the Guaranteed (*Makfûl 'Anhu*) with the source of repayment from fixed income/salary and other legal monthly income of the Guaranteed (*Makfûl 'Anhu*) work place.	-	Persentase Kafâlah maksimal adalah sebesar 100% dari Plafond Pembiayaan untuk penyebab kematian, 75% untuk sebab PHK dan lainnya. / The maximum percentage of Kafâlah is 100% of the Financing Platform for the cause of death, and 75% of the cause of work termination and other matters.
3	Kafâlah Pembiayaan Mikro Micro Financing Kafâlah	Kafâlah Pembiayaan Mikro adalah Penjaminan atas Pembiayaan yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk keperluan Modal Kerja dan/ atau Investasi dengan *Plafond* maksimum sebesar Rp250.000.000 atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Penerima Jaminan*(Makfûl Lahu)* atau sesuai kesepakatan tertulis antara PT Jamkrindo Syariah dan Penerima Jaminan *(Makfûl Lahu)*. / Micro Financing Kafâlah is a Financing Guarantee product that is given to Business layers for the needs of Work Capital and/or Investments with the maximum platform amounting to Rp250,000,000 or in accordance with the regulations applicable for each Guarantee Recipient (*Makfûl Lahu*) or in accordance with the written agreement between PT Jamkrindo Syariah and the Guarantee Recipients (*Makfûl Lahu*).	-	Persentase Kafâlah maksimal 75% dari Plafond Pembiayaan. / Maximum percentage of Kafâlah is 75% of Financing Plafond

No	Produk / Product	Deskripsi / Description	Jenis / Kind	*Coverage*
4	Kafâlah Bank Garansi / Kontra Bank Garansi Bank Guarantee / Counter Bank Guarantee Kafâlah	Kafâlah Kontra Bank Garansi (KBG) adalah Pemberian Jaminan sebagai kontra garansi atasfasilitas Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank kepada Terjamin *(Makfûl 'Anhu).* / Bank Guarantee / Counter Bank Guarantee Kafâlah is the Provision of Guarantee as a counter guarantee on the facilities of Bank Guarantee that is issued by a Bank to the Guaranteed (Makfûl 'Anhu).	• Kafâlah KBG untuk Penawaran (Jaminan Tender) / Bank Guarantee *Kafâlah* for the Offering (Tender Guarantee) • Kafâlah KBG Uang Muka (Jaminan Uang Muka) / Bank Guarantee Kafâlah for the Down Payment (Down Payment Guarantee) • Kafâlah KBG Pelaksanaan (Jaminan Pelaksanaan) / Bank Guarantee *Kafâlah* for the Implementation (Implementation Guarantee) • Kafâlah KBG Pemeliharaan (Jaminan Pemeliharaan) / Bank Guarantee Kafâlah for the Maintenance (Maintenance Guarantee) • Kafâlah KBG Pembayaran (Jaminan Pembayaran) / Bank Guarantee Kafâlah for the Financing (Financing Guarantee) • Kafâlah KBG untuk Penyalur/Agen/*Dealer*/ Depot *Holder* (swasta *bonafide*) / Bank Guarantee Kafâlah for the Distributors/Agents/ Dealers/ Depot Holders (bonafide private sector)	Coverage Kafâlah adalah sebesar 75%-100% dari Nilai Bank Garansi atau bergantung pada jenis Bank Garansi dan Persyaratan yang ditentukan Penerima Jaminan *(Makfûl Lahu)*. / The coverage for this product reaches 75%-100% of the Value of Bank Guarantee, or it depends on the type of Bank Guarantee and Requirements set by the Guarantee Recipients (*Makfûl Lahu*).

Gambar 2.3 Mekanisme Kafâlah **Figure 2.3 Kafâlah Mechanism**



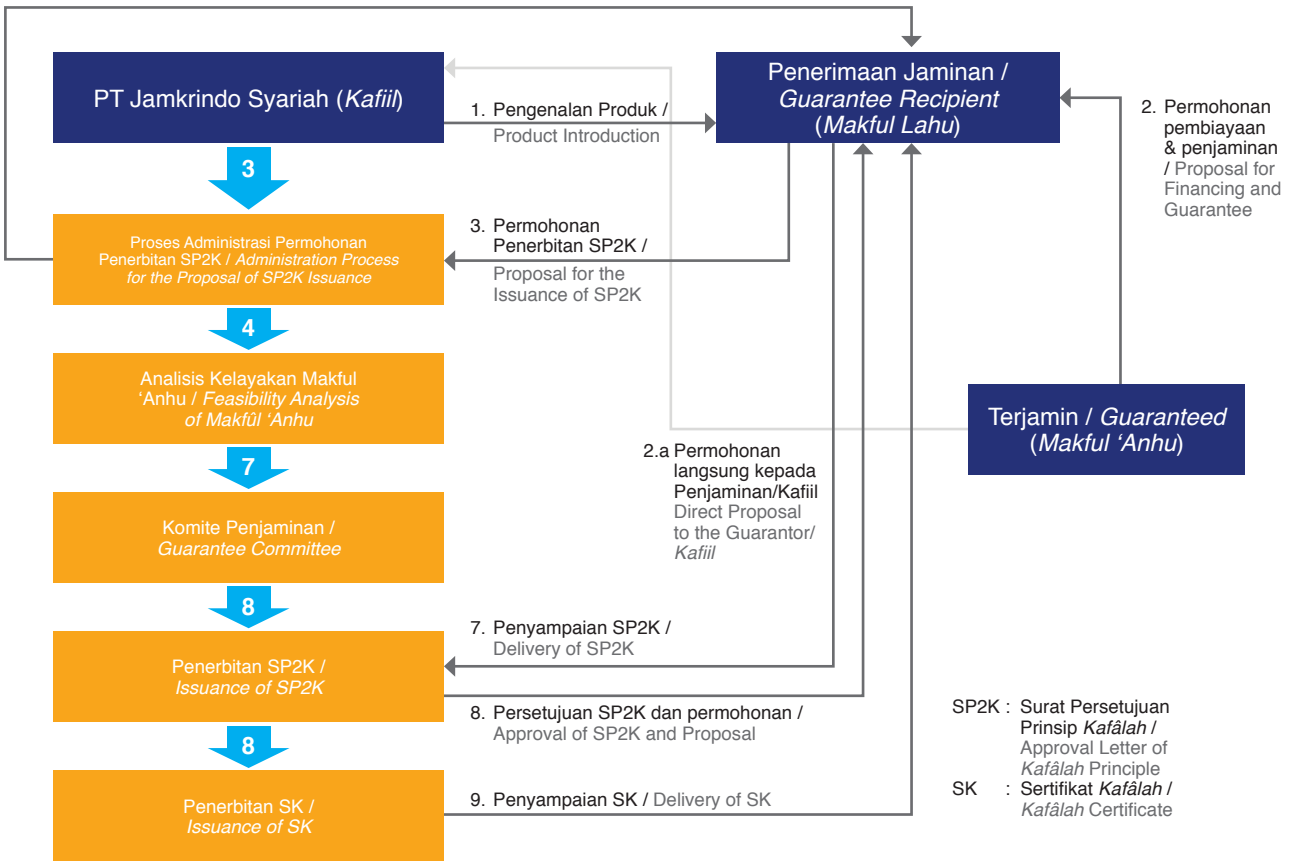
Penjelasan Model Mekanisme Kafâlah: **Description of Kafâlah Mechanism Model**

No	Penjelasan	Description
1	• Terjamin *(Makfûl 'Anhu)* mengajukan permohonan Pembiayaan • Terjamin *(Makfûl 'Anhu)* mengajukan persyaratan pengajuan Pembiayaan • Terjamin *(Makfûl 'Anhu)* memenuhi kewajiban Pembiayaan yang ditetapkan oleh Penerima Jaminan *(Makfûl Lahu)*	• The Guaranteed (*Makfûl 'Anhu*) submits Financing proposal • The Guaranteed (*Makfûl 'Anhu*) submits the requirements for the filing of Financing • The Guaranteed (*Makfûl 'Anhu*) fulfills the Financing obligations set by the Guarantee Recipients (*Makfûl Lahu*)
2a	Terjamin *(Makfûl 'Anhu)* mengajukan Kafâlah Pembiayaan secara langsung kepada Penjamin (*Kafiil)*: **Pola Langsung**	The Guaranteed (Makfûl 'Anhu) submits Financing Kafâlah directly to the Guarantor (Kafiil): **Direct Pattern**
2b	Terjamin *(Makfûl 'Anhu)* mengajukan Kafâlah Pembiayaan melalui Penerima Jaminan *(Makfûl Lahu)*: **Pola Tidak Langsung**	The Guaranteed (Makfûl 'Anhu) submits Financing Kafâlah through the Guarantee Recipients (Makfûl Lahu): **Indirect Pattern**
3	• Penerima Jaminan *(Makfûl Lahu)* mengajukan permohonan penjaminan Pembiayaan • Penerima Jaminan *(Makfûl Lahu)* menyampaikan laporan nominatif Pembiayaan secara periodik • Penerima Jaminan *(Makfûl Lahu)* menyampaikan angsuran piutang subrogasi dalam hal terdapat angsuran dari Terjamin *(Makfûl 'Anhu)*	• The Guarantee Recipients (*Makfûl Lahu*) submits Financing guarantee proposal • The Guarantee Recipients (*Makfûl Lahu*) delivers the Financing nominative report periodically • The Guarantee Recipients (*Makfûl Lahu*) delivers the installment of subrogation receivables in the event of the installment of the Guaranteed (*Makfûl 'Anhu*) exists

No	Penjelasan	Description
4a	• PT Jamkrindo Syariah memberikan persetujuan penjaminan kepada Penerima Jaminan *(Makfûl Lahu)* • PT Jamkrindo Syariah membayar klaim apabila Pembiayaan mengalami kemacetan sesuai kriteria Bank Indonesia sepanjang semua persyaratan klaim terpenuhi	• PT Jamkrindo Syariah gives approval for the guarantee to the Guarantee Recipients (*Makfûl Lahu*) • PT Jamkrindo Syariah pays the claim if the Financing stalled in accordance with the criteria of Bank Indonesia, as long as all claim requirements are fulfilled
4b	PT Jamkrindo Syariah menjamin Pembiayaan Terjamin *(Makfûl 'Anhu)* yang dinilai layak	PT Jamkrindo Syariah guarantees the financing for the Guaranteed (Makfûl 'Anhu) that is deemed feasible
5	• Penerima Jaminan *(Makfûl Lahu)* menyetujui dan mencairkan Pembiayaan kepada Terjamin *(Makfûl 'Anhu)* • Penerima Jaminan *(Makfûl Lahu)* menerima dan melakukan angsuran Pembiayaan Terjamin *(Makfûl 'Anhu)*	• The Guarantee Recipients (Makfûl Lahu) approves and disburses the Financing to the Guaranteed (*Makfûl 'Anhu*) • The Guarantee Recipients (Makfûl Lahu) receives and pays the installment of Financing of the Guaranteed (*Makfûl 'Anhu*)

Gambar 2.4. Prosedur Kafâlah

Figure 2.4 Kafâlah Procedure



PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE







1 Bakti Prasetyo - Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 10 November 1958, berumur 56 tahun. Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Penjaminan Jamkrindo Syariah berdasarkan Surat keputusan perubahan akta keputusan rapat nomor 9 tanggal 26 November 2014. Beliau mulai bergabung bersama Perum Jamkrindo (d/h Perum Pengembangan Keuangan koperasi (PKK)) sejak 1983 sebagai staf pada Biro Pengendalian. Pada 1989, beliau diberi amanah sebagai Kabag Pengendalian Kredit, lalu Kabag Klaim pada Divisi Keuangan sampai tahun 1990. Selanjutnya perusahaan memberi kepercayaan pada alumnus IPB tersebut menjadi Kepala Kantor Cabang Semarang sampai dengan tahun 1993. Karir beliau di Perum Jamkrindo berlanjut menjadi Kepala Biro Usaha I sampai tahun 1994, lalu Kadiv Bisnis Kredit Umum hingga 1995 kemudian Kadiv Penjaminan Bank sampai dengan 1998, Kadiv Pengembangan & Perencanaan Usaha sampai 2001, Kadiv. Pembiayaan Usaha sampai 2003 dan Kepala Kantor Cabang Bandung sampai tahun 2007. Beliau mulai menjabat sebagai Direktur Perum Jamkrindo sejak 2007. Secara berturut-turut Bakti mengemban tugas sebagai Direktur Pengembangan (2007-2013), Direktur MRTI (2013-2014) lalu Direktur Penjaminan Bank (2014-sekarang). Beliau meraih gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta pada 2000.

Bakti Prasetyo - President Commissioner

An Indonesian citizen, 56 years old, he was born in Bandung on November 10, 1958. He has been serving as the President Commissioner of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah pursuant to the Amendment Decree of deed of meeting resolution number 9 dated November 26, 2014. He joined Perum Jamkrindo (formerly Perum Pengembangan Keuangan koperasi (PKK)) since 1983 as a staff at Control Bureau. In 1989-1990, he was appointed as the Head of Credit Control Unit and Head of Claim Unit at the Finance Division. Then, this alumnus of IPB was appointed as the Head of Semarang Branch Office up until 1993. His career with Perum Jamkrindo continues with his appointment as the Head Business Bureau I (until 1994) , Head of General Credit Division (until 1995), Head of Bank Guarantee Division (until 1998), Head of Business Development and Planning (until 2001), Head of Business Financing Division (until 2003), and Head of Bandung Branch Office (until 2007). He started serving as the Director of Perum Jamkrindo since 2007 up to present with the following positions: Director of Development (2007-2013), Director of Risk Management and IT (2013-2014), and Director of Bank Guarantee (2014 up to present). He obtained Master of Management degree from Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta in 2000.

2 Ceriandri Widuri - Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang, 13 Maret 1972, berumur 42 tahun. Beliau menjabat sebagai Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah berdasarkan Surat keputusan perubahan akta pendirian PT Penjaminan Jamkrindo Syariah nomor 68 tanggal 19 September 2014. Beliau bergabung bersama Perum Jamkrindo sejak 1997 sebagai *Account Officer* (AO) Penjaminan Kredit pada Divisi Bisnis Kredit Umum. Tiga tahun berikutnya, beliau ditugasi menjadi AO Penjaminan Non Bank pada Divisi yang sama, lalu beralih menjadi AO Penjaminan pada Divisi Operasional II di tahun 2002. Pada Januari 2006, beliau dipercaya Manajemen untuk menjabat secara berturut-turut sebagai Kabag Penjaminan (Januari 2005-Februari 2006), Kabag Pengendalian Wilayah I (2006), Kabag Penjaminan Syariah (2006), Kabag Penjaminan Syariah 1 (2010), Kepala Kantor Cabang Banjarmasin (2011), Plt Kadiv Penjaminan Syariah sejak 2012 hingga diangkat menjadi Kadiv Penjaminan Syariah pada Maret 2014. Beliau ditugasi Manajemen untuk membidani kelahiran PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dengan menjadi Koordinator Tim Pendamping Penyusunan Rencana *Spin Off* Penjaminan Syariah Perum Jamkrindo di penghujung tahun 2013. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari FE Universitas Diponegoro dengan mengambil jurusan Manajemen. Kemudian melanjutkan jenjang Strata 2 dan meraih gelar *Master of Business Administration* dari Universitas Gadjah Mada, Program Manajemen Strategik.

Ceriandri Widuri - Commissioner

An Indonesian citizen, 42 years old, she was born in Semarang on March 13, 1972. She has been serving as a Commissioner of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah pursuant to the Amendment Decree of deed of establishment PT Penjaminan Jamkrindo Syariah number 68 dated September 19, 2014. She joined Perum Jamkrindo since 1997 as an Account Officer (AO) of Credit Guarantee in General Credit Business Division. In 2000, she was promoted to AO of Non-Bank Guarantee in the same division and in 2002 to AO of Guarantee in Operations Division II. In January 2006, she was appointed by the Management to be the Head of Guarantee Unit (January 2005 - February 2006), Head of Regional Control Unit I (2006), Head of Sharia Guarantee Unit (2006), Head of Sharia Guarantee Unit I (2010), Head of Banjarmasin Branch Office (2011), Acting Head of Sharia Guarantee Division (2012) and as the Head of Sharia Guarantee Division from March 2014. She was delegated by the Management to assist in the establishment of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah by becoming the Coordinator of Assisting Team for the Spin Off Planning of Penjaminan Syariah Perum Jamkrindo at the end of 2013. She obtained her Bachelor's Degree in Management from the Faculty of Economics of Diponegoro University and Master of Business Administration Degree from Gadjah Mada University, majoring in Strategic Management.

3 Muhammad Syakir Sula - Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir di Palopo, Sulawesi Selatan, 12 Februari 1964, berumur 50 tahun. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen PT Penjaminan Jamkrindo Syariah berdasarkan Surat keputusan perubahan akta pendirian PT Penjaminan Jamkrindo Syariah nomor 68 tanggal 19 September 2014 . Beliau dikenal sebagai pakar *marketing* syariah, selain dikenal luas sebagai praktisi dan pakar asuransi syariah. Beliau adalah salah satu dari 6 orang pemegang gelar profesional Ahli Asuransi Syariah

Muhammad Syakir Sula - Independent Commissioner

An Indonesian citizen, 50 years old, he was born in Palopo, South Sulawesi on February 12, 1964. He has been serving as an Independent Commissioner of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah pursuant to the Amendment Decree of deed of establishment PT Penjaminan Jamkrindo Syariah number 68 dated September 19, 2014. He is known as an expert in Sharia marketing, as well as an expert and practitioner in sharia insurance. He is one of the 6 professionals of Sharia Insurance Expert acknowledged by

(FIIS - *Fellow of Islamic Insurance Society*) di Indonesia, selain gelar profesional Ahli Asuransi Konvensional (AAIJ). Mantan Direktur Tehnik dan Direktur Marketing Takaful Group ini, juga aktif sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di 4 (empat) perusahaan asuransi syariah yaitu Nasional Reinsurance - Syariah, Asuransi Panin Life - Syariah, Asuransi Central Asia - Syariah, dan Perum Sarana Penjaminan - Syariah.

the Fellow of Islamic Insurance Society (FIIS) of Indonesia. This professional of Conventional Insurance Expert (from AAIJ) as well as the ex-Engineering Director and Marketing Director of Takaful Group is also active as a member of Sharia Supervisory Board of 4 (four) sharia insurance companies, namely Nasional Reinsurance - Syariah, Asuransi Panin Life - Syariah, Asuransi Central Asia - Syariah, and Perum Sarana Penjaminan - Syariah.

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH

SHARIA SUPERVISORY BOARD PROFILE





1 Hasanuddin AF - Ketua DPS

Warga Negara Indonesia, lahir di Majalengka, 18 Juli 1945, berumur 69 tahun. Beliau menjabat sebagai Ketua DPS PT Penjaminan Jamkrindo Syariah berdasarkan Surat keputusan perubahan akta pendirian PT Penjaminan Jamkrindo Syariah nomor 68 tanggal 19 September 2014. Beliau adalah Guru Besar tetap pada almamater yang sama. Sejak 2010, beliau adalah Anggota Dewan Syariah Nasional MUI diberi kepercayaan untuk menjadi Ketua Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Sebelumnya, Dosen Pendidikan Kader Ulama (PKU) MUI DKI Jakarta ini pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah (2002-2006). Beliau juga anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dari tahun 2004 hingga 2007. Di samping statusnya sebagai PNS dan Guru Besar, beliau

Hasanuddin AF - Chairman of Sharia Supervisory Board

An Indonesian citizen, 69 years old, he was born in Majalengka on July 18, 1945. He was appointed as the Chairman of Sharia Supervisory Board of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah pursuant to the Amendment Decree of deed of establishment PT Penjaminan Jamkrindo Syariah number 68, dated September 19, 2014. He obtained his bachelor, master, and doctorate degrees from UIN Syarif Hidayatullah (formerly IAIN Jakarta) in 1974, 1989 and 1994 respectively; and currently, he served as a Professor at the same almamater. Since 2010, he has been serving as a member of National Sharia Board of MUI and holds the position of Chairman of Fatwa Commission of the Central Majelis Ulama Indonesia (MUI). Previously, this Lecturer of Pendidikan Kader Ulama (PKU) of MUI Jakarta served as a Dean of Sharia Faculty of UIN Syarif

ikut mengembangkan perekonomian syariah di tanah air sebagai Dewan Pengawas Syariah di beberapa lembaga keuangan Syariah diantaranya Bank Niaga Syariah (2004-2008), Asuransi Tripakarta (2002-sekarang), Ketua DPS di Bank Victoria Syariah (2006-sekarang), Ketua DPS PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, sebelumnya Perum Jamkrindo sejak 2006 sampai dengan saat ini. Beliau meraih Penghargaan Presiden RI atas Pengabdian sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 30 tahun pada 1996. Pada 2005, beliau juga dianugerahi Certificate for ASEAN BEST EXECUTIVE GOLDEN AWARDS, International Human Resources Development Program. Beliau meraih gelar Sarjana (1974), Magister (1989) dan Doktoral (1994) dari UIN Syarif Hidayatullah, saat itu bernama IAIN Jakarta.

Hidayatullah (2002-2006). He is also a member of Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) from 2004 until 2007. Aside from his duty as a Civil Servant and Professor, he also contributes to the development sharia economy in the country as a member of Sharia Supervisory Board as several Sharia financial institutions, such as Bank Niaga Syariah (2004-2008), Asuransi Tripakarta (2002 up to present), Chairman of Supervisory Board of Bank Victoria Syariah (2006 up to present), Chairman of Supervisory Board of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, and Perum Jamkrindo from 2006 up to present. For his 30-year service as a Civil Servant, he was given an Award of the President of the Republic of Indonesia in 1996, and in 2005, he was given a Certificate for ASEAN BEST EXECUTIVE GOLDEN AWARDS, International Human Resources Development Program.

2 Muhammad Gunawan Yasni - Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 17 September 1969, berumur 45 tahun. Beliau menjabat sebagai Anggota DPS PT Penjaminan Jamkrindo Syariah berdasarkan Surat keputusan perubahan akta pendirian PT Penjaminan Jamkrindo Syariah nomor 68 tanggal 19 September 2014. Beliau adalah seorang ekonom, ahli dan praktisi keuangan syariah, pengajar, dan merupakan anggota Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta anggota Dewan Pengawas/Penasehat Syariah di beberapa lembaga keuangan syariah. Beliau memulai karier pada awal 1993 sebagai Staf Pengembangan Pentasena, lalu menjadi Sekretaris Korporat Bank CIC sebelum bergabung dengan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Beliau juga berprofesi sebagai pengajar dengan menjadi dosen Kajian Timur Tengah-Islam Pascasarjana Universitas Indonesia. Saat ini, beliau merupakan Anggota Dewan Syariah, Penguji Fit & Proper Test kementerian Keuangan & Otoritas Jasa Keuangan untuk Industri Asuransi dan Keuangan Non Bank. Dewan Pengawas/ Penasehat Syariah pada Deutsche Bank Sharia Custodian & Investment Banking (Oktober 2009-sekarang), PT Bank BRI Syariah (Oktober 2008-sekarang), Perum Jamkrindo (Oktober 2006-sekarang).

Muhammad Gunawan Yasni - Member of Sharia Supervisory Board

An Indonesian citizen, 45 years old, he was born in Jakarta on September 17, 1969. He was appointed as a member of Sharia Supervisory Board of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah pursuant to the Amendment Decree of deed of establishment PT Penjaminan Jamkrindo Syariah number 68, dated September 19, 2014. He is an economist, an expert and practitioner in sharia finance, a teacher, and a member of National Sharia Board of MUI as well as a member Sharia Supervisory/Advisory Board at several sharia financial institutions. He began his career in 1993 as a staff of Pengembangan Pentasena and as a Corporate Secretary of Bank CIC before joining PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). He is a lecturer of Kajian Timur Tengah-Islam at the Graduate Program of University of Indonesia. Currently, he serves as a member Sharia Board, Examiner of Fit & Proper Test at the Ministry of Finance and Financial Services Institution for the Insurance Industry and Non-Bank Finance, and a member of Sharia Supervisory/Advisory Board at Deutsche Bank Sharia Custodian & Investment Banking (October 2009 up to present), PT Bank BRI Syariah (October 2008 up to present), and Perum Jamkrindo (October 2006 up to present).

Pendidikan formal beliau ditempuh di American High School, Jordania (1985-1986), Indonesian High School, Egypt (1986-1987), Integrated Study of Management and Computer, Kementerian Pendidikan (1987-1988), Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, jurusan Akuntansi (1988-1993) dengan gelar akademis yang dicapai Sarjana Ekonomi, Akuntan. Beliau melanjutkan jenjang pendidikan pasca sarjana pada tahun 1994 dan mendapat gelar Magister Manajemen tahun 1995 dari Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya dengan mengambil jurusan Keuangan.

His formal education was obtained at American High School, Jordania (1985-1986), Indonesian High School, Egypt (1986-1987), Integrated Study of Management and Computer, Ministry of Education (1987-1988), and Bachelor's Degree in Economy, majoring in Accounting from the Faculty of Economy of University of Indonesia, (1988-1993). He obtained his Master of Management Degree, majoring in Finance from Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya in 1995.

PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS PROFILE







1 Kadar Wisnuwarman - Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir di Malang, 31 Oktober 1971, berumur 43 tahun. Beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Penjaminan Jamkrindo Syariah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada 19 September 2014. Beliau bergabung di Perum Jamkrindo sejak 1997. Beliau merintis karier sebagai staf Divisi Bisnis Kredit Umum Kantor Pusat pada 1998. Pada 2000, beliau ditugasi sebagai Staf Muda I Divisi Bisnis Kredit Umum Kantor Pusat yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian proses penjaminan di Kantor Pusat. Tahun berikutnya, posisi dan tugas yang sama beliau emban di Kantor Cabang Makassar. Sejak 2002, beliau dipercaya untuk mengemban tugas sebagai Kepala

Kadar Wisnuwarman - President Director

An Indonesian citizen, 43 years old, he was born in Malang on October 31, 1971. He has been serving as the President Director of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah pursuant to the Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) on September 19, 2014. His career at Perum Jamkrindo began since 1997 as a staff of the Division of General Credit Business at the Main Office (1998). In 2008, he was appointed as Muda Staff I of the Division of General Credit Business at the Main Office that is responsible for the settlement of guarantee process at the main office. In the following year, he was appointed to the same position at Makassar Branch Office. In 2002, he was appointed as the Head of Operations Unit

Bagian Operasional di beberapa kantor cabang di berbagai kota. Pada November 2012, beliau kembali bertugas di kantor pusat. Secara berturut turut Kadar ditugasi sebagai Kepala Sekretaris Perusahaan (November 2012- Januari 2013), Kepala Divisi Klaim & Subrogasi (Januari- Juni 2013), lalu Kepala Divisi Penjaminan Komersial (Juni 2013 - Februari 2014). Pada Februari 2014, beliau didaulat menjadi Kepala Kantor Cabang Jakarta Khusus dengan tugas bertanggungjawab terhadap pencapaian target Kantor Cabang Jakarta Khusus yang menangani kerja sama penjaminan dengan BUMN dan *Surety Bond*.

Beliau menempuh jenjang Pendidikan Tinggi Strata-1 di Universitas Airlangga Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen (1990 - 1996) kemudian Strata-2 di Universitas Hasanuddin Makassar Program Pasca Sarjana Magister Manajemen (2000-2002).

at several branch offices in various cities. In November 2012, he returned to the Head Office as was appointed to fill several positions such as Head of Corporate Secretary (November 2012 - January 2013), Head of Claim and Subrogation Division (January - June 2013), and Head of Commercial Guarantee Division (June 2013 - February 2014). In February 2014, he was delegated as the Head of Jakarta Special Branch Office with the responsibility of achieving the target for Jakarta Special Branch Office which specializes in handling the guarantee cooperation with SOE and Surety Bond matters.

He obtained his Bachelor's Degree in Management from Airlangga University (1990-1996) and Master of Management Degree from Hasanuddin University, Makassar (2000-2002).

2 Gatot Suprabowo - Direktur Bisnis

Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya, 27 Oktober 1973, berumur 41 tahun. Beliau diberi kepercayaan oleh Perum Jamkrindo dan Koperasi Sarana Sejahtera (KOPSSA), selaku pemegang saham PT Penjaminan Jamkrindo Syariah untuk menjabat Direktur Bisnis berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada 19 September 2014. Beliau bergabung dengan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (d/h Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU)) sejak 2006. Beliau memulai karirnya di Perum Jamkrindo sebagai Calon Pegawai di Kantor Cabang Jawa Timur (tahun 1996). Tahun berikutnya Gatot diangkat menjadi Staf Muda Bagian Operasi di kantor yang sama. Pada 2004, beliau dipercaya menjadi Kabag Operasional di Kantor Cabang Samarinda, kemudian 2007 menjadi Kabag Administrasi & Keuangan di Kantor Cabang Pontianak. Sejak Desember 2007 sampai dengan Juli 2010, Gatot mengemban tugas sebagai Kepala Kantor Perwakilan di Jayapura. Setelah itu, beliau menjabat sebagai Kabag Operasional 1 Kantor Cabang Surabaya. Sejak awal 2012 hingga 2013, beliau berkantor di kantor pusat sebagai Kabag Riset & Pengembangan, lalu Plt.

Gatot Suprabowo - Business Director

An Indonesian citizen, 41 years old, he was born in Surabaya on October 27, 1973. He was appointed by Perum Jamkrindo and Koperasi Sarana Sejahtera (KOPSSA), the shareholder of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, as the Business Director based on Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) on September 19, 2014. He joined Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (formerly Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU)) since 2006, and he began his career as Potential Employee at East Java Branch Office in 1996. In the following year, he was appointed as a Junior Staff of Operations Unit of the same branch office. In 2004, he was promoted to be the Head of Operational Unit at Samarinda Branch Office and in 2007, he served as the Head of Administration and Finance Unit at Pontianak Branch Office. From December 2007 until July 2010, he served as the Head of Representation Office In Jayapura. Following this he was appointed as the Head of Operational Unit I at Surabaya Branch Office. From 2012 until 2013, he served at the Head Office as the Head of Research & Development Unit, Acting Head of Claim & Subrogation Unit, and Acting Head of Planning and Development Unit. In March 2014,

Kepala Divisi Klaim & Subrogasi, kemudian Plt. Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan. Pada Maret 2014, beliau diberi kepercayaan menjadi Kepala Kantor Wilayah III yang bertugas menjadi koordinator Kantor Cabang dan Kantor Unit Pelayanan Perusahaan di Wilayah Indonesia Timur. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Jember pada 1995.

he was mandated as the Head of Regional Office III and the coordinator of Branch Office and Company Service Unit Office in the Eastern Indonesia Area. He obtained Bachelor's Degree in Economy from Jember University in 1995.

3 Endang Sri Winarni - Direktur Keuangan, SDM & Umum

Warga Negara Indonesia, lahir di Boyolali, 12 Maret 1971, berumur 43 tahun. Beliau diberi kepercayaan oleh Perum Jamkrindo dan Koperasi Sarana Sejahtera (KOPSSA) selaku pemegang saham PT Penjaminan Jamkrindo Syariah untuk menjadi Direktur Keuangan, SDM & Umum berdasarkan RUPS LB pada 19 September 2014. Beliau bergabung ke Perum Jamkrindo sejak 1996 sebagai Calon Pegawai di Bagian Perencanaan Usaha. Pada 1997 hingga 1998, beliau ditugasi perusahaan sebagai Staf Muda I di Bagian Pengkajian dan Pengembangan Bisnis, kemudian Maret 1998 hingga awal 2000 sebagai Staf Bagian Perencanaan Usaha. Pada 2000 hingga 2003, beliau menjadi Staf Bagian Penjaminan Bagi Hasil. Mulai Februari 2003, beliau mulai menjabat sebagai Kepala beberapa Bagian. Sejak Juni 2011, beliau mendapat tugas tambahan sebagai Staf Khusus Penghubung Direksi dengan Dewan Pengawas. Pada November 2012, beliau mulai menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko, serta sampai tahun 2014 beliau juga dipercaya menjadi Kadiv. Teknik Penjaminan Non Bank.

Beliau menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada jurusan Teknologi Industri Pertanian (1989-1994) kemudian Magister Manajemen Program Manajemen Risiko di Universitas Indonesia (2001-2003).

Endang Sri Winarni - Director of Finance, HR and General Affairs

An Indonesian citizen, 43 years old, she was born in Boyolali on March 12, 1971. She was appointed by Perum Jamkrindo and Koperasi Sarana Sejahtera (KOPSSA), the shareholder of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, as the Finance, HR and General Affairs Director based on Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) on September 19, 2014. She joined Perum Jamkrindo since 1996 as a Potential Employee at Business Planning Unit. In 1997 until 1998, she was appointed as Junior Staff I at Business Review and Development Unit, and in March 1998 until the beginning of 2000 as a staff at Business Planning Unit. In 2000 until 2003, she served as the Staff of Profit Sharing Guarantee Unit, and starting from February 2003, she served as the Head of several divisions at the Company. Since June 2011, she was appointed as a Special Communication Staff for the Board of Directos and Board of Supervisors. In November 2012, she was appointed as the Head of Risk Management Division and until 2014, she held the position of Head of Non-Bank Guarantee Technical Division.

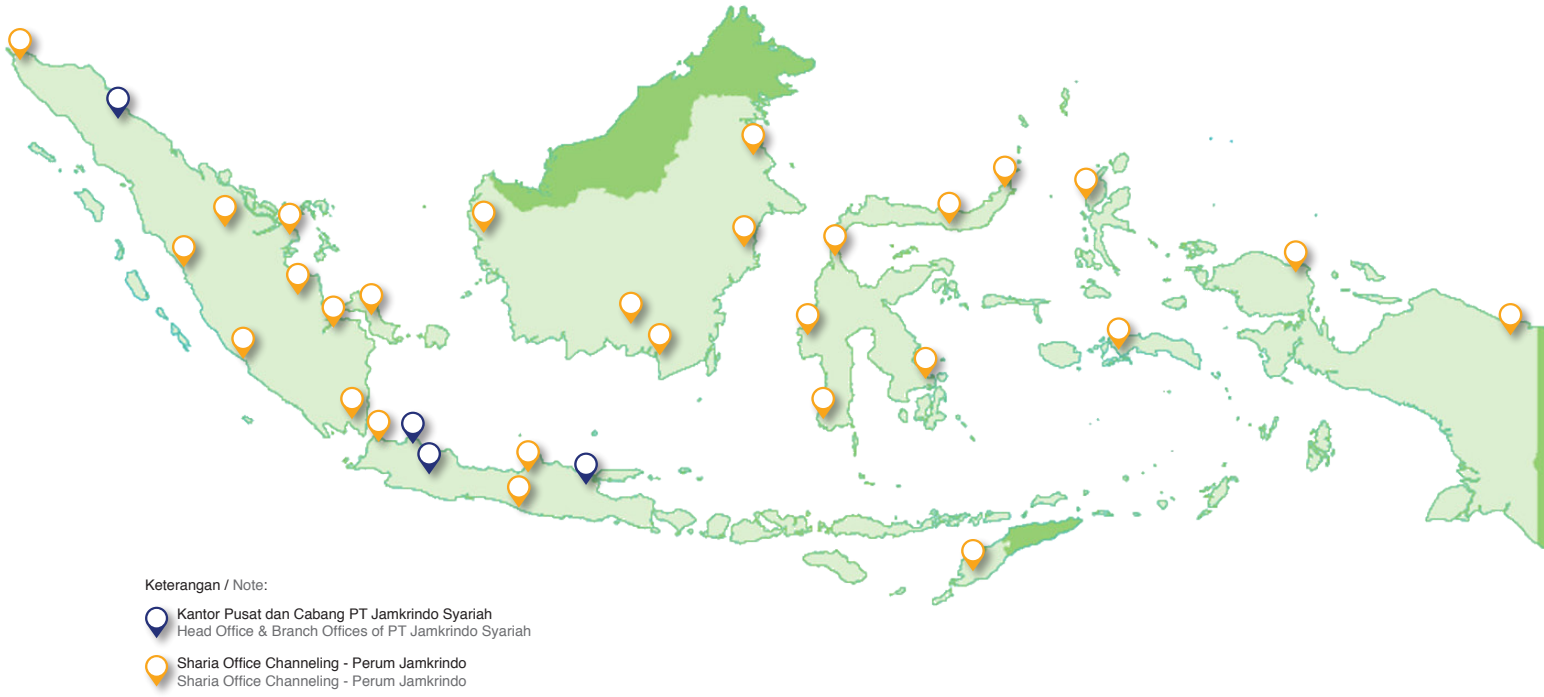
She obtained her Bachelor's Degree in Agriculture Industry Technology from Gadjah Mada University (1989-1994) and Master's Degree in Risk Management Program from University of Indonesia (2001-2003).

JARINGAN PELAYANAN

SERVICE NETWORK

Gambar 2.5. Peta Kantor Pusat dan Kantor Cabang PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

Figure 2.5 Map of Head Office and Branch Offices of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah



Tabel 2.22. Alamat Jaringan Pelayanan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

Table 2.22. Address of Service Network of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

KANTOR PUSAT **MAIN OFFICE**	Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Lt.7 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10610 Telp. 021 - 6540386 Faks. 021- 6540389 info@jamkrindosyariah.com	Wilayah kerja meliputi / Coverage: DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Banten / DKI Jakarta, East Kalimantan, South Kalimantan, Central Kalimantan, West Kalimantan and Banten
KANCA BANDUNG **BANDUNG BRANCH OFFICE**	Jl. Dr. Djundjunan nomor 15 Bandung 40173 Telp (022) 6010734 Faks. (022) 87803835 bdg@jamkrindosyariah.com	Wilayah kerja meliputi / Coverage: Jawa Barat, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta West Java, Central Java and Yogyakarta
KANCA SURABAYA **SURABAYA BRANCH OFFICE**	Jl. Ngagel Jaya nomor 042 Surabaya 60283 Telp. (031) 5023 795/796 Faks. (031) 5023797 sby@jamkrindosyariah.com	Wilayah kerja meliputi / Coverage: Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorotalo, Sulawesi Barat, Maluku, Bali, NTB, NTT dan Papua / East Java, South Sulawesi, Central Sulawesi, Southeast Sulawesi, North Sulawesi, Gorontalo, West Sulawesi, Maluku, Bali, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara and Papua
KANCA MEDAN **MEDAN BRANCH OFFICE**	Jl. KH. Wahid Hasyim nomor 32 Medan 20119 Telp (061) 888 17121 Faks (061) 888 17122 mdn@jamkrindosyariah.com	Wilayah kerja meliputi / Coverage: Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung / North Sumatera, Aceh, South Sumatera, Riau, West Sumatera, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau and Lampung





ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS



Program perluasan kredit bagi UMKM menjadi penting agar pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat secara kualitas dan bersifat inklusif. Jika UMKM terus bertumbuh, maka ada stimulus terhadap penambahan penyerapan tenaga kerja.

Credit expansion program for MSMEs is important so that the Indonesia's economic growth increases in quality and inclusive. There will be a stimulus towards the labor absorption if the MSMEs keep growing.

TINJAUAN UMUM

Ekonomi Indonesia tahun 2014 tumbuh 5,02%, melambat dibanding tahun 2013 sebesar 5,58%. Pertumbuhan negara-negara maju yang tidak merata, melambatnya ekonomi Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, serta tingginya apresiasi Dolar terhadap seluruh mata uang utama termasuk Rupiah, menjadi pemicu lambatnya perbaikan ekonomi nasional.

Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dibutuhkan sejumlah instrumen besar, terutama pembangunan infrastruktur. Namun, untuk membangun infrastruktur membutuhkan waktu yang relatif lama dan pendanaan

OVERVIEW

Indonesia economy growth grew 5.02% in 2014, slowed down compared with 2013 which was 5.58%. The uneven growth of developed countries, the slowdown of China economy as the biggest trading partner, as well as the high Dollar appreciation towards every currency, became the trigger for the slowdown of national economy.

To boost the economic development, a number of major instruments is needed, mainly the infrastructure development. However, it takes a long time and significant funding. Nevertheless, the Micro Credit (KUR) program

yang sangat besar. Meskipun demikian, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa menjadi solusi dalam waktu dekat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui aktivitas bisnis sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

could be a short-term solution to support the Indonesia economic growth through Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

UMKM memiliki peran yang penting dan strategis dalam perekonomian nasional. Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai data yang mendukung bahwa eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang cukup signifikan.

MSMEs have an important and strategic role in national economy. It can be seen from the supporting data that the existence of MSMEs is dominant in Indonesia economy. First, the big number of industries that are found in every economic sector. Second, the huge potential in absorbing the labor. Third, MSMEs' significant contribution to Gross Domestic Product (GDP) formation.

Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, saat ini jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sebanyak 57,89 juta unit atau 99,99% dari total jumlah pelaku usaha nasional. UMKM memberikan kontribusi terhadap kesempatan kerja sebesar 96,99%, dan terhadap pembentukan PDB sebesar 60,34%. Sektor UMKM daerah sudah seharusnya menjadi andalan penopang perekonomian nasional, terlebih lagi bagi UMKM yang sudah melakukan ekspor.

According to the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, the number of MSMEs in Indonesia is currently 57.89 million units or 99.99% from the total of national business players. MSMEs gives contribution to work opportunity amounting to 96.99%, and to the GDP formation amounting to 60.34%. Regional MSMEs sector is supposedly become the national economic mainstay support, moreover for MSMEs that have performed export.

Namun, masih banyak UMKM yang tidak mendapatkan sumber pendanaan dari bank karena tidak *bankable* atau skala bisnisnya tidak masuk dalam ranah bisnis industri perbankan. Ini merupakan tantangan bagi UMKM untuk bertumbuh dan berkembang, di tengah ketatnya regulasi internal perbankan dalam menyalurkan kredit ke UMKM.

However, there are some MSMEs who have not received financing source from bank because they were not bankable or the business scale is not included in the field of banking business industry. This is a challenge for the MSMEs to grow and develop, in the middle of the banking internal regulation tightness in credit giving for MSMEs.

Program perluasan kredit bagi UMKM menjadi penting agar pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat secara kualitas dan bersifat inklusif. Jika UMKM terus bertumbuh, maka ada stimulus terhadap penambahan penyerapan tenaga kerja. Kendati banyak kendala, namun tidak menutup kemungkinan memperbesar kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Credit expansion program for MSMEs is important so that the Indonesia's economic growth increased in quality and inclusive. There will be a stimulus towards the labor absorption if the MSMEs keep growing. Despite many obstacles ahead, it will not eliminate the possibility of MSMEs' contribution towards national economic growth.

Laporan Direktur Keuangan, Investasi dan TI
Director of Finance, Investment and Information Technology's Report



I. Rusdonobanu
Direktur Keuangan, Investasi dan TI
Director of Finance, Investment and Information Technology

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Dear Honored Stakeholders,

Pencapaian yang telah diraih oleh Perum Jamkrindo merupakan salah satu bentuk kecakapan pengelolaan yang dilaksanakan oleh Perum Jamkrindo dalam bidang keuangan, investasi dan TI selama 2014. Hal ini membuktikan Jamkrindo merupakan salah satu Perusahaan Umum Indonesia yang unggul dan andal dalam bisnis penjaminan.

The achievement which has been obtained by Perum Jamkrindo is one of the many forms of management excellence that is carried out by Perum Jamkrindo in the field of finance, investment and IT during 2014. This shows that Jamkrindo is one of Indonesia's excellent and reliable Public Companies in guarantee business.

Pada 2014, Perum Jamkrindo berhasil mencatatkan peningkatan yang positif, ditandai dengan pencapaian yang diraih di atas target sebesar 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada umumnya investasi merupakan hal utama yang mendukung pencapaian kinerja perusahaan dalam bisnis jasa keuangan. Hal ini dibuktikan dengan pencatatan laba yang cukup baik pada 2014 dari sisi investasi mencapai Rp531 miliar.

In 2014, Perum Jamkrindo managed to record a positive increase, shown by achievement of target above 50% compared to the previous year. In general, investment is the main sector which supports the Company's performance achievement in financial service business. This is proven by good profit record in 2014 from investment sector at Rp531 billion.

Pada Tahun 2014 perusahaan telah memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp846,94 miliar atau 120,02% dari anggaran tahun 2014 sebesar Rp705,68 miliar. Laba tersebut berasal dari total pendapatan sebesar Rp2,20 triliun dan total biaya Rp 1,35 triliun. Dibandingkan dengan laba tahun 2013 sebesar Rp656,97 miliar, pencapaian laba tahun 2014 adalah sebesar 128,92%. Jumlah aset per 31 Desember 2014 sebesar Rp10,02 triliun, meningkat Rp1,73 triliun atau 20,83% dari jumlah aset per 31 Desember 2013 sebesar Rp8,29 triliun. Realisasi beban klaim perusahaan tahun 2014 yaitu sebesar Rp1,02 triliun atau 90,97% dari anggaran tahun 2014 Rp1,12 triliun. Sumbangsih terbesar biaya klaim berasal dari biaya klaim KUR dimana realisasi biaya klaim KUR tahun 2014 sebesar Rp873,57 miliar atau 90,69% dari anggaran Klaim KUR. Nilai *Net Performing Loan* (NPL) masih terjaga dengan baik. Hal ini mampu memberikan nilai yang baik bagi Perum Jamkrindo dalam memberikan pelayanan penjaminan kepada mitra dan pelanggan.

In 2014 the Company has achieved income before tax amounting to Rp846.94 billion or 120.02% from 2014 budget at Rp705.68 billion. This profit originated from total revenues amounting to Rp2.20 trillion and total costs amounting to Rp1.35 trillion. Compared to profit of 2013 at Rp656.97 billion, achievement of profit in 2014 was Rp10.02 trillion, increased by Rp1.73 trillion or 20.83% from total assets per December 31, 2013 at Rp8.29 trillion. Realization of the Company's claim expenses in 2014 amounted to Rp1.02 trillion or 90.97% from budget in 2014 at Rp1.12 trillion. Largest cost of claim contribution was originated from KUR which realization in 2014 amounted to Rp873.57 billion or 90.69% from total KUR claim budget. Net Performing Loan (NPL) value is still well-maintained. All of these abovementioned matters are capable of providing good values for Perum Jamkrindo in giving guarantee service to partners and customers.

Selama 2014, kendala yang Perum Jamkrindo hadapi adalah terkait dengan SDM yang belum dapat Perusahaan optimalkan secara maksimal. Dalam hal ini, Perum Jamkrindo terus mengupayakan program-program pengembangan SDM guna meningkatkan kualitas SDM yang Perusahaan miliki. Begitu pula dengan biaya *overhead* yang terhitung meningkat karena oleh dibukanya kantor cabang baru. Hal ini tentu dapat mempengaruhi pengembangan dan kinerja Perusahaan, akan tetapi pada akhirnya kendala-kendala tersebut dapat teratasi dengan strategi dan perencanaan yang baik.

Throughout 2014, Perum Jamkrindo faced constraints related to Human Resources which have not been developed optimally. Therefore, Perum Jamkrindo continuously strives to implement Human Resource development programs to improve the quality of Company's Human Resources. Cost of overhead also increased due to the establishment of new branch office. These matters obviously will give impact on the Company's performance and development. However, eventually, such constraints can be overcome with good strategy and planning.

Keberhasilan yang kami capai di 2014 merupakan bentuk keberhasilan dari penggunaan Sistem Informasi Manajemen Industri (SIMI) dan rencana penggunaan Manajemen Investasi (MI) sebagai pembanding. Dapat dikatakan pencapaian yang diraih Perum Jamkrindo selama 2014 telah melampaui target.

Our success in 2014 is a form of success from the utilization of Industrial Management Information System and utilization plan of Investment Management as comparison. It can be said that the achievement of Perum Jamkrindo throughout 2014 has exceeded its target.

Seperti diketahui banyak pihak pelanggan atau mitra yang belum cukup memiliki kecakapan dalam bidang investasi. Oleh karena itu, Perum Jamkrindo memiliki rencana untuk membuat Manajemen Investasi (MI) dan hal ini sudah disetujui oleh pemegang saham untuk dilaksanakan di 2015. Selain itu, Perum Jamkrindo memiliki rencana untuk memasuki ranah asuransi, Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia (PKPI) dan melaksanakan *rating* dengan Pefindo sebagai bentuk peningkatan manajemen risiko.

As known by many customers or partners who have not yet possessed sufficient proficiency in investment field, Perum Jamkrindo has a plan to create an Investment Management and has been approved by shareholders to be implemented in 2015. In addition, Perum Jamkrindo also has a plan to enter the field of insurance business, be a member of Indonesian Entrepreneur Credit Guarantee (PKPI) and implement rating evaluation in cooperation with Pefindo as a form of risk management improvement.

Dari segi IT, Perum Jamkrindo sudah berada dalam kesiapan yang cukup baik. Dengan sistem yang sudah cukup baik tersebut, diharapkan mampu memberikan efisiensi yang lebih baik, terutama dari segi SDM. Perusahaan telah menyiapkan pengembangan *hardware, software*, dan metode pembayaran menggunakan kartu untuk peningkatan IT di 2015. Hal ini merupakan misi yang ingin kami wujudkan di masa mendatang untuk menjadi Perusahaan Umum yang lebih baik terutama dalam hal kinerja operasional.

From the aspect of IT, Perum Jamkrindo is well-prepared. With such system, it is expected to provide a better efficiency, particularly from Human Resources. The Company has prepared development of hardware, software and payment method using card for the IT improvement in 2015. This is a mission in which we want to realize in the future to be a better Public Company, especially in operating performance.

Ke depan, Perum Jamkrindo optimis suasana investasi akan semakin baik dan pencapaian target tentu akan menjadi lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

In the future, Perum Jamkrindo is optimistic that investment atmosphere will be better and achievement of target will also be better compared with the previous years.

Laporan Direktur Penjaminan Bank
Director of Bank Guarantee's Report



Bakti Prasetyo
Direktur Penjaminan Bank
Director of Bank Guarantee

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Dear Honored Stakeholders,

Kinerja bisnis penjaminan yang kami tangani selama 2014 dinilai sudah berjalan dengan cukup baik. Untuk penyaluran kredit-kredit penugasan pemerintah kami selalu memberikan dukungan penuh, terlihat dari sisi volume yang juga terhitung baik dan kinerja dari penugasan ini terus mengalami pertumbuhan dari sisi grafik setiap tahunnya.

Guarantee business that we have managed during the course of 2014 is considered successful and have good performance. We always fully support loan disbursement mandated by the government, as reflected on the better total volume this year. The performance of such disbursement continues to show escalating trend every year.

Di sisi lain, penyaluran kredit komersial juga berjalan dengan baik. Sejak adanya penetapan pemerintah tentang tarif untuk merumuskan dengan baik tingkat kecukupan industri berbanding dengan risiko produk menyebabkan tidak adanya ruang gerak untuk industri di pasar karena iklim kompetisi yang mulai bertambah. Hal ini ditandai dengan tumbuhnya Jamkrida di daerah-daerah dan juga dengan berlakunya peraturan OJK untuk perusahaan-perusahaan asuransi yang dapat menjalankan fungsi penjaminan.

On the other hand, commercial credit disbursement also runs well. Since the policy on tariff to determine the adequacy rate of industry against product risk is enforced, there is no ample room for industry in the market to move forward, as competition climate is getting more intense. It is indicated with the growth of Jamkrida in the regions and enforcement of OJK's rule for insurance companies that is capable of running the guarantee function.

Bertambahnya persaingan merupakan hal yang wajar, mengingat pasar UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang sangat luas. Jamkrindo sebagai penggagas penjaminan UMKM memiliki satu rumusan bahwa penjaminan kredit produktif harus diimbangi dengan konsumtif. Tidak dipungkiri bahwa sektor

The increasing competition is observed as normal issue, considering the wide market of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises). Jamkrindo, as the pioneer of MSMEs' guarantee, has a formulation that the productive loan guarantee should be balanced with the consumptive one. Micro sector inevitably requires proper infrastructure,

mikro membutuhkan infrastruktur yang memadai dan keadaannya dari tahun ke tahun mulai membaik sejak adanya dana simpan pinjam yang ditawarkan oleh bank-bank di Indonesia.

and the condition is getting better from year to year since saving and loan funds being offered by banks in Indonesia.

Penjaminan kredit yang disalurkan Perum Jamkrindo terdiri dari kredit penjaminan bank dan kredit penjaminan bukan bank. Untuk kredit penjaminan bank yang berada di bawah direktorat kami, terdiri dari penjaminan bank konvensional dan penjaminan bank syariah.

Loan guarantee disbursed by Perum Jamkrindo consists of bank guarantee loan and non-bank guarantee loan. Bank guarantee loan under our directorate consists of conventional and sharia bank guarantee.

Total kredit penjaminan bank selama 2014 sebesar Rp38,42 triliun atau mencapai 66,93% dari RKAP 2014, terdiri dari penjaminan bank konvensional sebesar Rp36,25 triliun atau mencapai 69,25% dari RKAP 2014 dan penjaminan bank syariah sebesar Rp2,17 triliun atau mencapai 42,88% dari RKAP 2014.

Total bank guarantee loan during 2014 was Rp38.42 trillion or reached 66.93% from RKAP 2014, consisting of conventional bank guarantee at Rp36.25 trillion or 69.25% from RKAP 2014 and sharia bank guarantee of Rp2,17 trillion or 42.88% from RKAP 2014.

Kredit penjaminan bank konvensional sendiri terdiri dari penjaminan produk eksisting sebesar Rp18,19 triliun dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp18,06 triliun. Sedangkan kredit penjaminan bank syariah terdiri dari penjaminan produk eksisting sebesar Rp1,46 triliun dan KUR sebesar Rp711,31 miliar.

Conventional bank guarantee loan alone consists of existing product guarantee of Rp18.19 trillion and Micro Credit Loan Program (KUR) at Rp18.06 trillion. Meanwhile, sharia bank guarantee loan consists of existing guarantee product of Rp1.46 trillion and KUR at Rp711.31 billion.

Pada 2014, kami menerapkan strategi anorganik untuk membentuk anak perusahaan yaitu PT Jamkrindo Syariah yang mengakar dari Divisi Penjaminan Syariah. Namun, *spin off* ini masih belum dapat kami lakukan karena ada beberapa hal yang harus kami perhatikan. Salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13 tahun 2011 yang menyatakan penjaminan dari kredit oleh institusi BUMN mendapatkan potongan perhitungan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) sebesar 50%. Seperti kita ketahui, NPL bank-bank syariah berada pada angka yang kurang menguntungkan sehingga perhitungan ATMR yang ada menjadi 100%. Untuk itu, karena anak perusahaan ini bukan termasuk ke dalam kategori BUMN, dibutuhkan waktu setidaknya 2 (dua) tahun untuk meningkatkan *rating* minimum. Strategi yang kami diskusikan dengan OJK adalah *spin off* bertahap dengan mekanisme yang berbeda dan mekanisme *co-Guarantee* seperti reasuransi antar perusahaan sejenis. Kami memiliki harapan ke depan pertumbuhan yang dapat memberikan efek yang baik.

In 2014, we implemented anorganic strategy to establish subsidiary, namely PT Jamkrindo Syariah, that rooted from Sharia Guarantee Division. However, we have not conducted the spin off yet as there were several things that we need to take into account. One of which is Bank Indonesia's Regulation (PBI) No. 13 year 2011, stating that guarantee from loan by SOE institutions has a discount of Risk Weighted Assets (RWA) calculation at 50%. As we know, NPL of sharia banks are less favorable, thus the calculation of RWA became 100%. Therefore, as this subsidiary is not included in the SOE category, it requires at least 2 (two) years to improve the minimum rating. The strategy that we discussed with OJK is a gradual spin off with different mechanism and co-Guarantee mechanism such as reinsurance among similar companies. We expect to have growth that can deliver positive impact on us in the future.

Laporan Direktur Penjaminan Non Bank
Director of Non-Bank Guarantee's Report



Nanang Waskito
Direktur Penjaminan Non Bank
Director Non Bank Guarantee

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Dear Honored Stakeholders,

Kinerja bisnis penjaminan yang dijalankan Perum Jamkrindo selama 2014 sudah berjalan dengan cukup baik. Pada 2014, sebuah kebijakan strategis ditempuh Direksi dengan melakukan pemisahan jajaran direktorat antara lembaga penjaminan bank serta non-bank yang dipandang sudah tepat sasaran karena berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan. Direktorat bukan bank berhasil meningkatkan pencapaian dari Rp1,03 triliun pada 2013 menjadi Rp2,32 triliun pada 2014.

Penetrasi pasar dinilai sudah baik dengan menerapkan pendekatan yang berbeda di tiap provinsi, misalnya penetrasi pasar antara Jawa dan non-Jawa berbeda. Dengan melakukan pendekatan melalui Pemda serta BUMN lainnya, Perusahaan dapat memperkuat agen-agen di masing provinsi dengan program SAKASAKI (Satu Kabupaten, Satu Kaki). Direktorat bukan bank juga telah membuat *competitive market mapping* agar untuk melihat potensi yang dimiliki setiap provinsi dan kantor cabang.

Guarantee business performance conducted by Perum Jamkrindo in 2014 was running quite well. This year, the Board of Directors implemented strategic policy of separating the directorate lines between bank and non-bank guarantee institutions that was considered well-targeted for achieving remarkable performance. Non-Bank Directorate was able to generate an increase in Company's revenue which was from Rp1.03 trillion in 2013 to Rp2.32 trillion in 2014.

Market penetration is considered to be good through the implementation of different apporaches in every province, for instance the different market penetration between Java and non-Java. By implementing an approach through local government and other SOEs, the Company can strengthen its agents in each province with SAKASAKI (Satu Kabupaten, Satu Kaki). The non-bank directorate also creates a competitive market mapping so as to see the potential in every province and branch office.

Selama 2014, total kredit penjaminan bukan bank konvensional sebesar Rp2,21 triliun dan kredit penjaminan bukan bank syariah sebesar Rp102,63 miliar. Sementara imbal jasa penjaminan bukan bank sebesar Rp24,48 miliar atau mencapai 111,07% dibandingkan target 2014 dan mencapai 159,91% dibandingkan realisasi tahun 2013.

In 2014, total non-conventional bank guarantee credit amounted to Rp2.21 trillion while non-sharia Bank guarantee credit was Rp102.63 billion. Meanwhile, guarantee compensation for non-bank amounted to Rp24.48 billion or 111.07% compared to the targets of 2014 and increasing to 159.91% compared to the realization in 2013.

Jumlah kredit dan imbal jasa penjaminan bukan bank didominasi oleh jasa dan perdagangan. Dalam jasa penjaminan bukan bank, Perusahaan bekerja sama dengan indonesia Eximbank (LPEI), PT Garuda Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM), PT Pegadaian (Persero), PT Hutama Karya, Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia, PT Semen Indonesia dan afiliasinya, PT Semen Bosowa, PT Pos Indonesia, PT Indofarma, PT Inti, PT Len, Koperasi pegawai Bank Indonesia (KOPEBI), Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG), Tripilar Betonmas, Oblige Suretyship, YKKBI, PERUMNAS, PROPERNAS, PT Sahid Dinamika, Brantas Abipraya, dan BOSTIK.

Total non-bank credit and guarantee compensation is dominated by service and trading. In non-bank guarantee service, the Company coordinated with Indonesia Eximbank (LPEI), PT Garuda Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM), PT Pegadaian (Persero), PT Hutama Karya, Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia, PT Semen Indonesia and its affiliation, PT Semen Bosowa, PT Pos Indonesia, PT Indofarma, PT Inti, PT Len, Cooperative of Bank Indonesia's Employees (KOPEBI), Cooperative of Semen Gresik People (KWSG), Tripilar Betonmas, Oblige Suretyship, YKKBI, PERUMNAS, PROPERNAS, PT Sahid Dinamika, Brantas Abipraya, and BOSTIK.

Sesuai dengan arahan dari Dewan Pengawas, kami akan lebih meningkatkan penjaminan melalui lembaga non bank. Kami optimis dalam mencapai prospek tahun 2015 yaitu memenuhi target penjaminan sebesar Rp17,35 triliun. Bila hal ini tercapai, proyeksi pasar akan semakin besar dan terbuka lebar. Salah satu usaha yang dilakukan Perusahaan adalah dengan selalu menekankan kerja sama tim yang solid. Dengan menghadirkan SDM yang handal serta koordinasi yang tepat di setiap jaringan, direktorat penjamin bukan bank akan mampu mencetak prestasi lain dan mencapai target di tahun 2015.

In line with the direction of Board of Supervisors, we will develop the guarantee sector through non bank institutions. We are optimistic to achieve the prospect for 2015, that is to fulfill guarantee target that amounted to Rp17.35 trillion. If it can be achieved, market projection will be greater and wide open. One of the attempts conducted by the Company is to always emphasize solid team work. By having competent Human Resources and good coordination in every level of the Company, Directorate of non bank Guarantee will be able to set achievements and reach its targets in 2015.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

Kegiatan Penjaminan

1. Pola Penjaminan

Pola penjaminan konvensional hadir untuk memenuhi kebutuhan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang memiliki usaha yang *feasible*, namun tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan, khususnya dalam hal pemenuhan agunan dalam rangka mengakses fasilitas Kredit atau Pembiayaan ke Bank, Non-Bank dan Kreditur konvensional lainnya.

Proses penjaminan kredit melibatkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) pihak, yaitu badan usaha pemberi kredit (dalam hal ini disebut Penerima Jaminan), debitur kredit (dalam hal ini disebut Terjamin), dan Perusahaan penjaminan kredit konvensional (dalam hal ini disebut Penjamin).

Perum Jamkrindo memiliki pengalaman lebih dari 32 tahun dalam bidang Penjaminan dan telah bekerja sama dengan lebih dari 70 mitra kerja, baik perbankan maupun non-bank, yang terdiri dari Bank BUMN, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Swasta Nasional serta Mitra Non Bank sebagai berikut:

1. Bank BUMN: Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Tabungan Negara (BTN).
2. Bank Pembangunan Daerah (BPD): 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia.
3. Bank Swasta Nasional: Bank CIMB Niaga, Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank Persyarikatan, Bank Kesejahteraan Ekonomi, Bank Permata, Bank Sriparta, Bank Agroniaga, Bank Artos Indonesia, Bank Bumiputra, Bank Yudha Bhakti, Bank Internasional Indonesia (BII).
4. Mitra Non Bank: Indonesia Eximbank (LPEI), PT Garuda Indonesia, PT PNM, PT Pegadaian (Persero), PT Hutama Karya, Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia, PT Semen Indonesia, PT Semen Bosowa, PT Pos Indonesia, PT Indofarma, PT Inti, PT Len, KOPEBI, KWSG, Tripilar Beton Mas, Perumnas, Propernas, PT Sahid Dinamika, Brantas Abipraya, BOSTIK, YKKBI, Obligee Surety.

OPERATIONAL OVERVIEW PER BUSINESS SEGMENT

Guarantee Activity

1. Guarantee Pattern

Conventional guarantee pattern is established to fulfill the need of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and Cooperatives having feasible businesses, but do not meet the technical requirements of banks, especially for the fulfillment of collateral in order to access the facilities of Credit or Financing to Banks, Non-Banks and other conventional Creditors.

The credit guarantee process involves 3 (three) parties, the creditor (as the Guarantee Recipient), the credit debtor (as the Guaranteed), and the conventional credit guarantee company (as the Guarantor).

Perum Jamkrindo has more than 32 years of experience in this Guarantee sector and has cooperated with more than 70 partners in banking and non-banking institutions, consisting of State-Owned Banks, Regional Development Banks (BPD), National Private Banks and Non-Bank Institutions. Those partners are:

1. State-Owned Banks: Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Tabungan Negara (BTN).
2. Regional Development Banks (BPD): 26 BPDs throughout Indonesia.
3. National Private Banks: Bank CIMB Niaga, Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank Persyarikatan, Bank Kesejahteraan Ekonomi, Bank Permata, Bank Sriparta, Bank Agroniaga, Bank Artos Indonesia, Bank Bumiputra, Bank Yudha Bhakti, Bank Internasional Indonesia (BII).
4. Non Bank Institutions: Indonesia Eximbank (LPEI), PT Garuda Indonesia, PT PNM, PT Pegadaian (Persero), PT Hutama Karya, Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia, PT Semen Indonesia, PT Semen Bosowa, PT Pos Indonesia, PT Indofarma, PT Inti, PT Len, KOPEBI, KWSG, Tripilar Beton Mas, Perumnas, Propernas, PT Sahid Dinamika, Brantas Abipraya, BOSTIK, YKKBI, Obligee Surety.

2. Jenis Penjaminan

a) Penjaminan Kredit Program

Kredit Program di Indonesia sudah mulai dikenal sejak 1960 dan bertujuan untuk membiayai ekonomi produktif dan berorientasi untuk pengembangan usaha. Awal mula munculnya kredit ini difokuskan untuk pembiayaan sektor pertanian, terkait dengan kebijakan intensifikasi pertanian.

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM definisi Kredit Program adalah pembiayaan sistem Kredit Bank yang diarahkan untuk kepentingan pembangunan Perekonomian Nasional.

Penjaminan Kredit Program merupakan salah satu kegiatan yang telah dilakukan oleh Perum Jamkrindo dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga Penjamin dalam mendukung kebijakan Kredit Program Pemerintah dalam meningkatkan volume Kredit kepada UMKM.

Beberapa Penjaminan Kredit Program yang saat ini dilakukan oleh Perum Jamkrindo adalah:

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
   Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM serta penguatan Perusahaan Penjaminan dengan memperkuat modal dan perluasan jangkauan pelayanan, maka sebagai implementasinya Perum Jamkrindo telah mendapat tugas untuk berperan dalam Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untuk program penjaminan KUR tersebut, Pemerintah menempatkan sejumlah dana sebagai tambahan modal Pemerintah untuk perkuatan Perum Jamkrindo.

   Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum *bankable* dengan *plafond* kredit sampai dengan Rp500 juta yang sebagian dijamin oleh Perusahaan Penjaminan.

2. Types of Guarantees

a) Credit Guarantee Program

In Indonesia, the loan program has been around since 1960 and aimed to finance the productive sector in the economy as well as oriented to business development. Initially, the emergence of this program is focused on financing the agricultural sector, associated with the intensification of agriculture policy.

According to the Ministry of Cooperatives and SMEs, the definition of Credit Program is a financing system for Bank's Credit geared to the interests of National Economic Development.

Credit Guarantee Program is one of the activities conducted by Perum Jamkrindo in carrying out its function as a guarantee institution in support of the Government's Credit Program policy to increase the volume of Credit to MSMEs.

Some of the Credit Guarantee Program currently undertaken by Perum Jamkrindo are:

1. Micro Credit Loan (Kredit Usaha Rakyat - KUR)
   In accordance with Presidential Instruction No. 6 year 2007 dated June 8, 2007 on the Acceleration of Real Sector Development and Empowerment of MSMEs as well as Enhancement of Guarantee Company by increasing capital and expanding service reach. Thus, in its implementation, Perum Jamkrindo has played a major role in Micro Credit Loan (KUR) Guarantee Program. In this program, the Government placed a sum of state capital as additional government capital to strengthen Perum Jamkrindo.

   KUR is a credit or financing method for working capital and/or investment to MSMEs and Cooperatives in productive and feasible business lines, but not yet bankable with a credit limit of up to Rp500 million, partially guaranteed by the Guarantee Company.

KUR yang disalurkan oleh bank pelaksana yang dijamin secara Otomatis Bersyarat (*Conditional Automatic Cover/CAC*) oleh Perusahaan Penjaminan dengan nilai penjaminan sebesar:

- 80% (delapan puluh persen) untuk sektor pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, industri kecil, dan TKI.
- 70% (tujuh puluh persen) untuk sektor lainnya.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) meliputi:

- KUR Mikro, dengan *plafond* sampai dengan Rp20 juta per debitur dengan tingkat suku bunga maksimal 22% p.a.
- KUR Ritel, yang memiliki *plafond* kredit di atas Rp20 juta sampai dengan Rp500 juta dengan tingkat suku bunga maksimal 13% p.a.

Mekanisme penyaluran KUR diatur sebagai berikut:

- Penyaluran langsung dari Bank Pelaksana kepada UMKMK.
- Tidak langsung melalui lembaga *linkage* dengan pola *executing*.
- Tidak langsung melalui lembaga *linkage* dengan pola *chanelling*.

Jangka waktu KUR ditetapkan sebagai berikut:

- Jangka waktu KUR tidak melebihi tiga tahun untuk Modal Kerja dan lima tahun untuk Kredit atau Pembiayaan Investasi.
- Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi, maka jangka waktu kredit dapat diperpanjang menjadi maksimal enam tahun untuk Kredit atau Pembiayaan Modal Kerja dan sepuluh tahun untuk Kredit atau Pembiayaan Investasi terhitung sejak tanggal perjanjian awal.
- Jangka waktu Kredit atau Pembiayaan Investasi untuk usaha perkebunan tanaman keras dapat diberikan langsung maksimal tiga belas tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah bekerjasama dengan Perum Jamkrindo, antara lain Bank Rakyat Indonesia

KUR distributed by the executing bank is guaranteed by Perum Jamkrindo in Conditional Automatic guarantee (Conditional Automatic Cover/CAC) with the value of:

- 80% (eighty percent) for agricultural, marine, fisheries, forestry, small industries, and Indonesian workers.
- 70% (seventy percent) for other sectors.

KUR includes:

- Micro KUR, with the limit of up to Rp20 million per debtor with a maximum interest rate of 22% p.a.
- Retail KUR, which has a credit limit above Rp20 million up to Rp500 million with a maximum interest rate of 13% p.a.

KUR distribution mechanism is set as follows:

- Direct distribution from Executing Bank to MSMEs and Cooperatives.
- Indirectly through linkage institutions with the executing pattern.
- Indirectly through linkage institutions with the channeling pattern.

KUR period shall be as follows:

- KUR period not exceeding three years for working capital and five years for the Credit or Investment Financing.
- In the event that an extension, suppletion and restructuring is needed, the loan period can be extended to a maximum of six years for Credit or Working Capital Financing, and ten years for Credit or Investment Financing effective from the date of the initial agreement.

- Duration of Credit or Investment Financing for plantation crops can be directly given for a maximum of thirteen years and cannot be extended.
- Executing Bank of KUR, which has been working with Perum Jamkrindo, includes: Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank BNI, Bank Mandiri, Bank

(BRI), Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan 26 Bank Pembangunan Daerah.

2. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 79/ PMK.05/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bakar Nabati, kegiatan usaha yang dibiayai KKP-E meliputi pengembangan tanaman pangan, pengembangan tanaman hortikultura, pengembangan tanaman perkebunan, pengadaan pangan (berupa gabah, jagung, kedelai dan perikanan), peternakan, penangkapan dan pembudidayaan ikan, pengadaan atau peremajaan peralatan, mesin dan sarana lain yang diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha tersebut.

Tingkat suku bunga KKP-E ditetapkan maksimal sebesar tingkat bunga pasar yang berlaku untuk kredit sejenis dengan ketentuan:
- Untuk KKP-E pengembangan tebu paling tinggi sebesar suku bunga penjaminan simpanan pada bank umum yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di tambah 5%; dan
- Untuk KKP-E lainnya paling tinggi sebesar suku bunga penjaminan simpanan pada bank umum yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di tambah 6% .

Bunga tersebut sebagian menjadi beban debitur dan sebagian lagi menjadi beban pemerintah (subsidi).

Bank Pelaksana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) yang telah bekerjasama dengan Perum Jamkrindo, antara lain PT Bank Jabar Banten Tbk, PT BPD Kalimantan Selatan, PT BPD Jateng, PT BPD Jatim, PT BPD Papua serta PT BPD Nusa Tenggara Barat.

BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah and 26 Regional Development Banks.

2. Loan for Food Security and Energy (KKP-E)
Based on Regulation of the Minister of Finance No.79/ PMK.05/2007 dated July 17, 2007 on the investment credit and/or the working capital given to support the implementation of the Food Security Program and Program Development of Bio Fuel Plant Raw Materials. The business activities funded by KKP-E include: the development of food crops, the development of horticulture crops, plantation development, procurement of food (in the form of grain, corn, soy and fish), animal husbandry, fishing and fish farming, procurement equipment, machinery and tools, and other activities needed to support these efforts.

The interest rates on KKP-E are set at a maximum of prevailing market rate for similar loans with the following provisions:
- For KKP-E development of sugar cane, a maximum interest rate on bank deposit insurance is determined by the Deposit Insurance Corporation (LPS) plus 5%; and
- For other KKP-E, a maximum interest rate on bank deposit insurance is generally set by the Deposit Insurance Corporation (LPS) plus 6%.

The interest is partly borne by the debtor and partly borne by the government (subsidies).

Executing Banks for Food Security and Energy (KKP-E) who has worked with Perum Jamkrindo are: PT Bank Jabar Banten Tbk, PT BPD Kalimantan Selatan, PT BPD Jateng, PT BPD Jatim, PT BPD Papua and PT BPD Nusa Tenggara Barat.

3. Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)
Sehubungan dengan usaha pembibitan sapi yang dilakukan peternak di Indonesia masih berjalan lambat dan belum banyak dilakukan oleh pelaku usaha, diperlukan peran Pemerintah untuk mendorong pelaku usaha untuk bergerak di bidang pembibitan sapi melalui penyediaan Skim Kredit dengan bunga bersubsidi.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Skim Kredit yang bersumber dari perbankan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) beserta perubahannya. Kelancaran pelaksanaan pemanfaatan Kredit yang dimaksud telah ditetapkan dalam suatu pedoman pelaksanaan KUPS dengan Peraturan Menteri pertanian No. 12/Permentan/PD.400/3/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS).

Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) merupakan Kredit yang diberikan Bank Pelaksana kepada Pelaku Usaha Pembibitan Sapi yang memperoleh subsidi bunga dari Pemerintah dengan tujuan untuk mendukung pendanaan pelaksanaan Usaha Pembibitan Sapi secara berkelanjutan. Objek yang dibiayai KUPS adalah Usaha Pembibitan Sapi untuk produksi bibit sapi potong atau sapi perah yang dilengkapi dengan nomor identifikasi berupa *microchip*.

Tingkat suku bunga KUPS ditetapkan maksimal sebesar tingkat bunga pasar yang diatur oleh Pemerintah dengan ketentuan sebesar 5% (lima persen) menjadi beban Pelaku Usaha (Debitur) dan sisanya menjadi beban Pemerintah (subsidi).

Bank Pelaksana Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) yang telah melakukan kerja sama Penjaminan dengan Perum Jamkrindo, antara lain Bank Nagari, BPD Jatim dan BPD NTB.

3. Credit of Cattle Breeding (KUPS)
With regard to the breeding cattle business operated by ranchers in Indonesia in which not many people are engaged in the cattle breeding business, the role of the government is essential to encourage people to move into the field of cattle breeding by providing credit with a subsidized interest rate scheme.

On that basis, the government has set up a Credit Scheme sourced from banks with the Ministry of Finance No. 131/ PMK.05/2009 on Credit of Cattle Breeding (KUPS) and regarding the smooth implementation of the utilization of the credit, the guidelines for the implementation of the Regulation of the Minister of Agriculture No.12/Permentan/PD.400/3/2012 on Guidelines of the Credit of Cattle Breeding (KUPS).

The credit of Cattle Breeding (KUPS) is the loan given by the Executing Bank to finance the Cattle Breeding Business with the interest rate subsidy from the Government with an aim to support the implementation of a sustainable Cattle Breeding Business. Objects funded by KUPS loans are Cattle Breeding for seed production of beef cattle or dairy cows equipped with a microchip identification number.

The interest rate of KUPS is set at a maximum market interest rates stipulated by the Government with the provisions of 5% (five percent) borne by the Business Players (Debtors) and the rest is borne by the government (subsidies).

Executing Banks of Credit for Cattle Breeding (KUPS) that have been cooperating with Perum Jamkrindo include: Bank Nagari, BPD Jatim and BPD NTB.

b) Penjaminan *Existing* (korporasi)

Penjaminan *Existing* merupakan penjaminan kredit yang selama ini dijalankan oleh Perum Jamkrindo, yang diciptakan dan dikembangkan sendiri oleh Perusahaan mengikuti kebutuhan pihak perbankan.

Perum Jamkrindo melakukan Penjaminan *Existing,* baik yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Pemberian Kredit secara langsung diberikan oleh Penerima Jaminan kepada UMKMK, sementara penyaluran kredit secara tidak langsung Penerima Jaminan bekerja sama dengan Lembaga *Linkage* dengan Pola *Executing* maupun *Channeling*.

Produk-produk Penjaminan *Existing* yang selama ini dijalankan oleh Perum Jamkrindo adalah sebagai berikut:

b) Existing (Corporate) Credit Guarantee

Existing Guarantee is a guarantee of credit that has been run by Perum Jamkrindo, established and developed by the Company following the needs of the banks.

Perum Jamkrindo made the Existing Guarantee whether directly or indirectly. Direct lending is provided by Guarantee Recipients to MSMEs and Cooperatives, while for indirect lending, the Guarantee Recipient cooperates with the Linkage Institutions with the Patterns of Executing and Channelling.

Existing Guarantee products that have been managed by Perum Jamkrindo are as follows:

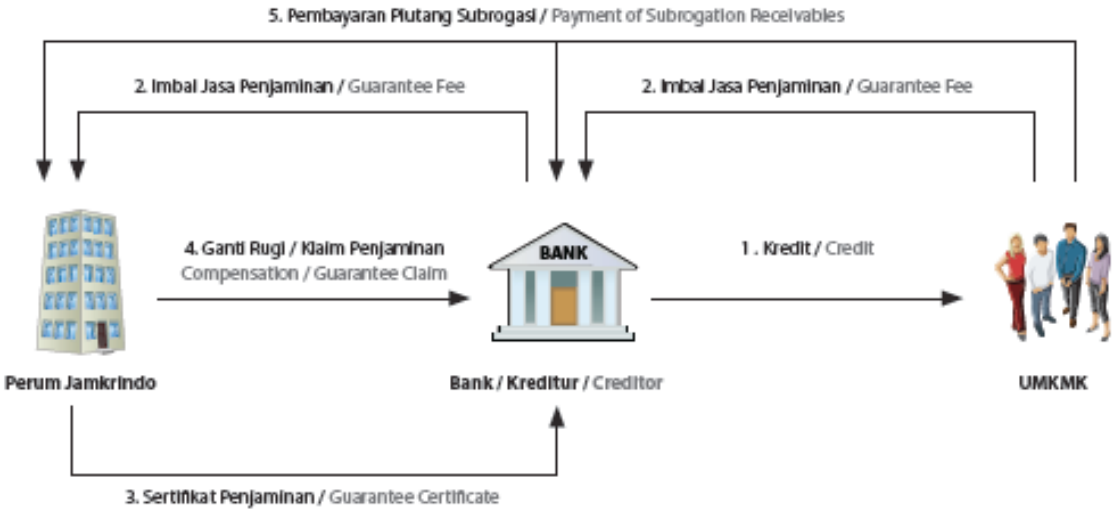
No	**Produk Penjaminan Kredit /** Credit Guarantee Product
1.	Penjaminan Kredit Mikro / Micro Credit Guarantee
2.	Penjaminan Kredit Umum / Commercial Credit Guarantee
3.	Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa / Credit Guarantee Construction and Procurement of Goods/ Services
4.	Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi) / Counter Bank Guarantee
5.	Penjaminan Distribusi Barang / Distribution of Goods Guarantee
6.	Penjaminan Kredit Multiguna / Multipurpose Credit Guarantee
7.	*Surety Bond*
8.	Penjaminan Kredit BPR/BPRS / BPR/BPRS Credit Guarantee
9.	Penjaminan KPR Sejahtera FLPP / FLPP Welfare KPR Guarantee
10.	*Customs Bond*
11.	Penjaminan Keagenan Kargo / Cargo Agency Guarantee
12.	Penjaminan Invoice Financing / Invoice Financing Guarantee

3. Proses Penjaminan

Proses Penjaminan Kredit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara Perum Jamkrindo (Penjamin) dan Penerima Jaminan, yang tertuang dalam Perjanjian kerja sama Penjaminan Kredit dan/atau Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3).

3. Guarantee Process

Credit Guarantee process is implemented in accordance with the terms and condition agreed upon between Perum Jamkrindo (Guarantor) and the Guarantee Recipient (Banks) and documented in the Credit Guarantee Agreement and or Letter of Credit Guarantee Approval (SP3).



Secara umum mekanisme proses penjaminan yang berlaku di Perum Jamkrindo adalah sebagai berikut:

a. Penjaminan Kasus Per Kasus (*Case By Case/CBC*)
   Penjaminan Kasus Per Kasus (*Case By Case/CBC*) adalah penjaminan yang proses persetujuannya dilakukan secara kasus per kasus atas kredit yang diberikan oleh Penerima Jaminan, di mana Perum Jamkrindo melakukan evaluasi kelayakan usaha calon Terjamin terlebih dahulu atas setiap pengajuan penjaminan sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) sebagai bentuk persetujuan penjaminan. Dalam hal ini, Perum Jamkrindo dapat menyetujui atau tidak menyetujui pengajuan penjaminan tersebut.

   Penjaminan kasus per kasus diberikan untuk produk penjaminan Kredit Umum, Kredit Mikro, Kredit Kontruksi dan Pengadaan Barang atau Jasa, Kontra Bank Garansi, Distribusi Barang dan beberapa jenis Kredit Multiguna.

   Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penjaminan kredit kasus per kasus adalah sebagai berikut:
   1. Terjamin dan Penerima Jaminan atau mitra kerja bank atau non bank mengajukan permohonan penjaminan kredit kepada penjamin dengan

In general, the mechanism of guarantee processes that applies in Perum Jamkrindo is as follows:

a. Case by Case (CBC) Guarantee
   Case by Case (CBC) Guarantee is a guarantee of which the approval process conducted in a case by case basis on the credits granted by the Guarantee Recipients, in which Perum Jamkrindo will evaluate in advance the feasibility of the Guaranteed candidate's business over each guarantee application prior to the issuance of SP3. In this case Perum Jamkrindo can approve or not approve the application of such credit guarantee proposal.

   The guarantee of case by case basis applies for Commercial Loans, Micro Credit, Construction and Procurement of Goods/Services Credit, Counter Bank Guarantee, Distribution of Goods and certain types of Multipurpose Credit.

   The steps taken in the case by case credit guarantee process are as follows:

   1. The Guaranteed and the guarantee recipients or partners of bank and non-bank applies for a credit guarantee to the guaranteed by attaching several

melampirkan beberapa dokumen, antara lain proposal usaha, identitas dan legalitas usaha pemohon sebagaimana permohonan kredit dari Terjamin UMKMK kepada Penerima Jaminan.

2. Setelah melakukan analisis kelayakan penjaminan, Penjamin menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) kepada Penerima Jaminan yang berisi tentang ketentuan dan persyaratan penjaminan, serta menyampaikan surat penolakan apabila Penjamin tidak menyetujui permohonan penjaminan tersebut.
3. Penerima Jaminan menyampaikan surat persetujuan atas seluruh ketentuan dalam SP3 Penjamin, apabila menyetujui ketentuan dalam SP3 tersebut.
4. Penerima Jaminan atau mitra kerja bank atau non bank dapat melakukan perjanjian (akad) kredit dan merealisasikan kreditnya kepada nasabah (Terjamin) UMKMK
5. Penerima Jaminan menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP) kepada Penjaminan dengan melampirkan beberapa dokumen, antara lain *copy* Perjanjian Kredit beserta *Addendum*-nya dan bukti pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP).
6. Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan (SP) kepada Penerima Jaminan.

b. Penjaminan Otomatis Bersyarat (*Conditional Automatic Cover/CAC*)

Penjaminan Otomatis Bersyarat (*Conditional Automatic Cover/CAC*) adalah penjaminan yang diberikan secara otomatis oleh Perum Jamkrindo atas kredit yang direalisasikan oleh Penerima Jaminan kepada UMKMK dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah disepakati yang tertuang dalam Perjanjian kerja sama Penjaminan, antara Perum Jamkrindo dengan Penerima Jaminan.

Penjaminan Otomatis Bersyarat diberikan untuk produk penjaminan KUR, Kredit Mikro, Kredit Kontruksi dan Pengadaan Barang atau Jasa dalam batasan jumlah tertentu, Kontra Bank Garansi dan Kredit Multiguna.

documents, among others, business proposal, the applicant's identity and the legality of the applicant's business as the credit proposal from the Guaranteed of MSMEs and Cooperatives to the Guarantee Recipients.

2. After analyzing the feasibility of the guarantee application, the Guarantor issues SP3 to the Guarantee Recipient that contains the guarantee terms and conditions, and issues a disapproval letter if the Guarantor do not approve the application of credit guarantee.

3. The Guarantee Recipient submits a letter of consent agreeing to all provisions in the Guarantor's SP3, if they agree to the terms of the SP3.

4. Guarantee Recipient or partners of bank or non-bank may sign the credit agreement and realize the credit to the customers (Guaranteed) of MSMEs and Cooperatives.
5. Guarantee Recipient submits the proposal for the issuance of Guarantee Certificate (SP) to the Guarantee Company by attaching several documents, including a copy of the Credit Agreement and its Addendum, and the receipt of Guarantee Fee payment (IJP).
6. Guarantee Certificate is issued by the Guarantor to the Guarantee Recipient.

b. Conditional Automatic Cover (CAC)

Conditional Automatic Cover (CAC) is a guarantee provided automatically by Perum Jamkrindo for the credit realized by Guarantee Recipient to the MSMEs and Cooperatives by takinginto account the terms agreed upon in the Guarantee Cooperation Agreement between Perum Jamkrindo and the Guarantee Recipient.

Conditional Automatic Cover is given to all credit guarantee products including KUR Guarantee, Micro Credit, Credit Construction and Procurement of Goods and Services within a certain limit, Counter Bank Guarantee and Multipurpose Credit.

Penjaminan Bersama (*Co-Guarantee*)

Sebagai salah satu upaya untuk mitigasi risiko serta memperluas jaringan pasar Perum Jamkrindo telah melakukan kerja sama Penjaminan (*co-Guarantee*) dengan beberapa Perusahaan Asuransi sebagai mitra kerja *co-Guarantee* Penjaminan melalui Penjaminan Bersama KUR, Kredit Multiguna dan *Co-Branding*.

1. Penjaminan Bersama (*Co-Guarantee*) KUR

Dalam rangka pelaksanaan Inpres No. 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKMK, Pemerintah memprogramkan penjaminan KUR tahun 2011 sebesar Rp30 triliun yang dijamin oleh 2 (dua) perusahaan, yaitu Perum Jamkrindo dan PT Askrindo (Persero).

Sejak 2010, Perum Jamkrindo dan PT Askrindo (Persero) menyepakati satu bentuk kerja sama penjaminan bersama (*co-Guarantee*). Selain untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target penyaluran KUR dari pemerintah, hubungan kerja sama penjaminan bersama (*co-Guarantee*) dilakukan dengan dasar sebagai berikut:

a. Perum Jamkrindo dan PT Askrindo (Persero) merupakan BUMN, di bawah satu naungan kementerian negara BUMN.
b. Perum Jamkrindo dan PT Askrindo (Persero) sama-sama mendapatkan tambahan dana Penyertaan Modal Negara (PMN).
c. Perum Jamkrindo dan PT Askrindo (Persero) juga sama-sama mendapatkan tugas menjamin KUR.
d. Bank pelaksana yang menyalurkan KUR adalah sama.
e. Mekanisme penjaminan KUR bersifat otomatis bersyarat (*conditional automatic cover*).

Perum Jamkrindo menerbitkan Sertifikat Penjaminan (SP) berdasarkan permohonan dari Bank Pelaksana, kemudian Perum Jamkrindo mengajukan Penjaminan bersama kepada PT Askrindo (Persero). Demikian juga sebaliknya, PT Askrindo (Persero) mengajukan Penjaminan bersama kepada Perum Jamkrindo atas Sertifikat Penjaminan yang diterbitkannya.

Co-Guarantee

As an effort to mitigate risks and expand the market network, Perum Jamkrindo have been cooperating with several insurance companies as a partner of co-Guarantee for some guarantee products such as KUR Co-Guarantee, Multipurpose Credit and Co-Branding.

1. Co-Guarantee of KUR

in the implementation of Presidential Instruction No. 6 Year 2007 dated June 8, 2007 on the Acceleration of Real Sector Development and Empowerment of MSMEs and Cooperatives, the Government allocated Rp30 trillion for KUR assurance program in 2011, of which program was guaranteed by 2 (two) companies, namely Perum Jamkrindo and PT Askrindo (Persero).

Since 2010, Perum Jamkrindo and PT Askrindo (Persero) agreed on co-Guarantee cooperation to support the government to achieve targets on KUR Program. The basic reason for the agreement in the co-guarantee of KUR Program between two institutions are as follows:

a. Perum Jamkrindo and PT Askrindo (Persero) are state-owned enterprises under the State Ministry of SOE.
b. Both Perum Jamkrindo and PT Askrindo (Persero) receive additional fund for State Capital Investment (PMN).
c. Both Perum Jamkrindo and PT Askrindo (Persero) have the assignment to guarantee KUR Program.
d. The executing Banks of KUR are the same.
e. The mechanism of KUR Guarantee is conditional automatic cover.

Perum Jamkrindo issues Guarantee Certificate (SP) based on the request of the Executing Bank. After the issuance, Perum Jamkrindo submits the certificate to PT Askrindo (Persero) and vice versa. This means, PT Askrindo (Persero) submits the certificate to Perum Jamkrindo for the issued Guarantee Certificate (SP).

2. Penjaminan Bersama (*Co-Guarantee*) Kredit Multiguna

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Mitra Penjaminan untuk menjamin pemberian Kredit Multiguna kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota POLRI/TNI, Pegawai BUMN/ BUMD dan Pegawai Perusahaan Swasta yang bonafit, di mana salah satu risiko kreditnya adalah kematian Terjamin, maka sebagai salah satu mitigasi risiko, Perum Jamkrindo telah menandatangani kerja sama penjaminan bersama (*co-Guarantee*) dengan Perusahaan-perusahaan Asuransi.

Atas risiko-risiko kredit yang disebabkan oleh kematian Terjamin, maka klaim dapat dilakukan kepada perusahaan-perusahaan Asuransi yang sudah menandatangani perjanjian kerja sama *co-Guarantee*. Risiko yang ditanggung oleh mitra *co-Guarantee* adalah risiko kemacetan kredit yang disebabkan Terjamin meninggal dunia, baik akibat kematian biasa maupun *personal accident* sejak 3 (tiga) bulan pertama dari tanggal realisasi kredit.

3. Penjaminan *Co-Branding*

Untuk memenuhi kebutuhan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam menjamin pemberian pembiayaan kepada Pengusaha Mikro Kecil, di mana salah satu risiko kreditnya adalah kematian Terjamin, maka sebagai salah satu mitigasi risiko, Perum Jamkrindo telah menandatangani kerja sama *Co-Branding* dengan PT Asuransi Jiwasraya.

Melalui kerja sama ini, Perum Jamkrindo dan PT Asuransi Jiwasraya sama-sama melakukan kerja sama Penjaminan atau Asuransi atas pembiayaan kepada Debitur PT PNM dengan penjaminan risiko yang berbeda. Perum Jamkrindo menjamin risiko kemacetan kredit sementara PT Asuransi Jiwasraya melindungi risiko kematian Terjamin.

Dalam kerja sama ini, Perum Jamkrindo menerbitkan Sertifikat Penjaminan (SP) kepada PT PNM sebagai bukti penjaminan, yang sekaligus mencantumkan pernyataan (*statement*) penjaminan atas risiko jiwa Debitur dari PT Asuransi Jiwasraya.

2. Co-Guarantee for Multipurpose Credit

In order to meet the needs of partners for the guarantee of Multipurpose Credit to the employees (Civil Servants, Member of POLRI/TNI, Employees of State-Owned Enterprise/Regional Enterprises and Employees of reputable Private Company), in which one of the credit risks is the death of the Guaranteed, Perum Jamkrindo has signed a joint guarantee or co-Guarantee agreement with insurance companies.

Credit risks due to the death of the Guaranteed can be claimed to the insurance companies that have signed the co-Guarantee agreement. Risks borne by the co-Guarantee partners is a non-performing loan risk due to the death of the Guaranteed, both because of ordinary cause and personal accident since the first 3 (three) months after the realization of credit disbursement date.

3. Co-Branding Guarantee

To fulfill the needs of PT Permodalan Nasional Madani (PNM) in guaranteeing financing disbursment for the micro and small enterprises, in which one of the credit risks is the death of the Guaranteed, Perum Jamkrindo signed a Co-Branding cooperation with PT Asuransi Jiwasraya as a means to mitigate such risk.

Through this cooperation, Perum Jamkrindo and PT Asuransi Jiwasraya are both conducting Guarantee or Insurance cooperation on financing disbursement to the Debtors of PT PNM with different risk guarantees. Perum Jamkrindo is responsible for the non-performing loan risks while PT Asuransi Jiwasraya is responsible for the risks of the Guaranteed's death.

In this partnership, Perum Jamkrindo issues Guarantee Certificate (SP) to PT PNM as a guarantee evidence, including guarantee statement to cover the death risk of the Debtor from PT Asuransi Jiwasraya.

PT PNM melimpahkan IJP hak Perum Jamkrindo serta premi hak PT Asuransi Jiwasraya melalui Perum Jamkrindo di mana premi tersebut akan diteruskan oleh Perum Jamkrindo kepada PT Asuransi Jiwasraya.

PT PNM grants the guarantee fee rights to Perum Jamkrindo, including the insurance/premium fee rights to PT Asuransi Jiwasraya through Perum Jamkrindo where the fee will be forwarded to PT Asuransi Jiwasraya.

Apabila terjadi klaim atas kematian Debitur, maka PT PNM mengajukan klaim tersebut melalui Perum Jamkrindo yang kemudian akan meneruskan pembayaran sesaat setelah klaim tersebut telah dibayar oleh PT Asuransi Jiwasraya.

Should there be a claim of the death of the Debtor, PT PNM files the claim through Perum Jamkrindo where the payment will be forwarded once the claim is paid by PT Asuransi Jiwasraya.

Kinerja Penjaminan Kredit

Selama periode 2014, total kredit yang dijamin Perum Jamkrindo sebesar Rp40,74 triliun atau mencapai 66,87% dari target RKAP tahun 2014 sebesar Rp60,92 triliun. Volume kredit yang dijamin Perum Jamkrindo tersebut terdiri dari penjaminan bank dan penjaminan bukan bank. Penjaminan bank pada 2014 tercatat sebesar Rp38,42 triliun yang berasal dari penjaminan konvensional sebesar Rp36,25 triliun dan penjaminan bukan bank sebesar Rp2,32 triliun.

Performance of Credit Guarantee

During the period of 2014, total loans guaranteed by Perum Jamkrindo reached Rp40.74 trillion or 66.87% from the RKAP target in 2014 amounting to Rp60.92 trillion. The volume of loans guaranteed by Perum Jamkrindo consists of bank and non-bank guarantee. Bank guarantee in 2014 was recorded to be at Rp38.42 trillion, derived from conventional guarantee amounting to Rp36.25 trillion and non bank guarantee at Rp2.32 trillion.

Peningkatan Kapasitas Penjaminan Kredit

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/ PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 010/2008 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, *Gearing Ratio* adalah batasan yang ditetapkan untuk mengukur kemampuan Penjamin dalam melakukan kegiatan Penjaminan.

The Increase in Credit Guarantee Capacity

Pursuant to the Regulation of the Minister of Finance Number 99/PMK.010/2011 on Amendments to the Regulation of the Minister of Finance Number 222/PMK.010/2008 On the Credit Guarantee and Credit Re-guarantee Companies, Gearing Ratio is defined as the limit set to measure the ability of the Guarantor in the Guarantee activities.

Gearing Ratio merupakan ukuran kemampuan menjamin oleh suatu Perusahaan Penjamin yang direpresentasikan oleh perbandingan antara total nilai *outstanding* Penjaminan yang ditanggung sendiri dengan modal sendiri bersih pada suatu waktu tertentu. Modal sendiri bersih adalah total Ekuitas Perum Jamkrindo atau Total Aset Perusahaan dikurangi total Kewajibannya.

Gearing Ratio is a measurement of the ability to guarantee by a Guarantee Company that is represented by the ratio between the total of owned outstanding values of Guarantee and the net owned capital at any given time. Net owned capital is the total Equity of the Company or the Company's Total Assets reduced with the total Obligations.

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99/PMK.010/2011, khususnya pada pasal 42, ayat (4) dan ayat (5), disebutkan bahwa:

1. *Gearing Ratio* untuk Usaha Produktif ditetapkan paling tinggi sebesar 10 kali.

As stipulated by the Regulation of the Minister of Finance Number: 99/PMK.010/2011, particularly in article 42, paragraph (4) and paragraph (5), it is stated that:

1. Gearing Ratio for Productive Business set at a maximum of 10 times.

2. Total *Gearing Ratio* ditetapkan paling tinggi sebesar 40 (empat puluh) kali.

Pada 2014, Perum Jamkrindo menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,3 triliun yang menjadikan modal sendiri bersih Perum Jamkrindo bertambah menjadi sebesar Rp10,02 triliun, maka kapasitas Perum Jamkrindo dalam melakukan kegiatan usaha Penjaminan Kredit menjadi semakin meningkat.

2. Total Gearing Ratio is set at a maximum of 40 (forty) times.

In 2014, Perum Jamkrindo received an addition of State Capital Investment (PMN) amounting to Rp1,3 trillion, which made its owned net capital increased to Rp10.02 trillion. Hence, the capacity of Perum Jamkrindo in conducting its Credit Guarantee activities also improved.

Pendapatan Usaha

1. Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP)

Pada 2014, total pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Perusahaan tercatat sebesar Rp1.686,27 miliar, naik 5,33% dibandingkan dengan tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp1.600,96 miliar.

Perkembangan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Perum Jamkrindo selama periode 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Operating Revenues

1. Income of Guarantee Fee (IJP)

In 2014, the total income of Guarantee Fee (IJP) reached Rp1,686.27 billion, grew by 5.33% compared to the previous year which was recorded at Rp1,600.96 billion.

The growth of the income of Guarantee Fee of Perum Jamkrindo over the last 3 (three) years is as follows:

Dalam miliar Rupiah / In billion Rupiah

Keterangan / Description	2012	2013	2014
Imbal Jasa Penjaminan (IJP) / Guarantee Fee (IJP)	1.399,06	1.600,96	1.686,27

2. Pendapatan Investasi

Pendapatan investasi pada 2014 sebesar Rp531,36 miliar, naik 52,83% dibandingkan dengan tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp347,67 miliar.

Perkembangan pendapatan hasil Investasi Perum Jamkrindo selama periode 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

2. Investment Revenue

The investment income in 2014 was Rp531.36 billion, an increase of 52.83% compared to 2013 which was recorded at Rp347.67 billion.

The trend of the investment income of Perum Jamkrindo during the last 3 (three) years is as follows:

Dalam miliar Rupiah / In billion rupiah

Keterangan/ Remarks	2012	2013	2014
Pendapatan Investasi / Investment Revenue	205,80	347,67	531,36

Catatan: untuk tahun 2013 dan 2014, pendapatan investasi yang dipakai adalah pendapatan investasi bruto.

Note: for 2013 and 2014, investment revenue used was gross investment revenue.

Imbal Jasa Penjaminan Bersih

1. Imbal Jasa Penjaminan Bruto

Sejak awal pendiriannya, Perum Jamkrindo berkomitmen untuk turut serta menunjang kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional dengan melaksanakan kegiatan Penjaminan Kredit bagi UMKMK. Salah satunya dengan mengoptimalkan penjaminan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Realisasi imbal jasa penjaminan bruto pada 2014 tercatat sebesar Rp1,68 triliun, nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp85,30 miliar atau 5,33% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1,60 triliun. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh kenaikan imbal jasa penjaminan yang meningkat secara signifikan oleh sektor agrobisnis yaitu konvensional Rp193,77 miliar dan syariah Rp6,52 miliar.

2. Pendapatan Komisi Reasuransi

Jumlah pendapatan komisi reasuransi Perum Jamkrindo pada 2014 tercatat sebesar Rp5,51 miliar, naik sebesar 552,38% dari tahun sebelumnya sebesar Rp844,53 juta. Peningkatan yang signifikan ini disebabkan karena pada tahun 2014 pelaksanaan reasuransi sudah satu tahun penuh, sedangkan pada tahun 2013 Jamkrindo memulai kerja sama reasuransi pada bulan Oktober 2013.

3. Premi *Co-Guarantee*

Premi *Co-Guarantee* pada 2014 tercatat sebesar Rp220,68 miliar, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp32,71 miliar atau 12,91% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp253,40 miliar. Penurunan ini disebabkan premi *co-Guarantee* merupakan turunan dari Imbal Jasa Penjaminan, sehingga penurunan premi *co-Guarantee* mengikuti sejalan dengan penurunan produksi penjaminan kredit multiguna.

Net Underwriting Compensation

1. Gross Guarantee Fee

Since the beginning of its establishment, Perum Jamkrindo has been committed to participating and supporting government programs in the fields of economy and national development by conducting Credit Guarantee for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and Cooperatives. One of which is by optimizing Micro Credit Loan (Kredit Usaha Rakyat - KUR) programs.

The realization of gross guarantee fee in 2014 was recorded to be at Rp1.68 trillion, increased by Rp85.30 billion or 5.33% compared to the previous year which amounted to Rp1.60 trillion. This increase was contributed mainly by the significant increase in agribusiness sector, i.e. conventional sector which was Rp193.77 billion and sharia sector which was Rp6.52 billion.

2. Reinsurance Commission Revenue

Total reinsurance commission revenue of Perum Jamkrindo in 2014 was recorded at Rp5.51 billion, increased by 552.38% from the previous year which was Rp844.53 million. This significant increase was mainly due to the implementation of reinsurance in 2014 which has been one full year, due to in 2013 Jamkrindo started the reinsurance cooperation in October 2013.

3. Co-Guarantee Premium

Co-Guarantee premium in 2014 was recorded at Rp220.68 billion, decreased by Rp32.71 billion or 12.91% compared to the previous year which amounted to Rp253.40 billion. The decrease occurred because the co-Guarantee premium was a derivative from Credit Guarantee Fee, so the decrease in co-Guarantee premium was in line with the decrease in multipurpose credit guarantee production.

4. Premi Reasuransi

Pada 2014, premi reasuransi mencapai Rp24,18 miliar, mengalami peningkatan sebesar 475,15% dari tahun sebelumnya sebesar Rp4,20 miliar. Peningkatan yang signifikan ini disebabkan karena pada tahun 2014 pelaksanaan Reasuransi sudah satu tahun penuh, sedangkan pada tahun 2013 Jamkrindo memulai kerja sama Reasuransi pada bulan Oktober 2013.

5. *Fee Based Income*

Fee based income tercatat sebesar Rp5,38 miliar mengalami peningkatan sebesar 15,15% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp4,67 miliar.

6. *Fee Agent*

Fee agent sebesar Rp11,11 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp7,63 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp3,48 miliar.

7. Restitusi IJP

Restitusi IJP sebesar Rp4,34 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp216 juta atau 4,74% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp4,56 miliar.

Secara keseluruhan, total imbal jasa penjaminan bersih Perum Jamkrindo pada 2014, mengalami kenaikan 7,68% menjadi Rp1,44 triliun dibandingkan dengan tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp1,33 triliun.

4. Reinsurance Premium

In 2014, the reinsurance premium reached Rp24.18 billion, increased by 475.15% from the previous year which amounted to Rp4.20 billion. This significant increase was mainly due to the implementation of reinsurance in 2014 has been one full year, while in 2013 Jamkrindo started the reinsurance cooperation in October 2013.

5. Fee Based Income

Fee based income was recorded at Rp5.38 billion, increased by 15.15% compared to 2013 which amounted to Rp4.67 billion.

6. Fee Agent

Fee agent amounted to Rp11.11 billion, increased by Rp7.63 billion compared to previous year which was recorded at Rp3.48 billion.

7. IJP Restitution

IJP restitution amounted to Rp4.34 billion, decreased by Rp216 million or 4.74% compared to previous year which was recorded at Rp4.56 billion.

Overall, the total net guarantee fee of Perum Jamkrindo in 2014 increased by 7.68% to Rp1.44 trillion compared to 2013 which was recorded at Rp1.33 trillion.

Dalam triliun Rupiah / In trillion Rupiah

Uraian/ Description	**2013**	**2014**	**%**
Total Imbal Jasa Penjaminan Bersih / Total Net Guarantee Fee	1,33	1,44	7,68

Profitabilitas

1. Perolehan Laba Perusahaan

Dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah

Uraian/ Description	2012	2013	2014
Laba Sebelum Pajak (EBT) / Profit Before Tax	562,27	656,97	846,94
Laba Tahun Berjalan (Setelah Pajak) / Current Year Profit (After Tax)	509,51	525,20	664,13
Laba Komprehensif Tahun Berjalan (Setelah Pajak) / Current Year Comprehensive Profit (After Tax)	517,66	445,13	724,66

2. Rasio Efektivitas Operasional

Rasio Efektivitas Operasinal merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dan pendapatan imbal jasa penjaminan (IJP). Rasio efektifitas operasional Perum Jamkrindo pada 2014 sebesar 50,23%. Rasio operasi mengalami kenaikan sebesar 9,16% dari 41,07% pada 2013.

Rasio Efektivitas Operasional tersebut menunjukkan Perum Jamkrindo cukup efektif dalam menjalankan operasional kegiatan Perusahaan.

3. *Return on Assets* (ROA)

Return on Assets (ROA) Perum Jamkrindo pada 2014 sebesar 9,96% Nilai tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan ROA tahun sebelumnya sebesar 7,97%. Peningkatan ini disebabkan adanya penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp1,3 triliun pada 2014.

4. *Return on Equity* (ROE)

Return on Equity (ROE) Perum Jamkrindo pada 2014 sebesar 9,72%. Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan ROE tahun sebelumnya sebesar 8,02%. Penurunan ini disebabkan adanya penambahan penyertaan modal.

Profitability

1. Company Profit

2. Operational Effectiveness Ratio

Operational Effectiveness Ratio is the comparison between profit before tax and income guarantee fee (IJP). The operational effectiveness ratio of Perum Jamkrindo in 2014 was 50.23%. The ratio increased by 9.16% compared to 2013 which was 41.07%.

The Operational Effectiveness Ratio shows Perum Jamkrindo's effectiveness in conducting its operational activities.

3. Return On Assets (ROA)

The Return On Assets (ROA) of Perum Jamkrindo in 2014 amounted to 9.96%, showing an increase compared to the previous ROA which was recorded at 7.97%. This increase was due to the addition in state capital investment which was recorded at Rp1.3 trillion in 2014.

4. Return On Equity (ROE)

Return On Equity (ROE) of Perum Jamkrindo in 2014 was 9.72%, decreased compared to previous ROE which was 8.02%. The decrease was caused by the addition in state capital investment.

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Laporan Posisi Keuangan

Aset (Aktiva)

Berdasarkan Laporan Keuangan (*Audited*) Perum Jamkrindo, Aset Lancar, Aset Tidak lancar, dan Jumlah Aset Perum Jamkrindo periode 31 Desember 2013 dan periode 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

ANALYSIS OF COMPANY'S FINANCIAL PERFORMANCE

Report on Financial Position

Assets

Based on the Financial Statements (Audited) of Perum Jamkrindo, the Current Assets, Non-Current Assets, and Total Assets of Perum Jamkrindo for the periods of December 31, 2013 and December 31, 2014 are as follows:

Disajikan dalam Rupiah Penuh / Expressed in Full Rupiah

Aset / Assets	**31 Desember 2013 /** December 31, 2013	**31 Desember 2014 /** December 31, 2014
Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalents	4.711.774.750.747	5.196.592.537.763
Efek-Efek / Marketable Securities		
- Dimiliki Hingga Jatuh Tempo / Held to Maturity	629.036.231.268	1.337.335.933.889
- Tersedia Untuk Dijual / Available for Sale	824.966.171.062	1.362.727.674.945
Piutang IJP KUR Kepada Pemerintah/Piutang *co-Guarantee* / IJP KUR Receivables to Government/co-Guarantee Receivables	1.206.227.439.791	1.075.355.409.006
Piutang Penjaminan Ulang / Re-guarantee Receivables	120.583.795.519	69.936.879.275
Piutang yang diberikan / Loans	1.297.400.099	973.438.042
Piutang lain-lain / Other Receivables	27.596.443.977	132.731.655.583
Beban Dibayar Dimuka / Prepaid Expenses	553.068.468.726	598.764.321.798
Properti Investasi / Investment Property	14.981.219.414	14.590.120.099
Aset Tetap / Fixed Assets	37.840.551.952	54.425.199.204
Aset Pajak Tangguhan / Deferred Tax Assets	141.500.601.350	119.400.366.323
Aset Lain-lain / Other Assets	24.508.628.027	57.811.014.608
Jumlah Aset / Total Assets	**8.293.381.701.932**	**10.020.644.550.535**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

1. **Total Aset**

   Total Aset Perum Jamkrindo per 31 Desember 2014 sebesar Rp10,02 triliun, naik 20,83% dari total aset per 31 Desember 2013 sebesar Rp8,29 triliun. Kenaikan aset sebesar Rp1,72 triliun. Kenaikan ini salah satunya disebabkan oleh adanya penambahan aset keuangan.

2. **Aset Lancar**

   a. Kas dan Setara Kas

      Posisi kas dan setara kas per 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp5,19 triliun, naik 10,29% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp4,71

Based on the table above, the description can be written as follow:

1. **Total Asset**

   Total assets of Perum Jamkrindo per December 31, 2014 amounted to Rp10.02 trillion, increased by 20.83% or Rp1.72 trillion, from total assets per December 31, 2013 which was Rp8.29 trillion. The increase was due to the addition of financial assets.

2. **Current Assets**

   a. Cash and Cash Equivalents

      The position of cash and cash equivalents per December 31, 2014 was recorded at Rp5.19 trillion, increased by 10.29% compared to 2013, which

triliun. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya penambahan aset keuangan.

b. Aset Keuangan
Aset keuangan merupakan Investasi dalam bentuk Deposito, Obligasi dan Saham per 31 Desember 2014 sebesar Rp2,7 triliun mengalami kenaikan 85,7% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp1,45 triliun. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp1,3 triliun di akhir tahun 2014.

c. Piutang *Co-Guarantee*
Piutang IJP KUR per 31 desember 2014 sebesar Rp1,07 triliun, turun 10,85% dari posisi per 31 Desember 2013 sebesar Rp1,20 triliun. Penurunan ini disebabkan karena sebagian IJP KUR sudah dibayar oleh pemerintah.

d. Beban Dibayar Dimuka
Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2014 sebesar Rp598,76 miliar, mengalami kenaikan sebesar 8,26% dari posisi 31 Desember 2013 menjadi Rp553,07 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan karena Kenaikan beban Premi Reasuransi dan *Fee Agent* dengan adanya pelaksanaan kerja sama dengan mitra Reasuransi dan agen penjaminan.

3. Aset Tidak Lancar

a. Aset Tetap
Aset Tetap Perusahaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp54,42 miliar, mengalami kenaikan sebesar 43,83% dari Rp37,84 miliar pada posisi 31 Desember 2013. Peningkatan aset tetap disebabkan adanya penambahan inventaris kantor dan kendaraan dinas pada 2014.

b. Aset Pajak Tangguhan
Aset Pajak Tangguhan per 31 Desember 2014 sebesar Rp119,40 miliar, mengalami penurunan sebesar 15,62%, dari Rp141,50 miliar pada posisi 31 Desember 2013. Penurunan aset pajak tangguhan disebabkan karena penurunan cadangan klaim pada 2014.

amounted to Rp.4.71 trillion. The increase was due to the addition of financial assets.

b. Financial Assets
Financial Assets, consisting of Investments in the form of Deposits, Bonds and Shares, amounted to Rp2.7 trillion as of December 31, 2014, increased by 85.7% compared to 2013 which amounted to Rp1.45 trillion. The increase was due to additional state capital investment which amounted to Rp1.3 trillion at the end of the current year.

c. Co-Guarantee Receivables
IJP KUR receivables was Rp1.07 trillion as of December 31, 2014, decreased by 10.85% from Rp1.20 trillion on December 31, 2013. The decrease was due to the partial repayment of the IJP KUR by the government.

d. Prepaid Expenses
Prepaid Expenses amounted to Rp598.76 billion as of December 31, 2014, increased by 8.26% from Rp553.07 billion in December 31, 2013. The increase was contributed by the increase in Reinsurance Premium and Fee Agent expenses due to the cooperation with Reinsurance partners and guarantee agencies.

3. Non-Current Assets

a. Fixed Assets
As of December 31, 2014, Fixed Assets of the Company were recorded at Rp54.42 billion, increased by 43.83% from Rp37.84 billion recorded on December 31, 2013. This increase was due to the addition of Company's inventories and cars in 2014.

b. Deferred Tax Assets
Deferred Tax Assets was Rp119.40 billion as of December 31, 2014, down by 15.62% from Rp141.50 billion on December 31, 2013. The decrease was due to the dropping in claim reserves during the year.

c. Aset Lain-lain

Aset lain-lain per 31 Desember 2014 sebesar Rp57,81 miliar, mengalami kenaikan menjadi sebesar 135,88% dari sebesar Rp24,50 miliar pada 31 Desember 2013. Aset lain-lain mengalami kenaikan dikarenakan kenaikan piutang *co-guarantee* atas pengajuan penggantian klaim yang belum diakseptasi.

c. Other Assets

Other assets amounted to Rp57.81 billion as of December 31, 2014, increased by 135.88% from Rp24.50 billion on December 31, 2013. The increase was due to the growth of co-guarantee receivables on the submission of change for claims yet to be accepted.

Liabilitas

Berdasarkan Laporan Keuangan (*Audited*) Perum Jamkrindo, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas Perum Jamkrindo periode 31 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Liabilities

Pursuant to the Financial Statements (Audited) of Perum Jamkrindo, the short-term liabilities, long-term liability and total liabilities of Perum Jamkrindo for the periods of December 31, 2013 to December 31, 2014 are as follows:

Disajikan dalam Rupiah Penuh / Expressed in Full Rupiah

Liabilitas / Liabilities	**31 Desember 2013 /** December 31, 2013	**31 Desember 2014 /** December 31, 2014
Hutang Klaim / Claim Debts	45.180.582.714	10.197.458.677
Cadangan Klaim / Claim Reserves	452.121.969.352	396.378.923.053
Hutang Penjaminan Ulang/Hutang *co-Guarantee* / co-Guarantee Debts	41.712.936.083	35.821.598.160
Pendapatan Ditangguhkan / Deferred Revenues	1.103.427.896.654	1.019.707.762.478
Hutang Pajak / Tax Debt	24.242.476.126	3.524.726.162
Hutang Lain-Lain / Other Debts	76.557.601.893	137.753.465.331
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	**1.743.243.462.822**	**1.603.392.621.514**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

1. **Total Liabilitas**

   Posisi kewajiban Perum Jamkrindo per 31 Desember 2014 sebesar Rp1,60 triliun, mengalami penurunan sebesar 8,02%, dari Rp1,74 triliun pada posisi 31 Desember 2013. Penurunan ini dikarenakan adanya pengakuan pendapatan yang ditangguhkan menjadi pendapatan tahun 2014.

2. **Hutang Klaim**

   Hutang klaim per 31 Desember 2014 sebesar Rp10,19 miliar, mengalami penurunan sebesar 77,43% dari sebesar Rp45,18 miliar pada 31 Desember 2013.

Based on the above table, the description can be stated as follows:

1. **Total Liabilities**

   As of December 31, 2014, the liabilities position of Perum Jamkrindo amounted to Rp1.60 trillion, decreased by 8.02% from Rp1.74 trillion on December 31, 2013. This decrease was due to the recognition of deferred revenue into revenue in 2014.

2. **Claim Debt**

   The claim debt as of December 31, 2014 was Rp10.19 billion, decreased by 77.43% from Rp45.18 billion on December 31, 2013,the decrease was due to claim

Penurunan ini dikarenakan adanya pembayaran klaim yang menjadi kewajiban perusahaan sesuai dengan SLA Perusahaan.

3. **Cadangan Klaim**
   Cadangan klaim per 31 Desember 2014 sebesar Rp396,37 miliar, mengalami penurunan sebesar 12,33% dari sebesar Rp452,12 miliar pada 31 Desember 2013. Penurunan cadangan klaim dikarenakan penurunan *outstanding* kredit yang dijamin karena perusahaan melakukan kerja sama dengan mitra Reasuransi.

4. **Hutang *Co-Guarantee***
   Hutang Penjaminan Ulang per 31 Desember 2014 sebesar Rp35,82 miliar, mengalami penurunan 14,12% dari sebesar Rp41,71 miliar pada 31 Desember 2013. Penurunan Hutang penjaminan Ulang pada tahun 2014 dikarenakan perusahaan membayar kewajiban kepada mitra *Co-Guarantee* dan Mitra Reasuransi.

5. **Hutang Pajak**
   Pajak per 31 Desember 2014 sebesar Rp3,52 miliar, mengalami penurunan sebesar 85,46% dari Rp24,24 miliar pada 31 Desember 2013. Penurunan Hutang Pajak dikarenakan semakin meningkatnya pajak *Final* atas pendapatan investasi dibanding tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2014 pajak terhutangnya menjadi lebih kecil.

6. **Hutang Lain-lain**
   Hutang lain-lain per 31 Desember 2014 sebesar Rp137,75 miliar, mengalami kenaikan sebesar 79,93% dari Rp76,56 miliar pada posisi 31 Desember 2013. Peningkatan hutang lain-lain dikarenakan adanya setoran dari bank atas subrogasi yang belum dapat di identifikasi nama terjaminnya.

Ekuitas

Berdasarkan Laporan Keuangan (*Audited*) Perum Jamkrindo, Ekuitas Perum Jamkrindo sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

payment, which was part of a company's responsibility in accordance with Company's SLA.

3. **Claim Reserves**
   As of December 31, 2014, claim reserves was recorded at Rp396.37 billion, decreased by 12.33% from Rp452.12 billion on December 31, 2013. The decline in claim reserves was due to the falling of credit outstanding that is guaranteed due to the cooperation with Reinsurance partners.

4. **Co-Guarantee Debts**
   Co-Guarantee Debts as of December 31, 2014, was Rp35.82 billion, decreased by 14.12% from Rp41.71 billion on December 31, 2013, due to the payment of obligation to Co-Guarantee partners and Reinsurance Partners.

5. **Tax Debts**
   The tax of the Company was Rp3.52 billion as of December 31, 2014, decreased by 85.46% from Rp24.24 billion on December 31, 2013. The decrease was due to the increasing Final taxes against investment income compared with the previous year. As such, there were smaller tax debts amount in 2014.

6. **Other Debts**
   Other debts reached Rp137.75 billion as of December 31, 2014, increased by 79.93% from Rp76.56 billion on December 31, 2013. The rising amount of other debts was due to the deposits from bank for subrogation that had unidentifiable guaranteed names.

Equity

Based on the Financial Statements (Audited) of Perum Jamkrindo, the Equity of Perum Jamkrindo up to December 31, 2013 is as follows:

Disajikan dalam Rupiah Penuh / Expressed in Full Rupiah

Ekuitas / Equity	**31 Desember 2013 /** December 31, 2013	**31 Desember 2014 /** December 31, 2014
Penyertaan Modal Negara / State Capital Investment	5.338.733.365.160	6.638.733.365.160
Cadangan-Cadangan / Reserves	757.940.218.914	1.125.586.279.252
Komponen Ekuitas Lainnya / Other Equity Components	(71.744.405.302)	(11.219.183.476)
Saldo Laba / Retained Earnings	525.209.060.338	664.138.955.479
Jumlah Ekuitas / Total Equities	**6.550.138.239.110**	**8.417.251.929.021**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat digambarkan sebagai berikut.

1. **Total Ekuitas**
   Total ekuitas Perum Jamkrindo pada 2014 sebesar Rp8,41 triliun, mengalami peningkatan 28,50% dari Rp6,55 triliun pada 31 Desember 2012.

2. **Penyertaan Modal Pemerintah**
   Penyertaan Modal Pemerintah per 31 Desember 2014 sebesar Rp6,63 triliun, mengalami peningkatan sebesar 24,35% dari Rp5,33 triliun pada 31 Desember 2013. Peningkatan ini dikarenakan adanya penambahan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp1,3 triliun pada tahun 2014.

3. **Cadangan-cadangan**
   Cadangan-cadangan per 31 Desember 2014 sebesar Rp1,12 triliun, mengalami peningkatan 48,51% jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp757,94 miliar. Peningkatan ini dikarenakan adanya penambahan cadangan dari alokasi laba tahun buku 2013.

4. **Komponen Ekuitas Lainnya**
   Komponen ekuitas lainnya adalah Laba (rugi) yang belum direalisir atas efek yang tersedia untuk dijual per 31 Desember 2014 yaitu rugi sebesar Rp11,21 miliar.

Laporan Laba (Rugi) Komprehensif

Berdasarkan Laporan Keuangan (*Audited*) Perum Jamkrindo, Laporan Laba (Rugi) Komprehensif Perum Jamkrindo untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Based on the above table, the factors could be described as follows:

1. **Total Equities**
   Total equities of Perum Jamkrindo in 2014 was Rp8.41 trillion, increased by 28.50% from Rp6.55 trillion on December 31, 2013.

2. **Government Capital Investment**
   As of December 31, 2014, the Government Capital Investment was Rp6.63 trillion, increased by 24.35% from Rp5.33 trillion on December 31, 2013. The increase was due to the State Capital Investment, which amounted to Rp1.3 trillion in 2014.

3. **Reserves**
   The amount of reserves on December 31, 2014 was Rp1.12 trillion, increased by 48.51% compared to 2013, which was Rp757.94 billion, due to the additional reserves from profit allocation of the 2013 fiscal year.

4. **Other Equity Components**
   Other equity components were Profit (loss) before realization on securities available for sale as of 31 December, 2014, namely a loss of Rp11.21 billion.

Comprehensive Profit (Loss) Statements

Pursuant to the Financial Statements (Audited) of Perum Jamkrindo, the Comprehensive Profit (Loss) Statements of Perum Jamkrindo for the years ended on December 31, 2014 and December 31, 2013 are as follows:

Disajikan dalam Rupiah Penuh / Expressed in Full Rupiah

Uraian / Description	31 Desember 2013 / December 31, 2013	31 Desember 2014 / December 31, 2014
PENDAPATAN PENJAMINAN / GUARANTEE INCOME		
Imbal Jasa Penjaminan Bruto / Gross Guarantee Fee	1.600.961.372.287	1.686.271.021.628
Pendapatan Komisi Reasuransi / Reinsurance Commission Income	844.526.272	5.509.491.735
Premi *co-Guarantee* / co-Guarantee Premium	(253.402.175.909)	(220.685.464.885)
Premi Reasuransi / Reinsurance Premium	(4.204.367.559)	(24.181.507.239)
Fee Based Income / Fee Based Income	(4.668.600.023)	(5.376.114.312)
Fee Agent / Fee Agent	(3.485.849.403)	(11.113.597.106)
Restitusi IJP / IJP Restitution	(4.560.059.814)	(4.343.792.787)
Imbal Jasa Penjaminan Bersih / Net Guarantee Fee	1.339.639.295.277	1.442.569.748.452
BEBAN KLAIM / CLAIM EXPENSES		
Beban Klaim / Claim Expenses	(898.582.003.777)	(1.071.911.769.047)
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim / Increase (Decrease) Claim Reserves	(39.541.500.471)	50.854.144.341
Beban Pencegahan Klaim / Claim Prevention Expenses	(937.683.469)	(5.677.525)
Kerugian Penurunan Nilai Piutang *Co-Guarantee* / Loss from Declining Co-Guarantee Receivables Value	(8.563.736.757)	-
Provisi Kerugian Klaim *Co-Guarantee* / Provision for Co-Guarantee Claim Loss	(16.705.639.084)	-
Jumlah Beban Klaim / Total Claim Expenses	(963.392.880.089)	(1.021.057.624.706)
PENJAMINAN BERSIH / NET GUARANTEE	376.246.415.188	421.512.123.746
Pendapatan Investasi Bersih / Investment Income - Net	347.674.270.928	531.363.555.447
Pendapatan Lain-Lain Bersih / Other Income - Net	162.646.571.794	222.491.534.555
BEBAN USAHA / OPERATIONAL EXPENSES		
Beban Operasional / Operational Expenses	(44.912.056.035)	(70.562.048.384)
Beban Sumber Daya Manusia / Human Resources Expenses	(115.761.687.179)	(168.091.609.431)
Beban Administrasi dan Umum / General and Administration Expenses	(64.212.211.219)	(70.196.530.879)
Beban Sistem, Teknologi, & Pengembangan Usaha / System, Technology & Business Development Expenses	(4.714.770.785)	(19.573.686.082)
Jumlah Beban Usaha / Total Operational Expenses	(229.600.725.218)	(328.423.874.776)
LABA SEBELUM PAJAK / PROFIT BEFORE TAX	656.966.532.692	846.943.338.972
BEBAN PAJAK PENGHASILAN / INCOME TAX EXPENSES		
Beban Pajak Kini / Current Tax Expenses	144.831.117.735	160.695.448.207
Manfaat Pajak Tangguhan / Deferred Tax Benefit	13.073.645.381	22.108.922.679
Jumlah Beban Pajak Penghasilan / Total Income Tax Expenses	131.757.472.354	182.804.370.886
LABA TAHUN BERJALAN / CURRENT YEAR PROFIT	525.209.060.338	664.138.968.086

Perum Jamkrindo menunjukkan peningkatan kinerja yang maksimal dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2014, Perum Jamkrindo sukses membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp664,13 miliar, jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2013 yang memperoleh laba bersih sebesar Rp525,20 miliar. Meningkatnya pendapatan operasional mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi tercapainya peningkatan Laba Perusahaan.

In 2014, Perum Jamkrindo demonstrated a more optimum performance compared with the previous year as reflected on the generation of profit for current year which amounted to Rp664.13 billion. The number of net profit increased from that of 2013, which amounted to Rp525.20 billion. This increase brought significant impact to the growth of Company Profit.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

1. **Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP)**
   Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan selama 2014 tercatat sebesar Rp1,68 triliun, mengalami kenaikan 5,33% dari tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp1 triliun. Pengakuan pendapatan IJP tersebut telah diakui secara aktual. Pendapatan IJP antara lain dipengaruh oleh adanya kenaikan Pendapatan IJP KUR.

2. **Premi *Co-Guarantee***
   Premi *co-Guarantee* selama 2014 tercatat sebesar Rp220,68 miliar, mengalami penurunan 12,91% dari tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp253,40 miliar. Penurunan premi *Co-Guarantee* disebabkan karena pada 2014 selain bekerja sama dengan mitra *Co-Guarantee*, perusahaan melakukan kerja sama dengan mitra Reasuransi dalam rangka memitigasi risiko.

3. ***Fee Based Income***
   Selama 2014, *Fee Based Income* yang menjadi pengurang pendapatan IJP tercatat sebesar Rp5,38 miliar mengalami kenaikan 15,15% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp4,67 miliar untuk pihak bank pelaksana.

4. **Beban Klaim Penjaminan**
   a) Beban Klaim
      Beban Klaim Penjaminan 2014 sebesar Rp1,07 triliun, mengalami kenaikan 19,29% dari tahun 2013 sebesar Rp898,58 miliar. Kenaikan Beban Klaim dikarenakan meningkatnya klaim atas Kredit Usaha Rakyat.

Based on the above table, the description can be stated as follows:

1. **Guarantee Fee (IJP) Income**
   Guarantee Fee Income during 2014 reached Rp1.68 trilion, increased by 5.33% from 2013 which amounted to Rp1 trilion. IJP revenue had been recognized in actual manner. This growth in IJP income was influenced by an increase in KUR Guarantee Fee Income.

2. **Co-guarantee Premium**
   In 2014, co-Guarantee Premium was recorded at Rp220.68 billion decreased by 12.91% compared to 2013 which amounted to Rp253.40 billion. The decrease of Co-Guarantee premium was due to the cooperation with Reinsurance partners, in addition to cooperating with Co-Guarantee partners, to mitigate risks.

3. **Fee Based Income**
   During 2014, the Fee Based Income that deducted the guarantee fee income was recorded at Rp5.38 billion, increased by 15.15% compared to 2013 which amounted to Rp4.67 billion for the executing banks.

4. **Guarantee Claim Expenses**
   a) Claim Expenses
      Guarantee Claim Expenses in 2014 amounted to Rp1,07 trillion, increased by 19.29% from 2013 which amounted to Rp898.58 billion. The increase in Claim Expenses was due to the rising claim of Micro Credit Loan.

b) Beban Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
Beban kenaikan cadangan klaim tahun 2014 sebesar Rp(50,85) miliar, turun sebesar 228,61% dari Rp39,54 miliar pada tahun 2013. Hal ini dikarenakan penurunan *outstanding* kredit yang dijamin karena perusahaan melakukan kerja sama dengan mitra Reasuransi.

5. Pendapatan Investasi
Selama 2014, pendapatan investasi perum jamkrindo tercatat sebesar Rp531,36 miliar mengalami kenaikan 52,83% dibanding dengan tahun 2013 sebesar Rp347,67 miliar. Kenaikan tersebut diakibatkan tingginya tingkat suku bunga deposito dan tingginya *Yield on Investment* (YOI) untuk instrumen lainnya seperti saham, reksa dana, dan obligasi.

6. Pendapatan Lain-lain Bersih
Pendapatan lain-lain bersih selama 2014 sebesar Rp222,49 miliar, mengalami peningkatan 36,79% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp162,65 miliar, terdiri dari pendapatan subrogasi dan pendapatan jasa giro.

7. Beban Operasional
Selama 2014, jumlah Beban Operasional Perusahaan mengalami peningkatan sebesar 57,11% dari Rp44,91 miliar pada 2013 menjadi Rp70,56 miliar pada 2014. Kenaikan Biaya Operasional disebabkan meningkatnya beban klaim, beban operasi dan beban pegawai.

8. Beban Sumber Daya Manusia
Beban Sumber Daya Manusia pada 2014 sebesar Rp168,09 miliar, mengalami peningkatan sebesar 45,20% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp115,76 miliar. Kenaikan biaya disebabkan oleh adanya penambahan jumlah SDM, peningkatan kesejahteraan karyawan, dan program Pengembangan SDM Perusahaan.

b) Increase (Decrease) of Claim Reserves Expenses
The increase of claim reserves expenses in 2014 amounted to Rp(50.85) billion, decreased by 228.61% from Rp39.54 billion in 2013. This decrease was contributed by the decline in outstanding credit that is guaranteed due to cooperation between the company and Reinsurance partners.

5. Investment Income
During 2014, income from investment of Perum Jamkrindo was recorded at Rp531.36 billion, increased by 52.83% compared to the previous year amounting to Rp347.67 billion. This increase was contributed by the high dpesoit interest rate and the Yield on Investment (YOI) of other instruments such as shares, mutual funds, and bonds.

6. Other Income - Net
Other income - net of the Company during 2014 amounted to Rp222.49 billion, showing an increase of 36.79% compared to 2013 which amounted to Rp162.65 billion, which consisted of subrogation income and clearing service income.

7. Operational Expenses
The Company's Operational Expenses increased by 57.11% from Rp44.91 billion in 2013 to Rp70.56 billion in 2014. The increase in Operational Expense was due to the increase in claim expenses, operational expenses and employee expenses.

8. Human Resources Expenses
Human Resources Expenses increased by 45.20% to Rp168.09 billion compared to the previous year which was recorded at Rp115.76 billion. The increasing expenses was due to the additional number of Human Resources, employees' welfare improvement, and Human Resources Development programs.

9. Beban Administrasi dan Umum

Seiring dengan efisiensi yang telah dilakukan dalam Operasional Perusahaan, biaya-biaya yang berhubungan dengan Biaya Administrasi dan Umum tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 9,32% dari Rp64,21 miliar pada 2013 menjadi Rp70,19 miliar pada 2014.

9. General and Administrative Expenses

In line with the efficiency that had been implemented in the Company's Operations, costs that are associated with General and Administrative Costs in 2014 increased by 9.32% from Rp64.21 billion in 2013 to Rp70.19 billion.

10. Pendapatan Komprehensif Lainnya

Pendapatan komprehensif lainnya adalah laba (rugi) yang belum direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual per 31 Desember 2014 yaitu laba sebesar Rp60,52 miliar.

10. Other Comprehensive Income

Other comprehensive income was the unrealized profit (loss) on securities available for sale as of December 31, 2014 which was the profit amounting to Rp60.52 billion.

Laporan Arus Kas

Jumlah kas dan setara kas Perum Jamkrindo pada akhir tahun 2014 tercatat sebesar Rp5,19 triliun, mengalami kenaikan 10,29% dibandingkan dengan tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp4,71 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan pada tahun 2014 perusahaan memperoleh tambahan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,3 triliun.

Cash Flow Statements

Total cash and cash equivalents of Perum Jamkrindo at the end of 2014 was recorded at Rp5.19 trillion, increased by 10.29% compared to that of 2013 recorded at Rp4.71 trillion. The increase was due to the addition in State Capital Investement (PMN) acquired by the Company in 2014 amounting to Rp1.3 trillion.

Arus Kas / Cash Flow	**31 Desember 2013 /** December 31, 2013	**31 Desember 2014 /** December 31, 2014
Arus Kas dari Aktivitas Operasi / Cash Flow from Operational Activity	(96.787.310.632)	549.032.351.459
Arus Kas dari Aktivitas Investasi / Cash Flow from Investment Activity	(525.864.585.656)	(1.206.664.077.049)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan / Cash Flow from Financing Activity	1.055.368.000.000	1.142.449.512.606

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Kas dari aktivitas operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada 2014 sebesar Rp549,03 miliar, mengalami kenaikan 467,26% dari kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2013 sebesar Rp96,79 miliar. Kenaikan aktivitas operasi dikarenakan adanya pembayaran IJP KUR dari pemerintah.

The following description can be stated based on the above table:

a. Cash from operational activity

Net cash obtained from operational activity in 2014 was Rp549.03 billion, increased by 467.26% compared to the net cash obtained from operational activity in 2013, which amounted to Rp96.79 billion. The rising operational activity was due to the payment of IJP KUR from the government.

b. Kas dari aktivitas investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada 2014 turun sebesar 129,46% menjadi Rp(1,2) triliun dibanding kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada 2013 sebesar Rp526 miliar. Kenaikan aktivitas investasi dikarenakan meningkatnya investasi yang bersumber dari dana PMN.

c. Kas dari aktivitas pendanaan

Pada sisi pendanaan, perusahaan mencatat kenaikan kas bersih 8,25% yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada 2014, sebesar Rp1,14 triliun dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 1,06 triliun. Kenaikan aktivitas pendanaan dikarenakan adanya penambahan PMN.

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN TAHUN 2014

Evaluasi tingkat kesehatan BUMN didasarkan pada Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN dan Peraturan Menteri Negara BUMN RI nomor: PER-10/MBU/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Jaminan.

Dari perhitungan tingkat kesehatan Perusahaan, sesuai dengan evaluasi tingkat kesehatan BUMN didasarkan pada Surat Keputusan Menteri BUMN RI Nomor KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 dan Peraturan Menteri Negara BUMN RI Nomor PER-10/MBU/2014 tanggal 25 Juli 2014, maka dengan total skor 87,50, Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia berada pada kategori “SEHAT AA” sementara pada 2013 dengan skor 93,56 Perusahaan masuk dalam kategori “SEHAT AA”.

b. Cash from investment activity

Net cash used for investment activity in 2014 decreased by 129.46% to Rp(1.2) trillion compared to the net cash used for investment activity in 2013, which amounted to Rp526 billion. The increase in investment activity was due to the escalating investment originated from the PMN funds.

c. Cash from financing activity

In terms of financing activity, the company recorded an increase in net cash of 8.25%, from Rp1.06 trillion in 2013 to Rp1.14 trillion in 2014. The increase in financing activity was due to the addition of PMN.

COMPANY’S HEALTH INDEX IN 2014

Evaluation of the Company’s Health Index is based on the Decree of State Minister of SOE Number: KEP-100/MBU/2002 on Evaluation of Health Index, and Regulation of State Minister of SOE of the Republic of Indonesia number: PER-10/MBU/2014 dated July 25, 2014 on the Evaluation Indicators for Health Index of State-Owned Enterprises of Financial Services in the Line of Business of Insurance and Guarantee Services.

From the calculation of the Company’s health index, in accordance with the evaluation of the health index of SOEs as based on the Decree of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 and the Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number PER-10/MBU/2014 dated July 25, 2014, then by a total score of 87.50, Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia is categorized as “HEALTHY AA”, similar to the previous year with a score of 93.56 the company is categorized as “HEALTHY AA”.

PENINGKATAN DAN PENURUNAN MATERIAL DARI PENJUALAN/PENDAPATAN BERSIH

Selama tahun buku 2014, Perum Jamkrindo tidak mencatat adanya peningkatan dan penurunan material dari penjualan atau pendapatan bersih, sehingga informasi mengenai hal tersebut tidak dapat disampaikan dalam laporan tahunan ini.

MATERIAL INCREASE AND DECREASE FROM REVENUE/NET SALES

During the financial year of 2014, Perum Jamkrindo did not record material increase and decrease from revenue/net sales. Therefore, the information cannot be disclosed in this annual report.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA

Pada 2014, tidak ada informasi keuangan yang dilaporkan Perusahaan yang mengandung kejadian luar biasa dan jarang terjadi.

FINANCIAL INFORMATION CONTAINING EXTRAORDINARY EVENT

There was no financial information containing extraordinary and rare events reported by the Company in 2014.

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN RKAP 2014

Hasil Usaha

Realisasi hasil usaha 2014 dibandingkan dengan RKAP tahun 2014 dan realisasi tahun 2013 menunjukkan kondisi sebagai berikut:

COMPARISON BETWEEN REALIZATION AND RKAP 2014

Results of Operation

The realization of operational results in 2014 compared to the RKAP of 2014 and the realization in 2013 is described in the following table:

Dalam jutaan Rupiah / In million Rupiah

Uraian / Description	**Realisasi /** Realization **2014**	**RKAP 2014**	**Realisasi /** Realization **2013**	**% Realisasi 2014 /** % Realization 2014	
Pendapatan Operasional / Operational Income	1.973.933	2.045.234	1.687.314	96,51%	117,99%
Beban Operasional / Operational Expenses	(1.349.481)	(1.538.076)	(1.192.994)	87,74%	113,12%
Laba Operasional / Operational Profit	624.452	507.159	494.320	123,13%	126,33%
Pendapatan (Beban) Non Operasional / Non Operational Income (Expenses)	222.491	198.517	162.647	112,08%	136,79%
Laba Sebelum Pajak / Profit Before Tax	846.943	705.676	656.967	120,02%	128,92%

Pendapatan operasional tahun 2014 sebesar Rp1,97 triliun atau mencapai 96,28% dibandingkan dengan RKAP 2014 atau mencapai 117,99% dari realisasi tahun 2013. Peningkatan terjadi karena peningkatan penjaminan kredit terutama dari sektor jasa dan perdagangan dan peningkatan pada pendapatan investasi.

In 2014, operational income was recorded at Rp1.97 trillion or reaching 96.28% compared to the RKAP of 2014, or reaching 117.99% from the realization in 2013. The increase was due to improvement of credit guarantee, particularly from service and trade sectors, as well as the improvement in investment income.

Beban operasional yaitu mencapai 87,45% dibandingkan RKAP tahun 2014 dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 mencapai 113,12%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan beban klaim terutama untuk sektor jasa dan perdagangan.

Operational expenses reached 87.45% compared to the RKAP of 2014 and reached 113.12% compared to the realization in 2013. The improvement was due to rising claim expenses, particularly for services and trade sector.

Pendapatan non operasional bersih mencapai 112,08% dibandingkan dengan target 2014 atau mencapai 136,79% dibandingkan realisasi tahun 2013. Oleh karena itu, tahun 2014 Perusahaan memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp846,94 miliar atau mencapai 120,02% dibandingkan RKAP tahun 2014 dan 128,92% dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp656,97 miliar.

Non-operational income - net reached 112.08% if compared to the targets of 2014 or reaching 136.79% compared to the realization in 2013. Hence, in 2014, the Company received profit before tax amounting to Rp846.94 billion or reaching 120.02% compared to the RKAP of 2014, and 128.92% compared to the realization in 2013 which amounted to Rp656.97 billion.

Pendapatan Penjaminan

a. Volume Kredit Jasa Penjaminan

Dalam jutaan Rupiah

Guarantee Income

a. Volume of Guarantee Service Credit

In million Rupiah

Uraian / Description	**Realisasi /** Realization **2014**	**RKAP 2014**	**Realisasi /** Realization **2013**	**% Realisasi 2014 /** % Realization 2014	
A. Penjaminan Bank / Bank Guarantee					
1. Penjaminan Konvensional / Conventional Guarantee					
Agrobisnis / Agribusiness	4.029.235	4.010.475	3.504.758	100,47%	114,96%
INKRA	547.496	1.255.165	670.831	43,62%	81,61%
Jasa dan Perdagangan / Trade and Services	31.676.299	47.082.816	36.748.282	67,28%	86,20%
Sub Jumlah 1 / Sub Total 1	36.253.030	52.348.456	40.923.870	69,25%	88,59%
2. Penjaminan Konvensional / Conventional Guarantee					
Agrobisnis / Agribusiness	76.967	402.700	326.638	19,11%	23,56%
INKRA	24.066	122.880	53.543	19,58%	44,95%
Jasa dan Perdagangan / Trade and Services	2.066.610	4.529.908	3.504.505	45,62%	58,97%
Sub Jumlah 2 / Sub Total 2	2.167.633	5.055.488	3.884.686	42,88%	55,80%
Sub Jumlah A / Sub Total A	38.420.662	57.403.944	44.808.556	66,93%	85,74%

Uraian / Description	Realisasi / Realization 2014	RKAP 2014	Realisasi / Realization 2013	% Realisasi 2014 / % Realization 2014	
B. Penjaminan Bukan Bank / Non-Bank Guarantee					
Agrobisnis/ Agribusiness	14.242	-	-	-	-
Konvensional / Conventional	14.222	-	-	-	-
Syariah / Sharia	20	-	-	-	-
INKRA	24.653	-	-	-	-
Konvensional / Conventional	23.328	-	-	-	-
Syariah / Sharia	1.335	-	-	-	-
Jasa dan Perdagangan / Trade and Services	2.278.060	3.516.218	1.034.840	64.79%	220,14%
Konvensional / Conventional	2.176.781	3.389.866	944.976	64,21%	230,35%
Syariah / Sharia	101.279	126.351	89.863	80,16%	112,70%
Sub Jumlah B / Sub Total B	2.316.956	3.516.218	1.034.840	65.89%	223,14%
Total (A+B)	**38.569.986**	**55.864.674**	**41.958.710**	**135%**	**312%**

Total realisasi jumlah kredit sebesar Rp40,74 triliun terdiri dari Jumlah Kredit Penjaminan bank konvensional sebesar Rp36,25 triliun, Kredit Penjaminan Bank Syariah sebesar Rp2,17 triliun, Kredit Penjaminan Bukan Bank Konvensional Rp2,21 triliun dan Kredit Penjaminan Bukan Bank Syariah Rp102,63 miliar.

Total of credit amount realization was Rp40,74 trillion, consisting of Total Guarantee Credit of conventional bank which amounted to Rp36,25 trillion, Guarantee Credit of Sharia Bank which amounted to Rp2,17 trillion, Guarantee Credit of Non-Conventional Bank which amounted to Rp2,21 trliion and Guarantee Credit of Non-Sharia Bank which amounted to Rp102,63 billion.

b. Imbal Jasa Penjaminan

Dalam jutaan Rupiah

b. Guarantee Fee

In million Rupiah

Uraian / Description	Realisasi / Realization 2014	RKAP 2014	Realisasi / Realization 2013	% Realisasi / % Realization 2014	
A. Penjaminan Bank / Bank Guarantee					
- Agrobisnis / Agribusiness	193.697	180.508	156.827	107.31%	123.51%
- INKRA	31.269	37.933	31.935	82.43%	97.92%
- Jasa dan Perdagangan / Trade and Services	1.317.391	1.463.360	1.261.513	89.91%	104.30%
Sub Jumlah / Sub Total	1.542.357	1.681.800	1.450.275	91. 61%	106.23%
B. Penjaminan Bukan Bank / Non-Bank Guarantee					
- Agrobisnis / Agribusiness	78	-	38	-	205.90%
- INKRA	21	-	5	-	419.03%
- Jasa dan Perdagangan / Trade and Services	24.384	28.329	13.503	86.08%	180.58%
Sub Jumlah / Sub Total	24.484	28.329	13.547	86.43%	180.74%
Total	**1.686.271**	**1.865.484**	**1.600.961**	**90.39%**	**105.33%**

Total imbal jasa penjaminan yang diperoleh tahun 2014 sebesar Rp1,68 triliun atau mencapai 105,33% dibandingkan dengan tahun 2013. Imbal jasa penjaminan bank sebesar Rp1,66 triliun mencapai 90,28% dari RKAP tahun 2014, yang terdiri dari imbal jasa penjaminan bank konvensional Rp1,54 triliun atau mencapai 91,61% dibandingkan dengan target 2014 serta mencapai 106,23% dari realisasi 2013 dan imbal jasa penjaminan bukan bank sebesar Rp119,43 miliar atau mencapai 75,85% dibandingkan target 2014 dan mencapai 85,92% dibandingkan realisasi tahun 2013. Imbal jasa penjaminan bank tersebut sangat signifikan diperoleh dari sektor agribisnis. Jumlah kredit dan imbal jasa penjaminan bukan bank didominasi oleh jasa dan perdagangan. Dalam jasa penjaminan bukan bank, Perusahaan bekerja sama dengan indonesia Eximbank (LPEI), PT Garuda Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM), PT PNM Syariah, PT Pegadaian (Persero), PT Hutama Karya, Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia, PT Semen Indonesia dan afiliasinya, PT Semen Bosowa, PT Pos Indonesia, PT Indofarma, PT Inti, PT Len, Koperasi pegawai Bank Indonesia (KOPEBI), Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG), Tripilar Betonmas, Oblige Suretyship, dan YKKBI.

Total guarantee fee gained in 2014 was Rp1.68 trillion or reaching 105.33% compared with 2013. The bank's guarantee fee was Rp1.66 trillion, reaching 90.28% from the RKAP of 2014. This segment consisted of conventional bank guarantee fee of Rp1.54 trillion, reaching 91.61% compared to the targets of 2014 and reaching 106.23% from the realization in 2013; and non-bank guarantee fee amounting to Rp119.43 billion or reaching 75.85% compared to the targets in 2014 and reaching 85.92% compared to the realization in 2013. The amount for the bank guarantee fee was primarily contributed by the gain from agribusiness sector. Meanwhile, total credit and non-bank guarantee fee was dominated by service and trade sector. In terms of non-bank guarantee service, the Company cooperated with Indonesia Eximbank (LPEI), PT Garuda Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM), PT PNM Syariah, PT Pegadaian (Persero), PT Hutama Karya, Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia, PT Semen Indonesia and its affiliates, PT Semen Bosowa, PT Pos Indonesia, PT Indofarma, PT Inti, PT Len, Koperasi Pegawai Bank Indonesia (KOPEBI), Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG), Tripilar Betonmas, Oblige Suretyship, and YKKBI.

PROYEKSI KEUANGAN TAHUN 2015

Proyeksi keuangan tahun 2015 tertulis dalam RKAP 2015 yang dibuat berdasarkan hasil analisis terhadap asumsi-asumsi yang digunakan, baik asumsi internal maupun eksternal. Proyeksi keuangan tahun tersebut menggambarkan kondisi Perum Jamkrindo untuk tahun buku 2015.

FINANCIAL PROJECTION FOR 2015

The financial projection for 2015 is stated in RKAP 2015, which is composed based on the analysis results of the used assumptions, both internal and external. The financial projection shall illustrate Perum Jamkrindo's conditions for the financial year of 2015.

Proyeksi keuangan Perum Jamkrindo yang tertulis dalam RKAP 2015 adalah sebagai berikut:

The financial projection of Perum Jamkrindo as stated in RKAP 2015 is as follows:

Uraian / Description	2014	RKAP 2015
Pendapatan Usaha / Operating Income	1.442.570	1.448.167
Beban Klaim / Claim Expenses	(1.021.058)	(1.045.026)
Penjaminan Bersih / Net Guarantee	421.512	403.141
Pendapatan Investasi Bersih / Investment Income - Net	531.364	568.582
Pendapatan Lain-lain Bersih / Other Income - Net	222.492	272.153
Beban Usaha / Operating Expenses	(328.424)	(476.016)
Laba Sebelum Pajak / Profit Before Tax	846.943	767.857
Laba Bersih / Net Profit	664.139	710.728

Uraian / Description	2014	RKAP 2015
Aset Lancar / Current Assets	8.579.464	8.665.755
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets	1.441.181	1.906.673
Liabilitas Lancar / Current Liability	613.156	450.399
Liabilitas Tidak Lancar / Non-Current Liability	990.236	1.109.782
Ekuitas / Equity	8.417.252	9.012.244
Total Aset/Liabilitas dan Ekuitas / Total Assets/Liabilities and Equity	10.021.696	10.572.426

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek, Perusahaan menggunakan rasio likuiditas yang terdiri dari rasio kas dan rasio lancar. Sedangkan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, Perusahaan menggunakan rasio solvabilitas yang diukur dengan membuat perbandingan seluruh kewajiban terhadap seluruh aset dan perbandingan seluruh kewajiban terhadap ekuitas.

SOLVENCY AND RECEIVABLES COLLECTIBILITY RATE

To measure the Company's ability to fulfill its short-term obligations, the Company used liquidity ratio consisting of cash ratio and current ratio. On the other hand, solvability ratio is used to measure the Company's ability to meet all obligations by making comparison of all obligations against assets and comparison of all obligations against equity.

Rasio Likuiditas **Liquidity Ratio**

Uraian / Description	2013	2014
Rasio Kas / Cash Ratio	1.014,87%	847,52%
Rasio Lancar / Current Ratio	1.010,06%	1.399,23%

Rasio Solvabilitas **Solvability Ratio**

Uraian / Description	2013	2014
Rasio Liabilitas Terhadap Total Aset / Liabilities Against Total Assets Ratio	21,02%	16,00%
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas / Liabilities Against Equity Ratio	26,61%	19,05%

Pada 2014, tingkat kemampuan Perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek berdasarkan aset lancar yang ditunjukkan melalui rasio lancar sebesar 1.399,23%, sedikit meningkat dibandingkan pada 2013 sebesar 1.010,06%. Berdasarkan nilai tersebut, kemampuan aset lancar Perusahaan dalam menjamin utang lancarnya masih relatif baik.

In 2014, the Company's ability to meet its short-term debts based on current assets is displayed by current ratio of 1,399.23%, a slight increase compared with 2013, which was 1,010.06%. Based on the value, the ability of the Company's current assets in guaranteeing its current debt is classified as relatively well.

Sedangkan tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan tercatat selama 168 hari, menunjukan sedikit perubahan dari tahun 2013 yang tercatat selama 208 hari, hal ini menunjukan peningkatan kemampuan Perusahaan dalam mengelola piutang.

The Company's collectibility rate was 168 days; a minor change from 2013, which was 208 days. The data demonstrated the improvement in the Company's capability in managing receivables.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Pengelolaan terhadap struktur modal Perum Jamkrindo dilakukan untuk melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha sehingga Perusahaan dapat memberikan imbal hasil bagi Pemegang Saham dan manfaat bagi Pemangku Kepentingan lainnya serta mempertahankan struktur permodalan yang optimal guna mengurangi biaya modal.

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

The management of capital structure of Perum Jamkrindo was conducted in order to protect the Company's ability in maintaining the business continuity so that the Company can provide returns for shareholders and benefits for other Stakeholders, as well as maintaining an optimal capital structure in order to reduce the cost of capital.

Kondisi struktur modal yang optimal dapat dicapai dengan modal rata-rata tertimbang atau *Weighted Average Cost of Capital* (WACC) yang minimal. Dengan pertambahan penggunaan utang, akan meminimalkan WACC karena biaya utang (*cost of debt*) lebih murah dibandingkan dengan biaya modal sendiri (*cost of equity*). Di samping itu, penggunaan hutang juga akan mengurangi biaya kena pajak sehingga akan terjadi penghematan pajak. Meski demikian, peningkatan hutang yang dilakukan Perum Jamkrindo akan meningkatkan biaya beban bunga yang selanjutnya akan mengurangi nilai Perum Jamkrindo secara keseluruhan. Untuk itu, perlu kompromi perpaduan antara penggunaan hutang dan modal sendiri sehingga diperoleh kondisi yang optimum.

The optimal capital structure can be achieved with a minimum value of Weighted Average Cost of Capital (WACC). The increase in the use of debt will minimize WACC because cost of debt will be cheaper than the cost of equity. In addition, the use of debt will also reduce taxable costs so that there will be tax savings. However, the increase of debt will also increase the cost of interest expense which consequently will reduce the value of the Company as a whole. Thus, it was necessary to compromise between the use of debt and equity in order to obtain an optimum condition.

Struktur modal Perum Jamkrindo adalah sebagai berikut:

The capital structure of Perum Jamkrindo is as follows:

Uraian / Description	**2014**	**Persentase Total Modal /** Percentage of Total Capital	**2013**	**Persentase Total Modal /** Percentage of Total Capital
Liabilitas / Liabilities	1.603.392.621.514	16.00%	1.743.243.462.822	21.02%
Ekuitas / Equity	8.417.251.929.021	84.00%	6.550.138.239.110	78.98%
Liabilitas dan Ekuitas / Liabilities and Equity	10.020.644.550.535	100%	8.293.381.701.932	100%

Perum Jamkrindo sebagai perusahaan *non listed*, berencana untuk mengajukan tambahan ekuitas dari Pemerintah dengan tujuan untuk mengoptimalkan struktur modal dan memelihara rasio *Debt to Equity Ratio* (DER).

As a non-listed company, Perum Jamkrindo plans to submit a proposal for additional equity from the Government aiming to optimize capital structure and maintain the debt to equity ratio (DER).

DER merupakan perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas. Rasio *Debt to Equity* Perum Jamkrindo untuk posisi 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

DER is the ratio between total debt and total equity. The Debt to Equity Ratios of Perum Jamkrindo as of December 31, 2013 and December 31, 2014 are as follows:

Uraian / Description	**2014**	**2013**
Debt to Equity Ratio	19.05%	26,61%

Berdasarkan indikator rasio *Debt To Equity* tersebut, maka risiko kegagalan membayar hutang Perum Jamkrindo relatif kecil, di mana pada 2014 menjadi lebih kecil (lebih baik) dibandingkan tahun 2013.

According to the indicators of Debt to Equity Ratio, the risk of failure to pay debt of Perum Jamkrindo was relatively small, whereas in 2014 the risk was smaller (better) than 2013.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Laporan Akuntan sampai dengan laporan ini diterbitkan yang berpengaruh secara signifikan terhadap penyajian Laporan Keuangan Perum Jamkrindo.

MATERIAL INFORMATION AND FACT SUBSEQUENT TO BALANCE SHEET DATE

There were no significant events after the Balance Sheet date until this report is published that significantly affected the presentation of Financial Statements of Perum Jamkrindo.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Pembagian laba tahun

RPB pada 2014 memutuskan usulan pembagian laba tahun buku 2013 sebagai berikut:

DIVIDEND POLICY

Annual profit distribution

The RPB in 2014 decided the proposal for profit distribution for the fiscal year of 2013 as follows:

Jumlah Dividen

Jumlah Dividen yang dibayarkan oleh Perum Jamkrindo kepada Pemerintah selaku 100% Pemegang Saham Perusahaan, adalah sebagai berikut:

Total Dividend

Total dividend paid by Perum Jamkrindo to the Government as the sole Shareholder of the Company is as follows:

Dalam miliar Rupiah / In billion Rupiah

Uraian / Description	**2014**	**2013**
Jumlah Dividen / Total Dividend	157,56	64,63

1) Jumlah Dividen untuk periode Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2012 dan dibayarkan pada 2013 adalah sebesar Rp64,63 miliar atau 12,31% dari laba bersih perusahaan.
2) Jumlah Dividen untuk periode Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2013 dan dibayarkan pada 2014 adalah sebesar Rp157,56 miliar atau 23,72% dari laba bersih perusahaan.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN

Status hukum Perusahaan merupakan BUMN di mana 100% saham Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Perusahaan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan atau manajemen Perusahaan.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Perum Jamkrindo tidak dapat menyampaikan informasi mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dikarenakan hingga saat ini Perum Jamkrindo belum tercatat di bursa manapun.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/ PELEBURAN USAHA, AKUISISI, ATAU RESTRUKTURISASI HUTANG/ MODAL

Pada 2014, Perum Jamkrindo melakukan penyertaan modal pada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, yang semula merupakan Divisi Penjaminan Syariah, dengan penyertaan langsung sebesar Rp249.987.500.000.

Pendirian Anak Perusahaan diikuti *Spin Off* Penjaminan Syariah ini sudah memenuhi seluruh ketentuan terkait dengan pendirian perusahaan yang berlaku (Peraturan OJK). Transaksi ini dinilai "wajar" dan sudah dihitung berdasarkan hasil perhitungan konsultan dan hukum.

1) Total Dividend for the period of Financial Statements ending on December 31, 2012 and paid in 2013 was Rp64.63 billion or 12.31% from net profit of the Company.
2) Total Dividend for the period of Financial Statements ending on December 31, 2013 and paid in 2014 was Rp157.56 billion or 23.72% from net profit of the Company.

MANAGEMENT AND/OR EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM

Based on legal status of the Company as an SOE, in which 100% of its shares are owned by the Government, the Company does not have management and/or employee stock ownership program.

USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

Perum Jamkrindo cannot convey information regarding the use of proceeds from public offering due to the fact that currently, Perum Jamkrindo has not been listed on any stock exchange.

INFORMATION OF MATERIAL TRANSACTION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER, ACQUISITION OR CAPITAL/DEBT RESTRUCTURING

In 2014, Perum Jamkrindo conducted capital investment on PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, formerly the Sharia Guarantee Division, with direct investment of Rp249,987,500,000.

The establishment of the Subsidiary, followed by the Spin Off of Sharia Guarantee, has met all prevailing requirements related to the company's establishment (OJK Regulations). This transaction was marked as 'fair' and was calculated by the consultants in legal method.

Tujuan dari transaksi ini adalah untuk diversifikasi usaha, memperluas pangsa pasar dan ekspansi usaha. Adapun Manfaat yang dapat diraih *stakeholders* atas pendirian PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, antara lain bagi Perum Jamkrindo (Perusahaan Induk), dapat lebih fokus pada keputusan strategis yang dijalankan bisnis inti, kemudian mempermudah pembinaan dan pengawasan, serta menunjukkan komitmen dan dukungan terhadap program pemerintah dalam pengembangan bisnis berbasis syariah, serta mendapatkan *capital gain*.

The purposes of this transaction are to realize business diversification, expand market share as well as Company's business. The stakeholders may received benefits on the establishment of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, such as for Perum Jamkrindo (Parent Company) to be more focused on the strategic decisions implemented in core business, to facilitate the development and monitoring and to show the commitment and support on the government's program in sharia-based business development, as well as generating capital gain.

Adapun investasi yang dilakukan pada 2014 yang ditujukan guna mengoptimalkan kinerja Perusahaan adalah sebagai berikut:

The investments conducted in 2014 aimed to optimize the Company's performance can be described as follows:

Dalam Jutaan Rupiah / In million Rupiah

Uraian / Description	**Realisasi /** Realization **2014**	**RKAP 2014**	**Realisasi /** Realization **2013**	**% Realisasi 2014 /** % Realization 2014	
Tanah, Bangunan, dan Gedung / Land, Building, and Building	1.192	135.300	896	-	-
Rumah Dinas / Service Houses	0	10.897	-	-	-
Inventaris Kantor / Office Inventory	9.256	16.578	4.668	55,83	198,29
Kendaraan / Vehicles	10.685	17.630	-	60,61	-
Renovasi Kantor / Office Renovation	-	-	-	-	-
Partisi, Penambahan Instalasi / Partition, Additional Installation	-	-	-	-	-
Jumlah / Total	**21.133**	**180.405**	**5.564**	**116**	**198**

Total realisasi investasi (belanja modal) tahun 2014 sebesar Rp21,13 miliar atau hanya 11,71% dari RKAP tahun 2014. Kondisi tersebut disebabkan realisasi investasi perusahaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan operasional tahun berjalan, namun bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 mencapai 379,81%.

Total investment realization (capital expenditure) in 2014 was Rp21.13 billion or only by 11.47% from the RKAP of 2014. The condition was caused by the realization of company's investment that is adjusted to the operational condition and demand of current year. Compared with that of the 2013, the ralization in 2014 reached 379.81%.

INVESTASI BARANG MODAL YANG DIREALISASIKAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Pada 2014, investasi barang modal disajikan pada halaman 206.

CAPITAL GOODS INVESTMENT REALIZED IN THE LAST FISCAL YEAR

In 2014, information on capital goods investment is available on page 206.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Pada 2014, tidak ada Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi yang dapat disajikan oleh Perum Jamkrindo.

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTION CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

In 2014, there was no information on material transaction containing conflict of interest and/or transaction with affiliated parties that can be presented by Perum Jamkrindo.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH

Sepanjang 2014, tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perum Jamkrindo.

CHANGES IN REGULATIONS THAT HAVE SIGNIFICANT IMPACT

In 2014, there were no changes in the rules and regulations that have significant impact on the Company.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Laporan keuangan Perum Jamkrindo disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia. Selama 2014, tidak terdapat perubahan atas kebijakan akuntansi yang berpengaruh terhadap Perusahaan.

ACCOUNTING POLICY

Changes in Accounting Policy

Financial statements of Perum Jamkrindo are prepared based on Statements of Financial Accounting Standard (PSAK) applicable in Indonesia. Throughout 2014, there were no changes on the accounting policies that significantly affect the Company.

PERPAJAKAN PERUSAHAAN

Pada 2014, Perusahaan telah melakukan kewajiban perpajakan berupa pemungutan dan penyetoran berbagai jenis pajak dengan rincian sebagai berikut:

CORPORATE TAXATION

In 2014, the Company has conducted all of its tax obligations in the form of collection and payment of various types of taxes with the following details:

Uraian / Description	**Saldo Awal /** Beginning Balance **(Rp)**	**Mutasi /** Transfer **2014**		**Saldo Akhir /** Ending Balance **(Rp)**
		Kewajiban / Obligation **(Rp)**	**Penyetoran /** Payment **(Rp)**	
I. Uang muka pajak / Tax advance payment				
Pajak Pertambahan Nilai / Value Added Tax	-	354.399.542	354.399.542	-
II. Hutang Pajak / Tax Debt				
Pajak Penghasilan / Income Tax				

Uraian / Description	Saldo Awal / Beginning Balance (Rp)	Mutasi / Transfer 2014		Saldo Akhir / Ending Balance (Rp)
		Kewajiban / Obligation (Rp)	Penyetoran / Payment (Rp)	
Pajak Penghasilan pasal 21 / Income Tax article 21	2.782.854.760	17.546.763.928	17.830.127.828	2.526.490.860
Pajak Penghasilan pasal 23/26 / Income Tax article 23/26	177.763.682	686.543.213	720.497.817	143.809.078
Pajak Penghasilan pasal 25 / Income Tax article 25	5.739.892.708	87.442.338.379	93.182.231.087	-
Pajak Penghasilan pasal 4 (2) / Income Tax article 4 (2)	67.019.679	392.444.272	398.421.451	61.042.500
Pajak Penghasilan pasal 29 / Income Tax article 29	15.092.892.755	(15.092.892.755)	-	-
Total Pajak Penghasilan / Total Income Tax	23.860.423.584	90.975.197.037	112.104.278.183	2.731.342.438
Pajak Pertambahan Nilai / Value Added Tax				
Pajak Pertambahan Nilai / Value Added Tax	382.052.542	2.332.896.800	2.112.600.495	602.348.847
Total Pajak Pertambahan Nilai / Total Added Value Tax	382.052.542	2.332.896.800	2.112.600.495	602.348.847
Pajak Bumi dan Bangunan / Land and Building Tax				
Pajak Bumi dan Bangunan / Land and Building Tax	-	492.841.307	492.841.307	-
Total Pajak Bumi dan Bangunan / Total Land and Building Tax	-	492.841.307	492.841.307	-
Total Hutang Pajak / Total Tax Debts	24.242.476.126	94.155.334.686	115.064.119.527	3.333.691.285

Pajak Penghasilan (PPh)

Total kewajiban pajak Perum Jamkrindo pada tahun 2014 adalah sebesar Rp94,15 miliar yang terdiri dari Pajak Penghasilan tahun 2014 sebesar Rp90,97 miliar, Pajak Pertambahan Nilai Rp2,33 miliar dan Pajak Bumi dan Bangunan Rp492,84 juta. Perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan dan menyetor ke kas negara sebesar Rp115,06 miliar sehingga kewajiban pajak per 31 Desember 2014 sebesar Rp3,33 miliar.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perum Jaminan Kredit Indonesia memiliki saldo awal PPN pada 2014 sebesar Rp382,05 juta dan kewajiban PPN selama 2014 sebesar Rp2,33 miliar. Jumlah PPN yang disetorkan pada 2014 sebesar Rp 2,11 miliar sehingga saldo akhir PPN tahun 2014 Perusahaan sebesar Rp602.35 juta.

Income Tax

Total tax liability of Perum Jamkrindo in 2014 was Rp94.15 billion, consisting of income tax of 2014 which amounted to Rp90.97 billion, Value Added Tax which amounted to Rp2.33 billion and Land and Building Tax which amounted to Rp492.84 billion. The Company has fulfilled tax obligations and payment to the state treasury amounting to Rp115.06 billion. Hence, the Company's tax liabilities by December 31, 2014 amounted to Rp3.33 billion.

Value Added Tax (VAT)

In 2014, Perum Jaminan Kredit Indonesia had a beginning balance of VAT amounting to Rp382.05 million and VAT liabilities during the year amounting to Rp2.33 billion. Total VAT paid in 2014 was Rp2.11 billion; thus, the ending balance of VAT in 2014 amounting to Rp602,35 million.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Sebagai wajib pajak, Perum Jaminan Kredit Indonesia telah memenuhi kewajiban membayar PBB sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diterima pada 2014 sebesar Rp492,84 juta.

ASPEK PEMASARAN

Strategi Pemasaran

Perum Jamkrindo menerapkan strategi pemasaran yang proaktif untuk produk-produk penjaminan kredit baik kredit KUR atau kredit program lainnya, maupun untuk penjaminan *existing* (Non KUR/Program). Hal tersebut juga diterapkan baik untuk skim penjaminan konvensional maupun skim penjaminan syariah. Secara berkelanjutan, selain menerapkan strategi pemasaran yang proaktif, Perum Jamkrindo juga melakukan strategi pemasaran lainnya yaitu strategi intensifikasi dan ekstensifikasi.

Secara khusus, Divisi Penjaminan Program melakukan strategi pemasaran yang dilakukan pada 2014, sebagai berikut:

1. Menciptakan terobosan terhadap produk-produk baru, kreatif dan visioner dengan perjanjian yang berbasis IT (*online system*)
2. Menghasilkan produk yang dapat memahami kebutuhan pasar/pelanggan, tidak hanya kebutuhan saat ini melainkan juga kebutuhan di masa depan
3. Menyediakan produk yang *customized*, sehingga dapat memenuhi harapan mitra perbankan, serta melampaui harapan mitra
4. Meningkatkan kompetensi pemasaran dalam hal ketrampilan berkomunikasi, negosiasi dan ketrampilan konseptual
5. Meningkatkan hubungan kerja sama dengan mitra perbankan melalui hubungan baik dan berkesinambungan
6. Menjaga *service level agreement* (SLA) antara Perum Jamkrindo dengan mitra perbankan yang sudah berjalan

Land and Building Tax (PBB)

As a taxpayer, Perum Jaminan Kredit Indonesia has fulfilled its obligations to pay the Land and Building Tax in accordance with the Notification Letter of Taxpayer (SPPT) received in 2014 amounting to Rp492.84 million.

MARKETING ASPECTS

Marketing Strategy

Perum Jamkrindo implemented a proactive marketing strategy for credit gurantee products either for credit of KUR credit or other credit programs, or existing guarantee (Non KUR/Program). This strategy is also implemented for a conventional guarantee scheme or sharia-based guarantee scheme. Continually, in addition to conducting a proactive marketing strategy, Perum Jamkrindo also deployed other marketing strategy namely intensification and extensification strategies.

In particular, Guarantee Program Division conducted the following marketing strategies in 2014:

1. Creating innovation on new, creative and visionary products with IT - based agreement (online system)
2. Generating products that can cover the market/ customers' demands, not only for the current uses but also for the future
3. Providing customized products to meet the expectation of banking partners in general and to exceed partners' expectation
4. Improving marketing competencies in the field of communication, negotiation and conceptual skills.
5. Improving cooperation with banking partners through a good and sustainable relationship.
6. Maintaining service level agreement (SLA) between Perum Jamkrindo and the current banking partners.

Di tahun 2015, Perum Jamkrindo menargetkan realisasi penjaminan produk eksisting sebesar Rp49,81 triliun dan memfokuskan diri dengan menciptakan kerja sama dengan bank-bank BUMN serta BPD dengan kinerja baik. Hal ini dilakukan dengan senantiasa menciptakan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan mitra perbankan.

In 2015, Perum Jamkrindo has set the target for the realization of existing guarantee products which amounted to Rp49.81 trillion and to focus on creating cooperation with SOE banks and BPDs with good performance. These actions will be conducted by generating new products as demanded by banking partners.

Strategi *Surety Bond*

Produk *Surety* Bond yang diluncurkan pada 2012 merupakan upaya Perusahaan untuk menjawab kebutuhan pasar, dan menyediakan pilihan lain atas kebutuhan *Surety Bond* yang selama ini dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan asuransi. Guna mendukung kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan adanya ketentuan bahwa produk *Surety Bond* yang dapat disediakan oleh Perusahaan Penjaminan sebagaimana Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka Jamkrindo merupakan perusahaan penjaminan pertama yang menerbitkan *Surety Bond* untuk UMKMK. Produk *surety bond* telah mewarnai kegiatan promosi dan sosialisasi produk di tahun 2012 juga mewarnai kegiatan perusahaan dan *outlet* (Kantor Cabang) Jamkrindo di seluruh Indonesia.

Surety Bond Strategy

Surety Bond product was launched in 2012 by the Company to meet market's demands and enrich customers' choices for Surety Bond that has been offerde by other insurance companies. In order to support the procurement of goods and services of the government and the matters regarding the provision on Surety Bond products that can be provided by Guarantee Companies in reference to Presidential Regulation No. 54/2010 concerning the Government's Goods and Services Procurement, Jamkrindo is the first guarantee company issuing Surety Bond for MSMEs and Cooperatives. Surety Bond product has provided contribution in the promotion and socialization of products in 2012 as well as the Company's activities in outlets (Branch Offices) throughout Indonesia.

Pada 2014, Perum Jamkrindo memperoleh daftar perusahaan penjaminan yang dapat melakukan penjaminan pengadaan barang dan/atau Jasa (*surety bond*) sebagai berikut:

In 2014, Perum Jamkrindo received a list of guarantee companies that are capable of conducting guarantee for goods and/or services procurement (surety bond). The list is as follows:

No	Nama Perusahaan / Company Name	Izin Usaha / Business Permit	
		Nomor / Number	Tanggal / Date
1	Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)	KEP-77/KM.10/2009	22 April 2009 / April 22, 2009
2	PT Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia (PT PKPI)	328/KMK.017/1997	21 Juli 1997 / July 21, 1997
3	PT Jamkrida Jatim	KEP-471/KM.10/2009	17 Desember 2009 / December 17, 2009
4	PT Jamkrida Bali Mandara	KEP-720/KM.10/2010	30 Desember 2010 / December 30, 2010
5	PT Jamkrida Riau	KEP-375/KM.10/2009	1 Agustus 2012 / August 1, 2012
6	PT Jamkrida NTB Bersaing	KEP-652/KM.10/2009	6 Desember 2012 / December 6, 2012

No	Nama Perusahaan / Company Name	Izin Usaha / Business Permit	
		Nomor / Number	Tanggal / Date
7	PT Jamkrida Jabar	KEP-05/D.05/2013	30 Januari 2013 / January 30, 2013
8	PT Jamkrida Sumbar	KEP-62/D.05/2013	26 Juli 2013 / July 26, 2013
9	PT Jamkrida Kalsel	KEP-22/D.05/2014	17 Maret 2014 / March 17, 2014
10	PT UAF Jaminan Kredit	KEP-26/D.05/2014	25 Maret 2014 / March 25, 2014
11	PT Jamkrida Sumsel	KEP-33/D.05/2014	7 Mei 2014 / May 7, 2014
12	PT Jamkrida Kalteng	KEP-90/D.05/2014	7 Juli 2014 / July 7, 2014
13	PT Jamkrida Babel	KEP-94/D.05/2014	12 Agustus 2014 / August 12, 2014
14	PT Jamkrida Banten	KEP-126/D.05/2014	31 Oktober 2014 / October 31, 2014
15	PT Jamkrida Kaltim	KEP-133/D.05/2014	7 November 2014 / November 7, 2014
16	PT Jamkrida Syariah	KEP-134/D.05/2014	7 November 2014 / November 7, 2014

Sehubungan kegiatan pemasaran perusahaan, pada 2014 telah dibuka 21 kantor cabang baru yakni kantor Cabang Banda Aceh, Cabang Bengkulu, Cabang Kendari, Cabang Padang, Cabang Palu, Cabang Serang, Cabang Tanjung Pinang, Cabang Gorontalo, Cabang Mamuju, Cabang Manokwari, Cabang Ambon, Cabang Pangkal Pinang, Cabang Tarakan, dan Cabang Ternate. Pembukaan kantor cabang baru merupakan upaya perusahaan untuk menjawab kebutuhan pasar di provinsi-provinsi yang selama ini masih bergabung dengan kantor cabang di provinsi lain dan untuk memperluas pangsa penjaminan Perum Jamkrindo terhadap UMKM.

Pertaining to the marketing activities, the Company opened 21 new branch offices in 2014, namely Banda Aceh Branch, Bengkulu Branch, Kendari Branch, Padang Branch, Palu Branch, Serang Branch, Tanjung Pinang Branch, Gorontalo Branch, Mamuju Branch, Manokwari Branch, Ambon Branch, Pangkal Pinang Branch, Tarakan Branch, and Ternate Branch. The opening of new branches was the company's efforts to respond to market needs in the provinces that still joined with branch office in other provinces and to expand the guarantee share of Perum Jamkrindo towards MSMEs.

Pangsa Pasar

Volume kredit yang dijamin Jamkrindo pada 2014 adalah Rp40,74 triliun yang terdiri dari penjaminan KUR sebesar Rp18,77 triliun dan *existing* (non KUR) sebesar Rp20,96 triliun, di mana kredit *existing* terdiri dari kredit produktif sebesar Rp7,29 miliar dan kredit konsumtif Rp12,76 miliar.

Market Share

Credit volume guaranteed by Jamkrindo in 2014 was Rp40.74 trillion, composing of KUR guarantee at Rp18.77 trillion and the existing (non KUR) guarantee at Rp 20.96 trillion in which the existing credit comprises of productive credit at Rp7.29 billion and consumptive credit at Rp112.76

Bila digolongkan berdasar jenis kredit, volume penjaminan Perum Jamkrindo untuk kredit produktif (KUR dan *existing* produktif) adalah Rp20,91 miliar dan kredit konsumtif adalah sebesar Rp12,76 miliar.

Dibandingkan dengan data penyaluran kredit konsumtif nasional berdasarkan laporan Bank Indonesia pada 2014 sebesar Rp1.013.666 triliun (sumber: Statistik Perbankan Indonesia Desember 2014), maka penjaminan kredit konsumtif Perum Jamkrindo menguasai pangsa pasar sekitar 6,52% (Rp15,5 triliun). Sedangkan untuk kredit produktif, mempertimbangkan data penyaluran kredit UMKM nasional sebesar Rp731,8 triliun (sumber: LPI tahun 2014 Bank Indonesia), maka pangsa pasar penjaminan kredit produktif Perum Jamkrindo sebesar 0,56% (Rp4,09 triliun). Sehingga total pangsa pasar penjaminan Perum Jamkrindo pada 2014 adalah sekitar 7,08%.

billion. Based on the credit type, guarantee volume of Perum Jamkrindo for productive credit (KUR and existing productive) was Rp20.91 billion and consumptive credit was Rp12.76 billion.

Compared with data of national consumer loan disbursement at Rp1,013,666 trillion based on report from Bank Indonesia in 2014 (source: Statistics of Indonesian Banking, December 2014), thus consumer loan guarantee of Perum Jamkrindo dominated market share of 6.52% (Rp15.5 trillion). Meanwhile, for productive loan, considering data of national MSME loan disbursement of Rp731.8 trillion (source: LPI year 2014, Bank Indonesia), market share of productive loan guarantee of Perum Jamkrindo amounted to 0.56% (Rp4.09 trillion). Thus total guarantee market share of Perum Jamkrindo in 2014 was 7.08%.

Pangsa pasar untuk Penjaminan Konvensional ditinjau dari jumlah bank

Market share for Conventional Guarantee based on total banks

No	Uraian / Description		Data Nasional / National Data	Market Share Perum Jamkrindo	%
A	Bank				
	1	Bank BUMN / SOE Banks	4 unit	4 unit	100%
	2	Bank Swasta Nasional Devisa / Foreign Exchange Private National Banks	31 unit	3 unit	0,10%
	3	Bank Swasta Nasional Non Devisa / Non-Foreign Exchange Private National Banks	24 unit	-	-
	4	Bank Daerah / Regional Banks	26 unit	22 unit	84,61%
	5	Bank Campuran / Joint-Venture Banks	14 unit	-	-
	6	Bank Asing / Foreign Banks	10 unit	-	-
B	Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non-Bank Financial Institutions		>100 unit	>100 unit	100%

Strategi Pemasaran Tahun 2014

Seiring pesatnya persaingan usaha penjaminan di tahun 2014, Perum Jamkrindo menerapkan strategi pemasaran yang aktif, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk semua produk penjaminan baik penjaminan kredit program maupun kredit *existing*. Sasaran penjaminan kredit KUR sesuai dengan Inpres No.6 Tahun 2007 adalah:

Marketing Strategy in 2014

In line with the increasingly tight guarantee business competition in 2014, Perum Jamkrindo implements an active marketing strategy, both by intensification and extensification, for all guarantee products, both for the credit program or the existing credit. Target KUR credit guarantee that is in accordance with the Presidential Instruction No.6 Year 2007 is:

a. Mempermudah UMKMK mengakses perbankan melalui penjaminan sehingga UMKMK menjadi lebih terberdayakan (*empowered*).
b. Meningkatkan kapasitas penjaminan sehingga jumlah UMKMK yang dilayani semakin meningkat, dengan volume Penjaminan sebesar Rp24,05 triliun, dengan tingkat risiko yang rendah.
c. Memperluas jangkauan pelayanan sehingga lebih mendekati UMKMK dan mitra kerja penjaminan, dengan jumlah UMKMK yang dilayani sebesar 1.393.270 UMKMK.
d. Menggerakkan sektor produktif dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dengan tenaga kerja 1.798.944 orang.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, Perusahaan melakukan strategi sebagai berikut:
a. Mempertahankan *market share* Perum Jamkrindo dengan melakukan kerja sama penjaminan kredit dengan Bank pelaksana yaitu BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah serta Bank- Bank Pembangunan Daerah yang mendapat penugasan untuk menyalurkan KUR.
b. Menciptakan *positioning* yang kuat di Perbankan.
c. Melakukan penanggungan ulang (*reasuransi*) produk Penjaminan KUR.
d. Mengoptimalkan penjaminan kredit program lainnya.

Program Kerja dan Langkah Kegiatan Tahun 2015

Perum Jamkrindo berencana untuk melakukan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp7,5 triliun. Kredit dimaksud akan disalurkan kepada 1.393.270 UMKM yang akan menyerap 1.798.944 tenaga kerja.

Untuk mencapai sasaran dimaksud, maka pada 2015 program kerja dan langkah kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Membuat skim penjaminan sebagaimana skim KUR yang diperbaharui dengan sistem penjaminan kredit *automatic cover*, sehingga diharapkan penjaminan kepada UMKMK dapat lebih mudah dan cepat.

a. Facilitating MSMEs and Cooperatives to access the banking through guarantee so that MSMEs and Cooperatives become more empowered.
b. Increasing the guarantee capacity so that the number of MSMEs and Cooperatives served also increased, with the guarantee volume of Rp24.05 trillion and low level of risk.
c. Expanding the range of services so as to be closer to MSMEs and Cooperatives and guarantee work partners, with the number of MSMEs and Cooperatives served reached 1,393,270.
d. Moving the productive sector and increasing employment amounting to 1,798,944 people.

To achieve these objectives, the Company has made the following strategies:
a. Maintaining Perum Jamkrindo's market share by conducting cooperation in credit guarantee with the executing Banks, namely BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri and Bank BNI Syariah, as well as the Regional Development Banks (BPDs) that are mandated to disburse KUR.
b. Creating a strong positioning in Banking.
c. Performing reinsurance activities of KUR Guarantee products.
d. Optimizing other credit guarantee programs.

Work Programs and Activities for 2015

Perum Jamkrindo plans to conduct guarantee of Micro Credit Loan (KUR) of Rp7.5 trillion. The credit is going to be channeled to 1,393,270 MSMEs that will absorb 1,798,944 manpowers.

To reach the intended target, the 2015 work programs and activities to be implemented are as follows:

a. Composing guarantee scheme in accordance with KUR scheme that is renewed through the automatic cover credit guarantee, for easier and faster guarantee to MSMEs and Cooperatives.

b. Membuat pesyaratan penjaminan kredit sesuai dengan ketentuan perkreditan pada bank pelaksana dalam arti kelayakan usahanya menjadi hal yang utama dalam penyaluran kreditnya.
c. Melakukan *business meeting* dengan Bank Pelaksana baik di tingkat pusat maupun dengan perbankan di daerah membahas Kredit Program Berpenjaminan.
d. Melakukan koordinasi internal dengan Kantor Cabang Perum Jamkrindo terkait pelaksanaan Kredit Program Berpenjaminan.
e. Meningkatkan kecepatan dalam persetujuan penjaminan KUR, antara lain melalui Penjaminan secara online dengan Bank Pelaksana.
f. Percepatan *Problem solving* dengan Bank Pelaksana.

g. Sosialisasi ketentuan dan persyaratan program, baik kepada pihak perbankan maupun instansi-instansi pembina UMKMK terkait.
h. Melakukan pengawasan pelaksanaan kredit program secara administratif dan *on the spot.*

PROSPEK USAHA PERUSAHAAN

Dengan kondisi perekonomian dalam negeri yang terus tumbuh serta tingkat stabilitas makro ekonomi yang tetap terjaga, pertumbuhan jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) akan semakin meningkat. Salah satu karakteristik yang melekat pada sebagian besar UMKMK sekaligus menjadi sumber permasalahannya adalah lemahnya struktur permodalan dan kurangnya akses kepada sumber pembiayaan (perbankan) yang disebabkan oleh adanya keterbatasan agunan.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah UMKMK di Indonesia, ketersediaan fasilitas Penjaminan Kredit akan berdampak pada meningkatnya permintaan kredit, serta memberikan peluang bagi industri Penjaminan Kredit di Indonesia untuk tumbuh secara berkelanjutan pada masa yang akan datang.

b. Composing requirements for credit guarantee in accordance with credit requirements for the executing banks, in which business legality becomes main priority in credit distribution.
c. Conducting business meeting with the Executing Bank, in both the central and regional banking offices to discuss Guarantee Credit Program.
d. Coordinating internally with Perum Jamkrindo Branch Offices related to the implementation of Guarantee Credit Program.
e. Accelerating the approval process of KUR guarantee, such as through online Guarantee with Executing Banks.
f. Accelerating Problem Solving process with Executing Banks.
g. Disseminating the regulations and requirements of the program, both to banking parties and related MSMEs and Cooperatives development institutions.
h. Monitoring the implementation of credit program through administrative and on-the-spot manner.

BUSINESS OUTLOOK

The increasing growth of domestic economy and stability of macro-economy will bolster the growth of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and Cooperatives. One of the characteristics embedded in most MSMEs and Cooperatives as well as the source of most of the problems is the lack of capital structure and access to financing sources (banking institutions) due to the collateral constraints.

In line with the economic growth and the number of MSMEs and Cooperatives in Indonesia, the availability of Credit Guarantee facilities will impact on the increasing demand for credit as well as will provide opportunities for the industry of Credit Guarantee in Indonesia to grow sustainably in the future.

Di samping kegiatan usaha Penjaminan Kredit, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/ PMK.010/2011, tanggal 8 Juli 2011, sebagai Perusahaan Penjamin, Perum Jamkrindo masih mempunyai peluang untuk memperluas kegiatan usaha yang dijalankan dan tidak terbatas pada kegiatan usaha pemberian jasa Penjaminan Kredit, antara lain:

1. Penjaminan pinjaman yang disalurkan koperasi kepada anggotanya;
2. Penjaminan Kredit dan/atau Pinjaman Program Kemitraan yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
3. Penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan Jaminan Gadai dan Fidusia;
4. Penjaminan atas Surat Utang;
5. Penjaminan Transaksi Dagang;
6. Penjaminan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*surety bond*);
7. Penjaminan Bank Garansi (kontra bank garansi);
8. Penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
9. Penjaminan *Letter of Credit* (L/C);
10. Penjaminan Kepabeanan (*custom bond*);
11. Jasa Konsultasi Manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan;
12. Penyediaan informasi/*database* Terjamin terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan;
13. Penjaminan lainnya setelah memperoleh persetujuan Menteri.

Sehubungan dengan peluang bisnis Penjaminan Kredit di Indonesia yang masih cukup luas, sebagai satu-satunya Perusahaan Penjamin Kredit milik pemerintah yang berskala nasional dan telah memiliki jaringan pelayanan terluas yaitu di 35 provinsi dan 21 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, Perum Jamkrindo memiliki peluang usaha untuk terus tumbuh dan berkesinambungan dalam jangka panjang.

Besides Credit Guarantee activities, as provided in the Minister of Finance Regulation Number 99/PMK.010/2011, dated July 8, 2011, as a Guarantee Company, Perum Jamkrindo still has the opportunity to expand their business activities that is run and not limited to the Credit Guarantee business activities, such as.

1. Providing guarantee that is distributed by the cooperatives to its members;
2. Providing Partnership Program for Credit and/or Guarantee that is channelled by State Owned Enterprises (SOEs) for Partnership and Community Development Program (PKBL);
3. Providing guarantee for the disbursement of Loan through Liens and the Fiduciary;
4. Providing guarantee for the Bonds;
5. Providing guarantee for Trade/Commerce Transactions;
6. Providing guarantee for the Procurement of Goods and/or Services (surety bond);
7. Providing guarantee for Bank Guarantees (Counter Bank Guarantee);
8. Providing guarantee for Domestic Letter of Credit (SKBDN);
9. Providing guarantee for Letter of Credit (L / C);
10. Providing guarantee for customs (custom bond);
11. Providing Management Consulting Services related to business activity of the Guarantee;
12. Provision of Information/Database of the Guaranteed related to business activity of Guarantee;
13. Other business upon the approval of the Minister.

Pertaining to the wide Credit Guarantee business opportunities in Indonesia, as the only national-scale Credit Guarantee Company owned by the Government and has the most extensive service network in 35 provinces and 21 regencies/cities throughout Indonesia, Perum Jamkrindo has good business opportunities to grow and achieve long term sustainability.

Bisnis utama Perum Jamkrindo adalah Penjaminan Kredit UMKMK, baik Penjaminan Kredit Korporasi (*existing*), maupun Penjaminan Kredit Program (Kredit Usaha Rakyat) yang ditujukan kepada Usaha Mikro dan Kecil yang layak tapi belum *bankable*.

Pada tahun-tahun mendatang, Perum Jamkrindo akan terus melakukan pengembangan produk penjaminan, baik penjaminan atas kredit tunai maupun non tunai, yang disalurkan oleh Perbankan maupun Lembaga Non Bank. Pengembangan tersebut dilakukan oleh Perum Jamkrindo untuk memenuhi kebutuhan UMKMK dan Mitra Perbankan atau Penerima Jaminan dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya.

Surety Bond yang diluncurkan sejak 2012 belum memberikan gambaran prospek yang baik. Penjaminan kredit konstruksi, kredit umum, dan distribusi barang kurang dapat ditangani dengan baik mengingat telah tercapainya kapasitas kerja maksimum sejak produk KUR melonjak tinggi.

Pada waktu yang akan datang, penjaminan kredit konstruksi, kredit umum, dan distribusi barang diperkirakan memiliki prospek yang semakin baik seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kesiapan organisasi, sumber daya manusia, proses bisnis, maupun pemanfaatan *Information and Communication Technology* (ICT) Perum Jamkrindo perlu mendapatkan perhatian lebih untuk dapat merealisasikan prospek tersebut.

RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perum Jamkrindo dalam lima tahun ke depan (2014-2018) adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan dikembangkan menjadi Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian Nasional, khususnya dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) serta usaha lainnya yang mendukung pengembangan UMKMK di Indonesia.

The core business of Perum Jamkrindo is providing Credit Guarantee for MSMEs and Cooperatives, both the existing credit guarantee business and KUR Guarantee Program, that is intended for Small and Micro Enterprises that are feasible but not yet bankable.

In the upcoming years, Perum Jamkrindo will continue to develop these credit products, both cash and non cash guarantees, that is provided by Banking and Non-Banking institutions. The development is carried out by Perum Jamkrindo to meet the needs of the MSMEs and Cooperatives as well as the Banking Partners or Guarantee Recipients in order to improve business activities.

Surety Bond launched since 2012 has not shown good prospect. The guarantee of construction credit, general credit and goods distribution was not properly handled considering that the maximum work performance was met since the peak of KUR product's demands.

In the future, the guarantee of construction credit, general credit and goods distribution are projected to remain buoyant in line with the national economic growth. The readiness of the organization, human resources, and business process, as well as the utilization of Information and Communication Technology (ICT) of Perum Jamkrindo need to be given extra attention to realize the prospects.

CORPORATE LONG-TERM PLAN

Corporate Long-Term Plan (RJPP) of Perum Jamkrindo in the next five years (2014-2018) is as follows:

1. The Company is being developed into the Leading Guarantee Company that Supports the National Economic Development, particularly in developing Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and Cooperatives, and other businesses that support the development of MSMEs and Cooperatives in Indonesia.

2. Perusahaan diarahkan untuk mendukung pengembangan bisnis UMKMK sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional melalui layanan yang luas dan berkualitas tinggi di bidang penjaminan kepada UMKMK dan mitra bisnis serta memberikan manfaat kepada *stakeholders* sesuai prinsip bisnis yang sehat.
3. Perusahaan dikembangkan untuk menjadi organisasi yang terus tumbuh secara berkesinambungan dengan sistem manajemen yang handal dan terintegrasi.
4. Perusahaan dikembangkan untuk selalu mencari inovasi-inovasi baru dalam memperkuat berbagai lini bisnis yang ada dengan menerapkan sistem *e-guarantee*.
5. Perusahaan diarahkan supaya berkembang dengan ditunjang oleh perusahaan-perusahaan anak untuk menjalankan usaha yang berkaitan dan sinergis dengan usaha utama Perum Jamkrindo.

Perusahaan dikembangkan untuk memberikan manfaat bagi *stakeholders* sesuai prinsip bisnis yang sehat.

Dengan arah tersebut diharapkan dapat tercapai sasaran Perum Jamkrindo pada tahun 2018 sesuai dengan visi perusahaan untuk Menjadi Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian Nasional. Sasaran Perusahaan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

a. Tahap I Tahun 2014-2015: Pertumbuhan Dengan Fokus Penguatan Daya Saing.

Pada tahun pertama dan kedua (tahun 2014-2015), sasaran utama yang ingin dicapai adalah efisiensi dan efektivitas operasional Perusahaan dalam mendukung kekuatan Perusahaan yang saat ini telah dimiliki. Pada tahap ini tercipta sistem manajemen operasional Perusahaan yang optimal dengan didukung oleh organisasi yang adaptif dan gesit, SDM yang berkualitas serta teknologi informasi dan komunikasi yang efektif. Pertumbuhan pendapatan penjaminan tetap terjaga untuk menjamin Perum Jamkrindo sebagai Perusahaan berkelanjutan. Pada periode ini, diversifitkasi usaha juga sudah mulai dilakukan.

2. The Company is being directed to support business development of MSMEs and Cooperatives as part of the national economic development through extensive and high quality service in guarantee sector to MSMEs and Cooperatives, and business partners, as well as to provide benefit to stakeholders according to the healthy business principles.
3. The Company is being developed into an organization that continues to grow sustainably through reliable and integrated management system.
4. The Company is being developed to always seek for new innovations in strengthening various lines of business available by implementing e-guarantee system.
5. The Company is being directed to develop, supported by subsidiaries to run the related business in synergy with the main business of Perum Jamkrindo.

The Company is being developed to provide benefits to stakeholders according to healthy business principles.

With such direction, it is expected that the goal of Perum Jamkrindo in 2018 meets the vision of the company to become the Leading Guarantee Company Supporting the Development of National Economy. The Company's targets for the next 5 (five) years is:

a. Stage I Year 2014-2015: Growth with Focus on Improvement of Competitive Power

In the first and second year (2014-2015), the main target to be achieved is efficiency and effectiveness of the Company's operations in supporting the Company's current strength. In this stage, the optimum management system of the Company's operation which is adaptive and responsive, as well as quality human resources and effective information and communication technology, will have been realized. The growth of guarantee income remains stable to ensure the sustainability of Perum Jamkrindo. In this period, business diversification will commence.

b. Tahap II Tahun 2016-2017: Pertumbuhan Dengan Fokus Penguatan Pasar dan Inovasi Produk.

Pada tahun ketiga dan keempat (tahun 2016-2017), sasaran yang ingin dicapai adalah pengembangan pasar melalui penguasaan pangsa pasar secara signifikan (*market leader*) untuk semua produk Perusahaan, baik untuk pasar yang saat ini dilayani maupun peningkatan basis pelanggan yang belum dilayani Perusahaan. Untuk bidang keuangan, profitabilitas Perusahaan meningkat baik melalui hasil operasi Perusahaan maupun hasil investasi. Pada bidang sistem teknologi informasi dan komunikasi (ICT), JODIS (*Jamkrindo Online Decision and Information Support*) telah berada pada tahap implementasi. Sedangkan di bidang SDM dan organisasi telah dimulai budaya organisasi yang kompetitif dan berorientasi pada pasar. Pada periode tahun ini, pengembangan produk melalui inovasi produk-produk baru telah menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi Perusahaan.

c. Tahap III Tahun 2018 dan Seterusnya: Mempertahankan dan Memantapkan Akselerasi Pertumbuhan.

Pada tahun terakhir periode RJPP (tahun 2018), sasaran yang ingin dicapai adalah mempertahankan dan memantapkan akselerasi pertumbuhan yang telah dicapai pada perode tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, sejalan dengan pengembangan produk-produk baru serta diversifikasi usaha terkait (*related diversification*) melalui pembentukan anak-anak perusahaan, maka pengembangan kompetensi baru juga menjadi sasaran yang ingin dicapai pada periode ini.

b. Stage II Year 2016-2017: Growth with Focus on Market Improvement and Product Innovation

In the third and fourth year (2016-2017), the target to be achieved is market development through domination of market share (market leader) for all products of the Company, both for current market and the increase in customer bases that have not been reached by the Company. For finance, the Company's profitability will be increased, seen from the Company's operational result and investment. In information and communication technology system (ICT), JODIS (Jamkrindo Online Decision and Information Support) will have been implemented. In Human Resources and organization, competitive organization culture oriented to market will also have started. During this period, product development through new product innovation has resulted in significant incomes for the Company.

c. Stage III Year 2018 and Forth: Maintaining and Enhancing Accelerated Growth.

During the last year of RJPP period (2018), the target to be achieved is maintaining and enhancing the accelerated growth that has been attained in the previous periods. Furthermore, in line with the new product development and related business diversification through the establishment of subsidiaries, the development of new competencies is also a target to be achieved in this period.

Tahap I Tahun 2014-2015
Stage I of 2014-2015

Pertumbuhan dengan fokus penguatan daya saing.

Growth with focus on improvement of competitive power.

Tahap II Tahun 2016-2017
Stage II of 2016-2017

Pertumbuhan dengan fokus penguatan pasar dan inovasi produk.

Growth with focus on market improvement and product innovation.

Tahap III Tahun 2018 dan seterusnya / Stage III of 2018 and Forth

Mempertahankan dan memantapkan akselerasi Perusahaan.

Maintaining and enhandcing accelerated growth of the Company.


hp



TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kebijakan dan Dasar Penerapan

Pelayanan maksimal dan cara kerja yang profesional dalam pengelolaan perusahaan menjadi komitmen yang senantiasa dijaga oleh seluruh insan Perum Jamkrindo sehingga mampu berkembang dan memiliki daya saing yang tinggi, menciptakan nilai tambah bagi *stakeholders*. Hal ini menuntut Perum Jamkrindo untuk terus menjaga penerapan GCG secara konsisten dan berkomitmen tinggi.

Terkait dengan komitmen pelaksanaan GCG, Dewan Pengawas dan Direksi telah membuat Surat Keputusan bersama untuk Pedoman *Good Corporate Governance* nomor 88/Kep-Dir/XII/2012; KEP-06/DP-JAMKRINDO/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012. Selain berdasarkan *Board Manual*, penerapan GCG Perum Jamkrindo berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Miliki Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corperate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012.
3. Undang-Undang RI No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
4. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator atau Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*).
5. Pedoman Umum GCG Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
6. *Roadmap* tata kelola perusahaan Indonesia.

Sosialisasi penerapan GCG terus dilakukan kepada seluruh jajaran dengan tujuan agar seluruh jajaran Perusahaan memahami dan dapat menerapkan prinsip-prinsip GCG

BASIS OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Policy and Basis of Implementation

The best service and professional performance in managing the Company become commitments which are always maintained by every individual in Perum Jamkrindo, thus the Company is able to develop, create added values for stakeholders, and has high competitiveness. It encourages Perum Jamkrindo to always maintain the implementation of GCG consistently.

Related to the commitment of GCG implementation, Board of Supervisors and Board of Directors have made a decree for Good Corporate Governance guidelines No. 88/Kep-Dir/XII/2012; KEP-06/DP-JAMKRINDO/XII/2012 dated December 3, 2012. Besides based on Board Manual, GCG implementation of Perum Jamkrindo refers to the policies as follows:

1. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 41 Year 2008 regarding Perum Jamkrindo.
2. Ministry of State Owned Enterprise Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, regarding Good Corporate Governance in State Owned Enterprise (SOE), as amended with Ministry of State Owned Enterprise Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012.
3. RI Laws No. 19 year 2003 regarding State Owned Enterprise (SOE).
4. Secretary of Ministry of State Owned Enterprises Decree No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 regarding Assessment and Evaluation Indicator or Parameter on Good Corporate Governance.
4. General guideline of Indonesia GCG by National Committee on Governance (NCG).
5. Roadmap of Indonesia Corporate Governance.

GCG implementation is continuously disseminated to all boards of Company so all boards of Company can understand and implement GCG principles in their daily

dalam lingkungan kerja sehari-hari guna menghindari perilaku menyimpang dari setiap jajaran unit kerja.

Praktik GCG di Perum Jamkrindo terus menerus ditingkatkan dengan pengawasan dari unit kerja terkait Kantor Pusat atas implementasi *Code of Conduct* (CoC). Apabila ditemukan benturan kepentingan atau penyalahgunaan jabatan yang menimbulkan tindakan *fraud* dari jajaran Perusahaan, maka akan diselesaikan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Komitmen

Perum Jamkrindo berkomitmen penuh untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) di setiap tingkatan dan jenjang organisasi, guna menciptakan organisasi yang profesional, solid, baik dan kompetitif, serta dapat memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip GCG telah berlandaskan pada budaya Perusahaan yang berorientasi pada kepuasan konsumen, proaktif terhadap perubahan lingkungan usaha, bersikap jujur, berpikir positif dan berdedikasi tinggi, bekerja tekun dan disiplin dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan, serta selalu meningkatkan profesionalisme demi pencapaian nilai tambah bagi Perusahaan. Nilai-nilai budaya Perum Jamkrindo ini telah diimplementasikan di seluruh jajaran Perusahaan. Penerapan hal tersebut juga merupakan kode etik yang menjadi acuan yang jelas dan terukur bagi manajemen dan karyawan dalam berpikir dan bertindak, sehingga membawa Perum Jamkrindo pada tujuan tata kelola perusahaan yang baik.

PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Govenance (GCG) merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan memberikan manfaat jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis. Dalam rangka meningkatkan nilai Perusahaan serta mendorong pengelolaan Perusahaan

work environment in order to avoid deviant behavior in every working unit.

GCG practice in Perum Jamkrindo is continuously developed with supervision from working unit in the Head Office on Code of Conduct implementation. If there is any conflict of interest or abuse of power that may create fraud from boards of Company, it will be solved and followed-up in accordance with the prevailing policy.

Commitment

Perum Jamkrindo fully commits to implement Good Corporate Governance in every level of managements in order to create a professional, solid, good and competitive organization, as well as to fulfill the need of stakeholders.

A commitment to implement GCG principle has been based on Company culture that covers, among others, orientation to customer satisfaction, proactive attitude to the change of business environment, honesty, positive thoughts and high-dedication, hard work and discipline by prioritizing the Company's interest, as well as professionalism improvement to reach added value for the Company. Culture value of Perum Jamkrindo has been implemented in all boards of Company managements. Such implementation is a code of conduct that becomes a clear reference by all managements and employees in thinking and acting so as to bring Perum Jamkrindo to achieve good corporate governance.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Good Corporate Governance is a key of the Company's success to grow and provide long-term benefit, as well as win business competition. To increase the Company's value as well as support the Company's management professionally, efficiently and effectively, Perum Jamkrindo

secara profesional, efisien dan efektif, maka Perum Jamkrindo menerapkan prinsip-prinsip GCG seperti transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kewajaran (*fairness*) pada seluruh Organ Perusahaan baik Pemilik Modal, Dewan Pengawas, dan Direksi.

implements GCG principles such as transparency, accountability, responsibility, independency and fairness in all Company organs, both shareholders, Board of Supervisors, and Board of Directors.

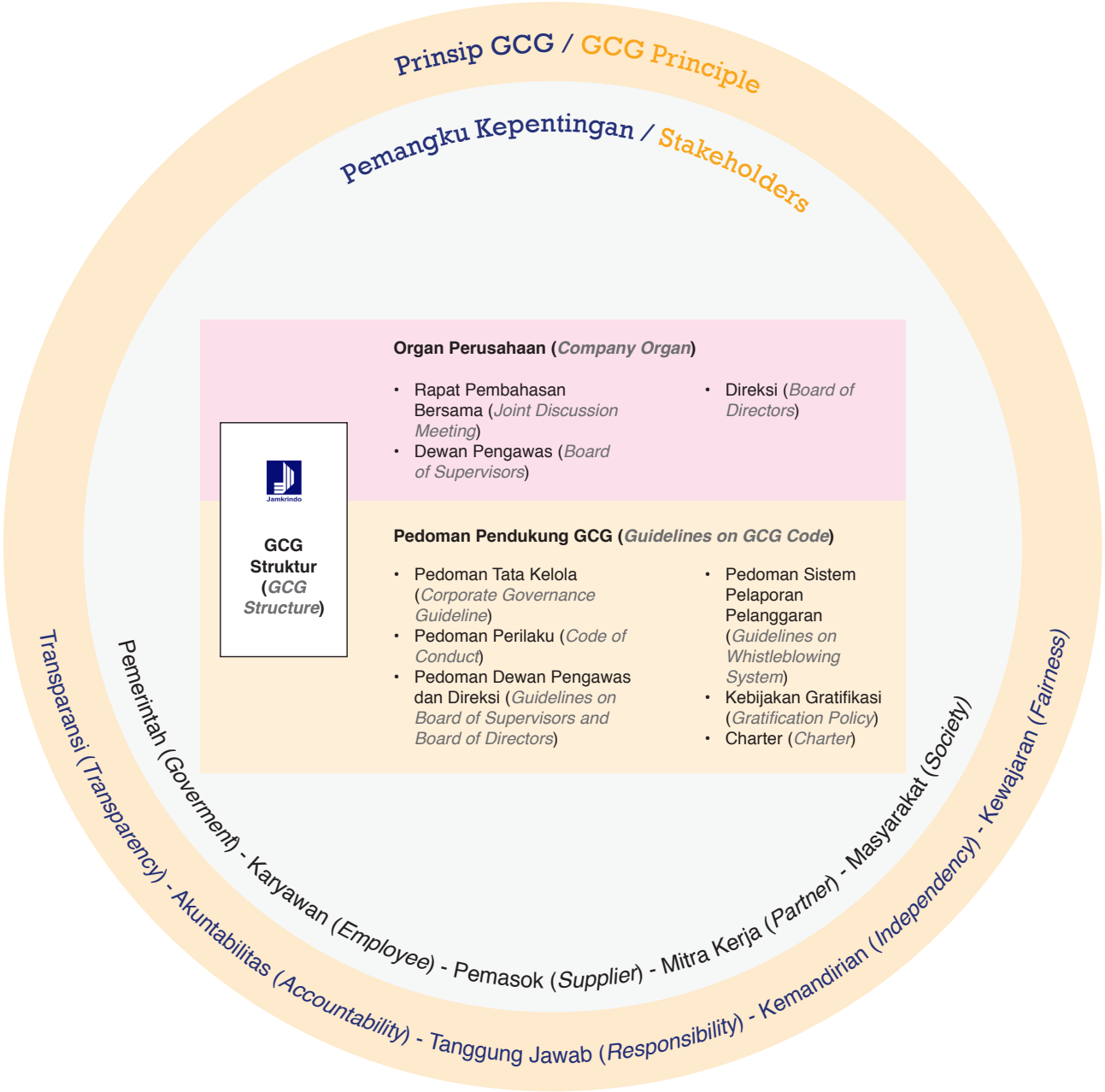
Gambar 4.1. Prinsip-prinsip GCG

Picture 4.1 GCG Principles

Transparansi *Transparency*	Akuntabilitas *Accountability*	Tanggung Jawaban *Responsibility*	Independensi *Independency*	Kewajaran *Fairness*
Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan serta informasi material dan relevan mengenai Perusahaan. Transparency in the process of decision-making as well as material and relevant information about the Company	Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. The clarity of function, implementation, and responsibility of organ, thus Company management is conducted effectively.	Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat memelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *Good Corporate Citizen*. The Company complies to the laws and regulations as well as conducts its responsibility to the society and environment to maintain long-term business continuity and receive acknowledgement as good corporate citizen.	Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. The Company is managed professionally without any conflict of interest or intervention from any party in accordance with the prevailing laws and healthy corporation principles.	Perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak Pemegang Saham dan *Stakeholders*, baik yang timbul karena perjanjian maupun peraturan perundang-undangan uang berlaku serta kebijakan Perusahaan. Equal treatment in fulfilling shareholders and stakeholders rights, both from an agreement and prevailing laws as well as the Company's policy.

Gambar 4.2. Implementasi Prinsip-prinsip GCG

Picture 4.2. Implementation of GCG Principles



Penerapan GCG berdasarkan kelima prinsip tersebut, tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo Nomor: 88/Kep-Dir/XII/2012, KEP-05/DP-JAMKRINDO/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

GCG implementation based on those 5 (five) principles is reflected on Director and Board of Supervisors Decree No: 88/Kep-Dir/XII/2012, KEP-05/DP-JAMKRINDO/XII/2012 dated December 3, 2012, regarding Guideline of Good Corporate Governance Implementation of Perum Jamkrindo, with the details as follows:

Pemilik Modal **Shareholder**

No.	Prinsip-Prinsip GCG / GCG Principles	Penerapan / Implementation
1.	Transparasi *(Transparency)*	a. Pengungkapan yang jelas mengenai rencana transaksi luar biasa, antara lain *merger*, akuisisi serta penjualan aset Perusahaan dalam jurnlah yang substansional / Transparent explanation regarding extraordinary transaction plan, such as merger, acquisition as well as the Company's asset sale in substantial total. b. Keterbukaan dalam penetapan penghasilan Direksi dan Dewan pengawas / Transparency in Board of Directors and Board of Supervisors' remuneration determination.
2.	Akuntabilitas *(Accountability)*	Pemilik modal mempunyai tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam proses pengelolaan Perusahaan dan memastikan bahwa semua pengelolaan Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku / Shareholder is responsible to monitor implementation of GCG principles in the process of Company management and ensure that all Company managements comply to the prevailing laws.
3.	Pertanggungjawaban *(Responsibility)*	Pemilik modal tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku / Shareholder should not interfere Company operational activity which is a responsibility of Director in accordance with the prevailing laws.
4.	Kemandirian *(Independency)*	Melakukan prosedur yang lazim dalam menetapkan anggota Direksi dan Dewan Pengawas, sehingga mendapatkan orang yang tepat sesuai kualifikasi yang dibutuhkan Perusahaan secara objektif / Conducting a common procedure in determining Board of Directors and Board of Supervisors, so as to have right person in accordance with the qualifications required by the Company objectively.
5.	Kewajaran *(Fairness)*	Pemilik modal berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Perusahaan dari Direksi dan atau Dewan Pengawas / Shareholder reserves the right to receive an explanation related to Company interest from Board of Directors or Board of Supervisors.

Dewan Pengawas **Board of Supervisors**

No.	Prinsip-Prinsip GCG	Penerapan
1.	Transparasi *(Transparency)*	a. Adanya risalah rapat Dewan Pengawas yang menunjukkan dinamika rapat dalam proses pengambilan keputusan / Board of Supervisors' minutes of meeting which shows meeting dynamic in the decision-making process. b. Kehadiran setiap anggota Dewan Pengawas dan pelaksanaan rapat Dewan Pengawas dilaporkan pada Laporan Tahunan Perusahan / Every member of Board of Supervisors' attendance and Board of Supervisorys' meeting are reported in Company Annual Report. c. Remunerasi Dewan Pengawas dilaporkan pada Laporan Tahunan Perusahaan / Board of Supervisors' remuneration is reported in Company Annual Report.
2.	Akuntabilitas *(Accountability)*	a. Dewan Pengawas bertanggungjawab atas pengawasan pelaksanaan strategi Perusahaan dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas serta pemberian nasehat kepada Direksi dalam rangka pengelolaan Perusahaan secara efektif / Board of Supervisors is responsible to supervise Company strategy implementation and oblige the implementation of accountability as well as provide advices to the Board of Directors to manage the Company effectively. b. Pemberdayaan fungsi Dewan Pengawas / Empowerment of Board of Supervisors' function.
3.	Pertanggungjawaban *(Responsibility)*	a. Dewan Pengawas harus mempunyai komitmen untuk menaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas jabatannya / Board of Supervisors shall have a commitment to comply with the laws and regulations related to its duties. b. Dewan Pengawas bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemilik Modal / Board of Supervisors has a responsibility on its duties implementation to the shareholder. c. Dewan Pengawas turut bertanggungjawab terhadap kebenaran Laporan keuangan yang diajukan Direksi kepada Pemilik Modal / Board of Supervisors also has a responsibility to ensure the validity of Financial Statement submitted by the Board of Directors to Shareholder.
4.	Kemandirian *(Independency)*	a. Memberikan pertimbangan yang objektif dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi Perusahaan yang mungkin mengandung potensi terjadinya benturan kepentingan / Providing an objective consideration in solving problems faced by the Company that might create a potential of conflict of interest. b. Dewan Pengawas tidak berwenang membuat keputusan manajemen pengelolaan Perusahaan sehari-hari, seperti keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian karyawan atau penandatanganan kerja sama atau kontrak-kontrak yang bersifat rutin / Board of Supervisors does not have an authority to make company management decision, such as employees appointment and dismissal decision, cooperation signing, or routine contracts.
5.	Kewajaran *(Fairness)*	Dewan Pengawas dalam menjalankan jabatannya akan selalu menerapkan etika bisnis Perusahaan dalam rangka pemenuhan kepentingan *stakeholders* / Board of Supervisors in conducting its duties will always implement the Company's business ethics to fulfill stakeholders interest.

Direksi **Board of Directors**

No.	Prinsip-Prinsip GCG	Penerapan
1.	Transparasi *(Transparency)*	a. Menyediakan Laporan Kegiatan dan Keuangan Perusahaan sebagai alat bantu untuk mengungkapkan transaksi keuangan dan kinerja Perusahaan kepada *stakeholder* secara transparan / Preparing an activity report and financial statement of the Company as a tool to help disclosing financial transaction and Company performance to the stakeholders transparently. b. Mengungkapkan informasi dan Laporan Keuangan Perusahaan diantaranya disajikan melalui *website* Perusahaan / Providing an information and financial statement presented in the Company's website. c. Mengungkapkan gaji dan penghasilan lain Direksi pada Laporan Tahunan / Disclosing salary and other income of Board of Directors in Annual Report.
2.	Akuntabilitas *(Accountability)*	a. Direksi harus mampu menempatkan urutan prioritas dalam upaya pemenuhan kepentingan *stakeholder* / The Board of Directors should be able to place priority order in fulfilling stakeholder interest. b. Direksi membangun dan menetapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang efektif sehingga dapat mengamankan aset Perusahaan / The Board of Directors builds and determines effective Internal Control System in order to safeguard the Company's assets. c. Direksi memberdayakan peran dan fungsi SPI sebagai mitra strategis manajemen / The Board of Directors empowers Internal Control System role and function as management strategic partner. d. Direksi harus memastikan bahwa SPI memiliki akses terhadap informasi mengenai Perusahaan yang perlu untuk dapat melaksanakan tugasnya / The Board of Directors should ensure that Internal Control System has Company infomation access to conduct its duties.
3.	Pertanggungjawaban *(Responsibility)*	a. Direksi harus mempunyai komitmen untuk menaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan operasional Perusahaan / The Board of Directors should have a commitment to comply with the laws and regulations related to the Company's operations. b. Direksi bertanggungjawab terhadap materi yang disajikan pada Laporan Keuangan / The Board of Directors is responsible for the material presented in Financial Statement. c. Direksi bertanggungjawab terhadap pengungkapan informasi Laporan Keuangan pada media publikasi nasional sehingga dapat diakses oleh *stakeholder* / The Board of Directors is responsible for the disclosure of Financial Statement to the national publication media in order to be easily accessed by stakeholders.
4.	Kemandirian *(Independency)*	Komposisi Direksi harus memungkinkan Direksi dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lainnya / The Board of Directors composition should enable the Board to act independently which means that the Board does not have any interest that might interfere its ability in conducting its duties independently and critically.

No.	Prinsip-Prinsip GCG	Penerapan
5.	Kewajaran *(Fairness)*	a. Penerapan sistem *reward* dan *punishment* yang memadai agar setiap karyawan memperoleh rasa keadilan dikaitkan dengan keberhasilan dalam pencapaian kinerja / An adequate reward and punishment system implementation so every employee receives a sense of fairness related to their success in their performance achievement. b. Menerapkan etika bisnis Perusahaan dalam rangka pemenuhan kepentingan *stakeholder* / Implementation of Company business ethics to fulfill stakeholders' interest.

MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam forum Rapat Pembahasan Bersama (RPB), para Pemilik Modal dapat melakukan pengambilan keputusan penting berkaitan dengan investasi yang telah ditanamkan di Perusahaan. Keputusan yang diambil dalam RPB didasarkan pada kepentingan Perusahaan. RPB atau Pemilik Modal tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RPB untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan. Dengan kedudukan yang setara, para Pemilik Modal akan mempertimbangkan dengan seksama keputusannya demi kepentingan jangka panjang Perusahaan. Setelah keputusan diambil, maka RPB kemudian akan menyerahkan segala kewenangan pengawasan dan pelaksanaan keputusan tersebut kepada Dewan Pengawas dan Direksi. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengelolaan Perusahaan dan pelaksanaan atas setiap keputusan RPB tersebut dilakukan oleh Direksi. Dewan Pengawas kemudian melakukan pengawasan dan memberikan nasihat untuk memastikan bahwa tujuan Perusahaan serta keputusan RPB tersebut dilaksanakan secara optimal dan dicapai maksimal. Dengan tugas dan tanggung jawab yang sedemikian besar dalam menjaga keberlangsungan Perusahaan, Dewan Pengawas dibantu oleh Komite Penunjang sedangkan Direksi dibantu oleh unit kerja yang terkait dengan mekanisme tata kelola tersebut.

MECHANISM OF CORPORATE GOVERNANCE

In Joint Discussion Meeting (RPB), shareholders can make an important decision related to the investment invested in the Company. Decision made in RPB is based on the Company'a interest. RPB or shareholder can not interfere Board of Supervisors and Board of Directors' duties, functions, and authority by not reducing the authority of RPB to conduct its rights in accordance with Article of Association as well as laws and regulations. With an equal position, shareholders will consider their decisions for the Company's long-term interest. After the decision is made, RPB later will give their supervision authorities and decision implementation to Board of Supervisors and Board of Directors. It is in line with Company's Article of Association and the prevailing laws and regulations.

Company managements and every RPB decision implementation are conducted by the Board of Directors. Board of Supervisors supervises and provides an advice to ensure that the Company's objective as well as RPB's decision have been conducted optimally and maximally. With a duty and responsibility in maintaining the continuity of Company, Board of Supervisors is assisted by Supporting Committee, while the Board of Directors is assisted by working unit related to the mechanism of governance.

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Proses GCG merupakan cara atau mekanisme yang dilakukan oleh perusahaan dan manajemen dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud dari komitmen, struktur GCG, sistem dan prosedur yang telah disusun oleh Perusahaan bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan melalui pengelolaan perusahaan yang profesional secara efektif dan efisien.

Perum Jamkrindo memiliki *Roadmap* dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG guna mencapai *Good Corporate Citizen* dengan mekanisme di bawah ini:

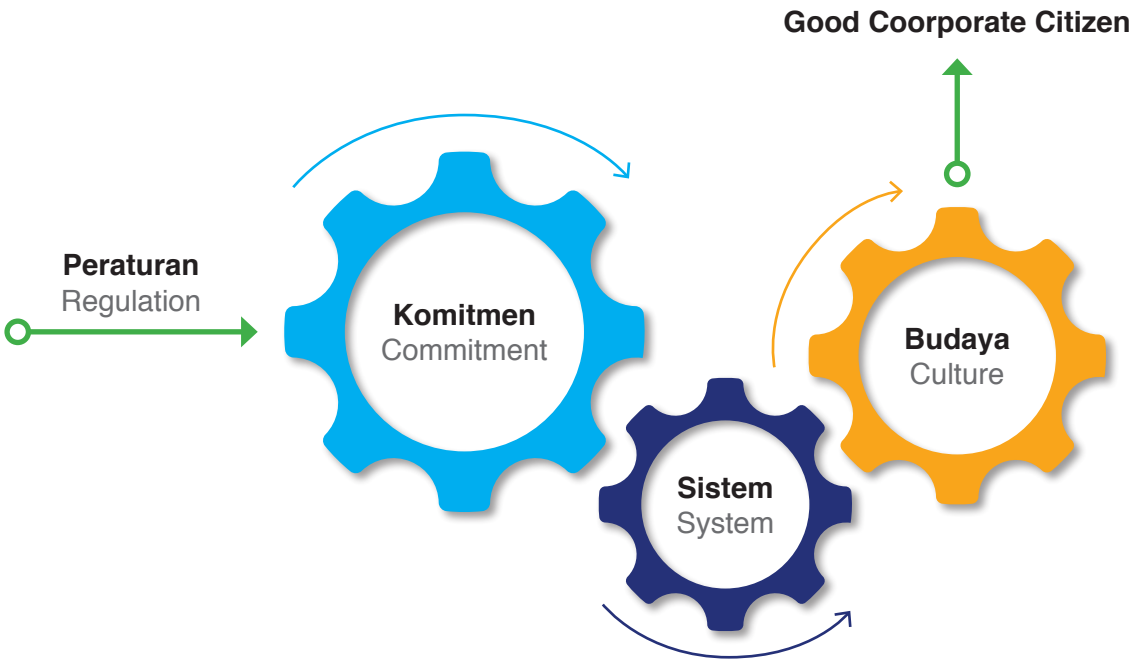
Gambar 4.2. *Roadmap* GCG

ROADMAP OF CORPORATE GOVERNANCE

GCG process is a mechanism conducted by the Company and management in implementing GCG principles to conduct the function and duties in accordance with the prevailing laws. A form of commitment, GCG structure, system and procedure prepared by the Company aim to create added value for the stakeholders through professional Company management effectively and efficiently.

Perum Jamkrindo has a roadmap in implementing GCG principles to achieve Good Corporate Governance with the mechanism below:

Picture 4.2 GCG Roadmap



1. Komitmen

   Dalam penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut, seluruh Insan Perusahaan berkomitmen untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta yang berlaku umum. Dukungan dari manajemen memberikan peran besar dalam menentukan arah dan tujuan penerapan GCG

1. Commitment

   In implementing GCG principles, every individual of the Company commits to comply all prevailing laws and regulations, as well as best practice. Support from the management plays an important role in determining direction and objective of GCG implementation in Perum Jamkrindo. In its practice, Perum Jamkrindo



di Perum Jamkrindo. Dalam praktiknya, Manajemen Perum Jamkrindo menjadi contoh bagi karyawan untuk terus berkomitmen dalam penerapan GCG yang berkelanjutan. Perum Jamkrindo akan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap proses bisnis dan melakukan penyempurnaan perangkat pendukung GCG.

2. Sistem

Dalam mendukung komitmen GCG yang berkelanjutan di Perum Jamkrindo, maka diperlukan sistem operasional perusahaan yang dapat bekerja secara efektif dan efisien melalui kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, sistem pengendalian internal yang memadai dan pengelolaan manajemen risiko yang baik serta penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang efektif.

management becomes an example for employees to always commit in the sustainable GCG implementation. Perum Jamkrindo will implement GCG principles in every business process and enhance GCG supporting instrument.

2. System

To support sustainable GCG commitment in Perum Jamkrindo, the Company requires the Company's operational system that can perform effectively and efficiently through the compliance to the prevailing laws, internal control system and good risk management as well as an effective whistleblowing system implementation.

3. Budaya

Nilai-nilai budaya Perum Jamkrindo merupakan landasan bagi Insan Perusahaan dalam bekerja agar lebih jelas dan terstruktur. Dalam rangka penerapan GCG Perum Jamkrindo, maka seluruh Insan Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai budaya perusahaan yang selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

3. Culture

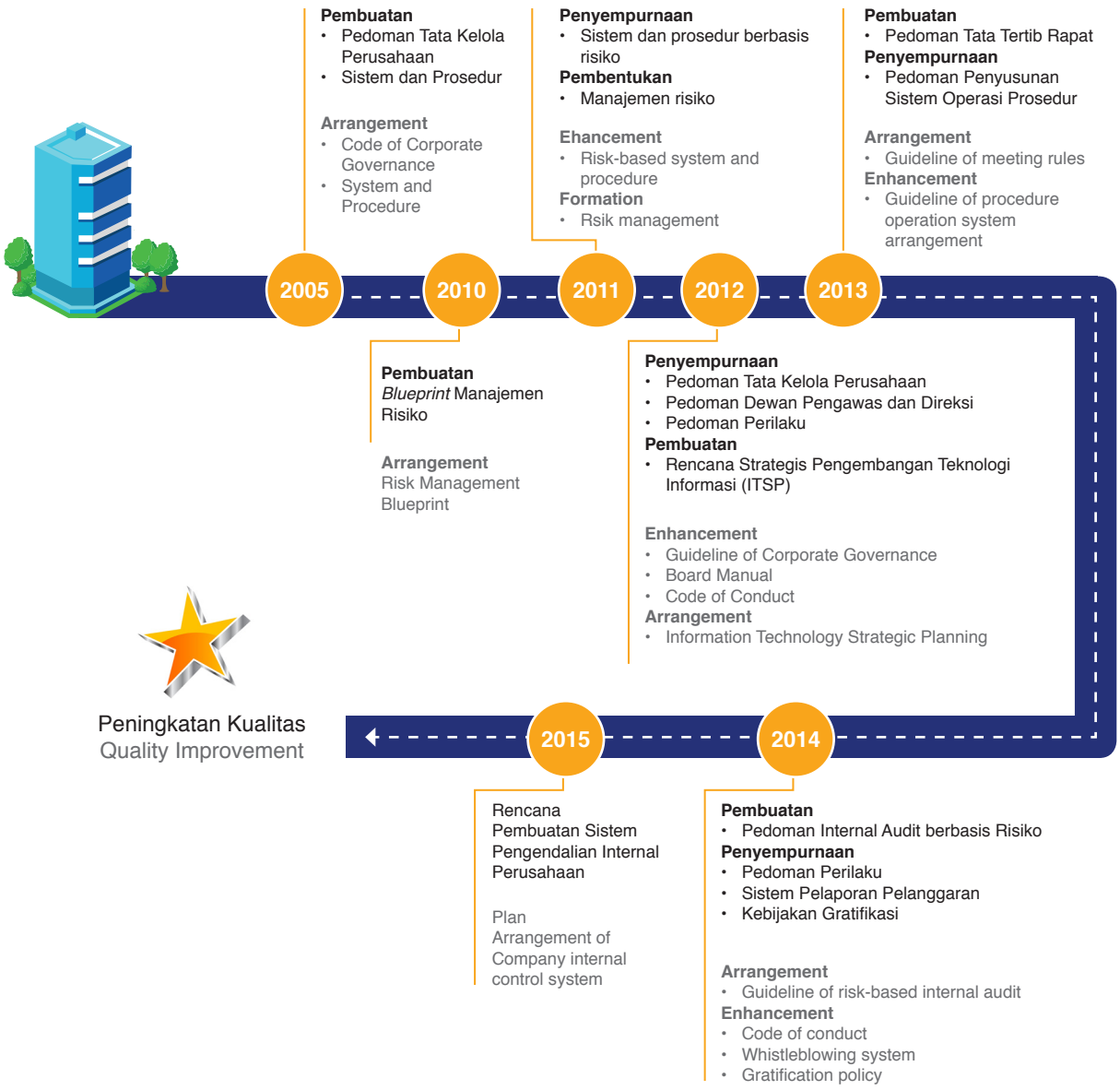
Culture value of Perum Jamkrindo is a reference for every individual of the Company in conducting their duties to be clearer and more structured. To implement Perum Jamkrindo GCG, every individual of the Company commits to implement Company value which is in line with GCG principles.

IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN

Gambar 4.3. Implementasi GCG Perum Jamkrindo

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Picture 4.3. Implementation of Perum Jamkrindo GCG

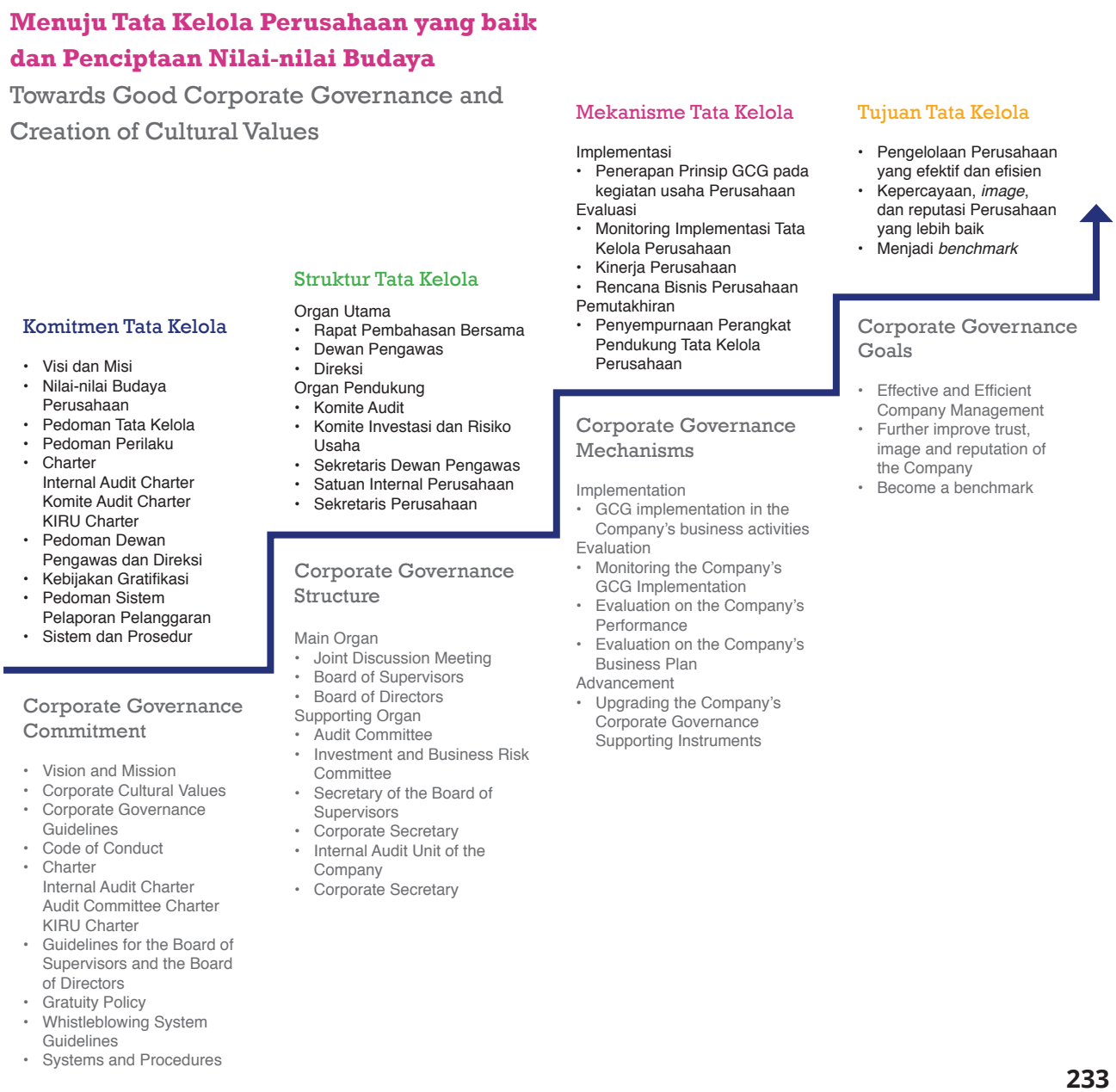


Tujuan implementasi GCG yang dilakukan Perum Jamkrindo adalah untuk menjadi Perusahaan Penjaminan yang memberikan nilai bagi para pemangku kepentingan melalui pengelolaan Perusahaan yang efektif dan efisien dengan menciptakan nilai-nilai budaya sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan, membangun citra Perusahaan (*brand image)* dan reputasi Perusahaan yang baik serta *benchmark* bagi perusahaan sejenis lainnya sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

The goal of GCG implementation by Perum Jamkrindo is to become a Guarantee Company that can give value to the stakeholders through an effective and efficient corporate governance in order to create cultural values so that it can ultimately increase the level of trust, build the Company's image (brand image) and the Company's good reputation as well as turning the Company to become a benchmark for other similar companies as described below:

Gambar 4.4. Tujuan Implementasi GCG Perum Jamkrindo

Image 4.4 Goal of GCG Implementation by Perum Jamkrindo



PENGUKURAN IMPLEMENTASI PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam rangka mengukur implementasi praktik GCG pada Perusahaan, maka dibentuklah Tim Pemantau Penerapan GCG yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 183/Kep-Dir/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014. Tujuan dibentuknya Tim tersebut yaitu guna memastikan Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaannya.

Tugas dan tanggung jawab Tim Pemantau Penerapan GCG adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GCG.
2. Melakukan koordinasi terhadap perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi hasil *assessment* GCG tahun 2013.

Hasil pemantauan serta evaluasi penerapan GCG pada Perum Jamkrindo selama 2014 adalah sebagai berikut:

1. Tim Evaluasi Penerapan GCG (*Self Assessment*) telah melaporkan Laporan Hasil *Assessment* GCG Tahun 2013 pada Perum Jamkrindo kepada Dewan Pengawas dengan nomor surat 1602/P/I/IV/2014 tanggal 28 April 2014 dan Kementerian BUMN dengan nomor surat 2184/P/I/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014

2. Telah dilakukan beberapa perbaikan dan penyempurnaan perangkat GCG sesuai dengan rekomendasi Hasil *Self Assessment GCG* Tahun 2013 dan Hasil *Assessment GCG* Tahun 2012 meliputi :
   a. Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Nomor: 121/Kep-Dir/VI/2014 Tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.
   b. Surat Edaran No. 19/SE/4/IX/2014 Perihal Kebijakan Pengendalian Gratifikasi di Perum Jamkrindo, sebagai peningkatan pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Perum Jamkrindo.
   c. Surat Edaran No. 16/SE/4/IX/2014 Perihal Penjelasan Tambahan Untuk Etika Perusahaan Dengan Karyawan (Peningkatan Implementasi

CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION MEASUREMENTS

In measuring GCG implementation in the Company, the Company establish the GCG Implementation Monitoring Team as set out in the Decision of the Board of Directors No. 183/Kep-Dir/VIII/2014 dated August 18, 2014. The purpose of the establishment of the Team is to ensure that the Company has implement GCG principles in its management.

Duties and Responsibilities of the GCG Implementation Monitoring Team are as follows:

1. Monitoring and evaluating the implementation of GCG

2. Coordinating the follow-up development based on recommendation of GCG assessment results in 2013.

GCG implementation monitoring and evaluating results of Perum Jamkrindo throughout 2014 are as follows:

1. GCG Implementation Evaluating Team (Self Assessment) has reported the result of GCG Assessment of Perum Jamkrindo in 2013 to the Board of Supervisors through letter no. 1602/P/I/IV/2014 dated April 28, 2014 and to the Ministry of State Owned Enterprises through letter no. 2184/P/I/VI/2014 dated June 11, 2014
2. Repairs and Improvement of GCG instruments has been carried out in accordance with the recommendation of GCG Self Assessment Results in 2013 and GCG Assessment Results in 2012, which includes:
   a. Decision of the Board of Directors of Perum Jamkrindo No. 121/Kep-Dir/VI/2014 on the Whistleblowing System Guidelines of Perum Jamkrindo.
   b. Circular Letter No. 19/SE/4/IX/2014 Concerning Gratuity Control Policy in Perum Jamkrindo, as an effort to improve the implementation of Good Corporate Governance in Perum Jamkrindo
   c. Circular Letter No. 16/SE/4/IX/2014 Concerning Additional Explanation on Corporate Ethics toward Employees (Improvement of KPKU Implementation

KPKU Kategori Fokus Tenaga Kerja), sebagai pelengkap dalam Pedoman *Code of Conduct.*

3. Telah melakukan sosialisasi GCG pada 9 Kantor Cabang yaitu Wilayah 1 - Kantor Cabang Jakarta, Khusus Jakarta, Bandung, Palembang, Wilayah 2 - Kantor Cabang Surabaya, Denpasar, Palangka Raya, Banjarmasin, Yogyakarta dan Wilayah 3 - Makassar.
4. Sarana/Media Pelaporan *Whistle Blowing System (WBS)* telah disediakan berupa *Email,* Kotak Surat, dan Pengiriman Langsung maupun melalui Pos.
5. Tim Pemantau Penerapan *Good Corporate Governance* (*GCG*) dibentuk sesuai dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Nomor 183/Kep-Dir/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014.
6. Perjanjian Kerja Bersama telah ditandatangani antara Perum Jamkrindo dan Serikat Karyawan Perum Jamkrindo sesuai PKB Nomor 88/Jamkrindo/IX/2014;01/SKJ/PKB/IX/2014 pada tanggal 3 September 2014.
7. Pelaksanaan *Assessment GCG* Perum Jamkrindo Tahun 2014 dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang, dan Ali sebagai *Assessor*.
8. Tim Pendamping/*Counterpart Assessment* Penerapan *Good Corporate Governance* (*GCG*) Tahun 2014 telah dibentuk sesuai Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Nomor 2 30/Kep-Dir/XI/2014 tanggal 20 November 2014.
9. Telah ditetapkannya Pedoman Audit Internal Berbasis Risiko (*Risk Based Internal Audit*) Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dalam Peraturan Direksi Nomor 45/Per-Dir/XII/2014.

ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dasar Pelaksanaan *Assessment*

Dasar pelaksanaan *assessment* atas penerapan GCG Perum Jamkrindo pada 2014 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/ MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

for the Category of Workforce Focus), as a complement in the Code of Conduct Guidelines.

3. Has conducted socialization of GCG to 9 Branch Offices in Area 1 - Branch office in Jakarta, Jakarta Special, Bandung, Palembang, Area 2 - Branch Office in Surabaya, Denpasar, Palangka Raya, Banjarmasin, Yogyakarta and Area 3 - Makassar.
4. Procurement of Whistle Blowing System (WBS) Facility/ Media through Email, Mailbox, and Direct Delivery or by Postal service.
5. GCG Implementation Monitoring Team has been established in pursuant to the Decision of the Board of Directors of Perum Jamkrindo No. 183/Kep-Dir/ VIII/2014 dated August 18, 2014.
6. Perum Jamkrindo has signed a Joint Working Agreement (PKB) with Perum Jamkrindo Workers Union in accordance to PKB No. 88/Jamkrindo/IX/2014;01/SKJ/PKB/ IX/2014 on September 3, 2014.
7. Execution of GCG Assessment in Perum Jamkrindo in 2014 was conducted by the Public Accounting Firm of Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang, and Ali as the Assessor.
8. Counterpart Assessment of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in 2014 has been established in pursuant to the Decision of the Board of Directors of Perum Jamkrindo No. 230/Kep-Dir/XI/2014 dated November 20, 2014.
9. Stipulation of Risk Based Internal Audit Guidelines for Perum Jamkrindo in the Board of Directors Regulation No. 45/Per-Dir/XII/2014.

CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION ASSESSMENT

Basis of Assessment

The basis of assessment of the implementation of GCG practices in Perum Jamkrindo refers to the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-01/ MBU/2011 dated August 1, 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in State-Owned Enterprises as amended by the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-09/

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 dan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Tujuan *Assessment*

Tujuan pelaksanaan penilaian *(assessment)* atas penerapan GCG pada Perum Jamkrindo mengacu pada Surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012, adalah:

1. Mengukur kualitas penerapan GCG perusahaan melalui evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan pada Perum Jamkrindo, melalui pemberian skor atau nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapannya.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG perusahaan, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria GCG dan penerapan pada Perum Jamkrindo.
3. Memonitor konsistensi penerapan GCG pada Perum Jamkrindo dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan *corporate governance* di lingkungan perusahaan.

Periode *Assessment*

Pelaksanaan *Assessment GCG 2014* dilakukan mulai 3 November 2014 sampai dengan 2 Januari 2015

Tahapan Pelaksanaan *Assessment*

Tahapan penilaian GCG di Perusahaan telah dilaksanakan sebagai berikut:

a. Pertemuan Pendahuluan (*kick-off meeting*)
   Pertemuan pendahuluan dan diskusi dengan manajemen untuk mempersiapkan hal-hal yang bersifat teknis sehubungan dengan pelaksanaan penilaian.

b. Kajian Dokumen
   Penilai melakukan kajian berbagai dokumen perusahaan yang diperlukan seperti Manual Akuntansi, Kontrak Manajemen Tahun 2014, Annual Report, RKAP, Pedoman GCG (*Board Manual*, GCG, CoC),

MBU/2012 dated July 6,2012 and by the decision of the Secretary of the Ministry of State Owned Enterprise No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 on indicators/ parameters of Assessment and Evaluation on the implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

Assessment Purposes

Purposes of assessment on GCG practices in Perum Jamkrindo refer to the Letter of the Secretary of the Ministry of State Owned Enterprise No. SK-16/S.MBU/2012, which are to:

1. Measure the quality of the implementation of GCG in the Company through evaluation on the level of compliance to the criteria of GCG as applied in Perum Jamkrindo, through scoring/grading on the implementation of GCG and the category of implementation quality.
2. Identify strengths and weaknesses of the Company's GCG implementation, as well as to propose recommendations for improvement to reduce the gap between criteria of GCG and the practical implementation in Perum Jamkrindo.
3. Monitor the consistency of GCG implementation of Perum Jamkrindo and to obtain input for the improvement and development of corporate governance policies in the corporate environment.

Assessment Period

The period of GCG implementation in 2014 was started from November 3, 2014 and ended on January 5, 2015.

Phases of Assesment Implementation

Phases of assessment on GCG implementation in the Company have been carried out as follows:

a. Kick-Off Meeting
   Kick-off meeting and discussion with the management to prepare for technical matters in regard to evaluation.

b. Document Review
   The assessors conduct a study on various company documents needed such as Accounting Manual, Management Contract Year 2014, Annual Report, RKAP, GCG Guidelines (Board Manual, GCG, CoC),

Struktur Organisasi, Uraian Pekerjaan Jabatan, Manual Prosedur Sistem Informasi, Laporan Hasil *Self Assessment* GCG Tahun 2013, Laporan Manajemen, Risalah RPB, Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2014, Risalah RPB RKAP 2014, Laporan Auditor Independen Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2014, Laporan Auditor Independen Atas Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern Tahun 2013, Laporan Keuangan Tahun 2014, Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2014, Laporan Evaluasi Kinerja Tahun 2014, Keputusan Dewan Pengawas RKAP Tahun 2014, Anggaran Dasar Perusahaan Tahun 2008, *Audit Charter, Audit Committee Charter*, RJPP 2014-2018, Risalah Rapat Direksi, Risalah Rapat Dewan Pengawas.

Organizational Structure, Description of Working Position, Information System Procedure Manual, Report on the GCG Self Assessment Results Year 2014, Management Report, Minutes of RPB, Company Management Report Year 2014, Minutes of RPB RKAP 2014, Report of Independent Auditor on the Compliance to the 2014 Legislation, Financial Statement Year 2014, Financial Statement of Partnership & Environment Development Program Year 2014, Decision of RKAP Board of Supervisors Year 2014, Company's Authorized Capital in Year 2008, Audit Charter, Audit Committee Charter, RJPP 2014-2018, Minutes of Meeting of the Board of Directors, Minutes of Meeting of the Board of Supervisors.

c. Penyebaran Kuisioner

Kuisioner disusun dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada parameter-parameter dalam kerangka acuan pelaksanaan penilaian penerapan GCG. Kuisioner disampaikan kepada responden untuk dilengkapi/diisi dan ditandatangani, selanjutnya disampaikan kepada penilai responden meliputi Kementerian BUMN, Dewan Pengawas, Direksi, serta pejabat satu tingkat di bawah Direksi.

c. Questionnaire Distribution

The questionnaire includes questions regarding parameters of the terms of reference of GCG implementation assessment. The questionnaire are distributed to the respondents to be filled/answered and signed, to be sent to the respondent assessor including the Ministry of State Owned Enterprises, the Board of Supervisors, the Board of Directors, and the officials one level below the Board of Directors

d. Wawancara

Berdasarkan hasil kuisioner dan kajian dokumen, penilai melakukan wawancara untuk melengkapi dan mengonfirmasikan informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Wawancara dilakukan terhadap Kementerian BUMN, Dewan Pengawas, Direksi, dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi.

d. Interview

Based on the results of questionnaire and document review, the assessors conduct interviews to complement and to confirm the information obtained before. The interview is conducted with the Ministry of State Owned Enterprises, the Board of Supervisors, the Board of Directors, and the officials one level below the Board of Directors.

e. Analisis dan Penyusunan Draf Laporan

Berdasarkan informasi yang diperoleh, penilai melakukan pengisian Kertas Kerja Penilaian dan memberikan penilaian. Kertas Kerja tersebut menjadi dasar penyusunan draf laporan untuk disampaikan kepada pihak Perusahaan. Format laporan disusun sesuai Kerangka Acuan Pelaksanaan Penilaian dari Kementerian BUMN.

e. Analysis and Formulation of the Draft Report

Based on the information obtained, the assessor fills in the Assessment Working Paper and gives its assessment. The Working Sheet then becomes the basis of the formulation of the draft of the report to be submitted to the Company. The format of the report is arranged in accordance to the Terms of Reference of Assessment from the Ministry of State Owned Enterprise.

f. Pembahasan Draft Laporan
Setelah penilai menyerahkan draf laporan hasil penilaian, maka selanjutnya dilakukan pembahasan dengan tim counterpart dari Perusahaan. Hasil pembahasan ini menjadi pertimbangan penilai untuk melakukan revisi yang dianggap perlu sebagai bahan penyusunan Laporan Akhir.

g. Penyampaian Laporan Akhir
Berdasarkan hasil pembahasan dengan pihak Perusahaan, Penilai melakukan revisi untuk selanjutnya disusun Laporan Akhir. Laporan Akhir disampaikan kepada Dewan Pengawas, Direksi, dan Pemilik Modal.

f. Discussion on Draft Report
After the assessor submits the draft of the valuation report, the report will be discussed along with the Company's counterpart team. The result of discussion will be considered by the assessor to conduct necessary revision to be used as a material for the preparation of the Final Report.

g. Presenting the Final Report
Based on the discussion with the Company, the assessor will conduct revision of the draft to prepare Final Report. The Final Report is delivered to the Board of Supervisors, the Board of Directors, and to the shareholders.

Pelaksanaan *Assessment* GCG

Perum Jamkrindo senantiasa memastikan bahwa sistem GCG yang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG, selama 2014 Perum Jamkrindo melakukan penilaian atau evaluasi atas penerapan GCG yaitu:

1. Pelaksanaan *review* atas penerapan GCG Tahun 2013 secara *self assesment* yang dilakukan Tim Evaluasi Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan memperolah skor 90,084 dengan klasifikasi peringkat kualitas penerapan GCG "Sangat Baik". Tim tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 10/Kep-Dir/II/2014 tanggal 5 Februari 2014.
2. Pelaksanaan *assesment* atas penerapan GCG Tahun 2014 yang dilakukan oleh *assessor* independent yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali dengan capaian skor 91,42 dengan klasifikasi peringkat kualitas penerapan GCG "Sangat Baik". Untuk memperlancar pelaksanaan *assessment* tersebut telah dibentuk Tim Pendamping/ *Counterpart Assessment* Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor: 230/Kep-Dir/XI/2014 tanggal 20 November 2014.

GCG Assessment Implementation

Perum Jamkrindo always ensure that the GCG system runs in accordance with the provisions of the applicable legislation. To improve the quality of GCG implementation, throughout 2014 Perum Jamkrindo has performed assessment or evaluation on the quality of GCG implementation, which includes:

1. Review on GCG implementation in 2013 through self assessment conducted by the Good Corporate Governance (GCG) Implementation Evaluation Team; the Company achieved the score of 90.084 with the classification of "Excellent". The team was established based on the Decision of the Board of Directors No. 10/ Kep-Dir/II/2014 dated February 5, 2014.
2. Assessment on the GCG implementation in Year 2014 done by the independent assessor, namely the Public Accounting Firm of Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang and Ali; the Company reached the score of 91.42 with the clasification of "Excellent". In order to facilitate the assessment, a Counterpart Assessment Team on the Implementation of GCG was established in 2014 in pursuant to the Decision of the Board of Directors No. 230/Kep-Dir/XI/2014 dated November 20, 2014.

Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG

Assessor menetapkan klasifikasi peringkat kualitas penerapan GCG baik indikator, aspek maupun keseluruhan, berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Classification of GCG Implementation Quality

The assessor determines the classification of GCG implementation quality based on the indicators, aspects or overall quality, with the following criteria:

Tingkat / Grade	Capaian / Achievement	Peringkat / Rate
1	Nilai di atas 85 / Value above 85	Sangat Baik / Excellent
2	75 < Nilai ≤ 85 / 75 < Value ≤ 85	Baik / Good
3	60 < Nilai ≤ 75 / 60 < Value ≤ 75	Cukup Baik / Fair
4	50 < Nilai ≤ 60 / 50 < Value ≤ 60	Kurang Baik / Poor
5	Nilai ≤ 50 / Value ≤ 50	Tidak Baik / Very Poor

Penilaian GCG 2014

Adapun hasil penilaian atau evaluasi GCG Perum Jamkrindo dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

GCG 2014 Assessment

Results of assessment or evaluation on GCG of Perum Jamkrindo can be summarized as follows:

Aspek / Aspect		Bobot / Weight	2014		2013	
			Nilai / Score	Pencapaian / Achievement (%)	Nilai / Score	Pencapaian / Achievement (%)
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan / Commitment on sustainable implementation of Good Corporate Governance	7,00	6,95	99,35	6,361	90,862
II	Pemegang Saham dan RPB/Pemilik Modal / Shareholders and GMS/Owners of Capital	9,00	8,12	90,19	8,463	94,039
III	Dewan Pengawas / Board of Supervisors	35,00	31,59	90,26	31,308	89,453
IV	Direksi / Board of Directors	35,00	32,93	94,09	32,312	92,319
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi / Information and Transparency Disclosure	9,00	7,91	87,90	7,890	87,663
VI	Aspek Lainnya / Other Aspects	5,00	4,00	80,00	3,750	75,000
SKOR KESELURUHAN / TOTAL SCORE		**100,00**	**91,51**	**91,51**	**90,084**	**90,084**
KLASIFIKASI PERINGKAT KUALITAS PENERAPAN GCG / CLASSIFICATION OF GCG IMPLEMENTATION QUALITY RANK			**SANGAT BAIK / EXCELLENT**		**SANGAT BAIK / EXCELLENT**	

Hasil *assessment* diharapkan dapat menjadi landasan untuk peningkatan dan perbaikan penerapan praktik GCG di Perum Jamkrindo. Selanjutnya, penerapan praktik GCG tersebut juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mendorong pengelolaan Perusahaan secara transparan, profesional, dan efisien sehingga dapat meningkatkan nilai

The results of the assessment are expected to be the basis for enhancement and improvement of GCG practices in Perum Jamkrindo. Furthermore, the implementation of GCG practices is also expected to provide benefits to encourage a transparent, professional, and efficient Company management in order to increase the value of the

Perusahaan dalam bentuk *trend* kinerja Perusahaan yang tinggi (*high performance*), dan citra Perusahaan yang baik (*good corporate image*), serta kepercayaan *stakeholders* (pengguna jasa, karyawan, dan masyarakat secara keseluruhan) terhadap Perum Jamkrindo.

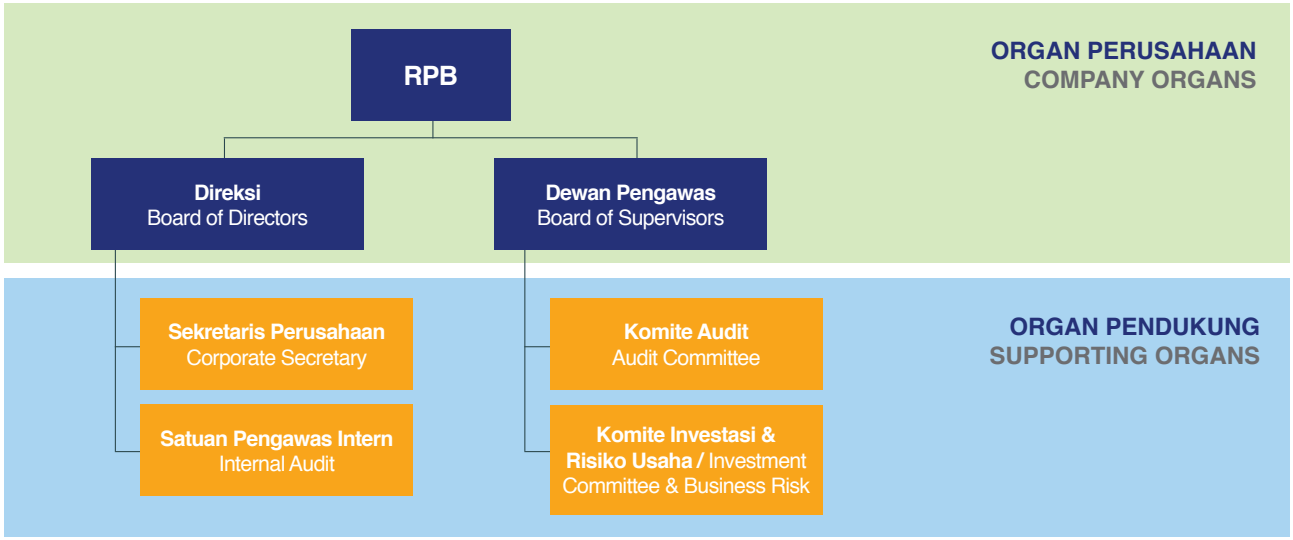
Company in the terms of a high performance trend, and a good corporate image, as well as the trust of stakeholders (service users, employees, and society as a whole) towards Perum Jamkrindo.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur tata kelola perusahaan memiliki peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan GCG. Fungsi dari organ-organ Perusahaan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan, dan ketentuan lainnya yang didasari prinsip independensi bagi setiap organ untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab. Berikut adalah struktur GCG di Perum Jamkrindo:

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

Corporate governance structure still plays a significant role in succeeding the implementation of GCG. Functions of the Company's organs are executed in accordance to the applicable legislation, Articles of Association of the Company, and other provisions based on the principle of independency for all organs to fulfill their duties, functions, and responsibilities. Below is the structure of GCG in Perum Jamkrindo:



RAPAT PEMBAHASAN BERSAMA (RPB)

Rapat Pembahasan Bersama (RPB) merupakan organ perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

JOINT DISCUSSION MEETING (RPB)

Joint Discussion Meeting (RPB) are the Company's organ which has the authority not granted to the Board of Directors or the Board of Supervisors, of which the limitation is determined in the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 41 Year 2008 concerning Perum Jamkrindo.

Perum Jamkrindo merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di Bidang Penjaminan Kredit yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, dan oleh karenanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 41 Tahun 2008 bahwa Pertanggungjawaban Pengelolaan Perusahaan disampaikan oleh Direksi kepada Pemerintah melalui Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemilik modal pada Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perum Jamkrindo is a State Owned Enterprise operating in the business field of Credit Guarantee where all of its capitals are owned by the state. This refers to the country's assets separated and not divided by share. Thus, in accordance with Government Regulation No. 41 Year 2008, the responsibility of the Company's management is held by the Board of Directors to the Government through Minister appointed and/or granted authorities to represent the Government as the shareholder in the Company by compliance to the legislation.

Wewenang RPB

Kewenangan RPB (Menteri Negara BUMN) dalam hal ini adalah Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemilik modal pada Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan, antara lain:

1. Penambahan Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya;
2. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan;
3. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah;
4. Menetapkan jumlah anggota Direksi Perusahaan, dan jumlah anggota Dewan Pengawas;
5. Pengesahan Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan;
6. Pengesahan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
7. Memberikan Persetujuan Rancangan perubahan rencana kerja dan anggaran Perusahaan yang telah disahkan, apabila terdapat perubahan rencana kerja dan anggaran Perusahaan;
8. Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan;
9. Pengesahan atas auditor eksternal yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan, dan melakukan pengesahan atas laporan hasil pemeriksaan auditor eksternal dimaksud;
10 Menetapkan alokasi penggunaan laba bersih Perusahaan, termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan;

Authorities of RPB

The authorities of RPB (Minister of State Owned Enterprise), in this regard, the Minister appointed and/or granted authorities to represent the Government as the Company's shareholder by compliance to the legislation, are as follows:

1. Increase in investment of State Capital originated from reserve capitalization and other sources;
2. Ratification of amendment of Articles of Association;
3. Appointment and dismissal of members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Sharia Supervisory Board;
4. Determination of total members of the Board of directors, and total members of Board of Supervisors;
5. Ratification of Draft of Long-Term Corporate Plan;
6. Ratification of Draft of Work Plan and Budget;
7. Approval of change in ratified work plan and company budget, if any;
8. Ratification of the Company's Annual Report;
9. Ratification of external auditor appointed to audit and ratify the result;
10. Determination of allocation of net profit use, including total allocation for reserve;

11. Menetapkan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas;
12. Melakukan penilaian (evaluasi) kinerja Direksi, dan Dewan Pengawas.

Pelaksanaan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) 2014

Pada 2014, Perum Jamkrindo telah menyelenggarakan Rapat Pembahasan Bersama yang dilaksanakan pada 17 April 2014 di Jakarta hasil keputusan sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perusahaan tahun 2013 termasuk di dalamnya laporan keuangan Perusahaan dan laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan serta laporan tugas pengawasan Dewan Pengawas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

   Menyetujui laporan tahunan dan mengesahkan perhitungan tahunan tahun buku 2013 termasuk laporan kegiatan perusahaan dan laporan tugas pengawasan Dewan Pengawas, serta mengesahkan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2013 yang telah diaudit oleh KAP Husni, Mucharam & Rasidi sesuai dengan laporan auditnya Nomor: LAI/PKBL. GA/14005 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

2. Pemberian pelunasan pembebasa tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
   Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2013, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan termasuk laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukan merupakan tindakan pidana.

3. Persetujuan penggunaan laba bersih tahun buku 2013.
   Menetapkan laba bersih sebesar Rp525.209.060.338 sebagai berikut:
   a. dividen Rp105.042.000.000 (20%)

   b. cadangan Rp420.167.060.338 (80%)

11. Determination of salary of the Board of Directors and the Board of Supervisorss;
12. Assessment (evaluation) on the performance of the Board of Directors, and the Board of Supervisors.

Implementation of Joint Discussion Meeting (RPB) 2014

In 2014, Perum Jamkrindo has organized Joint Discussion Meeting which was held on April 17, 2014 in Jakarta with decision result as follows:

1. Approval and ratification of Company's Annual Report 2013, including Company's financial statement and financial statement of Partnership and Community Development Program as well as supervision duty report of Board of Supervisors that ended on December 31, 2013.

   Approving Annual Report and ratifying annual calvulation for fiscal year 2013, including Company's activity report and supervision duty report of Board of Supervisors, as well as ratifying Company's financial statement for fiscal year 2013 that has been audited by KAP Husni, Mucharam & Rasidi in accordance with the audited report No: LAI/PKBL.GA/14005 with unqualified opinion.

2. Providing full release and discharge to the Board of Directors and Board of Supervisors.

   Providing full release and discharge to the Board of Directors and Board of Supervisors for their management and supervision for fiscal year 2013, as long as their actions are explained in annual report, including financial statement, as well as based on the prevailing provision, and not criminal actions.

3. Approval for the use of net profit for fisal year 2013.
   Determining net profit which amounted to Rp525.209.060.338 as follows:
   a. Dividend which amounted to Rp105.042.000.000 (20%)
   b. Reserves which amounted to Rp420.167.060.338 (80%)

4. Penetapan tantiem tahun 2013, gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas tahun buku 2014.

5. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan tahun buku 2014 dan laporan keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan tahun buku 2014.

   Menetapkan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam dan Rasidi, sebagai auditor eksternal untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan tahun buku 2014 dan laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan tahun buku 2014 serta memberikan kuasa kepada Dewan Pengawas untuk menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang ditetapkan tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

4. Determination of bonus, income, and honorarium as well as other allowances for Board of Directors and Board of Supervisory for fiscal year 2014.

5. Appointment of Public Accounting Firm to audit Company's financial statement for fiscal year 2014 and financial statement of Partnership and Community Development Program implementation for fiscal year 2014.

   Re-determining Public Accounting Firm Husni, Mucharam dan Rasidi, as external auditors to audit Company's financial statement for fiscal year 2014 and financial statement of Partnership and Community Development Program for fiscal year 2014 as well as granting the authority to Board of Supervisory to determine Public Accounting Firm Replacement in case the Public Accounting Firm appointed can not continue or conduct its duties because of any reasons based on the prevailing laws and regulations.

Pelaksanaan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) 2013

Pada 2013, Perum Jamkrindo telah menyelenggarakan Rapat Pembahasan Bersama yang dilaksanakan pada 30 April 2013 di Jakarta hasil keputusan dan realisasi sebagai berikut:

Implementation of Joint Discussion Meeting (RPB) 2013

In 2013, Perum Jamkrindo held Discussion of Joint Meeting on April 30, 2013 in Jakarta with decision results and realizations as follows:

No	**Hasil RPB /** RPB Result	**Realisasi /** Realization
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2012 / Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statement for fiscal year 2012	√
2	Persetujuan dan pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2012 / Approval and ratification of Partnership and Environment Development Porgram report for fiscal year 2012	√
3	Pemberian pelunasan dan pembebasan Tanggung Jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Pengawas / Providing full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Supervisory	√
4	Persetujuan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2012 / Approval on the use of net income for fiscal year 2012	√
5	Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas / Bonus determination for the Board of Directors and Board of Supervisory	√
6	Penetapan gaji/honorarium berikut tunjangan dan/atau fasilitas untuk Direksi dan Dewan Pengawas tahun buku 2013 / Determination of income/honorarium as well as allowance and/or facility for the Board of Directors and Board of Supervisory for fiscal year 2013	√

No	Hasil RPB / RPB Result	Realisasi / Realization
7	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2013 / Determination of Public Accounting Firm to audit Company's Financial Statement for fiscal year 2013	√

DEWAN PENGAWAS

Dewan Pengawas dibentuk oleh pemilik saham untuk memberikan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dijalankan oleh Direksi.

Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Pengawas

Dewan Pengawas Perum Jamkrindo berjumlah 5 (lima) orang yang seluruhnya diangkat oleh Menteri BUMN melalui Keputusan Menteri Negara BUMN:

BOARD OF SUPERVISORS

The Board of Supervisors was formed by the shareholders to monitor Company management by the Board of Directors.

Number and Composition of Members of the Board of Supervisors

The Board of Supervisors of Perum Jamkrindo has 5 (five) personnel, which is appointed by the Minister of State Owned Enterprises through Decree of the Minister of State Owned Enterprises:

Dewan Pengawas / Board of Supervisors	Surat Keputusan / Decree
Braman Setyo *)	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-199/MBU/10/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo / Decree of the Minister of State Owned Enterprises (BUMN) as the Shareholder of Perum Jamkrindo No. SK-199/MBU/10/2014 dated October 7, 2014 on the Dismissal and Appointment of the Chairman of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo.
Nasarudin Umar	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-409/MBU/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo, mengangkat Nasaruddin Umar sebagai Anggota Dewan Pengawas / Decree of the Minister of SOE as the Shareholder of Perum Jamkrindo No. SK-409/MBU/2012 dated November 19, 2012 on the Dismissal and Appointment of Member of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo, appointed Nasaruddin Umar as a Member of the Board of Supervisors.
Subandriyo	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-435/MBU/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo / Decree of the Minister of SOE as the Shareholder of Perum Jamkrindo No. SK-435/MBU/2013 dated December 31, 2013 on the Dismissal and Appointment of Member of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo.
Ony Suprihartono	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-435/MBU/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo / Decree of the Minister of SOE as the Shareholder of Perum Jamkrindo No. SK-435/MBU/2013 dated December 31, 2013 on the Dismissal and Appointment of Member of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo.
Dahlan Siamat	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-297/MBU/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo, mengangkat Dahlan Siamat sebagai Anggota Dewan Pengawas / Decree of the Minister of SOE as the Shareholder of Perum Jamkrindo No. SK-297/MBU/2013 dated June 28, 2013 on the Dismissal and Appointment of Member of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo, appointed Dahlan Siamat as a Member of the Board of Supervisors.

*) Perubahan komposisi Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-199/MBU/10/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo.telah dilakukan pergantian Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Choirul Djamhari digantikan oleh Braman Setyo.

*) Change in the composition of the Board of Supervisors In accordance to the Decree of the Minister of SOE as the Investor of Perum Jamkrindo No. SK-199/MBU/10/2014 dated October 7, 2014 on the Dismissal and Appointment of the Chairman of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo. There was a change in the roster of the Chairman of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo. Choirul Djamhari was replaced by Braman Setyo.

Perubahan Kompisisi Dewan Pengawas

Perubahan komposisi Dewan Pengawas per tanggal 31 Desember 2014 telah dilakukan pergantian Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Choirul Djamhari digantikan oleh Braman Setyo.

Change of Composition of the Board of Supervisors

As of December 31, 2014, there was a change in the roster of the Chairman of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo. Choirul Djamhari was replaced by Braman Setyo.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas untuk:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.
2. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan Perusahaan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas dalam rangka menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau bidang teknis operasional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Pengawas berkewajiban untuk melakukan hal-hal berikut:

1. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi.
2. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan.
3. Melaporkan dengan segera kepada Menteri apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.
4. Meneliti dan menelaah Laporan Berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan.
5. Memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Duties and Responsibilities of the Board of Supervisors

The Board of Supervisors is the instrument of the Company in charge of:

1. Monitoring Company management performed by the Board of Directors.
2. Providing input to the Board of Directors regarding the Company's governance.

The monitoring function is performed by the Board of Supervisors in regard to evaluate the Company by comparing the actual condition with the target condition, both in terms of finance or technical operations.

To fulfill the said duties, the Board of Supervisors is required to:

1. Provide input to the Minister regarding Long Term Corporate Plan and Work Plan, and Corporate Budget suggested by the Board of Directors.
2. Keep up with the development of the Company's activities, to give opinion and advice to the Minister regarding problems of concern of the Company's management.
3. Report immediately to the Minister if there are any indicators of decreasing company performance.
4. Examine and review Periodical Report and Annual Report prepared by the Board of Directors, as well as to sign the Annual Report.
5. Monitor and ensure an effective and sustainable implementation of GCG principles.

6. Mengadakan rapat secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan.

6. Hold meeting in a periodical basis, at least once a month.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas

Sesuai Keputusan Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Nomor KEP-24/D4.MBU/2011, tanggal 28 Juli 2011, Tentang Penetapan Penghasilan Tahun 2011 dan Tantiem Tahun Buku 2010 Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, penghasilan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo terdiri dari:

Procedure of Remuneration of the Board of Supervisors

In accordance with the Decree of the Capital Owner of Perum Jamkrindo No. KEP-24/D4.MBU/2011, dated July 28, 2011, on the Salary Determination for 2011 and Tantiem for Fiscal Year 2010 of the Board of Directors and the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo, the salary of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo is composed of:

No	**Uraian /** Type of Salary	**Keterangan /** Description
1	Honorarium / Honorarium	
2	Tunjangan / Allowance	Tunjangan Hari Raya Keagamaan / Religious Holiday Allowance
		Tunjangan Komunikasi / Communication Allowance
		Tunjangan Santunan Purna Jabatan / Post Assignment Allowance
		Tunjangan Pakaian / Clothing Allowance
		Tunjangan Transportasi / Transportation Allowance
3	Fasilitas / Facilities	Pemeliharaan kesehatan / Health Protection
		Kepersertaan dan perkumpulan profesi / Professional membership and association
		Bantuan hukum / Legal assistance
4	Tantiem / Tantiem	Pemberian tantiem bagi Dewan Pengawas juga mengacu pada ketentuan di atas antara lain / Tantiem for the Board of Supervisors also refers to the aforementioned provisions, such as: • Tantiem diberikan dalam hal BUMN memperoleh keuntungan dalam tahun buku yang bersangkutan / Tantiem is given when the Company is benefited within the related fiscal year. • Tantiem diberikan apabila pencapaian ukuran Kinerja Utama (KPI) lebih dari 70% dan tingkat kesehatan dengan nilai lebih dari 70% / Tantiem is given when the Key Performance Indicator and the Company's Sound Performance is above 70%.

Besaran Remunerasi Dewan Pengawas Tahun 2014

Jumlah remunerasi Dewan Pengawas Perum Jamkrindo disesuaikan dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tanggal 27 Desember tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, maka Direksi yang mendapatkan Tunjangan Perumahan apabila tidak mendapatkan fasilitas Rumah Jabatan. Total Besaran Remunerasi Dewan Pengawas selama 2014 sebesar Rp7.733.996.000.

Amount of Remuneration of the Board of Supervisors for the Year 2014

The amount of Remuneration of Board of Supervisors of Perum Jamkrindo is adjusted to the Decree of the Minister of SOEs Number: PER-04/MBU/2014 dated December 27 regarding the Determination Guidelines of the Remuneration of the Board of Directors, Board of Commissioners and Board of Supervisors of SOEs. Hence, members of Board of Directors are given the Housing Allowance if they are not given the Official Housing facilities. Total Remuneration for the Board of Supervisors in 2014 was Rp7,733,996,000.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas

Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo Nomor 93/Kep-Dir/XII/2012/KEP-07/DP-JAMKRINDO/XII/2012 yang secara garis besar mengatur tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) Perum Jamkrindo

Working Guidelines for the Board of Supervisors

The working guidelines for the Board of Supervisors are set out in accordance with the Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo No. 93/Kep-Dir/XII/2012/KEP-07/DP-JAMKRINDO/XII/2012 which regulates the Code of Conduct of Perum Jamkrindo

Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Dewan Pengawas Dalam Pertemuan Dewan Pengawas

Dewan Pengawas mengadakan rapat rutin sekali dalam setiap bulan, yaitu Rapat Internal Dewan Pengawas yang dihadiri oleh Komite Audit, dan Komite Investasi dan Risiko Usaha serta Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi. Namun dalam hal dipandang penting, Dewan Pengawas juga melakukan rapat-rapat insidental, baik dengan komite-komite maupun dengan Direksi.

Meeting Frequency and Attendance Level of the Board of Supervisors in the Board of Supervisors Meetings

The Board of Supervisors hold periodical meeting once a month, which includes Internal Meeting of the Board of Supervisors attended by Audit Committee, and Business Risk and Investment Committee, and Joint Meeting of the Board of Supervisors and the Board of Directors. For matters considered important, the Board of Supervisors also hold incidental meetings, either with the Committees or with the Board of Directors.

Nama / Name	**Jabatan /** Position	**Jumlah Rapat /** Total Meeting	**Jumlah Kehadiran /** Meeting Attendance	**Persentase /** Percentage
Choirul Djamhari	Ketua / Chairman	9	11	122%
Braman Setyo	Ketua / Chairman	3	5	167%
Nasarudin Umar	Anggota / Member	16	11	69%
Subandriyo	Anggota / Member	16	16	100%
Ony Suprihartono	Anggota / Member	16	14	88%
Dahlan Siamat	Anggota / Member	16	15	94%

Kunjungan Kerja Dewan Pengawas

Selama 2014, Dewan Pengawas melakukan beberapa kunjungan ke beberapa kantor cabang seperti Kantor Cabang Yogyakarta, Semarang, dan Makassar. Dalam kunjunganya, Dewan Pengawas memberikan *briefing* atau membahas hal-hal tertentu terkait aktivitas bisnis kantor cabang.

Dewan Pengawas juga melakukan *sharing session* mengenai investasi dan risiko usaha.

Working Visit from the Board of Supervisors

Throughout 2014, the Board of Supervisors has visited some of branch offices such as Branch Office in Yogyakarta, Semarang, and Makassar. During the visit, the Board of Supervisors hold a briefing or discussion on certain matters related to business activity of the branch offices.

The Board of Supervisors also hold a sharing session regarding investment and business risk.

Rekomendasi Dewan Pengawas

Sepanjang 2014, Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, keputusan RPB, dan keputusan lainnya guna menunjang kegiatan bisnis perusahaan. Hasil pengawasan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Direksi secara tertulis (memorandum) atau lisan (dalam rapat Direksi dengan Dewan Pengawas), antara lain mengenai:

1. Saran perbaikan terhadap *draft* sistem pelaporan pelanggaran (WBS) yang disusun oleh Direksi.
2. Peningkatan kinerja bisnis non-KUR, rencana *spin off*, bisnis penjaminan syariah, dan penyertaan modal pada perusahaan reasuransi.

Recommendations from the Board of Supervisors

Throughout 2014, the Board of Supervisors has carried out their duties and responsibilities in supervision function pursuant to the Articles of Association, RPB decision, and other decisions to support the Company's business activity. Results of supervision will be followed up by recommendations to the Board of Directors in a written form (memorandum) or verbal (in the joint meeting of the Board of Directors and the Board of Supervisors), in regard to:

1. Advice for the improvement on the whistleblowing system (WBS) draft compiled by the Board of Directors.
2. Improvement of non-KUR business performance, spin-off plan, sharia guarantee business, and capital investment in reinsurance companies.

Program Pelatihan Dewan Pengawas

Demi terus meningkatkan kompetensi sejalan dengan perkembangan bisnis, selama 2014, Dewan Pengawas telah mengikuti berbagai seminar/pelatihan/*workshop*, antara lain:

Training Program of the Board of Supervisors

In order to increase the competence following business development, in 2014, the Board of Supervisors has attended various seminar/training/workshop, among others:

Seminar / Seminar	**Waktu /** Date	**Tempat /** Location	**Penyelenggara /** Organizer	**Biaya /** Cost
Business Intuition in Manageng Corporate	18 Desember 2014 / December 18, 2014	Hotel Grand Zuri	Nurcahyo intuition Power	Rp6.250.000

KOMISARIS INDEPENDEN

Perusahaan tidak memiliki Komisaris Independen karena seluruh Dewan Pengawas Perum Jamkrindo berasal dari instansi pemerintah.

INDEPENDENT COMMISSIONERS

The Company does not have Independent Commissioners since all Supervisory Board of Perum Jamkrindo come from government agency.

DIREKSI

Berdasarkan *vide* pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

BOARD OF DIRECTORS

According to Article 1 verse 4 Government Regulation No. 41 Year 2008 comcerning Perum Jamkrindo, the Board of Directors is the Company's instrument responsible for Company management for the interest and objective of the Company and for representing the Company both inside and outside the court.

Jumlah dan Komposisi Direksi

Direksi Perum Jamkrindo berjumlah 5 (lima) orang, yang seluruhnya diangkat oleh Menteri BUMN, melalui Keputusan Menteri Negara BUMN. Berikut komposisi Direksi Perum Jamkrindo per 31 Desember 2014:

Number and Composition of the Board of Directors

The Board of Directors of Perum Jamkrindo has 5 (five) personnel appointed by the Minister of State Owned Enterprises through Decree of the Minister of of State Owned Enterprises:

Direksi / Board of Directors	**Jabatan** Position	**Surat Keputusan** Desicion Letter
Diding S. Anwar	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-316/MBU/2012 tanggal 7 September 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo, mengangkat Diding S. Anwar sebagai Direktur Utama j.o Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-44/MBU/2014 tentang Perubahan Nomenklatur Anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. Decree of the Minister of SOE as the Shareholder of Perum Jamkrindo No. SK-316/MBU/2012 dated September 7, 2012 on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo, Appointed Mr. Diding S. Anwar as the President Director in conjunction with Decree of the Minister of SOE as the Shareholder of Perum Jamkrindo No. SK-44/MBU/2014 on Change in Nomenclature of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo.
Bakti Prasetyo	Direktur Penjaminan Bank Director of Bank Guarantee	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-316/MBU/2012 tanggal 7 September 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo, mengangkat Diding S. Anwar sebagai Direktur Utama j.o Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-44/MBU/2014 tentang Perubahan Nomenklatur Anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. Decree of the Minister of SOE as the Shareholder of Perum Jamkrindo No. SK-316/MBU/2012 dated September 7, 2012 on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors in conjunction with Decree of the Minister of SOE as the Shareholder of Perum Jamkrinido No. SK-44/MBU/2014 on Change in Nomenclature of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo.
Nanang Waskito	Direktur Penjaminan Non Bank Director of Non Bank Guarantee	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-12/MBU/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pemberhentian,Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo, mengangkat Sdr. Nanang Waskito sebagai Direktur SDM dan Umum, Sdr.I Rusdonobanu sebagai Direktur Keuangan dan Investasi Utama j.o Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-44/MBU/2014 tentang Perubahan Nomenklatur Anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Decree of the Minister of SOE as the Shareholder of Perum Jamkrindo No. SK-12/MBU/2013 dated January 15, 2013 on the Dismissal, Change in Nomenclature, and the Appointment of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo, appointed Mr. Nanang Waskito as the Director of Human Resources and General Affairs, Mr. Rusdonobanu as the Director of Finance and Investment in conjunction with Decree of the Minister of SOE as the Shareholder of Perum Jamkrindo No. SK-44/MBU/2014 on Change in Nomenclature of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo

Direksi / Board of Directors	**Jabatan** Position	**Surat Keputusan** Desicion Letter
Herry Sidharta	Direktur SDM & Umum	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-78/MBU/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Pemberhentian, dan Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo, mengangkat Sdr. Herry Sidharta sebagai Direktur Keuangan j.o Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-44/MBU/2014 tentang Perubahan Nomenklatur Anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia
	Director of Human Resources & General Affairs	Decree of the Minister of SOE as the Shareholder of Perum Jamkrindo No. SK-78/MBU/2011 dated March 30, 2011 on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo, appointed Mr. Herry Sidharta as the Director of Finance in conjunction with Decree of the Minister of SOE as the Shareholder of Perum Jamkrindo No. SK-44/MBU/2014 on the Change in Nomenclature of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo
I. Rusdonobanu	Direktur Keuangan, Investasi dan Teknologi Informasi	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-12/MBU/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pemberhentian,Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo, mengangkat Sdr. Nanang Waskito sebagai Direktur SDM dan Umum, Sdr.I Rusdonobanu sebagai Direktur Keuangan dan Investasi Utama j.o Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-44/MBU/2014 tentang Perubahan Nomenklatur Anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia
	Director of Finance, Investment and Information Technology	Decree of the Minister of SOE as the Shareholder of Perum Jamkrindo No. SK-12/MBU/2013 dated January 15, 2013 on the Dismissal, Change in Nomenclature, and Appointment of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo, appointed Mr. Nanang Waskito as the Director of Human Resources and General Affairs, Mr. I Rusdonobanu as the Director of Finance and Investment in conjunction with Decree of the Minister of SOE as the Shareholder of Perum Jamkrindo No. SK-44/MBU/2014 on Change in Nomenclature of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo

Independensi dan Transparansi Direksi

Independensi dan transparansi Direksi merupakan salah satu faktor yang harus terus dijaga untuk kepentingan Perusahaan agar terhindar dari konflik kepentingan. Untuk menjaga independensi tersebut, seluruh anggota Direksi yang menjabat di Perum Jamkrindo diharuskan untuk tidak memiliki hubungan keuangan, keluarga (sampai derajat ke dua vertikal maupun horizontal) dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham pengendali.

Independency and Transparency of the Board of Directors

Independency and Transparency of the Board of Directors has to be maintained for the Company to avoid conflict of interest. To maintain independency, all of members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo are required to not have financial ties, family relationship (up to two degree in vertical or horizontal line) with member of the Board of Supervisors, other members of the Board of Directors, and/or with the controlling shareholders.

Tugas dan Tanggung Jawab

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

Duties and Responsibilities

Referring to the Government Regulation No. 41 Year 2008 concerning Perum Jamkrindo, duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows:

	Tugas Pokok / Main Duties		**Tanggung Jawab /** Responsibilities
1	Melaksanakan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan dan bertindak selaku Pimpinan dalam pengurusan tersebut / To manage the Company for the interest and objective of the Company and to take action as the management leader.	1	Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dan pengelolaan Perusahaan, serta melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Perusahaan dan mewakili Perum Jamkrindo di dalam dan di luar pengadilan / The Board of Directors is responsible for the Company's management and enactment of regulation, and to perform legal action for and on behalf of the Company, as well as to represent Perum Jamkrindo inside and outside the court.
2	Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan / To represent the Company inside and outside the court.	2	Secara bersama-sama atau individual, bertanggungjawab segala kerugian yang timbul pada kekayaan Perusahaan akibat tindakan Direksi yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan / Collectively or individually responsible for any loss in the Company's assete due to violation or neglecting action by the Board of Directors, as regulated in the Company Regulations and in the legislation.
3	Memelihara dan mengurus kekayaaan Perusahaan / To maintain and to manage the Company's property.	3	Memastikan agar informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Pengawas secara tepat waktu dan lengkap / To ensure a timely and complete delivery of Company information to the Board of Supervisors.
		4	Tanggung jawab lain sesuai ketentuan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku / Other responsibilities in accordance to the Company regulations and to the legislation.

Tugas dan wewenang masing-masing Direksi telah diatur dalam Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia Nomor : Kep-03/DP-JAMKRINDO/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia. Dalam menjalankan kegiatannya, anggota Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

Duties and Responsibilities of each member of the Board of Directors is regulated in the Decision of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo No. Kep-03/DP-JAMKRINDO/III/2014 dated March 10, 2014 on the Distribution of Duties and Authorities of the Board of Directors of Perum Jamkrindo. In carrying out their activities, members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo have duties and authorities as follows:

Nama / Name	**Jabatan /** Position	**Tugas dan Wewenang /** Duties and Authorities
Diding S. Anwar	Direktur Utama / President Director	a. Pengawasan Intern & Manajemen Risiko / Internal & Risk Management Supervision b. Pengendalian Mutu & Pengembangan Audit / Quality Control & Audit Develompent c. Kesekretariatan / Secretariat d. Kehumasan dan Hubungan International / Public Relations and International Relations e. Hukum / Legal Affairs f. Kepatuhan / Compliance g. Perencanaan / Planning h. Pengembangan / Development
Bakti Prasetyo	Direktur Penjaminan Bank / Director of Bank Guarantee	a. Pemasaran Penjaminan Program dan Koperasi / Cooperative and Guarantee Marketing Program b. Pemasaran Penjaminan Produktif / Productive Guarantee Marketing c. Pemasaran Penjaminan Konsumer / Consumer Guarantee Marketing d. Teknik Penjaminan Program dan Koperasi / Cooperative and Program Guarantee Techniques e. Teknik Penjaminan Komersial / Commercial Guarantee Techniques f. Klaim dan Subrogasi Penjaminan Bank / Claims and Subrogation of Bank Guarantee g. Re dan Co Garansi Penjaminan Bank / Re & Co Bank Guarantee h. Penjaminan Syariah / Sharia Guarantee i. Pengendalian Penjaminan Syariah / Sharia Guarantee Control
Nanang Waskito	Direktur Penjaminan Non Bank / Director of Non Bank Guarantee	a. Pemasaran *Surety Bond* / Surety Bond Marketing b. Pemasaran Penjaminan Non Bank Lainnya / Other Non Bank Guarantee Marketing c. Teknik Penerbitan *Surety Bond*, Analisa dan Administrasi Surety Bond / Surety Bond Issuance Techniques, Analysis and Administration of Surety Bond d. Teknik Analisis dan Administrasi Penerbitan Penjaminan Lainnya / Analysis and Administration Techniques of Other Guarantee Issuance j. Klaim & Subrogasi Penjaminan Non Bank / Claims and Subrogation of Non Bank Guarantee e. Re & Co Garansi Penjaminan Non Bank / Re & Co Non Bank Guarantee
Herry Sidharta	Direktur SDM & Umum / Director of Human Resources & General Affairs	a. Administrasi SDM / HR Administration b. Pengembangan SDM / HR Development c. Umum / General Affairs d. Pengelolaan Asset / Assets Management
I. Rusdonobanu	Direktur Keuangan dan Investasi / Director of Finance and Investment	a. Investasi / Investment b. *Treasury* / Treasury c. PKBL / Partnership & Community Development d. Akuntansi / Accounting e. Anggaran / Budget f. Teknologi Informasi / Information Technology

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Pedoman dan tata tertib kerja Direksi ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia yang secara garis besar mengatur tentang hari, jam kerja, cuti, dan izin Direksi serta ketentuan penyelenggaraan dan pengambilan keputusan rapat, kode etik, dan peningkatan kompetensi Direksi.

Working Guidelines for the Board of Directors

The working guidelines for the Board of Directors are set out in accordance with the Government Regulation No. 41 Year 2008 concerning Perum Jamkrindo which regulates working days, working hours, leave, and permits of the Board of Directors as well as provisions of meetings and decision-making in meeting, code of conduct, and improvement of competence of the Board of Directors.

Rapat Direksi

Sebagaimana diatur dalam peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia nomor 56/Per-Dir/XII/2013 tentang Pedoman pengelolaan rapat Direksi Perum Jamkrindo, ketentuan mengenai Rapat Direksi Perum Jamkrindo adalah sebagai berikut:

Meeting of the Board of Directors

In accordance with the regulation of the Board of Directors of Perum Jamkrindo No. 56/Per-Dir/XII/2013 on the Guidelines for the management of meeting of the Board of Directors of Perum Jamkrindo, provisions of meeting of the Board of Directors of Jamkrindo are as follows:

Pelaksanaan Rapat Direksi / Implementation of Meeting of the Board of Directors	
Rapat wajib dilaksanakan sekurang-kurangnya satu bulan sekali, atau atas usul dari sesama anggota Direksi dengan menyebutkan agenda atau hal-hal yang akan dibicarakan.	The Board of Directors is required to hold meeting at least once a month, or by recommendation of other members with clear agenda.
Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Apabila Direktur Utama berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh anggota Direksi yang hadir atau diwakili.	Meeting of the Board of Directors is chaired by the President Director. If the President Director is absent, the meeting will be chaired by one of members appointed by the attending members or representatives of the Board of Directors.

Keputusan Rapat Direksi / Resolutions of Meeting of the Board of Directors	
Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.	All resolutions are made in the meeting.
Semua keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah. Apabila dengan cara musyawarah tidak diperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.	All resolutions of the meeting are taken through consensus agreement. If the agreement is not reached, the decision will be made through voting.
Kuorum (jumlah minimal kehadiran yang harus dipenuhi) dapat tercapai bila setidaknya setengah dari jumlah anggota Direksi hadir dalam rapat.	The quorum (minimum attendance level that should be met) is reached when at least half of the total members of the Board of Directors attends the meeting.
Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.	A member of the Board of Directors can only be represented in the meeting by other members of the Board of Directors based on letter of authority.
Dalam keadaan dimana rapat Direksi tidak dapat diadakan seperti biasa, maka dapat diambil keputusan yang sah tanpa dilakukannya rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi yang hadir dalam rapat memberikan persetujuan dalam rapat serta memberikan persetujuan dengan menandatangani persetujuan tersebut.	In a condition where the meeting is held beyond schedule, decision can be officially made without the Board of Directors' meeting, provided that all members of the Board of Directors has been informed in a written consent and all members attending the meeting give their approval by signing the agreement.

Keputusan Rapat Direksi / Minutes of Meeting of the Board of Directors	
Dalam setiap rapat harus dibuat risalah rapat yang menyajikan dinamika rapat yaitu segala hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk bila ada perbedaan pendapat dalam rapat Direksi.	A minute of Meeting is necessary to be made in every meeting. The minutes of meeting shall provide the dynamics of the meeting, which is everything discussed and decided, including differences of opinion in the meeting of the Board of Directors.
Dibuat oleh petugas yang ditunjuk atau salah satu anggota Direksi yang hadir dalam rapat.	Made by the designated officer or by a member of the Board of Directors who are present in the meeting.
Ditandatangani oleh pimpinan rapat dan salah seorang anggota Direksi lain yang ditunjuk untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara Rapat Direksi tersebut.	Signed by the chairmaan of the meeting and one of the other members of the Board of Directors who is appointed to ensure the completeness and accuracy of the aforementioned Board of Directors' Minutes of Meeting.
Menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Dewan Pengawas dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat Direksi.	Became the legitimate proof for all members of the Board of Supervisors and the third parties regarding decisions and any other matters which take place in the meeting of the Board of Directors.
Segala hal yang diputuskan dalam rapat Direksi harus dibuat Berita Acara.	Each of decision made in the meeting of the Board of Directors shall be documented into the Minutes of Meeting.
Diberikan kepada semua anggota Direksi paling lambat 1 (satu) minggu setelah rapat diadakan, dan koreksi atas risalah tersebut sudah harus diterima paling lambat 1 (satu) minggu setelah itu.	Shall be distributed to every member of the Board of Directors no longer than a week after the date of the meeting, and the corrections of the minutes of meeting shall be distributed a week after the first distribution.
Ditandatangani oleh semua anggota Direksi yang hadir. Risalah rapat Direksi yang asli disimpan oleh salah seorang yang ditunjuk Direksi untuk menyimpan dokumentasi tersebut, sedangkan setiap anggota Direksi menyimpan fotokopi dari risalah tersebut.	Signed by the present members of the Board of Directors. The genuine minutes of meeting of the Board of Directors is stored by the person appointed by the Board of Directors to store the document, whilst each member of the Board of Directors is given the copies of the minutes of meeting.
Disahkan sebelum rapat berikutnya diadakan	Shall be approved before the next meeting takes place.
Satu dari buku, catatan dan dokumen yang wajib dipelihara oleh Direksi dalam rangka pengelolaan Perusahaan.	The minutes of meeting is a part of books, notes, and documents which shall be maintained by the Board of Directors in managing the Company.

Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Direksi Dalam Pertemuan Direksi

Direksi mengadakan rapat rutin setiap sekali dalam setiap bulan, sebagaimana ketentuannya telah diatur dalam penjelasan di atas. Frekuensi dan tingkat kehadiran Direksi dalam pertemuan Direksi selama 2014 adalah sebagai berikut:

Meeting Frequency and Attendance Rate of the Board of Directors in the Board of Directors Meetings

The Board of Directors holds periodical meeting once a month, in which the regulations has been described above. The frequency and attendance level of the Board of Directors in the Board of Directors Meetings in 2014 is as follows:

Nama / Name	**Jabatan /** Position	**Jumlah Rapat /** Total Meeting	**Jumlah Kehadiran /** Total Attendance	**Persentase /** Percentage
Diding S. Anwar	Direktur Utama / President Director	13	13	100%
Bakti Prasetyo	Direktur Penjaminan Bank / Director of Bank Guarantee	13	12	92,30%
Nanang Waskito	Direktur Penjaminan Non Bank / Director of Non Bank Guarantee	13	13	100%

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meeting	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Persentase / Percentage
Herry Sidharta	Direktur SDM & Umum / Director of Human Resources & General Affairs	13	13	100%
I. Rusdonobanu	Direktur Keuangan dan Investasi / Director of Finance and Investment	13	13	100%

Agenda dan Hasil Rapat Direksi

Beberapa hasil tindaklanjut rapat Direksi antara lain sebagai berikut:

Agenda and Resolutions of The Board of Directors Meeting

Some of follow-up results of meeting of the Board of Directors are as follows:

No.	Tanggal / Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda
1.	28 Januari 2014 / January 28, 2014	1. Pembahasan Persiapan Rapat Gabungan Dewan Pengawas dan Direksi / Discussion on the Preparation of Joint Meeting Between the Board of Supervisors and the Board of Directors 2. Pembahasan hal-hal strategis lainnya / Discussion on other strategic matters
2.	4 februari 2014 / February 4, 2014	1. Pembahasan Rencana self Assesment GCG 2013 / Discussion on GCG Self Assesment Plan 2013 2. Pembahasan Tata kelola Persuratan / Discussion on Mailing Policies 3. Perpanjangan PKS Co-guarantee Tahun 2014 / Extension of Co-guarantee Cooperation Agreement Year 2014 4. Pedoman pelaporan Manajemen Risiko / Risk Management Whistleblowing Guidelines
3.	6 Februari 2014 / February 6, 2014	1. Pembahasan penyusunan Annual Report tahun 2013 / Discussion on the Preparation of Annual Report 2013 2. Pembahasan hal-hal strategis lainnya / Discussion on other strategic matters
4.	10 maret 2014 / March 10, 2014	Pembahasan nomenklatur dan tugas & wewenang Direkasi / Discussion on nomenclature and duties & authoritiesof the Board of Directors
5.	22 April 2014 / April 22, 2014	Pembahasan hal-hal strategis / Discussion on Strategic Matters 1. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi / Development of Information Technology Systems 2. Pembahasan Penyesuaian atas beberapa SOP / Discussion on Adjustments of various SOP 3. Penunjukan eksternal auditor KAP untuk audit tahun buku 2014 / Appointment of KAP External Auditor for Audits for Fiscal Year 2014
6.	12 Mei 2014 / May 12, 2014	Pembahasan hal-hal strategis / Discussion on strategic matters: 1. Pembahasan rencana spin off / Discussion on spin-off plan 2. Pembahasan pelaksanaan assesment GCG tahun 2014 / Discussion on the implementation of GCG assessment in 2014 3. Implementasi Teknologi informasi / Implementation of Information Technology
7.	18 Juni 2014 / June 18, 2014	1. Pembahasan persiapan acara peresmian 7 (tujuh) Kantor KUP menjadi Kantor Cabang Perum Jamkrindo / Discussion on the preparation of the Inauguration of 7 (seven) KUP Offices into Perum Jamkrindo Branch Office 2. Pembahasan persiapan Rapat Gabungan Dewan Pengawas dengan Direksi bulan juni 2014 / Discussion on the preparation of Joint Meeting Between the Board of Supervisors and the Board of Directors on June 2014

No.	Tanggal / Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda
8.	15 Juli 2014 / July 15, 2014	1. Pembahasan persiapan Rapat gabungan Dewas dengan Direksi Bulan Juli 2014 / Discussion on the preparation of Joint Meeting between the Board of Supervisors and the Board of Directors on July 2014 2. Pembahasan hal-hal strategis lainnya / Discussion on other strategic matters
9.	7 Agustus 2104 / August 7, 2014	Pemabahasan Revisi RKAP 2014 / Discussion on RKAP Revision 2014 1. Research & Development / Research & Development 2. Akselerasi TI / IT Acceleration 3. Optimalisasi aset / Assets Optimization
10.	29 September 2014 / September 29, 2014	1. Pembahasan penyusunan RKAP tahun buku 2015 / Discussion on the formulation of RKAP for Fiscal Year 2015 2. Optimalisasi portofolio produk jasa penjaminan kredit / Optimization of credit guarantee services product portfolio
11.	20 Oktober 2014 / October 20, 2014	Pembahasan RKAP tahun buku 2015 / Discussion on RKAP for Fiscal Year 2015
12.	29 Oktober 2014 / October 29, 2014	Pembahasan RKAP tahun buku 2015 / Discussion on RKAP for Fiscal Year 2015 Persiapan pelantikan dan sertijab Kepala Kantor Cabang / Preparation of the Inauguration and certification of Head of Branch Office Persiapan MOU dengan JAMDATUN / Preparation of MOU with JAMDATUN Pembahasan persiapan MUKERNAS Asippindo / Discussion on the preparation of MUKERNAS Asippindo
13.	8 Desember 2014 / December 8, 2014	1. Pembahasan RKAP 2015 / Discussion on RKAP 2015 2. Pembahasan pengadaan tanah untuk Kantor Cabang / Discussion on the procurement of land for Branch Office

Tingkat Kehadiran Rapat Gabungan Dewan Pengawas dan Direksi

Selama 2014, Dewan Pengawas dan Direksi telah menyelanggarakan rapat sebanyak 16 kali, yang ditujukan untuk optimalisasi sistem tata kelola perusahaan dalam proses pengawasan dan pengelolaan Perusahaan. Secara rinci, frekuensi rapat yang dilakukan sebagai berikut:

Attendance Level of Joint Meeting of the Board of Supervisors and the Board of Directors

During 2014, the Board of Supervisors and the Board of Directors has held a total of 16 meetings, with the objective to optimize corporate governance system in the process of supervision and management of the Company. The detailed meeting frequency is described below:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meeting	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Persentase / Percentage
Choirul Djamhari	Ketua / Chairman	16	11	68,75%
Braman Setyo *	Ketua / Chairman	16	5	31,25%
Nasarudin Umar	Anggota / Member	16	11	68,75%
Subandriyo	Anggota / Member	16	16	100%
Ony Suprihartono	Anggota / Member	16	14	87,5%
Dahlan Siamat	Anggota / Member	16	15	93,75%
Diding S. Anwar	Direktur Utama / President Director	16	15	93,75%
Bakti Prasetyo	Direktur Penjaminan Bank / Director of Bank Guarantee	16	13	81,25%

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meeting	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Persentase / Percentage
Nanang Waskito	Direktur Penjaminan Non Bank / Director of Non Bank Guarantee	16	15	93,75%
Herry Sidharta	Direktur SDM & Umum / Director of Human Resources & General Affairs	16	15	93,75%
I. Rusdonobanu	Direktur Keuangan dan Investasi / Director of Finance and Investment	16	14	87,5%

*) Perubahan komposisi Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor SK-199/MBU/10/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo.telah dilakukan pergantian Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Choirul Djamhari digantikan oleh Braman Setyo.

*) Change in the composition of the Board of Supervisors In accordance to the Decree of the Minister of SOE as the Investor of Perum Jamkrindo No. SK-199/MBU/10/2014 dated October 7, 2014 on the Dismissal and Appointment of the Chairman of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo. There was a change in the roster of the Chairman of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo. Choirul Djamhari was replaced by Braman Setyo.

Agenda dan Hasil Rapat Gabungan Dewan Pengawas dan Direksi

Beberapa hasil tindaklanjut rapat Gabungan Dewan Pengawas dan Direksi antara lain sebagai berikut:

Agenda and Resolutions of Joint Meeting of the Board of Supervisors and the Board of Directors

Some of follow-up results of joint meeting of the Board of Supervisors and the Board of Directors are as follows:

No.	Tanggal / Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda
1.	30 Januari 2014 / January 30, 2014	1. Evaluasi kinerja Usaha Bulan Desember 2013 / Evaluation on Business Performance in December 2013 2. Rencana pengembangan Perusahaan / Company development plan 3. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan / Partnership & Environment Development Program 4. Hal-hal terkait dengan pengelolaan / Matters related to management
2.	28 Februari 2014 / February 28, 2014	1. Revitalisasi Bisnis Penjaminan Syariah / Revitalization of Sharia Guarantee Business 2. Evaluasi Kinerja Usaha Bulan januari 2014 / Evaluation on Business Performance in January 2014 3. Pemenuhan Kebijakan / Policy Compliance
3.	10 Maret 2014 / March 10, 2014	Pembahasan Struktur Organisasi Perum Jamkrindo / Discussion on the Organizational Structure of Perum Jamkrindo
4.	25 Maret 2014 / March 25, 2014	1. Evaluasi Kinerja Usaha bulan Februari 2014 / Evaluation on Business Performance in February 2014 2. Tindak lanjut rapat sebelumnya / Follow-up on previous meeting 3. Pemenuhan kebijakan / Policy compliance
5.	25 April 2014 / April 25, 2014	1. Evaluasi Kinerja Usaha Bulan Maret 2014 / Evaluation on Business Performance in March 2014 2. Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya / Follow-up on previous meeting 3. Pemenuhan Kebijakan / Policy compliance
6.	30 Mei 2014 / May 30, 2014	1. Evaluasi Kinerja Usaha Bulan April 2014 / Evaluation on Business Performance in April 2014 2. Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya / Follow-up on previous meeting
7.	13 Juni 2014 / June 13, 2014	Pembahasan Kajian Pembentukan Anak Perusahaan / Discussion on the Establishment of Subsidiaries : 1. Penjaminan Syariah (JamSyar) / Sharia Guarantee (JamSyar) 2. Jamkrindo Re-Asuransi (Jamre) / Jamkrindo Reinsurance (Jamre)

No.	Tanggal / Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda
8.	23 Juni 2014 / June 23, 2014	1. Evaluasi Kinerja Usaha Bulan Mei 2014 / Evaluation on Business Performance in May 2014 2. Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya / Follow-up on previous meeting 3. Pemenuhan kebijakan / Policy compliance
9.	23 Juli 2014 / July 23, 2014	1. Evaluasi Kinerja Usaha Bulan Juni 2014 / Evaluation on Business Performance in June 2014 2. Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya / Follow-up on previous meeting 3. Pemenuhan kebijakan / Policy compliance
10.	29 Agustus 2014 / August 29, 2014	1. Evaluasi Kinerja Usaha Bulan Juli 2014 / Evaluation on Business Performance in July 2014 2. Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya / Follow-up on previous meeting 3. Pemenuhan kebijakan / Policy compliance
11.	16 September 2014 / September 16, 2014	1. Evaluasi tindaklanjut Hasil rapat sebelumnya / Evaluation on the follow-up on previous meeting 2. Tindak lanjut LHP BPK / Follow-up on LHP BPK 3. Lain-lain / Others
12.	24 Oktober 2014 / October 24, 2014	1. Pembahasan RKAP 2015 / Discussion on RKAP 2015 2. Evaluasi Kinerja Usaha Bulan September 2014 / Evaluation on Business Performance in September 2014 3. Lain-lain / Others
13.	28 November 2014 / November 28, 2014	1. Pembahasan RKAP 2015 / Discussion on RKAP 2015 2. Evaluasi Kinerja Usaha Bulan Oktober 2014 / Evaluation on Business Performance in October 2014 3. Lain-lain / Others
14.	8 Desember 2014 / December 8, 2014	1. Pembahasan RKAP 2015 / Discussion on RKAP 2015 2. KPI Tahun 2015 / KPI 2015 3. Lain-lain / Others
15.	15 Desember 2014 / December 15, 2014	1. Pembahasan Lanjutan RKAP Tahun 2015 / Further Discussion on RKAP 2015 2. Pembahasan Lanjutan KPI Tahun 2015 / Further Discussion on KPI 2015 3. Lain-lain / Others
16.	31 Desember 2014 / December 31, 2014	1. Evaluasi Kinerja Usaha Bulan November 2014 / Evaluation on Business Performance in November 2014 2. Progres Masalah Pending / Progress on Pending Issues 3. Pemenuhan Kebijakan / Policy Compliance 4. Lain-lain / Others

Kebijakan Kepengurusan Perusahaan

Kebijakan Kepengurusan Perusahaan ditetapkan oleh Direksi. Dalam melaksanakan Kepengurusan Perusahaan, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan, dengan syarat semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi.

Jika Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, maka ditetapkan salah seorang Direktur berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dengan urutan sebagai berikut:

Company Management Policy

The Company Management Policy is stipulated by the Board of Directors. In managing the Company, the President Director is rightfully legal and authorized to act on behalf of the entire Board of Directors and the Company, on the condition of acquiring the approval in the meetings of the Board of Directors.

If the President Director is not present due to any circumstances, it is required for one of the authorized Directors to act for and on behalf of the Board of Directors by the sequence as listed below:

a. Salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan diantara anggota Direksi yang ada berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
c. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada butir (b) tidak dilakukan, salah seorang Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direktur berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
d. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang. Direktur sebagaimana dimaksud pada butir (c) yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.

a. One of the Directors appointed by the President Director is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors.
b. If the President Director has not appointed anybody, one of the Directors appointed by and among the present members of the Board of Directors may act for and on behalf of the Board of Directors.
c. If what is stated on point (b) has not been conducted, one of the Directors whose service period as the member of Directors is the longest may act for and on behalf of the Board of Directors.
d. If there is more than one Director whose service period is the longest, the Director as referred to in point (c) with the oldest age may act for and on behalf of the Board of Directors.

Program Pelatihan Direksi

Demi terus meningkatkan kompetensi sejalan dengan perkembangan bisnis, selama 2014, Direksi telah mengikuti berbagai seminar/pelatihan/workshop, antara lain:

Board of Directors Training Program

In order to increase the competence following business development, in 2014, the Board of Directors has attended various seminar/training/workshop, among others:

No	Nama pelatihan/Workshop	Pelaksana Pelatihan	Tanggal Pelatihan	Tempat Pelatihan	Peserta
1	Business Gathering produk Surety Bond Jamkrindo dan BUMN / Business Gathering of Jamkrindo and SOE Surety Bond Products	Perum Jamkrindo	24-26 Januari 2014 / January 24-26, 2014	Kota Bandung	Direksi Perum Jamkrindo dan Kadiv / Board of Directors and Head of Division
2	Studi Banding : US SBA USA / Comparative Study: US SBA USA	Perum Jamkrindo	21 Februari - 3 Maret 2014 / February 21 - March 3, 2014	Washington, USA	Bakti Prasetyo, I. Rusdonobanu, Bandung Pardede
3	Studi bandung : BPI France / Comparative Study: BPI France	Perum Jamkrindo	21 Februari - 3 Maret 2014 / February 21 - March 3, 2014	Perancis, Paris	Bakti Prasetyo, I. Rusdonobanu, Bandung Pardede
4	Sosialisasi POJK tentang Surety Bond / POJK Socialization regarding Surety Bond	Otoritas Jasa Keuangan / Financial Service Authority	27 28 Maret 2014 / March 27-28, 2014	Kota Jambi	Diding S. Anwar
5	Business Gathering dengan PT POS, PT LEN dan PT INTI / Business Gathering with PT POS, PT LEN and PT INTI	Perum Jamkrindo	15 Mei 2014 / May 15, 2014	Kota Bandung	Direksi Perum Jamkrindo / Board of Directors of Perum Jamkrindo
6	Evaluasi dan Koordinasi Penagihan Subrogasi Perum Jamkrindo / Evaluation and Coordination of Perum Jamkrindo Subrogation Invoicing	Perum Jamkrindo	6 Juni 2014 / June 6, 2014	Kota Makassar	Diding S. Anwar, Nanang Waskito dan Bakti Prasetyo

No	Nama pelatihan/Workshop	Pelaksana Pelatihan	Tanggal Pelatihan	Tempat Pelatihan	Peserta
7	Evaluasi dan Koordinasi Penagihan Subrogasi Perum Jamkrindo / Evaluation and Coordination of Perum Jamkrindo Subrogation Invoicing	Perum Jamkrindo	9 Juni 2014 / June 9, 2014	Kota Medan	Diding S. Anwar, Nanang Waskito
8	Evaluasi dan Koordinasi Penagihan Subrogasi Perum Jamkrindo / Evaluation and Coordination of Perum Jamkrindo Subrogation Invoicing	Perum Jamkrindo	7 Juli 2014 / July 7, 2014	Kota Banjarmasin	Diding S. Anwar, I.Rusdobanu
9	Workshop Perizinan Usaha Perusahaan Penjaminan / Workshop of Business Licensing of Guarantee Company	Otoritas Jasa Keuangan / Financial Service Authority	12 Agustus 2014 / August 12, 2014	Kota Bali	Diding S. Anwar, Nanang Waskito
10	Pelatihan Penjaminan *Surety Bond* Tingkat Dasar / Basic Level of Surety Bond Guarantee Training	Asipindo	19 Agustus 2014 / August 19, 2014	Kota Mataram	Nanang Waskito
11	International Seminar on Market Conduct : A New Era of Conduct Supervision : Consequences, Chalenges and Opportunities	Otoritas Jasa Keuangan / Financial Service Authority	8 s.d. 9 September 2014 / September 8 to 9, 2014	Nusa Dua, Bali	Nanang Waskito
12	Workshop International Program KUR / International Workshop of KUR Program	Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI / Coordinating Ministry for Economic Affairs of Republic of Indonesia	13 s.d. 14 September 2014 / September 13 to 14, 2014	Hotel Discovery, Bali	Nanang Waskito
13	BPK "Goes to Campus" dengan tema Fungsi Pengawasan Keuangan Negara / BPK "Goes to Campus" with the theme of "Supervisory Function of State Budgeting"	Badan Pemeriksa Keuangan / Audit Board of the Republic of Indonesia	23 September 2014 / September 23, 2014	UGM, Yogyakarta	Diding S. Anwar
14	Working Level Task Force V antara Indonesia dengan Korea / Working Level Task Force V between Indonesia and Korea	Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI / Coordinating Ministry for Economic Affairs of Republic of Indonesia	29 s.d. 30 September 2014 / September 29 to 30, 2014	Kota Seoul, Korea Selatan	I. Rusdonobanu
15	Tutorial Executive "Peluang dan Tantangan Perkembangan Bisnis Syariah Sesi Pertama" / Tutorial Executive of "First Session of Opportunities and Challenges in Sharia Business Development"	Muamalat Institute	3 Oktober 2014 / October 3, 2014	Kanpus Perum Jamkrindo	Direksi Perum Jamkrindo dan Kadiv / Board of Directors and Head of Division

No	Nama pelatihan/Workshop	Pelaksana Pelatihan	Tanggal Pelatihan	Tempat Pelatihan	Peserta
16	Implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) / Implementation of National Fish Logistics System (SLIN)	Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan / Directorate General of Fishery Product Processing and Marketing – Ministry of Marine Affairs and Fisheries	14 Oktober 2014 / 14 Oktober 2014	Kota Kendari	Herry Siharta
17	ACSIC Conference ke 27	ACSIC	16 - 22 Nopember 2014 / November 16 - 22, 2014	Malaysia	Nanang Waskito, Subandriyo (Dewas/ Board of Supervisors)
18	Business Intitution In Managing Corporate	Mahadibya Nurcahyo Chakrasana	27 Nopember 2014 / November 27, 2014	Hotel Grand Zuri, Tangerang	Ony Suprihartono (Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo / members of Board of Supervisors Perum Jamkrindo)
19	Seminar Market Outlook 2015 dan Investor Gathering dari PT Sinarmas Asset Management / Market Outlook 2015 Seminar and PT Sinarmas Asset Management Investor Gathering	Sinarmas Asset Management	27 Nopember s.d 2 Desember 2014 / November 27 to December 2, 2014	Kota Beijing, Shanghai	Bakti Prasetyo, I. Rusdonobanu
20	Certified Financial Modelling	Clariden Global	10-12 Desember 2014 / December 10-12, 2014	Shangri-La Hotel, Singapura	Herry Sidharta (Dir. SDM dan Umum),
21	Outlook Bisnis dan Investasi / Business Outlook and Investment	Perum Jamkrindo	22 Desember 2014 / December 22, 2014	Kanpus Jamkrindo	Diding S Anwar, Herry Sidharta, I. Rusdonobanu

Catatan:

1. Realisasi biaya terhadap anggaran 2,22% dari anggaran Pendidikan dan Pelatihan SDM Perum Jamkrindo.

Note:

1. budget realization from the total of 2.22% of Perum Jamkrindo Human Resource Education and Training Budgeting

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Besarnya remunerasi yang diterima oleh setiap anggota Direksi mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Remunerasi Direksi Perusahaan disusulkan dalam Rapat Dewan Pengawas, dengan membahas pertimbangan usulan, hasil survey dengan industri sejenis dengan industri sejenis dan sektor lainnya, bersama-sama Dewan Pengawas mengusulkan kepada RPB, dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri di atas dan kemampuan perusahaan, untuk kemudian ditetapkan dalam RPB. Pada 2014, penetapan dilakukan saat pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2013 yang dilaksanakan pada 17 April 2014, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Procedure of Remuneration of the Board of Directors

The amount of remuneration received by each member of the Board of Directors refers to the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-04/MBU/2014 on the Guidelines of Salary Determination for the Board of Directors and the Board of Supervisors of State Owned Enterprises.

Remuneration of the Company's Board of Directors is proposed in the Meeting of the Board of Supervisors, through discussion on the consideration of input, survey results with similar industry and other sectors. The proposal is submitted together with the Board of Supervisors to the RPB, by referring to the above Minister's Regulation and the Company's ability, to be stipulated in the RPB. In 2014, the stipulation was conducted during the ratification of the Financial Report for Fiscal Year 2013 conducted on April 17, 2014, with details of calculation as follows:

No	**Uraian /** Type of Remuneration	**Keterangan /** Description
1	Gaji Salary	Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri / Salary of the President Director is determined by referring to the internal guidelines set out by the Minister.
		Gaji anggota Direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan sebesar 90% dari Gaji Direktur Utama / Salary of the other members of the Board of Directors is determined with the composition of scale of position amounted to 90% of the President Director's Salary.
2	Tunjangan Allowance	Tunjangan hari raya diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji / Allowance is given 1 (one) times the Salary.
		Tunjangan perumahan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut / Housing allowance is given under the following conditions: • Tunjangan perumahan termasuk biaya utilitas diberikan secara bulanan sebesar 40% dari gaji dengan ketentuan paling banyak sebesar Rp27.500.000,00 untuk wilayah Ibu Kota Negara / Housing allowance including utility cost is given on monthly basis amounted to 40% of the Salary with the maximum provision of Rp27,500,000.00 in the capital area of the State. • Perusahaan tidak memberikan fasilitas rumah jabatan bagi Direksi / The Company does not give any occupational housing facility for the Board of Directors.
		Tunjangan komunikasi bagi Direksi sebesar pemakaian (*at cost*) / Communication allowance for the Board of Directors is given at cost.

No	Uraian / Type of Remuneration	Keterangan / Description
		Asuransi purna jabatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut / Post Assignment Insurance is granted under the following conditions: • Asuransi purna jabatan diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti) / Post Assignment Insurance is granted during office tenure (from appointment until the expiration of the term of office) • Premi yang ditanggung perusahaan paling banyak 25% dari gaji dalam satu tahun / Premium covered by the company is 25% of annual Salary at maximum • Pemilihan program untuk asuransi purna jabatan ditetapkan oleh masing-masing anggota Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas BUMN / Selection of post assignment insurance program is determined by each member of the Board of Directors, Board of Supervisors and the Board of Supervisors of SOE. • Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian / Provision of premiums, fees or other terms relevant to the post assignment insurance has included premium for accident and death insurance.
		Tunjangan pakaian sesuai dengan yang dianggarkan di RKAP / Clothing allowance in accordance with the budget in RKAP
		Tunjangan cuti tahunan diberikan setiap tahun sebanyak 1 (satu) kali gaji/honorarium, setelah Direksi bekerja selama minimal 6 (enam) bulan berturut-turut / Annual leave allowance is given as many as 1 (one) times of Salary/Honorarium, after the Board of Directors had worked for the minimum of 6 (six) months consecutively.
		Tunjangan cuti besar diberikan paling banyak 2 (dua) kali gaji/honorarium per bulan apabila Direksi bekerja 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam satu periode jabatan. Selama tahun buku 2014 Perusahaan tidak mengeluarkan Tunjangan Cuti Besar / Grand leave allowance is given as many as 2 (two) times of Salary/Honorarium per month at maximum should the Directors had worked for 3 (three) years consecutively in one office period. During the Fiscal Year 2014, the Company did not issue any Grand Leave Allowance.
		Pajak tunjangan ditanggung dan menjadi beban Perusahaan / Allowance tax is covered by the Company
3	Fasilitas Facilities	Fasilitas kendaraan bagi Direksi sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta pemeliharaan dan operasionalnya. Spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh RPB. Fasilitas kendaraan ini harus dikembalikan kepada Perusahaan dalam 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat. / Transportation facility for the Board of Directors is given in the form of 1 (one) unit of service vehicle including its maintenance and operational cost. The vehicle specification and standards are determined by the RPB. The transportation facility should be returned within 30 (thirty) days after the end of tenure.
		Perusahaan telah memberikan fasilitas berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas kepada seluruh Direksi beserta biaya pemeliharaan dan operasional sehingga tidak diberikan lagi tunjangan transportasi / The Company has provided transportation facility in the form of 1 (one) unit of service vehicle to the Board of Directors including its maintenance and operational cost, so that transportation allowance would not be provided.

No	Uraian / Type of Remuneration	Keterangan / Description
		Fasilitas kesehatan / Health facilities: • Fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan / Health facilities in the form of helath insurance or medical reimbursement. • Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Direksi beserta seorang istri/suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan / Health facilities are granted to members of the Board of Directors and their wife/husband and the maximum of three children under the age of 25, provided if the children had married or had worked therefore the children is not entitled to receive health facilities. • Fasilitas kesehatan diberikan berupa / Health facilities are given in the form of: a. Rawat jalan dan obat / Outpatient care and medication b. Rawat inap dan obat / Hospitalization and medication c. *Medical check up*.
		Fasilitas uang pangkal dan iuran tahunan paling banyak 2 (dua) perkumpulan profesi / Entrance fee and annual fee for as may as 2 (two) professional associates
		Fasilitas biaya representasi Direksi mewakili Perusahaan sebesar *at cost* yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan batas maksimumnya ditetapkan oleh RPB / Representative allowance for the Board of Directors at cost in accordance with the Company's soundness and the maximum amount is determined by the RPB
		Fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/ perbuatan untuk dan atas nama jabatan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan / Legal aid facility in terms of actions for and on behalf of the position in relation to the means and purposes of the Company's business activities
		Pajak yang timbul akibat pemberian fasilitas ditanggung dan menjadi beban perusahaan / Taxes due to the provision of facilities are covered by the Company
4	Tantiem / Insentif Kinerja	Jumlahnya ditetapkan sesuai RPB yang disesuaikan dengan pencapaian KPI dan tingkat kesehatan Perusahaan / The amount is determined by the RPB and appropriated in accordance with KPI achievements and the Company's soundness
		Besarnya tantiem bagi anggota Direksi sebesar 90% dari Direktur Utama / The amount of tantiem for members of the Board of Directors is amounted to 90% of the tantiem for the President Director
		Pajak yang timbul atas tantiem direksi ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi / Taxes due to tantiem for the Board of Directors are covered by each Director.

Besaran Remunerasi Direksi

Jumlah remunerasi Direksi Perum Jamkrindo disesuaikan dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tanggal 27 Desember tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, maka Direksi yang mendapatkan Tunjangan Perumahan apabila tidak mendapatkan fasilitas Rumah Jabatan. Total Besaran Remunerasi Direksi selama 2014 sebesar Rp18.469.800.000.

The Amount of Board of Directors Remuneration

The amount of Remuneration of Board of Directors of Perum Jamkrindo is adjusted to the Decree of the Minister of SOEs Number: PER-04/MBU/2014 dated December 27 regarding the Determination Guidelines of the Remuneration of the Board of Directors, Board of Commissioners and Board of Supervisors of SOEs. Hence, members of Board of Directors are given the Housing Allowance if they are not given the Official Housing facilities. Total Remuneration for the Board of Directors in 2014 was Rp18,469,800,000.

Kebijakan Mengenai Rencana Suksesi Direksi

Suksesi Direksi menjadi momentum membangun tradisi alih generasi dan *role* model bagi Perum Jamkrindo, selain sebagai tantangan bagi Direksi terpilih dan segenap karyawan untuk menjawabnya dengan prestasi dan kinerja terbaik.

Untuk memastikan perusahaan dikelola oleh manajemen yang memiliki keahlian dan kompetensi yang semestinya, Perusahaan melakukan proses suksesi Direksi dimana penetapan calon Direksi Perum Jamkrindo ditetapkan berdasarkan pemenuhan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-04/MBU/2009 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/pojk.05/2014. Adapun proses pemilihan Direksi dilakukan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Eselon I terkait dan Sekretaris Kementerian. Proses penyeleksian oleh Tim Evaluasi, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemanggilan terhadap Calon Anggota Direksi yang termasuk dalam Daftar Calon yang telah disetujui oleh Menteri, untuk mengikuti UKK.
2. Melakukan pengujian terhadap Calon Anggota Direksi, jika pengujian tidak menggunakan Lembaga Profesional;
3. Melakukan evaluasi terhadap hasil pengujian Lembaga Profesional, jika pengujian menggunakan Lembaga Profesional;
4. Mengambil keputusan dan memberikan rekomendasi atas penilaian yang dilakukan.
5. Menetapkan hasil akhir evaluasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua Tim Evaluasi, untuk disampaikan kepada Menteri guna mendapatkan penetapan;
6. Menyampaikan seluruh dokumen UKK kepada Sekretaris Kementerian untuk diadministrasikan;
7. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri dalam rangka memperlancar proses UKK.

Policy on Board of Directors Succession Plan

Board of Directors Succession becomes momentum of traditions building over generations and role model for Perum Jamkrindo, besides as challenge to the elected Board of Directors and all employees to answer it by the achievements and best performances.

To ensure the Company is managed by appropriate and competent management, the Company made Board of Directors succession process in which nominations to the Board of Directors of Perum Jamkrindo is determined based on the fulfillment of Minister of SOE regulation No. PER-04/MBU/2009 and Financial Services Authority Regulation No. 5/pojk.05/2014. The Board of Directors election process conducted by the evaluation team appointed by the Minister based on the proposal of Echelon I related and the Secretary of the Ministry. The selection process by the evaluation team are as follows:

1. Calling the Board of Directors member candidates who are included in Candidate List which was approved by the Minister, to participate in UKK.
2. Testing the Board of Directors member candidates, if the test is not through the Professional Institute;
3. Evaluating the test results Professional Institute, if test is through the Professional Institute;
4. Making decisions and providing recommendations on assessment.
5. Stipulating the final results of evaluation signed by the Chairman and Vice Chairman of the Evaluation Team, to be submitted to the Minister in getting a determination;
6. Delivering the entire UKK documents to the Secretary of Ministry to be administered;
7. Carried out other duties given by the Minister in expediting the UKK process.

Tim Evaluasi memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menentukan calon terbaik. Sedangkan pembobotan dalam penilaian terhadap persyaratan materil calon Direksi, adalah sebagai berikut:

1. Integritas dan moral diberikan bobot penilaian sebesar 35% dengan perincian sebagai berikut:
   a. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur), diberikan bobot sebesar 10%;
   b. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 10%;
   c. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/ atau pihak lain sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 10%;
   d. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 5%;
2. Kompetensi teknis/keahlian diberikan bobot penilaian sebesar 55% dengan perincian sebagai berikut:
   a. Pengetahuan di bidang usaha BUMN yang bersangkutan diberikan bobot 5%
   b. Pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan diberikan bobot 10%
   c. Pengalaman dalam pengelolaan BUMN/ Perusahaan/Lembaga diberikan bobot 10%.
   d. Kemampuan memimpin dan bekerja sama diberikan bobot 10%
   e. Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan BUMN diberikan bobot 20%.
3. Psikologis diberikan bobot penilaian sebesar 10%

Evaluation Team provides recommendations to the Minister to determine the best candidate. While the scoring in the assessment of the material requirements of the prospective Directors are as follows:

1. Integrity and moral are scored at 35% with the following details:
   a. Never engaged in engineering acts and deviant practices at the respective place of work before the nomination (dishonest), the point is 10%;
   b. Never engaged in acts of breach of contract that may break commitments made at the respective place of work before the nomination (indecent behavior), the point is 10%;
   c. Never engaged in acts that could be categorized unlawfully benefit to the concerned and/or other parties before the nomination (indecent behavior), the point is10%;
   d. Never engaged in acts that can be categorized as a violation of the provisions relating to the principles of sound management of the company (indecent behavior), the point is 5%;
2. The point of technical competence/expertise is 55% with the following details:
   a. Knowledge in the field of SOE concerned is 5%
   b. Understanding of the management and corporate governance is 10%
   c. Experience in managing SOE/Company/ Organization is 10%.
   d. Ability to lead and cooperate is 10%
   e. The ability to formulate and implement strategic policies for the development of state-owned companies is 20%.
3. Psychological is 10%

ASSESSMENT DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Proses Pelaksanaan *Assessment*

Secara keseluruhan, RPB merupakan pihak yang melakukan penilaian atas kinerja Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam tahun yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas dan Direksi untuk tahun buku 2014 dilakukan dalam RPB Perum Jamkrindo akan diselenggarakan pada 2015.

Kriteria dan Penilaian terhadap Dewan Pengawas

Indikator penerapan GCG untuk Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/ pembelajaran secara berkelanjutan.
2. Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
3. Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.
4. Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.
5. Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.
6. Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak Perusahaan/ Perusahaan patungan.
7. Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegial) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.
8. Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.

ASSESSMENT ON BOARD OF SUPERVISORS AND BOARD OF DIRECTORS

Assessment Implementation Process

Overall, RPB is a party to perform an assessment of the performance of Supervisory Board and Board of Directors related to duties and responsibilities implementation in the relevant year. Accountability of Board of Supervisors and Board of Directors' duties and responsibilities for the fiscal year 2014 carried out in Perum Jamkrindo RPB which will be held in 2015.

Criteria and Assessment of Board of Supervisors

GCG implementation indicators for Board of Supervisors are as follows:

1. Board of Supervisors carries out training/learning program on an ongoing basis.
2. Board of Supervisors distributes the duties, authorities and responsibilities clearly and determines the factors that are needed to support the implementation of the Board of Supervisors duties.
3. Board of Supervisors approves RJPP and RKAP draft submitted by the Board of Directors.
4. Board of Supervisors directs the Board of Directors on the implementation of Company's plans and policies.
5. Board of Supervisors supervises Board of Directors on the implementation of the Company's plans and policies.
6. Board of Supervisors supervises the implementation of management policies of subsidiaries/joint venture.
7. Board of Supervisors plays a role in the nomination of Board of Directors members, assesses the Board of Directors performance (individually and collectively) and proposes bonuses/performance incentives according to applicable regulations and considers the Board of Directors performance.
8. Board of Supervisors takes action against potential conflicts of interest that concern it.

9. Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
10. Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri rapat Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
11. Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kesekretariatan Dewan Pengawas.
12. Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Pengawas yang efektif.

Berdasarkan hasil *assessment* terhadap penerapan 12 (dua belas) indikator di atas melalui pengujian 43 (empat puluh tiga) paramater dengan skor yang dicapai 31,592 dari bobot 35,00 atau setara persentase pencapaian sebesar 90,26%.

9. Board of Supervisors monitors and ensures that the Good Corporate Governance practice has been implemented effectively and sustainably.
10. Board of Supervisors holds Board of Supervisors meeting which is effective and attends the meetings in accordance with statutory provisions.
11. Board of Supervisors has the Secretary to support the secretariat of Board of Supervisors.
12. Board of Supervisors has an effective committee.

Based on assessment results of the application of 12 (twelve) indicators above through testing of 43 (forty-three) parameters, the score was 31.592 points of 35.00 or equivalent to 90.26%.

Kriteria dan Penilaian terhadap Direksi

Indikator penerapan GCG untuk Direksi adalah sebanyak 13 (tiga belas) indikator, yaitu:

1. Direksi melaksanakan program pelatihan/ pembelajaran secara berkelanjutan.
2. Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.
3. Direksi menyusun perencanan Perusahaan.
4. Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perusahaan.
5. Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.
6. Direksi melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.
7. Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perusahaan dan *stakehoders*.
8. Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajamen di bawah Direksi.
9. Direksi memastikan Perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Pengawas dan Pemilik Modal tepat waktu.

Criteria and Assessment of Board of Directors

GCG implementation of Board of Supervisors has 13 indicators, which are:

1. Board of Directors carries out a training/learning program on an ongoing basis.
2. Board of Directors distributes the duties/functions, authorities and responsibilities clearly.
3. Board of Directors prepares the Company's planning.
4. Board of Directors plays a role in the fulfillment of the Company's performance targets.
5. Board of Directors carries out the operational and financial control over the implementation of the Company's plans and policies
6. Board of Directors carries out the Company management in accordance with the prevailing laws and regulations and also articles of association.
7. Board of Directors having relationship that gives added value to the Company and stakeholders.
8. Board of Directors monitors and manages the potential conflicts of interest of Board of Directors members and management under Board of Directors.
9. Board of Directors ensures the Company to implement appropriate disclosure of information and communications in accordance with the prevailing laws and regulations and delivery of information to Board of Supervisors and Shareholder timely.

10. Direksi menyelenggarakan rapat dan menghadiri Rapat Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
11. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.
12. Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif.
13. Direksi menyelenggarakan RPB Tahunan dan RPB lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil *assessment* terhadap penerapan 13 (tiga belas) indikator diatas melalui pengujian 52 (lima puluh dua) parameter dengan skor yang dicapai 32,931 dari bobot 35,00 atau setara prosentase pencapaian sebesar 94,09%.

10. Board of Directors holds meetings and attends Board of Supervisors meetings in accordance with the statutory provisions.
11. Board of Directors shall hold qualified and effective internal controls.
12. Board of Directors performs the functions of the Corporate Secretary which are qualified and effective.
13. Board of Directors holds Annual RPB and other RPBs in accordance with laws and regulations.

Based on assessment results of the application of 13 (thirteen) indicators above through testing of 52 (fifty two) parameters, the score was 32.931 of 35.00 or equivalent to 94.09%.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Kualitas setiap insan dalam Perusahaan merupakan faktor yang amat signifikan dalam menunjang kemajuan Perusahaan pada masa mendatang. Kualitas ini dapat dilihat baik dari segi keterampilan, kompetensi maupun etos kerja yang dipandang sebagai kunci utama keberhasilan dan kemajuan Perusahaan.

Kualitas khususnya dibutuhkan bagi kepemimpinan. Oleh karenanya, Perusahaan memandang perlu adanya kompetensi yang beragam serta mendukung peningkatan kompetensi serta berfokus untuk memiliki keberagaman keahlian guna memenuhi kelengkapan keahlian yang diperlukan dalam jajaran kepemimpinan khususnya bagi jajaran Dewan Pengawas serta Direksi.

Oleh karena itu, pelaksanaan tata kelola perusahaan dirancang untuk dapat menciptakan iklim yang mendorong adanya partisipasi konkret seluruh pemangku kepentingan serta adanya keberagamanan dalam susunan komposisi Dewan Pengawas maupun Direksi. Keberagaman ini diwujudkan melalui pembentukan komposisi Dewan Pengawas maupun Direksi yang memenuhi berbagai aspek yang diperlukan baik dari segi kualifikasi akademis, keterampilan, usia serta atas dasar prinsip anti diskriminasi.

BOARD OF SUPERVISORS AND BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

The quality of every member of the Company is a significant factor in supporting the Company advancement in the future. The quality can be seen both in terms of skills, competence and work ethic that is deemed as key to the Company's success and advancement.

Particularly, the quality is required for leadership. Therefore, the Company deems it is necessary for diverse competencies and supports the increased competence and focuses to have a diversity of expertise to fulfill the completeness of the required expertise, especially in leadership, especially Board of Supervisors and Board of Directors.

Therefore, the corporate governance implementation is designed to create a climate that encourages the concrete participation of all stakeholders as well as the diversity in Board of Supervisors and Board of Directors composition. This diversity is implemented through the formation of Board of Supervisors and Board of Directors composition that meets the various aspects needed both in terms of academic qualifications, skills, age and on the basis of anti-discrimination principles.

INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, SAMPAI KEPADA PEMILIK INDIVIDU

Perum Jamkrindo merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya dimiliki 100% oleh negara dan hingga tahun 2013 jumlah Penyertaan Modal Negara (PMN) di Perum Jamkrindo sebesar Rp1,12 triliun.

INFORMATION ON MAJOR AND CONTROLLING SHAREHOLDERS, EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, TO INDIVIDUAL OWNERS

Perum Jamkrindo is State Owned Enterprise whose shares are 100% owned by the state and until 2013 the number of State Capital Investment (PMN) in Perum Jamkrindo amounted to Rp1.12 trillion.

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DIREKSI, DEWAN PENGAWAS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

Perum Jamkrindo merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Negara, sehingga baik jajaran Direksi maupun Dewan Pengawas merupakan utusan Pemerintah yang menduduki jabatan di Perum Jamkrindo selaku pemegang saham utama.

RELATIONSHIP BETWEEN AFFILIATED BOARD OF DIRECTORS, SUPERVISORY BOARD, AND MAJOR AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDERS

Perum Jamkrindo is State Owned Enterprise whose shares are fully owned by the State, so that both the Board of Directors and Supervisory Board are the government delegates as the major shareholder of Perum Jamkrindo.

KOMITE-KOMITE YANG BERADA DI BAWAH DEWAN PENGAWAS

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas dibantu oleh Komite Audit serta Komite Investasi dan Risiko Usaha.

COMMITTEES UNDER BOARD OF SUPERVISORS

In the implementation its duties and responsibilities, Board of Supervisors is assisted by Audit Committee as well as Investment and Business Risk Committee.

KOMITE AUDIT

Pembentukan Komite Audit serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya didasarkan pada Peraturan Pemerintah R.I. No. 41 tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, Peraturan Pemerintah R.I. No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN, dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN.

AUDIT COMMITTEE

The establishment of Audit Committee and the implementation of its duties and responsibilities are based on R.I Government Regulation No. 41 year 2008 on Indonesian Credit Guarantee Public Corporation, Government Regulation No. 45 year 2005 on the Establishment, Management, Monitoring, and Dissolution of SOE, and Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2006 on Audit Committee for SOEs.

Komite Audit bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Komite Audit memiliki independensi dalam pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.

Audit Committee works collectively to help Board of Supervisors in carrying out its duties. Audit Committee has independency in performing its duties and be responsible to the Board of Trustees.

Struktur, Keanggotaan, Integritas, Keahlian, dan Independensi Komite Audit

Struktur, Keanggotaan, Integritas, Keahlian, dan Independensi Komite Audit Perum Jamkrindo sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN dan Surat Menteri Negara BUMN No. S-375/MBU.Wk/2011 tanggal 5 Desember 2011 tentang Kebijakan Menteri Negara BUMN dalam Pengurusan dan Pengawasan BUMN.

Komite Audit dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari anggota Dewan Pengawas, dan jumlah anggota Komite Audit yang berasal dari luar Dewan Pengawas adalah sebanyak 2 (dua) orang. Anggota Komite Audit memiliki integritas yang baik dan mempunyai pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan. Selain itu, anggota Komite Audit Perum Jamkrindo mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan serta memahami industri bisnis Perum Jamkrindo. Anggota Komite Audit juga tidak mempunyai potensi benturan kepentingan dengan Perum Jamkrindo.

Susunan Anggota Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP-04/DP-JAMKRINDO/VII/2013 tentang perubahan susunan Komite Audit pada Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, komposisi dan masa tugas Ketua dan Anggota Komite Audit selama 2014 adalah sebagai berikut:

Structure, Membership, Integrity, Expertise and Independency of Audit Committee

Structure, Membership, Integrity, Expertise and Independency of Audit Committee Perum Jamkrindo already meet the conditions stipulated in Minister of SOE Regulation No. PER-05/MBU/2006 on Audit Committee for SOE and Minister of SOE Decree No. S-375/MBU.Wk/2011 dated December 5, 2011 on the Minister of SOE Policy in the Management and Supervision of SOEs.

Audit Committee is led by a chairman who comes from members of Board of Supervisors, and the number of Audit Committee members who come from outside Supervisory Board is 2 (two) persons. Audit Committee members have good integrity and considerable work experience in supervising/inspecting. In addition, Audit Committee members of Perum Jamkrindo have the educational background of accounting and finance as well as understand the Perum Jamkrindo business industry. Audit Committee members also do not have the potential conflicts of interest with Perum Jamkrindo.

Audit Committee Members Composition

Based on Supervisory Board Decree No.KEP-04/DP-JAMKRINDO/VII/2013 on changes in Audit Committee composition on Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, composition and tenure of Chairman and Members of Audit Committee in 2014 is as follows:

Nama / Name	**Jabatan /** Position	**Masa Tugas /** Tenure
Dahlan Siamat	Ketua / Chairman	26 Juli 2013 s.d. 26 Juli 2015 July 26, 2013 to July 26, 2015
Achmad Mamun Muljono Jogasara	Anggota / Member	1 Juli 2014 s.d. 1 Juli 2016 Juli 1, 2014 to Juli 1, 2016
Fajar Karyanto	Anggota / Member	26 Juli 2013 s.d. 26 Juli 2015 July 26, 2013 to July 26, 2015

Profil Anggota Komite Audit

Dahlan Siamat - Ketua

Profil Ketua Komite Audit sudah disajikan dalam profil Dewan Pengawas.

Audit Committee Members Profile

Dahlan Siamat - Chairman

Profile of Audit Committee Chairman has been presented in the profile of Board of Supervisors section.

Nama / Name	**Achmad Mamun Muljono Jogasara**
Jabatan / Position	Anggota Komite Audit / Audit Committee Member
Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Keputusan Dewan Pengawas Nomor : KEP-09/DP-JAMKRINDO/VII/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komite Audit pada Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia / Board of Supervisors Decree No. KEP-09/DP-Jamkrindo/VII/2014 on Dismissal and Appointment of Audit Committee at Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia
Umur / Age	55 tahun / years old
Warga Negara / Nationality	Indonesia / Indonesian
Pendidikan / Education	Akuntan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada 1987 / Accountancy, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara in 1987
Riwayat Pekerjaan / Work Experience	
2010-sekarang/present	Anggota Komite Audit Perum Jamkrindo / Audit Committee Member at Perum Jamkrindo
1993-2010	KAP AMM. Jogasara, Akuntan / KAP AMM. Jogasara, Accountant
2006-2007	Kepala Satuan Anti Korupsi BRR NAD-Nias / Head of Anti-Corruption Unit at BRR NAD-Nias
1991-1993	Manajer Audit, KAP Drs. Mustafa Lubis / Audit Manager at KAP Drs. Mustafa Lubis
1987-1991	Akuntan di Pusat Pembukuan Keuangan Negara, Departemen Keuangan / Accountant at Financial Accounting Center of State, Ministry of Finance
1987-1987	Manajer Audit, KAP Drs. Mustafa Lubis / Audit Manager at Drs. Mustafa Lubis
1984-1987	Auditor pada BPKP / Auditor at BPKP
1981-1984	Auditor pada Ditjen. Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (DJPKN), Departemen Keuangan / Auditor at Directorate General of Development Finance Controller (DJPKN), Ministry of Finance
Pelatihan / Training	
	Pelatihan wajib profesi IAI / IAPI, 30 SKP setiap tahun / Compulsory training of profession IAI / IAPI, 30 SKP each year.
1993	Pelatihan Sistem Akuntansi dan Keuangan PT. Elnusa (Trainer) / Accounting and Financial System Training PT. Elnusa (Trainer)
1992	Pelatihan Sistem Akuntansi Pemerintah, Departemen Keuangan (Trainer) / Government Accounting System Training, Ministry of Finance (Trainer)
1990-1991	Pelatihan Sistem Akuntansi Proyek Berbantuan Luar Negeri, Departemen Pertanian (Trainer) / Foreign Assisted Projects Accounting System Training, Ministry of Agriculture (Trainer)
1998	Review Ujian Sertifikasi Akuntan Publik, IAI (Trainee) / Public Accountant Certification Exam Review, IAI (Trainee)
1995 - 1997	Pelatihan Pemeriksaan Sederhana Lapangan PPN dan PPnBM, Direktorat Jenderal Pajak (Trainee) / PPN and PPnBM Field Simple Examination Training, Directorate General of Taxation (Trainee)
1995-1997	Pelatihan Pemeriksaan Sederhana Lapangan PPN dan PPnBM, Direktorat Jenderal Pajak (Trainee) / PPN and PPnBM Field Simple Examination Training, Directorate General of Taxation (Trainee)
1991/1992	Brevet A, B dan C (Trainee) / Brevet A, B dan C (Trainee)
1989	Training for Trainer Workshop, SGV Utomo (Trainee) / Training for Trainer Workshop, SGV Utomo (Trainee)
1981	Pelatihan Manajemen Audit, BPKP (Trainee) / Audit Management Training, BPKP (Trainee)

Nama / Name	**Fajar Karyanto**
Jabatan / Position	Anggota Komite Audit / Audit Committee Member
Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Keputusan Dewan Pengawas Nomor : Kep-04/DP-JAMKRINDO/VII/2013 tentang perubahan susunan Komite Audit pada Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia / Board of Supervisors Decree No. Kep-04/DP-Jamkrindo/VII/2013 on changes in Audit Committee composition at Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia
Umur / Age	32 tahun / years old
Warga Negara / Nationality	Indonesia / Indonesian
Pendidikan / Education	S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 2010 / Bachelor of Accounting, Faculty of Economics, University of Indonesia in 2010
	D3 Akuntansi STAN JAKARTA pada 2000 / Diploma in Accounting at STAN Jakarta in 2000
Riwayat Pekerjaan / Work Experience	
2014 - sekarang / present	Kedeputian bidang usaha jasa Keuangan, jasa Konstruksi dan jasa lain / Deputy in Financial services, Construction service, and other services
	Keasdepan usaha Pembiayaan dan jasa lain / Assistant Deputy of Financing business and other services
	Ketua bidang usaha Pembiayaan dan jasa lain / Head of Financing business and other services
	PLT. Kepala Sub bidang usaha Pembiayaan dan jasa lain / Acting Official of Sub-Financing business and other services
Pelatihan / Training	
	Diklat Prajabatan / Pre-emplo Training
	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa / Goods and Services Procurement Training

Uraian Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Memperhatikan kewajiban yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah R.I. No. 41 tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dan Peraturan Pemerintah RI No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN, Dewan Pengawas Perum Jamkrindo telah membentuk Komite Audit.

Pembentukan Komite Audit serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya didasarkan pada Peraturan Pemerintah R.I. No. 41 tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, Peraturan Pemerintah R.I. No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN, dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN.

Description of Function, Duties, and Responsibilities of Audit Committee

Considering the responsibilities stipualted in the Company's Articles of Association, as stipulated in the Government Regulation of RI No. 41 year 2008 concerning Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia and Government Regulation of RI No. 45 year 2005 regarding Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of SOE, Board of Supervisors of Perum Jamkrindo has established Audit Committee.

The establishment of Audit Committee and the implementation of duties and responsibilities is based on Government Regulation of RI No. 41 year 2008 concerning Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, Government of Indonesia of RI No. 45 year 2005 concerning Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of SOE, and Regulation of Minister of SOE No. PER-05/MBU/2006 concerning Audit Committe for SOE.

Komite Audit Perum Jamkrindo bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit Perum Jamkrindo memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan efektivitas pelaksanaan Tugas Auditor Eksternal dan Auditor Internal.
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Eksternal.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan Sistem Pengendalian Manajemen serta pelaksanaannya.
4. Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perum Jamkrindo.
5. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Pemilik Modal.
6. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Pengawas lainnya.

Laporan Singkat Pelaksanaan Program Kerja Komite Audit 2013

Realisasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah dilakukan oleh Komite Audit selama 2014 adalah sebagai berikut:

1. Penilaian terhadap sistem pengendalian internal Perum Jamkrindo
   - Pemutkahiran/*updating* atas SOP penjaminan kredit multiguna berbasis risiko
   - Pengaturan mekanisme pengadaan dan evalusi Mitra *co-Guarantee*
   - Penambahan kebijakan umum terkait standar minimal dalam penyusunan perjanjian khusus mengenai syarat nasabah yang dapat dijamin

Audit Committee of Perum Jamkrindo cooperates collectively and has function to assist the Board of Supervisors in carrying out its duties. In implementing its function, the Audit Committee of Perum Jamkrindo has duties and responsibilities as follows:

1. Assisting the Board of Supervisors in ensuring the effectiveness of Internal Control System and Duties of Internal and External Auditors.
2. Assessing the implementation of activities and audit findings that are implemented by Internal Audit and External Auditor.
3. Providing recommendation concerning the improvement of Management Control System and its implementation.
4. Ensuring that there is satisfactory review procedure on all information issued by Perum Jamkrindo.
5. Providing recommendation on the appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to Board of Supervisors to be submitted to the Shareholders.
6. Identifying things that need attention of the Board of Supervisors and other duties of the Board of Supervisors.

Brief Report of the Audit Committee Work Program Implementation in 2013

Realization of duties and responsibilities that have been carried out by Audit Committee during 2014 are as follows:

1. Assessment of internal control system of Perum Jamkrindo
   - Updating the risk-based multipurpose credit guarantee SOP
   - Setting the procurement and evaluation mechanisms of co-Guarantee Partners
   - Addition of general policy related to minimum standards in the preparation of specific agreement on customer requirements that can be guaranteed

2. Penilaian terhadap satuan pengawas Internal Perum Jamkrindo
   - Evaluasi atas dukungan manajemen dan Dewan Pengawas terhadap posisi dan peran SPI
   - Efektifitas pelaksanaan penugasan audit
3. Penilaian terhadap Auditor Eksternal

2. Assessment of internal control unit of Perum Jamkrindo
   - Evaluation on management and Board of Supervisors' support on the position and role of SPI
   - Audit assignment implementation effectiveness
3. Assessment of External Auditor

Besaran Remunerasi Komite Audit / **The Amount of Audit Committee Remuneration**

No.	Uraian / Description	Anggota / Membership
1	Gaji/Honorarium / Salary/Honorarium	18.400.000
2	THR per Tahun / Religious Holiday Allowance (THR) per year	18.400.000
3	Komunikasi per bulan / Communication per month	-
4	Pakaian per tahun / Cloths per year	-
5	Cuti per tahun (1xGaji/Honor per bulan) / Leave per year (1x Salary/Honor per month)	-
6	Tunjangan perumahan per bulan / Housing allowance per month	-
7	Tantiem / Bonus TB 2014 sblm Pph 21 / Tantiem/Bonus TB 2014 Before Pph 21	-

Frekuensi Rapat Komite Audit

Selama 2014, Komite Audit telah menyelanggarakan rapat yang ditujukan untuk membantu tugas Dewan Pengawas dalam mengawasi pengelolaan Perusahaan. Secara rinci, frekuensi rapat yang dilakukan sebagai berikut:

Audit Committee Meetings Frequency

Throughout 2014, Audit Committee has held meetings to assist Board of Supervisors' duties in supervising the Company management. In detail, the frequency of meetings held are as follow:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meeting	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Persentase / Percentage
Dahlan Siamat	Ketua / Chairman	12	4	33,33%
Achmad Mamun Muljono Jogasara	Anggota / Member	12	4	33,33%
Fajar Karyanto	Anggota / Member	12	4	33,33%

KOMITE INVESTASI DAN RISIKO USAHA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41/2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia sebagai tindaklanjut atas Surat Menteri Negara BUMN No. S-328/MBU.4/2011 tanggal 25 Oktober 2011 perihal Laporan Hasil *Assessment* Penerapan GCG Perum Jamkrindo Tahun 2010, dengan memperhatikan kondisi bahwa:

1. Perum Jamkrindo mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penjaminan kredit bagi

INVESTMENT AND BUSINESS RISK COMMITTEE

Based on the Republic of Indonesia Government Regulation No. 41/2008 on the Indonesian Credit Guarantee Public Corporation as the follow-up of Minister of SOE Decree No. S-328/MBU.4/2011 dated October 25, 2011 on the Assessment Report of Perum Jamkrindo GCG implementation in 2010, to the conditions that:

1. Perum Jamkrindo has a main duty to implement the credit guarantee activities for Micro, Small, Medium

Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi, yang menghadapi risiko tinggi, terutama risiko pembayaran klaim (tagihan ganti rugi dari pihak perbankan selaku pemberi kredit) akibat kredit macet.
2. Perum Jamkrindo mengelola dana dalam jumlah yang relatif besar yang pengelolaannya perlu diselenggarakan dengan baik melalui penempatan pada berbagai instrument investasi keuangan dengan memperhatikan keamanan dan optimalisasi pendapatan.

Enterprises and Cooperatives, which face a high risk, especially the risk of claims payment (claims for compensation from the bank as the creditor) due to bad credit.
2. Perum Jamkrindo manages funds in a relatively large amount which management needs to be held up well through the placement of various instruments of financial investment by taking into account the security and optimization of revenue.

Maka dibentuk Komite Investasi dan Risiko Usaha pada Desember 2011.

Then the Investment and Business Risk Committee is established in December 2011.

Susunan Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor KEP-04/DP-JAMKRINDO/III/2014 tentang Pengangkatan Ketua Komite Invetasi dan Risiko Usaha pada Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia dan KEP-05/DP-JAMKRINDO/V/2014 tentang Pengangkatan anggota Komite Invetasi dan Risiko Usaha pada Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia, komposisi dan masa tugas Ketua dan Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha selama 2014 adalah sebagai berikut:

Members of Investment and Business Risk Committee

Based on Board of Supervisors Decree No. KEP-04/DP-Jamkrindo/III/2014 on the appointment of Chairman of Investment and Business Risk Commmttee at Indonesian Credit Guarantee Public Corporate and KEP-05/DP-Jamkrindo/V/2014 on the appointment of members of Investment and Business Risk Committee at Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia, composition and tenure of Chairman and Members of Investment and Business Risk Committee during 2014 are as follows:

Nama / Name	**Jabatan /** Position	**Masa Tugas /** Tenure
Subandriyo	Ketua / Chairman	21 Maret 2014 s.d 21 Maret 2017 March 21, 2014 to March 21, 2017
Slamet Wiyono	Anggota / Member	1 Mei 2014 s.d 1 Mei 2017 May 1, 2014 to May 1, 2017

Profil Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha

Subrandriyo - Ketua

Profil Ketua Komite Investasi dan Risiko Usaha sudah disajikan dalam profil Dewan Pengawas.

Investment and Business Risk Committee Members Profile

Subrandriyo - Chairman

Investment and Business Risk Committee Chairman profile has been presented in the Board of Supervisors profile page.

Nama / Name	**Slamet Wiyono**
Jabatan / Position	Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha / Investment and Business Risk Committee Member
Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Keputusan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo Nomor : KEP-05/DP-JAMKRINDO/V/2014 tentang pengangkatan anggota komite investasi dan risiko usaha pada Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia / Board of Supervisors Decree No. KEP-05/DP-JAMKRINDO/V/2014 on the appointment of investment and business risk committee member at Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia

Umur / Age	56 tahun / years old	
Warga Negara / Nationality	Indonesia / Indonesian	
Pendidikan / Education	S3 bidang Islamic Economics and Finance Universitas Trisakti (dalam proses penyelesaian) / Doctor of Islamic Economics and Finance at Trisakti University(in process)	
	Sertifikasi Akuntansi Syariah dari Ikatan Akuntan Indonesia pada 2010 / Islamic Accounting certification from Indonesian Institute of Accountants in 2010	
	S2 bidang Accounting and Finance RVB Belanda, Maastricht pada 1993 / Master of Accounting and Finance at RVB Maastricht, the Netherlands in 1993	
	S1 bidang Akuntansi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 1984 / Bachelor of Accounting and Finance at RVB Maastricht, the Netherlands in 1993	
Jabatan Dalam Pengelolaan Institusi / Position in Institution's Management		
2013-2018	Wakil Ketua Kopkar FE Usakti / Vice Chairman of FE Employee Cooperative	Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti / Economics Faculty of Trisakti University
2008-2009	Aggota Tim Evaluasi PKM / Member of PKM Evaluation Team	Universitas Trisakti / Trisakti University
2010	Sekretaris pendirian Diploma 4 Komunikasi / Secretary of establishment of Diploma 4 Communications	Universitas Trisakti / Trisakti University
1996	Anggota Senat Fakultas / Faculty Senate Member	Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti / Economics Faculty of Trisakti University
1996 – 1999	Direktur Lembaga Administrasi Perusahaan (LAP) / Director of Company Administration Institute	Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti / Economics Faculty of Trisakti University
1992-1993; 1994-1996	Sekretaris Jurusan Akuntansi FE Usakti Jakarta / Secretary of Accounting Major in FE Usakti Jakarta	Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti / Economics Faculty of Trisakti University
Pelatihan / Training		**Penyelenggara / Organizer**
2014	Pelatihan Akuntansi Perbankan Syariah (dalam negeri) / Sharia Banking Accounting Training (within the country)	IAI Kelapa Gading, Jakarta
2013	Pelatihan software SEM AMOS dan LISREL untuk penelitian Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (Dalam negeri) / SEM AMOS and LISREL softwares for Economic, Management, and Accounting research training (within the country)	Fakultas Ekonomi Usakti / Economics Faculty of Usakti
2012	Pelatihan software Eview untuk penelitian Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (Dalam negeri) / Eview Software for Economic, Management, and Accounting research training (within the country)	Fakultas Ekonomi Usakti / Economics Faculty of Usakti
2012	Pelatihan Asesor Teknisi Akuntansi (Dalam negeri) / Accounting Technicians Assessor Training (within the country)	LSP Teknisi Akuntansi / Accounting Technician LSP
2011	Pelatihan IFRS (Dalam negeri) / IFRS Training (within the country)	Fakultas Ekonomi Usakti / Economics Faculty of Usakti

2010	Pelatihan Kebahasaan dalam Translatasi IFRS ke Standar Akuntansi Keuangan Indonesia(dalam negeri) / Linguistic training in IFRS Translation to the Indonesian Financial Accounting Standards (within the country)	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bekerjasama dengan UIN Syahid Jakarta / Indonesian Institute of Accountants coordinating with UIN Syahid Jakarta
2009	Training of Trainers Dosen Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara (dalam negeri) / Training of Trainers for Government Accounting/State Financial Supervisory Lecturer (within the country)	Inspektorat Jenderal Depdiknas / Inspector General of Department of National Education
2009	Pelatihan IFRS (International Financial Reporting Standard) untuk Aktiva Tetap (dalam negeri) / IFRS (International Financial Reporting Standard) Training for Fixed Assets (within the country)	Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti / Economics Faculty of Trisakti University
2008	Training of Trainers Dosen Pemeriksaan Akuntansi bagi Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) (dalam negeri) / Training of Trainers for Accounting Examination Lecturer for Regional Supervisory Agency (BAWASDA) (within the country)	Inspektorat Jenderal Depdiknas / Inspector General of Department of National Education
2008	Pelatihan IFRS (International Financial Reporting Standard) (dalam negeri) / IFRS (International Financial Reporting Standard) Training (within the country)	Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti / Economics Faculty of Trisakti University
2007	Pelatihan Perbankan Syariah Dalam Rangka Sosialisasi Ekonomi dan Perbankan Syariahdi Indonesia (dalam negeri) / Sharia Banking Training for Economic and Sharia Banking Socialization in Indonesia (within the country)	Pusat Studi Ekonomi Syariah FE Usakti / Sharia Economic Study Center of FE Usakti
2006	Pelatihan Intellectual Quotiant, Emotional Quotiant, Spiritual Quotiant dan Adverstiy Quotiant bagi Dosen (dalam negeri) / wIntellectual Quotiant, Emotional Quotiant, Spiritual Quotiant and Adverstiy Quotiant Training for Lecturer (within the country)	Fakultas Ekonomi Usakti / Economics Faculty of Trisakti University
2005	Pelatihan Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia (dalam negeri) / Sharia Accounting Development in Indonesia Training (within the country)	Fakultas Ekonomi Usakti / Economics Faculty of Trisakti University
2003	Pelatihan Teknologi Informasi Perpustakaan bagi Dosen Wali (dalam negeri) / Library Information Technology Training for Guardian Lecturer (within the country)	Universitas Trisakti / Trisakti University
2003	Metode Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penulisan Laporan PKM sebagai Karya Tulis Ilmiah (dalam negeri) / Method of Community Services and PKM Report Writing as a Scientific Essay (within the country)	Universitas Trisakti / Trisakti University

2003	Pelatihan Akuntansi Perbankan Syariah menurut PSAK 59 (dalam negeri) / Sharia Banking Accounting based on PSAK 59 (within the country)	Fakultas Ekonomi Usakti / Economics Faculty of Trisakti University
2002	Pelatihan Keuangan Syariah di Karim Business Consulting (dalam negeri) / Sharia Finance Training in Karim Business Consulting (within the country)	The Karim Business Consulting Jakarta
2001	Pelatihan Total Quality Management (dalam negeri) / Total Quality Management Training (within the country)	Fakultas Ekonomi Usakti / Economics Faculty of Trisakti University
2000	Penyegaran dan Pembekalan Dosen Wali Mahasiswa / Refreshment and debriefing for Academic Supervisor	Fakultas Ekonomi Usakti / Economics Faculty of Trisakti University

Tugas Komite Investasi dan Risiko Usaha

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Investasi dan Risiko Usaha Perum Jamkrindo memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. melakukan pemantauan terhadap transaksi, pengelolaan, kebijakan dan pedoman keuangan dan investasi.
2. melakukan *review* terhadap kinerja investasi, penerapan manajemen risiko, dan struktur permodalan.
3. memberikan masukan mengenai hal-hal yang perlu mendapat perhatian kepada Dewan Pengawas dalam rangka memberi nasihat kepada Direksi terkait dengan pengelolaan investasi dan risiko usaha
4. membuat rencana kerja dan anggaran tahunan yang diselaraskan dengan rencana kerja tahunan pengelolaan risiko dan investasi yang diselenggarakan Direksi.
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengawas yang terkait dengan pemantauan risiko usaha dan investasi.
6. melaporkan hasil-hasil kerja Komite kepada Dewan Pengawas.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Investasi dan Risiko Usaha

Realisasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah dilakukan oleh Komite Investasi dan Risiko Usaha selama 2014 adalah sebagai berikut:

Investment and Business Risk Committee's Duties

In carrying out its functions, Investment and Business Risk Management of Perum Jamkrindo has duties and responsibilities as follows:

1. Monitoring the transaction, management, policy and guideline of finance and investment.
2. Reviewing the investment performance, risk management implementation, and capital structure.
3. Providing suggestions on matters that need to be concerned to Board of Supervisors in advising Board of Directors regarding the investment and business risk management.
4. Preparing work plan and annual budget that is aligned with annual work plan of risk and investment management organized by Board of Directors.
5. Carrying out other duties assigned by Board of Supervisors related to business risk and investment monitoring.
6. Reporting the Committee's work results to Board of Supervisors.

Report on Investment and Business Risk Committee's Duties and Responsibilities Implementation

Realization of duties and responsibilities implementation that have been carried out by Investment and Business Risk Committee during 2014 are as follows:

1. Investasi tahun 2014
   Dalam rangka melakukan pengawasan atas investasi, KIRU melakukan pemantauan terhadap implementasi seluruh jenis portofolio investasi periode tahun 2014.
2. RKAP 2014
   Dalam rangka pelaksanaan evaluasi kecukupan pertimbangan pengelolaan risiko dan investasi dalam perencanaan pengurusan perusahaan (RJPP/RKAP), KIRU melakukan pengawasan dan pemantauan kinerja keuangan dengan melakukan evaluasi terhadap laporan kinerja yang disampaikan perum Jamkrindo secara bulanan. Evaluasi difokuskan kepada upaya perusahaan dalam mencapai target pendapatan IJP, Beban klaim, dan biaya yang ditetapkan dalam RKAP 2014 dari bisnis penjaminan KUR dan Non KUR (eksisting) serta pendapatan dan kegiatan investasi.
3. Manajemen Risiko
   KIRU melakukan pemantauan terhadap penaganan beberapa risiko usaha, diantaranya adalah risiko penjaminan kredit.
4. Tugas lainnya
   Beberapa kegiatan lain yang dilaksanakan KIRU sesuai dengan penugasan dari Dewan Pengawas diantaranya adalah monitoring tindak lanjut saran/nasihat Dewan Pengawas, pembahasan lanjutan atas kajian pendirian Jamkrindo Syariah.
5. Rapat
   KIRU melaksanakan rapat setiap bulan dengan Dewan Pengawas untuk membahas kinerja usaha Jamkrindo dan memberikan saran kepada kepada Direksi. Di samping itu, KIRU juga melakukan rapat pada setiap bulannya baik secara internal KIRU antara KIRU dan Komite Audit maupun dengan Kepala Divisi/staf terkait dengan tugas KIRU dan tugas-tugas lain dari Dewan Pengawas.

1. Investment in 2014
   In supervising the investment, KIRU monitored the implementation of all kinds of investment portfolios in period of 2014.
2. RKAP 2014
   In implementing the evaluation of risk management and investment considerations adequacy in planning the Company management (RJPP/CBP), KIRU supervising and monitoring the financial performance by evaluating the performance reports submitted by Perum Jamkrindo on a monthly basis. Evaluation focused on the company's efforts in achieving the target of IJP revenues, Claim expenses, and costs set out in the RKAP 2014 from KUR and non-KUR (existing) guarantee business as well as income and investment activities.
3. Risk Management
   KIRU monitors the handling of several business risk handling, such as credit guarantee risk.

4. Other duties
   Several activities are carried out by KIRU in accordance with the assignment from Board of Supervisors include monitoring the follow-up suggestions/advices of Board of Supervisors, further discussions on the review of Jamkrindo Syariah establishment.
5. Meeting
   KIRU organizes monthly meetings with Board of Supervisors to discuss Jamkrindo's business performance and provide suggestions to Board of Directors. In addition, KIRU also organizes meetings on a monthly basis both internally between KIRU and Audit Committee as well as with the Head of Division/ staff related to the duties of KIRU and other duties of Board of Supervisors.

Besaran Remunerasi Komite Investasi dan Risiko

Invesment and Business Risk Committtee Remuneration

No.	Uraian / Description	Anggota / Membership
1	Gaji/Honorarium / Salary/Honorarium	18.400.000
2	THR per Tahun / Religious Holiday Allowance (THR) per year	18.400.000
3	Komunikasi per bulan / Communication per month	-
4	Pakaian per tahun / Clothes per year	-
5	Cuti per tahun (1xGaji/Honor per bulan) / Leave per year (1x Salary/Honor per month)	-
6	Tunjangan perumahan per bulan / Housing allowance per month	-
7	Tantiem / Bonus TB 2014 sblm Pph 21 / Tantiem/Bonus TB 2014 Before Pph 21	-

Frekuensi Rapat Komite Investasi dan Risiko Usaha

Selama 2014, Komite Investasi dan Risiko Usaha telah menyelenggarakan rapat yang ditujukan untuk membantu tugas Dewan Pengawas dalam mengawasi pengelolaan Perusahaan. Secara rinci, frekuensi rapat yang dilakukan sebagai berikut:

Investment and Business Risk Committee Meetings Frequency

Throughout 2014, Investment and Business Risk Committee has held meetings to assist the Board in supervising the Company management. In detail, the frequency of meetings held as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meeting	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Persentase / Percentage
Subandriyo	Ketua / Chairman	12	12	100%
Slamet Wiyono	Anggota / Member	12	12	100%

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dibantu oleh Komite.

KOMITE PENJAMINAN KREDIT

Komite Penjaminan Kredit (KPK) adalah forum pengambilan keputusan-keputusan penting yang terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan, yang dilaksanakan baik di tingkat Direksi, Direktorat, maupun Kantor Cabang/Kantor Anak Cabang Perusahaan.

COMMITTEES UNDER BOARD OF DIRECTORS

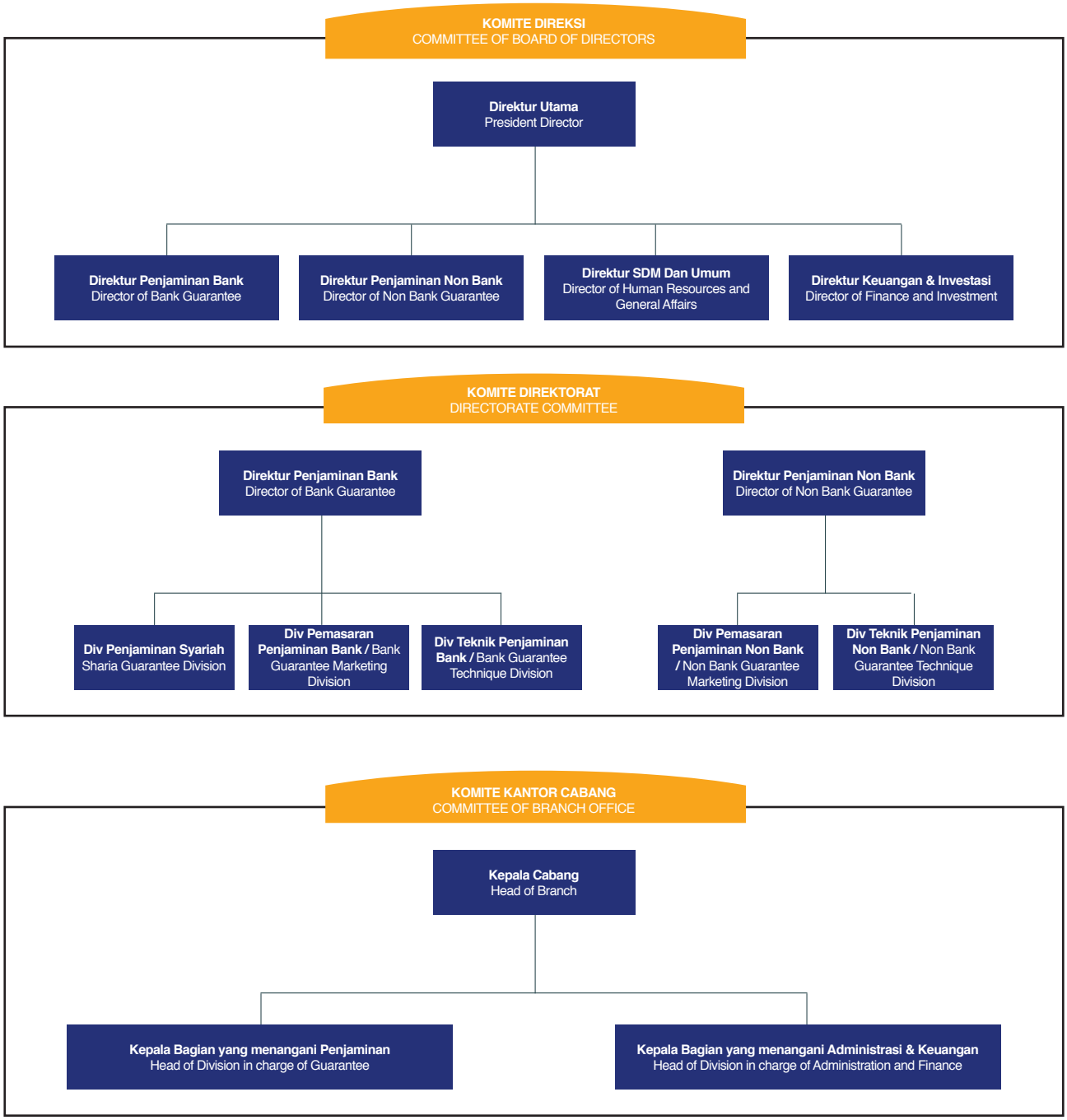
In carrying out its duties and responsibilities, Board of Directors is assisted by Committees.

CREDIT GUARANTEE COMMITTEE

Credit Guarantee Committee (KPK) is a forum for making important decisions related to the Company's operational activities, which conducted well at the level of the Board of Directors, Directorate, as well as the Branch Office/Branch Office Entity.

Struktur dan Keanggotaan Komite Penjaminan Kredit (KPK)

Structure and Membership of Credit Guarantee Committee.



Tugas dan Tanggung Jawab Komite Penjaminan Kredit (KPK)

Tugas Komite Penjaminan Kredit (KPK) adalah memberikan persetujuan atau penolakan Kredit sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan oleh Direksi.

Adapun tanggung jawab Komite Penjaminan Kredit (KPK) adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan tugas dalam pemberian keputusan Penjaminan Kredit berdasarkan asas kehati-hatian (prudent), profesional, jujur, cermat dan seksama.
b. Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan persetujuan Penjaminan Kredit yang bersifat formalitas.
c. Menandatangani Berita Acara Komite Penjaminan Kredit (KPK) sebagai bukti pemberian putusan Penjaminan Kredit sebagai wujud tanggung jawab Komite Penjaminan Kredit (KPK) .

Oleh karena itu, sebelum menandatangani Berita Acara, Komite Penjaminan Kredit (KPK) harus memastikan bahwa setiap Kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan Penjaminan Kredit.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO (KMR)

Komite Manajemen Risiko (KMR) Perum Jamkrindo adalah komite yang bertugas membantu Direksi dalam melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko Perusahaan serta tata cara meminimalisasi risiko dalam hubungannya dengan risiko usaha.

Struktur Keanggotaan Komite Manajemen Risiko (KMR)

Struktur dan tugas keanggotaan Komite Manajemen Risiko (KMR) tingkat Korporat yaitu Kantor Pusat, berbeda dengan KMR tingkat Unit Proses Bisnis (UPB) yaitu Kantor Cabang dan Kantor Anak Cabang. Hal ini menyesuaikan dengan pihak yang mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut, dengan pihak yang melaksanakan keputusan.

Credit Guarantee Committee's Duties and Responsibilities

Credit Guarantee Committee's duty is to grant credit approval or rejection in accordance with limit of authority set by Board of Directors.

Credit Guarantee Committee's responsibilities are as follows:

a. Carrying out duties in granting decision of Credit Guarantee based on the principle of prudence professionalism, honesty, carefulness and meticulousness.
b. Rejecting the request and/or influence of parties concerned to approve formalistic Credit Guarantee.
c. Signing Minutes of Credit Guarantee Committee (KPK) as evidence of the decision granting of Credit Guarantee as a manifestation of Credit Guarantee Committee's responsibility.

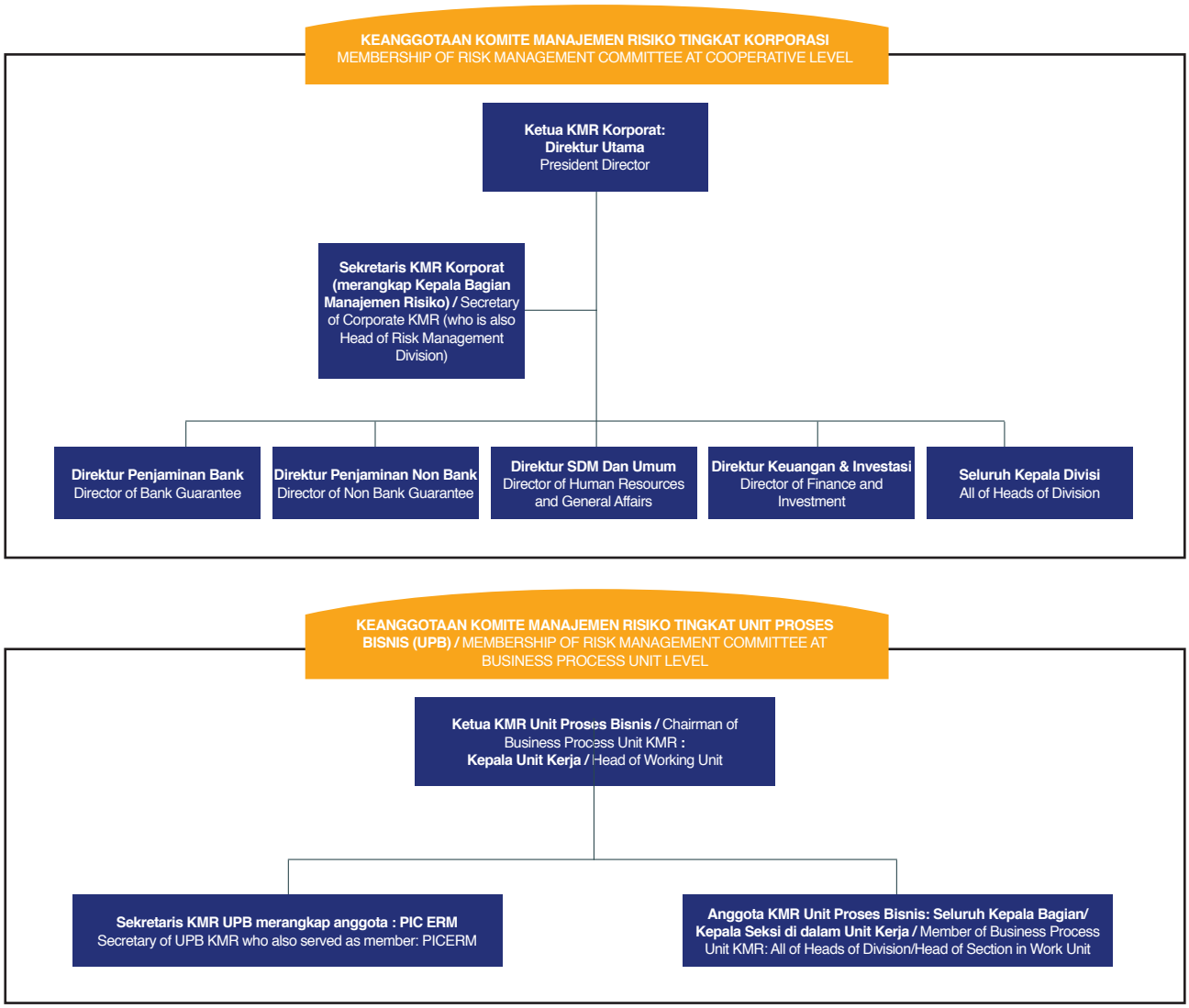
Therefore, before signing the Minutes, Credit Guarantee Committee (KPK) must ensure that each Loan has complied with the provisions of Credit Guarantee.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE (KMR)

Risk Management Committee (KMR) of Perum Jamkrindo is a committee responsible for assisting the Board of Directors in conducting periodic assessments and providing recommendations on the Company risks as well as the procedures to minimize risk related to business risks.

Risk Management Committee (KMR) Membership Structure

Structure and duties of the Risk Management Committee (RMC) at Corporate level, which is Headquarter, in contrast with the KMR at Business Process Unit (UPB) level, which is Branch Office and Branch Office Entity. This is adapted to the parties who make decision and are responsible for the decision, with the parties who implement the decision.



Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko (KMR) / Risk Management Committee's Duties and Responsibilities

Komite Manajemen Risiko / Risk Management Committee	
1	Penetapan Strategi dan Pengambilan Keputusan Risiko Strategis Perusahaan Komite Manajemen Risiko membangun strategi pengelolaan risiko strategis sekaligus mengambil keputusan terkait risiko strategis Perusahaan / Determination of Strategy and Decision Making of Corporate Strategic Risk of Risk Management Committee to build strategic risk management strategies as well as take the decisions related to the Company's strategic risk.
2	Komite Manajemen Risiko melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaporan risiko yang dilaksanakan oleh Unit Manajemen Risiko (UMR) dan *Risk Taking Unit* (RTU)/Pemilik Risiko / Risk Management Committee carries out independent oversight on risk reporting processes conducted by Risk Management Unit (UMR) and Risk Taking Unit (RTU)/Risk Owner.

Komite Manajemen Risiko / Risk Management Committee	
3	Komite Manajemen Risiko memberikan pengawasan independen atas proses Manajemen Risiko Dan pelaksanaan tindak lanjut penanganan risiko / Risk Management Committee provides independent oversight on risk management processes and the implementation of the follow-up of risk.
4	Komite Manajemen Risiko juga memberikan rekomendasi tentang risiko usaha, tata cara meminimalisasi risiko, dalam hubungannya dengan risiko usaha / The Risk Management Committee also provides recommendations on business risk, procedures to minimize risk, in conjunction with the business risks.

Komite Manajemen Risiko Korporat / Corporate Risk Management Committee			
Tugas / Duties		**Tanggung Jawab /** Responsibilities	
1	Menetapkan kebijakan penanganan risiko yang terdiri dari sistem respon pusat, batas toleransi risiko, dan peta risiko perusahaan / Establishing the risk management policies consist of the central response system, risk tolerance limit, and corporate risk map.	1	Formulasi kebijakan dan strategi pengelolaan risiko / Policy formulation and risk management strategy.
2	Memutuskan risiko-risiko strategis dan kritis di level Korporat / Deciding the strategic and critical risks at Corporate level.	2	Implementasi atas arahan pengelolaan risiko / Risk management directives implementation.
3	Membangun atau menyetujui revisi Manual Manajemen Risiko / Establishing or approving the revised Risk Management Manual.	3	Penyempurnaan praktek pengelolaan risiko / Risk management practices enhancement.
4	Memutuskan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk Strategi Manajemen Risiko dan contingency plan apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi / Deciding Risk Management Policy and its amendment, including Risk Management Strategy and contingency plan if abnormal external conditions occur.	4	Melakukan kontrol atas keputusan bisnis ditingkat Perusahaan yang bertentangan dengan kebijakan pengelolaan risiko / Controlling the business decisions at corporate level as opposed to risk mangement policies.
5	Memberikan masukan pada Dewan Direksi atas tindakan-tindakan yang diperlukan baik diminta atau tidak apabila risiko dianggap membahayakan kelangsungan usaha / Providing suggestions to Board of Directors for the actions necessary whether requested or not, if the risk is considered dangerous to business continuity.		

Komite Unit Proses Bisnis / Business Process Unit Committee			
Tugas / Duties		**Tanggung Jawab /** Responsibilities	
1	Memeriksa pelaksanaan metodologi identifikasi dan penilaian risiko untuk mendapatkan jaminan yang wajar atas kelengkapan dan ketepatan register risiko / Checking identification methodology implementation and risk assessment to obtain reasonable assurance on the completeness and accuracy of risk register.	1	Implementasi pengelolaan risiko / Risk management implementation.

Komite Unit Proses Bisnis / Business Process Unit Committee			
Tugas / Duties		**Tanggung Jawab /** Responsibilities	
2	Melakukan evaluasi efektivitas strategi mitigasi untuk mengatasi risiko dari unit kerjanya / Evaluating the mitigation strategies effectiveness to overcome the risk of its work units.	2	Penyempurnaan praktik pengelolaan risiko / Risk management practices enhancement.
3	Memberikan masukan pada Kepala Unit Kerja atas tindakan-tindakan yang diperlukan (sistem respon risiko) baik diminta atau tidak apabila risiko dianggap membahayakan kelangsungan usaha / Providing suggestions to Head of Work Unit for the actions necessary whether requested or not, if the risk is considered dangerous to business continuity.		
4	Memberikan masukan pada Kepala Unit Kerja atas tindakan-tindakan yang diperlukan baik diminta atau tidak apabila risiko dianggap membahayakan kelangsungan usaha di tingkat Unit Proses Bisnis / Providing suggestions to Head of Work Unit for the actions necessary whether requested or not, if the risk is considered dangerous to business continuity at Business Process Unit level.	3	Melakukan kontrol atas keputusan bisnis di tingkat Unit Proses Bisnis yang bertentangan dengan kebijakan pengelolaan risiko / Controlling the business decisions at corporate level as opposed to risk mangement policies.
5	Menetapkan risiko kritis dalam Unit Proses Bisnis / Establishing critical risk in Business Process Unit.		
6	Melakukan Sosialisasi Risiko Manajemen tingkat Unit Proses Bisnis / Socializing Risk Management at Business Process Unit level.		

Manajemen Risiko Penjaminan

Risiko Manajemen Kredit merupakan risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan nasabah perbankan dalam mememuhi kewajibannya. Dalam mengelola risiko Penjaminan tersebut, maka diperlukan Sistem Manajemen Risiko Penjaminan Kredit. Sistem ini meliputi rangkaian prosedur yang digunakan untuk mengindentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan Penjaminan Kredit.

Dalam pelaksanaannya, Sistem Manajemen Risiko dilaksanakan secara efektif pada seluruh tahapan kegiatan Penjaminan Kredit disesuaikan dengan kemampuan sumber daya Perusahaan serta karakteristik dan risiko kredit yang dijamin.

Pada tahapan implementasi, dilakukan proses identifikasi risiko yang bertujuan untuk memprediksi risiko atas kredit yang diajukan Penjaminannya oleh Penerima Jaminan. Prediksi risiko tersebut dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Guarantee Risk Management

Credit Management Risk is the risk arises as a result of failure of banking customers in fulfilling obligations. In managing the guarantee risk, Guarantee Credit Risk Management System is required. The system includes a series of procedures used to identify, measure, monitor, and control risks arising from Credit Guarantee activities.

In its practice, Risk Management System was implemented effectively at all stages of Credit Guarantee and adjusted to the capabilities and characteristics of the Company's resources and guaranteed credit risk.

At the stage of implementation, risk identification process is carried out to predict the credit risk whose bail is filed by Guarantee Recipient. The risk prediction is used as one of the considerations in decision making.

Persetujuan Penjaminan yang dituangkan dalam hasil evaluasi Kelayakan Penjaminan sesuai dengan sistem dan prosedur penjaminan terkait. Pendekatan yang dilakukan dalam identifikasi risiko menggunakan 4P, yaitu *Prospect, Productivity, Payment,* dan *Personality*. Item yang harus diperhatikan untuk masing-masing aspek tersebut disesuaikan dengan karakteristik kredit yang akan dijamin, dan dijabarkan di dalam sistem dan prosedur penjaminan yang terkait.

Guarantee approval as outlined in the Feasibility of Guarantee evaluation results in accordance with the systems and procedures of related guarantee. The approach taken in the risk identification is 4P, which is Prospect, Productivity, Payment, and Personality. Items to be considered for each of these aspects is adjusted to the characteristics of loans guaranteed, and elaborated in related systems and procedures of guarantee.

Hasil dari proses identifikasi risiko kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan prediksi risiko penjaminan untuk mengetahui besarnya Risiko Penjaminan. Dalam pelaksanaannya prediksi risiko dapat dilakukan secara kualitatif dan/atau kuantitatif untuk setiap aspek 4P. Prediksi secara kuantitatif dilakukan dengan sistem *scoring*. Berdasarkan *score,* ditetapkan prediksi risiko penjaminan masing-masing Terjamin atau sekelompok Terjamin, atau suatu produk baru.

Results of risk identification process are followed up by the establishment of guarantee risk prediction to determine the amount of Risk Assurance. In its implementation, risk prediction can be done qualitatively and/or quantitatively to every 4P aspect. Quantitative prediction is conducted by scoring system. Based on the score, guarantee risk prediction of each Secured or Secured group or a new product is established.

Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan apakah suatu Pengajuan Penjaminan dapat disetujui atau tidak, dilakukan dalam sebuah Rapat Komite. Sesuai prinsip kehati-hatian, maka anggota komite tersebut terdiri dari Pejabat yang terkait secara langsung dengan kegiatan Penjaminan (*risk taker unit*) dan Pejabat yang terkait langsung dengan konsekuensi biaya atas potensi risiko (*risk financing unit*). Dengan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan dua pihak atau lebih dari sisi yang berlainan tersebut, maka diharapkan keputusan menjadi lebih objektif dan potensi risiko karena kesalahan pengambilan keputusan dapat diminimalisasi.

Furthermore, the decision making whether a submission Guarantee can be approved or not, is done in Committee Meeting. In accordance with prudential principles, members of the committee consist of officials directly involved in the Guarantee activities (risk taker unit) and officials directly involved in the cost consequences on potential risks (risk financing unit). By decision-making mechanism that involves two or more parties from different sides, it is expected the decision to be more objective and potential risk caused by wrong decision-making can be minimized.

Selain digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan Penjaminan, hasil analisis risiko yang telah dilakukan juga dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam melakukan pemantauan terhadap kredit yang sedang berjalan. Untuk kredit yang berisiko tinggi, maka pemantauan terhadap kredit dilakukan secara lebih intensif.

Besides being used to help the decision-making process of guarantee, the results of risk analysis which have been carried out are also used as one of basic considerations in monitoring the ongoing credit. For high-risk credit, the credit monitoring is carried out more intensively.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan Sistem Manajemen Risiko adalah pelaporan dan evaluasi. Setiap unit kerja yang terekspos oleh risiko harus menyampaikan laporan terkait dengan risiko tersebut. Atas laporan tersebut, bagian yang menangani Manajemen Risiko melakukan pengolahan data dan informasi sebagai dasar penetapan kebijakan dalam meminimalisasi Risiko Penjaminan Kredit.

Reporting and evaluation are integral part in Risk Management System implementation. Each unit exposed by risk should submit a report related to the risks. On the report, division which deals with Risk Management processing data and information as a basis for setting policy in minimizing Credit Guarantee Risk.

Operasional Risk Management

Pengelolaan Risiko Operasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Manajemen Risiko Perum Jamkrindo yang bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dan dampak kerugian risiko operasional. Sesuai dengan peraturan Direksi Perum Jamkrindo, risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.

Operational Risk Management

Operational Risk Management is an integral part of Perum Jamkrindo Risk Management which aims to minimize the possibility and impact of operational risk loss. In accordance with Perum Jamkrindo Board of Directors regulations, operational risk is the risk that is partly due to insufficient or failed internal processes, human errors, system failures, or external problems affecting the Company operations.

Risiko operasional tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kegagalan sistem/*downtime* & teknologi, kesalahan manusia (*human error*), peralatan (mechanical *and engineering*), pihak *external*, *fraud*, kegagalan proses internal, organisasi & SDM, *Counterpart*, HSE (*Health, Safety and Environment*), dan Teknologi Informasi.

Operational risk can be caused by several factors such as system failure/downtime and technology, human error, equipment (mechanical and engineering), external parties, fraud, internal processes failure, organization and human resources, Counterpart, HSE (Health, Safety and Environment), and Information Technology.

Dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko Operasional, Perum Jamkrindo telah memiliki panduan untuk melaksanakan *Risk and Control Self Assessment* (RCSA). RCSA tersebut dilaksanakan dengan pendekatan *bottom up*, di mana identifikasi dan penilaian risiko dilaksanakan oleh Kepala Bagian atau Seksi di Unit Kerja Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Anak Cabang. Penetapan level pelaksana identifikasi dan penilaian risiko tersebut didasarkan pada pertimbangan level tersebut merupakan Pejabat yang terendah di unit kerjanya, sehingga mereka mengetahui permasalahan teknis dan kaitan antara permasalahan teknis tersebut dengan pencapaian tujuan Perusahaan.

In implementing the Operational Risk Management, Perum Jamkrindo has owned guidelines for implementing the Risk and Control Self-Assessment (RCSA). RCSA is carried out with a bottom-up approach, in which the identification and risk assessment are carried out by the Head of Section in Working Unit of Head Office, Branch Office and Branch Office Entity. Determination of executive level of risk Identification and assessment is based on the consideration that level is the lowest official in its unit, thus they know the technical issues and link between the technical problems and the Company's objectives achievement.



MANAJEMEN RISIKO

Blue-Print Manajemen Risiko

Untuk melakukan implementasi manajemen risiko terintegrasi, Perusahaan telah menyusun *Blueprint* Manajemen Risiko Terintegrasi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. *Blueprint* yang telah diselesaikan pada 2010 tersebut merupakan cetak biru arsitektur pengembangan *Enterprise Risk Management* (ERM).

Secara umum, *Blueprint* ERM Perum Jamkrindo terdiri dari 6 (enam) komponen utama yaitu komitmen, struktur dan fungsi, mekanisme, proses manajemen risiko, sistem pendukung, dan pencapaian. Keenam komponen tersebut memiliki berbagai elemen sebagai bagian utamanya, secara lebih lengkap model *Blueprint* ERM perum Jamkrindo digambarkan dalam model di bawah ini.

RISK MANAGEMENT

Blue Print of Risk Management

In implementing the integrated risk management, the Company has developed a Blueprint of Integrated Risk Management of Indonesian Credit Guarantee Public Corporation. Blueprint, which have been completed in 2010, is an architectural blueprint for the Enterprise Risk Management (ERM) development.

Generally, ERM Blueprint of Perum Jamkrindo consists of 6 (six) main components, namely commitment, structure and function, mechanism, risk management process, supporting system, and achievement. The components have many elements as its main part. Model of ERM Blueprint of Perum Jamkrindo is completely demonstrated as below:

Gambar 4.5 Model *Blue-Print* Manajemen Risiko Terintegrasi Perum Jamkrindo

Picture 4.5 Model of Blue-Print of Integrated Risk Management of Perum Jamkrindo



Roadmap Manajemen Risiko

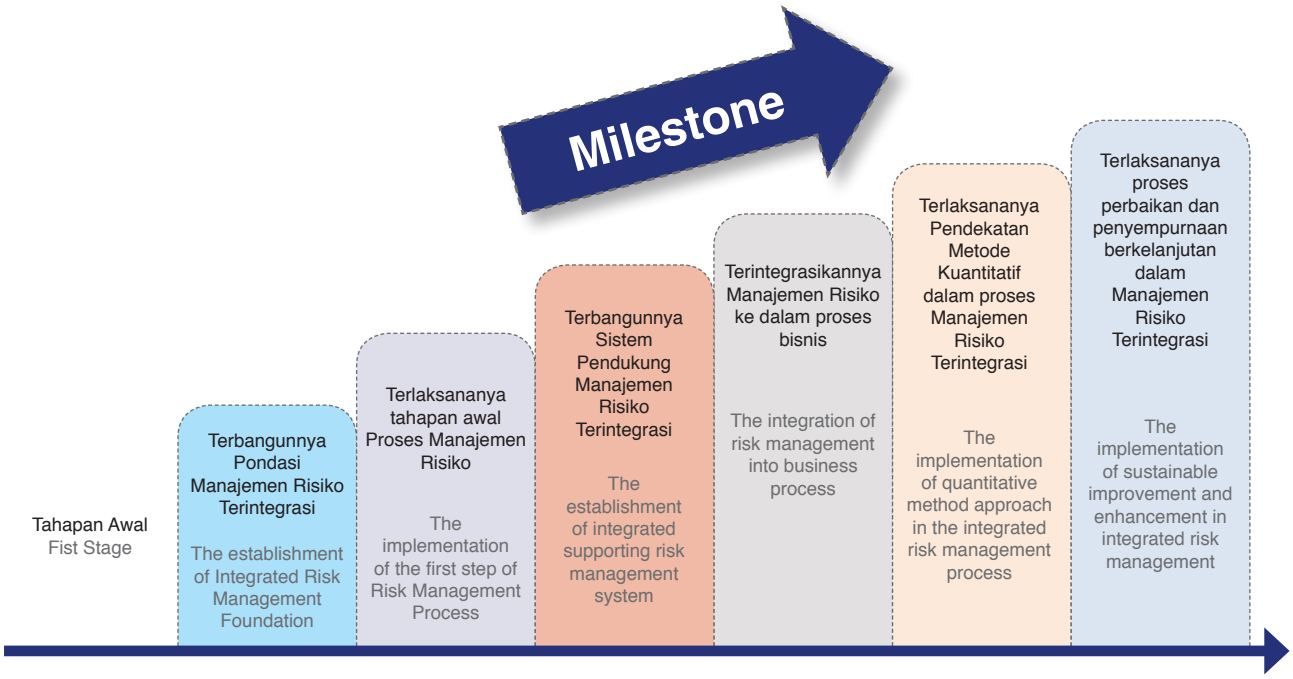
Untuk mencapai kondisi penerapan manajemen risiko seperti yang telah dituangkan dalam *Blueprint* Manajemen Risiko, Perum Jamkrindo telah menyusun *roadmap* implementasi pengembangan manajemen risiko.

Risk Management Roadmap

To meet the implementation of risk management as stated in the Blueprint of Risk Management, Perum Jamkrindo has prepared a roadmap for the implementation of risk management development.

Untuk mencapai kondisi tersebut, *milestone* pencapaian *Blue-Print* Manajemen Risiko Terintegrasi Perum Jamkrindo adalah sebagai berikut:

To reach the condition, milestone of Blue-Print of integrated risk management of Perum Jamkrindo is as follows:



Implementasi Manajemen Risiko

Kegiatan Manajemen Risiko dilakukan secara periodik dan insidentil. Kegiatan Manajemen Risiko yang dilakukan secara periodik adalah proses manajemen risiko yang terdiri dari 4 (empat) tahapan proses, yaitu identifikasi risiko, penilaian risiko, penanganan risiko dan *monitoring* dan evaluasi risiko.

Pada tahap awal, proses yang dilakukan adalah Identifikasi dan Penilaian Risiko *Inherent*. Atas hasil identifikasi risiko dan penilaian risiko tersebut dilakukan evaluasi untuk perbaikan proses manajemen risiko.

Kegiatan Manajemen Risiko yang bersifat insidentil adalah pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan pada tahap-tahap tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam SOP proses bisnis berbasis risiko dan pemberian opini terkait dengan hal-hal yang harus dimintakan pendapat kepada Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

Implementation of Risk Management

Risk Management activities are carried out periodically and incidentally. The periodical activity refers to a risk management process consisting of four stages, i.e. risk identification, risk assessment, risk management and monitoring, and risk evaluation.

In the early stage, the process carried out is Identification and Inherent Risk Assessment. Based on the identification and risk assessment, evaluation for improvement of risk management will be carried out.

Incidental Risk Management activities refer to implementation of risk management carried out at certain stages in accordance with the risk-based SOP of business processes. The activity also includes provision of opinion related to the matters of concerns to Division of Risk Management.

Kegiatan insidentil berupa pemberian opini untuk hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak signifikan bagi keberlangsungan perusahaan, pembuatan produk dan/atau aktivitas baru, transaksi dengan nilai tertentu, kebijakan penghapusbukuan piutang perusahaan, pembuatan SOP, RJP, RKAP, implementasi penggunaan aplikasi/*software* baru, penentuan bank baru untuk penempatan deposito dan investasi, dan kebijakan lainnya yang bersifat strategis.

Sesuai Per-Dir No. 03 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Pendapat (Opini) Manajemen Risiko Perum Jamkrindo, pelaksanaan pemberian opini tersebut mulai diterapkan secara resmi pada 1 Juli 2013, namun demikian mulai Oktober 2011 telah dilakukan pemberian opini dalam rangka pembelajaran.

Pada periode 1 Januari hingga 31 Desember 2014, telah dilakukan pemberian opini sebanyak 30 (tiga puluh), baik opini terkait dengan kegiatan penjaminan, keuangan, maupun kegiatan pendukung lainnya.

Di samping pemberian pendapat kepada unit kerja terkait, Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan juga memberikan masukan kepada Direksi dan Divisi mengenai hal-hal berikut:

- *Review* atas Peraturan Direksi/Keputusan Direksi pada Unit Kerja Manajemen Risiko sebagai penyesuaian dengan perubahan SO tahun 2014.
- Kajian dan Evaluasi Produk Penjaminan Perum Jamkrindo 2014 seperti *Surety Bond* dan *Custom Bond*.
- *Review* atas Laporan Hasil *Self Assessment* GCG 2013 sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan *Assessment* tahun 2014 yang dilakukan oleh Konsultan KAP Doli Bambang Sulistiyanto Dadang & Ali.

Kelengkapan Manajemen Risiko

Sebagai bentuk implementasi manajemen risiko secara terintegrasi, maka diperlukan beberapa kelengkapan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan manajemen risiko. Terkait dengan hal tersebut, Perum Jamkrindo telah menyusun beberapa kelengkapan sebagai berikut:

Incidental activities such as giving opinions on things which is essential for strategic matters significantly impact on the sustainability of the company, product manufacturing, and/or new activities, transaction within certain values, the company's receivables write-off, the preparation of SOP, RJP, RKAP, implementation of new application/ software, determination of new banks to place deposit and investment, and other strategic policies.

In accordance with Regulation of Board of Directors number 03/Per-Dir/X/2011 dated October 10, 2011 regarding opinion of Risk Management of Perum Jamkrindo, the input provision has been fully carried out in 2013. However, since October 2011 the activity has been implemented in a trial.

In the period of January 1 to December 31, 2014, 40 (thirty) times input provision had been carried out, opinions related to guarantee activities, financial or other supporting activities.

In addition to input provision related to work unit, Risk Management Division also suggested Board of Directors regarding:

- Review on Board of Directors Regulations/Decisions on Risk Management Unit as an adjustment to the changing SO 2014.
- Review and Evaluation of Perum Jamkrindo Assurance Products in 2014 as Surety Bond and Custom Bond.
- Review on GCG Self-Assessment Reports in 2013 as improvement material for Assessment activities in 2014 which is conducted by Consultant of KAP Doli Bambang Sulistiyanto Dada & Ali.

Completeness of Risk Management

In order to implement integrated risk management, several requirements are needed to support the implementation of risk management. In this regard, Perum Jamkrindo has prepared some of the requirements as follows:

a. Peraturan Direksi tentang Penerapan Manajemen Risiko

Peraturan Direksi tentang Penerapan Manajemen Risiko merupakan peraturan yang menyatakan tentang penerapan manajemen risiko dan perangkat pendukung yang diperlukan. Dalam peraturan tersebut dilampirkan pernyataan tentang pengelolaan risiko yang merupakan pernyataan Direksi dan seluruh Pejabat Perum Jamkrindo mengenai kebijakan penanganan risiko perusahaan. Pernyataan tersebut merupakan bentuk tertulis dari komitmen Direksi dan Pejabat Perum Jamkrindo dalam menerapkan manajemen risiko dalam setiap tahapan kegiatan.

b. Organisasi Manajemen Risiko Perum Jamkrindo

Secara struktural, Direksi telah menetapkan struktur organisasi yang di dalamnya terdapat unit kerja yang menangani manajemen risiko. Di samping organisasi yang bersifat struktural, terdapat pula struktur yang bersifat *ad hoc*, yaitu Komite Manajemen Risiko Perum Jamkrindo.

Komite Manajemen Risiko (KMR) Perum Jamkrindo adalah komite yang bertugas membantu Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dalam melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko perusahaan, tata cara meminimalisasi risiko, dalam hubungannya dengan risiko usaha.

Di samping itu, untuk kelancaran pelaksanaan proses manajemen risiko, di setiap unit kerja ditunjuk seorang *Person in Charge* (PIC) yang bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan proses manajemen risiko di masing-masing unit kerja. Dalam melaksanakan tugasnya, PIC Manajemen Risiko berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

c. Panduan Manajemen Risiko Perum Jamkrindo

Panduan Manajemen Risiko merupakan buku yang menjadi payung bagi pelaksanaan proses manajemen risiko yang memuat kebijakan manajemen risiko

a. Board of Directors Regulations regarding the Implementation of Risk Management

Board of Directors Regulations regarding the Implementation of Risk Management states its implementation and the required supporting instruments. The regulation attaches the statements of the risk management, which are statements of the Board of Directors and all officers of Perum Jamkrindo regarding the company's policies of risk management. The statements reflect commitment of the Board of Directors and officers of Perum Jamkrindo in implementing the risk management in every phase of activity.

b. Risk Management Organization of Perum Jamkrindo

Structurally, the Board of Directors has established an organizational structure in which there is a division in charge of risk management. In addition to the structural organization, the Company also has ad hoc structure, namely the Risk Management Committee of Perum Jamkrindo.

Risk Management Committee (KMR) of Perum Jamkrindo is a committee assigned to assist the Board of Directors in carrying out assessments and providing recommendations on the Company risks, procedures of mitigating the risks with regard to the business risk.

In addition, for the smoothness of implementation of risk management process, a Person in Charge (PIC) is appointed to coordinate the implementation of risk management process in each work unit. In carrying out its duties, Risk Management PIC coordinates and consults to the Risk and Compliance Management Division.

c. Perum Jamkrindo Risk Management Guideline

Risk Management Guideline is an umbrella for the implementation of risk management process and contains Perum Jamkrindo risk management

Perum Jamkrindo dan pedoman pelaksanaan proses manajemen risiko Perum Jamkrindo. Panduan manajemen risiko tersebut kemudian diturunkan (*cascading*) ke dalam SOP Manajemen Risiko, dan SOP Proses Bisnis Berbasis Risiko.

d. SOP Proses Manajemen Risiko

SOP Proses Manajemen Risiko merupakan SOP yang ditujukan untuk memberikan panduan teknis dalam pelaksanaan proses manajemen risiko pada Perum Jamkrindo.

e. Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko

Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko diterbitkan dengan Surat Edaran Nomor 15/SE/4/VII/2012. Petunjuk Teknis tersebut memuat penjelasan mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap Unit Kerja terkait penerapan Manajemen Risiko di Perum Jamkrindo.

Hal-hal yang harus dilakukan terkait dengan pelaksanaan penerapan manajemen risiko tersebut secara garis besar adalah:

1. Identifikasi Risiko
2. Penilaian Risiko
3. Penanganan Risiko
4. Monitoring dan Evaluasi Risiko
5. Komite Manajemen Risiko
6. Pelaporan *Loss Event* (Risiko yang telah terjadi)
7. Pelaksanaan proses bisnis dengan mempertimbangkan risiko
8. Pemberian Opini/Pendapat Manajemen Risiko atas risiko yang berdampak secara signifikan bagi Perusahaan.

f. *Standard Operation Procedure* (SOP) Proses Bisnis Berbasis Risiko

Standard Operation Procedure (SOP) Proses Bisnis Berbasis Risiko merupakan SOP dari suatu proses bisnis yang disusun dengan mempertimbangkan risiko yang terkait proses tersebut. SOP tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa risiko yang tercantum dalam *risk register* dan pengendalian risiko yang diperlukan

policies and guidelines for the implementation of risk management process. The risk management guideline is later being cascaded into SOP of Risk Management and Risk-based Business Process.

d. Risk Management Process SOP

Risk Management Process SOP is intended to provide technical guideline for the implementation of risk management process of Perum Jamkrindo.

e. Technical Guideline for the Implementation of Risk Management

Technical Guidelines for Implementation of Risk Management are issued by Circular Letter No. 15/SE/4 /VII/2012. The Technical Guideline contains description of matters that must be carried out by each Work Unit related to the implementation of Risk Management of Perum Jamkrindo.

Things to do related to the implementation of risk management mainly are:

1. Risk Identification
2. Risk Assessment
3. Risk Handling
4. Risk Monitoring and Evaluation
5. Risk Management Committee
6. Loss Event Report (Risks have been occurred)
7. Business process implementation by risk consideration
8. Providing Risk Management Opinions on Risk which significantly affects the Company

f. Standard Operation Procedure (SOP) of Risk-based Business Process

Standard Operation Procedure (SOP) of Risk-based Business Process is a business process prepared by considering risks related to the process. The SOP is intended to ensure that risk stipulated on risk register and necessary risk control have been considered in the implementation of business process, as well as to the

telah dipertimbangkan dalam pelaksanaan proses bisnis, serta untuk jenis-jenis risiko baru dipastikan telah mendapatkan opini dari bagian ERM sebagai *second opinion* dalam pengambilan keputusan. Mengingat jenis kegiatan yang ada di Perum Jamkrindo cukup beragam, maka penyusunan SOP proses bisnis berbasis risiko dilakukan secara bertahap.

types of new risks are certainly have obtained opinions from ERM as second opinion in decision making. Since the activities in Perum Jamkrindo are quite diverse, so the preparation of SOP of risk-based business process is carried out gradually.

Pada 2014, telah dilakukan penyusunan 3 (tiga) SOP proses bisnis berbasis risiko, yaitu:

1. SOP Penjaminan Langsung Non Bank yang ditetapkan dengan Per-Dir No. 30/Per-Dir/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014.
2. SOP Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Surety Bond yang ditetapkan dengan Per-Dir No. 36/Per-Dir/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014.
3. SOP Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Customs Bond yang ditetapkan dengan Per-Dir No. 37/Per-Dir/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014.

In 2014, the preparation of SOP of risk-based business process has been carried out 3 (three) times, namely:

1. SOP of Non-Bank Direct Guarantee is stipulated by Per-Dir No. 30/Per-Dir/VIII/2014 dated August 28, 2014
2. SOP of Surety Bond Implementation Guidelines is stipulated by Per-Dir No. 36/Per-Dir/X/2014 dated October 14, 2014.
3. SOP of Customs Bond Implementation Guidelines is stipulated by Per-Dir No. 37/Per-Dir/X/2014 dated October 14, 2014.

g. Sistem Pendukung Manajemen Risiko Terintegrasi

Terkait dengan sistem pendukung manajemen risiko terintegrasi, pada 2011, Perusahaan telah mulai membangun Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko. Aplikasi tersebut berfungsi untuk mempermudah proses identifikasi, penilaian risiko, dan tindak lanjut penanganan risiko. Dengan adanya aplikasi, data risiko dapat tersimpan dalam bentuk *data base* yang terstruktur.

g. Integrated Risk Management Supporting System

Related to Integrated Risk Management Supporting System, the Company has started to build Risk Management Information System Application. The Application is intended to facilitate the identification process, risk assessment, and follow-up of risk. Risk data can be saved in the form of structured data base through the Application.

Jenis dan Pengelolaan Risiko Selama 2014

Beberapa risiko yang relatif signifikan pada 2014 adalah sebagai berikut :

a. Risiko Penjaminan Kredit

Risiko Penjaminan Kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajibannya. Risiko tersebut dapat dilihat pada besarnya *default rate* dan tingkat NPL kredit yang dijamin, serta tingkat pengembalian piutang subrogasi.

Risk Types and Management in 2014

Several risks which are relatively significant in 2014 are as follows:

a. Credit Guarantee Risk

Credit Guarantee Risk arises as a result of guaranteed failure in fulfilling its obligations. The risk can be seen on the amount of default rate and NPL rate of secured credit, as well as subrogation receivables return rate.

Pada 2014, beberapa indikator risiko penjaminan kredit cenderung mengalami kenaikan. *Default Rate* mengalami peningkatan 37,62% dari tahun 2013, Tingkat NPL meningkat 34,54% dari tahun 2013,

In 2014, several credit guarantee risk indicators are tended to rise. Default Rate has increased by 37.62% from 2013, the NPL rate has increased by 34.54% from 2013, Subrogation Receivables Recovery Rate

Recovery Rate Piutang Subrogasi meningkat menjadi sebesar -8,16% dari tahun 2013. Namun demikian, terdapat satu indikator yaitu tingkat pencapaian pengembalian piutang subrogasi yang mengalami penurunan sebesar 51,36% dari tahun 2013.

increased to -8.16% from 2013. However, there is one indicator, namely subrogation receivables return rate, which decreased by 51.36% from 2013.

Uraian / Description	**2013 (Rp)**	**2014 (Rp)**	**Pertumbuhan /** Growth **(%)**
Default rate = Biaya Klaim / Claim Cost ÷ Volume Penjaminan / Guarantee Volume			
Biaya klaim / Claim Cost	898.582.003.777	1.071.911.769.047	
Volume penjaminan / Guarantee Volume	46.996.238.461.142	40.737.617.898.609	
DR	1,91%	2,63%	37,62%
NPL = Outstanding Kredit Kol 3+4+5 / Outstanding Credit Kol 3+4+5 ÷ Total Outstanding Kredit / Total of Outstanding Credit			
Outstanding kredit kol 3+4+5 / Outstanding Credit Kol 3+4+5	161.907.452.709	201.226.082.067	
Total Outstanding Kredit / Total of Outstanding Credit	97.685.466.719.275	90.239.385.918.452	
NPL	0,17%	0,22%	34,54%
Tingkat Pencapaian Pengembalian Subrogasi / Subrogation Return Rate = Realisasi Angsuran Subrogasi / Subrogation Installment Realization ÷ Target Angsuran Subgorasi / Subrogation Installment Target			
Realisasi angsuran subrogasi / Subrogation Installment Realization	126.949.809.855	205.645.782.859	
Target angsuran subrogasi / Subrogation Installment Target	150.645.785.217	161.230.209.580	
Tingkat Pencapaian Pengembalian Subrogasi / Subrogation Return Rate	84,27%	127,55%	51,36%
Recovery Rate Piutang Subrogasi / Subrogation Receivables Recovery Rate = Angsuran Piutang Subrogasi / Subrogation Receivable Installment ÷ Saldo Piutang Subgorasi / Subrogation Receivable Balance			
Angsuran piutang subrogasi / Subrogation Receivable Installment	126.949.809.855	205.455.471.575	
Saldo piutang subrogasi / Subrogation Receivable Balance	2.233.821.481.737	3.936.379.708.403	
Recovery Rate Piutang Subrogasi / Subrogation Receivables Recovery Rate	5,68%	5,22%	-8,16%%

Untuk meminimalkan risiko penjaminan, maka pada proses penjaminan kredit dilakukan identifikasi risiko menggunakan 4P, yaitu *Prospect, Productivity, Payment, dan Personality*. Item yang harus diperhatikan untuk masing-masing aspek tersebut disesuaikan dengan karakteristik kredit yang akan dijamin, dan dijabarkan di dalam sistem dan prosedur penjaminan yang terkait.

In order to minimize guarantee risk, the credit guarantee process was conducted by using the method 4P, namely Prospect, Productivity, Payment, and Personality in identifying the risks. The items taken into consideration for each aspect were different regarding corresponded with the characteristics of the guaranteed products, and explained in the system and procedure of related guarantee.

Hasil dari proses identifikasi risiko kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan prediksi risiko penjaminan untuk mengetahui besarnya risiko penjaminan. Dalam pelaksanaannya prediksi risiko dapat dilakukan secara kualitatif dan/atau kuantitatif untuk setiap aspek 4P. Prediksi secara kuantitatif dilakukan dengan sistem *scoring*. Berdasarkan *score* ditetapkan prediksi risiko penjaminan masing-masing Terjamin atau sekelompok Terjamin, atau suatu produk baru.

The results of risk identification process are followed up by the establishment of guarantee risk prediction to determine the amount of Risk Assurance. In its implementation, risk prediction can be done qualitatively and/or quantitatively to every 4P aspect. Quantitative prediction is conducted by scoring system. Based on the score, guarantee risk prediction of each Secured or Secured group or a new product is established.

Selanjutnya, pengambilan keputusan apakah suatu pengajuan penjaminan dapat disetujui atau tidak, dilakukan dalam sebuah rapat komite. Sesuai prinsip kehati-hatian, maka anggota komite tersebut terdiri dari pejabat yang terkait secara langsung dengan kegiatan penjaminan (*risk taker unit*) dan pejabat yang terkait langsung dengan konsekuensi biaya atas potensi risiko (*risk financing unit*). Dengan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan dua pihak atau lebih dari sisi yang berlainan tersebut, maka diharapkan keputusan menjadi lebih obyektif dan potensi risiko karena kesalahan pengambilan keputusan dapat diminimalisasi.

Furthermore, the decision making whether a submission Guarantee can be approved or not, is done in Committee Meeting. In accordance with prudential principles, members of the committee consist of officials directly involved in the Guarantee activities (risk taker unit) and officials directly involved the cost consequences on potential risks (risk financing unit). By decision-making mechanism that involves two or more parties from different sides, it is expected the decision to be more objective and potential risk caused by wrong decision-making can be minimized.

Selain digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan penjaminan, hasil analisis risiko yang telah dilakukan juga dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam melakukan pemantauan terhadap kredit yang sedang berjalan. Untuk kredit yang berisiko tinggi, maka pemantauan terhadap kredit dilakukan secara lebih intensif.

Besides being used to help the decision-making process of guarantee, the results of risk analysis which have been carried out are also used as one of basic considerations in monitoring the ongoing credit. For high-risk credit, the credit monitoring is carried out more intensively.

Pada 2014, di samping upaya mitigasi tersebut, perusahaan juga melakukan beberapa mitigasi risiko lainnya, yaitu:

1. Melakukan pembaharuan perjanjian kerja sama dengan menambahkan klausula yang dapat digunakan untuk meminimalkan risiko.
2. Melakukan penyebaran risiko dengan menambah mitra kerja baru.
3. Menambah produk yang dipasarkan oleh Perusahaan.
4. Melakukan penjajakan penyebaran risiko dengan bekerjasama dengan perusahaan reasuransi.
5. Memanfaatkan jasa agen yang dapat membantu menyeleksi calon Terjamin untuk Penjaminan Kredit non KUR.
6. Melakukan koordinasi dengan Komite Kebijakan terkait dengan pelaksanaan Program KUR untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul.
7. Melakukan pembatasan volume penjaminan untuk produk yang berisiko tinggi.
8. Melakukan updating data piutang subrogasi termasuk agunan sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan upaya penagihan piutang subrogasi agar upaya tersebut dapat dilakukan secara efektif.
9. Mengoptimalkan penagihan piutang subrogasi.

In 2014, in addition to mitigation, the company also conducted some other risk mitigation measures such as:

1. Renewing the contract by adding a clause that able to be used to minimize the risk.
2. Spreading the risk by adding products and new partners.
3. Increasing products that marketed by the Company.
4. Conducting risk assessment in cooperation with reinsurers.
5. Utilizing the services of an agent/ broker that can help to select Guaranteed candidates for Non-KUR Credit Guarantee.
6. Coordinating with the Policy Committee related to the implementation of the KUR program to anticipate problems that may arise.
7. Limiting the guarantee volume for high-risk product.
8. Updating data of subrogation receivables, including factoring as one consideration to effectively collect subrogation receivables.
9. Optimizing the collection of subrogation receivables.

b. Risiko *Co-Guarantee*

Co-guarantee adalah kerja sama antara Perum Jamkrindo dan perusahaan penjaminan lain atau asuransi dalam bentuk penutupan risiko tertentu. Terkait dengan kerja sama tersebut, maka Perum Jamkrindo terekspos oleh risiko *co-Guarantee*. Risiko *co-Guarantee* merupakan risiko tidak tertagihnya piutang *co-guarantee*. Sesuai dengan Per-Dir Nomor 15 tanggal 29 Desember 2010 tentang Panduan Manajemen Risiko, risiko *co-guarantee* digolongkan ke dalam kategori risiko operasional dengan sub kategori risiko *counterpart*.

Salah satu indikasi besaran risiko *co-Guarantee* adalah besarnya piutang *co-Guarantee* dibandingkan dengan rata-rata pengajuan klaim *co-Guarantee* dengan mitra *co-guarantee* yang terkait. Sesuai dengan

b. Risk of Co-Guarantee

Co-guarantee is a partnership between Perum Jamkrindo with other insurance companies or insurance in the form of the closure of certain risks. Associated with such cooperation, Perum Jamkrindo is exposed to a co-Guarantee risk. Co-Guarantee risk is the risk of uncollectible co-Guarantee receivables. In accordance with the Regulation of Board of Directors number 15 dated December 29, 2010 on Risk Management Guidelines, co-guarantee risk is classified into the category of operational risk with the sub category of counterpart risk.

The larger amount of co-guarantee receivable compared to the average co-Guarantee claim with partner-related co-guarantee is one of indicators to determine the level of co guarantee risk. Pursuant to the Regulation of

Per-Dir no. 14 tanggal 22 Desember 2011, piutang *co-Guarantee* dinyatakan wajar apabila saldo piutang *co-Guarantee* yang belum diselesaikan oleh mitra *co-Guarantee* maksimal 3 (tiga) bulan rata-rata pengajuan penggantian pembayaran klaim periode terakhir.

Board of Directors no. 14 dated December 22, 2011, co-guarantee receivables is deemed normal provided that the co-Guarantee receivables that have not been resolved by the partners of co-Guarantee is at the average of maximum of 3 (three) months of filing the reimbursement claims in the last period.

Pada 2014, co-*Guarantee* dilakukan dengan bekerja sama dengan 5 (lima) perusahaan asuransi, yaitu PT Heksa Eka Life Insurance (PT Heksa), PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin (PT AL Amin), PT Mubarakah, PT Jiwasraya, dan PT CAR. Performance mitra *co-Guarantee* Perum Jamkrindo tersebut adalah sebagai berikut:

In 2014, co-Guarantee was conducted in cooperation with 5 (five) insurance companies, namely PT Heksa Eka Life Insurance (PT Heksa), PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin (PT Al Amin), PT Mubarakah, PT Jiwasraya, and PT CAR. The co-Guarantee partnership performance of Perum Jamkrindo is as follows:

Mitra Co-Guarantee / Co-Guarantee Partner	**Saldo Piutang Co-Guarantee /** Co-Guarantee Receivable Balance	**Rata-2 Pengajuan Klaim Co-Guarantee per Bulan /** Average of Co-Guarantee Proposed Claim per month	**Perbandingan Saldo Piutang thdp 3 Bulan Rata-2 Pengajuan /** Comparison of Receivable Balance towards 3 Months Average Proposed
PT Heksa Eka Life Insurance	24.564.444.574	5.096.635.020	1,61
PT AJS AL AMIN	94.339.807.003	9.312.593.750	3,38
PT MUBARAKAH	72.705.247.599	407.408.497	59,49
PT JIWASRAYA	1.140.092.827	63.565.910	5,98
PT CAR	98.299.208	48.455.435	0,68

Untuk meminimalkan risiko *co-Guarantee*, perusahaan melakukan mitigasi dengan:

1. Melakukan evaluasi kinerja mitra *co-Guarantee* untuk meminimalisasi risiko.
2. Melakukan penyempurnaan perjanjian dengan menambahkan klausul untuk meminimalkan risiko.
3. Melakukan rekonsiliasi dan penagihan piutang *co-Guarantee* secara berkala.

In order to minimize the risk of co-Guarantee, the company mitigated the risk by:

1. Evaluating the performance of co-guarantee partners to minimize risk.
2. Amending the contract by adding a clause to minimize the risk
3. Performing reconciliation and collection of co-Guarantee receivables in a regular basis.

c. Risiko Keuangan

Risiko Keuangan dapat tercermin dari risiko likuiditas suatu perusahaan. Sesuai dengan Per-Dir nomor 15 tanggal 29 Desember 2010 tentang Panduan Manajemen Risiko, Risiko Likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu.

b. Financial Risk

Pursuant to Regulation of Board of Directors number 15 dated December 29, 2010 regarding Guidelines of Risk Management, Liquidity Ratio partly arises from the Company's incapability of meeting liabilities that have met its maturity.

Sesuai dengan PMK No. 99/PMK.010/2011, rasio likuiditas penjamin ditetapkan paling sedikit 150% (seratus lima puluh per seratus). Rasio Likuiditas dihitung dengan menggunakan *current ratio* yaitu perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar.

In accordance with the PMK. 99/PMK.010/2011, the liquidity ratio of guarantor is determined at the least 150% (one hundred fifty percent). Liquidity ratio is calculated by using the current ratio, which is a comparison between current assets and current liabilities.

Uraian / Description	**2013 (Rp)**	**2014 (Rp)**	**Pertumbuhan** / Growth **(%)**
Risiko Likuiditas / Risk of Liquidity = $\frac{\text{Aset Lancar / Current Assets}}{\text{Utang Lancar / Current Liabilities}}$			
Aset lancar / Current assets	7.090.379.251.556	8.579.463.892.080	
Utang lancar / Current liabilities	701.978.838.397	613.156.415.097	
Risiko Likuiditas / Liquidity Ratio	1.010,06%	1.399,23%	38,53%

Berdasarkan indikator tersebut, maka risiko likuiditas Perum Jamkrindo relatif kecil.

Regarding to those indicators, the liquidity risk of Perum Jamkrnido is relatively small.

d. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar *(adverse movement)* penjaminan Perum Jamkrindo, yang dapat mengurangi pasar penjaminan (merugikan) Perusahaan serta pergerakan pasar keuangan yang dapat berpotensi menurunnya *return* dan nilai investasi. Variabel pasar dalam hal ini yang terkait penjaminan adalah tingkat kompetisi, *trend* kredit perbankan dan regulasi pasar. Risiko pasar yang terkait dengan investasi adalah suku bunga, inflasi, dan portofolio investasi.

d. Market Risk

Market risk is due to the movements of market variables (adverse movement) of credit guarantee market of Perum Jamkrindo, which can reduce the insurance market (adverse) of the Company. In addition to that, market risk can be also triggered by movement of financial markets that could potentially decrease investment return and value. Market variables related to the guarantee is the level of competition, the trend of credit bank, market regulation. Market risks associated with investments are interest rates, inflation, and investment portfolio.

Uraian / Description	**2013 (Rp)**	**2014 (Rp)**	**Pertumbuhan** / Growth **(%)**
Pertumbuhan Penjaminan / Guarantee Growth = $\frac{\text{(Vol Penjaminan t-Vol Penjaminan t-1 / Guarantee Vol t-Guarantee Vol t-1)}}{\text{Vol Penjaminan t-1 / Guarantee Vol t}}$			
Vol Penjaminan t - Vol Penjaminan t-1 / Guarantee Vol t - Guarantee Vol t-1	(6.546.503.276.353)	(6.258.620.562.533)	
Vol Penjaminan t-1 / Guarantee Vol t-1	46.996.238.461.142	40.737.617.898.609	
Pertumbuhan Penjaminan / Guarantee Growth	-13,93%	-15,36%	10,29%

Uraian / Description	2013 (Rp)	2014 (Rp)	Pertumbuhan / Growth (%)
Pencapaian Target Penjaminan / Guarantee Target Achievement = Realisasi Vol Penjaminan / Realization of Guarantee Volume ÷ Target Vol Penjaminan / Guarantee Volume Target			
Realisasi volume penjaminan/ Realization of Guarantee Volume	46.996.238.461.142	40.737.617.898.609	
Target volume penjaminan/ Guarantee Volume Targer	53.899.548.546.000	60.920.162.110.298	
Pencapaian Target Penjaminan / Guarantee Target Achievement	87,19%	66,87%	-23,31%
Pencapaian Pendapatan Investasi / Investment Income Achievement = Realisasi Pendapatan Investasi / Realization of Investment Income ÷ Target Pendapatan Investasi / Investment Income Target			
Realisasi pendapatan investasi / Realization of Investment Income	286.814.758.443	531.363.555.447	
Target pendapatan investasi/ Investment Income Target	281.368.750.000	420.050.000.000	
Pencapaian Pendapatan Investasi / Investment Income Achievement	101,94%	126,50%	24,10%
Risiko dari *Return* Investasi = standard deviasi *return* investasi deposito Risks from Investment Return = Deviation Standard of Deposit Investment Return			
Rata-rata *yield* deposito Per Bulan / Average of Yield Deposit per month		0,56% atau setara 6,75% per tahun / 0.56% or equal to 6.75% per years	

Dari beberapa indikator tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan penjaminan, pencapaian target penjaminan mengalami penurunan, kecuali pencapaian pendapatan invetasi mengalami kenaikan.

From some indicators above, it can be seen that the insurance growth, the achievement of insurance target and the achievement of investment revenue decreased.

Secara nominal, nilai penjaminan Perusahaan mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang ditetapkan dalam RKAP 2014. Oleh karena itu, dalam jangka panjang Perusahaan perlu waspada terhadap risiko tidak tercapainya target volume penjaminan kredit.

Nominally, the Company's insurance value increased yet has not achieved the target set forth in RKAP 2014. Therefore, in the long term, the Company needs to be careful to the risks of failure in achieving the target volume in credit insurance.

Secara nominal, pendapatan investasi Perusahaan mengalami peningkatan, dan pencapaiannya melebihi target yang ditetapkan dalam RKAP 2014. Namun

Nominally, the Company's investment income increased and exceeded the target which was determined in RKAP 2014. However, growth of investment income

demikian, pertumbuhan pencapaian pendapatan investasi mengalami kenaikan sebesar 24,10%, sehingga dalam jangka panjang Perusahaan harus lebih mengoptimalkan pencapaian target pendapatan investasi sekaligus meminimalisir potensi risiko yang dapat menghambat tercapainya target investasi.

Untuk meminimalkan risiko investasi berupa deposito, hal-hal yang dilakukan perusahaan adalah:

1. Melakukan pemilihan bank untuk penempatan deposito, di mana deposito ditempatkan di bank-bank yang berkinerja baik
2. Nominal penempatan disesuaikan dengan ekuitas bank yang bersangkutan
3. Penempatan dilakukan dengan jangka waktu tertentu yang memungkinkan dilakukan *review* apabila terjadi perubahan tingkat suku bunga.

achievement rose by 24.10%, so that in long term aspect, the Company must optimize the achievement of investment income target while minimizing the potential risk which may slowdown the achievement of investment target.

To minimize the risk of investment in the form of deposits, the Company performs strategies as follows:

1. Selecting high-performing banks for deposit placement, where deposit placed in the high quality performance banks
2. The amount of equity is adjusted with the related equity bank
3. The placement is carried out within the specified period to enable a review in case of changes in interest rates.

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko bertujuan untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan perusahaan. Penerapan Manajemen Risiko Perum Jamkrindo mulai dilakukan pada 2010 yang ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Direksi No. 13/Per-Dir/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010. Penerapan tersebut masih bersifat pembelajaran dan baru diberlakukan secara efektif sejak tanggal 1 Juli 2013. Mengingat pemberlakuan secara efektif baru dimulai pada semester kedua tahun 2013, maka penilaian efektivitas penerapan sistem Manajemen Risiko oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) atau oleh konsultan independen belum dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara garis besar kondisi beberapa parameter penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman Manajemen Risiko

   Sebagian proses manajemen risiko sudah tercantum dalam beberapa SOP proses bisnis berbasis risiko, sehingga apabila audit internal ataupun eksternal tidak menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap SOP dimaksud, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman Manajemen Risiko sudah cukup baik.

Evaluation on the Effectiveness of Risk Management System

The implementation of Risk Management System purposes to ensure the company in the achievement of corporate objectives. The application of Perum Jamkrindo Risk Management started in 2012 that set by the Regulation of Board of Directors No. 13/Per-Dir/XII/2010 dated December 29, 2010. The application was still be enforced as a trial and effectively implemented from July 1, 2013. Regarding the effective enforcement begun effectively in the second semester of 2013, then assessment on the effectiveness implementation of Risk Management System by Internal Audit Unit (SPI) or independent consultant has not been conducted.

As the details explained above, generally the condition in several parameters implemented of Risk Management are:

a. Risk Management Comprehension

   A half of a management risk process has been stated in several SOP of risk-based business process, if the internal or external audit does not meet any non-compliance with referred SOP, then it can be concluded that the level of comprehension of Risk Management has been relatively good.

b. Pelaksanaan Rancangan Proses Manajemen Risiko

Pelaksanaan rancangan proses manajemen risiko perlu didukung dengan adanya sistem manajemen risiko. Terkait sistem manajemen risiko, Perum Jamkrindo telah memiliki *Blueprint* Manajamen Risiko dan Panduan Manajemen Risiko yang didukung dengan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko yang berfungsi untuk mempermudah proses identifikasi, penilaian risiko, dan tindak lanjut penanganan risiko. Proses identifikasi dan penilaian risiko serta penyusunan rencana pengendalian risiko tersebut sudah dilakukan secara triwulanan oleh *Risk Owner* di Perum Jamkrindo. Dengan demikian, dapat dikatakan rancangan proses manajemen risiko telah sesuai untuk diterapkan.

c. Metode Pengukuran dan Evaluasi Proses Manajemen Risiko

Manajemen Risiko Perum Jamkrindo saat ini sedang melakukan pengukuran dan penilaian risiko secara komprehensif berupa *Credit Risk Modelling* dan *Assessment* Penerapan Manajemen Risiko dengan bantuan Konsultan. Pengukuran dan penilaian tersebut mulai berlangsung pada Desember 2014 dan akan selesai pada awal 2015, sehingga Manajemen Risiko Perum Jamkrindo dapat menerapkan *Credit Risk Modelling* pada unit bisnis Perusahaan.

b. The Implementation of Risk Management Process Plan

The implementation of risk management process plan must be supported with risk management system. In relation to that, Perum Jamkrindo has had a Blueprint of the Risk Management and Guidelines of Risk Management, supported with the Application of Risk Management information System that functions to expedite the identification process, risk assessment and follow-up of the risk management. The identification process and risk assessment, including the preparation of the risk control plan has been done in a quarterly basis by the Risk Owner in Perum Jamkrindo. Therefore, it can be concluded that the blue print of risk management process has met the expectation to be further implemented.

c. Measurement and Evaluation Method of Risk Management Process

Perum Jamkrindo Risk Management is currently performing risk measurement and assessment comprehensively in form of Credit Risk Modelling and Assessment of Risk Management Implementation with the help of consultant. The measurement and assessment started in December 2014 and will be finished by the beginning of 2015, so that Perum Jakrindo Risk Management can implement the Credit Risk Modelling on the Company's business unit.

SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS / BOARD OF SUPERVISORS SECRETARY

Nama / Name	**Wawan Chaerul Anwar**
Jabatan / Position	**Sekretaris Dewan Pengawas / Board of Supervisors Secretary**
Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Nomor : KEP-01/DP-JAMKRINDO/IV/2013 tentang pengangakatan sekretaris dewan Pengawas Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia / Decision of Perum Jamkrindo's Board of Supervisors No: KEP-01/DP-JAMKRINDO/IV/2013 regarding the appointment of Perum Jamkrindo's Board of Supervisor Secretary
Umur / Age	46 tahun / years old
Warga Negara / Nationality	Indonesia / Indonesian
Pendidikan / Education	Sarjana Ekonomi pada Universitas Jayabaya pada 1994 / Bachelor of Economics from Jayabaya University in 1994.
Riwayat Pekerjaan / Work Experience	
2012-sekarang / present	Sekretaris Dewan Pengawas Perum Jamkrindo / Perum Jamkrindo's Secretary of Board of Supervisors
2010-2012	Kepala Sub Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik / Head of the Infrastructure and Logistic Business Sub-Division

Tugas Sekretaris Dewan Pengawas

Pelaksanaan kegiatan meliputi komunikasi Perusahaan, protokoler, sekretariatan, administrasi persuratan, humas dalam rangka pengelolaan Perusahaan, antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan komunikasi perusahaan, termasuk penyusunan strategi dan perencanaan kegiatan komunikasi Dewan Pengawas.
2. Melaksanakan kegiatan protokoler dan kesekretariatan Perusahaan.
3. Melaksanakan kegiatan adminsitratif dan memfasilitasi Dewan Pengawas dengan Pihak Eksternal.
4. Melaksanakan kegiatan agenda rapat Dewan Pengawas dan RPB.
5. Melaksanakan kegiatan humas dalam pertemuan dengan pihak internal maupun ekternal terkait kepentingan Perusahaan.
6. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dokumen/ kearsipan Perusahaan.
7. Menyusun materi dan Berita Acara Komite Audit Dan Komite Risiko Usaha sesuai bidang tugasnya.
8. Melaksanakan dan mengawasi penerapan *Good Corporate Governance* di bidang tugasnya.
9. Melaksanakan kegiatan Manajemen Risiko sesuai bidang tugasnya.
10. Melaksanakan, memelihara dan mengolah data base sesuai bidang tugasnya.
11. Melakukan penatausahaan berkas/dokumentasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
12. Menyusun laporan kegiatan dan berkala di bidang tugasnya.
13. Menyediakan data dan informasi untuk keperluan pemeriksaan internal/eksternal serta menindaklanjuti rekomendasi Auditor tersebut sesuai bidang tugasnya.
14. Membina, mengarahkan dan menilai kinerja seluruh staff dan pelaksana pada bagian Sekretariatan & Humas.
15. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi dan pelaksana bagian Sekretariat dan Humas.

Duties of the Secretary of Board Supervisors

Duties of the Secretary include company communication, protocols, secretariat, correspondence, and public relations for the Company's management. The duties are as follows:

1. Performing corporate communication function, including preparing strategies and planning communication activities for the Board of Supervisors.
2. Performing protocol and secretariat activity.
3. Performing administrative activity and facilitates Board of Supervisors with External Parties.
4. Preparing meeting agenda for the Board of Supervisors and RPB.
5. Performing a public relations function to facilitate the meetings for internal and external parties for the Company's interest.
6. Managing and filing documents.
7. Preparing materials and Minutes of Meeting of the Audit Committee and Business Risk Committee in accordance with the duties.
8. Performing and supervising the implementation of good corporate governance in accordance with the duties.
9. Performing Risk Management activity in accordance with the duties.
10. Performing, maintaining, and managing database in accordance with the duties.
11. Administering documents related to the duties.
12. Preparing periodical reports of activity in accordance with the duties.
13. Providing data and information for auditing internal and external activity and following-up the recommendation of the Auditor in accordance with the duties.
14. Developing, directing, and assessing performance of all staffs and executing officer in the Secretariat & Public Relations.
15. Performing supervisory function to the implementation of duties of Board of Directors and executing officer in the Secretariat and Public Relations.

SEKRETARIS PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARY

Nama / Name	**M.Natsir Rahmadi**
Jabatan / Position	**Sekretaris Perusahaan** / **Corporate Secretary**
Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Nomor : 221/Kep-Dir/XI/2014 / Decision of Perum Jamkrindo's Board of Directors No: 221/Kep-Dir/XI/2014
Umur / Age	43 tahun / years old
Warga Negara / Nationality	Indonesia / Indonesian
Pendidikan / Education	S1 di Universitas Brawijaya pada 1999 / Bachelor's Degree from Brawijaya University in 1999
Riwayat Pekerjaan / Work Experience	
2014-sekarang / present	Sekretaris Perusahaan Perum Jamkrindo / Perum Jamkrindo's Corporate Secretary
2012-2014	Kabag. Kepatuhan Divisi Hukum dan Kepatuhan / Head of Legal and Compliance Division
2011-2012	Kasie. Adm dan Keuangan Kantor Anak Cabang Papua / Head of Administration and Finance Section of Papua Branch Office
2007-2011	Staf administrasi dan Keuangan kantor Cabang Samarinda / Administration and Finance Staff, Samarinda Branch Office
2004-2007	Staf Operasional kantor Cabang Samarinda / Operational Staff, Samarinda Branch Office
Pelatihan / Education	
2010	Developing Personal Effectiveness
2007	Aplikasi Operasional Perusahaan / Company Operational Application
2011	Kebutuhan Jaminan dalam Pengadaan Barang dan Jasa, IT Master Plan & IT Governance / Needs of Guarantee in Goods and Services Procurement, IT Master Plan & IT Governance
2011	Manajemen Risiko / Risk Management
2012	Aplikasi KUR BRI Online, Operasional, Manajemen Risiko, Akuntansi dan Penjaminan / KUR BRI Online application, Operational, Risk Management, Accounting and Guarantee
	Workshop Analisis Beban Kerja / Workload Analysis Workshop
	Encounter Leadership Program utk Level 3 / Level 3 Encounter Leadership Program
	Kontra Bank Garansi, Surety Bond & Custom Bond / Counter Bank Guarantee, Surety Bond & Custom Bond
2012	Sosialisasi Kebijakan & Ketentuan Bidang Keuangan & SDM Perum Jamkrindo / Socialization of Policy and Regulation of Perum Jamkrindo Financial and Human Resources Field
2012	Workshop GCG / GCG Workshop
2013	Workshop Peraturan Menteri Negara BUMN No.15 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa BUMN / Regulation of State Minister of SOEs No. 15 Year 2012 on Procurement of SOEs Goods and Services Workshop
2013	Membangun Perusahaan yang berintegritas dan GCG / Building Company with integrity and GCG

2013	Workshop Prinsip-prinsip Best Practice Reasuransi / Workshop of Reinsurance Best Practice Principles
2013	Workshop Implementasi Peraturan Menteri BUMN No. PER-19/MBU/2012 / Implementation of the Regulation of Minister of SOEs No. PER-19/MBU/2012 Workshop
2013	Pelatihan kader anti narkoba / Training of Anti-Drugs Successor

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Pelaksanaan kegiatan Sekretaris Perusahaan yang meliputi kegiatan komunikasi Perusahaan, protokoler, sekretariatan, administrasi persuratan, humas dalam rangka pengelolaan Perusahaan, antara lain:

1. Menyusun dan mengusulkan serta melaksanakan Rencana Jangka Panjang sesuai bidang tugasnya.
2. Menyusun, mengusulkan dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bagian Sekretariatan & Humas.
3. Merumuskan, menyusun, mengusulkan dan melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, dan SOP sesuai bidang tugasnya.
4. Melaksanakan kegiatan komunikasi perusahaan, termasuk penyusunan strategi dan perencanaan kegiatan komunikasi Perusahaan.
5. Melaksanakan kegiatan protokoler dan kesekretariatan Perusahaan.
6. Melaksanakan kegiatan adminsitratif dan memfasilitasi Direksi dan Dewan pengawas dengan Pihak Eksternal.
7. Melaksanakan kegiatan agenda rapat Direksi, Rapat Direksi dan Dewan Pengawas dan RPB.
8. Melaksanakan kegiatan humas dalam pertemuan dengan pihak internal maupun ekternal terkait kepentingan Perusahaan.
9. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dokumen atau kearsipan Perusahaan.
10. Menyusun materi dan Berita Acara Komite Direktorat dan Direksi sesuai bidang tugasnya.
11. Melaksanakan dan mengawasi penerapan *Good Corporate Governance* di bidang tugasnya.

Duty Implementation of the Corporate Secretary

The duty implementation of the Corporate Secretary which covers the Company's communication activities, protocol, secretary, administration and letters, public relation in managing the Company, such as:

1. Compiling, proposing, and conducting Long-Term Plans in accordance with the field of duties.
2. Compiling, proposing and conducting the Work Plan and Annual Budget of Secretary and Public Relation.
3. Creating, compiling, proposing and conducting the policies, system and procedure, and SOP in line with the field of duties.
4. Conducting the Company's communication activities, including compiling strategies and planning of the Company's communication activities.
5. Conducting the protocol and secretary activities of the Company.
6. Conducting the administrative and facilitate the Board of Directors and Board of Supervisors with External Parties.
7. Conducting the meeting agenda of Board of Directors, meetings of Board of Directors, Board of Supervisors and RPB.
8. Conducting the public relation activities in the meetings with internal or external parties related to the interest of the Company.
9. Conducting the management of document/archives of the Company.
10. Compiling the material and Minutes of Meeting of the Directorate Committee and Board of Directors in accordance with the field of duties.
11. Conducting and supervising the implementation of Good Corporate Governance in its field of duties.

12. Melaksanakan kegiatan Manajemen Risiko sesuai bidang tugasnya.
13. Melakukan kerja sama dengan Kepala Bagian pada Divisi Umum, SPI, Divisi lainnya, dan Kantor Cabang serta Kantor Anak Cabang dalam rangka koordinasi dan penyelesaian pekerjaan.
14. Melaksanakan, memelihara dan mengolah *data base* sesuai bidang tugasnya.
15. Melakukan penatausahaan berkas atau dokumentasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
16. Menyusun laporan kegiatan dan berkala di bidang tugasnya.
17. Menyediakan data dan informasi untuk keperluan pemeriksaan internal dan eksternal serta menindaklanjuti rekomendasi Auditor tersebut sesuai bidang tugasnya.
18. Melaksanakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi pencapaian anggaran di bidang tugasnya.
19. Membina, mengarahkan dan menilai kinerja seluruh staf dan pelaksana pada bagian Sekretariatan dan Humas.
20. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas seluruh staf dan pelaksana bagian Sekretariat dan Humas.

12. Conducting the Risk Management activities in line with the field of duties.
13. Conducting a cooperation with the Head Division in Division of General Affairs, Internal Control Unit, other Divisions, Branch Offices, and Sub-Branch Offices in coordinating and completing the works.
14. Conducting, maintaining and processing the database in accordance with the field of duties.
15. Conducting the administration of archives/ documentation related to the field of duties.
16. Compiling the activities report periodically in the field of duties.
17. Providing the data and information for an internal/ external inspection and following up the Auditor's recommendation in line with the field of duties.
18. Conducting the monitoring and evaluation of budget achievement in the field of duties.
19. Establishing, directing, and appraising the performance of the entire staffs and managers of Secretary and Public Relations.
20. Supervising the implementation of duties of all staffs and executing officer in Secretariat and Public Relation Division.

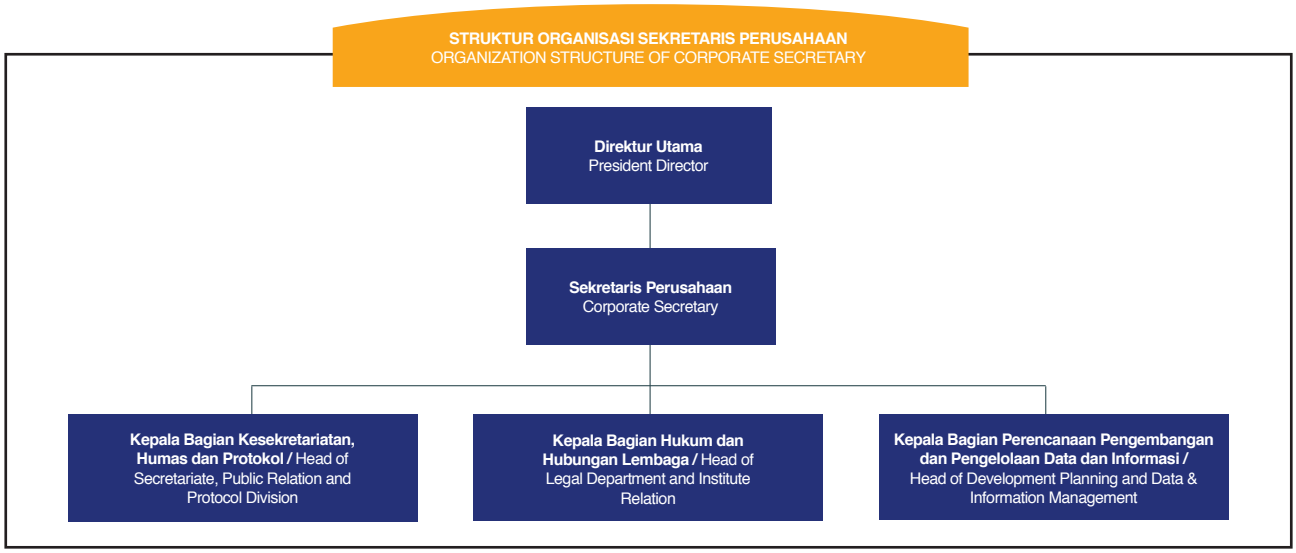
Penyampaian Laporan Manajemen

Penyampaian Laporan Manajemen kepada Dewan Pengawas, yaitu:

Report Submission of Management

Report Submission of management to Supervisory Board, namely:

Jenis Laporan / Type of Report	**Standar Waktu /** Times Standard	**Penyampaian /** Submission
Laporan Triwulanan / Wuarterly Report		
TW I/2014 / Quarter I/2014	-	13 Mei 2014 / May 13, 2014
TW II/2014 / Quarter II/2014	-	07 Mei 2014 / May 7, 2014
TW III/2014 / Quarter III/2014	-	28 Oktober 2014 / October 28, 2014
TW IV/2014 / Quarter IV/2014	-	17 Februari 2015 / February 17, 2015



No	Jabatan / Position	Nama / Name
1	Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary	M. Natsir Rahmadi
2	Kepala Bagian Kesekretariatan, Humas dan Protokol / Head of Secretariate, Public Relation and Protocol Division	Hafizah
3	Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Lembaga / Head of Legal Department and Institute Relation	Zulfikar
4	Kepala Bagian Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Informasi / Head of Development Planning and Data & Information Management	Puspita Dewi

Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Upaya Perusahaan untuk mendukung kemajuan dan peningkatan kompetensi Sekretaris Perusahaan adalah dalam rangka mengoptimalkan kinerja Sekretaris Perusahaan bagi kemajuan Perusahaan. Sepanjang 2014, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti beberapa program pelatihan, yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Competency Development Program of Corporate Secretary

The Company's effort to support the progress and improvement of competency of the Corporate Secretary aims to optimize the performance of Corporate Secretary for the development of the Company. During 2014, the Company has attended several training programs, clearly seen in this following table:

No	Nama Pelatihan/ Workshop	Pelaksana Pelatihan/ Training Organizer	Tanggal Pelatihan / Date of Training	Tempat Pelatihan / Training Location	Peserta / Participant	Jumlah (Orang) / Total (Person)	Biaya Pelatihan / Cost of Training	Biaya Lain-lain (uang transport, SPPD, penginapan) / Other Costs (transportation, SPPD, inn)	Jumlah Biaya / Total Cost
1	Professional Directors Program	IICD	17-18 Februari 2014 / February 17-18, 2014	Swissbel hotel	Soegeng Iman W	20	Rp140.000.000	Rp33.010.063	Rp173.010.063
2	Seminar Konsepsi dan Aplikasi Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan / Seminar of BPJS Health and Employment Concept and Application	Forum Peduli Solidaritas Bangsa	26-27 Maret 2014 / March 26-27, 2014	Hotel Grand Cempaka	Deden Wahyudin, Helena LMS	2	Rp6.500.000	Rp370.000	Rp6.870.000
3	Diklat Nasional Peningkatan Kemampuan Taktik Teknik Pola Pengungkapan Kasus/Jaringan dan Anatomi Kejahatan Tertentu / National Education and Training of the Improvement of Tactic of Disclosure Pattern Tenchniques for Cases/Netwroks and Certain Crimes Anatomy	Lembaga Diklat Profesi PPNS-RI	17-18 April 2014 / April 17-18, 2014	Wisma Mabes POLRI Argamuncar	Azwar Annas F, M. Noor Yustisiananda	4	Rp17.000.000	Rp355.000	Rp17.355.000
4	Mediasi di Sektor Jasa Keuangan / Mediation in Financial Service Sector	Otoritas Jasa Keuangan	21-26 April 2014 / April 21-26, 2014	Menara Bidakara, Jaksel	Zulfikar	1	Rp0	Rp0	Rp0
5	Pendidikan dan Pelatihan Penjaminan Syariah Batch I / Education and Training of Sharia Guarantee Batch I	Jamkrindo	25-26 April 2014 / April 25-26, 2014	Kanpus Jamkrindo	Rino Hapsoro, Nastiti Pandanwangi	35	Rp38.500.000	Rp3.715.000	Rp42.215.000
6	Pendidikan dan Pelatihan Penjaminan Syariah Batch II / Education and Training of Sharia Guarantee Batch II	Jamkrindo	9-10 Mei 2014 / May 9-10, 2014	Kanpus Jamkrindo	Rino Hapsoro, Dwi Putra Raneldo	35	Rp38.500.000	-	Rp38.500.000

No	Nama Pelatihan/ Workshop	Pelaksana Pelatihan/ Training Organizer	Tanggal Pelatihan / Date of Training	Tempat Pelatihan / Training Location	Peserta / Participant	Jumlah (Orang) / Total (Person)	Biaya Pelatihan / Cost of Training	Biaya Lain-lain (uang transport, SPPD, penginapan) / Other Costs (transportation, SPPD, inn)	Jumlah Biaya / Total Cost
7	Interpretasi dan Penyusunan Laporan KPKU / Interpretation and Arrangement of KPKU Report	Forum Ekselen BUMN	21-23 Mei 2014 / May 23-24, 2014	Hotel Amaroosa Bandung	Rino Hapsoro	2	Rp3.800.000	Rp360.000	Rp4.160.000
8	Pendidikan dan Pelatihan Penjaminan Syariah Batch III / Education and Training of Sharia Guarantee Batch III	Jamkrindo	23-24 Mei 2014 / May 23-24, 2014	Kanpus Jamkrindo / Head Office	M. Natsir, Penny Eka Y, Retno Endah Purwani	36	Rp38.500.000	-	Rp38.500.000
9	English Club	Equal	10 Juni 2014 / June 10, 2014	Kanpus Jamkrindo / Head Office	Nastiti Pandanwangi, Helena LMS, Penny Eka Yulianti, Retno Endah Purwani, Puspita Dewi	50	Rp12.000.000	Rp600.000	Rp12.600.000
10	Menyusun Peraturan Perusahaan dan PKB / Preparing Company's Regulation and PKB	DHN Consulting	18 Juni 2014 / June 18, 2014	Hotel Oasis Amir, Jakarta	R. Evayanthy	1	Rp1.695.000	Rp0	Rp1.695.000
11	Workshop Penyusunan KPI dalam Peningkatan Daya Saing BUMN / Workshop of KPI Arrangement in Improving SOE Competitiveness	Media Pekerja BUMN	20 Juni 2014 / June 20, 2014	Hotel Grand Preanger, Bandung	Rino Hapsoro	2	Rp7.000.000	Rp0	Rp7.000.000
12	Evaluator KPKU / KPKU Evaluator	Forum Ekselen BUMN	24-26 Juni 2014 / June 24-26, 2014	Hotel Amaroosa Bandung	Puspita Dewi	2	Rp7.600.000	Rp400.000	Rp8.000.000
13	Interpretasi dan Penyusunan Laporan KPKU / Interpretation and Arrangement of KPKU Report	Forum Ekselen BUMN	24-26 Juni 2014 / June 24-26, 2014	Hotel Amaroosa Bandung	Helena LMS	2	Rp7.600.000	Rp400.000	Rp8.000.000
14	Pemahaman dan Manajemen Pemasaran Surety Bond / Surety Bond Comprehension and Marketing Management	Perum Jamkrindo	28 Juni 2014 / June 28, 2014	Kanpus Jamkrindo / Head Office	M. Natsir, Dyah Ayu Kusuman	28	Rp5.000.000	Rp4.300.000	Rp9.300.000

No	Nama Pelatihan/ Workshop	Pelaksana Pelatihan/ Training Organizer	Tanggal Pelatihan / Date of Training	Tempat Pelatihan / Training Location	Peserta / Participant	Jumlah (Orang) / Total (Person)	Biaya Pelatihan / Cost of Training	Biaya Lain-lain (uang transport, SPPD, penginapan) / Other Costs (transportation, SPPD, inn)	Jumlah Biaya / Total Cost
15	Pelatihan Reasuransi/ Re-Insurance Training	Jamkrindo	12 Juli 2014 / July 12, 2014	Kanpus Jamkrindo / Head Office	R Evayanthy, Rico Zulkarnaen, Azwar Annas	40	Rp0	Rp0	Rp0
16	English for Travel	Equal Englis Training	7 - 15 Agustus 2014 / August 7-15, 2014	Kanpus Jamkrindo / Head Office	Dody N, Puspita Dewi,	4	Rp1.250.000	Rp0	Rp1.250.000
17	ATP ke 24 Tahun 2014 / 24th ATP year 2014	ACSIC	17 - 22 Agustus 2014 / August 17-22, 2014	Gangnam, Seoul Korea	Dody N, Puspita Dewi,	4	Rp12.440.450	Rp49.612.514	Rp62.052.964
18	In House Training Pelayanan Klaim Penjaminan / In House Training of Guarantee Claim Service	Perum Jamkrindo	23 - 24 Agustus 2014 / August 23-24, 2014	Kanpus Jamkrindo / Head Office	Azwar Annas F, Rico Zulkarnaen	57	Rp0	Rp0	Rp0
19	Perekonomian Indonesia secara Makro dan Potensi Perusahaan Penjaminan untuk UKMK oleh Bapak Dr. Ir. Arief Budimanta / Indonesian Macro Economic and Guarantee Company's Potential for UKMK by Bapak Dr. Ir. Arief Budimanta	Perum Jamkrindo	1 September 2014 / September 1, 2014	Hotel Holiday Inn, Kemayoran	Soegeng Iman W, M Natsir, Hafizah, Puspita Dewi, Zulfikar	67	Rp15.000.000	Rp0	Rp15.000.000
20	Motivasi Dengan Memperkuat Kemampuan Komunikasi Meningkatkan Kinerja Jamkrindo secara Keseluruhan oleh Aqua Dwipayana / Motivation by Strengthening Communication Ability can Increase Overall Performance of Jamkrindo by Aqua Dwipayana	Perum Jamkrindo	2 September 2014 / September 2, 2014	Hotel Holiday Inn, Kemayoran	Soegeng Iman W, M Natsir, Hafizah, Puspita Dewi, Zulfikar	67	Rp60.000.000	Rp0	Rp60.000.000

No	Nama Pelatihan/ Workshop	Pelaksana Pelatihan/ Training Organizer	Tanggal Pelatihan / Date of Training	Tempat Pelatihan / Training Location	Peserta / Participant	Jumlah (Orang) / Total (Person)	Biaya Pelatihan / Cost of Training	Biaya Lain-lain (uang transport, SPPD, penginapan) / Other Costs (transportation, SPPD, inn)	Jumlah Biaya / Total Cost
21	Arbitrase Syariah di Sektor Jasa Keuangan / Sharia Arbitration in Financial Service Sector	OJK	21 - 22 Oktober 2014 / October 21-22, 2014	Menara Radius Prawiro Jakarta	Sulistyorini W, Azwar Annas F	2	Rp0	Rp550.000	Rp550.000
22	ACSIC Conference ke-27 / 27th ACSIC Conference	ACSIC	16 - 22 Nopember 2014 / November 16-22, 2014	Malaysia	-	13	-	-	-
23	Pelatihan Mediasi/ Mediation Training	Pusat Mediasi Nasional	4 Desember 2014 / December 4, 2014	Jakarta	Azwar Annas Fahmi	1	Rp0	Rp125.000	Rp125.000
24	Markplus Conference	Markplus	11 Desember 2014/ December 11, 2014	Hotel Ritz Carlton SCBD	Helena LMS, Hafizah, Retno Endah Purwani	30	Rp15.000.000	Rp1.850.000	Rp16.850.000
25	Leading at The Speed of Trust Batch II	Mahadibya Nurcahyo Chakrasana	13 Desember 2014/ December 13, 2014	Menara ESQ 146	Hafizah, Puspita Dewi	50	Rp104.500.000	Rp38.277.500	Rp142.777.500

SATUAN PENGAWASAN INTERN

Satuan Pengawasan Intern (SPI) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Pengawas, dengan kegiatan meliputi kegiatan di bidang pengawasan Intern (pemeriksaan atau audit), pengendalian mutu dan pengembangan audit, serta manajemen resiko dan kepatuhan yang berkaitan dengan kegiatan keuangan, kegiatan operasional dan non operasional Perusahaan, dan arahan Direktur Utama dalam rangka mencapai sistem manajemen perusahaan yang tertib, efektif, efisien dan bernilai tambah.

Pedoman Pelaksanaan Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Pedoman pelaksanaan yang digunakan SPI dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

INTERNAL AUDIT

Internal Audit (SPI) is chaired by Head of Internal Audit appointed and dismissed by the President Director by the approval of the Board of Commissioners, with scope of activities including internal supervision (inspection or audit), quality control and audit development, as well as risk management and compliance related to financial activity, Company's operational and non-operational activity, and guidance of the President Director in order to achieve a management system that is in order, effective, efficient and with added-value.

Guidelines for the Implementation of Internal Audit (SPI)

Guidelines of Implementation that are used by SPI in implementing their duties are:

- Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises.

- Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2008 tentang Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum).
- Surat Edaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 797/K/1985 tentang Norma Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern.
- Keputusan Direksi Nomor 04/Kep-Dir/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Umum Jaminan Kredit.
- Keputusan Direksi Nomor 58/Dir/IX/1998 tanggal 18 September 1998 tentang Pedoman Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern.
- Peraturan Direksi Nomor 45/Per-Dir/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang Pedoman Audit Internal Berbasis Risiko (*Risk Based Internal Audit*) Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia.
- Piagam Satuan Pengawasan Intern (SPI Charter).

- Government Regulation No. 95 of 2000 on the Establishment of Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha jo the Government Regulation Number 41 of 2008 on Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia.
- Government Regulation No. 13 of 1998 on Perusahaan Umum (Perum).
- Circular Finance and Development Supervisory Agency (BPK) 797/K/1985 Number of Norms of Internal Control Unit Inspection.
- Board of Directors Decision No. 04/Kep-Dir/I/2013 Directors dated January 15, 2013 on Organizational Structure of Perusahaan Umum Jaminan Kredit.
- Board of Directors Decision No. 58/Dir/IX/1998 Directors dated 18 September 1998 regarding Guidelines for Examination of Internal Audit.
- Regulation of the Board of Directors No. 45/Per-Dir/XII/2014 dated December 5, 2014 on the Guidelines for Examination of Internal Audit
- Internal Audit Charter (SPI Charter).

Piagam *Internal Audit*

Audit internal memiliki *Internal Audit Charter* yang disusun guna memenuhi kewajiban Perusahaan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN dan Undang-Undang RI No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Di samping itu untuk mendorong terwujudnya iklim kerja yang kondusif bagi berkembangnya motivasi dan produktivitas kerja yang profesional.

Piagam Satuan Pengawasan Intern merupakan pedoman kerja audit internal yang memuat maksud, visi, misi, struktur dan hubungan kerja, fungsi, tugas dan tanggung jawab, wewenang, kualifikasi auditor internal, ruang lingkup, kebijakan, standar kode etik kerahasiaan, evaluasi dan penyempurnaan.

Internal Audit Charter

Internal Audit has Internal Audit Charter that created to comply with Regulation of Ministry of State Owned Enterprise No. PER-01/MBU/2011 regarding the implementation of Good Corporate Governance for SOE and Regulation of RI No. 19 Year 2003 regarding the State Owned Enterprise. Furthermore, in order to create a conducive working atmosphere to boost motivation, professionalism, and productivity of the Company.

Internal Audit Charter constitutes guidelines that encompass the Internal Audit's intention, vision, mission, structure and work relations, functions, duties and responsibilities, authorities, qualification of internal auditor, scope of works, policies, standards of confidentiality of ethical code, evaluation, and amendment.

Visi

Menjadi mitra kerja Unit yang independen, obyektif, profesional, terpercaya, tanggap untuk mendukung tugas Direksi dan jajaran Manajemen dan berperan aktif dalam di bidang pengawasan melalui kegiatan assurance dan consulting dalam membantu mencapai tujuan perusahaan.

Misi

1. Aktif melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas perusahaan meliputi proses pengendalian manajemen, operasional, keuangan dan pengelolaan risiko dalam peningkatan kinerja perusahaan melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip GCG;
2. Meningkatkan peran pemeriksaan intern dan kualitas hasil pengawasan melalui peningkatan kompetensi auditor internal dan pemanfaatan sistim informasi;
3. Mengupayakan pelayanan konsultasi untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan dan sistim-sistim pendukungnya dan memberikan jaminan atau meyakinkan *(assurance)* bahwa seluruh aktivitas perusahaan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan, praktek bisnis terbaik (*business best practice*) dan sesuai dengan prosedur & kebijakan (*procedures & policy*) yang ditetapkan;
4. Memberikan nilai tambah baik secara kualitas dan kuantitas yang berfokus pada proses bisnis dan pelanggan, pro-aktif, antusias dan terpercaya, dapat berkomunikasi secara efektif, mampu menemukan akar permasalahan dan dapat memanfaatkan secara optimal sistem teknologi informasi.

Vision

To be an Independent, Objective, Professional, Trusted and Perceptive Unit business partner to support the duties of Board of Directors and Management as well as actively take part in supervisory field through the assurance and consulting activity in assisting the achievement of Company's objectives.

Mission

1. Actively monitoring the entire Company activities including process of management control, operational, financial and risk management within the development of Company performance through the improvement of efficiency and effectiveness of Company activities that are based on GCG principles;
2. Increasing the role of internal audit and quality of audit through the improvement of internal auditor competency and utilization of information system;
3. Working on consultation service to increase Company values and its supporting systems and provide guarantee or assurance that the entire Company activities has been carried out in accordance with the regulation and business best practice and is in accordance with the procedures & policy that has been set before;
4. Provide added value both for quality and quantity which focuses on business process and customers, pro-active, enthusiastic and trusted, capable in communicating effectively, able to locate source of problems and able to optimally utilize the information system technology.

Profil Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Profile of the Chairman of Internal Audit (SPI)

Nama / Name	**Achmad Sonhadji**
Jabatan / Position	**Kepala Satuan Pengawasan Intern** / **Chairman of Internal Audit Unit**
Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Keputusan Direksi Nomor: 221/Kep-Dir/XI/2014 tanggal 6 November 2014 dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas. / Decision of the Board of Directors No. 221/Kep-Dir/XI/2014 dated November 6, 2014 and has been approved by the Board of Supervisors
Tanggal Lahir / Date of Birth	19 April 1965 / April 19, 1965
Umur / Age	49 tahun / years old
Warga Negara / Nationality	Indonesia / Indonesian

Pendidikan / Education	Qualified Internal Audit (QIA)
	Master Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Labora pada 1999 / Master of Management from Labora Management High School in 1999
	Sarjana Akuntansi di Universitas Brawijaya pada 1990 / Bachelor of Accounting from Brawijaya University in 1990

Berikut riwayat Pekerjaan beliau : Here are his Career History:

No	Jabatan / Position	Unit Kerja / Working Unit	Periode Pengangkatan / Period of Appointment
1.	Pejabat Pranata Utama / Main Official	Direktorat SDM dan Umum / Directorate of Human Resources and General Affair	3 September 2014 / September 3, 2014
2.	Kepala Divisi / Head of Division	Divisi Pemasaran dan Penjaminan Bank / Marketing and Bank Guarantee Division	10 Maret 2014 / March 10, 2014
3.	Kepala Divisi / Head of Division	Divisi Klaim dan Subrograsi / Claim and Subrogation Division	17 Januari 2014 / January 17, 2014
4.	Kepala Kantor Cabang / Head of Branch Office	Kantor Cabang Surabaya / Surabaya Branch Office	15 Januari 2013 / January 15, 2013
5.	Kepala Divisi / Head of Division	Divisi Keuangan / Finance Division	27 November 2012 / November 27, 2012
6.	Kepala Divisi / Head of Division	Divisi MRTI / MRTI Division	8 Juli 2010 / July 8, 2010
7.	Kepala Divisi / Head of Division	Divisi PUTI / PUTI Division	9 Juli 2008 / July 9, 2008
8.	Kepala Cabang / Head of Branch Office	Kanca Samarinda / Samarinda Branch Office	10 September 2007 / September 10, 2007
9.	Kabag Operasional / Head of Operational Division	Kanca Surabaya / Surabaya Branch Office	25 Mei 2005 / May 25, 2005
10.	Kabag Pengendalian / Head of Control Division	Divisi Pengendalian & Pemasaran / Control & Marketing Division	16 Desember 2004 / December 16, 2004
11.	Kabag Sistem & Teknologi / Head of System & Technology Division	Divisi PPU / PPU Division	29 Mei 2003 May 29, 2003
12.	Kabag Operasional / Head of Operational Division	Satuan Pengawas Intern / Internal Audit	3 Januari 2000 / January 3, 2000
13.	Kabag Pemeriksaan Keu & Adm / Head of Finance Inspection & Administration	Satuan Pengawas Intern / Internal Audit	1 Juli 1999 / July 1, 1999
14.	Analisa Muda I / Staf Muda I / Young Analyst I / Young Staff I	Bag Pengendalian Div Penjaminan Bank / Control and Bank Guarantee Division	31 Maret 1998 / March 31, 1998
15.	Analisa Muda I / Staf Muda I / Young Analyst I / Young Staff I	Bagian Wilayah Usaha 1 / Business Sector 1	1 Juni 1993 / June 1, 1993

No	Jabatan / Position	Unit Kerja / Working Unit	Periode Pengangkatan / Period of Appointment
16.	Staf I / Staff I	Bagian Wilayah Usaha 1 / Business Sector 1	1 Maret 1993 / March 1, 1993
17.	Penata Muda / Young Administrator	Bagian Wilayah Usaha 1 / Business Sector 1	1 Juli 1992 / July 1, 1992
18.	Calon Karyawan / Prospective Employee	Biro Analisa Kredit / Credit Analyst Bureau	01 November 1990 / November 1, 1990

Pelatihan/Workshop yang diikuti:

Participated Trainings/Workshops

Pelatihan / Trainings	Penyelenggara / Organizer	Tahun / Year
Professional Directors Program	IICD	2014
Pelatihan Reasuransi / Reinsurance Training	Perum Jamkrindo	2014
Pelatihan Pelayanan Klaim Penjaminan Kredit / Credit Guarantee Claim Service Training	Perum Jamkrindo	2014
Perekonomian Indonesia secara Makro dan Potensi Perusahaan Penjaminan untuk UKMK oleh Dr Ir Arief Budimanta / Indonesia Economy in Macro and Potential of Insurance Companies for SMEs by Dr Ir Aried Budimanta	Perum Jamkrindo	2014
Motivasi dengan memperkuat kemampuan komunikasi meningkatkan kinerja Jamkrindo secara keseluruhan oleh Aqua Dwipayana / Motivation by strengthening communication ability improving the performance of Jamkrindo in overall by Aqua Dwipayana	Perum Jamkrindo	2014
Tutorial Executive peluang dan tantangan perkembangan bisnis keuangan syariah untuk Direksi Perum Jamkrindo / Executive Tutorial, opportunities and challenges of sharia financial business development for Perum Jamkrindo Board of Directors	Muamalat Institute	2014

Struktur Organisasi dan Kedudukan Satuan Pengawasan Intern

Satuan Pengawasan Intern (SPI) dipimpin oleh seorang kepala yang berada langsung di bawah Direktur Utama dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Pengawas. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala SPI, setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas, jika Kepala SPI tidak memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Organization Structure and Position of Internal Audit

Internal Audit is chaired by a supervisor under the President Director who is directly responsible to President Director.

The Head of Internal Audit was dismissed by the President Director by approval from the Board of Supervisors. This might happen if the Head of the Internal Audit fails to meet the obligations as the internal auditor in accordance with the applicable laws.



No	Jabatan / Position	Nama / Name
1	Kepala Satuan Pengawasan Intern / Chairman of Internal Audit	Achmad Sonhadji
2	Kepala Bagian Pengawasan I / Head of Supervision Unit I	Sri Lestari
3	Kepala Bagian Pengawasan II / Head of Supervision Unit II	Dadang Ary Avianto
4	Kepala Bagian Pengawasan III / Head of Supervision Unit III	Arry Andru Palapi
5	Kepala Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan / Head of Risk Management and Compliance	Zachri
6	Kepala Seksi Manajemen Risiko / Head of Risk Management Section	Ridwan Kurniawan Kapindo

Jumlah Karyawan Satuan Pengawasan Intern

Mengingat tugas pengawasan yang diemban SPI memegang peranan yang sangat penting, maka jumlah dan kualitas personil SPI diupayakan memadai sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugasnya. Pada periode 2014, jumlah pegawai Audit Internal adalah 17 (tujuh belas) orang, dengan rincian, sebagai berikut:

1. Kepala SPI : 1 orang
2. Kepala Bagian : 4 orang
3. Staf : 11 orang
4. Agendaris : 1 orang

Pihak Yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern

Pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Total Employees of Internal Audit

Considering the important role of supervisory function of the Internal Audit, the number and quality of Internal Audit personnel will be improved to support the duty implementation. In 2014, total employees of Internal Audit are 17 (seventeen) people, with detail as follows:

1. Head of SPI : 1 person
2. Head of Division : 4 people
3. Staff : 11 people
4. Mail Clerk : 1 person

Parties Appointing/Dismissing Internal Audit Head

Parties that are involved in the process of appointment and dismissal of the Head of Internal Audit (SPI) is the Board of Directors with the approval of Board of Supervisors.

Partisipasi Dalam Perhimpunan Profesi Auditor Internal

Satuan Pengawasan Intern (SPI) Perum Jamkrindo aktif sebagai anggota dan menjabat sebagai bendahara pada Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern (FKSPI) Asuransi Negara dan Jasa Keuangan (Asgara Jaskeu Plus). Keikutsertaan SPI dalam forum tersebut berguna untuk *sharing* pengetahuan dan informasi mengenai kegiatan pemeriksaan intern sesama BUMN.

Participation in Professional Association of Internal auditors

Internal Audit of Perum Jamkrindo is active as member and serves as treasurer in Communication Forum of Internal Audit (FKSPI) of State Insurance and Financial Service. The participation of the Internal Audit in the forum is useful for knowledge and information sharing on internal monitoring for SOEs.

Pengembangan Sumber Daya Auditor

Dalam rangka memastikan kesinambungan pengembangan SDM, baik sisi kompetensi maupun *soft-skill*, Auditor terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dengan mengikuti seminar, *workshop*, studi banding, pelatihan dan pendidikan bersertifikasi Auditor Internal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang kompeten, baik untuk pendidikan kompetensi audit maupun *Good Corporate Governance* (GCG).

Development of Auditor Resources

To ensure the sustainability of HR development in competency and soft skills, Auditors continue improving knowledge and skills by attending seminars, workshops, study visit, training and educations for the certification of Internal Audit held by competent educational institution. This covers education in audit competency and good corporate governance.

Tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI) terkait dengan Pemeriksaan Internal Perusahaan

Dalam menjalankan Pemeriksaan Internal pada Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern (SPI) bertugas untuk:

1. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan serta memberikan saran perbaikannya.
2. Memberikan laporan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI) kepada Direktur Utama.
3. Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Satuan Pengawasan Intern (SPI) bertanggung jawab untuk:

1. Menyelenggarakan program kerja pengawasan atas pelaksanaan semua kebijakan dan keputusan Direksi serta program kerja Perusahaan.
2. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada bidang pengawasan intern Perusahaan yang berkaitan dengan pemeriksaan kegiatan Operasional dan Administrasi & Keuangan.

Duties of Internal Audit (SPI) related to the Company's Internal Examination

In implementing Internal Examination on the Company, Internal Audit is in charge to:

1. Assist President Director to monitor the Company's operation and finance, assess the control, management, and its implementation in the Company, and provide improvement suggestions.
2. Provide a report regarding the audit finding or report of the performance of duties of the Internal Audit Unit to the President Director.
3. Monitor the follow up actions of the findings that have been reported.

To carry out those main tasks, the Internal Audit Unit is responsible for:

1. Undertaking supervisory work program for the implementation of all policies and decisions of the Board of Directors and the Company's work program.
2. Coordinating and controlling the implementation of activities in the Internal Audit area that relates to audit activities of Operations and Administration & Finance.

3. Melakukan penelitian dan pengujian atas kebenaran laporan atau informasi mengenai segala hal yang dapat menyebabkan kerugian Perusahaan.
4. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama mengenai hasil pemeriksaan, berikut saran perbaikannya.
5. Menilai ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, dengan melakukan penilaian dan pemantauan atas semua sistem, prosedur, ketentuan dan operasional Perusahaan untuk mendorong efektifitas dan ketaatan dalam pelaksanaannya serta memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai pengendalian/pengelolaan risiko usaha.
6. Menilai Sistem Pengendalian Intern Perusahaan.
7. Menilai kewajaran Laporan Keuangan dan menilai efisiensi dan efektifitas kegiatan operasional atau non operasional perusahaan.
8. Memberikan pendapat, usulan dan saran perbaikan atas kegiatan operasional atau non operasional.
9. Memotivasi pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh setiap unit kerja dan wajib melakukan penilaian dan pemantauan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut oleh semua organ Perusahaan.
10. Melakukan pemantauan pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan atas hasil pemeriksaan SPI maupun Auditor Eksternal dan melaporkan hasil pantauan tersebut kepada Direktur Utama.
11. Menjadi mitra kerja Auditor Eksternal dalam pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan Perusahaan ataupun pemeriksaan lainnya.

Pelaksanaan Fungsi Satuan Pengawasan Intern

Selama 2014, SPI Perum Jamkrindo telah melaksanakan aktivitas pemeriksaan atas seluruh cakupan-cakupan pemeriksaan yang diperkirakan signifikan dan berpotensi mengganggu pencapaian tujuan Perusahaan. Peran SPI Perum Jamkrindo sebagai katalisator tumbuhnya kesadaran manajemen akan pentingnya Manajemen Risiko telah mampu diimplementasikan secara baik terkait dengan peran SPI sebagai *Strategic Business Partner* bagi manajemen ini Perum Jamkrindo.

3. Conducting research and testament of the correctness of the report or information concerning al matters that is potential to cause the loss of the Company.
4. Preparing and submitting a report to the President Director regarding the results of the findings and the suggestion for improvement.
5. Assessing compliance to the existing provisions, by assessing and monitoring all systems, procedures, rules and operations of the Company to promote the effectiveness and compliance in the implementation, as well as making recommendations to the Board of Directors of the control/management of business risk.
6. Assessing the Company's Internal Control System.
7. Assessing the fairness of financial statements and the efficiency and effectiveness of the Company's operations/non-operation
8. Providing opinions, recommendation and suggestions regarding the improvement of operational/non operational activities.
9. Motivating the implementation of the principles of good corporate governance by each working unit and is compulsory to conduct assessments and monitoring of the implementation of these principles by all instruments of the Company.
10. Monitoring the follow-up of the findings of Internal and External Auditor and report the results to the President Director.
11. Becoming partners of external Auditor in the implementation of the audit of financial statements or other audit.

Duty Implementation of Internal Audit

Throughout 2012, Internal Audit Unit of Perum Jamkrindo has conducted audit for all ranges of audit that significantly and potentially hampers the Company to achieve its objective. Role of Internal Audit Unit of Perum Jamkrindo as a catalyst to raise the awareness of the management concerning the importance of Risk Management has been implemented properly, with regard to the role of Strategic Business Partner for Perum Jamkrindo's management.

SPI telah melaksanakan tugas analisa dan evaluasi terhadap sistem yang berjalan maupun yang baru akan diimplementasikan mengenai pengendalian, pengelolaan, pemantauan efektivitas serta efisiensi sistem dan prosedur (*system operating procedure*) serta operasi Perusahaan pada semua bagian dan bidang kegiatan perusahaan serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas proses Manajemen Risiko serta praktek GCG atas seluruh aspek dan unsur kegiatan Perusahaan, dan melaporkan seluruh temuan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Internal Audit Unit has analyzed and evaluated the existing and new system that will be implemented for controlling activity, management, monitoring of effectiveness and efficiency of system operating procedure and operations of the Company in all divisions and units, as well as assessment of working units' performance quality, evaluates the adequacy and effectiveness of Risk Management process and GCG practices of all aspects and elements of the Company's activities and reports all audit findings in accordance with the applicable regulation.

Secara periodik, Audit Intern telah melaksanakan proses monitoring dan pelaporan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan *auditee*. Dalam rangka meningkatkan kualitas pemeriksaannya, SPI terus berupaya melakukan proses peningkatan kompetensi auditor melalui pendidikan Profesionalisme Audit Internal, training, seminar dan lainnya, yang diharapkan dapat memberikan pembekalan secara proporsional kepada auditor dalam menjalankan tugas pemeriksaannya.

Periodically, Internal Audit has conducted monitoring process and reporting of follow-up of improvement strategies carried out by the auditee. To improve the audit quality, Internal Audit continues to improve the auditors' competency through professionalism education of Internal Audit, training, seminars, and others, that are expected to give intensive training proportionally to the auditor for discharging audit duties.

Hasil Temuan Audit Internal

Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Audit Internal sepanjang 2014 adalah sebagai berikut:

Result of Internal Audit Findings

Total Internal Audit Findings throughout 2014 are as follows:

Unit Kerja / Working Unit	**Jumlah Rekomendasi Temuan 2013 /** 2013 Total Findings Recommendation	**Penyelesaian Tindak Lanjut 2013 /** 2013 Follow-Up Settlement		**Jumlah Rekomendasi Temuan 2014 /** 2014 Total Findings Recommendation	**Penyelesaian Tindak Lanjut 2014 /** 2014 Follow-Up Settlement	
Divisi / Division	80	46	57,50%	43	7	16,28%
Kantor Cabang / Branch Office	181	170	93,92%	182	122	67,03%
JUMLAH / TOTAL	**261**	**216**	**82,76%**	**220**	**129**	**58,67%**

Evaluasi atas Efektivitas Satuan Pengawasan Intern

Satuan Pengawasan Intern (SPI) membantu manajemen untuk mendorong ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku dan meningkatkan kinerja perusahaan agar mencapai sasaran yang ditetapkan.

Evaluation of the Effectiveness of Internal Control Systems

Internal Audit Unit (SPI) helps management to promote compliance with the applicable regulations and improve the performance of the company in order to achieve the established objectives.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal memastikan agar Perusahaan tetap patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan, memastikan kesesuaian unit kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya terhadap tujuan, sasaran, rencana, kebijakan, instruksi dan/atau ketentuan lain yang berlaku dalam organisasi, ketaatan atau kesesuaian perusahaan terhadap aturan dan ketentuan bidang pengelolaan perusahaan dan komitmen perusahaan kepada segenap *Stakeholder.*

Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh Insan Perum Jamkrindo untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset perusahaan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Perum Jamkrindo mengacu pada *Internal Audit Charter* dan Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang menjelaskan sebagai berikut:

1. Lingkup Manajemen Risiko
   a. Memastikan bahwa risiko-risiko yang dikelola oleh manajemen risiko sudah diidentifikasi, dianalisa, dievaluasi, dimonitor dan dikomunikasikan.
   b. Melaksanakan konsultasi, pemantauan dan evaluasi atas penerapan pengelolaan risiko Perusahaan.
   c. Menyusun dan menerapkan pemeriksaan berdasarkan risiko (risk based audit) yaitu audit berbasis risiko.

2. Lingkup Pengendalian Intern
   a. Lingkungan pengendalian intern dalam Perusahaan yang disiplin dan terstruktur yang terdiri dari beberapa hal berikut:
      - Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan
      - Filosofi dan gaya manajemen
      - Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Internal Control System ensures that the Company remains obedient to the applicable regulations, ensures the compliance of working units within the framework of its duties to objectives, targets, plans, policies, instructions and/or other regulations that are applicable within the organization, as well as to obey and comply to the rules and provisions of company management and commitment to the entire Stakeholder.

Internal Control System is a process which is integrated to actions and activities that are carried out continuously by the leader and the entire Personnel of Perum Jamkrindo to provide adequate confidence over the achievement of organization objectives through effective and efficient activities, reliability of financial reporting, assets security and compliance to the legislation in force.

Implementation of internal control that is carried out by Perum Jamkrindo refers to the Internal Audit Charter and Guidelines of Good Corporate Governance implementation which describes the following:

1. Scope of Risk Management
   a. Ensuring that risks have been identified, analyzed, evaluated, monitored, and reported.
   b. Consulting, monitoring, and evaluation of the implementation of risk management.
   c. Preparing and implementing risk-based audit.

2. Scope of Internal Control
   a. Discipline and structured areas of internal control includes:
      - Integrity, ethical values, and employees' competency
      - Philosophy and management style
      - Management's strategy to exercise their authority and responsibility

- Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia, dan
- Perhatian dan arahan yang diberikan oleh Direksi.

b. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisa, menilai dan mengelola risiko usaha relevan.

c. Aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otoritasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset Perusahaan.

d. Sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku pada Perusahaan.

e. Monitoring yang merupakan proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal pada setiap tingkat dan unit struktur Perusahaan sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

3. Lingkup Tata Kelola Perusahaan yang Baik

a. Memastikan bahwa manajemen telah menetapkan nilai dan sasaran Perusahaan dan mengkomunikasikannya dengan para pemangku kepentingan.

b. Memastikan bahwa semua proses bisnis dalam Perusahaan memenuhi aspek akuntabilitas.

c. Mengawasi dan mengevaluasi penerapan GCG pada kegiatan operasional Perusahaan.

***Review* atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern**

Penerapan pengendalian internal merupakan sebuah proses yang dipengaruhi oleh Direksi, Manajemen dan pihak lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna menjamin efektivitas dan efisiensi kegiatan operasi, keandalan laporan keuangan dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

- Management and development of human resources, and
- Attention and direction given by Board of Directors.

b. Review and manage business risks to identify, analyze, evaluate, and manage relevant business risks.

c. Control activities. This refers to controlling action for the Company's activity in each level and units such as those related to authority, verification, reconciliation, assessment of work achievement, segregation of duties, and asset protection.

d. Information and communication system. This refers to a process of reporting the operational and financial activity, including compliance with applicable laws.

e. Monitoring. This refers to an assessment of internal control quality within each level and units of the Company's structure. The assessment is expected to generate an optimum result for all the Company's activities.

3. Areas of good corporate governance

a. Ensuring that the management has determined values and target of the Company and communicating them to the stakeholders.

b. Ensuring that all business process upholds accountability.

c. Supervising and evaluating the implementation of GCG in the Company's operational activity.

Review on the Effectiveness of Internal Control System

Implementation of internal control is a process that is influenced by the Board of Directors, Management and other parties which is designed to provide adequate confidence in order to ensures the effectiveness and efficiency of operation activities, reliability or financial reporting and compliance to the legislation in force.

Pengendalian internal yang dilakukan oleh Dewan Pengawas adalah dengan melakukan pengawasan dan penasehatan terkait proses kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan, pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang dibantu oleh Komite Audit dan Komite Investasi dan Risiko Usaha. Sedangkan Direksi menerapkan sistem pengendalian internal melalui penerapan kebijakan dan prosedur perusahaan secara konsisten dan memenuhi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, antara lain terkait dengan kegiatan usaha perusahaan dan manajemen risiko, rencana strategis, pembagian tugas, pendelegasian wewenang serta kebijakan akuntansi yang memadai.

Direksi menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan. Lingkungan pengendalian intern dalam perusahaan dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, integritas yang tinggi, nilai etika serta kompetensi karyawan.

AUDIT EKSTERNAL

Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)
Jl. Gatot Subroto Kav. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp : 021-2554 9000

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Menara Radius Prawiro Lt. 2
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta Pusat
Telp : 021-500 655
Fax : 021-386 6032

Kantor Akuntan Publik
Husni, Mucharam & Rasidi
Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH, No. 178A
Jakarta Selatan 12870
Telp : 021-8351868/8313413
Fax : 021-8351978

Internal control that is carried out by the Board of Supervisors is done through the supervision and provision of advice related to process of adequacy and fairness within the preparation of financial statement and risk management by taking account to the principle of prudent, assisted by Audit Committee and Investment & Business Risk Committee. While the Board of Directors implements the internal control system through the implementation of Company's policies and procedures consistently and in compliance to the applicable regulation, among others related to the company business activity, risk management, strategic plan, division of tasks, delegation of authority as well as adequate accounting policies.

Board of Directors determined an effective internal control system to secure the Company's assets and investment. Scope of internal control within the Company is implemented in a discipline and structured way, with high integrity, ethical values as well as employee competency.

EXTERNAL AUDIT

Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)
Jalan Gatot Subroto Kav. 31
Central Jakarta 10210
Telp. : +6221 25549000

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Menara Radius Prawiro Lt. 2
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. MH Thamrin No. 2 Central Jakarta
Telp. : +6221 500655
Fax : +6221 3866032

Public Accounting Firm
Husni, Mucharam & Rasidi
The Royal palace Blok C-18
Jl. Prof. DR. Soepomo. SH, No. 178 A Jakarta 12870
Telp. : +6221 8351868/8313413
Fax : +6221 8351978

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali
Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat
Telp : 021-310 3768
Fax : 021-310 3230

Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja
Jl. Anggrek III No. 28, Larangan Indah, Ciledug, Kebayoran Lama - Jakarta Selatan
Telp : 021-587 4378
Fax : 021-584 8635

Peran dan Fungsi Audit Eksternal

Pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan atas Perundang-undangan, Kebijakan Perusahaan, dan ketentuan terkait atas bisnis yang dilakukan Perum Jamkrindo tidak hanya dilakukan oleh Auditor Internal dalam hal ini adalah Satuan Pengawasan Intern melainkan dilakukan juga oleh Auditor Eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Pelaksanaan Fungsi Audit Eksternal

Pada 2014, berdasarkan ketetapan Kementerian BUMN atas usulan Dewan Pengawas telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah mendapatkan izin dan terdaftar di Kementerian Keuangan yakni KAP Husni, Mucharam dan Rasidi untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perum Jamkrindo. Penunjukan KAP berpedoman pada regulasi yang berlaku dan dipilih melalui tahapan sesuai ketentuan atau kriteria sebagai berikut:

1. KAP yang ditunjuk harus memiliki legalitas yang jelas.
2. Berpengalaman dalam memeriksa Perusahaan Bidang Jasa Keuangan.
3. Memahami dan menguasai regulasi terkait bisnis Perusahaan dan peraturan lainnya yang relevan.
4. Memahami produk-produk Perusahaan.
5. Berpengalaman dan paham mengenai Manajemen Risiko.

Dodi, Bambang, Sulistyano, Dadang & Ali
Jl. Imam Bonjol No. 61, Central Jakarta
Telp : 021-310 3768
Fax : 021-310 3230

Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja
Jl. Anggrek III No. 28, Larangan Indah, Ciledug, Kebayoran Lama - South Jakarta
Telp : 021-587 4378
Fax : 021-584 8635

Role and Function of Internal Audit

The supervision to the implementation of compliance with Legislations, Company Policies, and Provisions is not conducted only by Internal Auditor, in this regard, the Internal Audit is also performed by External Auditor, namely State Audit Board (BPK), the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP), Financial Services Authority (OJK) and Public Accounting Firm (KAP).

Implementation of External Audit Function

In 2014, based on the decision of Ministry of SOEs over the recommendation of the Board of Supervisors, the Company has appointed Public Accounting Firm who has obtained a license and registered in the Ministry of Finance, namely KAP Husni, Mucharam and Rasidi. The appointment of KAP was based on the applicable regulations and selected through a procedure of audit in accordance with the following criteria:

1. The appointed KAP must have clear legality.
2. Experienced in auditing Company engaged in Financial Service.
3. Understanding and controlling regulation related to the Company's business, and other relevant laws.
4. Understanding the Company's products.
5. Experienced and understanding of Risk Management.

Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik yang telah melakukan audit laporan keuangan tahunan Perusahaan pada 2014 adalah Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi. Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi telah menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada Perum Jamkrindo. Kantor Akuntan Publik Husni Mucharam & Rasidi juga telah bekerja secara independen dan memenuhi kriteria yang telah diperjanjikan sebelumnya. Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi telah melakukan Audit laporan keuangan Tahunan Perusahaan Perum Jamkrindo sebanyak 6 (enam) periode yaitu Periode Tahun Buku 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 serta 2014.

Jasa lain yang diberikan akuntan adalah jasa konsultan penyusunan Manual Akuntansi Perum Jamkrindo dengan adanya pendirian anak perusahaan syariah oleh KAP Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja dan jasa *assessor* independen untuk penilaian (*assessment*) penerapan GCG Tahun 2014 oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali.

Hasil Temuan Audit Eksternal

Jumlah temuan hasil pemeriksaan Audit Ekternal pada 2014, adalah sebagai berikut:

Public Accounting Firm

Public Accounting Firm that has conducted audit of the annual financial statement of the Company in 2014 was Public Accounting Firm of Husni, Mucharam & Rasidi. Public Accounting Firm of Husni, Mucharam & Rasidi has submitted the result of the audit and letter management to Perum Jamkrindo. Public Accounting Firm of Husni, Mucharam & Rasidi also has worked independently and met the criteria agreed at the beginning. Public Accounting Firm of Husni, Mucharam & Rasidi has audited Perum jamkrindo's annual Financial Statement for 5 (five) periods namely Period of Fiscal Year 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 and 2014.

Other services that are given by the accountant are consultation service regarding the preparation of Perum Jamkrindo Manual Accounting with the establishment of sharia subsidiary by KAP Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja and independent assessor service for the assessment of 2014 GCG implementation by KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali.

Findings of External Audit

Total findings of External Audit conducted in 2014 are as follows:

Posisi / Position	**Jumlah Temuan /** Total Findings					
	BPK		**OJK**		**KAP**	
	2013	**2014**	**2013**	**2014**	**2013**	**2014**
Total Temuan / Total Finding	-	7	-	-	7	10
Total Rekomendasi / Total Recommendation	-	28	-	6	19	-
Rekomendasi Yang Telah Diselesaikan / Completed Recommendation	-	18	-	2	6	-
Dalam Proses Penyelesaian / In settlement process	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti dengan proses hukum / Followed Up by Legal Proceeding	-	-	-	-	-	-

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI

Perkara/Gugatan yang Dihadapi

Selama 2014, Perum Jamkrindo tidak memiliki Perkara/gugatan yang signifikan yang dihadapi oleh perusahaan.

Permasalahan Hukum

Selama 2014, Perum Jamkrindo tidak memiliki Permasalahan Hukum yang signifikan yang dihadapi oleh perusahaan.

LEGAL CASE

Case/Lawsuit Faced

During 2014, Perum Jamkrindo did not have case/lawsuit significantly affected the Company.

Legal Case

In 2014, Perum Jamkrindo did not have legal case that significantly affected the Company.

SANKSI ADMINISTRASI

Setiap karyawan wajib:

a. Mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah bagi Pegawai BUMN;
b. Mentaati semua peraturan perusahaan, baik berupa perintah maupun larangan secara tertulis atau secara lisan dalam batas pengertian yang layak dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan
c. Menunaikan tugas dan kewaiiban dengan sebaik-baiknya sesuai dengan penugasan oleh Direksi dan atasan masing-masing pegawai dengan mementingkan kepentingan Perusahaan.

Pemberian sanksi administrasi bagi karyawan Perum Jamkrindo mengacu pada Peraturan Direksi Nomor : 19/Per-Dir/III/2006 tanggal tentang Disiplin Pegawai. Sanksi administrasi diberikan bagi karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin.

ADMINISTRATIVE SANCTION

Each employee is obliged to:

a. Complying with all provisions and regulations stated by the Government for SOE employees;
b. Complying with all regulations of the company, in the form of oral and written order and prohibition, in a meaning that is proper and not in contravention with the decency norms.
c. Performing duties and responsibilities well according to the assignment of the Board of Directors and supervisors of each employee and prioritizing the interest of the Company.

Provision of administrative sanction for employees of Perum Jamkrindo refers to Regulation of Board of Directors Number: 19/Per-Dir/III/2006 concerning employee Discipline. Administrative sanction is given to employees who are not disciplinary.

Karyawan yang mendapatkan sanksi administrasi / **Employee receiving administrative sanction**

No.	**Jenis Hukuman /** Type of Punishment	**Jumlah Karyawan** Total Employees
1	Surat Peringatan Pertama / First Warning Letter	2
2	Surat Peringatan Kedua / Second Warning Letter	2
3	Surat Peringatan Ketiga / Third Warning Letter	-
4	Pemberhentian Sementara (schorsing) selama 1 (satu) bulan / Temporary Termination for a month	-
5	Diberhentikan sebagai Karyawan / Terminated as Employee	2
	Total	6

PRAKTIK *BAD GOVERNANCE*

Perusahaan menyadari bahwa kegiatan bisnis yang dijalankan tidak terlepas dari interaksi secara langsung atau pun tidak langsung dengan masyarakat sekitar area proyek serta lingkungan. Oleh karena itu, praktik *bad corporate governance* senantiasa mengancam dalam kegiatan operasional Perusahaan. Meski demikian, selama 2014, Perusahaan tidak memperoleh adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Perusahaan terhadap pembangunan masyarakat dan pelestarian lingkungan melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan tidak hanya semata-mata berorientasi pada keuntungan semata, namun lebih dari itu yakni memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Praktik *bad corporate governance* lainnya juga tidak terlihat pada ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan *audited* dengan Standar Akuntansi Indonesia. Pada 2013, Perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan serta penyesuaian penyajian laporan keuangan *audited* dengan Standar Akuntasi Indonesia.

BAD GOVERNANCE PRACTICE

The Company realizes that the implemented business activities are inseparable from direct or indirect interaction with nearby community and surrounding. Therefore, bad corporate governance practices can always threatens the Company's operations. However, there were no reports on the Company's activities being the causes of environmental pollution in 2014. This reflects the Company's commitment to community development and environmental preservation through corporate social responsibility. The Company is not only oriented to seek for profit, but more importantly, give enormous benefit to society and environment. Other bad corporate governance practices are evidenced in the non-compliance with taxation regulation and the non-conformity of audited financial report presentation with Indonesia Accounting Standard. In 2013, the Company has met taxation obligation and confirmed by the Indonesia Accounting Standard for presenting its audited financial statements.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Akses Terhadap Informasi Perusahaan

Dalam menyampaikan dan penyebaran informasi serta berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan Perum Jamkrindo menggunakan berbagai media yang ada, yaitu media Internet, cetak dan kegiatan atau *event*.

ACCESS TO INFORMATION AND DATA OF THE COMPANY

Access to the Company's Information

In disclosing and disseminating information and communicating with parties related to Perum Jamkrindo, various means can be used, such as Internet, printed media or event.

Dalam prosesnya, akses terhadap informasi Perusahaan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

In its process, access to Company information is divided to 2 (two) communications, namely:

No	Akses Informasi	Jenis	
1	Komunikasi Internal / Internal Communication	a	Surat Edaran / Circular Letter
	Komunikasi Internal dilakukan untuk mengonsolidasikan seluruh organ dan pekerja di dalam lingkungan Perum Jamkrindo agar memiliki visi yang sama dan fokus pada tujuan Perusahaan, dengan memergunakan media / Internal Communication is carried out to consolidate the entire organ and workers within the environment of Perum Jamkrindo to possess mutual vision and focus on Company objectives by using the media		Perum Jamkrindo menggunakan Surat Edaran untuk mengkomunikasikan kebijakan dan peraturan terbaru di dalam internal perusahaan. Informasi yang disebarkan umumnya berisi tentang sosialisasi kebijakan Direksi / Perum Jamkrindo uses Circular Letter to communicate the latest policies and regulations within the Company's internal. In general, information spread generally contains socialization regarding the Board of Directors' policies
		b	ICPR (*Integrated Corporate Performance Reporting*)
			Perum Jamkrindo juga menggunakan sarana teknologi informasi yang berbasis web yaitu ICPR yang telah diterapkan di lingkungan Perum Jamkrindo / Perum Jamkrindo also uses web-based information technology called ICPR which has been implemented within the environment of Perum Jamkrindo
		c	E-mail
			Perum Jamkrindo juga telah memiliki *e-mail system* sendiri untuk mengelola komunikasi internal perusahaan antar unit kerja / Perum Jamkrindo also uses its own e-mail system to manage the Company's internal communication between working units
		d	Evaluasi dan *Action Plan* Triwulan / Quarterly Evaluation and Action Plan
			Untuk sarana komunikasi antara Direksi dengan Kepala Divisi dan Pimpinan Kantor Cabang atau Kantor Anak Cabang dalam menyampaikan target dan rencana bisnis Perusahaan, Perum Jamkrindo secara rutin tiga bulan atau triwulanan menyelenggarakan rapat evaluasi dan *action plan*. Dalam rapat evaluasi dan *action plan* ini, Direksi Perum Jamkrindo melakukan evaluasi terhadap kinerja triwulanan berjalan dan membahas serta mengkomunikasikan rencana bisnis Perum Jamkrindo untuk triwulan-an kedepan kepada para Kepala Divisi, Kepala Kantor Cabang dan Kepala Kantor Anak Cabang untuk meneruskan target dan rencana bisnis tahunan yang telah ditetapkan dalam RKAP tahun berjalan. Means of communications between the Board of Directors, Head of Division and Head of Branch Office/Subsidiaries in submitting the Company's business plan and target, Perum Jamkrindo regularly held evaluation and action plan meeting quarterly. Within this evaluation and action plan meeting, Board of Directors of Perum Jamkrindo carried out the evaluation on quarterly basis to run operations and discuss as well as communicate the business plan of Perum Jamkrindo for the next quarter to the Head of Division, Head of Branch Office and Head of Subsidiaries to forward the annual business plan and target which has been set in RKAP of the current year.

No	Akses Informasi	Jenis	
2	Komunikasi Eksternal / External Communication	a	Alamat Perusahaan / Company Address
	Komunikasi eksternal dilakukan bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan citra perusahaan dimata mitra kerja, masyarakat, stakeholder serta lainnya. Adapun jenis informasi dan media yang digunakan Perum Jamkrindo dalam melakukan komunikasi ekstemal Perusahaan / External communication is intended to maintain and improve the Company's image in the eye of partners, society, stakeholder and others. Type of information and media that are used by Perum Jamkrindo in carrying out its Company external communication.		Gedung Jamkrindo Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat Telepon : +62 21 6540335 Faksimili : +62 21 6540344/48 Gedung Jamkrindo Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru Bandar Kemayoran, Central Jakarta Phone : +62 21 6540335 Facsimile : +62 21 6540344/48
		b	*Website*
			Untuk memudahkan mitra kerja, masyarakat yang berkepentingan lainnya atau *stakeholders* dalam mendapatkan informasi Perum Jamkrindo menyediakan akses dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi yang handal melalui website www. jamkrindo.com / To ease partners, society, and stakeholders in obtaining information, Perum Jamkrindo provides access by utilizing the support of excellent information technology through website www.jamkrindo.com
		c	*Press Release*
			Perum Jamkrindo juga pada saat diperlukan melakukan publikasi dari setiap kegiatan perusahaan yang dilakukan melalui *press release* / Perum Jamkrindo also, if necesssary, published every Company activities that are carried out through press release.
		d	*Public Expose*
			Sekali dalam setahun perusahaan wajib menyelenggarakan *public expose* atau paparan publik mengenai kinerja perusahaan / Once in a year the Company must conduct public expose or public exposure regarding the Company's performance.
		e	Iklan / Advertisement
			Iklan digunakan sebagai alat untuk mengelola citra dan meningkatkan *awareness* terhadap Perum Jamkrindo beserta produk-produknya, dengan menggunakan media untuk menyebarluaskan iklan di masyarakat, antara lain adalah surat kabar, majalah, dan media lainnya, dengan terlebih dahulu menganalisis media dan target *audiences* agar iklan dapat berfungsi dengan efektif / Advertisement is used as a tool to manage the image and increase awareness on Perum Jamkrindo and its products, by using the media to spread advertisement to public, among others, daily newspaper, magazine, and other media, by first analizing the media and target audience so that the advertisement may function effectively.
		f	Pameran / Exhibition

No	Akses Informasi	Jenis	
			Perum Jamkrindo juga selalu ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan pameran untuk mengelola citra dan meningkatkan *awareness* terhadap Perum Jamkrindo beserta produk-produknya, dengan terlebih dahulu menganalisis media dan target *audiences* agar iklan dapat berfungsi dengan efektif / Perum Jamkrindo always participates in every exhibition activity to manage the image and increase the awareness on Perum Jamkrindo and its products, by first analyzing the media and target audiences so that the advertisement may function effectively.

KODE ETIK PERUSAHAAN

Kode Etik Perusahaan

Perusahaan memiliki komitmen untuk berusaha meningkatkan kinerja Perusahaan dengan berbasiskan budaya Perusahaan melalui Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan berpedoman pada prinsip-prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas dan independen, sehingga dapat mendukung kebijakan Pemerintah di bidang pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Hal ini tertuang dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. 93/Kep-Dir/XII/2012-KEP-07/DP-JAMKRINDO/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).

Standar perilaku Perusahaan adalah transparansi dan pengungkapan informasi kemandirian, pertanggungjawaban dan kewajaran. Penerapan standar etika usaha tersebut merupakan cara Perusahaan berbisnis dalam rangka mewujudkan komitmen untuk:

1. Menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama.
2. Menerapkan Standar Etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
3. Senantiasa secara proporsional dalam rangka pemberian jasa yang bermutu tinggi kepada bisnis Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).
4. Memperlakukan semua stakeholder sebagai mitra.
5. Perusahaan harus melayani dan berupaya mengantisipasi kebutuhan *stakeholder* dengan baik.

CODE OF ETHICS

Code of Ethics of the Company

The Company has commitment to improve the Company's performance by implementing corporate culture through good corporate governance that upholds the principles of transparency, fairness, accountability, and independency, to support the Government's policy in the development of Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperative (UMKMK). This is stated in the Joint Decree of Board of Directors and Board of Supervisors of Perum Jamkrindo No. 93/Kep-Dir/XII/2012-KEP-07/DP-JAMKRINDO/XII/2012 dated December 13, 2012 regarding the Code of Conduct.

Standards of the Company's conduct are transparency and disclosure of information concerning independency, accountability, and fairness. The implementation of the ethical standards is the Company's business strategy and its commitment to:

1. Place customer satisfaction as the main priority.
2. Implement Ethical Standards in all operations based on Good Corporate Governance.
3. Continuously and Proportionally within the framework of high quality service provision to the Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK).
4. Treat all stakeholders as partners.
5. The Company has to service and anticipate the needs for the stakeholders.

Kode etik Perusahaan atau etika perusahaan dalam *Code of Conduct* berlaku bagi seluruh level organisasi serta diatur dalam beretika dengan *stakeholder*, karyawan, mitra kerja (pelanggan), penyedia barang dan jasa (*supplier*), pesaing, pemerintah, masyarakat dan media massa.

The Company's code of conduct is applied for all levels of organization and for building relationship to the stakeholders, employees, customers, suppliers, competitors, government, public, and mass media.

Etika Perusahaan dengan *Stakeholder*

1. Perusahaan harus memperlakukan stakeholder secara baik dan adil dengan memenuhi hak-hak *stakeholder.*
2. Perusahaan wajib meningkatkan kinerja dan memelihara citra positif dalam rangka meningkatkan nilai bagi *stakeholder.*
3. Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan informasi dan data.
4. Perusahaan harus mematikan pemberian informasi yang tidak menyesatkan kepada *stakeholder.*
5. Perusahaan harus melayani dan berupaya mengantisipasi kebutuhan *stakeholder* dengan baik.

The Company's ethics to the Stakeholders

1. The Company should treat the stakeholders well and with fairness by fulfilling their rights.
2. The Company is obliged to improve and maintain the positive image of the Company to improve value for the stakeholders.
3. The Company needs to protect the confidentiality of information and data
4. The Company should ensure the provision of non-misleading information to the stakeholders.
5. The Company should service and anticipate the needs of all stakeholders.

Etika Perusahaan dengan Karyawan

1. Perusahaan harus mengutamakan kesehatan, keselamatan kerja, peningkatan kualitas dan kesejahteraan Karyawan dengan pemenuhan hak-hak Karyawan secara proporsional sehingga diharapkan Karyawan dapat menunjukkan kinerja secara maksimal.
2. Perusahaan memberikan kesempatan kerja yang sama kepada semua Kayawan tanpa memperhatikan latar belakang, etnis, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
3. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam pengembangan diri Karyawan.
4. Perusahaan memberikan penghargaan berdasarkan kompetensi dan kinerja Karyawan.
5. Perusahaan menciptakan lingkungan kerja, komunikasi dan hubungan kerja dengan atasan, bawahan dan rekan kerja yang kondusif dan produktif.
6. Perusahaan harus menghargai martabat manusia tanpa memperhatikan perbedaan latar belakang etnis, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

The Company's Ethics to Employees

1. The Company has to prioritize the health, occupational safety, and welfare of the employees by fulfilling employee rights proportionally so that the employee can be motivated to perform their best.
2. The Company gives equal opportunity to all employees without differentiating their background, ethnic, religion, sex, ages, physical defect, or other certain condition protected by laws.
3. The Company provides equal opportunities to develop the employees.
4. The Company gives awards based on competency and their achievements.
5. The Company creates a conducive and productive work environment, communication, and relation between the supervisor and the sub-ordinates, and partners.
6. The Company has to appreciate human rights without differentiating their ethnic, religion, sex, age, physical defect or any other certain condition protected by laws.

7. Perusahaan harus menjunjung tinggi prinsip umum kemanusiaan, hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Perusahaan mengijinkan Karyawan melakukan kegiatan rangkap di luar Perusahaan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, keanggotaan profesi, asosiasi atau kelompok sejenisnya.

Etika Perusahaan dengan Mitra Keja (Pelanggan)

1. Perusahaan berupaya menjalankan praktik usaha yang saling menguntungkan dengan mitra kerja berdasarkan perjanjian kerja sama yang berimbang.
2. Perusahaan membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan hasil kerjasama.
3. Perusahaan harus menjaga hubungan yang kondusif dengan mitra kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Perusahaan harus menghindari penyalahgunaan hubungan kemitraan.

Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang dan Jasa (*Supplier*)

1. Perusahaan memperlakukan penyedia barang atau jasa (*supplier*) termasuk proses pengadaan sesuai prinsip bisnis yang sehat, terbuka, tidak memihak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Perusahaan harus melakukan proses pengadaan secara transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan yang berlaku dengan mengacu prinsip efektivitas, efisiensi dan ekonomis.
3. Perusahaan menggunakan penyedia barang dan jasa dilakukan berdasarkan dokumen secara tertulis.
4. Perusahaan harus menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
5. Perusahaan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

7. The Company has to uphold human rights and responsibilities based on the prevailing regulation.
8. The Company allows the employees to have affiliation outside the Company, such as for social interest, professional membership, association, or other groups.

The Company's Ethics to Customers

1. The Company endeavors to implement business practice that has mutual benefit with partners based on balanced contract agreement.
2. The Company builds intensive communication with business partners to seek the best solution for the improvement of partnership.
3. The Company has to maintain a conducive relation with business partners in accordance with the applicable laws.
4. The Company has to avoid any misuse within the partnership.

The Company's Ethics with Suppliers

1. The Company develops business with the suppliers, including in the process of procurement, in accordance with healthy, transparent, and non-block principle and the applicable laws.
2. The Company has to carry out the procurement process with transparency and accountability based on the applicable regulation by referring to the effective, efficient, and economical practices.
3. The Company cooperates with the suppliers based on a written consent.
4. The Company has to protect the confidentiality of information and documents of goods and service procurement based on the applicable regulation.
5. The Company does not commit to corruption, collution and nepotism in performing procurement of goods and services.

Etika Perusahaan dengan Pesaing

1. Perusahaan harus melaksanakan persaingan usaha yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan kualitas layanan.
2. Perusahaan harus menghindari perilaku yang menyesatkan dan atau tindakan yang tidak jujur.
3. Perusahaan menentang kesepakatan atau kesepahaman yang bersifat anti kompetisi.
4. Perusahaan tidak melakukan kerja sama tanpa alasan yang dapat diterima dan wajar.

The Company's Ethics to the Competitors

1. The Company has to engage in a healthy business competition by upholding the product and service quality.
2. The Company will avoid any misleading conducts or cheating.
3. The Company contends agreements or understanding related to anti-competition.
4. The Company does not build cooperation without any reasonable reasons.

Etika Perusahaan dengan Pemerintah

1. Perusahaan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perusahaan harus membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah.
3. Perusahaan harus mendukung program-program Pemerintah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

The Company's Ethics to the Government

1. The Company must comply with the applicable regulation.
2. The Company must build cooperation and good communication with the Government.
3. The Company must support the government's program in accordance with the applicable regulation.

Etika Perusahaan dengan Masyarakat

1. Perusahaan memelihara lingkungan yang bersih dan sehat.
2. Perusahaan mendukung kegiatan sosial, budaya, tradisi, agama dan hak azasi manusia.
3. Perusahaan berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.
4. Perusahaan mengoptimalkan penyaluran program-program tanggung jawab sosial Perusahaan kepada masyarakat (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan).
5. Perusahaan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan.

The Company's ethics to Society

1. The Company shall preserve a clean and healthy environment.
2. The Company shall support social and cultural activity, tradition, and those related to religion and human rights.
3. The Company participates in empowering the economy of the nearby society.
4. The Company optimizes the disbursement of corporate social responsibility programs to public (Partnership and Community Development Program)
5. The Company does not carry out any actions that lead to discrimination to race, religions, and groups.

Etika Perusahaan dengan Media Massa

1. Perusahaan harus memberikan informasi yang relevan.
2. Perusahaan menjadikan media massa sebagai mitra dalam menciptakan kerja sama yang kondusif berdasarkan hubungan saling menghormati dan saling menguntungkan.
3. Perusahaan menerima dan menindaklanjuti secara proporsional terhadap kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa.

The Company's Ethics to Mass Media

1. The Company should give relevant information
2. The Company considers mass media as partners to create a conducive cooperation by respecting each other and giving mutual benefit.
3. The Company accepts and follows-up constructive criticism directed to the Company through mass media.

STANDAR PERILAKU INSAN PERUSAHAAN

Tanggung Jawab Pribadi dan Profesi

1. Seluruh Insan Perusahaan wajib mematuhi seluruh ketentuan Perusahaan tentang kepegawaian.
2. Seluruh Insan Perusahaan wajib memahami dan mematuhi seluruh ketentuan baik yang dikeluarkan oleh Perusahaan maupun regulator sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
3. Seluruh Insan Perusahaan harus berdedikasi, loyal, giat dan teliti dalam bekerja serta selalu berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Seluruh Insan Perusahaan harus menerapkan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Menciptakan Lingkungan Keria yang Kondusif

1. Seluruh Insan Perusahaan harus bersikap santun dalam berkomunikasi.
2. Seluruh Insan Perusahaan harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam hubungan kerja dengan atasan, bawahan dan rekan kerja.
3. Seluruh Insan Perusahaan harus menghindari tindakan dan ucapan yang mengandung unsur pelecehan, penghinaan, sikap mengejek, memfitnah dan merendahkan.
4. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan perselingkuhan dan tindakan pelecehan seksual secara verbal, visual maupun fisik termasuk pelecehan atas privasi dan status.
5. Seluruh Insan Perusahaan dilarang (baik di kantor maupun di luar kantor) :
   a. Menggunakan, memiliki, mendistribusikan atau menjual narkotika atau obat-obatan terlarang.
   b. Mengkonsumsi minuman beralkohol.
   c. Melakukan semua bentuk perjudian,
   d. Melakukan semua bentuk tindakan kriminal.
6. Seluruh Insan Perusahaan wajib memelihara lingkungan yang sehat.
7. Seluruh Insan Perusahaan agar mengupayakan penggunaan telepon secara efisien dan efektif serta menghindari penggunaan telepon untuk kepentingan pribadi secara berlebihan serta merespon bunyi telepon atau tanda panggilan pada kesempatan pertama.

BEHAVIOR STANDARD OF COMPANY PERSONNEL

Personal and Professional Responsibility

1. All personnel of the Company must comply with all regulation of the Company on the employees.
2. All personnel of the Company is required to understand and comply with all provisions, both issued by the Company and regulators according to the duties and responsibilities.
3. All personnel of the Company must be dedicated, loyal, diligent and careful while working and always strive to improve knowledge and capacity to ensure that their works run smoothly.
4. All personnel of the Company must implement the Company's interest over personal or group interest.

Creating Conducive Work Environment

1. All personnel of the Company must be polite in communication.
2. All personnel of the Company must uphold ethical value in making working relation with supervisors, subordinators or colleagues.
3. All personnel of the Company must avoid any action and remarks that contains harassment, humiliation, mock, blasphemy and despise.
4. All personnel of the Company is not allowed to have love affair and sexual harassment either verbally or physically, including harassment on privacy and status.
5. All personnel of the Company is not allowed (both inside and outside the office) to:
   a. Use, have, distribute or sell narcotics or drugs.
   b. Consume alcohols.
   c. Play gambling,
   d. Committing to criminal act.
6. All personnel of the Company must maintain a healthy environment.
7. All personnel of the Company are encouraged to use telephone efficiently and effectively and avoid the use of telephone for personal interest improperly and pick up the telephone at the first ring.

Menghindari Segala Benturan Kepentingan dan Potensinya yang Memicu Perilaku Tidak Sehat dan Tidak Jujur

1. Seluruh Insan Perusahaan menggunakan tenaga, pemikiran dan kemampuan kerjanya untuk kepentingan Perusahaan. Pekerjaan atau kegiatan di luar jam kantor dapat dilakukan sepanjang tidak memanfaatkan nama dan kepentingan Perusahaan.
2. Seluruh Insan Perusahaan yang sudah tidak aktif atau telah mengundurkan diri dilarang menggunakan setiap bentuk hak cipta, hak milik intelektual, data dan informasi Perusahaan serta melakukan kegiatan atas nama Perusahaan.
3. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh melakukan investasi dana Perusahaan atas nama pribadi atau golongan.
4. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh melakukan investasi dana Perusahaan dengan memperjanjikan keuntungan pribadi dengan pihak lain.
5. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh menerima suap atau pembayaran dalam bentuk apapun dari pihak yang memiliki hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan jabatan atau tugasnya.
6. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh menerima dan memberikan hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga dapat mempengaruhi keputusan bisnis yang sehat.
7. Seluruh Insan Perusahaan dilarang menjadi penyedia barang dan jasa yang secara langsung maupun tidak langsung menjual barang, hak atau jasa kepada Perusahaan.
8. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan mark up harga penjualan atau pembelian baik untuk kepentingan pribadi atau pihak iain.
9. Seluruh Insan Perusahaan dilarang memanfaatkan jabatannya untuk memberikan perlakuan istimewa kepada pihak lain.

Menjaga Aset, Harta dan Informasi demi Kepentingan Perusahaan

1. Seluruh Insan Perusahaan menggunakan asset Perusahaan hanya untuk kepentingan Perusahaan dan tidak diperkenankan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Avoiding Any Conflict of Interest and Its Potential that Triggers Unhealthy and Dishonest Conduct

1. All personnel of the Company devote their energy, thought and work capacity for the interest of the Company. Any work or activity outside office hours can be done as long as it does not take advantage the name and interest of the Company.
2. All personnel of the Company that are not active or resign are not allowed to use any form of copy rights, intellectual property, data and information of the Company and conduct activities on behalf of the Company.
3. All personnel of the Company are not allowed to invest fund for the Company on behalf of personal or group name.
4. All personnel of the Company shall not invest the Company's fund by pledging personal benefits to other parties.
5. All personnel of the Company shall not accept bribes or payments of any form from parties who have a direct or indirect relationship with the office or duties.
6. All personnel of the Company shall not receive and give presents of any form which may allegedly affect a sound business decision.
7. All personnel of the Company are prohibited from being a provider of goods and services or directly and indirectly selling goods, rights or services to the Company.
8. All personnel of the Company are prohibited to mark up the sale or purchase price for both personal and party interests.
9. All personnel of the Company are prohibited from utilizing his position to give preferential treatment to other parties.

Maintaining Assets and Information for the Company's Interest

1. All personnel of the Company shall utilize the Company's assets for the benefit of the Company and not for personal/ group interest.

2. Seluruh Insan Perusahaan harus bertanggung jawab melindungi harta Perusahaan dari pencurian, penggelapan dan penyalahgunaan asset sesuai wewenangnya masing-masing.
3. Seluruh Insan Perusahaan wajib menjaga data dan informasi beserta perangkatnya sesuai dengan kewenangannya agar tidak disalahgunakan, dirusak, dicuri, atau tidak diakses oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab.
4. Seluruh Insan Perusahaan tidak diperkenankan menggunakan nama, logo, hak cipta dan berbagai aksesoris milik Perusahaan untuk kepentingan pribadi.
5. Seluruh Insan Perusahaan wajib menjaga informasi internal Perusahaan yang bersifat rahasia dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, teman, golongan, atau kelompok apapun dan manapun.
6. Seluruh Insan Perusahaan wajib membuat dan memberikan laporan dan data-data dengan benar dan jujur kepada pihak yang berkepentingan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mematuhi Hukum daan Perundang-Undangan

1. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan kegiatan insider trading guna memperoleh keuntungan pribadi dan tidak bertindak sebagai pialang, pencari atau perantara lain untuk kepentingan pribadi atau golongan dalam transaksi yang dilakukan Perusahaan.
2. Seluruh Insan Perusahaan dilarang terlibat atau melibatkan diri pada investasi dan atau praktik yang bersifatp pencucian uang (*money laundering*).
3. Seluruh Insan Perusahaan dilarang membuat kesepahaman, perikatan, pernyataan baik langsung maupun tidak langsung yang menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki keterikatan dengan partai politik manapun, namun Perusahaan memberikan kebebasan bagi seluruh insan Perusahaan untuk menyalurkan aspirasi politiknya dengan syarat :
   a. Tidak mengatasnamakan Perusahaan,
   b. Tidak menggunakan asset Perusahaan dalam aktifitas politiknya,
   c. Tidak memberikan kontribusi apapun atas nama Perusahaan,

2. All personnel of the Company are responsible for protecting the Company's assets from thievery, embezzlement and misappropriation in accordance of their respective authority.
3. All personnel of the Company shall maintain the data / information along with the device in accordance with the authority in order not to be abused, damaged, stolen, or accessed by other parties.
4. All personnel of the Company shall not utilize the name, logo, copyright and various accessories of the Company for personal gain.
5. All personnel of the Company shall maintain the Company's internal and confidential information and shall not utilize them for personal, family, associates, or other parties' interests.
6. All personnel of the Company are required to prepare and provide reports and data properly and honestly to interested parties according to the rules and regulations in force.

Compliance on the Rules and Regulations

1. All personnel of the Company are prohibited from conducting insider trading for personal gain and shall not act as brokers, finders or other intermediary for personal or group interests in the transactions made by the Company.
2. All personnel of the Company are prohibited from engaging in investment and or money laundering.
3. All personnel of the Company are prohibited from establishing an understanding, engagement, statement, either directly or indirectly, which indicates the Company's ties to any political party. However, the Company grants freedom for all personnel to channel their political aspirations under these conditions:
   a. All personnel shall not act on behalf of the Company,
   b. All personnel must not utilize the Company's assets for political activities.
   c. All personnel shall not provide any political contribution on behalf of the Company,

d. Apabila menduduki jabatan di Partai Politik (parpol) dan menjadi calon/anggota legislatif dianggap mengundurkan diri dari Perusahaan.

4. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Internalisasi dan Penegakanan *Code of Conduct*

Internalisasi dan penegakan *Code of Conduct* dilakukan melalui Komitmen Bersama seluruh insan perusahaan yang bertekad untuk menaati Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), dan perusahaan wajib melakukan sosialisasi atau internalisasi Pedoman Perilaku tersebut kepada seluruh insan Perusahaan.

Mekanisme penegakan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dilakukan dengan cara seluruh insan perusahaan wajib menandatangani surat Pernyataan Komitmen untuk Mematuhi Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), dan seluruh insan Perusahaan wajib mengerti, memahami dan menerapkan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).

Saluran Pengaduan

1. Apabila ditemui adanya pelanggaran Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan Perusahaan, setiap Insan Perusahaan berkewajiban untuk segera melaporkan secara tertulis dengan menyebutkan identitas pelapor kepada Divisi yang menangani bidang Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Permasalahan perilaku Dewan Pengawas dan Direksi, penanganannya dilakukan oleh Menteri.
3. Permasalahan perilaku pegawai, penanganannya dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai mekanisme yang berlaku.
4. Pelanggaran Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dalam hubungannya dengan masyarakat, penanganannya tetap mengacu kepada ketentuan kepegawaian yang berlaku dalam Perusahaan.
5. Divisi yang menangani bidang Sumber Daya Manusia (SDM) berkewajiban untuk merespon dengan segera setiap pertanyaan, pemberitahuan, dan laporan yang diterimanya secara proporsional.

d. A personnel is considered to resign if he/she holds a position in any political party or becoming a legislature candidate/member.

4. All personnel of the Company are prohibited from conducting Corruption, Collusion and Nepotism (KKN).

Internalization and Enforcement of Code of Conduct

The Internalization and enforcement of Code of Conduct is conducted through Joint Commitment for all employees who are determined to comply with the Code of Conduct. The Company is responsible for conducting dissemination or internalization of the Code of Conduct to all employees.

The enforcement mechanism of Code of Conduct is conducted by all employees by signing a Statement of Commitment to Comply with the Code of Conduct. All employees are obliged to understand, comprehend, and implement the Code of Conduct.

Complaints Hotline

1. If any violation of the Code of Conduct found in the Company, each personnel is obliged to promptly report in written form and state the reporter's identity to Human Resources Division.
2. Behavioral problems of Board of Supervisors and the Board of Directors are handled by the Minister.
3. Behavioral issues of the employees are handled immediately by the supervisor in tier in line with the applicable mechanism.
4. Violations to the Code of Conduct in relation to the public shall be handled by referring to personnel's provision applicable in the Company.
5. The division in charge of Human Resources is obliged to respond immediately to any questions, notices, and reports received proportionally.

Mekanisme Penanganan atas Laporan Pelanggaran Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*)

1. Atasan langsung atau unit kerja yang ditunjuk untuk mengelola penanganan atas laporan pelanggaran berdasarkan laporan yang diterima melakukan identifikasi permasalahan analisis, mengumpulkan informasi tambahan yang relevan serta merahasiakan identitas pelapor.
2. Hasil analisis tersebut apabila di pandang perlu dapat dilaporkan kepada Direksi untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

Handling Mechanism of Code of Conduct Mechanism

1. The immediate supervisor or unit designated to manage the handling of violations based on the received reports identifies analysis' issues, collects relevant additional information and conceals the reporter's identity.
2. The results of this analysis in perspective, if necessary, should be reported to the Board of Directors for further process in accordance with the applicable mechanism.

Penyebarluasan Etika Perusahaan

Upaya sosialisasi dan penyebarluasan Etika Perusahaan secara merata kepada seluruh elemen Perusahaan dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain:

1. Pemberian sosialisasi, training dan seminar bagi karyawan
2. Pemasangan banner maupun spanduk
3. Rapat evaluasi kinerja
4. Sosialisasi saat proses perekrutan

Corporate Ethics Dissemination

Socialization and dissemination of Corporate Ethics are conducted evenly to all elements of the Company by way of several strategies, among others:

1. Providing socialization, training, and seminar for employees
2. Banner installation
3. Performance evaluation meeting
4. Socialization of recruitment process

Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Etika Perusahaan

Agar penegakan standar etika dapat ditegakkan secara ketat, Perusahaan menerapkan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Etika Perusahaan yang diberlakukan oleh seluruh perangkat Perusahaan tanpa terkecuali. Adapun sanksi yang diberikan berupa surat peringatan.

Enforcement and Sanction for Violation to Corporate Ethics

To strictly enforce the ethical standard, the Company imposes sanction for the violation to Corporate Ethics enforced by all elements of the Company without exception. The sanctions can be in the form of letter of warning.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Perum Jamkrindo mempunyai komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance)* secara konsisten dan berkesinambungan sebagai salah satu acuan dalam melakukan pengelolaan Perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan usaha, perusahaan senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel serta mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan kegiatannya, kadang terjadi pengaduan pelanggaran insan Perusahaan terhadap prinsip-prinsip GCG, nilai-nilai etika serta ketentuan

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Perum Jamkrindo is committed to apply the Good Corporate Governance consistently and sustainably, as a reference in performing the management. In managing the Company, the Company is always required to run the business transparently and accountably, as well as with integrity and adherence to the applicable regulations.

In conducting the activities, violation towards GCG principles, ethics values, and applicable regulations might occur. To create a clean and responsible work situation, the

perundang-undangan yang berlaku. Untuk menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggung jawab, Perusahaan menyusun dan menerapkan suatu sistem yang mengatur penanganan dan penyelesaian Pengaduan Pelanggaran bagi Insan Perum Jamkrindo dalam suatu Sistem Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing system*).

Company prepared and applied a system which will set the handling and settlement of whistleblowing report for Perum Jamkrindo Personnel in a whistleblowing system.

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing system*) merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasi terjadi di dalam suatu perusahaan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan niat baik untuk kepentingan perusahaan.

Whistleblowing system is a system that can be a media for the reporter to submit information regarding violation indicated to occur in a company based on accountable and goodwill for the benefit of the Company.

Adapun tujuan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing system*) yaitu:

1. Menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan pelanggaran yang efektif.
2. Menciptakan iklim yang kondusif dengan memperkuat lingkungan pengawasan dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra perusahaan dalam rangka menjaga serta melidungi aset atau kepentingan perusahaan.
3. Mempermudah manajemen untuk menangani secara cepat dan efektif dalam penyelesaian laporan-laporan pelanggaran secara internal maupun eksternal melalui jalur hukum (bila dianggap perlu), melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta tetap menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi tersebut.
4. Membangun suatu kebijakan dan infrastruktur untuk perlindungan pelapor dari balasan pihak-pihak internal maupun eksternal.
5. Mengurangi potensi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini.
6. Meningkatkan reputasi perusahaan.
7. Sebagai salah satu upaya dalam pengungkapan berbagai permasalahan dalam perusahaan yang tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku di Perusahaan.

The whistleblowing system has the following adjective:

1. Guarantee the implementation of effective settlement mechanism of whistleblowing reports.
2. To create conducive environment by strengthening the supervisory environment and encourage the reporting towards matters which lead to financial and non-financial loss, including matters which could ruin the Company's image in order to maintain and protect the assets or the interests.
3. To facilitate the management in quickly and effectively handling the whistleblowing internally or externally through legal means (if necessary), to protect the confidentiality of the reporter as well as maintaining the confidentiality and security of the information.
4. To establish the policy and infrastructure for the protection for the reporter from internal and external reprisal.
5. To minimize the potential loss occurred because the reporting through early detection.
6. To improve the Company's reputation.
7. As one of the efforts in revealing the various problems in the Company which are not in accordance with the applicable ethics standard in the Company.

Yang termasuk di dalam aktivitas pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Melanggar peraturan perundang-undangan.
2. Melanggar kode etik perusahaan.
3. Melanggar prinsip akuntasi yang berlaku umum.
4. Melanggar kebijakan dan prosedur operasional perusahaan, ataupun kebijakan, prosedur, peraturan lain yang dianggap perlu oleh perusahaan.
5. Tindakan kecurangan lain yang dianggap perlu oleh perusahaan.
6. Tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial ataupun non finansial.
7. Tindakan yang membahayakan keselamatan kerja.

Violation activities including as follows:

1. Violating the regulations.
2. Violating the code of conduct.
3. Violating the generally accepted accounting principles.
4. Violating policies and operational procedures considered necessary for the Company.
5. Other fraud deemed significant by the company
6. Any fraud potentially leading to financial and non-financial loss.
7. Any harmful actions for occupational safety.

PRAKTIK *WHISTLE BLOWING*

Komitmen Perum Jamkrindo dan Karyawan

Seluruh karyawan Perum Jamkrindo berkomitmen untuk mempraktekkan *Whistleblowing System* dalam rangka melaksanakan sistem pelaporan pelanggaran. Karyawan juga dituntut untuk berpartisipasi aktif untuk ikut melaporkan bila menemukan adanya pelanggaran. Sementara itu, Perum Jamkrindo juga memiliki komitmen untuk membuat kebijakan untuk melindungi pelapor.

Yang lebih penting lagi bahwa menurut ketentuan di dalam *Whistleblowing System* ini, kebijakan perlindungan menyatakan secara jelas bahwa seorang pelapor pelanggaran akan mendapatkan perlindungan dari perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan. Sistem pelaporan pelanggaran berada di bawah Direksi, khususnya Direktur utama. Dewan Pengawas akan melakukan pengawasan atas kecukupan dan efektivitas pelaksanaan sistem tersebut.

Mekanisme penyampaian laporan pelanggaran

1. Semua pelanggaran yang dilaporkan dan diversifikasi ditangani dengan baik
2. Pelanggaran yang berulang dan sistemik dilaporkan kepada pejabat terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbaikan.

WHISTLEBLOWING PRACTICE

Commitment of Perum Jamkrindo and Employees

All employees of Perum Jamkrindo are committed to the implementation of Whistleblowing System. The employees are also required to actively report any violation. Meanwhile, Perum Jamkrindo is also committed to formulate policies to protect the reporter.

Furthermore, according to the provisions in KNKG, the policies should clearly state that the whistleblower will have protection from the Company to anticipate any harmful deeds. The whistleblowing system is overseen by the Board of Directors, particularly the President Director. Board of Supervisors will oversee the adequacy and effectiveness of the system.

Whistleblowing Mechanism

1. All violations reported and verified have been well handled.
2. Repeated and systemic violation has been reported to the related official having authority to make improvement.

3. Tim pengelola WBS harus mendapatkan akses pelaporan langsung kepada Direktur Utama dengan tembusan ke Ketua Dewan Pengawas selaku penanggung jawab pemantauan sistem pelaporan pelanggaran.
4. Mekanisme pelaporan pelanggaran:
   a. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh karyawan maka laporan pelanggaran tersebut diserahkan langsung kepada direktur utama. Penangan lebih lanjut atas laporan pelanggaran tersebut dilakukan oleh tim pengelola WBS.
   b. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh personil tim pengelola wbs maka laporan pelanggaran tersebut diserahkan kepada Direktur Utama. Penanganan lebih lanjut atas laporan pelanggaran tersebut dilakukan oleh Direksi, dan bila diperlukan investigasi dimungkinkan untuk menggunakan investigator/auditor eksternal yang independen.
   c. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Anggota Direksi maka laporan pelanggaran tersebut diserahkan kepada Ketua Dewan Pengawas. Penanganan lebih lanjut atas laporan pelanggaran tersebut dilakukan oleh Direksi, dan bila diperlukan investigasi dimungkinkan untuk menggunakan investigator/auditor eksternal yang independen.
   d. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas dan organ pendukungnya maka laporan pelanggaran tersebut diserahkan kepada Direktur Utama. Penanganan lebih lanjut atas laporan pelanggaran tersebut dilakukan oleh direksi dan bila diperlukan investigasi dimungkinkan untuk menggunakan investigator/auditor eksternal yang independen.
   e. Dalam hal pelanggaran dilakukan anggota Dewan Pengawas, organ Dewan Pengawas, anggota Direksi dan karyawan tidak dapat diselesaikan secara internal, apabila dipandang perlu, maka laporan pelanggaran tersebut diserahkan kepada penegak hukum yang berwenang seperti polisi, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi (KPK), atau penyidik.

3. WBS management team must get direct reporting access to President Director with copy to Board of Supervisors as the whistleblowing system monitoring in charge.
4. Whistleblowing mechanism:
   a. The report is submitted to President Director directly if the violation is committed by employees. Further handling will be conducted by WBS management team.
   b. The report is submitted to President Director if the violation is committed by wbs management team personnel. Further handling will be conducted by Board of Directors, and investigation by investigator/ independent external auditor might be conducted if necessary.
   c. The report is submitted to the Head of Board of Supervisors if the violation is committed by member of the Board of Directors. Further handling will be conducted by Board of Directors, and investigation by investigator/ independent external auditor might be conducted if necessary.
   d. The report is submitted to President Director if the violation is committed by member of the Board of Supervisors and its supporting organ. Further handling will be conducted by Board of Directors, and investigation by investigator/ independent external auditor might be conducted if necessary.
   e. If the violation committed by member and organ of Board of Supervisors, member of Board of Directors and employees could not be solved internally, and if considered necessary, the report will be handed over to authorized law enforcer such as police, attorney, corruption eradication commission (KPK), or investigator.

Perlindungan bagi Pelapor

Perlindungan kepada pelapor tindak pelanggaran pada prinsipnya adalah pemenuhan hak dan rasa aman kepada pelapor dan atau keluarga pelapor terkait dengan kemungkinan ancaman/tindakan yang dihadapinya akibat penyampaian atau pengungkapan laporan pelanggaran. Pemberian perlindungan dilakukan dengan tetap memperhatikan azas kerahasiaan dan ketentuan terkait yang berlaku di perusahaan.

Perlindungan yang diberikan oleh perusahaan meliputi:

1. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya
2. Menjamin perlindungan segala bentuk ancaman, intimidasi ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaannya pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.
3. Memberikan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan yaitu:
   a. Pemecatan yang tidak adil;
   b. Penundaan kenaikan pangkat atau penurunan jabatan;
   c. Penundaan kenaikan gaji berkala dan atau tunjangan;
   d. Pengenaan sanksi baik langsung maupun tidak langsung;
   e. Tindakan fisik seperti pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
   f. Intimidasi, pemaksaan atau menjadi korban;
   g. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record).*

Perlindungan terhadap pelapor pelanggaran dilaksanakan apabila pelaporan pelanggaran menyampaikan pengungkapan dengan memenuhi kriteria berikut:

1. Beriktikad baik berdasarkan dorongan moral dan etika serta tidak mengharapkan imbalan materi dan atau popularitas.
2. Informasi dan atau pelanggaran yang disampaikan adalah yang telah terjadi dan dapat dipercaya.
3. Hal-hal yang terjadi sesuai dengan inforamsi dan atau pelanggaran yang disampaikan atau dilaporkan dan dapat dipercaya.

Protection for the Reporter

Protection for the violation reporter is a fulfillment of rights and sense of security to the reporter and or the family related to threat possibility/ actions faced due to the reporting or whistleblowing disclosure. The protection is conducted by considering the confidentiality principle and related provision prevailing in the Company.

The protection covers:

1. Confidential identity.
2. Protection from any threat, intimidation or unpleasant act from any parties as long as the reporter keeps the violation confidential.
3. Provide protection towards harmful treatment, namely:
   a. Unfair dismissal;
   b. Promotion postponement or demotion;
   c. Periodic salary increase postponement and or allowance;
   d. Direct or indirect sanction imposition;
   e. Physical action such as harassment or discrimination;
   f. Intimidation, coercion, or being a victim;
   g. Adverse record in personal file record.

The protection will be implemented if the whistleblowing disclosure fulfill these criteria:

1. Good faith based on moral encouragement and ethics as well as not expects any material rewards and or popularity.
2. Reported information and or violation have been occurred and can be trusted.
3. Occurred events are in accordance with information and or violation reported and can be trusted.

Pemberian perlindungan kepada pelapor dapat ditolak atau dihentikan apabila terbukti bahwa pelapor tidak melakukan kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan identitas diri dan laporannya serta apabila dikemudian hari terbukti bahwa laporan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor ternyata palsu atau fitnah atau mempunyai tujuan yang menyimpang.

Protection for reporter might be rejected or stopped if the rapporteur found not keeping the identity and report confidentiality as well as if later the report is found fake or defamation, or having deviant purposes.

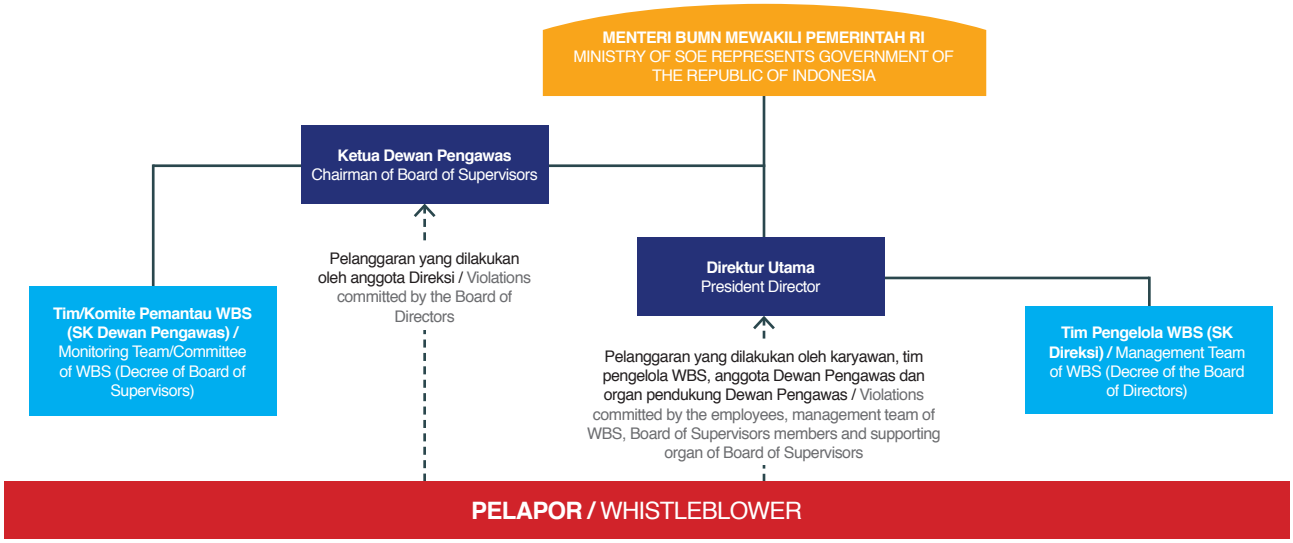
Mekanisme Penanganan Pengaduan

1. Tim pengelola WBS menerima dan menyaring laporan pengaduan pelanggaran yang diterima.
2. Mengindentifikasi indikasi awal atas laporan pengaduan pelanggaran yang diterima agar dapat mengetahui perlu tidaknya proses tindak lanjut.
3. Melakukan telaah (verifikasi) terhadap pengaduan dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Utama.
4. Dari hasil verifikasi tersebut maka Direktur Utama menetapkan rekomendasi perlu tidaknya investigasi oleh Tim Pengelola WBS.
5. Apabila diperlukan proses tidak lanjut maka Direktur Utama memberikan perintah kepada Tim Pengelola WBS agar melaksanakan investigasi terhadap pengaduan dan melaporkan hasilnya.
6. Berdasarkan investigasi yang dilakukan, apabila tidak terbukti maka proses investigasi dihentikan dan laporan pengaduan ditutup, sebaiknya, bila pengaduan terbukti kebenarannya maka Direktur Utama mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau diteruskan kepada pihak penyidik untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
7. Tim pengelola WBS mengusulkan kepada Direktur Utama untuk memberikan penghargaan bagi pelapor atas laporan pelanggaran yang terbukti kebenarannya dan memberikan sanksi apabila laporan pelanggaran terbukti tidak benar/palsu.
8. Tim Pengelola WBS membuat laporan tindak lanjut atas laporan pengaduan kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas.
9. Tim Pengelola WBS mendokumentasi seluruh proses pengelolaan pelanggaran tersebut secara rapi, aman, dan rahasia.

Complaint Handling Mechanism

1. WBS management team receives and filters the whistleblowing report.
2. Identify the initial indication of the received report in order to identify whether follow up process is necessary.
3. Verify the complaint and report the result to President Director.
4. President Director stipulates the recommendation whether or not an investigation is needed.
5. If a follow up is needed, the President Director will order the WBS Management Team to implement investigation towards the complaint and submit the result.
6. If not proven, then the investigation process will be stopped and the complaint report is closed, otherwise, if the complaint is proven, the President Director will impose the sanction in accordance with applicable provision or forwarded to investigator for further process in accordance with applicable laws and regulations.
7. WBS management team suggest to the President Director to give reward for rapporteur whose report is proven right and impose sanction if the report is fake.
8. WBS Management Team makes follow up report on complaint report to President Director and Board of Supervisors.
9. WBS Management Team documents the entire violation management process neatly, safely, and secretly.

Pihak yang mengelola pengaduan / **Complaint Managing Party**



Proses Penanganan dan Data Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran Selama 2014

Selama 2014, Perusahaan tidak menerima laporan pengaduan pelanggaran.

Handling Process and Whistleblowing Management Data During 2014

During 2014, the Company did not receive any whistleblowing report.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Undang-undang Republik Indonesia menetapkan bahwa membayar atau menawarkan pembayaran atau bahkan menerima suap, *kickback* atau pun bentuk pembayaran lain yang korup adalah suatu tindak pidana yang dapat menjadikan Perusahaan maupun para pegawai secara individu dapat dikenai denda dan/atau hukuman penjara. Undang-undang anti korupsi ini, termasuk Peraturan Praktik Korupsi menjadikan pembayaran, penawaran atau pemberian segala sesuatu yang bernilai kepada pejabat Perusahaan dengan tujuan mempengaruhi tindakan atau keputusan para pejabat sebagai suatu tindak pidana.

Tujuan Kebijakan ini adalah untuk memastikan agar semua pegawai, pejabat dan direktur, serta semua anak perusahaan dan afiliasi Perusahaan patuh terhadap Kebijakan Anti Korupsi Perusahaan dan undang-undang anti korupsi terkait.

ANTI-CORRUPTION POLICY

The Law of the Republic of Indonesia stipulates that paying, offering to pay or accepting bribes, kickbacks, or any other form of corrupt payment is a crime which results in making the Company and the individual employee as subject to fines and / or imprisonment. Anti-corruption laws, including the Corrupt Practices Regulations categorizes payments, offering or giving valuable items to the Company's officials with the purpose of influencing actions or decisions of the officials as criminal offense.

The purpose of this policy is to ensure that all employees, officers and directors, as well as all of its subsidiaries and affiliated companies adhere to the Company's Anti-Corruption Policies and related anti-corruption law.

Kebijakan ini mencakup hal-hal berikut ini:
1. Suap, *Kickback* atau Pembayaran Korup Lain
2. Pembayaran Fasilitasi
3. Hubungan dengan Pihak Ketiga

Kementerian Badan Usaha Milik Negara meluncurkan *roadmap* BUMN Bersih sebagai aksi anti korupsi dilingkungan kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan negara, dan itu juga berlaku di Perum Jamkrindo sebagai salah satu perusahaan negara.

KEPATUHAN TERHADAP PAJAK

Perusahaan senantiasa mematuhi ketentuan pajak yang berlaku sebagai bentuk kontribusi nyata serta menjadi kewajiban terhadap negara. Hal ini sejalan dengan semangat Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan melalui optimalisasi penerimaan pajak.

Total kewajiban pajak Perum Jamkrindo 2014 sebesar Rp118.397.810.994 yang terdiri dari saldo awal Rp24.242.476.126 dan total kewajiban pajak pada 2014 sebesar Rp94.155.334.686. Kewajiban pajak pada 2014 terdiri dari Pajak Penghasilan tahun 2014 sebesar Rp90.975.197.037, Pajak Pertambahan Nilai Rp2.332.896.800 dan Pajak Bumi dan Bangunan Rp492.841.307. Perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan dan menyetor ke kas Negara sebesar Rp115.064.119.527 sehingga kewajiban pajak per 31 Desember 2014 yang masih harus dibayar pada tahun 2015 sebesar Rp3.333.691.285.

The policies include:
1. Bribery, Kickback or Other Corrupt Payments
2. Facilitation Payments
3. Relationships with Third Parties

The Ministry of State Owned Enterprises launches Clean BUMN roadmap as an act of anti-corruption within the environment of the Ministry of SOE and state corporations, including Perum Jamkrindo as one of the state corporations.

TAX COMPLIANCE

The Company continues to comply with the provisions of applicable taxes as well as being a form of real contribution obligations to the state. This is in line with the spirit of the Government to promote development through tax revenue optimization.

Perum Jamkrindo's tax liabilities in 2014 amounted to Rp118,397,810,994, which consisted of beginning balance of Rp24,242,476,126 adn total tax liabilities in 2014 amounted to Rp94,155,334,686. Tax liabilities in 2014 comprised Income Tax of 2014 at Rp90,975,197,037, Value Added Tax of Rp2,332,896,800 and Land and Building Tax of Rp492,841,307. The Company has met taxation liabilities and paid it to the State's cash at the amount of Rp115,064,119,527, thus tax liabilities as of December 31, 2014 that must be paid in 2015 is Rp3,333,691,285.


Jamkrindo
Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia
Gedung JAMKRINDO
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6
Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10610
Telp. 021-6540335 Fax. 021-6540344/48



PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM

FILOSOFI DAN DASAR KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB

Perum Jamkrindo dalam menjalankan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), tentunya tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan lingkungan. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dituangkan dalam Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Dasar Kebijakan

Secara garis besar, kebijakan umum PKBL yang diterapkan dalam Perum Jamkrindo adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (Permen BUMN 5/2007)

Sumber Daya Manusia

Berikut adalah sumber daya manusia yang menangani program PKBL Perum Jamkrindo:

1. Kepala Divisi Keuangan & Investasi	: 1 Orang
2. Kepala Bagian PKBL	: 1 Orang
3. Staf PKBL	: 1 orang
Total SDM	: 3 orang

PHILOSOPHY AND BASIC POLICY OF RESPONSIBILITY

Perum Jamkrindo in conducting its business activities running in the field of Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives financing can not be separated from the support of society and environment. Corporate Social Responsibility is realized through Partnership and Environmental Development Program (PKBL) conducted consistently and sustainably.

Basic Policy

Generally, general policies of PKBL implemented in Perum Jamkrindo are as follows:

1. Government Regulation No. 32 year 1998 regarding Development of Small Business
2. Laws No. 19 year 2003 regarding State Owned Enterprises
3. Laws No. 20 year 2008 regarding Micro, Small, and Medium Enterprises
4. Ministry of State Owned Enterprise Regulation No. PER-05/MBU/2007 year 2007 regarding Partnership Program of State Owned Enterprise with Small Business and Community Development Program as changed with Ministry of State Owned Enterprise Regulation No. PER-08/MBU/2013 year 2013 regarding the Fourth Change of Ministry of State Owned Enterprise Regulation No. PER-05/MBU/2007 regarding Partnership Program of State Owned Enterprise and Community Development Program (Ministry of State Owned Enterprise Regulation 5/2007)

Human Resource

Human Resource that handles PKBL Program of Perum Jamkrindo are as follows:

1. Head of Financial & Investment Division	: 1 person
2. Head of PKBL Program	: 1 person
3. PKBL Staff	: 1 person
Total Human Resources	: 3 people

PROGRAM KEMITRAAN

Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013, Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Permen BUMN 5/2007 tersebut.

Tanggung jawab terhadap mitra binaan diwujudkan dalam bentuk pembinaan mitra binaan. Sumber dana untuk pembinaan mitra binaan adalah Dana Pembinaan Program Kemitraan, yaitu maksimal sebesar 20% dari dana Program Kemitraan yang disalurkan dalam tahun berjalan.

Pembinaan mitra binaan hanya diperuntukkan bagi Mitra Binaan Perum Jamkrindo dalam rangka membantu pengembangan usaha Mitra Binaan, diberikan dalam bentuk:

a. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan.
b. Kegiatan lainnya untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan

Kegiatan

Program Kemitraan yang dilakukan Perum Jamkrindo pada 2014 adalah:

1. Pelatihan Mitra Binaan di Kantor Pusat
   Perum Jamkrindo menggelar Pelatihan *Internet Marketing* yang bertujuan untuk membekali Mitra Binaan PKBL Perum Jamkrindo dalam pemanfaatan akses internet untuk memasarkan produk mereka. Pelatihan *Internet Marketing* adalah wujud dalam pemecahan solusi pemasaran bagi UMKMK, khususnya pemasaran bagi produk Mitra Binaan PKBL Perum Jamkrindo. Pelatihan ini diikuti oleh 10 Mitra Binaan yang masing-

PARTNERSHIP PROGRAM

Policy

Based on Ministry of State Owned Enterprise Regulation No. PER-08/MBU/2013 dated September 10, 2013, Partnership Program of BUMN with Small Business, is a program to develop small business capability in order to be tougher and more independent through the utilization of fund from BUMN profit. Small business is the activity of small-scale public economic and meets the criteria of net assets or annual sales as well as ownership as regulated in the Ministry Regulation.

Responsibility towards foster partner is realized in the form of foster partner development. Fund source for development partner development is from Partnership Program Development Fund which is recorded 20% of Partnership Program fund distributed in ongoing year.

Development partner development is only intended for Perum Jamkrindo foster partner to help the development of foster partner business, that is provided in the form of:

a. Education aids, training, internship, marketing, promoting, and others related to the development of foster partner productivities.
b. Other activities to review/analyze everything related to Partnership Program.

Activities

Partnership program conducted by Perum Jamkrindo in 2014 are:

1. Development Partner Training in Head Office
   Perum Jamkrindo held Internet Marketing training that its aim is to provide knowledge for Perum Jamkrindo PKBL Development Partner in utilizing internet access to promote their products. Internet Marketing training is a form of marketing solution solving for UMKMK, particularly marketing for Perum Jamkrindo PKBL Development Partner Training products. This training was followed by 10 Development Partners in which

masing diwakili oleh 2 orang. Tim Pengajar dalam Pelatihan ini tergabung dalam komunitas BEST UKM di mana para pengajarnya adalah tenaga profesional internet khususnya *internet marketing*. Pelatihan ini dikemas selama 2 (dua) hari dan berlangsung pada 4 dan 5 Desember 2014, bertempat di Gedung Jamkrindo. Pelatihan ini diadakan dengan harapan produk Mitra Binaan PKBL Perum Jamkrindo dapat lebih dikenal oleh Pasar Dunia sehingga dapat memajukan taraf hidup pelaku UKM, khususnya Mitra Binaan PKBL.

2. Pameran Crafina 2014
   Mitra Binaan PKBL Perum Jamkrindo ikut berpartisipasi dalam Pameran Crafina 2014 yang berlangsung di JCC Senayan, pada 26 hingga 30 Desember 2014. Dalam pameran tersebut, terdapat 3 Mitra Binaan PKBL Perum Jamkrindo Kantor Cabang Jakarta, yaitu Inna Kerudung, UD. Hadicraft Corner dan Menara Batik. Dengan mengikuti Pameran Crafina 2014, diharapkan produk yang dihasilkan Mitra Binaan PKBL Perum Jamkrindo dapat lebih dikenal oleh masyarakat domestik maupun luar negeri, sehingga dapat membantu Mitra Binaan PKBL Perum Jamkrindo dalam memasarkan produknya.

Mitra Binaan Perum Jamkrindo

1. Toko Songket Palembang "ASIA"
   Usaha batik dan songket Palembang ini dirintis sejak tahun 2005 oleh Ahmad Fikri. Sejak menjadi Mitra Binaan Perum Jamkrindo dan mendapatkan penyaluran dana dari Kantor Cabang Palembang, usaha toko yang berlokasi di Jl. Radial Komplek IBP Blok B No. 8, Palembang ini semakin maju. Karyawanya berjumlah 4 orang dan kini wilayah pemasarannya meliputi Palembang, Jambi, Lampung, Jakarta, Medan dan telah melakukan ekspor ke Malaysia. Songket Palembang milik Toko Songket Asia ini digunakan untuk mengisi salah satu interior Istana Malaysia.

2. Toko Kerudung "Inna Kerudung"
   Toko kerudung "Inna Kerudung" berawal dari usaha kecil-kecilan sang pemilik yaitu Ibu Inna Mutmainnati, seorang *Banker* di sebuah Bank BUMN, yang menawarkan hasil

each development partner was represented by 2 people. Trainer team in this training is incorporated in BEST UKM community where the trainers/tutors are professional in internet field, especially in internet marketing. This training was held for 2 (two) days, on December 4-5, 2014, in Jamkrindo building. This training was expected to make Perum Jamkrindo PKBL Development Partner's products being well-known by World Market so UKM businessman, especially PKBL Development Partner, can develop their living standard.

2. Crafina Exhibition 2014
   Perum Jamkrindo PKBL development partner participated in Crafina exhibition 2014 in JCC Senayan, on December 26-30, 2014. In the exhibition, there were 3 PKBL development partners of Perum Jamkrindo branch offices, which were Inna Kerudung, UD. Handicraft Corner and Menara Batik. By joining Crafina exhibition 2014, it is expected that Perum Jamkrindo PKBL development partner can be well-known by domestic and foreign communities, so it can help Perum Jamkrindo PKBL development partner to promote their products.

Development Partner of Perum Jamkrindo

1. Songket Palembang Store "ASIA"
   This batik and songket Palembang business was started since 2005 by Ahmad Fikri. Since becoming Perum Jamkrindo Development Partner and receiving fund distribution from Palembang branch office, his store located in Jl. Radial Komplek IBP Blok B No. 8 is developing. Currently there are 4 employees and his marketing areas now include Palembang, Jambi, Lampung, Jakarta, Medan, and even export to Malaysia. Songket Palembang owned by Toko Songket Asia is used to fill one of Istana Malaysia interiors.

2. Veil Store "Inna Kerudung"
   Veli store "Inna Kerudung" was started from small business conducted by Ibu Inna Mutmainnati, a banker in BUMN bank, who offered her design to her colleagues

rancangannya kepada rekan-rekan di tempat kerjanya. Rancangan kerudungnya mendapat tanggapan yang cukup baik, sampai akhirnya salah satu rekannya menyarankan agar usaha tersebut dikelola dengan lebih serius. Akhirnya Ibu Inna membuka toko kerudung di Taman Mini Square pada 2008 dan mendapat tanggapan yang cukup baik dari masyarakat. Untuk meningkatkan omset, Ibu Inna mendapat tambahan modal dari PKBL Perum Jamkrindo, sehingga sampai saat ini telah memiliki tambahan toko sebanyak 2 buah yaitu di Taman Mini Square dan Thamrin City.

in her office. Her veil design received a good response, until one of her friends suggested that she had to manage her business to be more serious. Ibu Inna finally opened veil store in Taman Mini Square in 2008, and she received a good response from the society. To increase her profit, Ibu Inna received addition capital from PKBL Perum Jamkrindo, so until now she has two additional stores which are in Taman Mini Square and Thamrin City.

3. Toko Sepatu “Raysshoes”
   Toko sepatu Raysshoes didirikan oleh Bapak Uray Tiar Fahrozi pada 2010, bertempat di Jl. Gusti Hamzah Blok F, Pontianak. Produk sepatu adalah representasi gaya hidup di dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat urban. Tidak heran jika usaha sepatu dapat menjanjikan keuntungan yang memuaskan. Saat ini toko sepatu Raysshoes telah memiliki karyawan tetap sebanyak 2 orang. Wilayah pemasarannya berada di seputar kota Pontianak dan beberapa kabupaten di luar kota Pontianak. Setelah mendapat pinjaman dari PKBL Perum Jamkrindo Kantor Cabang Pontianak, usaha mitra binaan ini semakin lancar dan terus berkembang.

3. Shoe Store “Raysshoes”
   Shore store “raysshoes” was established by Bapak Uray Tiar Fahrozi in 2010, it is located in Jl. Gusti Hamzah Blok F, Pontianak. Shoe product is part of lifestyle as well as community’s life, particularly urban community’s life, thus it can be considered that shoe business promises satisfy profit. Currently shoe store “Raysshoes” has 2 permanent employees, and its marketing areas are around Pontianak and several regencies outside Pontianak. After receiving loan from PKBL Perum Jamkrindo of Pontianak branch office, this development partner business is developing and improving.

4. Toko Batik “Menara Batik”
   Toko Batik Menara Batik dirintis sejak 2008 oleh Ibu Dewi. Toko ini terletak di kawasan Mardi Grass Citra Raya, Cikupa. Karena banyaknya permintaan dari pelanggan, Ibu Dewi yang awalnya hanya berjualan bahan batik, kemudian merambah ke pakaian jadi pria dan wanita serta anak-anak. Untuk mengembangkan usahanya ini, Ibu Dewi mendapat pinjaman dana dari PKBL Perum Jamkrindo Kantor Cabang Jakarta. Setelah mendapat bantuan dana tersebut, usaha Menara Batik semakin berkembang. Karyawan tetapnya berjumlah 2 orang. Kini produk yang dijual meliputi bahan batik, pakaian jadi pria dan wanita, pakaian jadi anak-anak, bahan bordir khas Kota Kudus, dan baju gamis. Perum Jamkrindo ikut mendukung pemasaran produk-produk Menara Batik dengan mengikutsertakannya pada Pameran Ina Craft Tahun 2014.

4. Batik Store “Menara Batik”
   Batik store “Menara Batik” was established since 2008 by Ibu Dewi. Its location is in Mardi Grass Citra Raya, Cikupa area. Ibu Dewi originally only sold batik material, then she sold men, women, and children clothes since there were numerous requests from the customers. To develop her business, Ibu Dewi received loan from PKBL Perum Jamkrindo of Jakarta branch office. After receiving loan, Menara Batik business is now developing. Currently there are 2 permanent employees, and the products sold include batik material, women and men clothes, children clothes, embroidery materials from Kota Kudus and gamis. Perum Jamkrindo supports Menara Batik products marketing by including them in Ina Craft Exhibition 2014.

5. Toko Sepatu dan Tas “The Blitz”
   Toko sepatu dan tas The Blitz dirintis oleh Ibu Wismarni sejak 2003. Awalnya penjualan tas, dompet, sepatu dan sandal ini hanya dipasarkan kepada kerabat dan tetangga saja. Namun dari waktu ke waktu, berbagai macam produk The Blitz semakin diminati dan penjualannya semakin meningkat. Hal ini membuat usahanya menjadi berkembang dan pada akhirnya dapat menyewa kios yang beralamat di Jalan Raya Penggilingan, PGP Lt. 1 Blok B.2 No. 20, Kel. Penggilingan Kec. Cakung, Jakarta Timur. Toko sepatu dan tas The Blitz mendapat pinjaman dana dari Program PKBL Perum Jamkrindo Kantor Cabang Jakarta.

5. Shoe and Bag Store “The Blitz”
   Shoe and Bag Store “The Blitz” is established by Ibu Wismarni since 2003. Originally the bag, wallet, shoe and sandal are only sold to relatives and neighbors. However, from time to time, several products of The Blitz are increasingly in demand and their sales are increasing as well. It makes her business more develop, so she can rent a kiosk in Jalan Raya Penggilingan, PGP Lt. 1 Blok B.2 No. 20, Kel. Penggilingan Kec. Cakung, Jakarta Timur. Shoe and bag store “The Blitz” received loan from PKBL Perum Jamkrindo of Jakarta branch office.

Perkembangan penyaluran program kemitraan Perum Jamkrindo selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2010-2014 adalah:

The development of PKBL Perum Jamkrindo distribution for the last 5 (five) years from 2010-2014 are as follows:

Kanca / Branch	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Jakarta	1.050.000.000	755.000.000	907.000.000	1.030.000.000	1.095.000.000
Bandung	185.000.000	738.878.000	982.978.000	170.000.000	50.000.000
Semarang	240.000.000	834.107.500	999.107.500	275.000.000	510.000.000
Surabaya	320.000.000	401.000.000	1.405.000.000	180.000.000	590.000.000
Makassar	341.000.000	325.000.000	1.245.000.000	235.000.000	230.000.000
Pekanbaru	549.215.118	580.000.000	920.000.000	315.000.000	91.000.000
Palembang	295.000.000	435.000.000	670.000.000	520.000.000	630.000.000
Pontianak	296.500.000	455.000.000	683.000.000	170.000.000	525.000.000
Samarinda	290.000.000	402.500.000	71.600.000	290.000.000	285.000.000
Denpasar	250.000.000	400.000.000	1.185.000.000	50.000.000	320.000.000
Medan	280.000.000	305.000.000	1.326.500.000	280.000.000	360.000.000
Banjarmasin	-	-	-	-	95.000.000
Palangkaraya	-	-	-	-	85.000.000
Mataram	-	-	-	-	-
Kupang	-	-	-	-	96.000.000
Papua	-	-	-	-	80.000.000
Jambi	-	-	-	-	102.000.000
Manado	-	-	-	-	100.000.000
Total	4.096.715.118	5.631.485.500	10.395.185.500	3.515.000.000	5.244.000.000

Realisasi penyaluran dana pembinaan program kemitraan berdasarkan Kantor Cabang Perum Jamkrindo selama 5 (lima) tahun terakhir adalah:

Realization of development fund distribution of partnership program based on branch office of Perum Jamkrindo for the last 5 (five) years are as follows:

Kanca / Branch	2010	2011	2012	2013	2014
Kantor Pusat / Head Office	215.837.500	-	812.318.000	-	146.700.000
Jakarta	113.000.000	195.495.445	54.000.000	-	-
Bandung	59.800.000	52.500.000	9.550.000	7.100.000	-
Semarang	11.750.000	83.100.000	12.500.000	-	-
Surabaya	-	27.649.000	1.500.000	-	-
Makassar	-	-	-	-	-
Pekanbaru	-	-	-	-	-
Palembang	-	-	-	-	34.760.000
Pontianak	-	20.200.000	41.900.000	-	-
Samarinda	-	37.100.000	-	-	-
Denpasar	-	-	-	-	-
Medan	-	-	-	-	-
Banjarmasin	-	-	-	-	-
Palangkaraya	-	-	-	-	-
Mataram	-	-	-	-	-
Kupang	-	-	-	-	-
Papua	-	-	-	-	-
Jambi	-	-	-	-	-
Manado	-	-	-	-	-
Total	400.387.500	416.044.445	931.768.000	7.100.000	181.460.000

Realisasi penyaluran pinjaman program kemitraan berdasarkan sektor selama 5 (lima) tahun terakhir adalah:

Realization of loan distribution for partnership program based on sector for the last 5 (five) years are as follows:

Sektor / Sector	2010	2011	2012	2013	2014
Industri / Industry	930.000.000	596.000.000	485.000.000	330.000.000	840.000.000
Perdagangan / Trading	1.884.715.118	2.684.400.000	3.852.500.000	2.186.000.000	3.051.000.000
Pertanian / Agriculture	40.000.000	891.085.500	4.461.085.500	75.000.000	27.000.000
Peternakan / Farm	70.000.000	145.000.000	290.000.000	150.000.000	40.000.000
Perkebunan / Plantation	-	-	-	35.000.000	85.000.000
Perikanan / Fishery	90.000.000	-	100.000.000	-	-
Jasa / Service	1.082.000.000	1.315.000.000	1.851.000.000	739.000.000	1.201.000.000
Total	4.096.715.118	5.631.485.500	11.039.585.500	3.515.000.000	5.244.000.000

Realisasi penyaluran dana pembinaan program kemitraan berdasarkan sektor selama 5 (lima) tahun terakhir adalah:

Realization of development fund distribution for partnership program based on sector for the last 5 (five) years are as follows:

Sektor / Sector	2010	2011	2012	2013	2014
Industri / Industry	182.937.000	228.394.445	7.750.000	-	-
Perdagangan / Trading	205.700.000	62.550.000	384.018.000	7.100.000	181.460.000
Pertanian / Agriculture	-	125.100.000	540.000.000	-	-
Peternakan / Farm	-	-	-	-	-
Perkebunan / Plantation	-	-	-	-	-
Perikanan / Fishery	-	-	-	-	-
Jasa / Service	11.750.000	-	-	-	-
Total	400.387.000	416.044.445	931.768.000	7.100.000	181.460.000

Sepanjang 2014, Perum Jamkrindo telah menyalurkan dana Program Kemitraan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Throughout 2014, Perum Jamkrindo had distributed partnership program fund as can be seen in the following table:

Penyaluran Dana Pembinaan Program Kemitraan berdasarkan Sektor Tahun 2014.

Development Fund Distribution of Partnership Program based on sector in 2014:

Sektor / Sector	2014
Industri / Industry	-
Perdagangan / Trading	181.460.000
Pertanian / Agriculture	-
Peternakan / Farm	-
Perkebunan / Plantation	-
Perikanan / Fishery	-
Jasa / Service	-
Total	181.460.000

Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan berdasarkan Wilayah Dati I Tahun 2014.

Fund Distribution of Partnership Program based on Dati I Area 2014

Provinsi / Province	2014
DKI Jakarta	1.095.000.000
Banten	-
Jawa Barat / West Java	50.000.000
Jawa Tengah / Central Java	510.000.000
Jawa Timur / East Java	590.000.000
Papua	80.000.000
Sulawesi Utara / North Sulawesi	100.000.000
Sulawesi Selatan / South Sulawesi	230.000.000
Riau	91.000.000

Provinsi / Province	2014
Sumatera Selatan / South Sumatera	630.000.000
Kalimantan Tengah / Central Kalimantan	85.000.000
Kalimantan Barat / West Kalimantan	525.000.000
Kalimantan Selatan / South Kalimantan	95.000.000
Kalimantan Timur / East Kalimantan	285.000.000
Nusa Tenggara Timur / East Nusa Tenggara	96.000.000
Bali	320.000.000
Sumatera Utara / North Sumatera	360.000.000
Nusa Tenggara Barat / West Nusa Tenggara	-
Jambi	102.000.000
Total	5.244.000.000

PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Kebijakan

Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah Kantor Perum Jamkrindo, yang diselenggarakan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Perusahaan. Hal ini dilakukan berdasarkan atas kesadaran Perusahaan akan pentingnya keberadaan masyarakat di sekitar Perusahaan, serta Permen BUMN nomor: Per-08/MBU/2013.

Kegiatan

Program Bina Lingkungan yang dilakukan Perum Jamkrindo pada 2014 adalah:

1. Perum Jamkrindo Peduli Kaum Duafa

   Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1435 H serta membangun jalinan silaturahmi dengan masyarakat, Perum Jamkrindo menunjukkan kepeduliannya dengan mengadakan pembagian sembako gratis kepada kaum dhuafa khususnya di sekitar Perusahaan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Pusat dan seluruh Kantor Cabang Perum Jamkrindo dengan ringkasan sebagai berikut:

   a. Kantor Pusat, Kantor Cabang Jakarta dan Kantor Cabang Jakarta Khusus

      Perum Jamkrindo Kantor Pusat, Kantor Cabang Jakarta dan Kantor Cabang Jakarta Khusus melakukan kegiatan berbagi sembako gratis secara bersamaan. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor

COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM

Policy

Community development program is a social condition empowerment program around Perum Jamkrindo' office area, that is held through the utilization of fund from Company's half of profit. It is conducted based on the Company's awareness on the importance of community's presence around the Company, as well as Ministry of SOE Regulation No: Per-08/MBU/2013.

Activities

Community development program conducted by Perum Jamkrindo in 2014 are as follows:

1. Perum Jamkrindo Cares about Duafa

   To welcome Eid Al-Fithr (Hari Raya Idul Fitri) 1435 H, as well as to build a harmonious relationship with the society, Perum Jamkrindo shows its concern by providing free nine basic foods for dhuafa around the Company. This activity is conducted by Headquarter and all branch offices of Perum Jamkrindo with the description as follows:

   a. Head Office, Branch Office of Jakarta and Branch Office of Special Jakarta

      Head Office, Branch Office of Jakarta and Branch Office of Special Jakarta of Perum Jamkrindo distributed free nine basic foods aid simultaneously. This activity was conducted in Head Office of Perum

Pusat Perum Jamkrindo pada 22 Juli 2014. Total sembako yang dibagikan adalah sebanyak 470 paket.

b. Kantor Cabang Jambi
Kegiatan berbagi sembako gratis di Kantor Cabang Jambi dilaksanakan pada 22 Juli 2014. Sembako yang dibagikan adalah sebanyak 120 paket.

c. Kantor Cabang Palangkaraya
Kegiatan berbagi sembako gratis di Kantor Cabang Palangkaraya dilaksanakan pada 24 Juli 2014. Sembako yang dibagikan adalah sebanyak 200 paket.

d. Kantor Cabang Surabaya
Kegiatan berbagi sembako gratis di Kantor Cabang Surabaya dilaksanakan pada 23 Juli 2014. Sembako yang dibagikan adalah sebanyak 152 paket.

e. Kantor Cabang Pontianak
Kegiatan berbagi sembako gratis di Kantor Cabang Pontianak dilaksanakan pada 15 Juli 2014. Sembako yang dibagikan adalah sebanyak 500 paket.

f. Kantor Cabang Semarang
Kegiatan berbagi sembako gratis di Kantor Cabang Semarang dilaksanakan pada 24 Juli 2014. Sembako yang dibagikan adalah sebanyak 150 paket.

g. Kantor Cabang Lampung
Kegiatan berbagi sembako gratis di Kantor Cabang Lampung dilaksanakan pada 14 Juli 2014. Sembako yang dibagikan adalah sebanyak 300 paket.

h. Kantor Cabang Kupang
Kegiatan berbagi sembako gratis di Kantor Cabang Kupang dilaksanakan pada 21 Juli 2014. Sembako yang dibagikan adalah sebanyak 150 paket.

i. Kantor Cabang Mataram
Kegiatan berbagi sembako gratis di Kantor Cabang Mataram dilaksanakan pada 24 Juli 2014. Sembako yang dibagikan adalah sebanyak 200 paket.

Jamkrindo on July 22, 2014. Total nine basic foods package given are 470 packages.

b. Branch Office of Jambi
The distribution of free nine basic foods aid in branch office of Jambi was conducted on July 22, 2014. Total nine basic foods packages given were 120 packages.

c. Branch Office of Palangkaraya
The distribution of free nine basic foods aid in branch office of Palangkaraya was conducted on July 24, 2014. Total nine basic foods packages given were 120 packages.

d. Branch Office of Surabaya
The distribution of free nine basic foods aid in branch office of Surabaya was conducted on July 23, 2014. Total nine basic foods packages given were 152 packages.

e. Branch Office of Pontianak
The distribution of free nine basic foods aid in branch office of Pontianak was conducted on July 15, 2014. Total nine basic foods pacakages given were 500 packages.

f. Branch Office of Semarang
The distribution of free nine basic foods aid in branch office of Semarang was conducted on July 24, 2014. Total nine basic foods packages given were 150 packages.

g. Branch Office of Lampung
The distribution of free nine basic foods aid in branch office of Lampung was conducted on July 14, 2014. Total nine basic foods packages given were 300 packages.

h. Branch Office of Kupang
The distribution of free nine basic foods aid in branch office of Kupang was conducted on July 21, 2014. Total nine basic foods packages given were 150 packages.

i. Branch Office of Mataram
The distribution of free nine basic foods aid in branch office of Mataram was conducted on July 24, 2014. Total nine basic foods pacakages given were 200 packages.

j. Kantor Cabang Yogyakarta
Kegiatan berbagi sembako gratis di Kantor Cabang Yogyakarta dilaksanakan pada 24 Juli 2014. Sembako yang dibagikan adalah sebanyak 150 paket.

k. Kantor Cabang Banjarmasin
Kegiatan berbagi sembako gratis di Kantor Cabang Banjarmasin dilaksanakan pada 14 Juli 2014. Sembako yang dibagikan adalah sebanyak 150 paket.

l. Kantor Cabang Bandung
Kegiatan berbagi sembako gratis di Kantor Cabang Bandung dilaksanakan pada 24 Juli 2014. Sembako yang dibagikan adalah sebanyak 200 paket.

m. Kantor Cabang Pekanbaru
Kegiatan berbagi sembako gratis di Kantor Cabang Pekanbaru dilaksanakan pada 24 Juli 2014. Sembako yang dibagikan adalah sebanyak 150 paket.

n. Kantor Cabang Medan
Kegiatan berbagi sembako gratis di Kantor Cabang Medan dilaksanakan pada 23 Juli 2014. Sembako yang dibagikan adalah sebanyak 150 paket.

o. Kantor Cabang Papua
Kegiatan berbagi sembako gratis di Kantor Cabang Papua dilaksanakan pada 23 Juli 2014. Sembako yang dibagikan adalah sebanyak 150 paket.

p. Kantor Cabang Palangkaraya
Kegiatan berbagi sembako gratis di Kantor Cabang Palangkaraya dilaksanakan pada 8 Juli 2014. Sembako yang dibagikan adalah sebanyak 175 paket.

q. Kantor Cabang Samarinda
Kegiatan berbagi sembako gratis di Kantor Cabang Samarinda dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2014. Sembako yang dibagikan adalah sebanyak 150 paket.

j. Branch Office of Yogyakarta
The distribution of free nine basic foods aid in branch office of Yogyakarta was conducted on July 24, 2014. Total nine basic foods pacakages given were 150 packages.

k. Branch Office of Banjarmasin
The distribution of free nine basic foods aid in branch office of Banjarmasin was conducted on July 14, 2014. Total nine basic foods pacakages given were 150 packages.

l. Branch Office of Bandung
The distribution of free nine basic foods aid in branch office of Bandung was conducted on July 24, 2014. Total nine basic foods packages given were 200 packages.

m. Branch Office of Pekanbaru
The distribution of free nine basic foods aid in branch office of Pekanbaru was conducted on July 24, 2014. Total nine basic foods packages given were 150 packages.

n. Branch Office of Medan
The distribution of free nine basic foods aid in branch office of Medan was conducted on July 23, 2014. Total nine basic foods packages given were 150 packages.

o. Branch Office of Papua
The distribution of free nine basic foods aid in branch office of Papua was conducted on July 23, 2014. Total nine basic foods packages given were 150 packages.

p. Branch Office of Palangkaraya
The distribution of free nine basic foods aid in branch office of Palangkaraya was conducted on July 8, 2014. Total nine basic foods packages given were 175 packages.

q. Branch Office of Samarinda
The distribution of free nine basic foods aid in branch office of Samarinda was conducted on July 24, 2014. Total nine basic foods packages given were 150 packages.

r. Kantor Cabang Denpasar
Kegiatan berbagi sembako gratis di Kantor Cabang Denpasar dilaksanakan pada 24 Juli 2014. Sembako yang dibagikan adalah sebanyak 150 paket.

2. Perum Jamkrindo Berbagi Kebahagiaan di Hari Raya Idul Adha 1435H
Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1435 H, Perum Jamkrindo mengadakan kegiatan yang merupakan perwujudan peran aktif terhadap kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu yang ada di sekitar Gedung Jamkrindo.

Perayaan Hari Raya Idul Adha 1435 H ini diisi dengan pelaksanaan pemotongan hewan qurban yang terdiri dari 5 (lima) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing yang kemudian dibagikan kepada 450 kepala keluarga. Acara ini merupakan bentuk sinergitas antara manajemen Perum Jamkrindo dengan Sekarya (Serikat Karyawan) dan dana PKBL. Kegiatan tersebut dilakukan pada 7 Oktober 2014.

3. Perum Jamkrindo Peduli Kepada Lingkungan Hidup
Perum Jamkrindo ikut serta dalam kegiatan penanaman 3.000 bibit pohon di sepanjang area Banjir Kanal Timur, Jakarta Timur. Kegiatan tersebut diadakan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan seluruh keluarga besar BUMN. Program ini dilakukan dalam rangka Bakti Sosial Forum Humas BUMN dan rangkaian kegiatan Porseni BUMN 2014. Bibit pohon ini ditanam di sepanjang 4 (empat) kilometer di pinggir Banjir Kanal Timur yang berfungsi untuk memperkuat konstruksi tanah dalam menghadapi aliran air sungai yang deras, dan ditujukan untuk mengatasi masalah banjir di area Banjir Kanal Timur.

Selain itu, dalam rangka menyambut HUT KAHMI ke-48, Perum Jamkrindo turut berpartisipasi pada acara gerak jalan sehat dan penanaman *mangrove*. Acara penanaman *mangrove* dilaksanakan di Kawasan Hutan

r. Branch Office of Denpasar
The distribution of free nine basic foods aid in branch office of Denpasar was conducted on July 24, 2014. Total nine basic foods packages given were 150 packages.

2. Perum Jamkrindo Shares Happiness in Hari Raya Idul Adha 1435 H
To celebrate Hari Raya Idul Adha 1435 H, Perum Jamkrindo held an activity which is a form of Company's active role in increasing welfare of underprivileged people around Jamkrindo Building.

Celebration of Hari Raya Idul Adha 1435 H was filled with Qurban slaughterhouses which consisted of 5 (five) cows, 2 (two) goats that later would be distributed to 450 families. This is a form of synergy between management of Perum Jamkrindo with Sekarya (Serikat Karyawan) and PKBL. This activity was conducted on October 7, 2014.

3. Perum Jamkrindo Cares about the Environment
Perum Jamkrindo contributed in the activity of cultivation 3.000 tree seeds around Banjir Kanal Timur area, Jakarta Timur. The activity was held by Ministry of BUMN and all BUMN big families. The program was conducted for Bakti Sosial Forum Humas BUMN and Porseni BUMN 2014. These tree seeds were planted throughout 4 (four) kilometers on the edge of Banjir Kanal Timur in which its function is to strengthen land constructtion in facing heavy flow of river water and handle flood problem in Banjir Kanal Timur area.

Besides, to welcome the 48th anniversary of KAHMI, Perum Jamkrindo participated in healthy hike event and mangrove cultivation. This mangrove cultivation was held in Kawasan Hutan Kapuk, Pantai Indah Kapuk,

Kapuk, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada 14 September 2014. Penanaman *mangrove* di kawasan hutan kapuk ini selain berfungsi untuk melindungi dari abrasi dan dampak lingkungan, juga bisa menjadi tujuan wisata.

Jakarta Utara on September 14, 2014. Mangrove cultivation in Kawasan Hutan Kpuk did not only function to protect the area from abrasion and environment impact, but also to be a tourist destination.

4. Perum Jamkrindo Peduli kepada Sesama
   Perum Jamkrindo bekerja sama dengan Persatuan Istri Karyawan/Karyawati Perum Jamkrindo mengadakan kegiatan bakti sosial dengan mengunjungi Panti Asuhan Alqi, Bogor pada 10 Oktober 2014. Kegiatan bakti sosial yang dilakukan adalah memberikan santunan kepada anak-anak di panti asuhan, berupa sembako, perlengkapan sholat, alat-alat tulis dan *goody bag*. Selain itu, Perum Jamkrindo juga memberikan bahan bangunan kepada pihak panti asuhan untuk menunjang pembangunan panti yang sedang diadakan dengan harapan dapat memberi manfaat yang berkelanjutan dan berguna bagi mereka.

4. Perum Jamkrindo Cares for Each Others
   Perum Jamkrindo cooperating with Persatuan Istri Karyawan/Karyawati Perum Jamkrindo held social activity by visiting Panti Asuhan Alqi, Bogor on October 10, 2014. Social activity conducted was providing donations, which are nine basic foods, prayer equipments, stationeries, and goody bag, for children in orphanage. In addition, Perum Jamkrindo also provided building materials to support the building of orphanage, it was expected to provide a sustainable and useful benefit for them.

5. Perum Jamkrindo Peduli kepada Korban Banjir
   Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban banjir yang melanda wilayah DKI Jakarta, Perum Jamkrindo memberikan bantuan sebesar Rp200.000.000,- melalui PMI Provinsi Jakarta. Bantuan secara simbolis diserahkan oleh Direktur Keuangan dan Investasi, Ignatius Rusdonobanu dan Direktur Operasi Jamkrindo, Herry Sidharta, kepada ketua PMI Provinsi DKI Jakarta, Rini Sutiyoso, di Gedung Jamkrindo, Senin 27 Januari 2014.

   Selain untuk korban banjir di wilayah DKI Jakarta, Perum Jamkrindo juga memberikan bantuan untuk korban banjir di wilayah Banten melalui Perum Jamkrindo Cabang DKI Jakarta sebesar Rp50 juta. Sedangkan untuk korban banjir Manado, penyaluran bantuan melalui Perum Jamkrindo Cabang Manado sebesar Rp50 juta, untuk korban bencana Gunung Sinabung, penyaluran bantuan melalui Perum Jamkrindo Cabang Medan sebesar Rp48 juta.

5. Perum Jamkrindo Cares about Flood Victims
   As a form of Company's concern to flood victims in DKI Jakart area, Perum Jamkrindo provided aid which amounted to Rp200,000,000,- through Indonesian Red Cross Society (PMI) of Jakarta province. The aid was symbolically given by Director of Finance and Investment, Ignatius Rusdonobanu, and Director of Operation, Herry Sidharta, to Head of PMI of DKI Jakarta province, Rini Sutiyoso, in Jamkrindo building, on Monday, January 27, 2014.

   Besides for flood victims in DKI Jakarta area, Perum Jamkrindo also provided aid for flood victims in Banten area through Perum Jamkrindo Branch of DKI Jakarta which amounted to Rp50 million. While for flood victims in Manado, aid distribution given through Perum Jamkrindo Branch of Manado was Rp50 million, and for disaster victims of Gunung Sinabung, aid distribution given through Perum Jamkrindo Branch of Medan was Rp48 million.

Realisasi Penyaluran Program Bina Lingkungan berdasarkan Kantor Cabang Perum Jamkrindo selama 5 (lima) tahun terakhir adalah:

Distributions realization of Community Development Program based on Perum Jamkrindo Branch Office for the last 5 (five) years are as follows:

Kanca / Branch	2010	2011	2012	2013	2014
Kantor Pusat / Head Office	644.897.000	448.219.630	1.467.064.150	2.317.674.696	146.250.000
Jakarta	43.798.000	105.000.000	233.700.000	276.025.000	214.409.560
Bandung	94.000.000	144.940.000	38.000.000	557.549.000	278.900.000
Semarang	19.535.000	221.138.000	108.026.544	801.115.533	294.182.500
Surabaya	88.000.000	148.834.313	71.126.000	640.427.115	236.386.800
Makassar	37.000.000	98.792.000	66.975.000	647.411.200	267.917.450
Pekanbaru	85.745.000	151.000.000	315.000.000	141.469.000	-
Palembang	78.444.000	75.566.000	99.250.000	226.032.500	198.296.000
Pontianak	40.500.000	109.750.000	82.289.000	173.876.560	152.481.600
Samarinda	15.000.000	40.611.458	90.000.000	236.909.250	60.707.000
Denpasar	42.300.000	99.500.000	93.600.000	166.844.919	46.000.000
Medan	75.083.960	112.346.250	218.450.000	406.519.500	130.990.000
Banjarmasin	-	-	-	-	41.208.100
Palangkaraya	-	-	-	-	-
Mataram	-	-	-	-	24.821.550
Kupang	-	-	-	60.000.000	88.413.200
Papua	-	-	-	-	22.500.000
Jambi	-	-	-	-	-
Manado	-	-	-	-	-
Total	1.264.302.960	1.755.697.651	2.883.480.694	6.651.854.273	2.203.463.760

Realisasi penyaluran Program Bina Lingkungan berdasarkan Wilayah adalah:

Distributions realization of Community Development Program based on areas are as follows:

Provinsi / Province	2014
DKI Jakarta	360.659.560
Banten	-
Jawa Barat / West Java	278.900.000
Jawa Tengah / Central Java	294.182.500
Jawa Timur / East Java	236.386.800
Papua	22.500.000
Sulawesi Utara / North Sulawesi	-
Sulawesi Selatan / South Sulawesi	267.917.450
Riau	-
Sumatera Selatan / South Sumatera	198.296.000
Kalimantan Tengah / Central Kalimantan	-
Kalimantan Barat / West Kalimantan	152.481.600
Kalimantan Selatan / South Kalimantan	41.208.100
Kalimantan Timur / East Kalimantan	60.707.000

Provinsi / Province	2014
Nusa Tenggara Timur / East Nusa Tenggara	88.413.200
Bali	46.000.000
Sumatera Utara / North Sumatera	130.990.000
Nusa Tenggara Barat / West Nusa Tenggara	24.821.550
Jambi	-
Total	2.203.463.760

Realisasi Penyaluran Program Bina Lingkungan berdasarkan jenis bantuan selama 5 (lima) tahun terakhir adalah:

Distributions realization of Community Development Program based on types of aid for the last 5 (five) years are as follows:

Jenis Bantuan / Types of Aid	2010	2011	2012	2013	2014
Bencana Alam / Disaster	182.000.000	-	95.276.544	306.533.181	90.000.000
Pendidikan & Pelatihan / Education & Training	216.377.000	500.810.000	768.176.650	2.066.375.665	559.336.500
Peningkatan Kesehatan / Health Improvement	64.050.000	292.450.458	287.739.000	476.298.325	346.123.150
Prasarana & Sarana Umum / Public Infrastructure and Facilities	68.832.000	169.537.563	237.496.000	1.859.442.052	226.331.600
Sarana Ibadah / Place of Worship	276.043.960	558.904.000	565.367.500	1.058.870.000	697.408.700
Pelestarian Alam / Nature Conservation	7.000.000	183.995.630	345.725.000	298.650.000	-
Sosial Kemasyarakatan / Social Community	-	-	-	585.685.050	284.263.810
BUMN Peduli / BUMN Care	450.000.000	50.000.000	350.000.000	-	
Total	1.264.302.960	1.755.697.651	2.649.780.694	6.651.854.273	2.203.463.760

Selama 2014, Perum Jamkrindo telah menyalurkan bantuan Program Bina Lingkungan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

In 2014, Perum Jamkrindo had distributed aid of Community Development Program as can be seen in the following table:

Jenis Bantuan / Types of Aid	2014
Bencana Alam / Disaster	90.000.000
Pendidikan & Pelatihan / Education & Training	559.336.500
Peningkatan Kesehatan / Health Improvement	346.123.150
Prasarana & Sarana Umum / public infrastructure and facilities	226.331.600
Sarana Ibadah / Place of Worship	697.408.700
Pelestarian Alam / Nature Conservation	-
Sosial Kemasyarakatan / Social Community	284.263.810
BUMN Peduli / BUMN Care	-
Total	2.203.463.760

Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK References

Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Financial Services Authority Reference				
KRITERIA / CRITERIA		**PENJELASAN** / DESCRIPTION		**HALAMAN** / PAGE
I. Umum / General				
Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris.	Annual Report is presented in good and correct Indonesian and it is recommended to present the report also in English.			√
Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca.	Annual report is printed in good quality and use type and font so that the text is easy to read.			√
Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas.	Annual report should state clearly the identity of the company.	Nama Perusahaan dan Tahun Annual Report ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; 4. Setiap halaman	Name of company and year of the annual report is placed on: 1. The front cover; 2. Side; 3. Back Cover; 4. Each page	√
Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan	Annual Report is presented in the company's website			√
II. Ikhtisar Data Keuangan Penting / Financial data Highlights				
Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.	Financial information in comparative form over a period of 3 financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 years.	Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha 2. Laba (rugi) 3. Total laba (rugi) komprehensif 4. Laba (rugi) per saham	The information includes: 1. Sales/income from business 2. Gross profit (loss) 3. Comprehensive profit (loss) 4. Profit (loss) per share	28-29
Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.	Financial position information in comparative form over a period of 3 financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 years.	Informasi memuat antara lain: 1. Modal kerja bersih 2. Jumlah investasi pada entitas asosiasi dan/ atau joint venture 3. Jumlah aset 4. Jumlah liabilitas 5. Jumlah ekuitas	The information includes: 1. Net operating capital 2. Total investment in associate entities and/or joint venture 3. Total Assets 4. Total Liabilities 5. Total equities	27
Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.	Financial ratio in comparative form over a period of 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less then 3 (three) years.	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.	Information includes 5 (five) financial ratios that are common and relevant to the industry the company.	29
Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik.	Share price information in the form of chart and table.	Informasi dalam bentuk tabel dan grafik yang memuat: 1. Jumlah saham yang beredar; 2. Kapitalisasi pasar; 3. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan 4. Volume perdagangan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada).	Information in the form of chart and table includes: 1. Total outstanding shares 2. Market capitalization 3. The highest, lowest, and closing price of share 4. Trading volume on a quarterly basis during the last 2 (two) fiscal years.	96
Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.	Information on outstanding bond, sukuk or convertible bond within the las 2 (two) fiscal years.	Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding) 2. Tingkat bunga/imbalan 3. Tanggal jatuh tempo 4. Peringkat obligasi/sukuk	The information contains: 1. The number of bonds/sukuk/outstanding bonds 2. The interest *Rate* / exchange 3. Date of maturity 4. The rating of bonds / sukuk	96
III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi / Board of Commissioners and Board of Directors Report				
Laporan Dewan Komisaris	Board of Commissioners' Report	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi. 3. Perubahan komposisi Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada)	Contains the following items: 1. Assessment on the performance of the Board of Directors in managing the company. 2. View on the prospects of the company's business as established by the Board of Directors. 3. Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any).	38-42
Laporan Direksi	Board of Directors' Report	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan 2. Gambaran tentang prospek usaha 3. Penerapan tata kelola perusahaan 4. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada)	Contains the following items: 1. Analysis of company's performance, encompassing strategic policies, comparison between achievement of results and targets and challenges faced by the company 2. Description of business outlooks 3. The implementation of good corporate governance 4. Changes in the composition of the Board of Directors (if any)	44-52

Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Financial Services Authority Reference				
KRITERIA / CRITERIA		**PENJELASAN** / DESCRIPTION		**HALAMAN** / PAGE
Tanda tangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Signature of members of the Board of Directors and Board of Commissioners	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri 2. Pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan. 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau: penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan	Contains the following items: 1. Signatures are set on a separate page. 2. Statement that the Board of Directors and the Board of Commissioners are fully responsible for the accuracy of the annual report. 3. Signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors, stating their names and titles/positions. 4. A written explanation in a separate letter from each member of the Board of Commissioners or Board of Directors who refuses to sign the annual report, or: written explanation in a separate letter from the other members in the event that there is no written explanation provided by the said member.	54-55
IV. Profil Perusahaan / Company Profile				
Nama dan alamat lengkap perusahaan	Name and address of the Company	Informasi memuat antara lain nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website	Information on name and address, zip code, telephone and or facsimile, email, website.	58
Riwayat singkat perusahaan	Brief history of the company	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama perusahaan (jika ada).	Includes date/year of establishment, name, and change in the company name (if any)	59-60
Bidang usaha	Line of Business	Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; dan 2. Penjelasan mengenai produk dan/atau jasa yang dihasilkan	Description about: 1. Line of business based on the latest articles of association; and 2. Description of products/services	61-65
Struktur organisasi	Organizational Structure	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi	In the form of a chart, giving the names and titles at the least until one level below the Board of Directors.	71-75
Visi dan misi perusahaan	Company Vision and Mission	Mencakup: 1. visi perusahaan; 2. misi perusahaan; dan 3. keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris	Including: 1. Corporate vision 2. Mission; and 3. Statement that the vision and mission has been approved by the Board of Directors/ Board of Commissioners	66
Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris	Identity and brief curriculum vitae of the members of the Board of Commissioners;	Informasi memuat antara lain: 1. Nama 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain) 3. Umur 4. Pendidikan 5. Pengalaman kerja 6. Tanggal penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris	The information should contain: 1. Name 2. Position (including position in other companies/institutions) 3. Age 4. Education 5. Working experience 6. The first appointment date as member of Board of Commissioners	76-80
Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi	Identity and brief curriculum vitae of the members of the Board of Directors;	Informasi memuat antara lain: 1. Nama 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain) 3. Umur 4. Pendidikan 5. Pengalaman kerja 6. Tanggal penunjukan pertama kali sebagai anggota Direksi	The information should contain: 1. Name 2. Position (including position in other companies/institutions) 3. Age 4. Education 5. Working experience 6. The first appointment date as member of Board of Directors	84-93
Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan)	Number of employees (comparative in 2 years) and description of competence building (for example: education and training of employees)	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan 3. Pelatihan karyawan yang telah dilakukan dengan mencerminkan adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan 4. Biaya yang telah dikeluarkan	The information should contain: 1. The number of employees for each level of the organization. 2. The number of employees for each level of education 3. Training of employee that has been and will be conducted 4. Availability of equal opportunity to all employees	108-111
Komposisi pemegang saham	Composition of shareholders	Mencakup antara lain: 1. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham 2. Nama Direktur dan Komisaris yang memiliki saham 3. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%,dan persentase kepemilikannya	Should include: 1. Names of shareholders having 5% or more shares. 2. Names of Directors and Commissioners owning shares 3. Public shareholders having respective share ownership of less than 5% and its percentage	270
Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi	List of subsidiaries and/or affiliated companies	Informasi memuat antara lain : 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi 2. Persentase kepemilikan saham 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/ atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi)	The information should include: 1. Name of subsidiaries/affiliated companies 2. Percentage of share ownership 3. Information on the line of business of subsidiaries and/or associate entities 4. Explanation regarding the operational status of the subsidiary or affiliated company (already operating or not yet operating)	98-101

Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Financial Services Authority Reference				
KRITERIA / CRITERIA		**PENJELASAN** / DESCRIPTION		**HALAMAN** / PAGE
Struktur grup perusahaan	Structure of company's group	Struktur grup perusahaan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan *special purpose vehicle* (SPV), atau pernyataan tidak memiliki grup	Structure of company's group describing subsidiaries, associate entities, joint venture, and special purpose vehicle (SPV), or statement of having no group.	N/A
Kronologis pencatatan saham	Share-listing chronology	Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan saham 2. Jenis tindakan korporasi (*corporate action*) yang menyebabkan perubahan jumlah saham 3. Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku 4. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan	Includes: 1. Share-listing chronology 2. Types of corporate action causing changes in the number of shares 3. Changes in the number of shares from the beginning of listing up to the end of the financial year 4. Name of Stock Exchange where the company's shares are listed	96
Kronologis pencatatan efek lainnya;	Other securities listing chronology	Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan efek lainnya 2. Jenis tindakan korporasi (*corporate action*) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya 3. Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku 4. Nama Bursa dimana efek lainnya dicatatkan 5. Peringkat efek	Includes: 1. Other securities listing chronology 2. Types of corporate action causing changes in the number of securities 3. Changes in the number of securities from the initial listing up to the end of the financial year 4. Name of Stock Exchange where the company's securities are listed 5. Rating of the securities	96
Nama dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal	Name and address of institution and or profession supporting the capital market	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik 3. Nama dan alamat Perusahaan Pemeringkat Efek	The information contains: 1. Name and address of BAE 2. Name and address of Public Accounting Firm 3. Name and address of share registrar	97
Penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional	Awards and/or certificates received by the company, both at national and international level	Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi 2. Tahun perolehan 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi)	Information should include: 1. Name of the awards and/or certification 2. Year when awards are received 3. Institution presenting the awards/ceritication 4. Period of validity (for certification)	35
Nama dan alamat entitas anak dan/ atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)	Name and address of subsidiaries and/or branch office or representative office (if any)			98-101
V. Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan / Managament Discussion and Analysis				
Tinjauan operasi per segmen usaha	Operational review per business segment	Memuat uraian mengenai: 1. Produksi/kegiatan usaha; 2. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; 3. Penjualan/pendapatan usaha; 4. Profitabilitas; untuk masing-masing segmen usaha yang diungkapkan dalam laporan keuangan (jika ada)	Includes description of: 1. Products/line of business; 2. Increase/decrease in production capacity 3. Sales/operating income 4. Profitability For each business segment disclosed in the financial statement (if any)	164-165
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	Description of company's financial performance	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas 3. Ekuitas 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi), pendapatan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif 5. Arus kas	An analysis of financial performance which includes a comparison between the financial performance of the current year and that of the previous year (in the form of narration and tables) concerning: 1. Current assets, non-current assets, and amount of assets 2. Short term and long term liabilities and total liabilities 3. Equity 4. Sales/operating income, expenses and profit (loss), other comprehensive revenue, and total comprehensive profit (loss) 5. Cash flow	188-197
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan	Discussion and analysis on the capacity to pay debts and the company's level of receivables collectability by presenting relevant ratio calculation	Penjelasan tentang : 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang 2. Tingkat kolektibilitas piutang	Explanation on: 1. Capacity to pay short term and long term debts 2. Receivables collectability level	202-203
Bahasan tentang struktur modal (*capital structure*), dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure policy*)	Discussion on capital structure, management policies on capital structure	Penjelasan atas: 1. Struktur modal (*capital structure*), dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies)	Explanation on: 1. Capital structure, and 2. Capital structure policies	203-204
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal	Discussion on material ties for the investment of capital goods	Penjelasan tentang: 1. Tujuan dari ikatan tersebut 2. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut 3. Mata uang yang menjadi denominasi 4. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal, agar diungkapkan	Explanation on: 1. The purpose of the ties 2. Fund resources expected to fulfill the said ties 3. Currency of denomination 4. Steps taken by the company to protect the position of related currency against risks. Notes: if the company does not have tie related to investment of capital goods, the information should be disclosed.	204
Jika laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan/pendapatan bersih, maka berikan bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan dengan jumlah barang atau jasa yang dijual, dan/atau adanya produk atau jasa baru.	If the financial statement discloses a material increase or decrease in the sales or net income, an explanation should be disclosed concerning the extent to which such changes can be linked to the amount of goods or service offered and/or new products/services.	Penjelasan mengenai: 1. Besaran peningkatan/penurunan penjualan atau pendapatan bersih 2. Faktor penyebab peningkatan/penurunan material dari penjualan atau pendapatan bersih yang dikaitkan dengan jumlah barang atau jasa yang dijual, dan/atau adanya produk atau jasa baru.	Description of: 1. Amount of an increase/decrease of sales/net income 2. Factors causing the material increase/ decrease from sales or net income related to total goods or services and or new products/ services.	198

Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Financial Services Authority Reference				
KRITERIA / CRITERIA		PENJELASAN / DESCRIPTION		HALAMAN / PAGE
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, struktur permodalan, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan	Information on the comparison between target set at the beginning of the fiscal year and the realization and target or projection for the next year concerning revenue, profit, capital stricter, and others considered important for the company.	Informasi memuat antara lain: 1. perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi) 2. target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam satu tahun mendatang	Information should include: 1. Comparison between target of the beginning of the year and the realization 2. Target or projection for the next year	198-201
Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan	Information and material fact subsequent to the date of accountant	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan	Description of important events after the date of the accountant's report, including the effects on the performance and business risk in the future Note: if there is no important event after the date of the accountant report, such information should be disclosed	204
Uraian tentang prospek usaha perusahaan	Description of the company's business prospects	Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya	Description of the company's prospects related to overall industry and economy, complete with quantitative data and reliable sources	214-216
Uraian tentang aspek pemasaran	Description of marketing aspects	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar	Description of marketing aspect of products and/or services, such as marketing strategy and market share	209-214
Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir	Description on dividend policy and amount of cash dividend per share and amount of dividend per year published/ paid for the last 2 (two) financial years.	Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah dividen kas 2. Jumlah dividen kas per saham 3. *Payout ratio* untuk masing-masing tahun Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya	Information includes: 1. Total cash dividend 2. Total cash dividend per year 3. Payout ratio for each year Notes: if there is no dividend distribution, the reason should be disclosed	204-205
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	Realization of fund utilization from public offering (should the company be required to submit the report of fund utilization)	Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana, 2. Rencana penggunaan dana, 3. Rincian penggunaan dana, 4. Saldo dana, dan 5. Tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana (jika ada)	The information should include: 1. total funds obtained, 2. budget plan, 3. details of budget plan, 4. balance, and 5. Date of approval from General Meeting of Shareholders regarding the changes in fund utilization (if any)	205
Informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi atau restrukturisasi utang/ modal.	Material information concerning investment, expansion, divestment, consolidation/ merger, acquisition or debt/ capital restructuring.	Memuat uraian mengenai: 1. Tujuan dilakukannya transaksi; 2. Nilai transaksi atau jumlah yg direstrukturisasi; 3. Sumber dana. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan	The information should include 1. The purpose of transaction 2. Transaction value or number of transaction 3. Fund resource Note: If there is no such transaction, the information should be disclosed	205-206
Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi.	Transaction information material conflict of interest and/ or transactions with affiliated parties.	Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode berjalan; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan	The information should include: 1. Name of the parties involved in the transactions and related affiliation 2. Explanation on fairness of transaction 3. Reason for transaction 4. Realization of transaction within the period 5. Corporate policy related to review mechanism of the transaction; and 6. Compliance to provisions and concerned regulation Note: if there is no such transaction, such information should be disclosed	207
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan	Description on changes in regulation having significant effect on the company	Uraian memuat antara lain: perubahan peraturan perundang-undangan dan dampaknya terhadap perusahaan Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan, agar diungkapkan	Description should include: changes in the regulation and its effect on the company Note: if there is no change in the regulation having significant effect on the company, such information should be disclosed	207
Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi	Description on changes in the accounting policy	Uraian memuat antara lain: perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi, agar diungkapkan	Description includes changes in accounting policy, its reasons and impacts on financial report Notes: if there is no change in accounting policy, such information should be disclosed	207
VI. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik / Good Corporate Governance				
Uraian Dewan Komisaris	Description of Board of Commissioners	Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris 2. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris 4. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam pertemuan 5. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris 6. Pengungkapan mengenai *Board Charter* (pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris)	Description includes: 1. Descripiton of responsibilities of Board of Commissioners 2. Disclosure of procedures of determining remuneration 3. Remuneration structure that represents remuneration component and amount per component for each member of Board of Commissioners 4. Meeting frequency and attendance level of Board of Commissioners 5. Training programs to increase the competency of Board of Commissioners 6. Disclosure of Board Charter (regulation of Board of Commissioners)	244-248
Uraian Direksi	Description of Board of Directors	Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi 2. Frekuensi pertemuan 3. Tingkat kehadiran anggota direksi dalam pertemuan 4. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi direksi 5. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi)	Description includes: 1. Scope of works and responsibility of each member of the Board of Diretors 2. Meeting frequency 3. Attendance level of each member of the Board 4. Training programs for improving the competence of the Board 5. Disclosure on Board Charter (regulation of Board of Directors)	248-266

Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Financial Services Authority Reference				
KRITERIA / CRITERIA		**PENJELASAN** / DESCRIPTION		**HALAMAN** / PAGE
Assessment terhadap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi	Assessment on Board of Commissioners and Board of Directors	Mencakup antara lain: 1. Proses pelaksanaan *assessment* atas kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi 2. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan *assessment* atas kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi 3. Pihak yang melakukan *assessment*	Includes: 1. Assessment on performance of Board of Commissioners and/or Board of Directors' performance 2. Criteria used in the assessment process 3. Parties conducting assessment	267-269
Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi	Description on remuneration policies for Board of Directors	Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi 2. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Direksi 3. Pengungkapan indikator kinerja untuk mengukur *performance* Direksi	Includes: 1. Disclosure of procedure of determining remuneration 2. Remuneration structure which shows type and total short term and long term returns, post employment, and other long term kinds of remuneration for each member of the Board of Directors 3. Disclosure of performance indicator to assess the performance of the Board of Directors.	264
Informasi mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu	Information on the Majority and Controlling Shareholders, direct and indirectly, and the individual shareholder	Dalam bentuk skema atau diagram	In the form of scheme or diagram	270
Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali	Disclosure of affiliation among Board of Directors, Board of Commissioners, and Majority and/or Controlling Shareholders	Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan	Include: 1. Affiliation among internal members of the Board of Directors 2. Affiliation between the Board of Directors and the Board of Commissioners 3. Affiliation between the member of the Board of Directors and Majority and/or Controlling Shareholders 4. Affiliation among internal members of the Board of Commissioners 5. Affiliation between the member of the Board of Commissioners and Majority and/or Controlling Shareholders Note: if there is no such transaction, such information should be disclosed	270
Komite Audit	Audit Committee	Mencakup antara lain: 1. Nama dan jabatan anggota Komite Audit 2. Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota Komite Audit 3. Independensi anggota Komite Audit 4. Uraian tugas dan tanggung jawab 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite Audit	Includes: 1. Name and position of each member of Audit Committee 2. Educational background and working experience of Audit Committee member 3. Independency of Audit Committee member 4. Description of roles and responsibilities 5. Brief report of the implementation of Audit Committee activity 6. Meeting frequency and attendance level of Audit Committee	270-275
Komite Nominasi dan Remunerasi	Nomination and Remuneration Committee	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Komite Nominasi dan/atau Remunerasi 2. Independensi anggota Komite Nominasi dan/atau Remunerasi 3. Uraian tugas dan tanggung jawab 4. Uraian pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan/atau Remunerasi 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite Nominasi dan/atau Remunerasi	Includes: 1. Name, position, and brief curriculum vitae of member of Remuneration and/or Nomination Committee 2. Independency of Remuneration and/or Nomination Committee member 3. Description of roles and responsibilities 4. Description of the implementation of Remuneration and/or Nomination Committee's activity 5. Meeting frequency and attendance level of Remuneration and/or Nomination Committee	N/A
Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan	Other committees under the Board of Commissioners	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain 2. Independensi anggota komite lain 3. Uraian tugas dan tanggung jawab 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain	Includes: 1. Name, position, and brief curriculum vitae of other committees 2. Independency of other committee member 3. Description of roles and responsibilities 4. Description of the implementation of other committee's activity 5. Meeting frequency and attendance level of other committees	270-281
Uraian tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan	Description on roles and functions of corporate secretary	Mencakup antara lain: 1. Nama dan riwayat jabatan singkat Sekretaris Perusahaan 2. Uraian pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan	Includes: 1. Name and professional record of Corporate Secretary 2. Description on the implementation of Corporate Secretary's duties	305-312
Uraian mengenai unit audit internal	Description on internal audit unit	Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit Audit Internal 2. Jumlah pegawai (Audit Internal) pada unit audit internal 3. Kualifikasi/sertifikasi sebagai profesi Audit Internal 4. Kedudukan unit Audit Internal dalam struktur perusahaan 5. Uraian pelaksanaan tugas 6. Pihak yang mengangkat/memberhentikan ketua unit Audit Internal	Includes: 1. Name of head of Internal Audit Unit 2. Number of employees (Internal Auditor) within Internal Audit Unit 3. Qualification/certification as professional Internal Audit 4. Position of Internal Audit Unit in the company structure 5. Description of duty implementation 6. Parties appointing/dismissing head of Internal Audit Unit	312-320
Akuntan Perseroan	Company accountant	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah periode akuntan telah melakukan audit laporan keuangan tahunan 2. Jumlah periode Kantor Akuntan Publik telah melakukan audit laporan keuangan tahunan 3. Besarnya *fee* untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik 4. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa audit laporan keuangan tahunan Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan	Information includes: 1. Total period when the accountant has audited the yearly financial statements 2. Total period when the Public Accounting Firm has audited yearly financial statements 3. The amount of fee for each service given by the public accountant 4. Other service given by the accountant other than audit for financial reports Note: if there is no such transaction, such information should be disclosed	323-435

Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Financial Services Authority Reference				
KRITERIA / CRITERIA		PENJELASAN / DESCRIPTION		HALAMAN / PAGE
Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan	Description on risk management	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko 2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut	Includes: 1. Explanation on risk management system 2. Explanation on evaluation of risk management system effectiveness 3. Explanation on risks posed to the company 4. Efforts to managae such risks	289-303
Uraian mengenai sistem pengendalian internal	Description on internal control system	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional/COSO (*control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring activities*) 3. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem pengendalian intern	Includes: 1. Brief explanation on internal control system, including financial and operational control 2. Explanation of the conformity of internal control system to the internationally-recognized framework/COSO (control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring activities) 3. Explanation of the evaluation on the effectiveness of internal control system.	321-323
Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan lingkungan hidup	Description on corporate social responsibility program that relates to environment	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan, 2. Kegiatan yang dilakukan, dan 3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, dan lain-lain 4. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki	Includes: 1. Policies, 2. Activities, and 3. Financial impacts from the environmental programs that relates the company's operational activity, such as the use or eco-friendly and recyclable material, energy saving, waste management, and others 4. Certification for environmental programs	355-361
Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja	Explanation on corporate social responsibility related to employment, occupational health and safety	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan, 2. Kegiatan yang dilakukan, dan 3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat *turnover* karyawan, tingkat kecelakaan kerja, dan lain-lain	Includes: 1. Policies, 2. Activities, and 3. Financial impacts from the activities related to employment and occupational health and safety such as gender equality, facilities for safety, employee turnover level, accident at work Rate, etc	N/A
Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan	Explanation on corporate social responsibility related to social and community development	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan, 2. Kegiatan yang dilakukan, dan 3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain.	Includes: 1. Policies, 2. Activities, and 3. Financial impacts from the activities related to social and community development programs, such as the empowerment of local manpower and society in the vicinity of the company, the improvement of social facilities and infrastructure, donation, others.	349-355
Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen	Explanation on corporate social responsibility related to responsibility to customers	Mencakup antara lain: 1. Kebijakan, 2. Kegiatan yang dilakukan, dan 3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain	Includes: 1. Policies, 2. Activities, and 3. Financial impacts from the activities related to product reliability, such as aspects of customer health and safety, product information, facilities, number of customer complaint management, etc	N/A
Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada periode laporan tahunan	Litigation faced by the company, subsidiaries, members of Board of Diretors and/or members of Board of Commissioners for the period	Mencakup antara lain: 1. pokok perkara/gugatan 2. status penyelesaian perkara/gugatan 3. pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan 4. sanksi administrasi yang dikenakan kepada entitas, anggota Direksi dan Dewan Komisaris, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi) Catatan: dalam hal tidak berperkara, agar diungkapkan	Includes: 1. Material of the case/claim 2. Status of settlement of the case/claim 3. Potential impacts on the company 4. Administrative sactions imposed to the entity, members of the Board of Directors and Board of Commissioners, which is imposed by the authorities concerned (capital market, banking, etc) for the last financial year (including statements of having no administrative sanction, if any) Note: if there is no litigation, such information should be disclosed	326
Akses informasi dan data perusahaan	Information access and corporate data	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui *website* (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya	Description on the availabililty of access to corporate information and data for public, such as through website (in Bahasa and English), mass media, mailing list, bulletin, meeting with analysts, etc.	327-330
Bahasan mengenai kode etik	Description on code of conduct	Memuat uraian antara lain: 1. Isi kode etik 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi 3. Upaya dalam penerapan dan penegakannya 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (*corporate culture*) yang dimiliki perusahaan	Includes: 1. Content of code of conduct 2. Disclosure that code of conduct prevails to all organizational levels 3. Efforts in its implementation and enforcement 4. Statement of corporate culture owned by the company	330-338
Pengungkapan mengenai *whistleblowing system*	Disclosure on whistleblowing system	Memuat uraian tentang mekanisme *whistleblowing* system antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran 2. Perlindungan bagi whistleblower 3. Penanganan pengaduan 4. Pihak yang mengelola pengaduan 5. Hasil dari penanganan pengaduan	Includes description on whistleblowing system such as 1. Submission of violation reports 2. Protection for the whistleblowers 3. Complaint management 4. Parties managing the complaint 5. Results from the complain handling	338-344

Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Financial Services Authority Reference				
KRITERIA / CRITERIA		**PENJELASAN** / DESCRIPTION		**HALAMAN** / PAGE
VII. Informasi Keuangan / Financial Information				
Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas laporan keuangan	Statement by the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the responsibility of financial reports	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang tanggung jawab atas laporan keuangan	Conformity to the regulation applied concerning the responsibility on the financial statements	Laporan Keuangan Konsolidasi/ Consolidated Financial Statements
Opini auditor independen atas laporan keuangan	Opinion of independent auditor on the financial reports			Laporan Keuangan Konsolidasi/ Consolidated Financial Statements
Deskripsi auditor independen di opini	Description of the independent auditor in the opinion	Deskripsi memuat tentang: 1. Nama & tanda tangan 2. Tanggal Laporan Audit 3. No. ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik	Description includes: 1. Name & signature 2. Date of Audit Report 3. PAF and Public Accountant license	Laporan Keuangan Konsolidasi/ Consolidated Financial Statements
Laporan keuangan yang lengkap	Complete financial statements	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan (neraca) 2. Laporan laba rugi komprehensif 3. Laporan perubahan ekuitas 4. Laporan arus kas 5. Catatan atas laporan keuangan 6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan)	Contains all elements of the financial statements: 1. Balance sheet 2. income statement 3. Equity statement 4. Cahs flow report 5. Notes to the financial statements 6. Statement of financial position at the beginning of the comparative period presented when an entity implements accounting policy retrospectively or makes restatement of financial statement items, or when the entity reclassify items in its financial statements (if relevant)	Laporan Keuangan Konsolidasi/ Consolidated Financial Statements
Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya	Disclosure in the notes to the financial statements when the entity implements accounting policy retrospectively or to make the restatement of financial statements items, or when the entity reclassify items in financial statements.	Ada atau tidak ada pengungkapan sesuai dengan PSAK	In the event that there is disclosure according to PSAK or otherwise, the information should be disclosed	Laporan Keuangan Konsolidasi/ Consolidated Financial Statements
Perbandingan tingkat profitabilitas	Comparison of the levels of profitability	Perbandingan laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya	Comparison of income for the year and the previous year	Laporan Keuangan Konsolidasi/ Consolidated Financial Statements
Laporan arus kas	Cash flow report	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan 2. Penggunaan metode langsung (*direct method*) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan/atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan	Meet the following propositions: 1. Classification for three activities: operation, investment, and funding 2. The utilization of direct method to report cash flow from operational activity 3. Separated presentation of the cash receipt and or cash expended for the year related to the operational, investment, and funding activity. 4. Disclosure of non-cash transaction should be attached in the notes to financial statements	Laporan Keuangan Konsolidasi/ Consolidated Financial Statements
Ikhtisar kebijakan akuntansi	Accounting policy highlights	Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan 3. Pengakuan pendapatan dan beban 4. Aset Tetap 5. Instrumen Keuangan	Includes at least: 1. Statement of compliance to SAK 2. Benchmark of preparing financial report 3. Recognition of income and expense 4. Fixed asset 5. Financial instrument	Laporan Keuangan Konsolidasi/ Consolidated Financial Statements
Pengungkapan transaksi pihak berelasi	Disclosure of transaction from related parties	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas.	Disclosure materials: 1. Name of the related parties and its affiliation 2. Transaction value and its percentage of the total revenue and expenses concerned; and 3. Total balance amount and its percentage of the total assets and liabilities	Laporan Keuangan Konsolidasi/ Consolidated Financial Statements
Pengungkapan yang berhubungan dengan Perpajakan	Disclosure related to taxation	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	Disclosure materials: 1. Fiscal reconciliation and calculation of current tax 2. Explanation of the relationship between tax expense (income) and income tax accounting 3. Statement that the amount of Taxable Profit as calculated through reconciliation is in accordance with the Tax Return 4. Details of the asset and liabilities in deferred tax presented in the balance sheet ine ach period of presentations, and amount of charge (income) of deferred tax acknowledged in the profit loss statement if the said amount is not evident in the aasset or liability of deferred tax acknowledged in the balance sheet 5. Disclosure of whether there is tax dispute or not	Laporan Keuangan Konsolidasi/ Consolidated Financial Statements

Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Financial Services Authority Reference				
KRITERIA / CRITERIA		PENJELASAN / DESCRIPTION		HALAMAN / PAGE
Pengungkapan yang berhubungan dengan Aset Tetap	Disclosure related to fixed asset	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi	Disclosure material: 1. Depreciation method used 2. Description of the selected accounting policies between the fair value model and cost model 3. Methods and significant assumptions used in estimating the fair value of fixed assets (revaluation model) or disclosure of the fair value of fixed assets (cost method); and 4. Reconciliation of the gross carrying amount and accumulated depreciation of fixed assets at the beginning and end of the period with disclosre of addition, deduction, and reclassification.	Laporan Keuangan Konsolidasi/ Consolidated Financial Statements
Kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan imbalan kerja	Accounting policies related to benefit	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Jenis imbalan kerja yang diberikan kepada karyawan; 2. Deskripsi umum mengenai jenis program imbalan pascakerja yang diselenggarakan oleh perusahaan; 3. Kebijakan akuntansi perusahaan dalam mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial; dan 4. Pengakuan keuntungan dan kerugian untuk kurtailmen dan penyelesaian.	Disclosure material: 1. Types of benefit given to the employees; 2. Overview of types of post-employement benefits program held by the company 3. Accounting policy for the recognition of actuarial profit and loss; and 4. Recognition of profit and loss for curtailment and completion	Laporan Keuangan Konsolidasi/ Consolidated Financial Statements
Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan	Disclosure related to financial instrument	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Persyaratan, kondisi dan kebijakan akuntansi untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 2. Klasifikasi instrumen keuangan; 3. Nilai wajar tiap kelompok instrumen keuangan; 4. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko; 5. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; dan 6. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.	Material disclosure: 1. Requirements, accounting condition and policy for each financial instrument classification; 2. Classification of financial instruments; 3. Fair value of each financial instrument; 4. Objective and policy of risk management; 5. Explanation of risk related to financial instruments; market risk, credit and liquidation; and 6. Risk analysis with quantitative method related to financial instruments	Laporan Keuangan Konsolidasi/ Consolidated Financial Statements
Penerbitan laporan keuangan	Publishing of financial statements	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan	Material disclosure: 1. Date of financial statements authorized for publication; and 2. Parties responsible to authorize the financial statements.	Laporan Keuangan Konsolidasi/ Consolidated Financial Statements

Halaman ini sengaja dikosongkan

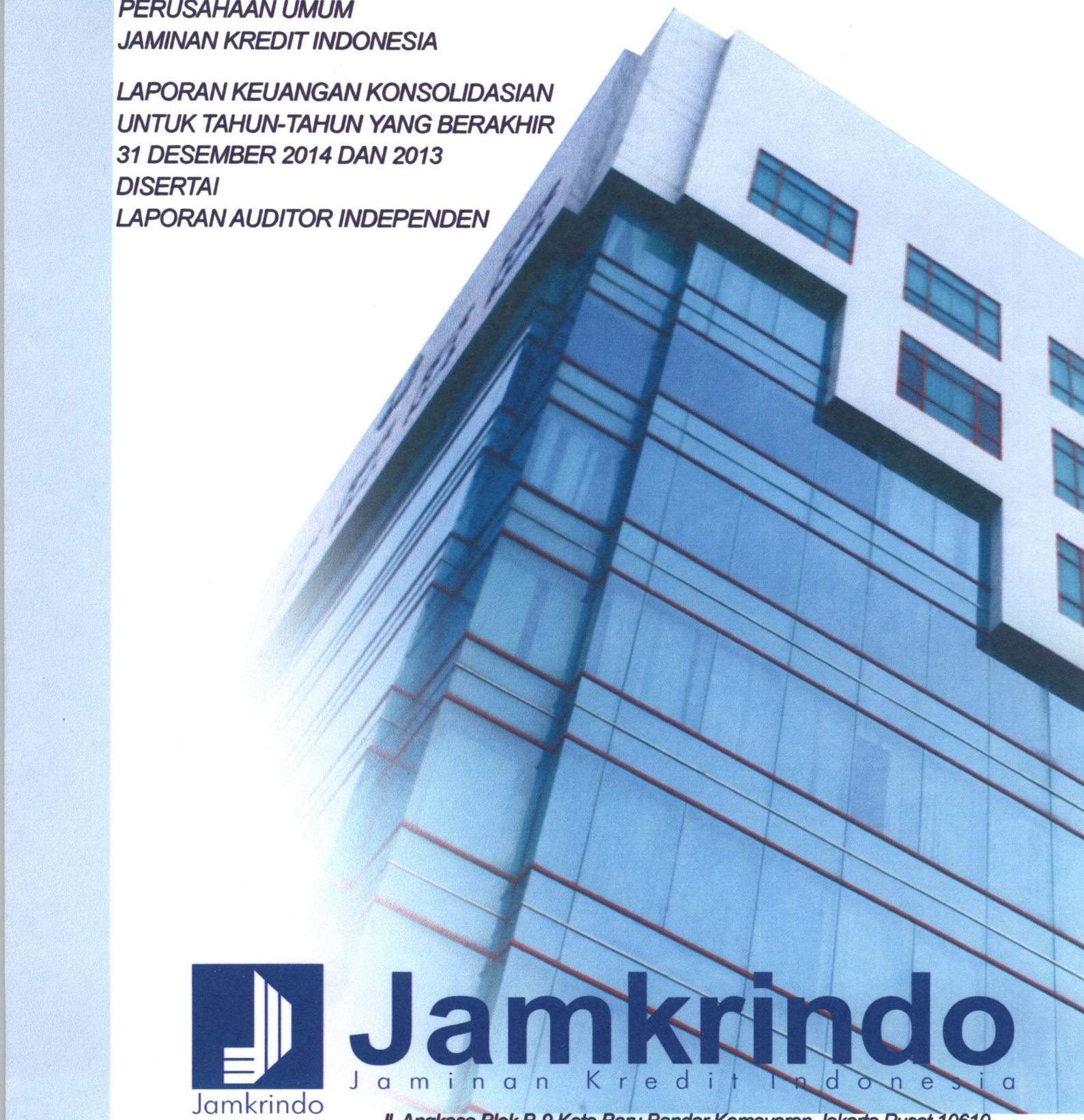
This page is intentionally left blank

PERUSAHAAN UMUM
JAMINAN KREDIT INDONESIA

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
WITH
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

PERUSAHAAN UMUM
JAMINAN KREDIT INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014 DAN 2013
DISERTAI
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



Jamkrindo

Jamkrindo

Jaminan Kredit Indonesia

Jl. Angkasa Blok B-9 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10610
Telp. 021-6540335 Fax. 021-6540344/48

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA

Daftar Isi / Table Of Contents

SURAT PERNYATAAN DIREKSI		***DIRECTOR'S STATEMENT***
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		***INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN		***CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL STATEMENTS***
	Hal	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2014 dan 2013	1 - 2	*Consolidated Statements Of Financial Position as at 31 December 2014 and 2013*
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013	3 - 4	*Consolidated Statements Of Comprehensive Income For The Years Ended 31 December 2014 and 2013*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013	5	*Consolidated Statements Of Changes In Equity For The Years Ended 31 December 2014 and 2013*
Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013	6	*Consolidated Statements Of Cash Flows For The Years Ended 31 December 2014 and 2013*
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013:		*Notes to the Consolidated Financial Statements For The Years Ended 31 December 2014 and 2013:*
Gambaran Umum Perusahaan	7	*Company General Illustration*
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan	8	*Summary of Significant Accounting Policies*
Catatan Atas Laporan Keuangan	22 - 57	*Notes to the Financial Statements*

SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
(JAMKRINDO)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Diding S. Anwar
- Jabatan : Direktur Utama
- Alamat Kantor : Jl Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10720

- Nama : I. Rusdonobanu
- Jabatan : Direktur Keuangan dan Investasi
- Alamat Kantor : Jl Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10720

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo);
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) telah dimuat secara lengkap dan benar;
4. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo).

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
AS AT 31 DECEMBER 2014 AND 2013
PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
(JAMKRINDO)

We, the undersigned:

- *Name* : *Diding S. Anwar*
- *Function* : *President Director*
- *Office Address* : *Jl Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10720*

- *Name* : *I. Rusdonobanu*
- *Function* : *Finance and Investment Director*
- *Office Address* : *Jl Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10720*

Declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo);*
2. *Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)'s consolidated financial statement have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standars in Indonesia;*
3. *All information in the Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)'s consolidated financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;*
4. *Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)'s consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;*
5. *We are responsible for Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)'s internal control system.*

We certify the accuracy of this statement.

Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of the Board of Directors*

METERAI TEMPEL
5B274ADF108009841
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Diding S. Anwar	**I. Rusdonobanu**
Direktur Utama	Direktur Keuangan dan Investasi
/President Director	*/Finance and Investment Director*

Jakarta, 3 Februari 2015 / *February 3, 2015*

No. LAI/GA/BTW/15006 | *No. LAI/GA/BTW/15006*

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Dewan Pengawas dan Direksi | ***The Boards of Supervisory and Directors***

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA DAN ENTITAS ANAK /
PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES

Laporan Atas Laporan Keuangan

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia dan Entitas Anak terlampir, yang terdiri atas laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2014, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying consolidated financial statement of Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2014, and the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audits. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and State Financial Audit Standard established by The Audit Board of The Republic of Indonesia. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statement, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the

risiko tersebut auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion

Opini

Opinion

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia tanggal 31 Desember 2014, serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the consolidated financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia as at December 31, 2014, and the results of its operations, and its cash flows for the year then ended in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

Laporan atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengendalian intern adalah tanggung jawab manajemen perusahaan.

We also examined the company's compliance to laws and regulations, and internal control. Compliance with laws and regulations, and internal control are the responsibility of the Company's management.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengendalian intern kami sampaikan secara terpisah dengan laporan kami nomor: LAI/UU/BTW/15006 dan LAI/IC/BTW/15006 tanggal 3 Februari 2015.

We submit about compliance with laws and regulations, and internal control separately in our report number: LAI/UU/BTW/15006 and LAI/IC/BTW/15006 dated February 3, 2015.

Kantor Akuntan Publik/Registered Public Accountants

Husni, Mucharam & Rasidi

Budi T. Wibawa, CPA.

Izin Praktik No. AP. 0083/ Public Accountant License No AP.0083

Izin KAP No. KEP-662/KM.17/1998/Registered Public Accountant License No. KEP-662/KM.17/1998

3 Februari 2015/February 3, 2015

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in Full Rupiah)

	31 Desember 2014 / *December 31, 2014*	Catatan/ Notes	31 Desember 2013 / *December 31, 2013* (disajikan kembali/*Restated*)	
ASET				***ASSETS***
Kas dan Setara Kas	5.196.592.537.763	2b, 3	4.711.774.750.747	*Cash and Cash Equivalent*
Investasi Deposito dan Efek		2g, 2n, 4		*Deposit Investment and Marketable Securities*
- Dimiliki Hingga jatuh Tempo	1.337.335.933.889		629.036.231.268	*Held To Maturity* -
- Tersedia untuk Dijual	1.362.727.674.945		824.966.171.062	*Available For Sale* -
Piutang IJP KUR Kepada Pemerintah	1.075.355.409.006	5	1.206.227.439.791	*KUR Premium Receivable To The Goverment*
Piutang Penjaminan Ulang *setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp60.884.628.596 pada 31 Desember 2014 dan Rp60.884.628.595 pada 31 Desember 2013*	69.936.879.275	2i, 2n, 6	120.583.795.519	*Co-Guarantee Receivable Net of Allowance for Impairment Losses Rp60.884.628.596 as of December 31, 2014 and Rp60.884.628.595 December 31, 2013*
Pinjaman Yang Diberikan *setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp17.568.618.974 pada 31 Desember 2014 dan Rp17.557.387.575 pada 31 Desember 2013*	973.438.042	2h, 7	1.297.400.099	*Loans Net of Allowance for Impairment Losses Rp17.568.618.974 as of December 31, 2014 and Rp17.557.387.575 December 31, 2013*
Piutang Lain-Lain	132.731.655.583	8	27.596.443.977	*Other Receivable*
Beban Dibayar Dimuka	598.764.321.798	2j, 9	553.068.468.726	*Prepaid Expenses*
Properti Investasi *setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp17.154.244.806 pada 31 Desember 2014 dan Rp16.763.145.491 pada 31 Desember 2013*	14.590.120.099	2k, 10	14.981.219.414	*Investment Property Net of Accumulated Depreciation of Rp17.154.244.806 as of December 31, 2014 dan Rp16.763.145.491 as of December 31, 2013*
Aset Tetap *setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp44.007.549.306 pada 31 Desember 2014 dan Rp39.459.459.187 pada 31 Desember 2013*	54.425.199.204	2l, 11	37.840.551.952	*Fixed Assets Net of Accumulated Depreciation of Rp44.007.549.306 as of December 31, 2014 dan Rp39.459.459.187 as of December 31. 2013*
Aset Pajak Tangguhan	119.400.366.323	2q, 17	141.500.601.350	*Deferred Tax Assets*
Aset Lain-Lain	57.811.014.608	2m, 12	24.508.628.027	*Other Assets*
JUMLAH ASET	**10.020.644.550.535**		**8.293.381.701.932**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian
The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in Full Rupiah)

	31 Desember 2014 / *December 31, 2014*	Catatan/ Notes	31 Desember 2013 / *December 31, 2013* (disajikan kembali/*Restated*)	
LIABILITAS & EKUITAS				***LIABILITIES & EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILTIES***
Hutang Klaim	10.197.458.677	2s, 13	45.180.582.714	*Claim Payable*
Hutang Pajak	3.524.726.162	2q, 17	24.242.476.126	*Tax Payable*
Hutang Penjaminan Ulang	35.821.598.160	15	41.712.936.083	*Co Guarantee Payable*
Pendapatan Ditangguhkan	1.019.707.762.478	16	1.103.427.896.654	*Deferred Revenue*
Cadangan Klaim	396.378.923.053	2u, 14	452.121.969.352	*Claims Reserve*
Kewajiban Pajak Tangguhan	8.687.653	17	-	*Deferred Tax Liabilities*
Hutang Lain-Lain	137.753.465.331	19	76.557.601.893	*Other Liabilities*
JUMLAH LIABILITAS	**1.603.392.621.514**		**1.743.243.462.822**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITIES***
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				***Equity Attributable to Owners of the Parent***
Penyertaan Modal Negara	6.638.733.365.160	20a	5.338.733.365.160	*Government's Share Placement*
Cadangan-Cadangan	1.125.586.279.252	20b	757.940.218.914	*Appropriate Retained Earnings*
Komponen Ekuitas Lainnya	(11.219.183.476)	20c	(71.744.405.302)	*Other Equity Component*
Saldo Laba	664.138.955.479		525.209.060.338	*Retained Earnings*
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	**8.417.239.416.415**		**6.550.138.239.110**	***Net Equity Attributable to Owners of the Parent***
Kepentingan Non Pengendali	12.512.606		-	*Non-Controlling Interests*
JUMLAH EKUITAS	**8.417.251.929.021**		**6.550.138.239.110**	***TOTAL EQUITIES***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**10.020.644.550.535**		**8.293.381.701.932**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian
The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in Full Rupiah)

	31 Desember 2014 / *December 31, 2014*	Catatan / Notes	31 Desember 2013 / *December 31, 2013*	
PENDAPATAN PENJAMINAN				***GUARANTEE REVENUES***
Imbal Jasa Penjaminan Bruto	1.686.271.021.628	2r, 22	1.600.961.372.287	*Gross Guarantee Fee*
Pendapatan Komisi Re Asuransi	5.509.491.735	2r, 22	844.526.272	*Re Insurance Comission Fee*
Premi Co Guarantee	(220.685.464.885)	2r, 22	(253.402.175.909)	*Co Guarantee Premium*
Premi Re Asuransi	(24.181.507.239)	2r, 22	(4.204.367.559)	*Re Insurance Premium*
Restitusi IJP	(4.343.792.787)	2r, 22	(4.560.059.814)	*Guarantee Restitution*
Imbal Jasa Penjaminan Bersih	**1.442.569.748.452**		**1.339.639.295.277**	***Net Guarante Revenues***
BEBAN KLAIM				***CLAIM EXPENSES***
Beban Klaim	(1.071.911.769.047)	2t, 23	(898.582.003.777)	*Claim Expenses*
Kenaikan Penurunan Cadangan Klaim	50.854.144.341	23	(39.541.500.471)	*Increase Decrease in Reserve Claim*
Kerugian Penurunan Nilai Piutang Co Guarantee	-	23	(8.563.736.757)	*Impairment Losses on Co Guarantee Receivable*
Provisi Kerugian Klaim Co Guarantee	-	23	(16.705.639.084)	*Provision for Claim Losses Co Guarantee*
Jumlah Beban Klaim	**(1.021.057.624.706)**		**(963.392.880.089)**	***Total Claim Expenses***
PENJAMINAN BERSIH	**421.512.123.746**		**376.246.415.188**	***NET GUARANTEE INCOME***
Pendapatan Investasi Bersih	531.363.555.447	2p, 24	347.674.270.928	*Investment Income - Net*
Pendapatan (Beban) Lain-lain	222.491.534.555	26	162.646.571.794	*Other Income (Expenses)*
BEBAN USAHA		2t, 25		***OPERATING EXPENSES***
Beban Operasional	(70.562.048.384)		(44.912.056.035)	*Operating Expenses*
Beban Sumber Daya Manusia	(168.091.609.431)		(115.761.687.179)	*Human Resoursce Expenses*
Beban Administrasi dan Umum	(70.196.530.879)		(64.212.211.219)	*General and Administrative Expenses*
Beban Sistem, Teknologi, & Pengembangan Usaha	(19.573.686.082)		(4.714.770.785)	*Technology, System, & Development Expense*
Jumlah Beban Usaha	**(328.423.874.776)**		**(229.600.725.218)**	***Total Operating Expenses***
LABA SEBELUM PAJAK	**846.943.338.972**		**656.966.532.692**	***INCOME BEFORE TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				***INCOME TAX EXPENSE***
Beban Pajak Kini	160.695.448.207	2q, 17	144.831.117.735	*Current Income Tax*
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	22.108.922.679	2q, 17	(13.073.645.381)	*Tax Benefit (Deffered) Expense*
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	**182.804.370.886**		**131.757.472.354**	*Total Tax Expenses*
LABA TAHUN BERJALAN	**664.138.968.086**		**525.209.060.338**	***PROFIT FOR THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in Full Rupiah)

	31 Desember 2014 / *December 31, 2014*	Catatan / Notes	31 Desember 2013 / *December 31, 2013*	
LABA TAHUN BERJALAN	**664.138.968.086**		**525.209.060.338**	***PROFIT FOR THE YEAR***
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA :				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME :***
Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual	**60.525.221.825**	2n, 4	**(80.069.355.927)**	*Available For Sale Financial Assets*
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**724.664.189.911**		**445.139.704.411**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik Entitas Induk	664.138.955.480		525.209.060.338	*Owners of the Parent*
Kepentingan Non Pengendali	12.606	2x, 21	-	*Non-Controlling Interests*
	664.138.968.086		**525.209.060.338**	
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik Entitas Induk	724.664.177.305		445.139.704.411	*Owners of the Parent*
Kepentingan Non Pengendali	12.606	2x, 21	-	*Non-Controlling Interests*
	724.664.189.911		**445.139.704.411**	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KRDIT INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KRDIT INDONESIA AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in Full Rupiah)

	Catatan /Notes	Penyertaan Modal Pemerintah /Government's Share Placement	Cadangan Modal /Capital Reserve	Cadangan Umum /General Reserve	Cadangan Tujuan /Special Reserve	Cadangan Dana Teknis /Technical Fund Reserve	Saldo Laba /Retained Earnings	Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual /Available for Sale Financial Assets	Jumlah /Total	Kepentingan Non Pengendali /Non-Controlling Interests	Jumlah Ekuitas /Total Equity	
Saldo 01 Januari 2013		4.218.733.365.160	904.000.000	221.669.380.403	12.207.510.860	78.274.593.035	509.516.734.615	8.324.950.625	5.049.630.534.698		5.049.630.534.698	***Balance as of January 31, 2013***
Penyertaan Modal Negara	20	1.120.000.000.000	-	-	-	-	-	-	1.120.000.000.000		1.120.000.000.000	*Government's Share Placement*
Eliminasi Saldo Rugi akibat Pengaruh Perubahan Kebijakan Akuntansi		-	-	-	-	-	-	-	-		-	*The Elimination of Loss Balance in Effect of Accounting Changes*
Pembagian Laba Tahun 2012 :							-				-	*Distribution of 2012 profits :*
Cadangan Umum	20	-	-	358.984.734.616	-	-	(358.984.734.616)	-	-		-	*General Reserve*
Cadangan Tujuan	20	-	-	-	85.900.000.000	-	(85.900.000.000)	-	-		-	*Special Reserve*
Cadangan Dana Teknis	20	-	-	-	-	-	-	-	-		-	*Technical Fund Reserve*
Dividen	20	-	-	-	-	-	(64.632.000.000)	-	(64.632.000.000)		(64.632.000.000)	*Dividend*
Dana Program Kemitraan	20	-	-	-	-	-	-	-	-		-	*Partnership Fund Program*
Dana Bina Lingkungan	20	-	-	-	-	-	-	-	-		-	*Community Development Fund*
Total Pendapatan Komprehensif 2013	20	-	-	-	-	-	525.209.060.338	(80.069.355.927)	445.139.704.411		445.139.704.411	*Total Comprehensif Income 2013*
Saldo 31 Desember 2013		**5.338.733.365.160**	**904.000.000**	**580.654.115.019**	**98.107.510.860**	**78.274.593.035**	**525.209.060.337**	**(71.744.405.302)**	**6.550.138.239.110**	**-**	**6.550.138.239.110**	***Balance as of December 31, 2013***
Penyertaan Modal Negara		1.300.000.000.000	-	-		-	-	-	1.300.000.000.000		1.300.000.000.000	*Government's Share Placement*
Penyertaan Saham di Entitas Anak										12.500.000	12.500.000	
Eliminasi Saldo Rugi akibat Pengaruh Perubahan Kebijakan Akuntansi		-	-	-	-		-	-	-		-	*The Elimination of Loss Balance in Effect of Accounting Changes*
Pembagian Laba Tahun 2013 :											-	*Distribution of 2013 profits :*
Cadangan Umum	20	-	-	279.046.060.337	-	-	(279.046.060.337)	-	-		-	*General Reserve*
Cadangan Tujuan	20	-	-		88.600.000.000	-	(88.600.000.000)	-	-		-	*Special Reserve*
Cadangan Dana Teknis	20	-	-	-	-	-	-	-	-		-	*Technical Fund Reserve*
Dividen	20	-	-		-	-	(157.563.000.000)	-	(157.563.000.000)		(157.563.000.000)	*Dividend*
Dana Program Kemitraan	20	-	-	-	-	-	-	-	-		-	*Partnership Fund Program*
Dana Bina Lingkungan	20	-	-	-	-	-	-	-	-		-	*Community Development Fund*
Total Pendapatan Komprehensif 2014	20	-	-	-	-	-	664.138.955.479	60.525.221.826	724.664.177.305	12.606	724.664.189.911	*Total Comprehensif Income 2014*
Saldo 31 Desember 2014		**6.638.733.365.160**	**904.000.000**	**859.700.175.357**	**186.707.510.860**	**78.274.593.035**	**664.138.955.479**	**(11.219.183.476)**	**8.417.239.416.415**	**12.512.606**	**8.417.251.929.021**	***Balance as of December 31, 2014***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian
The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014 AND 2013
(Expressed in Full Rupiah)

	31 Desember 2014 /December 31, 2014	Catatan/ Notes	31 Desember 2013 /December 31, 2013	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES***
Laba sebelum pajak	664.138.968.086		596.107.020.207	*Income Before Tax*
Ditambah (Dikurang) Unsur yang Tidak Mempengaruhi Arus Kas Operasi:				*Add (Deduct) items Not Affecting Operating Cash Flows:*
Beban Penyusutan Aset Tetap	4.939.189.435	11	4.210.504.298	*Depreciation Expenses*
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(356.388.505)	6, 7	8.533.193.617	*Allowance for Impairment Losses Expense*
Arus Kas Operasi Sebelum Perubahan unsur-unsur Modal Kerja	668.721.769.016		608.850.718.122	***Operating Cash Flows Before Changes in Working Capital***
Perubahan Unsur-unsur Modal Kerja:				*Changes in Working Capital Items:*
Peningkatan Piutang IJP KUR	130.872.030.785		(552.398.005.455)	*Government*
Peningkatan Piutang Penjaminan Ulang	50.646.916.244	6	(112.793.307.499)	*Increase of Co-Guarantee Receivable*
Penurunan Piutang Pinjaman Yang diberikan	327.992.102	7	405.209.517	*Increase of Loans Receivable*
Penurunan (Peningkatan) Piutang Lain-lain	(104.778.823.101)	8	(14.088.137.542)	*Decrease (Increase) of Others Receivable*
Penurunan (Peningkatan) Biaya Dibayar di Muka	(45.695.853.072)	9	(19.351.084.920)	*Decrease (Increase) of Prepaid Expenses*
Peningkatan (Penurunan) Aset Pajak Tangguhan	22.100.235.027	17	-	*Increase (Decrease) of Deferred Tax Assets*
Peningkatan (Penurunan) Aset Lain-lain	(33.302.386.581)	12	(55.238.154.704)	*Increase (Decrease) of Other Assets*
Peningkatan (Penurunan) Hutang Klaim	(34.983.124.037)	13	23.124.068.149	*Increase (Decrease) of Claim Payables*
Peningkatan (Penurunan) Hutang Pajak	(20.717.749.964)	17	8.211.878.127	*Increase (Decrease) of Tax Payable*
Peningkatan (Penurunan) Hutang Penjaminan Ulang	(5.891.337.923)	15	39.105.260.414	*Increase (Decrease) of Co Guaranbtee Payable*
Peningkatan (Penurunan) Peningkatan Hutang Lain-lain	61.195.863.438	19	38.490.918.911	*Increase (Decrease) of Other Payable*
Peningkatan Cadangan Klaim	(55.743.046.299)	14	56.247.139.555	*Increase of Claim Reserve*
Peningkatan (Penurunan) Pendapatan ditangguhkan	(83.720.134.176)		(17.404.087.488)	*Increase (Decrease) of Deferred Revenue*
Pembayaran Pajak Penghasilan	-	17	(99.949.725.820)	*Income Tax Payment*
Arus Kas Bersih yang Diperoleh (Digunakan) dari Aktivitas Operasi	**549.032.351.459**		**(96.787.310.632)**	***Net Cash Flow Provided (Used) from Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTMENT ACTIVITIES***
Peningkatan Investasi	(1.185.535.984.678)	4	(520.300.568.832)	*Increase of Long Term Investment*
Pembelian Aset Tetap	(21.128.092.371)	11	(5.564.016.824)	*Acquisition of Fixed Assets*
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(1.206.664.077.049)**		**(525.864.585.656)**	***Net Cash Used in Investment Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES***
Peningkatan Penyertaan Modal Negara	1.300.000.000.000	20	1.120.000.000.000	*Increase of Government's Share Placement*
Dividen	(157.563.000.000)	20	(64.632.000.000)	*Dividend*
Hak Non Pengendali	12.512.606	21	-	*Non-Controlling Interests*
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	**1.142.449.512.606**		**1.055.368.000.000**	***Net Cash Provided from Financing Activities***
(PENURUNAN) KENAIKAN KAS DAN SETARA KAS	**484.817.787.016**		**432.716.103.712**	***(DECREASE) INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	**4.711.774.750.747**		**4.279.058.647.035**	***CASH AND EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	**5.196.592.537.763**		**4.711.774.750.747**	***CASH AND EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian
The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

1. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia, sebelumnya adalah Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi, didirikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1981 yang merupakan peleburan dari Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang dibentuk tahun 1970. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1981, disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1985 selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2000 tanggal 7 November 2000, Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi diubah menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 diubah lagi namanya menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia ("Perusahaan").

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat terletak di Jl. Angkasa Blok 9-Kav.6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta dan mempunyai 3 Kantor Wilayah, 35 Kantor Cabang dan 21 Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Lingkup dan Jaringan Usaha Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008, kegiatan usaha utama Perusahaan adalah melakukan penjaminan kredit baik bersifat tunai maupun non tunai yang diberikan Bank atau Badan Usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.

Per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

2014:
Dewan Pengawas

Ketua	Braman Setyo	
Anggota	Ony Suprihartono	
Anggota	Nasaruddin Umar	
Anggota	Dahlan Siamat	
Anggota	Subandriyo	

Direksi

Direktur Utama	Diding S. Anwar	
Direktur Penjaminan Non Bank	Nanang Waskito	
Direktur Penjaminan Bank	Bakti Prasetyo	
Direktur SDM dan Umum	Herry Sidharta	
Direktur Keuangan dan Investasi	I. Rusdonobanu	

Sesuai Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor:SK-199/MBU/10/2014 tanggal 07 Oktober 2014, Pemilik Modal memutuskan menyetujui pengangkatan Sdr. Braman Setyo sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo dan berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Sesuai Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor:SK-435/MBU/2013 tanggal 31 Desember 2013, Pemilik Modal memutuskan menyetujui pengangkatan Sdr. Ony Suprihartono dan Sdr. Subandriyo sebagai anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo dan berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Sesuai Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor:SK-44/MBU/2014 tentang Perubahan Nomenklatur Anggota-Anggota Direksi Perum Jamkrindo.

2013:
Dewan Pengawas

Ketua	Choirul Djamhari	
Anggota	Nasaruddin Umar	
Anggota	Bobby Hamzar Rafinus	
Anggota	Bandung Pardede	
Anggota	Dahlan Siamat	

Direksi

Direktur Utama	Diding S. Anwar	
Direktur Operasi	Herry Sidharta	
Direktur Keuangan dan Investasi	I. Rusdonobanu	
Direktur SDM dan Umum	Nanang Waskito	
Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi	Bakti Prasetyo	

1. COMPANY GENERAL INFORMATION

a. Establishment of the Co. Establishment of the Company

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia, formerly called as Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi, was established based on Government Regulation No. 51 year 1981 which is merged from Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) which is formed by 1970. Based on the Government Regulation No. 51 year 1981, which is renewed by Government Regulation No. 27 year 1985, here in after by Government Regulation No. 95 year 2000 dated November 7, 2000, Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi was changed by Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha, and based on PP No. 41 Year 2008 the name was changed again become Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia ("Company").

The company located in Jakarta, whose Head Office located in Jl. Angkasa Blok 9-Kav.6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta and have 3 regional offices, 35 branch offices, and 21 unit service offices which spread over in all Indonesia.

Activities and Company Business Network

Based on Government Regulation No. 41 Year 2008, the main business activity of Corporation is guarantee of loan either in form of cash or noncash which is provided by Bank or Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives.

As at 31 December 2014 and 2013, the composition of the company's Supervisory Council and Board of Directors are as follows:

2014:
Supervisory Council Members

Chairman	Braman Setyo	
Member	Ony Suprihartono	
Member	Nasaruddin Umar	
Member	Dahlan Siamat	
Member	Subandriyo	

Directors

President Director	Diding S. Anwar	
Non-Bank Guarantee Director	Nanang Waskito	
Bank Guarantee Director	Bakti Prasetyo	
General and Human Resource Development Director	Herry Sidharta	
Investment and Finance Director	I. Rusdonobanu	

According to Decree of Minister of State-Owned Enterprises: Number SK-199/MBU/10/2014 dated October 07, 2014, Owners of Capital decided to approve the appointment of Mr. Braman Setyo as a Chaiman of the Supervisory Council and the Perum Jamkrindo effective as of the date specified.

According to Decree of Minister of State-Owned Enterprises: Number SK-435/MBU/2013 dated December 31, 2013, Owners of Capital decided to approve the appointment of Mr. Ony Suprihartono dan Sdr. Subandriyo as a member of the Supervisory Council Perum Jamkrindo and effective as of the date specified.

According to Decree of Minister of State-Owned Enterprises: Number SK-44/MBU/2014 on Nomenclature Amendment Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo.

2013:
Supervisory Council Members

Chairman	Choirul Djamhari	
Member	Nasaruddin Umar	
Member	Bobby Hamzar Rafinus	
Member	Bandung Pardede	
Member	Dahlan Siamat	

Directors

President Director	Diding S. Anwar	
Operation Director	Herry Sidharta	
Investment and Finance Director	I. Rusdonobanu	
General and Human Resource Development Director	Nanang Waskito	
Technology Information and Risk Management Director	Bakti Prasetyo	

1. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

a. Pendirian Perusahaan

Per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 perusahaan memiliki karyawan sebanyak 501 dan 518 orang.

1. *COMPANY GENERAL INFORMATION*

a. *Establishment of The Co. Establishment of The Company*

As of December 31, 2014 and 2013 the company has 501 and 518 employees.

b. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan

Anak perusahaan yang dimiliki oleh Perusahaan pada 31 Desember 2014 sebagai berikut:

b. *Consolidated Subsidiary*

The Subsidiaries and owned by the Company as of December 31, 2014 as follows:

Entitas Anak/ *The Subsidiaries*	Lingkup kegiatan usaha/ *Scope of business activities*	Kedudukan, tanggal pendirian/ *Position, date of establishment*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of Ownerships*	Total Aset Sebelum Jurnal Eliminasi/ Total Assets Before Elimination
PT Perum Jamkrindo Syariah	Penjaminan Syariah	Jakarta, 19 September 2014	99,95%	Rp250.652.549.208

Pernyataan Tanggung Jawab

Direksi bertanggung jawab sepenuhnya atas penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014. Laporan keuangan *unaudited* (*home statement*) telah diselesaikan pada 10 Januari 2015 dan laporan keuangan final telah disetujui untuk diterbitkan pada 3 Februari 2014.

Statement of Responsibility

Board of Directors is solely responsible for the preparation of financial statements for the year ended December 31, 2014. Unaudited financial statements (home statement) has been completed on January 10, 2015 and the final financial report has been approved for issue on February 3, 2015.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi yang penting, yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 disusun oleh Direksi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, menggunakan konsep harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan tersedia untuk dijual, dan aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, serta menggunakan dasar akrual, termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.101 (Revisi 2011), "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No.102, "Akuntansi Murabahah", PSAK No.104, "Akuntansi Istihna", PSAK No. 105, "Akuntansi Mudharabah", PSAK No.106, "Akuntansi Musyarakah", PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah", PSAK No.110, "Akuntansi Sukuk".

Laporan keuangan entitas anak disajikan berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual dengan beberapa pengecualian sebagai berikut:

1) Surat berharga tertentu dinyatakan sebesar nilai wajar
2) Aset yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan
3) Perhitungan pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil yang menggunakan dasar kas, dan
4) Pendapatan imbalan (ujrah) jasa tertentu dan pendapatan adminstrasi pembiayaan yang diakui menggunakan dasar kas.

Laporan Arus Kas disusun menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah tidak perlu menyiapkan laporan keuangan syariah secara lengkap melainkan hanya melaporkan transaksi syariah sesuai dengan standar akuntansi syariah dalam laporan keuangan konvensial.

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES*

The significant accounting policies, applied consistently in the preparation of the financial statements of the company for the years ended 31 December 2014 and 2013 were as follows:

a. *Statement of Compliance*

The Company's financial statements for the year ended December 31, 2014 and 2013 prepared by the Directors in accordance with Financial Accounting Standards applicable in Indonesia set by Indonesian Institute of Accountants.

b. *Basis for Preparation of Financial Statement*

The Company's financial statements have been prepared by the Financial Accounting Standards in Indonesia, used the historical cost basis, except for financial assets classified as available for sale, financial assets and liabilities held at fair value through profit and loss, and on an accrual basis, including the Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) 101 (Revised 2011), "Presentation of Financial Statements Sharia", SFAS 102, "Accounting Murabaha", SFAS No.104, "Accounting Istihna "SFAS No. 105, "Accounting Mudaraba", SFAS 106, "Accounting Musharaka", SFAS No. 107, "Accounting for Ijarah", SFAS 110, "Accounting for Sukuk".

The subsidiaries financial statements are presented based on the historical cost basis and accrual basis with some exceptions as follows:

1) Certain securities are stated at fair value
2) Foreclosed assets in connection with the completion of the financing are recorded at net realizable value.
3) Calculation of income available to the results using the cash basis, and
4) Income benefits (ujrah) certain services and financing revenue administration recognized using the cash basis.

The Cash Flow Statement is prepared based on the indirect method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the cash flows reporting, cash and cash equivalents include cash on hand, deposits can be withdrawn at any time and short-term liquid investments with original maturities of three months or less, to the extent not used as collateral and unrestricted.

Conventional entity conducting sharia transaction do not need to set up sharia financial statements in full but only report the sharia transaction in accordance with the accounting standards of sharia in conventional financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

c. Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan beserta Entitas Anak yang berada di bawah pengendalian Perusahaan.

Dalam hal pengendalian terhadap Entitas Anak dimulai atau diakhiri dalam suatu tahun tertentu, maka hasil usaha Entitas Anak yang diperhitungkan kedalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebatas hasil pada saat pengendalian tersebut dimulai diperoleh hingga saat pengendalian atas Entitas Anak itu berakhir.

Pengendalian dianggap ada bilamana Perusahaan menguasai lebih dari lima puluh persen (50%) hak suara di Entitas Anak, atau mempunyai kemampuan untuk memberhentikan atau menunjuk mayoritas anggota direksi di Entitas Anak.

Seluruh saldo hutang piutang serta transaksi antar perusahaan konsolidasian dieliminasi. Hak pemegang saham minoritas dalam ekuitas dan hasil usaha dari Entitas Anak yang dikonsolidasi disajikan secara tersendiri dalam laporan keuangan konsolidasian.

d. Usaha yang Berkelanjutan

Manajemen telah melakukan penilaian atas kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Perusahaan tidak memperoleh bukti objektif tentang ketidakpastian material yang dapat menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

e. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi dan periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dibulatkan menjadi Rupiah yang terdekat, kecuali dinyatakan secara khusus.

Pertimbangan dan estimasi signifikan adalah sebagai berikut :

Nilai wajar dari instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk menggunakan model matematika. Masukan untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Dalam mengestimasi arus kas, Perusahaan melakukan penilaian tentang kondisi keuangan peminjam dan nilai realisasi bersih dari agunan.

Penurunan Nilai Piutang

Perusahaan mereview Piutang secara individual pada setiap akhir periode pelaporan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi.

Secara khusus, pertimbangan oleh manajemen diperlukan dalam mengestimasi jumlah dan waktu arus kas di masa mendatang ketika menentukan penurunan nilai.

Estimasi-estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin akan berbeda, yang tercermin dalam perubahan penyisihan penurunan nilai di masa mendatang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Principle of Consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of the Company and its subsidiaries are under the control of the Company.

In terms of control to the Subsidiary commencing or ending in a particular year, then the results of operations of subsidiaries accounted into the consolidated financial statements only from the date that the control starts up to the date control of the Subsidiary ended.

Control is presumed to exist where more than fifty percent (50%) of the voting rights in the Subsidiary, or control the removal or appointment of a majority of the directors in the Subsidiary.

The entire balance of accounts payable as well as transactions between consolidated companies are eliminated. Rights of minority shareholders in the equity and results of operations of consolidated subsidiaries are presented separately in the consolidated financial statements.

d. Going Concern

Management has conducted an assessment of the Company's ability to continue its business continuity and convinced that the company has sufficient resources to continue its efforts in the future. In addition, the management company does not obtain objective evidence about uncertainties of material that can cause significant losses to the company's ability to continue its business. Therefore, the company's financial statements for the year ended December 31, 2014 have been prepared on the basis of a sustainable business.

e. Use of Judgements, Estimates and Assumptions

In preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standard requires management to make judgments, estimates and assumptions that effect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Estimasi and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised and future periods affected by the revised estimate.

Figures in these financial statements are rounded to and stated in Rupiah, unless otherwise stated.

The most significant uses of the judgement and estimates are as follows:

Fair value of financial instruments

Where the fair value of financial assets and financial liabilities recorded on the financial position statements cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but where observable market data are not available, judgment is required to establish fair values. In estimating these cash flows, the Company makes judgement about the borrower's financial condition and the net realizable value of collateral.

Impairment Losses on Receivables

The Company reviews its receivable individually at each the end of reporting dates to assess whether an impairment loss should be recorded in the income statement.

In particular, judgement by management is required in the estimation of the amount and timing of future cash flows when determining the impairment loss.

These estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may be different, resulting in future changes to the allowance.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Perubahan dalam Kebijakan Akuntansi

Standar, perubahan dan interpretasi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2013 yang relevan dengan perusahaan:

PSAK No.60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"

Dampak dari perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan adalah sebagai berikut:

PSAK No.60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"

Standar yang baru menggabungkan dan memperluas sejumlah persyaratan pengungkapan yang telah ada sebelumnya dan menambahkan beberapa pengungkapan baru. Prinsip utama dari standar ini adalah untuk mengungkapan informasi yang memadai yang membuat pengguna laporan keuangan mampu mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan instrument keuangan yang signifikan milik perusahaan. PSAK 60 berisi pengungkapan-pengungkapan baru atas risiko-risiko dan manajemen risiko dan mensyaratkan entitas pelaporan untuk melaporkan sensitivitas instrument keuangannya terhadap pergerakan risiko-risiko tersebut.

Beberapa peraturan baru yang penting antara lain:

1) Pengungkapan kualitatif dan kuantitatif atas dampak dari risiko-risiko, antara lain risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas;

2) Penambahan pengungkapan untuk item-item yang mempengaruhi jumlah laba komprehensif, dimana keuntungan dan kerugian dipisahkan berdasarkan kategori instrumen keuangan; dan

3) Pengungkapan nilai wajar untuk setiap kelas aset dan kewajiban keuangan, serta pengungkapan hirarki nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diukur dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Perusahaan telah menyertakan pengungkapan yang dipersyaratkan PSAK 60 untuk laporan keuangan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2014.

Standar, perubahan dan interpretasi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2014 yang relevan dengan perusahaan:

Pada bulan Desember 2013, Dewan Standar Akuntansi Syariah-IAI telah menerbitkan PSAK 102 Revisi "Akuntansi Murabahah" yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2014 secara 'prospective catch up'. Perubahan terbesar pada PSAK 102 Revisi ini adalah perlakuan akuntansi untuk transaksi murabahah yang dikategorikan sebagai transaksi pembiayaan. Dalam PSAK 102 Revisi ini diatur bahwa seluruh transaksi murabahah yang secara substansi adalah pembiayaan harus mengacu kepada PSAK 55: "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran': PSAK 50: Instrumen Keuangan: "Penyajian'; dan PSAK 60: Instrumen Keuangan: "Pengungkapan" dan PSAK lain yang relevan. Dengan terbitnya PSAK 102 Revisi maka terhitung sejak 1 Januari 2014 Bank akan mengimplementasikan Buletin Teknis 9: "Penerapan Metode Anuitas Dalam Murabahah" yang telah diterbitkan sebelumnya seperti diindikasikan dalam basis kesimpulan pada PSAK 102 Revisi. Saat perusahaan sedang pengevaluasi PSAK 102 Revisi tersebut dan belum menetukan dampak penerapan PSAK 102 Revisi tersebut terhadap laporan keuangan.

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2015 adalah:

PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", yang diadopsi dari IAS 19, yang menghapus mekanisme koridor dan pengungkapan atas informasi liabilitas kontijensi untuk menyederhanakan klarifikasi dan pengungkapan. Saat ini Perusahaan sedang mengevaluasi PSAK Revisi tersebut dan belum menentukan dampak penerapan PSAK Revisi tersebut terhadap laporan keuangan.

g. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Klasifikasi
Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut.

Aset Keuangan

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, efek-efek, piutang co-guarantee, pinjaman yang diberikan dan piutang lain-lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Changes in Policies Accounting

Standards, amendments and interpretations effective as of January 1, 2013 that are relevant to the company:

SFAS No. 60 ,"Financial Instruments: Disclousure"

The impact from the changes in the company accounting policies as follows:

SFAS No. 60 ,"Financial Instruments: Disclousure"

The new standards combine and expand a number of disclosure requirements that have been there before and added some new disclosures. The main principles of this standard is to express their adequate information which makes the user able to evaluate the financial performance reports and the financial position of significant financial instruments belonging to the company. SFAS NO. 60 contains a disclosure-disclosure recently of risks and risk management and requires reporting entities to report its financial instrument's sensitivity to the risks of such movements.

There are new important rules as follows:

1) Qualitative and quantitative disclousure are impact from the risks such as market risk, credit risk and liquidity risk;

2) The addition of disclosure for those items that affect the amount of comprehensive income which the gains and losses are separated by category of financial instruments, and

3) Disclosure of fair value for each class of financial assets and liabilities, and disclosure of the fair value hierarchy of financial instruments measured at fair value at the reporting date. The Company has included disclosures required by SFAS No. 60 to the financial statements year ended December 31, 2014.

Standards, amendments and interpretations effective as of January 1, 2014 that are relevant to the company:

In December 2013, the Accounting Standards Board of Sharia-IAI has issued revised SFAS 102 "Accounting Murabaha" effective from January 1, 2014 as a 'prospective catch up'. The biggest change in this revised SFAS 102 is the accounting treatment for murabaha transactions classified as financing transactions. In a revision of SFAS 102 is arranged that the entire transaction that in substance murabaha financing should refer to IAS 55 "Financial Instruments: Recognition and Measurement ': IAS 50: Financial Instruments:' Presentation '; and IAS 60: Financial Instruments: "Disclosures" and other relevant GAAP. With the publication of the revised SFAS 102 since January 1, 2014 the Bank will implement the Technical Bulletin 9: "Implementation of Annuity Method In Murabaha" which has been published previously as indicated in the base conclusions on SFAS 102 Revised. When companies are evaluators The revision of SFAS 102 and not determine the impact of the adoption of SFAS 102 Revision of the financial statements.

Effective for the period starting on or after January 1, 2015 is:

SFAS No. 24 (Revised 2013), "Employee Benefits", the adoption of IAS 19, which removes the corridor mechanism and the disclosure of contingent liabilities to simplify the information and disclosure clarification. The Company is currently evaluating the revised IAS and has not yet determined the impact of adoption of SFAS revision on the financial statements.

g. Financial Asset and Financial Liabilities

Classification
The Company classifies its financial instruments into classes that reflects the nature of the information and considering the characteristics of the financial instruments

Financial Asset

The company financial assets consist of cash and cash equivalent, marketable securities, co-guarantee receivable, loans and other receivable.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

g. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Aset Keuangan (Lanjutan)

Berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2011), pada saat pengakuan awal aset keuangan diklasifikasikan dalam kategori sebagai berikut:

1) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi,
2) pinjaman yang diberikan dan piutang,
3) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo,
4) aset keuangan tersedia untuk dijual

Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya berdasarkan tujuan perolehan aset keuangan tersebut.

Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut.

1) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan Perusahaan tidak berniat untuk menjualnya segera atau dalam waktu dekat.

- yang dimaksudkan oleh Perusahaan untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan Piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan Piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan dan Piutang dihitung dengan menggunakan metode bunga efektif yang diakui pada laporan laba rugi sebagai "pendapatan bunga".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan Piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai 'Cadangan Kerugian Penurunan Nilai'.

2) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, dan tidak ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau tersedia untuk dijual.

- investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- investasi yang ditetapkan oleh entitas dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan Piutang.

Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan dan Piutang dihitung dengan menggunakan metode bunga efektif yang diakui pada laporan laba rugi sebagai "pendapatan bunga".

Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat investasi dan diakui didalam laporan keuangan sebagai 'Cadangan Kerugian Penurunan Nilai'.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

g. Financial Asset and Financial Liabilities (Continued)

Financial Asset (Continued)

The financial assets owned by the Company include the categories:

1) financial assets at fair value through profit or loss,
2) loans and receivables,
3) held-to-maturity financial assets, and
4) available-for-sale financial assets.

Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

The classification depends on the purpose for which the financials assets were acquired.

1) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market and The Company does not intend to sell immediately or in the short term.

- *those that the Company intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that the entity upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss;*
- *those that the Company upon initial recognition designates as available for sale; or*
- *those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of loans and receivables.*

Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. Interest Income from loans and receivables are calculated using the effective interest method that recognize in the income statement as 'Interest income'.

In the case of impairment, the impairment loss is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loan and receivables recognised in the income statement as 'Allowance for impairment losses'.

2) Held-to-maturity financial assets

Held-to-maturity investments are nonderivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities which is the Company has the positive intention and ability to hold to maturity, and are not specified at fair value through profit loss or available for sale.

- *those that the Company upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss;*
- *those that the Company designates as available for sale; and*
- *those that meet the definition of loans and receivables.*

These are initially recognised at fair value including transaction costs and subsequently measured at amortised cost, using the effective interest method.

Interest Income from loans and receivables are calculated using the effective interest method that recognize in the income statement as 'Interest income'.

In the case of an impairment, the impairment loss is been reported as a deduction from the carrying value of the investment and recognised in the income statement as 'Allowance for "impairment losses".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

g. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Aset Keuangan (Lanjutan)

3) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori aset keuangan lainnya.

- Pengakuan pendapatan dan beban
  a. Aset tersedia untuk dijual serta aset keuangan dan kewajiban keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan suku bunga efektif.

  b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

     Perubahan nilai wajar dari aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual diakui pada pendapatan komprehensif lainnya sebagai "keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar aset keuangan yang tersedia untuk dijual".

     Ketika aset keuangan diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual telah dijual, akumulasi penyesuaian nilai wajar yang diakui pada ekuitas dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Pendapatan bunga atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual dihitung dengan menggunakan metode bunga efektif yang diakui pada laporan laba rugi sebagai "pendapatan bunga".

Liabilitas Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari Hutang klaim, Hutang co-guarantee dan liabilitas lain-lain.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, atau pada saat Perusahaan mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Perusahaan secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perusahaan diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Klasifikasi dan Instrumen Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut.

Saling Hapus Aset Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

g. Financial Assets and Liabilities (Continued)

Financial Asset (Continued)

3) Available-for-sale financial assets

Available-for-sale financial assets are nonderivative financial assets that designated as available for sale or are not classified in any of the other categories of financial assets.

- *Income and expense recognition*
  a. For available-for-sale securities and financial assets and liabilities held at amortized cost, interest income and interest expense is recognised in the statement of income using the effective interest rate method.

  b. Gains and losses arising from changes in the fair value of the financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are included in the statement of income.

     The change at fair value of financial assets classified as available for sale are recognized in other comprehensive income as "gains or losses from changes at fair value of financial assets available for sale".

     When financial assets classified as available for sale have been sold, the accumulated fair value adjustments recognized in equity are included in the income statement. Interest Income from loans and receivables are calculated using the effective interest method that recognize in the income statement as 'Interest income'.

Financial Liabilities

The company classifies its financial liabilities in the category of financial liabilities are measured by amortized cost. Financial liabilities of the Company consits of claim payable, co-guarantee payable and other liabilities.

At the time of initial recognition, financial liabilities are amortized cost category recognized at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate.

Derecognition

The Company terminates recognition of financial assets when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when the Company transferred all rights to receive the contractual cash flows of the financial asset in a transaction in which the Company has transferred substantially all the risks and rewards of ownership of the asset transferred financial. Any rights or liabilities for financial assets that are transferred incurred or that are still owned by the Company is recognized as a separate asset or liabilitv.

The Company terminates recognition of financial liability when the liability specified in the contract are released or canceled or expired.

Classes of Financial Instrument

The Company classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments.

Offseting Financial Instruments

Financial assets and liabilities can be offset and the net amount presented in the statement of financial position if, and only if, the Company has a legally enforceable right to offset the recognised amounts and intend to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

h. Pinjaman yang diberikan

Pinjaman yang diberikan merupakan aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pinjaman yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Termasuk dalam pinjaman yang diberikan adalah Pinjaman Bagi Hasil (PBH) dan pinjaman koperasi pegawai. Pinjaman yang diberikan disajikan dalam jumlah neto setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit penyisihan kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atas pinjaman yang telah dihapusbukukan sebelumnya, dikreditkan ke penyisihan kerugian penurunan nilai di laporan posisi keuangan.

i. Piutang Co-Guarantee dan Piutang Re-Guarantee

Pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggungan mitra co-guarantee dan mitra re-guarantee dicatat sebagai Piutang dalam penyelesaian.

Pengakuan Piutang dalam penyelesaian dilakukan setiap terjadi pembayaran klaim yang menjadi tanggungan mitra co-guarantee dan mitra re guarantee.

Piutang dalam penyelesaian diakui sebagai Piutang co-guarantee pada saat mitra co-guarantee mengaksep atau mengakui Piutang dalam penyelesaian tersebut sebagai Hutangnya (sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja sama antara Perusahaan dengan mitra co-guarantee), namun pembayaran belum dilakukan.

Piutang dalam penyelesaian diakui sebagai Piutang re-guarantee pada saat diterbitkannya SOA (Statement of Acoount), namun pembayaran belum dilakukan.

j. Beban Dibayar Dimuka

Beban dialokasikan sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus *(straight-line method)*.

Beban co-guarantee, beban re-guarantee, beban fee based income bank pelaksana dan beban komisi agen dibayar dimuka diamortisasi secara proporsional mengikuti pola pengakuan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan /Kafalah.

k. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai Perusahaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Perusahaan menerapkan PSAK No. 13 (Revisi 2011), "Properti Investasi", dimana Perusahaan telah memilih model biaya sebagai dasar pengukuran properti investasi.

Penyusutan bangunan dan pengembangan bangunan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat ekonomisnya.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laba rugi dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Untuk pemindahan dari properti investasi ke properti yang digunakan sendiri, Perusahaan menggunakan metode biaya pada tanggal perubahan penggunaan. Jika properti yang digunakan menjadi properti investasi, Perusahaan mencatat properti investasi tersebut sesuai dengan kebijakan aset tetap sampai dengan saat tanggal terakhir perubahan penggunaannya.

Properti investasi mencakup juga properti dalam proses pembangunan yang di masa depan akan digunakan sebagai properti investasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

h. Loans

Loans are financial assets nonderivatif with fixed or determinable payments and have not quoted in an active market. Loans are initially measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable and an additional cost to acquire the asset, and after initial recognition are measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Included in loans is the loan-sharing (PBH) and loan cooperative employees. Loans are recorded net of allowance for impairment losses.

Loans are written off when there is no realistic prospect of the return of the loan. The loans can not be repaid is written off by debiting the allowance for impairment losses. Subsequently repayment on loans previously written off are credited to the allowance for impairment losses in the statement of financial position.

i Co-Guarantee and Re-Guarantee Receivable

Payment of claims to the sole recipent of a guarantee that partners co-guarantee and partners re-guarantee are recorded as a receivable in the settlement.

The recognition of receivables in the settlement of claims payments made every occur a dependent partner co-guarantee and partner re-guarantee.

Receivables in the settlement are recognized as Co-guarantee Receivables in the completion of when partners co guarantee accept in settlement of the accounts (in accordance with a term of the Agreement of Cooperation between the Perum Jamkrindo with partners Co-guarantee), but payment has not been done.

Receivables in the settlement are recognized as a receivables re-guarantee at the time of the SOA (Statement of Acoount), but the payment has not been made.

j. Prepaid Expense

Expenses are allocated according to the useful life of each charge with a straight-line method (straight-line method).

Prepaid co-guarantee expense, re-guarantee expense, fee based income of banks implementing and agent commission expense are amortized proportionally to follow the pattern of revenue recognition Guarantee/Kafalah Service Fee.

k. Investment Property

The investment properties is property (land or building or part of a building or both) held by the Company to generate lease or for capital appreciation or both, and are not for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sold in the ordinary course of business. Company adopted SFAS No. 13 (Revised 2011), "Investment Property", which the Company has chosen the cost model as the basis of measurement of investment property.

Depreciation of buildings and infrastructure are calculated using the straight-line method based on the estimated useful lives.

Investment property is derecognized when either it has been disposed of or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future benefit is expected from its disposal. Gains or losses on the retirement or disposal of an investment property are recognized in the statement of income in the year of retirement or disposal.

For removal of investment property to owner-occupied property, the Company uses the cost method at the date of change in use. If the property is used as an investment property, the Company recorded an investment property in accordance with the policy of fixed assets up to the date of change in use.

Investment property includes properties in progress that will be used as investment property in the future.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

l. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya dinyatakan sebesar harga perolehan. Setelah pengukuran awal, aset tetap diukur dengan model biaya, dicatat pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai.

Harga perolehan mencakup harga pembelian dan semua beban yang terkait secara langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk memungkinkan aset tersebut beroperasi sebagaimana ditentukan oleh manajemen.

Tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan. Penyusutan aset tetap selain tanah dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan hingga mencapai nilai sisa yang diestimasikan sebesar nihil, sepanjang estimasi masa manfaatnya sebagai berikut:

Jenis Aset *(Asset Type)*	Masa Manfaat (tahun) *Useful Life (year) Annual*	Penyusutan Per Tahun (%) *Depreciation (%)*
Bangunan Gedung *(Buildings)*	20-30	3,33-5
Kendaraan Bermotor *(Vehicle)*	5	20
Inventaris *(Equipment)*	2-10	50-10

Perusahaan menerapkan kebijakan kapitalisasi aset tetap dengan nilai minimum sebesar Rp5.000.000, kecuali untuk inventaris sebesar Rp3.000.000.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Perusahaan mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dalam periode keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, biaya-biaya tersebut tidak didepresiasikan. Biaya terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak dengan menggunakan metode garis lurus.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan melakukan review periodik aset tetap untuk memastikan sisa masa manfaat, nilai residu, dan metode penyusutan masih sesuai dengan estimasi sebelumnya.

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan melakukan penelaahan untuk memutuskan apakah terdapat indikasi penurunan nilai.

m. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tak berwujud terdiri dari harga beli, termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat direstitusi, setelah dikurangi diskon dan rabat dan semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan.

Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Perusahaan menilai apakah umur manfaat aset tak berwujud terbatas atau tidak terbatas dan, jika terbatas, jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama umur manfaat. Aset tak berwujud dianggap oleh Perusahaan memiliki umur manfaat tidak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode aset diperkirakan menghasilkan arus kas neto untuk entitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

l. Fixed Assets

Fixed assets initially stated at acquisition cost. After initial measurement, fixed assets are measured at the cost model, is recorded at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment

Acquisition cost includes the purchase price and all expenses related directly to bringing the asset to the location and condition necessary to allow these assets to operate as determined by management.

Land is stated at acquisition cost and is not depreciated. Depreciation of fixed assets excluding land is calculated using the straight-line method to allocate the purchase price to achieve the estimated residual value of nil, over the expected useful lives as follows:

The company has the policy on capitalization of its fixed assets with the minimum amount of Rp5,000,000, except to inventory with the amount of Rp3,000,000.

Costs after the initial recognition are recognized as part of the carrying amount of the asset or as a separate asset, as appropriate, only if the company is likely to benefit economically in the future with respect to the assets and the cost of the item can be measured reliably. The cost of repairs and maintenance are charged to the income statement in the financial period when these costs occur.

Fixed assets are derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the year the asset is derecognized.

All cost and expenses incurred in relation with the acquisition of the landright, such as license fee, survey and measurement cost, notarial fees and taxes, are deferred and presented separately from the cost of the landright was presented as part of "Other Assets" in the statements of financial position, and amortized over the period of the related landright using the straight-line method.

The carrying amount of assets immediately reduced by the amount that can be recovered if the asset's carrying amount is greater than the estimated recoverable amount.

At each reporting date the Company perform periodic reviews of fixed assets to ensure the remaining useful lives, residual values and depreciation method are comparable with previous estimates.

At each reporting date the Company perform conducts a review to determine whether there is any indication of impairment.

m. Intangible Assets

Intangible assets are initially recognized at cost. The cost of acquisition of intangible assets consists of the purchase price, including import duties and taxes that can not be direstitusi pernbelian, net of discounts and rebates and all the costs that are directly attributable to preparing the asset so it is ready for use.

After initial recognition, intangible assets are recorded at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses.

The Company assesses whether the useful life of intangible assets is limited or unlimited and, if limited, period of time or number of production or similar units quantity produced during useful life. Intangible assets are considered by the Company to have an indefinite useful life when, based on an analysis of all relevant factors, there is no limit in sight at the moment over the period the asset is expected to generate net cash flows of the entity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

m. Aset Tak Berwujud (Lanjutan)

Jumlah tersusutkan aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas dialokasikan secara sistematis selama umur manfaatnya. Amortisasi dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, yakni ketika aset berada pada lokasi dan dalam kondisi untuk beroperasi sesuai dengan cara yang dimaksudkan oleh manajemen. Amortisasi dihentikan pada tanggal yang lebih awal antara ketika aset tersebut dikelompokkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual (atau dimasukkan dalam kelompok aset lepasan yang diklasifikasikan dalam aset yang dimiliki untuk dijual. Metode amortisasi yang digunakan menggambarkan perkiraan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomi masa depan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka digunakan metode garis lurus.

1. Lisensi

Lisensi disajikan berdasarkan harga perolehan Lisensi memiliki masa manfaat yang terbatas dan disajikan berdasarkan harga perolehan diikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan bertujuan untuk mengalokasikan harga perolehan lisensi selama estimasi masa manfaatnya (15-20 tahun).

2. Piranti Lunak Komputer

Lisensi piranti lunak komputer yang diperoleh dikapitalisasi sebesar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan membuat piranti lunak tersebut siap untuk digunakan. Biaya ini diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya (3-5 tahun).

Biaya yang berhubungan dengan pengembangan atau pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya-biaya yang terkait langsung dengan produksi piranti lunak yang unik dan dapat diidentifikasi serta dikendalikan oleh Perusahaan dan kemungkinan besar akan memberikan manfaat ekonomi yang melebihi biayanya dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, diakui sebagai aset tak berwujud. Biaya-biaya langsung ini meliputi, antara lain, biaya karyawan yang turut mengembangkan piranti lunak dan porsi biaya overhead yang terkait.

Biaya pengembangan piranti lunak komputer yang diakui sebagai aset dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya (tidak lebih dari 3 tahun).

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan melakukan review periodik atas aset tak-berwujud untuk memastikan periode amortisasi dan metode amortisasi masih sesuai dengan estimasi sebelumnya.

n. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan) dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

1. Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dan aset keuangan tersebut Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun penyisihan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

m. Intangible Assets (Lanjutan)

Total depreciation of intangible assets with finite useful life are systematically allocated during their useful life. Amortisation begins when the asset is available for use, ie when the asset is at a location and in a condition to operate in the manner intended by management. Amortization stopped at an earlier date between when the assets are classified as assets held for sale (or included in a loose group of assets classified as assets held for sale. The method of amortization is used illustrates the expected pattern of consumption of the entity over the future economic benefits. If the pattern can not be determined reliably, the straight-line method is used.

1. *Licences*

Licences are shown at historical cost licences have a definite useful life and are carried at cost less accumulated amortisation.

Amortisation is calculated using the straight-line method to allocate the cost of licences over their estimated useful lives (15-20 years).

2. *Computer Software*

Acquired computer software lioences are capitalised on the basis of the costs incurred to acquire and bring to use the specific software. These costs are amortised over their estimated useful lives (3-5 years).

Costs associated with developing or maintaining computer software programmes are recognised as an expense as incurred. Costs that are directly associated with the production of identifiable, and unique software products controlled by company, and that will probably generate economic benefits exceeding costs more than one year, are recognised as intangible assets. Direct costs include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.

Computer software development costs recognised as assets are amortised over their estimated useful lives (not exceeding three years).

At each reporting date the assets perform periodic reviews to ensure intangibles amortization period and amortization method is in accordance with previous estimates.

n. Allowances for Impairment of Financial Assets

The company, assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or the company of financial assets is impaired.

A financial asset or the company of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of' one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a loss event) and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the company of financial assets that can be reliably estimated.

1. Financial Assets carried at amortised cost

The amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value, of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the, loss is recognised in the consolidated income statement. If a loan or held-to--maturity investment has a variable interest rate) the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract. As a practical expedient, the company may measure impairment on the basis of an instruments fair value using an observable market price.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

n. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)

1. Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (Lanjutan)

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit (yaitu berdasarkan proses pemeringkatan Perusahaan yang mempertimbangkan jenis aset, industri, lokasi geografis, jenis agunan, status tunggakan dan faktor-faktor relevan lainnya). Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur untuk membayar seluruh Hutang yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

Arus kas masa datang dan kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievauasi secara kolektif diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual atas aset-aset di dalam kelompok tersebut dan kerugian historis yang pemah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut. Kerugian historis yang pemah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini: yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Estimasi terhadap perubahan arus kas masa datang dari kelompok aset harus mencerminkan dan memiliki arah yang konsisten dengan perubahan data terkait yang dapat diobservasi dari satu periode ke periode berikutnya (seperti perubahan tingkat pengangguran, harga properti, harga komoditas, status pembayaran, atau faktor-faktor lainnya yang merupakan indikasi timbulnya kerugian dalam kelompok aset keuangan tersebut serta besarannya). Metodologi dan asumsi yang digunakan dalam mengestimasi arus kas masa datang dikaji ulang secara berkala oleh Perusahaan untuk mengurangi perbedaan antara taksiran jumlah kerugian dengan jumlah kerugian aktualnya.

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur) maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya, diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun penyisihan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi.

2. Aset yang tersedia untuk dijual

Penurunan nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terdapat bukti objetif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya.

Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasikan dari ekuitas ke laba rugi merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi atas investasi instrument ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual tidak dibalik melalui laba rugi.

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen hutang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

n. Allowances for Impairment of Financial Assets (Continued)

1. Financial Assets carried at amortised cost (Continued)

For the purposes of a collective evaluation of impairment; financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics (that is, on the basis of the company grading process that considers asset types industry, geographical location, collateral type past due status and other relevant factors). Those characteristics are relevant to the estimation of future cash flows from groups of such assets by being indicative of the debtors' ability to pay all amounts due according to the contractual terms of the assets being evaluated.

Future cash flows in a Company of financial assets that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of the contractual cash flows of the assets in the Company and historical loss experience for assets with credit risk characteristics similar to those in the group. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effect of current conditions that did not affect the period on which the historical loss experience is based and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist.

Estimates of changes in future cash flows for groups of assets should reflect and be directionally consistent with changes in related observable data from period to period (for example, changes in unemployment rates, property prices payment status, or other factors indicative of changes in the probability of losses in the company and their magnitude). The methodology and assumptions used for estimating future cash flows are reviewed regularly by the company to reduce any differences between loss estimates and actual loss experience.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreeses and the decrease can be related objectively to an event occurring, after the impairment was recognised (such as an improvement in the debtors credit rating), the previously recognised impairment loss is reversed by adjusting the allowance account The amount of the reversal is recognised in the income statement.

nterest income on financial assets is impaired continues to be recognized on the basis of interest rates used to discount the future cash flows in measuring the impairment loss. When a subsequent event causes the amount of impairment loss decreases impairment, the impairment loss previously recognized to be restored and the recovery is recognized in the income statement.

2. Assets classified as available for sale

Decrease in fair value of available-for-sale financial assets has been recognized in other comprehensive income and there is an objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial asset has not been derecognized.

The amount of the cumulative loss that is reclassified from equity to profit or loss is the difference between the acquisition cost (net of principal repayment and amortization) and current fair value, less any impairment loss before financial asset has been recognized in profit or loss.

Impairment losses are recognized in profit or loss on investment in equity instruments classified as available for sale are not reversed through profit or loss.

If, in subsequent period, the fair value of a debt instrument classified as available for sale increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in profit or loss, the impairment loss is reversed through the income statement.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

o. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Nilai tercatat dari aset yang bukan aset keuangan milik Perusahaan, kecuali aset pajak tangguhan, ditelaah setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika indikasi tersebut ada, maka nilai yang dapat dipulihkan dari aset tersebut akan diestimasi.

Nilai yang dapat diperoleh kembali dari suatu aset atau unit penghasil kas adalah sebesar jumlah yang lebih tinggi antara nilai pakainya dan nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya untuk menjual. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini terhadap nilai kas kini dan risiko spesifik terhadap aset tersebut.

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, aset yang tidak dapat diuji secara individual akan digabungkan dalam kelompok yang lebih kecil yang memberikan arus kas masuk dari penggunaan Berkelanjutan yang sebagian besar independen terhadap arus kas masuk atas aset lainnya atau kelompok aset ("unit penghasil kas" atau "UPK").

Penyisihan penurunan nilai diakui jika nilai tercatat dari suatu aset atau UPK melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Penyisihan penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset non keuangan, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi.

p. Pendapatan Bunga/ Bagi Hasil

Pendapatan bunga diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tetap mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umum dari aset keuangan atau kewajiban keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau kewajiban keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

q. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode balance sheet liability untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan Perusahaan.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

o. Impairment of Financial Assets

The carrying amount of financial assets that are not assets of the Company, except for deferred tax assets, are reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication of impairment. If such an indication exists, the recoverable value of the asset will be estimated.

The recoverable value of an asset or cash-generating unit is the higher of the amount between its value in use and fair value of an asset or cash-generating unit less costs to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the present cash value and the risks specific to the asset.

For the purpose of impairment testing, assets that can not be tested individually be combined in smaller groups that provide cash inflows of Sustainable use that are largely independent of the cash inflows of other assets or groups over assets ("unit penghasil kas" or "UPK ").

Provision for impairment is recognized if the carrying amount of an asset or UPK exceeds its recoverable value. Provision for impairment loss is recognized in profit or loss for the year.

Recovery of impairment loss, for non-financial assets, are recognized if, and only if, there is a change in the estimates used to determine the recoverable amount since the last impairment testing. Reversal of impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

p. Interest/ Profit Sharing Income

Interest income are recognised in the statement of income using the effective interest method. The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument (or, where appropriate, a shorter period) to the carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the company estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. This calculation covers all commision, provision, and other forms accepted by the parties in the contract which are an integral part of effective interest rate, transaction costs, and all other premiums and discounts.

If financial assets or similar financial asset groups have been impaired as a consequence of loss on impairment, then the interest income subsequently acquired is recognized based on interest rate used for discounting future cash flows in calculating the loss on impairment.

q. Taxation

All temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying values for financial reporting purposes is recognized as deferred income tax using the liability method.

Deferred income tax is recognized, using the balance sheet liability method for all temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying values in the financial statements of The company.

Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted at the reporting date and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled.

A deferred tax asset is recognized to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the asset can be utilized

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

q. Perpajakan (Lanjutan)

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan dicatat pada saat diterimanya surat ketetapan, atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding diterima.

r. Imbal Jasa Penjaminan/ Kafalah, Pendapatan Komisi Re-Guarantee, Pendapatan Jasa Administrasi Penjaminan, Beban Komisi Agen, *Fee based Income* Bank Pelaksana, Beban *Co-Guarantee* dan Beban *Re-Guarantee*

Pendapatan imbal jasa penjaminan/ kafalah, pendapatan komisi re guarantee dan beban komisi agen yang besarnya dinyatakan sebagai prosentase tertentu dari IJP, beban fee based income-bank pelaksana, beban co-guarantee dan beban re-guarantee diakui sejak bulan Sertifikat Penjaminan (SP) diterbitkan.

Pendapatan imbal jasa penjaminan/ kafalah dan pendapatan komisi/ ujrah re guarantee yang besarnya dinyatakan sebagai pendapatan tangguhan dan diamortisasi sesuai dengan periode berlakunya sertifikat penjaminan kecuali sertifikat penjaminan existing yang diterbitkan sebelum 01 Januari 2013 diamortisasi sesuai dengan periode berlakunya Sertifikat Penjaminan dengan batas waktu maksimal 48 (empat puluh delapan) bulan.

Pendapatan jasa administrasi penjaminan diakui seluruhnya saat Sertifikat Penjaminan (SP) diterbitkan.

Beban fee based income-bank pelaksana, beban komisi/ ujrah agen yang besarnya dinyatakan sebagai prosentase tertentu dari IJP, beban co-guarantee dan beban re-guarantee yang berjangka waktu lebih dari satu tahun, diakui sebagai biaya dibayar dimuka dan diamortisasi sesuai dengan periode berlakunya Sertifikat Penjaminan.

Pendapatan imbalan jasa penjaminan/ kafalah disajikan secara bruto sebelum dikurangkan fee base income-bank pelaksana, beban komisi agen, beban co guarantee dan beban re guarantee.

Jika terdapat pelunasan dipercepat atas pinjaman yang dijaminkan, jumlah pendapatan imbalan jasa penjaminan dan pendapatan komisi re guarantee, serta beban dibayar dimuka atas fee based income-bank pelaksana, beban komisi agen, beban co guarantee dan beban re-guarantee yang masih ditangguhkan diakui seluruhnya ke laporan laba rugi tahun berjalan.

s. Hutang Klaim

Hutang klaim merupakan Hutang Perusahaan kepada pemberi pinjaman yang dijamin oleh Perusahaan. Hutang klaim yang tercatat adalah permohonan/ pengajuan klaim yang telah diproses dan disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan.

t. Beban Klaim

Beban klaim dicatat pada saat terjadinya kerugian. Beban klaim yang telah disetujui oleh komite klaim namun belum dilakukan pembayaran dicatat sebagai hutang klaim.

Perubahan jumlah hutang klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah utang klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laporan laba rugi pada tahun terjadinya perubahan.

u. Cadangan Klaim

Cadangan klaim ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK. 010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 010/2008 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Berdasarkan ketentuan tersebut cadangan klaim yang wajib dibentuk minimal sebesar 0,25% dari total nilai penjaminan outstanding yang ditanggung perusahaan.

Kenaikan(penurunan) cadangan klaim merupakan selisih cadangan klaim periode berjalan dan periode sebelumnya.

v. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan telah mengikutsertakan karyawannya ke dalam program pensiun, yaitu Program Asuransi Kesejahteraan Karyawan dan Program Kesejahteraan Karyawan melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Selain program pensiun, Perusahaan juga membukukan imbalan pasca kerja manfaat pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

q. Taxation (Continued)

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the results of the appeal.

r. Guarantee/ Kafalah Service Fee, Re-Guarantee Commission Fee, Guarantee Administration Service Fee, Agent Commission Expenses, Fee Based Income-Executive Bank and Co-Guarantee Expenses, and Re-Guarantee Expenses

Underwriting compensation income, commission income and expenses re-guarantee agency commission in the amount expressed as a certain percentage of the IJP, the burden of fee-based income-bank executive, co-guarantee load and re-load the guarantee recognized since Guarantee Certificate (SP) was published.

Income guarantee/ kafalah compensation and commission/ ujrah income guarantee in the amount re-stated as deferred revenue and amortized over the period of validity of the certificate unless the certificate of guarantee existing guarantees issued prior to January 1, 2013 is amortized in accordance with the Guarantee Certificate validity period with a maximum time limit of 48 (forty-eight) months.

Administrative services revenue assurance is recognized when all of Guarantee Certificates (SP) was published.

Fee-based load-bank executive, agent/ ujrah commission expense in the amount expressed as a certain percentage of the IJP, the burden of co-guarantee and re-guarantee load a maturity of more than one year, are recognized as prepayments and amortized in accordance with the Guarantee Certificate validity period .

Underwriting fee income is presented on a gross basis before the deductible fee income base-bank executive, agent commission expense, co guarantee expense and re guarantee expense.

If there is an accelerated repayment of the loan collateral, the amount of the guarantee fee income and commission income re-guarantee, as well as prepaid expenses over the bank's fee-based income-executor, agent commission expense, burden of co guarantee and re-guarantee loads are still suspended entirely recognized to profit or loss for the year

s. Debt Claim

Claim payable is debts of the Company to the lender Bank guaranteed by the Company. Recorded claim payable are debts that have been processed and approved but not yet paid. Payables are stated at the amount of claim has been authorization dan paid.

t. Claim Expense

Claim expenseare recorded at the time of the loss. Claim expense that have been approved by the committee but has not made a payment claim is recorded as a debt claim.

Changes in the amount of debt claims, as a result of the review process further and the difference between the amount of debt claims with claims paid, are recognized in the income statement in the year of change.

u. Claim Reserve

Claims reserves established by the Regulation of the Minister of Finance No. 99/PMK. 010/2011 on Amendments to the Regulation of the Minister of Finance No. 222/PMK. 010/2008 About the Credit Guarantee Company and Re-Credit Guarantee Company. Under these provisions shall be established a claim reserve a minimum of 0.25% of the total value of outstanding guarantee company covered.

Increase (decrease) in reserve claim reserve represents the excess up the claim period and prior periods.

v. Post Employment Benefit

Perum Jaminan Kredit Indonesia have registered their employees into pension plan, that is Program Asuransi Kesejahteraan Karyawan and Program Kesejahteraan Karyawan through Financial Institution Pension Fund (DPLK). Besides pension plan, company also recognizes defined benefit post employment benefit according to Labor Law.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

v. Imbalan Pasca Kerja (Lanjutan)

Program imbalan pasca kerja dilaksanakan sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 dengan metode perhitungan aktuaria yang digunakan untuk menentukan nilai kini kewajiban manfaat pasti dan biaya jasa kini adalah Projected Unit Credit, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.24 Tahun 2004 (PSAK 24 – Revisi 2010).

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun dimana Perusahaan akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah (dana pensiun) dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut apabila dana pensiun tersebut tidak memiliki aset yang memadai untuk membayar seluruh imbalan karyawan yang timbul dari pelayanan yang diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu.

Kewajiban program imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan dihitung sebesar nilai kini dari estimasi kewajiban imbalan pasca kerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar aset bersih dana pensiun. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan metode projected-unit-credit.

Ketika imbalan pasca kerja berubah, porsi kenaikan atau penurunan imbalan sehubungan dengan jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa lalu dibebankan atau dikreditkan ke dalam laporan laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan hingga imbalan pasca kerja menjadi hak karyawan. Imbalan pasca kerja yang telah menjadi hak karyawan diakui segera sebagai beban dalam laporan laba rugi.

Keuntungan atau kerugian aktuaria diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuaria bersih yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasca kerja pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian diakui dengan menggunakan metode garis lurus selama sisa masa kerja rata-rata karyawan. Jika tidak, keuntungan atau kerugian aktuaria tidak diakui.

Selain program pensiun imbalan pasti, Perusahaan juga memiliki program iuran pasti dimana Perusahaan membayar iuran yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari gaji pokok karyawan kepada program asuransi pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan. Iuran dibebankan ke dalam laporan laba rugi pada saat terutang.

Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasti diamortisasi selama rata-rata sisa masa kerja yang akan datang. Jumlah yang diakui sebagai kewajiban manfaat pasti di neraca merupakan nilai kini kewajiban manfaat pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui dan biaya jasa lalu yang belum diakui.

w. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Berelasi

Sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2010) tentang "Pengungkapan pihak-pihak yang berelasi", yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut :

a Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut :

i memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor,
ii memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau

iii personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

v. Post Employment Benefit (Continued)

Post employment benefit is executed according to Labor Law No.13 year 2003 use aktuarial calculation method which applied to determine present of value defined benefit obligation and current service cost that is Projected Unit Credit methos, as stated in Statement of Financial Accounting Standard No.24 year 2004 (PSAK 24 - Revised 2004).

A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit to be provided, usually based on one or more factors such as age, years of service or compensation.

A defined contribution plan is a pension plan under which The company will pay fixed contributions into a separate entity (a fund) and has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not have sufficient assets to pay all employee benefits arising of services provided by employees on the present and the past.

Defined benefit plan obligations are recognized in the statement of financial position is calculated at the present value of the estimated post-retirement benefit obligations in the future arising from services rendered by employees who have been on the present and the past, less the fair value of net assets of the pension fund. The calculation is performed by an independent actuary with the projected-unit-credit.

When the post-employment benefits change, the portion of the increase or decrease in compensation in connection with the services that have been provided by the employee in the past charged or credited to the income statement using the straight-line method over the expected average remaining working lives of the employees until the benefits become vested employment . Post-employment benefits become vested is recognized immediately as an expense in the income statement.

Actuarial gains or losses are recognized as income or expense if the net actuarial gains or losses that have not been recognized at the end of the previous reporting year exceeded 10% of the present value of post-employment benefits on that date. Gains or losses are recognized on a straight-line basis over the remaining working lives of the average employee. Otherwise, the actuarial gain or loss is not recognized.

In addition to the defined benefit pension plan, The company also has defined contribution plans in which the Company pays fees calculated based on a certain percentage of the employee's basic salary to the pension insurance program held by the pension funds of financial institutions. Contributions are charged to the income statement when due.

Unrecognized net accummulated actuarial gain and losses which exceeding 10% from present value of defined benefit obligation are amortized during average of rest of year of service which will come. Amounts which recognized as defined benefits obligation in balance sheets are present value of defined benefits obligation which are adjusted by actuarial gain or losses which not yet been recognized.

w. Transactions with Related Parties

In accordance with PSAK No. 7 (Revised 2010) regarding "related party Disclosure", the meaning of a related party is a person or entity that is related to a reporting entity as follow :

a A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person :

i has control or joint control over the reporting entity,

ii has significant influence over the reporting entity; or is

iii member of the key management personel of the reporting entity of a parent of the reporting entity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

w. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Berelasi (Lanjutan)

b Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut :

i entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain),
ii suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya),
iii kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama,
iv satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga,
v Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari suatu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor,
vi Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a),
vii orang yang diidentifikasi dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Entitas pelapor yang berelasi dengan pemerintah tidak mengungkapkan persyaratan pada PSAK 7 Revisi 2010 paragraf 17 yaitu, jika entitas memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi selama periode yang dicakup dalam laporan keuangan, maka entitas mengungkapkan sifat dari hubungan dengan pihak-pihak berelasi serta informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen, yang diperlukan untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam laporan keuangan. Pengungkapan sekurang-kurangnya meliputi:

i Jumlah transaksi

ii Jumlah saldo, termasuk komitmen :
a. Persyaratan dan ketentuannya, termasuk apakah terdapat jaminan, dan sifat imbalan yang akan diberikan, untuk penyelesaian,
b. Rincian garansi yang diberikan atau diterima,
c. Penyisihan piutang ragu- ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut, dan
d. Beban yang diakui selama periode dalam hal piutang ragu-ragu atau penghapusan piutang dari pihak-pihak berelasi.

Entitas pelapor yang berelasi dengan pemerintah mengungkapkan mengenai transaksi dan saldo terkait dengan:

i Nama departemen atau instansi pemerintah dan sifat hubungannya dengan entitas pelapor (misalnya, pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan).

ii Informasi berikut dengan rincian yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak transaksi dengan pihak-pihak berelasi terhadap laporan keuangan :
a. Sifat dan jumlah setiap transaksi yang secara individual signifikan; dan

b. Untuk transaksi lainnya yang secara kolektif, tetapi tidak secara individu, signifikan, indikasi secara kualitatif atau kuantitatif atas luasnya transaksi tersebut.

Berdasarkan PSAK No. 7 (Revisi 2010), transaksi antara Perusahaan dengan pemerintah, BUMN lainnya dan perusahaan-perusahaan yang dimiliki, atau dikendalikan negara, termasuk Lembaga Penjamin Simpanan tidak dikategorikan sebagai transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi.

x. Kepentingan Non Pengendali

Kepentingan non pengendali adalah ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung dan tidak langsung pada entitas anak.

Kepentingan non pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

w. Transactions with Related Parties (Continued)

b An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:

i the entity and the reporting entity are members of the same the Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
ii one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of member of a company of which the other entity is a member).

iii both entities are joint ventures of the same third party.

iv one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
v the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity.
vi the entity controlled or jointly controlled by a person identified in (a)

vii a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personel of the entity (or of a parent of the entity).

Reporting entities are related to the government did not disclose terms of the Revised 2010 IAS 7 paragraph 17 that is, if the entity had transactions with related parties during the period covered by the financial statements, the entity shall disclose the nature of the relationship with related parties as well as information about the transactions and balances, including commitments, necessary to understand the potential impact of such relationships in the financial statements. Disclosure shall at least include:

i Total Transaction

ii Total balances, including commitments :
a. Terms and conditions, including whether there is a guarantee, and the nature of the reward that will be given, for completion,
b. Details of the warranty is given or received,
c. Allowance for doubtful accounts related to the amount of the balance, and
d. Expense recognized during the period in terms of doubtful accounts receivable or elemination of related parties.

Reporting entities are related to the government revealed on transactions and balances related to:

i Name of the department or government agency and the nature of its relationship with the reporting entity (eg, control, joint control or significant influence).

ii The following information with enough detail that enables users of financial statements to understand the impact of transactions with related parties on the financial statements:
a. The nature and amount of each individually significant transactions; and
b. For other transactions that are collectively, but not individually, significant, a qualitative or quantitative indication on the extent of such transactions.

Based on PSAK No. 7 (Revised 2010), transaction between the Company and the government, other state owned entities and companies which are owned or controlled by the government, including the deposit insurance corporation is not categorized as transaction with related parties.

x. Non-Controlling Interests

Non-controlling interest is the equity of the subsidiary not attributable, directly and indirectly in subsidiaries.

Non-controlling interests are presented in equity in the consolidated financial statements, separately from the equity owners of the parent.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

y. Investasi pada Sukuk

Investasi pada sukuk dapat diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan atau diukur pada nilai wajar.

Investasi pada sukuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan jika:

a. investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual; dan
b. persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada biaya perolehan termasuk biaya transaksi dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk.

Investasi pada sukuk yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar. Pada saat pengakuan awal, investasi diukur pada nilai wajar sebesar biaya perolehan tidak termasuk biaya transaksi. Untuk selanjutnya diukur pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Bank mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat, maka Bank mengakui rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

y. Investment to Sukuk

Investments in sukuk may be classified as measured at cost or fair value.

Investments in sukuk are classified as measured at cost if:

a. The investments held within a business model whose main aim to obtain contractual cash flows; and
b. contractual terms determine the specific date of payment of principal and / or results.

At initial recognition, investments in sukuk are measured at cost, including transaction costs and the difference between the acquisition cost and nominal value is amortized straight-line basis over the term of the sukuk.

Investments in sukuk which are not classified as measured at historical cost, are classified as at fair value. At initial recognition, investments are measured at fair value at acquisition cost excluding transaction costs. To subsequently measured at fair value. The difference between the fair value and the carrying amount is recognized in profit or loss.

For investments in sukuk are measured at cost, if there is an indication of impairment, the Bank measures the recoverable amount. If the recoverable amount is less than the carrying amount, the Bank recognizes an impairment loss. Recoverable amount is the amount that would be obtained from the principal returns without taking into account the present value.

3. KAS DAN SETARA KAS / *3. CASH AND EQUIVALENT CASH*

	2014	2013	
Kas			***Cash on hand***
Kas Perusahaan	5.031.485.447	2.802.387.331	*Parent Cash*
Entitas Anak - PT Jamkrindo Syariah	125.751.619	-	*Subsidiary - PT Jamkrindo Syariah*
Jumlah	**5.157.237.066**	**2.802.387.331**	***Total***
Giro Bank			***Bank Account***
Pihak Berelasi			***Related Party***
BPD DKI	232.578.694	895.555.912	*BPD DKI*
BPD Jabar Banten	989.076.943	1.061.521.762	*BPD Jabar Banten*
BPD Jateng	14.809.126.915	4.704.032.831	*BPD Jateng*
BPD DIY	198.246.792	53.398.122	*BPD DIY*
BPD Jatim	3.868.820.739	1.117.466.975	*BPD Jatim*
BPD Bali	793.026.540	506.544.332	*BPD Bali*
BPD NTB	295.174.661	290.251.209	*BPD NTB*
BPD NTT	344.381.009	1.460.263.059	*BPD NTT*
BPD Sumsel	1.519.361.090	1.854.179.947	*BPD Sumsel*
BPD Lampung	110.363.092	19.412.636	*BPD Lampung*
BPD Aceh	2.356.797.714	564.049.693	*BPD Aceh*
BPD Sumut	57.368.693	4.346.261	*BPD Sumut*
BPD Riau	1.585.571.052	1.067.941.402	*BPD Riau*
BPD Sumbar (Nagari)	564.874.943	144.947.718	*BPD Sumbar (Nagari)*
BPD Jambi	16.743.439	10.494.922	*BPD Jambi*
BPD Kalbar	962.954.422	1.067.766.649	*BPD Kalbar*
BPD Kalteng	1.401.913.702	654.194.080	*BPD Kalteng*
BPD Kalsel	368.627.842	967.906.618	*BPD Kalsel*
BPD Kaltim	390.310.220	578.084.909	*BPD Kaltim*
BPD Sulsel	1.040.757.751	804.465.319	*BPD Sulsel*
BPD Sulut	1.333.418.808	720.939.705	*BPD Sulut*
BPD Sulteng	103.813.471	71.158.881	*BPD Sulteng*
BPD Sultra	309.975.394	4.229.208	*BPD Sultra*
BPD Bengkulu	178.785.139	-	*BPD Bengkulu*
BPD Maluku	1.556.997.166	55.473.491	*BPD Maluku*
BPD Papua	1.215.387.060	1.798.142.977	*BPD Papua*
Bank Rakyat Indonesia	32.944.439.478	39.350.802.138	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Mandiri	11.144.104.105	7.120.652.007	*Bank Mandiri*
Bank Negara Indonesia	6.292.298.131	2.704.957.013	*Bank Negara Indonesia*
Bank Tabungan Negara	1.755.930.448	156.635.575	*Bank Tabungan Negara*
Bank Rakyat Indonesia Agroniaga	1.678.812	-	*Bank Rakyat Indonesia Agroniaga*
BPD Syariah Jabar Banten	170.697.198	799.966.326	*BPD Syariah Jabar Banten*
BPD Syariah Jateng	1.122.484.187	1.138.349.535	*BPD Syariah Jateng*
BPD Syariah DIY	195.139.845	172.547.237	*BPD Syariah DIY*
BPD Syariah Jatim	33.721.361	253.049.330	*BPD Syariah Jatim*
BPD Syariah Sumsel	66.530.425	43.482.200	*BPD Syariah Sumsel*
BPD Syariah Aceh	435.183.157	19.696.185	*BPD Syariah Aceh*
BPD Syariah Riau	347.963.159	132.827.315	*BPD Syariah Riau*
BPD Syariah Kalbar	97.942.059	40.559.863	*BPD Syariah Kalbar*
BPD Syariah Kaltim	13.619.476	86.713.996	*BPD Syariah Kaltim*
BPD Syariah Sulsel	174.171.168	85.767.944	*BPD Syariah Sulsel*
BPD Syariah NTB	20.684.222	1.914.750	*BPD Syariah NTB*
Bank Rakyat Indonesia Syariah	631.082.062	448.082.618	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Syariah Mandiri	6.037.330.110	3.334.033.612	*Bank Syariah Mandiri*
Bank Negara Indonesia Syariah	7.714.114	7.883.913	*Bank Negara Indonesia Syariah*
Bank Tabungan Negara Syariah	420.168.423	31.390.662	*Bank Tabungan Negara Syariah*
Pihak Ketiga			***Third Party***
Bank Muamalat	5.872.847.320	2.425.273.936	*Bank Muamalat*
Bank CIMB Niaga	539.033.192	570.686.705	*Bank CIMB Niaga*
Bank Danamon	7.166.538	7.221.299	*Bank Danamon*
Bank Bukopin Syariah	46.111.152	45.348.821	*Bank Bukopin Syariah*
Bank Mega	37.341.453	3.098.791	*Bank Mega*
Bank Permata	8.435.711	8.435.711	*Bank Permata*
Bank Bukopin	394.043.881	435.741.611	*Bank Bukopin*
Bank CIMB Niaga Syariah	117.528.014	79.431.228	*Bank CIMB Niaga Syariah*
Bank Panin Syariah	828.725	1.202.463	*Bank Panin Syariah*
Bank Sinar Harapan Bali	5.543.825	5.830.324	*Bank Sinar Harapan Bali*
Bank Agroniaga	-	13.051.812	*Bank Agroniaga*
Jumlah Giro Perusahaan	**105.546.215.042**	**80.001.403.536**	***Total Bank Account-Parent***
Giro Entitas Anak	2.136.125.775	-	*Subsidiary Account*
Jumlah Giro	**107.682.340.817**	**80.001.403.536**	***Total Bank Account***

3. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan) / *3. CASH AND EQUIVALENT CASH (Continued)*

	2014	2013	
Deposito			***Time Deposit***
Pihak Berelasi			***Related Party***
BPD DKI	28.925.000.000	21.075.000.000	*BPD DKI*
BPD Jabar Banten	71.424.000.000	148.000.000.000	*BPD Jabar Banten*
BPD Jateng	97.050.000.000	72.950.000.000	*BPD Jateng*
BPD Jatim	54.900.000.000	66.170.000.000	*BPD Jatim*
BPD Bali	42.255.000.000	40.045.000.000	*BPD Bali*
BPD NTB	49.735.000.000	49.835.000.000	*BPD NTB*
BPD NTT	34.650.000.000	37.500.000.000	*BPD NTT*
BPD Sumsel	38.950.000.001	62.982.000.001	*BPD Sumsel*
BPD Lampung	1.300.000.000	5.000.000.000	*BPD Lampung*
BPD Aceh	39.590.000.000	91.140.000.000	*BPD Aceh*
BPD Sumut	550.000.000	550.000.000	*BPD Sumut*
BPD Riau	38.930.000.000	28.680.000.000	*BPD Riau*
BPD Sumbar (Nagari)	18.935.000.000	13.705.000.000	*BPD Sumbar (Nagari)*
BPD Jambi	12.000.000.000	14.000.000.000	*BPD Jambi*
BPD Kalbar	105.445.000.000	104.455.000.000	*BPD Kalbar*
BPD Kalteng	18.000.000.000	23.050.000.000	*BPD Kalteng*
BPD Kalsel	33.870.000.000	32.450.000.000	*BPD Kalsel*
BPD Kaltim	56.500.000.000	37.250.000.000	*BPD Kaltim*
BPD Sulsel	23.655.000.000	15.095.000.000	*BPD Sulsel*
BPD Sulut	49.400.000.000	52.900.000.000	*BPD Sulut*
BPD Sulteng	-	1.760.000.000	*BPD Sulteng*
BPD Sultra	1.900.000.000	42.570.000.000	*BPD Sultra*
BPD Bengkulu	3.000.000.000	-	*BPD Bengkulu*
BPD Maluku	25.775.000.000	6.475.000.000	*BPD Maluku*
BPD Papua	49.500.000.000	15.950.000.000	*BPD Papua*
BPD Syariah Jabar Banten	41.150.000.000	71.750.000.000	*BPD Syariah Jabar Banten*
BPD Syariah DIY	150.000.000	150.000.000	*BPD Syariah DIY*
BPD Syariah Jateng	400.000.000	100.000.000	*BPD Syariah Jateng*
BPD Syariah Jatim	100.000.000	100.000.000	*BPD Syariah Jatim*
BPD Syariah NTB	1.200.000.000	500.000.000	*BPD Syariah NTB*
BPD Syariah Sumsel	1.700.000.000	1.700.000.000	*BPD Syariah Sumsel*
BPD Syariah Aceh	1.900.000.000	1.200.000.000	*BPD Syariah Aceh*
BPD Syariah Riau	6.700.000.000	6.345.000.000	*BPD Syariah Riau*
BPD Syariah Kalbar	3.900.000.000	3.750.000.000	*BPD Syariah Kalbar*
BPD Syariah Kalsel	-	500.000.000	*BPD Syariah Kalsel*
BPD Syariah Kaltim	20.100.000.000	10.950.000.000	*BPD Syariah Kaltim*
BPD Syariah Sulsel	1.635.000.000	2.235.000.000	*BPD Syariah Sulsel*
Bank Rakyat Indonesia Syariah	4.290.000.000	130.940.000.000	*Bank Rakyat Indonesia Syariah*
Bank Syariah Mandiri	101.720.000.000	211.799.000.000	*Bank Syariah Mandiri*
Bank Tabungan Negara Syariah	13.350.000.000	170.750.000.000	*Bank Tabungan Negara Syariah*
Bank Negara Indonesia Syariah	500.000.000	1.400.000.000	*Bank Negara Indonesia Syariah*
Bank Rakyat Indonesia	2.615.768.959.879	1.271.387.959.879	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Rakyat Indonesia Agroniaga	37.125.000.000	117.375.000.000	*Bank Agroniaga*
Bank Mandiri	339.875.000.000	399.640.000.000	*Bank Mandiri*
Bank Negara Indonesia	226.840.000.000	152.800.000.000	*Bank Negara Indonesia*
Bank Tabungan Negara	149.050.000.000	622.875.000.000	*Bank Tabungan Negara*
Pihak Ketiga			***Third Party***
Bank Bukopin	308.850.000.000	297.400.000.000	*Bank Bukopin*
Bank Bukopin Syariah	280.000.000	280.000.000	*Bank Bukopin Syariah*
Bank CIMB Niaga	5.900.000.000	10.055.000.000	*Bank CIMB Niaga*
Bank Mega	5.000.000.000	5.000.000.000	*Bank Mega*
Bank Bumiputera	500.000.000	500.000.000	*Bank Bumiputera*
Bank Victoria	-	5.000.000.000	*Bank Victoria*
Bank Kesejahteraan	1.250.000.000	11.250.000.000	*Bank Kesejahteraan*
Bank BTPN	-	200.000.000	*Bank BTPN*
Bank Muamalat	5.880.000.000	15.802.000.000	*Bank Muamalat*
Bank CIMB Niaga Syariah	900.000.000	2.000.000.000	*Bank CIMB Niaga Syariah*
Bank Mega Syariah	500.000.000	60.650.000.000	*Bank Mega Syariah*
Bank Victoria Syariah	3.500.000.000	5.000.000.000	*Bank Victoria Syariah*
Bank Panin Syariah	42.000.000.000	54.000.000.000	*Bank Panin Syariah*
Jumlah Deposito Perusahaan	**4.838.252.959.880**	**4.628.970.959.880**	***Sub Total Time Deposit- Parent***
Deposito Entitas Anak	245.500.000.000	-	*Subsidiary Time Deposit*
Jumlah Deposito	**5.083.752.959.880**	**4.628.970.959.880**	***Total Time Deposit***
Jumlah Kas dan Setara Kas	**5.196.592.537.763**	**4.711.774.750.747**	***Total Cash and Equivalent Cash***

4. INVESTASI DEPOSITO DAN EFEK / *4. DEPOSIT INVESTMENT AND MARKETABLE SECURITIES*

Dimiliki Hingga Jatuh Tempo / ***Held-To-Maturity***

	2014	2013	
Deposito			***Time Deposit***
BPD DKI	1.050.000.000	2.125.000.000	*BPD DKI*
BPD Jabar Banten	2.000.000.000	-	*BPD Jabar Banten*
BPD Sumsel	16.000.000.000	1.000.000.000	*BPD Sumsel*
BPD Sulut	20.215.000.000	10.915.000.000	*BPD Sulut*
BPD Maluku	-	25.000.000.000	*BPD Maluku*
BPD Papua	200.000.000	200.000.000	*BPD Papua*
Bank Rakyat Indonesia Agroniaga	50.000.000.000	-	*Bank Rakyat Indonesia Agroniaga*
Bank Kesejahteraan	20.000.000.000	20.000.000.000	*Bank Kesejahteraan*
Bank Permata	-	20.000.000.000	*Bank Permata*
Bank Rakyat Indonesia	112.650.000.000	18.000.000.000	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Mandiri	100.000.000.000	-	*Bank Mandiri*
Bank Tabungan Negara	37.500.000.000	-	*Bank Tabungan Negara*
Bank Tabungan Negara Syariah	1.000.000.000	-	*Bank Tabungan Negara Syariah*
Jumlah Deposito	**360.615.000.000**	**97.240.000.000**	***Sub Total Time Deposit***
Obligasi			***Bonds***
Pihak Berelasi			***Related Party***
Bank Lampung III Tahun 2012	15.000.000.000	15.000.000.000	*Bank Lampung III Tahun 2012*
PNM I Tahun 2012	20.000.000.000	20.000.000.000	*PNM I Tahun 2012*
Antam seri B Tahun 2011	20.000.000.000	20.000.000.000	*Antam Seri B tahun 2011*
Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahap I Tahun 2013	20.000.000.000	20.000.000.000	*Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahap I Tahun 2013*
PNM II Tahun 2013	25.000.000.000	25.000.000.000	*PNM II Tahun 2013*
Negara RI seri FR0058	9.816.050.000	9.816.050.000	*Negara RI seri FR0058*
Obligasi I PTPN X Tahun 2013	20.000.000.000	20.000.000.000	*Obligasi I PTPN X Tahun 2013*
Obligasi I PLN tahap I Tahun 2013 seri A	11.000.000.000	11.000.000.000	*Obligasi I PLN tahap I Tahun 2013 seri A*
Sukuk Ijarah I PLN Tahap I Tahun 2013	17.000.000.000	17.000.000.000	*Sukuk Ijarah I PLN Tahap I Tahun 2013*
Pegadaian II Tahap I Tahun 2013 seri D	25.000.000.000	25.000.000.000	*Pegadaian II Tahap I Tahun 2013 seri D*
Negara RI seri FR0070	30.521.920.000	20.579.300.000	*Negara RI seri FR0070*
Negara RI seri FR0068	19.966.880.000	19.966.880.000	*Negara RI seri FR0068*
Berkelanjutan I PLN tahap I Tahun 2013	20.000.000.000	20.000.000.000	*Berkelanjutan I PLN tahap I Tahun 2013*
Berkelanjutan I Hutama Karya Tahun 2013 Seri C	12.000.000.000	-	*Berkelanjutan I Hutama Karya Tahun 2013 Seri C*
Negara RI seri FR0044	11.593.920.000	-	*Negara RI seri FR0044*
Negara RI seri FR0071	21.440.400.000	-	*Negara RI seri FR0071*
Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014	10.000.000.000	-	*Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014*
Pihak Ketiga			***Third Party***
Japfa Tahun 2012	8.000.000.000	8.000.000.000	*Japfa Tahun 2012*
Berkelanjutan I Smart tahap I Tahun 2012 seri A	25.000.000.000	25.000.000.000	*Smart Tahun 2012 Seri A*
Bukopin Tahap I Tahun 2012	83.000.000.000	83.000.000.000	*Bukopin Tahap I Tahun 2012*
Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2012	22.000.000.000	22.000.000.000	*Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2012*
Agung Podomoro Land II Tahun 2012	10.000.000.000	10.000.000.000	*Agung Podomoro Land II Tahun 2012*
Berkelanjutan II BTPN Tahap I Tahun 2013 seri B	5.000.000.000	5.000.000.000	*Berkelanjutan II BTPN Tahap I Tahun 2013 seri B*
Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013	10.000.000.000	10.000.000.000	*Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013*
Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013	10.000.000.000	10.000.000.000	*Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013*
Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013	10.000.000.000	10.000.000.000	*Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013*
Serasi Autoraya II Tahun 2011 Seri C	15.551.850.000	-	*Serasi Autoraya II Tahun 2011 Seri C*
TPJ I Tahun 2008 Seri C	10.429.913.889	-	*TPJ I Tahun 2008 Seri C*
Obligasi I Ciputra Residence Tahun 2014 Seri A	10.000.000.000	-	*Obligasi I Ciputra Residence Tahun 2014 Seri A*
Obligasi I Agung Podomoro Land II Tahun 2014	10.000.000.000	-	*Obligasi I Agung Podomoro Land II Tahun 2014*
Jumlah Obligasi	**537.320.933.889**	**426.362.230.000**	***Total Bonds***
Reksadana			***Mutual Fund***
Pihak Berelasi			***Related Party***
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012	-	10.145.563.712	*RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012*
RDPT Danareksa Sinergi BUMN II	10.000.000.000	10.135.603.868	*RDPT Danareksa Sinergi BUMN II*
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013	10.000.000.000	10.053.087.782	*RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013*
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 Seri II	50.000.000.000	50.042.895.950	*RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 Seri II*
RDPT PNM Pembiayaan Industri Telekomunikasi BUMN 2013	35.000.000.000	-	*RDPT PNM Pembiayaan Industri Telekomunikasi BUMN 2013*
RDPT Danareksa BUMN Fund 2013 - Infrastruktur 3	25.000.000.000	-	*RDPT Danareksa BUMN Fund 2013 - Infrastruktur 3*
RDPT Danareksa BUMN Fund 2014 - Infrastruktur 4	30.000.000.000	-	*RDPT Danareksa BUMN Fund 2014 - Infrastruktur 4*
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014	25.000.000.000	-	*RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014*
RDPT Bahana Construction Fund 1	25.000.000.000	-	*RDPT Bahana Construction Fund 1*
Pihak Ketiga			***Third Party***
RDPT AAA Jamkrindo BUMN Fund	144.000.000.000	25.056.849.956	*RDPT AAA Jamkrindo BUMN Fund*
RD Insight Terproteksi Syariah II	10.000.000.000	-	*RD Insight Terproteksi Syariah II*
RDPT CIMB - Principal CPF CB XIX	50.400.000.000	-	*RDPT CIMB - Principal CPF CB XIX*
Jumlah Reksadana	**414.400.000.000**	**105.434.001.268**	***Total Mutual Fund***

4. INVESTASI DEPOSITO DAN EFEK (Lanjutan) / *4. DEPOSIT INVESTMENT AND MARKETABLE SECURITIES (Continued)*

Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (Lanjutan) / ***Held-To-Maturity (Continued)***

	2014	2013	
Efek Beragun Aset (EBA)			
Efek Beragun Aset KPR PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk	25.000.000.000	-	*Efek Beragun Aset KPR PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk*
Jumlah Efek Beragun Aset (EBA)	**25.000.000.000**	**-**	***Total***
Jumlah Investasi Deposito dan Efek Yang Dimiliki Hingga Jatuh tempo	**1.337.335.933.889**	**629.036.231.268**	***Total Held-To-Maturity Deposit Investment and Marketable Securities***

Tersedia untuk Dijual / ***Available-For-Sale Financial Assets***

Reksadana			***Mutual Fund***
Pihak Berelasi			***Related Party***
RD BNI-AM Dana Terencana	-	22.816.396.951	*RD BNI-AM Dana Terencana*
RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis	9.476.366.918	7.437.799.742	*RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis*
Danareksa Mawar Konsumer	4.795.294.538	3.780.983.930	*Danareksa Mawar Konsumer*
RD BNI-AM DANA Saham Sektoral/ Saham Inspiring Equity Fund	61.134.662.186	-	*RD BNI-AM DANA Saham Sektoral/ Saham Inspiring Equity Fund*
Pihak Ketiga			***Third Party***
RD Batavia Dana Saham Optimal	20.864.836.458	8.845.039.323	*RD Batavia Dana Saham Optimal*
RD OSK Nusadana Alpha Sec. Rotation	25.000.000.000	8.958.689.389	*RD OSK Nusadana Alpha Sec. Rotation*
RD Manulife Saham SMC Plus	4.744.335.824	4.052.464.993	*RD Manulife Saham SMC Plus*
RD Simas Satu	9.922.419.041	4.696.315.848	*RD Simas Satu*
RD SAM Syariah Berimbang	10.659.980.582	4.553.226.848	*RD SAM Syariah Berimbang*
RD CIMB-Principal Indo Domestic Equty	21.972.853.652	7.817.000.000	*RD CIMB-Principal Indo Domestic Equty*
RD SAM Sharia Equity Fund	5.181.144.368	3.920.717.388	*RD SAM Sharia Equity Fund*
RD Syailendra Equity Opportunity Fund	4.716.949.672	3.954.020.995	*RD Syailendra Equity Opportunity Fund*
RD Panin Dana Maksima	4.900.558.352	3.875.157.093	*RD Panin Dana Maksima*
RD CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah	20.862.106.521	-	*RD CIMB-Peincipal Islamic Equity Growth Syariah*
RD CIMB-Principal Equity Aggressive	10.983.391.392	-	*RD CIMB-Principal Equity Aggressive*
RD Millenium Equity	5.272.881.822	-	*RD Millenium Equity*
RD AAA Enchanced Strategy Fund	-	18.756.401.041	*RD AAA Enchanced Strategy Fund*
RD CIMB Princ. Balanced Strategic Plus	10.855.700.000	4.272.120.881	*RD CIMB Princ. Balanced Strategic Plus*
RD Batavia Dana Saham	26.166.461.782	-	*RD Batavia Dana Saham*
RD CIMB-Principal Equty Focus	134.752.283.873	-	*RD CIMB-Principal Equty Focus*
RD Simas Saham Unggulan	10.000.000.000	-	*RD Simas Saham Unggulan*
RD Insight Support (I-Support)	46.345.621.168	-	*RD Insight Support (I-Support)*
RD UGM CIMB-Principal Balanced	10.000.000.000	-	*RD UGM CIMB-Principal Balanced*
RD AAA Balanced Fund	10.258.657.806	-	*RD AAA Enchanced Strategy Fund*
RD Perdana Saham I-Wealth	5.075.863.490	-	*RD Perdana Saham I-Wealth*
RD SAM Indonesian Equity Fund	10.285.510.000	8.868.406.839	*RD SAM Indonesian Equity Fund*
Jumlah Reksadana	**484.227.879.445**	**116.604.741.262**	***Total Mutual Fund***
Obligasi			**Bonds**
Pihak Berelasi			***Related Party***
Antam Seri A tahun 2011	13.597.500.000	13.923.000.000	*Antam Seri A tahun 2011*
Perum Pegadaian Tahun 2012 Seri D	4.000.000.000	3.632.000.000	*Perum Pegadaian Tahun 2012 Seri D*
Obligasi Negara RI Seri FR0058	3.351.000.000	6.702.500.000	*Obligasi Negara RI Seri FR0058*
Obligasi Negara RI Seri FR0059	-	5.200.000.000	*Obligasi Negara RI Seri FR0059*
Obligasi Negara RI Seri FR0060	-	5.037.454.000	*Obligasi Negara RI Seri FR0060*
Obligasi Negara RI Seri FR0061	-	5.475.000.000	*Obligasi Negara RI Seri FR0061*
Obligasi Negara RI Seri FR0063	-	2.534.763.300	*Obligasi Negara RI Seri FR0063*
Obligasi Negara RI Seri FR0064	-	2.887.500.000	*Obligasi Negara RI Seri FR0064*
Obligasi Negara RI Seri FR0065	1.640.000.000	2.040.000.000	*Obligasi Negara RI Seri FR0065*
Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Th 2013	8.800.000.000	8.795.000.000	*I Bank BTN Tahap II Th 2013*
Berkelanjutan I Adhi Tahap II Tahun 2013	15.775.700.000	17.708.000.000	*I Adhi Tahap II Tahun 2013*
Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013	19.318.200.000	19.804.400.000	*I PP Tahap I Tahun 2013*
Berkelanjutan I Hutama Karya 2013 Seri C	-	12.000.000.000	*I Hutama Karya 2013 Seri C*
Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014 Seri C	9.748.000.000	-	*Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014 Seri C*
Wajib Konversi Reindo Tahun 2014	300.000.000.000	-	*Wajib Konversi Reindo Tahun 2014*
	376.230.400.000	**105.739.617.300**	

4. INVESTASI DEPOSITO DAN EFEK (Lanjutan) / *4. DEPOSIT INVESTMENT AND MARKETABLE SECURITIES (Continued)*

Tersedia untuk Dijual / ***Available-For-Sale***

	2014	2013	
Obligasi			**Bonds**
	376.230.400.000	**105.739.617.300**	
Pihak Ketiga			***Third Party***
Sarana Multi Griya Finance 2012 Seri C	23.707.500.000	23.112.500.000	*Sarana Multi Griya Finance 2012 Seri C*
Sarana Multi Griya Finance 2012 Seri B	46.225.000.000	46.600.000.000	*Sarana Multi Griya Finance 2012 Seri B*
Astra Sedaya Finance Seri B	46.000.000.000	49.025.000.000	*Astra Sedaya Finance Seri B*
Astra Sedaya Finance Seri C	24.255.000.000	24.500.000.000	*Astra Sedaya Finance Seri C*
Sukuk Mudharabah II Mayora	35.319.600.000	34.380.000.000	*Sukuk Mudharabah II Mayora*
Adira Multifinance Seri C Tahun 2012	48.681.500.000	50.848.200.000	*Adira Multifinance Seri C*
Indomobil Finance Seri C	48.750.000.000	47.610.000.000	*Indomobil Finance Seri C*
Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012 seri B	20.769.000.000	24.775.000.000	*Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012 seri B*
Toyota Astra Finance Service Tahap II Tahun 2012 seri B	26.010.400.000	25.337.000.000	*Toyota Astra Finance Service Tahap II Tahun 2012 seri B*
Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012	23.850.000.000	22.867.550.000	*Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012*
Mitra Adi Perkasa Thn 2012 Seri A	11.000.000.000	15.067.500.000	*Mitra Adi Perkasa Thn 2012 Seri A*
AKR Corporindo Thn 2012 Seri A	18.750.000.000	19.800.000.000	*AKR Corporindo Thn 2012 Seri A*
BTPN Tahap III Tahun 2013 Seri B	4.750.000.000	4.717.500.000	*BTPN Tahap III Tahun 2013 Seri B*
Obligasi II SMF Tahap II Th 2013 Seri C	20.000.000.000	20.000.000.000	*Obligasi II SMF Tahap II Th 2013 Seri C*
Obligasi I Bumi Serpong Damai II 2013	14.052.000.000	13.711.500.000	*Obligasi I Bumi Serpong Damai II 2013*
Adira Multifinance Tahap III Tahun 2012 Seri C	-	48.850.000.000	Adira Multifinance Tahap III Tahun 2012 Seri C
Sarana Multi Griya Finance 2011 Seri C	-	4.000.000.000	*Sarana Multi Griya Finance 2011 Seri C*
Jumlah Obligasi	**788.350.400.000**	**580.941.367.300**	***Total Bonds***
Saham			***Shares***
Pihak Berelasi			***Related Party***
Bank Rakyat Indonesia	1.747.500.000	7.703.125.000	*Bank Rakyat Indonesia*
Bukit Asam	2.500.000.000	2.550.000.000	*Bukit Asam*
Perusahaan Gas Negara	3.300.000.000	14.460.962.500	*Perusahaan Gas Negara*
Bank Mandiri	1.616.250.000	18.251.250.000	*Bank Mandiri*
Semen Gresik	21.481.200.000	18.762.900.000	*Semen Gresik*
Jasa Marga	-	7.205.625.000	*Jasa Marga*
Bank Tabungan Negara	7.216.263.000	2.022.750.000	*Bank Tabungan Negara*
Telekomunikasi Indonesia	6.016.500	4.515.000.000	*Telekomunikasi Indonesia*
Semen Baturaja, Tbk	381.000.000	330.000.000	*Semen Baturaja, Tbk*
Wijaya Karya Tbk	-	1.580.000.000	*Wijaya Karya Tbk*
Adhi Karya Tbk	7.656.000.000	-	*Adhi Karya Tbk*
Pihak Ketiga			***Third Party***
Astra International Indonesia	4.677.750.000	18.360.000.000	*Astra International Indonesia*
PP London Sumatra	4.592.700.000	-	*PP London Sumatra*
Indofood Sukses Makmur	3.543.750.000	2.310.000.000	*Indofood Sukses Makmur*
United Tractors	5.031.500.000	3.477.000.000	*United Tractors*
Unilever	1.524.560.000	3.445.000.000	*Unilever*
Kalbe Farma, Tbk	2.118.591.000	2.968.750.000	*Kalbe Farma, Tbk*
Indocement Tunggal Perkasa	5.000.000.000	6.950.000.000	*Indocement*
Bumi Serpong Damai	1.444.902.500	2.128.500.000	*Bumi Serpong Damai*
Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk	-	765.000.000	*Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk*
Surya Semesta Internusa	7.490.000.000	1.456.000.000	*Surya Semesta Internusa*
Bank Central Asia Tbk	2.174.812.500	2.904.000.000	*Bank Central Asia Tbk*
AKR Corporindo Tbk	3.131.200.000	2.406.250.000	*AKR Corporindo Tbk*
Alam Sutera Realty	2.381.400.000	1.493.175.000	*Alam Sutera Realty*
Malindo Feedmill	-	1.374.775.000	*Malindo Feedmill*
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	1.134.000.000	-	*Charoen Pokphand Indonesia Tbk*
Jumlah Saham	**90.149.395.500**	**127.420.062.500**	***Total Shares***
Jumlah Investasi Deposito dan Efek Tersedia Untuk Dijual	**1.362.727.674.945**	**824.966.171.062**	***Total Available-For-Sale Deposit Investment and Marketable Securities***
Total Investasi Deposito dan Efek	**2.700.063.608.834**	**1.454.002.402.330**	***Total Deposit Investment and Marketable Securities***

Rincian obligasi berdasarkan rating surat berharga, tingkat suku bunga dan jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	Kupon / *Coupon*	Rating / *Rate*	Jatuh Tempo / *Maturity Date*	
Antam Seri B tahun 2011	9,05%	AA	14 Desember 2021	*Antam Seri B tahun 2011*
Japfa Tahun 2012	9,90%	AA+	12 Januari 2017	*Japfa Tahun 2012*
Bukopin Tahap I Tahun 2012	9,25%	AA+	06 Maret 2019	*Bukopin Tahap I Tahun 2012*
Smart Tahun 2012 Seri A	9,00%	AA-	03 Juli 2017	*Smart Tahun 2012 Seri A*
Bumi Serpong Damai	9,25%	A+	04 Juli 2017	*Bumi Serpong Damai*
Agung Podomoro Land	9,38%	A	15 Agustus 2017	*Agung Podomoro Land*
Bank Lampung Tahun 2012	9,45%	A-	09 Oktober 2017	*Bank Lampung Tahun 2012*
PNM Tahun 2012	9,10%	A	12 Oktober 2017	*PNM Tahun 2012*
Antam Seri A Tahun 2011	8,38%	AA	14 Desember 2018	*Antam Seri A Tahun 2011*
Sarana Multi Griya Finance	7,55%	AA	25 April 2017	*Sarana Multi Griya Finance*
Astra Sedaya Finance Seri B	8,00%	AA+	21 Februari 2015	*Astra Sedaya Finance Seri B*
Astra Sedaya Finance Seri C	8,60%	AA+	21 Februari 2017	*Astra Sedaya Finance Seri C*
Sukuk Mudharabah II Mayora	8,25%	AA-sy	09 Mei 2017	*Sukuk Mudharabah II Mayora*
Adira Multifinance Seri C	7,75%	AA+	04 Mei 2015	*Adira Multifinance Seri C*
Indomobil Finance Seri C	8,25%	A	11 Mei 2016	*Indomobil Finance Seri C*

4. INVESTASI DEPOSITO DAN EFEK (Lanjutan) / *4. DEPOSIT INVESTMENT AND MARKETABLE SECURITIES (Continued)*

	Kupon / *Coupon*	Rating / *Rate*	Jatuh Tempo / *Maturity Date*	
Toyota Astra Finance Service II	7,50%	AA	05 Juni 2015	*Toyota Astra Finance Service II*
Indomobil Wahana Trada I	8,40%	A	19 Juni 2015	*Indomobil Wahana Trada I*
Adira Multifinance Tahun 2012 Seri C	8,75%	AA+	28 September 2017	*Adira Multifinance Tahun 2012 Seri C*
Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012	7,75%	AAA	30 Oktober 2017	*Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012*
Mitra Adi Perkasa Thn 2012 Seri A	7,95%	AA-	12 Desember 2015	*Mitra Adi Perkasa Thn 2012 Seri A*
AKR Corporindo Thn 2012 Seri A	8,40%	AA-	21 Desember 2017	*AKR Corporindo Thn 2012 Seri A*
Sarana Multi Griya Finance 2012 Seri B	7,50%	AA	27 Desember 2017	*Sarana Multi Griya Finance 2012 Seri B*
Perum Pegadaian Tahun 2012 Seri D	7,75%	AA+	14 Februari 2019	*Perum Pegadaian Tahun 2012 Seri D*
SMF Tahap I Tahun 2011 Seri C	8,84%	AA	21 Desember 2014	*SMF Tahap I Tahun 2011 Seri C*
BTPN Tahap III Tahun 2013 Seri B	8,25%	AA-	05 Maret 2018	*BTPN Tahap III Tahun 2013 Seri B*
Adhi Tahap II Tahun 2013 Seri B	8,50%	A	15 Maret 2020	*Adhi Tahap II Tahun 2013 Seri B*
PP Tahap I Tahun 2013	8,38%	A-	19 Maret 2018	*PP Tahap I Tahun 2013*
SMF Tahap II Tahun 2013 Seri C	7,60%	AA	21 Maret 2018	*SMF Tahap II Tahun 2013 Seri C*
Bank BTN Tahap II Tahun 2013	7,90%	AA	27 Maret 2023	*Bank BTN Tahap II Tahun 2013*
BSD Tahap II Tahun 2013	8,38%	AA-	05 Juni 2018	*BSD Tahap II Tahun 2013*
Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013	9,25%	A	26 Juni 2018	*Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013*
Hutama Karya Tahun 2013 Seri C	9,50%	A-	28 Juni 2020	*Hutama Karya Tahun 2013 Seri C*
PT PTPN X Tahun 2013	8,90%	A+	05 Juli 2018	*PT PTPN X Tahun 2013*
Sukuk Ijarah Berklnjt I PLN Tahap I Tn 2013	8,00%	AAA (sy)	05 Juli 2020	*Sukuk Ijarah Berklnjt I PLN Tahap I Tn 2013*
Garuda Indonesia Tahap I Tahun 2013	9,25%	A	05 Juli 2018	*Garuda Indonesia Tahap I Tahun 2013*
PLN Tahap I Tahun 2013 Seri A	8,00%	AAA	05 Juli 2020	*PLN Tahap I Tahun 2013 Seri A*
BTPN Tahap I Tahun 2013 Seri B	8,25%	AA-	04 Juli 2018	*BTPN Tahap I Tahun 2013 Seri B*
Pegadaian Tahap I Tahun 2013 Seri D	8,00%	AA+	09 Juli 2020	*Pegadaian Tahap I Tahun 2013 Seri D*
PNM II Tahun 2013	9,20%	A	09 Juli 2018	*PNM II Tahun 2013*
Bank CIMB Niaga Berklnjt Thp II 2013	9,75%	AAA	20 Nopember 2018	*Bank CIMB Niaga Berklnjt Thp II 2013*
PLN I Tahap II Tahun 2013 Seri B	9,60%	AAA	10 Desember 2023	*PLN I Tahap II Tahun 2013 Seri B*
Obligasi I Summarecon Agung I 2013	10,85%	A+	11 Desember 2018	*Obligasi I Summarecon Agung I 2013*
TPJ I Tahun 2008 Seri C	13,25%	A	13 Maret 2015	*TPJ I Tahun 2008 Seri C*
Seraso Autoraya II 2011 Seri C	10,20%	A+	05 Juli 2015	*Seraso Autoraya II 2011 Seri C*
Ciputra Residence I 2014 Seri A	11,40%	A	02 April 2017	*Ciputra Residence I 2014 Seri A*
I Agung Podomoro Land Th II 2014	12,25%	A	06 Juni 2019	*I Agung Podomoro Land Th II 2014*
I pupuk Indonesia 2014 Seri A	9,63%	AAA	08 Juli 2017	*I pupuk Indonesia 2014 Seri A*
EBA DBTN05 – KPR Kls A 2014 Seri A2	10,25%	AAA	07 September 2025	*EBA DBTN05 – KPR Kls A 2014 Seri A2*
Wajib Konversi Reindo Tahun 2014	12,00%	A	31 Desember 2017	*Wajib Konversi Reindo Tahun 2014*

5. PIUTANG IJP KUR KEPADA PEMERINTAH / *5. KUR GUARANTEE RECEIVABLE TO THE GOVERNMENT*

	2014	2013	
Piutang IJP KUR Kepada Pemerintah	572.599.823.370	862.234.407.631	*KUR Guarantee Receivable to the Government*
Piutang IJP KUR Belum Ditagihkan dan Diverifikasi	502.755.585.636	343.993.032.160	*KUR Guarantee Receivable Unpaid and Unverified*
Jumlah	**1.075.355.409.006**	**1.206.227.439.791**	***Total***

Piutang IJP KUR merupakan tagihan Perusahaan kepada Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008. Imbal Jasa Penjaminan dibayar oleh Pemerintah dengan tarif imbal jasa penjaminan sebesar 1,5% dan coverage sebesar 70% untuk kredit yang akadnya sebelum 14 Februari 2010. Untuk kredit yang akadnya setelah 14 Februari 2010 tarif imbal jasa penjaminan sebesar 3,25% pertahun dengan coverage sebesar 70%-80% sesuai PMK No.189/PMK.05/2010 tanggal 2 November 2010.

KUR IJP receivables represent receivables to the Government in accordance with the Regulation of the Minister of Finance No. 135/PMK.05/2008 dated 24 September 2008. Return Guarantee Services paid by the Government to guarantee compensation rates at 1.5% and the coverage is 70% for credit akadnya before February 14, 2010. For akadnya credit after February 14, 2010 underwriting compensation rates by 3.25% per year with coverage of 70% -80% according PMK No.189/PMK.05/2010 Nov. 2, 2010.

IJP sebesar Rp572.599.823.371 telah ditagihkan kepada Pemerintah (KPA baru Kemenkop & UKM) melalui surat No. 460/P/5/XI/2014 perihal Pencairan Subsidi IJP KUR tanggal 05 November 2014 namun belum diverifikasi dan IJP sebesar Rp502.755.585.636 belum ditagihkan dan diverifikasi karena belum masuk dalam periode penagihan.

IJP amounted Rp572.599.823.371 has been charged to the Government (new KPA Kemenkop & SMEs) through letter No. 460 / P / 5 / XI / 2014 regarding subsidy disbursement IJP KUR date November 5, 2014 but has not been verified and IJP for Rp502.755.585.636 not been charged and verified as not included in the billing period.

Hal-hal yang menyebabkan belum diverifikasinya IJP tersebut adalah sebagai berikut :

a Perpindahan KPA KUR dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Koperasi dan UKM.
b Terbitnya PMK No. 190/PMK.05/2014 perihal Tata Cara Pelaksanaan IJP KUR tanggal 01 Oktober 2014.

The things that cause has not been verified IJP are as follows:

a KUR KPA displacement of the Ministry of Finance to the Ministry of Cooperatives and SMEs.
b Publication of PMK No. 190 / PMK.05 / 2014 concerning the Implementation of the IJP KUR dated October 1, 2014.

Pada PMK 190 pasal 18 menyatakan bahwa dengan berlakunya PMK 190 maka PMK mengenai KUR sebelumnya yaitu PMK 135/PMK.05/2008 dan perubahan yang mengikutinya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali ketentuan mengenai besaran IJP KUR.

In PMK 190 Article 18 states that the enactment of the 190 PMK PMK PMK regarding previous KUR 135 / PMK.05 / 2008 and the changes that followed revoked and declared null and void unless the provisions regarding the amount of KUR IJP.

Telah dilaksanakan rapat Ekspose dan Pembahasan Kriteria Verifikasi IJP KUR Tahap II/2014 pada tanggal 12 November 2014 antara KPA Kemenkop, SMI Kemenkeu, Perusahaan Penjamin dan BPKP (Verifikator), terdapat beberapa pembahasan terkait pasal-pasal didalam PMK 190 yang masih perlu dibahas lebih lanjut antara lain :

It has been conducted meetings and discussions Exposure Criteria Verification KUR STM Phase II / 2014 on 12 November 2014 between the NAC Kemenkop, SMI Ministry of Finance, Corporate Guarantor and BPKP (verifier), there is some discussion of related clauses in the FMD 190 which still need to be discussed further among others:

5. PIUTANG IJP KUR KEPADA PEMERINTAH (Lanjutan)

a Pasal 4 dan 16, Perjanjian Kerjasama Penjaminan (PKP) perlu segera direvisi terkait dengan perpindahan KPA.
b Draft PKP Perum Jamkrindo telah disampaikan kepada KPA dan masih dibahas di KPA.
c Pasal 10, Pelaksanaan verifikasi yang dilakukan BPKP mengacu pada kriteria yang disepakati antara KPA dan BPKP dan SOP yang ditetapkan oleh KPA. Terkait dengan butir ini maka BPKP baru akan melakukan verifikasi setelah ada SOP dari KPA dan disepakatinya kriteria verifikasi.
d SOP masih dalam proses pembahasan di KPA (Kementerian Koperasi dan UKM).

5. KUR GUARANTEE RECEIVABLE TO THE GOVERNMENT (Continued)

a Article 4 and 16, Guarantee Cooperation Agreement (PKP) needs to be revised associated with the transfer of the KPA.
b Draft Housing Jamkrindo PKP has been submitted to the KPA and is still being discussed in the NAC.
c Article 10 The verification carried BPK referring to criteria agreed between the NAC and the BPK and SOPs are set by KPA. Related to this point, the new BPKP will verify after the SOP of the KPA and the agreement on verification criteria.
d SOP is still in the process of discussion at the NAC (Ministry of Cooperatives and SMEs).

6. PIUTANG PENJAMINAN ULANG

6. REASSURANCE RECEIVABLE

	2014	2013	
Piutang Co Guarantee :			*Co Guarantee Receivable:*
- PT Heksa Eka Life Insurance	10.342.004.996	4.037.264.576	*PT Heksa Eka Life Insurance* -
- PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin	54.813.577.429	34.945.187.909	*PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin* -
- PT Asuransi Syariah Mubarakah	60.884.628.596	60.884.628.595	*PT Asuransi Syariah Mubarakah* -
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(60.884.628.596)	(60.884.628.595)	*Allowance for Impairment Losses*
- PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya	98.299.208	3.431.490.664	*PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya* -
- PT Asuransi Jiwasraya	725.937.696	-	*PT Asuransi Syariah Mubarakah* -
- PT Askrindo (Persero)	-	77.754.198.241	*PT Askrindo (Persero)* -
- PT Reasuransi Nasional Indonesia	242.228.650	-	
Total Piutang Co Guarantee	**66.222.047.979**	**120.168.141.390**	***Total Co Guarantee Receivable***
Piutang Re Asuransi :			***Re Asuransi Receivable***
- PT Reasuransi Nasional Indonesia	3.714.831.296	415.654.129	*PT Reasuransi Nasional Indonesia* -
Jumlah Piutang Re Asuransi	**3.714.831.296**	**415.654.129**	***Total Re Asuransi Receivable***
Total Piutang Penjaminan Ulang	**69.936.879.275**	**120.583.795.519**	***Total Reassurance Receivable***

Piutang Co-Guarantee kepada PT Heksa Eka Life Insurance, PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, PT Asuransi Syariah Mubarakah, PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya adalah penggantian pembayaran klaim yang ditagihkan kepada mitra Co-Guarantee atas pembayaran klaim yang telah dibayarkan oleh Perusahaan.

Co-guarantee receivables to PT Heksa Eka Life Insurance, PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, PT Asuransi Syariah Mubarakah, PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya are reimbursement of claims billed to Co-Guarantee partners for the payment of claims have been paid by the Company.

Perusahaan bekerjasama dengan mitra Co-Guarantee untuk kredit multiguna dan mikro untuk mengalihkan risiko klaim yang diakibatkan meninggalnya terjamin.

The company cooperates with Co-Guarantee partners for a multipurpose and micro credit to transfer the risk of claims resulting from the death of the assured.

Untuk menghindari tertunggaknya pembayaran Piutang dari mitra Co Guarantee, sejak tahun 2011 telah ditambahkan ketentuan baru dalam perjanjian kerja sama dengan mitra Co Guarantee yaitu perusahaan akan memotong pembayaran premi Co Guarantee maksimal sebesar 50% dari premi Co Guarantee sebesar 60% dari IJP/IJK yang menjadi hak mitra Co Guarantee apabila saldo Piutang Co Guarantee di atas kewajaran, yang dihitung 3 kali dari rata-rata pengajuan pembayaran klaim dalam 1 tahun terakhir atau dengan perhitungan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan mitra Co Guarantee.

To avoid the payment of delinquent receivables from Co-Guarantee partners, since 2011 has been added a new provision in the agreement of cooperation with Co-Guarantee partners that the company will cutoff the premium Co. Guarantee a maximum of 50% of the premium Co. Guarantee for 60% of the STM / IJK the Guarantee Co partner right when the balance in the Accounts Receivable Guarantee Co. fairness, which is calculated 3 times of the average filing claims payments in the last 1 year or with other calculations agreed by the company and partner Co. Guarantee.

Perjanjian kerjasama terbaru dengan mitra Co Guarantee sebagai berikut:

- Perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi Syariah Mubarakah (PT ASM) No: 37/Jamkrindo/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna.

- Perjanjian kerjasama dengan PT Heksa Eka Life Insurance No. 06/Jamkrindo/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna yang diaddendum dengan perjanjian kerjasama No. 33/Jamkrindo/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna, diaddendum dengan perjanjian kerjasama No.01/Jamkrindo/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna, yang kemudian diaddendum lagi dengan perjanjian kerjasama No.38/Jamkrindo/V/2013 – PKS.008/HELI/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna, dan terakhir diaddendum dengan perjanjian kerjasama No.06/Jamkrindo/II/2014 – PKS.003/HELI/II/2014 tanggal 07 Pebruari 2014 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna.

New cooperation agreements with partner Co-Guarantee as follows:

- *Cooperation agreement with PT Asuransi Syariah Mubarakah (PT ASM) No. : 37/Jamkrindo/VI/2012 date June 27, 2012 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose.*

- *Cooperation agreement with PT Heksa Eka Life Insurance No.: 06/Jamkrindo/II/2012 date February 28,2012 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose that has been addendum with cooperation agreement No.: 33/Jamkrindo/V/2012 date May 24, 2012 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose, that has been addendum with cooperation agreement No.: 01/Jamkrindo/I/2013 date January 15, 2013 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose, that has been addendum with cooperation agreement No. 38/Jamkrindo/V/2013 - PKS.008/HELI/V/2013 date May 17, 2013 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose, and last that has been addendum with cooperation agreement No.: 06/Jamkrindo/II/2014 - PKS.003/HELI/II/2014 date February 07, 2014 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose.*

6. PIUTANG PENJAMINAN ULANG (Lanjutan)

- Perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin No. 4/Jamkrindo/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna, diadendum dengan perjanjian kerjasama No.02/Jamkrindo/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna, diadendum dengan perjanjian kerjasama No.39/Jamkrindo/V/2013 – 0011/PKS-AL AMIN/DIR/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna, kemudian diadendum dengan perjanjian kerjasama No.05/Jamkrindo/II/2014 – 006/PKS-AL AMIN/DIR/II/2014 tanggal 07 Pebruari 2014 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna.

- Perjanjian kerjasama dangan PT Asuransi Jiwasraya No.07/Jamkrindo/II/2014 – 035.SJ.U.0214 tanggal 07 Pebruari 2014 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna.

- Perjanjian kerjasama dangan PT Asuransi Bina Griya Upakara No.54/Jamkrindo/VI/2014 – 15/PKS/DIR-BINAGRIYA/062014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Penempatan Asuransi Kebakaran Rumah Tinggal Bagi Nasabah Bank Yang Dibiayai Dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Perum Jamkrindo dengan PT. Askrindo (Persero) telah melakukan kerja sama Penjaminan Bersama KUR, sejak tahun 2010 Perjanjian Kerja Sama Penjaminan Kredit Bersama KUR Nomor: 95/Jamkrindo/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, addendum I Nomor: 51/Jamkrindo/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 dan addendum II Nomor: 38/Jamkrindo/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012.

Pada akhir tahun 2013 dengan tidak tercapainya kesepakatan mengenai pokok-pokok pembaharuan PKS Penjaminan Bersama KUR, sehingga para pihak menyetujui pengakhiran kerja sama penjaminan bersama KUR. Dengan diakhirinya kerja sama penjaminan bersama KUR, hak dan kewajiban yang belum diselesaikan tetap harus diselesaikan oleh kedua belah pihak untuk akseptasi atas IJP, Klaim dan Subrogasi KUR bank konvensional tahun 2010, 2011. 2012 dan 2013.

Pada tahun 2014 belum dilakukan rekonsiliasi karena PT. Askrindo (Persero) belum menyampaikan data penjaminan bersama KUR. Bersama ini kami sampaikan data Perum Jamkrindo (rekapitulasi ijp, klaim dan subrogasi kur – set off co guarantee KUR 2014) yang akan diakseptasi oleh PT. Askrindo (Persero).

6. *REASSURANCE RECEIVABLE (Continued)*

- *Cooperation agreement with PT Asuransi Jiwa Sharia Al-Amin No.: 4/Jamkrindo/I/2012 date January 31, 2012 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose, that has been addendum with cooperation agreement No.: 02/Jamkrindo/I/2013 date January 15, 2013 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose, that has been addendum with cooperation agreement No. 39/Jamkrindo/V/2013 - 011/PKS-AL AMIN/DIR/V/2013 date May 17, 2013 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose, that has been addendum with cooperation agreement No.: 05/Jamkrindo/II/2014 - 006/PKS-AL AMIN/DIR/II/2014 date February 07, 2014 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose.*

- *Cooperation agreement with PT Asuransi Jiwasraya No. : 07/Jamkrindo/II/2014 - 035.SJ.U.0214 date February 07, 2014 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose.*

- *Cooperation agreement with PT Asuransi Bina Griya Upakara No. : 54/Jamkrindo/VI/2014 - 15/PKS/DIR-BINAGRIYA/062014 date June 26, 2014 about Fire Insurance Placement House Live For Customer Bank Financed With Housing Finance Liquidity Facility (FLPP) .*

Perum Jamkrindo with PT. Askrindo (Persero) has been working Assurance Together KUR, since 2010 Cooperation Agreement Joint Credit Guarantee KUR Number: 95 / Jamkrindo / XII / 2010 dated December 1, 2010, the first addendum Number: 51 / Jamkrindo / XII / 2011 dated December 28, 2011 and addendum II Cooperation Agreement Joint Credit Guarantee KUR Number: 38 / Jamkrindo / VII / 2012 dated July 2, 2012.

At the end of 2013 with no agreement on the main points of the Joint Guarantee KUR MCC renewal, so that the parties agree to guarantee mutual cooperation termination KUR. With the end to guarantee mutual cooperation KUR, the rights and obligations that have not been resolved remains to be resolved by both sides to acceptances on IJP, Claims and Subrogation KUR conventional banks in 2010, 2011, 2012 and 2013.

In the year 2014 has not been made reconciliation for PT. Askrindo (Persero) has not submitted a joint guarantee of data KUR. Herewith we Jamkrindo Housing Data (IJP recapitulation, claims and subrogation kur - set off co guarantee KUR 2014) which will acceptance by PT. Askrindo (Persero).

Nomor	Uraian	Nilai / *Value* (Rp)	*Description*	*Number*
1	Imbal Jasa Penjaminan (IJP)	585.579.701.508,90	*Guarantee Fee*	*1*
2	Klaim	809.859.085.248,79	*Claim*	*2*
3	Subrogasi	68.935.565.504,19	*Subrogation*	*3*

Piutang Re Asuransi kepada PT Reasuransi Nasional Indonesia adalah penggantian pembayaran klaim yang ditagihkan kepada mitra Re Asuransi atas pembayaran klaim yang telah dibayarkan oleh Perusahaan. Perusahaan bekerjasama dengan mitra Reasuransi untuk semua jenis kredit untuk mengalihkan sebagian risiko klaim.

Dalam kerja sama dengan reasuransi digunakan metode treaty. Metode treaty merupakan perjanjian pertanggungan ulang otomatis secara tahunan antara Perusahaan Penjamin dan Reasuransi dengan kondisi yang disepakati bersama dalam negosiasi treaty.

Kerjasama dengan perusahaan Reasuransi dilakukan melalui perusahaan pialang dengan PKS sebagai berikut :

- PKS antara Perum Jamkrindo dengan PT BOARe No.127/Jamkrindo/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014.
- PKS antara Perum Jamkrindo dengan PT Igna Asia No.126/Jamkrindo/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014.
- PKS antara Perum Jamkrindo dengan PT Paragon Re No.125/Jamkrindo/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014.

Treaty antara Perum Jamkrindo dan PT Reasuransi Nasional Indonesia, terdiri dari :

1 Quota Share Reinsurance Treaty Penjaminan Kredit Konsumer Tahun 2014

2 Quota Share Reinsurance Treaty Penjaminan Kredit Umum Tahun 2014

Re Insurance Receivable PT Indonesian National Reinsurance is reimbursement payments charged to the partners claim for payment of Re Insurance claims paid by the Company. Reinsurance companies collaborate with partners for all types of credit to shift some of the risk of claims.

In cooperation with the method used reinsurance treaty. Methods treaty is a treaty insured auto reset on an annual basis between Insurance and Reinsurance The company with the conditions agreed upon in the treaty negotiations.

Cooperation with companies is done through a reinsurance brokerage firm with PKS as follows:

- *Cooperation agreement between Perum Jamkrindo with PT BOARe No.127/Jamkrindo/X/2014 date October 30, 2014.*
- *Cooperation agreement between Perum Jamkrindo with PT Igna Asia No.126/Jamkrindo/X/2014 date October 30, 2014.*
- *Cooperation agreement between Perum Jamkrindo with PT Paragon Re No.125/Jamkrindo/X/2014 date October 30, 2014.*

Treaty between Perum Jamkrindo and PT Indonesian National Reinsurance, consisting of:

1 Quota Share Reinsurance Treaty Consumer Credit Guarantee Corporation in 2014

2 Quota Share Reinsurance Treaty General Credit Guarantee Corporation in 2014

6. PIUTANG PENJAMINAN ULANG (Lanjutan) / *6. REASSURANCE RECEIVABLE (Continued)*

3 Quota Share Reinsurance Treaty Penjaminan Kredit Mikro Tahun 2014 / *3 Quota Share Reinsurance Treaty Micro Credit Guarantee Corporation in 2014*

4 Quota Share Reinsurance Treaty Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang dan jasa Tahun 2014 / *4 Quota Share Reinsurance Treaty Construction and Procurement of Goods and services Credit Guarantee Corporation in 2014*

5 Quota Share Reinsurance Treaty Penjaminan Bank Garansi Tahun 2014 / *5 Quota Share Reinsurance Treaty Bank Guarantee Corporation in 2014*

6 Quota Share Reinsurance Treaty Penjaminan Distribusi Barang Tahun 2014 / *6 Quota Share Reinsurance Treaty Goods Distribution Guarantee Corporation in 2014*

7 Quota Share Reinsurance Treaty Penjaminan Surety Bond Tahun 2014 / *7 Quota Share Reinsurance Treaty Surety Bond Guarantee Corporation in 2014*

Perubahan CKPN atas Piutang Co Guarantee adalah sebagai berikut: / *The changes in allowance for Co Guarantee Receivable is as follows:*

	2014	2013	
Saldo Awal Tahun	60.884.628.595	43.266.401.389	*Beginning Balance of The Year*
Penambahan Cadangan	1	17.618.227.206	*Additional Reserves*
Pengurangan Cadangan	-	-	*Reduction in Reserves*
Saldo Akhir	**60.884.628.596**	**60.884.628.595**	***Ending Balance***

7. PINJAMAN YANG DIBERIKAN / *7. LOANS*

	2014	2013	
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Piutang Pinjaman Bagi Hasil	17.355.096.337	17.538.799.286	*Profit Sharing Loan*
Pihak Berelasi			*Related Parties*
Piutang Pinjaman Bagi Hasil	132.402.682	136.430.392	*Profit Sharing Loan*
Piutang Kepada Koperasi Pegawai	1.054.557.997	1.179.557.996	*Employee Cooperative Receivable*
Jumlah Pinjaman Yang Diberikan	**18.542.057.016**	**18.854.787.674**	***Total Loans***
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Penyisihan kerugian nilai pinjaman bagi hasil	(17.076.377.702)	(17.260.080.651)	*Profir Sharing Loan for Impairment Losses*
Pihak Berelasi			*Related Parties*
Penyisihan kerugian nilai pinjaman bagi hasil	(124.621.368)	(62.126.165)	*Profir Sharing Loan for Impairment Losses*
Penyisihan kerugian nilai pinjaman koperasi pegawai	(367.619.904)	(235.180.759)	*Employee Cooperative Receivable for Impairment Losses*
Jumlah penyisihan penurunan nilai	**(17.568.618.974)**	**(17.557.387.575)**	***Total Allowance for Impairment Losses***
Jumlah Pinjaman Yang diberikan Bersih	**973.438.042**	**1.297.400.099**	***Total Net Loans***

Piutang Pinjaman Bagi Hasil adalah penyediaan uang/dana oleh Perusahaan kepada nasabah berdasarkan perjanjian pinjaman bagi hasil antara Perusahaan dengan nasabah yang mewajibkan pihak nasabah untuk melunasi Hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan imbalan bagi hasil yang dihitung dari nilai nominal atau target IRR tertentu. Piutang Pinjaman bagi Hasil diatur dalam Keputusan Direksi Perusahaan No. 42/DIR/IX/2001. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia tidak lagi menyalurkan pinjaman bagi hasil baru.

Profit Sharing Loan Receivable is the provision of money / funds by the Company to customers under Profit Sharing Loan agreements between the Company with customers who require the customer to repay the debt after a certain period in return for taking into account the results calculated from the nominal value or a specific target IRR. Profit Sharing Loan Receivable regulated in The Decree of Company's Board of Directors No.42/DIR/IX/2001. Based on Government Regulation Number 41 of 2008 and Presidential Regulation Number 2 of 2008, Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia are not distributed new Profit Sharing Loan.

Pinjaman bagi hasil dengan kategori lancar ditetapkan sebagai pinjaman yang tidak mengalami penurunan nilai dan tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

Profit Sharing Loan with current category defined as loans that are not impaired and no impairment loss reserves established.

Terhadap Piutang bagi hasil yang mengalami penurunan nilai namun Perusahaan tidak dapat memperoleh komitmen pembayaran dari para debitur, maka nilai wajar Piutang bagi hasil ditetapkan nihil. Dengan demikian CKPN yang dibentuk sebesar 100% dari nilai tercatat.

For profit sharing loan receivables are impaired but the Company can not obtain payment from the debtor's commitments, the fair values of accounts receivable is set to nihil. Thus allowance for impairment losses formed at 100% of the carrying value.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai telah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya pinjaman tersebut.

Management considers that allowance for impairment losses have been adequate to cover losses that may arise from uncollectible loans.

8. PIUTANG LAIN-LAIN / *8. OTHER RECEIVABLE*

	2014	2013	
Piutang Pendapatan Bunga Deposito	8.239.502.701	5.333.690.219	*Deposit Interest Income Receivable*
Piutang Pendapatan Bunga Reksadana	4.517.794.029	-	*Mutual Fund Interest Income Receivable*
Piutang Pendapatan Bunga Obligasi	11.031.314.757	9.513.628.518	*Bond Interest Income Receivable*
Piutang Pendapatan Bunga EBA	175.460.069	-	*EBA Interest Income Receivable*
Piutang Pendapatan Komisi	3.343.756.173	3.966.418.200	*Comission Income Receivable*
Piutang Sewa Gedung	194.849.574	601.164.087	*Building Rent Receivable*
Piutang kepada Penyewa Gedung	489.165.095	674.268.997	*Receivable to Tenant Building*
Piutang kepada Pegawai	7.953.460.094	7.429.067.852	*Receivable to Employee*
Piutang Lainnya	96.786.353.091	78.206.104	*Others Receivable*
Total Piutang Lain-lain	**132.731.655.583**	**27.596.443.977**	***Total Other Receivable***

8. PIUTANG LAIN-LAIN (Lanjutan) / 8. OTHER RECEIVABLE (Continued)

Piutang pendapatan bunga deposito terdiri dari deposito existing dan deposito dana KUR.	*Deposit interest income receivable consists of existing deposits and deposits KUR fund.*
Piutang pendapatan reksadana merupakan pendapatan reksadana KUR.	*Mutual fund interest income receivable is interest income KUR mutual fund.*
Piutang pendapatan bunga obligasi merupakan pendapatan bunga obligasi KUR.	*Bond interest income receivable is interest income KUR bonds.*
Piutang sewa gedung merupakan tagihan sewa gedung kepada penyewa dan Piutang kepada penyewa gedung merupakan tagihan atas pemakaian telepon oleh penyewa.	*Building Rent Receivable is claim of builing rent to tenant and Receivable to Tenant Building is claim of telephone charges.*
Piutang kepada pegawai merupakan tagihan atas ekses klaim asuransi kesehatan kepada karyawan dan tagihan atas bantuan uang muka.	*Receivables to employee is billed for the excess to the employee health insurance claims and bills for payment assistance.*
Piutang lainnya merupakan rincian Piutang cabang-cabang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Piutang tersebut diatas.	Other receivables are detailed receivables of the branches that can not be classified as receivables mentioned above.

9. BEBAN DIBAYAR DIMUKA / 9. PREPAID EXPENSE

	2014	2013	
Beban Operasi	790.054.184	570.553.434	*Operating Expense*
Beban SDM	390.979.418	774.103.703	*Human Resource Expense*
Beban Umum	6.472.913.599	3.243.972.705	*General Expense*
Premi Co-Guarantee	405.548.406.561	491.511.772.326	*Co-Guarantee Premium*
Premi Re-Asuransi	60.393.952.322	16.380.297.062	*Re-Insurance Premium*
Fee Based Income	39.436.605.453	15.082.162.289	*Fee Based Income*
Fee Agent	58.806.194.680	24.104.222.100	*Fee Agent*
Uang Muka Premi Co Guarantee	1.056.020.402	1.349.234.561	*Prepaid Premium Co Guarantee*
Pajak PPh pasal 28A	25.403.561.629	52.150.546	*Article 28A of the Income Tax*
Uang Muka Supplier	465.633.550	-	*Supplier Prepaid Taxes*
Total Beban Dibayar Dimuka	**598.764.321.798**	**553.068.468.726**	***Total Prepaid Expense***

Beban dialokasikan sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus. Masa manfaat sewa bangunan, asuransi dan premi pensiun sesuai dengan jangka waktu kontrak atau polis.	*Expenses are allocated according to the useful life of each cost with a straight-line method. The useful life of building rent, insurance and pension premiums in accordance with the term of the contract or policy.*
Beban Premi Co Guarantee dan Fee Based Income dibayar dimuka diakui selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya Sertifikat Penjaminan (SP).	*Premiums Co Guarantee Expenses and Prepaid Fee Based Income are recognized over the term of the guarantee and allocated by month issuance of Certificate of Guarantee (SP).*
Beban dibayar dimuka co-guarantee merupakan Pembayaran Premi tahun berjalan dan tahun-tahun lalu ke mitra co-guarantee yang akan menjadi beban di tahun-tahun mendatang.	*Prepaid expenses co-guarantee is premium payments of the current year and years ago to co-guarantee partners that will be due in the coming years.*
Beban dibayar dimuka re-asuransi merupakan Pembayaran Premi tahun berjalan dan tahun-tahun lalu ke mitra re-asuransi yang akan menjadi beban di tahun-tahun mendatang.	*Prepaid expenses re-insurance is premium payments of the current year and years ago to re-insurance partners that will be due in the coming years.*
Beban dibayar dimuka fee bank (fee based income) merupakan pembayaran fee bank tahun berjalan dan tahun-tahun lalu penerima jaminan yang akan menjadi beban di tahun-tahun mendatang.	*Prepaid expenses fee bank (fee based income) is fee bank payments of the current year and years ago to the insured partners that will be due in the coming years.*
Beban dibayar dimuka fee agen merupakan pembayaran fee agen tahun berjalan dan tahun-tahun lalu ke mitra agen yang akan menjadi beban di tahun-tahun mendatang.	*Prepaid expenses agent fee is agent fee payments of the current year and years ago to the agent partners that will be due in the coming years.*

10. PROPERTI INVESTASI / 10. INVESTMENT PROPERTY

	31 Des 2014 (Dec 31, 2014)					
	Saldo Awal *(Beginning)*	**Penambahan *(Addition)***	**Pengurangan *(Disposal)***	**Reklasifikasi / Koreksi *(Reclassification / Correction)***	**Saldo Akhir *(Ending Balance)***	
Nilai Perolehan :						*Acquisition Cost :*
Tanah	2.385.791.680				2.385.791.680	*Land*
Gedung Kantor	29.358.573.225				29.358.573.225	*Buildings*
Jumlah	**31.744.364.905**	-	-	-	**31.744.364.905**	***Total***
Akumulasi Penyusutan						*Acquisition Cost :*
Gedung Kantor	(16.763.145.491)	(391.099.315)			(17.154.244.806)	*Buildings*
Jumlah	**(16.763.145.491)**	**(391.099.315)**	-	-	**(17.154.244.806)**	***Total***
Nilai Buku	**14.981.219.414**				**14.590.120.099**	***Net Book***

10. PROPERTI INVESTASI (Lanjutan) / *10. INVESTMENT PROPERTY (Continued)*

	31 Des 2013 *(Dec 31, 2013)*					
	Saldo Awal *(Beginning)*	Penambahan *(Addition)*	Pengurangan *(Disposal)*	Reklasifikasi / Koreksi *(Reclassification / Correction)*	Saldo Akhir *(Ending Balance)*	
Nilai Perolehan :						***Acquisition Cost :***
Tanah	2.385.791.680			-	2.385.791.680	*Land*
Gedung Kantor	29.358.573.225			-	29.358.573.225	*Buildings*
Jumlah	**31.744.364.905**	-	-	-	**31.744.364.905**	***Total***
Akumulasi Penyusutan						***Acquisition Cost :***
Gedung Kantor	(16.417.182.169)	(345.963.322)		-	(16.763.145.491)	*Buildings*
Jumlah	**(16.417.182.169)**	**(345.963.322)**	-	-	**(16.763.145.491)**	***Total***
Nilai Buku	**15.327.182.736**				**14.981.219.414**	***Net Book***

Properti investasi terutama merupakan kantor pusat Perusahaan, yang terletak di Jakarta. Properti investasi ini disewakan kepada pihak ketiga.

Investment property represents the Company's office located at Jakarta. This investment property has rented to the third parties.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul atas risiko yang ada.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses that may arise from the risks that exist.

11. ASET TETAP / *11. FIXED ASSET*

	31 Des 2014 *(Dec 31, 2014)*					
	Saldo Awal *(Beginning)*	Penambahan *(Addition)*	Pengurangan *(Disposal)*	Reklasifikasi / Koreksi *(Reclassification / Correction)*	Saldo Akhir *(Ending Balance)*	
Nilai Perolehan :						***Acquisition Cost :***
Tanah	13.514.808.279	-	-	-	13.514.808.279	*Land*
Gedung Kantor	14.382.864.511	1.192.446.000	-	-	15.575.310.511	*Buildings*
Bangunan rumah dinas	1.038.502.236	-	-	-	1.038.502.236	*Office housing*
Inventaris Kantor	24.281.698.711	9.193.950.752	-	-	33.475.649.463	*Office equipment*
Inventaris rumah dinas	1.484.889.998	61.588.000	-	-	1.546.477.998	Housing equipment
Kendaraan	22.597.247.404	10.684.752.619		-	33.282.000.023	*Vehicle*
Jumlah	**77.300.011.139**	**21.132.737.371**	-	-	**98.432.748.510**	***Total***
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Gedung Kantor	(3.216.222.338)	(370.316.008)			(3.586.538.346)	*Buildings*
Bangunan rumah dinas	(740.388.895)	(13.232.522)			(753.621.417)	*Office housing*
Inventaris Kantor	(16.276.050.272)	(3.058.971.581)			(19.335.021.853)	*Office equipment*
Inventaris rumah dinas	(1.161.165.581)	(83.286.016)			(1.244.451.597)	Housing equipment
Kendaraan	(18.065.632.101)	(1.022.283.992)			(19.087.916.093)	*Vehicle*
Jumlah	**(39.459.459.187)**	**(4.548.090.119)**	-	-	**(44.007.549.306)**	***Total***
Nilai Buku	**37.840.551.952**				**54.425.199.204**	***Book Value***

	31 Des 2013 *(Dec 31, 2013)*					
	Saldo Awal *(Beginning)*	Penambahan *(Addition)*	Pengurangan *(Disposal)*	Reklasifikasi / Koreksi *(Reclassification / Correction)*	Saldo Akhir *(Ending Balance)*	
Nilai Perolehan :						***Acquisition Cost :***
Tanah	13.514.808.279	-	-	-	13.514.808.279	*Land*
Gedung Kantor	13.486.920.797	895.943.714	-	-	14.382.864.511	*Buildings*
Bangunan rumah dinas	1.038.502.236	-	-	-	1.038.502.236	*Office housing*
Inventaris Kantor	19.682.823.601	4.598.875.110	-	-	24.281.698.711	*Office equipment*
Inventaris rumah dinas	1.415.691.998	69.198.000	-	-	1.484.889.998	Housing equipment
Kendaraan	22.597.247.404	-	-	-	22.597.247.404	*Vehicle*
Jumlah	**71.735.994.316**	**5.564.016.824**	-	-	**77.300.011.139**	***Total***
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Gedung Kantor	(2.903.571.328)	(312.651.010)	-	-	(3.216.222.338)	*Buildings*
Bangunan rumah dinas	(727.484.703)	(12.904.192)	-	-	(740.388.895)	*Office housing*
Inventaris Kantor	(14.052.850.068)	(2.223.200.204)	-	-	(16.276.050.272)	*Office equipment*
Inventaris rumah dinas	(1.007.947.704)	(153.217.877)	-	-	(1.161.165.581)	Housing equipment
Kendaraan	(16.903.064.409)	(1.162.567.692)	-	-	(18.065.632.101)	*Vehicle*
Jumlah	**(35.594.918.212)**	**(3.864.540.975)**	-	-	**(39.459.459.187)**	***Total***
Nilai Buku	**36.141.076.104**				**37.840.551.952**	***Book Value***

11. ASET TETAP (Lanjutan)

Aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, kebongkaran, gempa bumi, kecelakaan dan risiko lainnya. Manajemen berpendapat bahwa semua aset tetap tersebut telah dilindungi oleh asuransi dalam jumlah yang memadai.

Manajemen berkeyakinan tidak terdapat indikasi penurunan nilai terhadap aset tetap perusahaan.

11. FIXED ASSET (Continued)

Fixed assets have been insured for fire, theft, earthquake, accident, and other risk. Management have a notion that all of fixed asset have been insured in an adequate amounts.

Management believes there is no indication of impairment of fixed assets of the company.

12. ASET LAIN-LAIN

12. OTHER ASSETS

	2014	2013	
Piutang Dalam Penyelesaian	57.267.993.208	24.130.095.127	*Receivable in Settlement*
Aset TakBerwujud -*Software*	164.488.500	-	*Intangible Asset - Software*
Aset Lainnya	378.532.900	378.532.900	*Other Assets*
Total Aset Lain-Lain	**57.811.014.608**	**24.508.628.027**	***Total Other Assets***

Piutang Dalam Penyelesaian merupakan Piutang Co Guarantee yang belum ada persetujuan klaim dari mitra Co Guarantee.

Aset lainnya merupakan saldo jaminan listrik PLN, dan jaminan telepon.

Receivable in progress are receivable's guarantee co that there has been no approval for claims of the partners co guarantee.

Other assets is electricity, telephone deposit fund, and deferred expenses.

13. HUTANG KLAIM

13. CLAIM LIABILITY

	2014	2013	
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Hutang Klaim - Kredit Eksisting	1.637.764.356	6.202.161.863	*Claim Liability – Existing Credit*
Hutang Klaim - Kredit Usaha Rakyat	8.559.694.321	38.978.420.851	*Claim Liability - Kredit Usaha Rakyat*
Jumlah	**10.197.458.677**	**45.180.582.714**	***Total***

Hutang klaim merupakan Hutang Perusahaan kepada Bank pemberi pinjaman yang dijamin oleh Perusahaan. Hutang klaim yang tercatat adalah Hutang yang telah disetujui namun belum dibayar. Hutang klaim dinyatakan sebesar prosentase penjaminan atas baki debit pinjaman yang disetujui.

The claims the debt is payable to the lender Bank guaranteed by the Company. Recorded claims payable are debts that have been approved but not yet paid. Claims payable are stated at the percentage of underwriting the loans approved discharge tray.

14. CADANGAN KLAIM

14. CLAIM RESERVE

	2014	2013	
Cadangan Klaim - Kredit Eksisting	164.800.096.815	175.065.232.673	*Claim Reserve – Existing Credit*
Cadangan Klaim KUR	219.762.089.113	260.351.097.595	*Claim Reserve KUR*
Provisi Kerugian Atas Klaim Co Guarantee	11.816.737.125	16.705.639.084	*Provision for Claim Losses Co Guarantee*
Total Cadangan Klaim	**396.378.923.053**	**452.121.969.352**	***Total Claim Reserve***

Cadangan Klaim merupakan pembentukan cadangan atas klaim yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun mendatang atas penjaminan yang belum jatuh tempo.

Cadangan klaim per 31 Desember 2014 ditetapkan sebesar 0,275% dari *outstanding* penjaminan untuk cadangan klaim eksisting dan 0,725% dari *outstanding* penjaminan untuk cadangan klaim Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Cadangan klaim per 31 Desember 2013 ditetapkan sebesar 0,275% dari *outstanding* penjaminan untuk cadangan klaim eksisting dan 0,80% dari *outstanding* penjaminan untuk cadangan klaim Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Cadangan klaim minimal yang dapat dibentuk ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK.010/2008 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, yaitu minimal sebesar 0,25% dari *outstanding* penjaminan.

Perusahaan membentuk provisi untuk mengantisipasi bahwa kemungkinan akan tertagihnya/terpulihnya Piutang co guarantee serta potensi klaim di masa yang akan datang yang menjadi tanggungan PT ASM sangat kecil. Provisi dibentuk berdasarkan Default Rate (DR) rata-rata ditambah dengan standar deviasi dikalikan dengan outstanding kredit.

The claims reserve is the establishment of reserves for claims that might occur infuture years for the guarantee has not matured.

Claims reserves per December 31, 2014 was set at 0.275% of outstanding credit for existing claims reserves and 0.725% claims reserves People's Business Credit (KUR).

Claims reserves per December 31, 2013 was set at 0.275% of outstanding credit for existing claims reserves and 0.80% claims reserves People's Business Credit (KUR).

Claims reserves established at least that can be formed by the Minister of Finance Regulation No. 99/PMK. 010/2011 on Amendments to the Minister of Finance Regulation No. 222/PMK. 010/2008 About the Company Corporate Credit Guarantee and Credit Guarantee Re, which is at least 0.25% of the outstanding guarantees.

The Company form anticipates that the provision for uncollectible is likely to co guarantee receivables and potential claims in the future dependent PT ASM is very small. Provisions established by the Default Rate (DR) average plus standard deviation multiplied by the outstanding credit.

15. HUTANG PENJAMINAN ULANG / *15. CO GUARANTEEE LIABILITY*

	2014	2013	
Hutang Co Guarantee:			*Co Guarantee Payable:*
- PT Heksa Eka Life Insurance	4.119.683.428	7.013.430.995	*PT Heksa Eka Life Insurance* -
- PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin	6.827.926.171	13.861.641.689	*PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin* -
- PT Asuransi Takaful	(177.310.089)	229.194.249	*PT Asuransi Takaful* -
- PT Asuransi Jiwasraya	5.959.922.802	-	*PT Asuransi Jiwasraya* -
- PT Asuransi Binagriya Upakarti	332.986.964	-	*PT Asuransi Binagriya Upakarti* -
Jumlah Hutang Co Guarantee	**17.063.209.276**	**21.104.266.933**	***Total Co Guarantee Liability***
Hutang Re Asuransi:	-	-	*Re-Insurance Payable*
- PT Reasuransi Nasional Indonesia	18.758.388.884	20.608.669.150	*PT Reasuransi Nasional Indonesia* -
Jumlah Hutang Re Guarabtee	**18.758.388.884**	**20.608.669.150**	***Total Re Guarantee Liability***
Total Hutang Co Guarantee	**35.821.598.160**	**41.712.936.083**	***Total Co Guarantee Liability***

Utang co guarantee dan re asuransi merupakan utang premi yang harus dibayarkan perusahaan untuk mengalihkan resiko klaim.

Co Guarantee Liability and Re Guarantee Liability are an insurance premium payable to be paid a company to transfer the risk of death claims.

16. PENDAPATAN DITANGGUHKAN / *16. DEFERRED REVENUE*

	2014	2013	
Pihak Berelasi			*Related Parties*
Imbal Jasa Penjaminan	902.360.057.728	1.019.734.991.348	*Guarantee Fee*
Komisi Penjaminan	12.673.779.174	2.866.856.259	*Comission Fee*
Imbal Jasa Penjaminan Belum Terbit	85.852.636.377	72.960.214.584	*Guarantee Fee UnPublished*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Imbal Jasa Penjaminan	17.833.016.577	7.092.025.008	*Guarantee Fee*
Komisi Penjaminan	200.897.989	670.689.799	*Comission Fee*
Sewa & Servis Gedung	787.374.633	103.119.656	*Rent & Service Building*
Total Pendapatan Ditangguhkan	**1.019.707.762.478**	**1.103.427.896.654**	***Total Deferred Revenue***

Imbal Jasa Penjaminan ditangguhkan merupakan pembayaran premi penjaminan tahun berjalan dan tahun-tahun lalu dari Terjamin kepada Perusahaan yang akan menjadi pendapatan di tahun-tahun mendatang.

Deferred Guarantee fee is a guarantee premium payments current year and years ago from the insured to Perum Jamkrindo which will be income in future years.

Komisi Penjaminan Ditangguhkan merupakan penerimaan komisi dari reasuransi tahun berjalan yang akan menjadi pendapatan di tahun-tahun mendatang.

Deferred Assurance Commission constitutes acceptance of reinsurance commissions for the year will be income in the years to come.

Pendapatan Ditangguhkan akan diakui sebagai pendapatan selama sisa jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya Sertifikat Penjaminan (SP). Dengan mempertimbangkan banyaknya kredit yang dipercepat pelunasannya, manajemen menetapkan batas waktu maksimal alokasi Imbal Jasa Penjaminan diterima dimuka adalah sesuai jangka waktu.

Deferred Revenue will be recognized as incomeover the remaining term IJP underwriting and issuance of certificates allocated by month Guarantee (SP). Taking into account the number of credits, acceleratedrepayment, management set a maximum time limit of the allocation received in advance Return Service Guarantee.

Imbal Jasa Penjaminan Diterima Dimuka berasal dari penerimaan IJP pada tahun-tahun sebagai berikut:

Prepaid guarantee fee from receipt of IJP in the years following:

	2014	2013	
2010	-	55.749.837.592	2010
2011	46.679.977.683	180.052.363.873	2011
2012	190.474.076.455	351.783.384.784	2012
2013	358.120.337.124	439.241.430.107	2013
2014	324.915.218.920	-	2014
Jumlah	**920.189.610.182**	**1.026.827.016.356**	***Total***

Sewa dan Service Gedung ditangguhkan merupakan pembayaran sewa dan service dari penyewa gedung yang belum menjadi pendapatan.

Deffered Rent and Service Building was received upfront is the lease payment and service from the tenants of the building that would not become revenue.

17. PERPAJAKAN / *17. TAXES*

a. Pajak Dibayar Dimuka / *a. Prepaid Tax*

Saldo pajak dibayar dimuka adalah per 31 Desember 2014 dan 2013 terdiri da

Prepaid Tax as of December 31, 2014 and 2013 consists of:

	2014	2013	
Entitas Induk			***Parent Company***
PPh Pasal 25	25.049.162.087	52.150.546	*Income tax–article 25*
PPN Masukan	354.399.542	-	*Value Added Tax*
	25.403.561.629	**52.150.546**	

Catatan Nomor 9 Biaya Dibayar Dimuka

Note No. 9 Prepaid Expenses

17. PERPAJAKAN (Lanjutan) / ***17. TAXES (Continued)***

b. Hutang Pajak / ***b. Tax Payable***

Saldo Hutang pajak adalah per 31 Desember 2014 dan 2013 terdiri dari : / *Tax payable as of December 31, 2014 and 2013 consists of:*

	2014	2013	
Entitas Induk			***Parent Company***
PPh Pasal 21	2.526.490.860	2.782.854.760	*Income tax–article 21*
PPh Pasal 23	143.809.077	177.763.682	*Income tax–article 23*
PPh Pasal 25	-	5.739.892.708	*Income tax–article 25*
PPh Pasal 4 Ayat 2	61.042.500	67.019.679	*Income tax–article 4 point 2*
PPh Badan (PPh pasal. 29)	-	15.092.892.754	*Company Income tax –article 29*
Pajak Pertambahan Nilai	602.348.847	382.052.542	*Value Added tax*
	3.333.691.284	**24.242.476.126**	
Entitas Anak			***Subsidiary***
PPh Pasal 21	57.795.952	-	*Income tax–article 21*
PPh Pasal 23	26.102.926	-	*Income tax–article 23*
PPh Pasal 4 Ayat 2	107.136.000	-	*Income tax–article 4 point 2*
	191.034.878	**-**	
Jumlah	**3.524.726.162**	**24.242.476.126**	***Total***

c. Beban Pajak Penghasilan terdiri dari : / ***c. Income Tax Expense consist of :***

	2014	2013	
Entitas Induk			***Parent Company***
Beban Pajak Kini	68.133.069.000	83.971.605.250	*Current Tax Expense*
Beban Pajak Kini Final	91.608.268.328	60.859.512.485	*Current Tax Expense - Final*
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	22.100.235.026	(13.073.645.381)	*Deferred Tax (Benefit) Expense*
	181.841.572.354	**131.757.472.354**	
Entitas Anak			***Subsidiary***
Beban Pajak Kini	954.110.879	-	*Current Tax Expense*
Manfaat Pajak Tangguhan	8.687.653	-	*Deffered Tax Benefit*
	962.798.532	**-**	
Jumlah	**182.804.370.886**	**131.757.472.354**	***Total***

d. Beban Pajak / ***d. Tax Expense***

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 sebagai berikut: / *The reconciliation between income before tax, as presented in statement of income, and taxable income for the years ended Desember 31, 2014 and 2013 are as follows:*

	2014	2013	
Laba Sebelum Pajak	**845.728.410.815**	**596.107.020.207**	***Laba Sebelum Pajak***
Perbedaan Temporer:			***Temporary Differences:***
Perbedaan Penyusutan antara Fiskal dan Komersil	(1.844.090.589)	(2.210.953.124)	Depreciation Differencesbetween Fiscal and Commercial
Penyisihan Piutang Bagi Hasil dan Piutang Lain	7.718.636	(30.543.140)	Allowance of receivable
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	124.720.508	8.563.736.757	*Allowance For Impairment Losses*
Jasa Produksi Tahun 2012	(19.506.954.817)	(24.232.114.278)	*Incentif Year 2012*
Jasa Produksi Tahun Berjalan	9.438.457.212	19.506.954.817	*Incentif at Current Year*
Provisi Kerugian Klaim Co Guarantee	-	16.705.639.084	*Provision for Claim Losses Co Guarantee*
Kenaikan (penurunan) cadangan klaim	(50.854.144.341)	39.541.500.471	*Increase (Decrease) in Reserve Claim*
Jumlah	**(62.634.293.390)**	**57.844.220.587**	***Total***
Perbedaan Permanen:			***Permanent Differences:***
Beban Asuransi & Penggantian Biaya Kesehatan	2.647.190.116	2.758.544.309	Expense Reinbursement Insurance & Health
Premi Jamsostek	650.277.503	333.225.302	*Social security premium*
Beban Sewa Lainnya	-	30.160.000	*Other rent expense*
Beban Umum dan Administrasi Lain-lain	8.415.844.472	5.663.131.224	*Other General and Administrative Expenses*
Beban Pemeliharaan Gedung	1.655.113.596	1.408.191.515	*Building Maintenance expenses*
Beban Komunikasi dan Energi Gedung	1.238.204.885	1.073.601.999	*Communication and Building energy Expenses*
Beban Komunikasi dan Energi Rumah Dinas	362.565.755	357.704.849	Communication and officer housing energy
Beban Penyusutan Gedung Kantor Pusat	391.099.315	358.691.137	*Depreciation expenses of Head Office*
Beban Representasi	3.457.868.309	1.982.578.786	*Repersentation expenses*
Beban Investasi	3.335.521.640	2.928.903.192	*Investment expenses*
Beban Promosi	9.076.133.407	5.284.939.433	*Promotion expenses*
Beban Rapat Kerja	1.981.879.185	1.710.125.482	*Meeting expenses*
Beban Pemeliharaan dan Inventaris Rumah Dinas	414.461.455	108.245.858	Maintenance Expense and Inventory Home Office
Beban Penyusutan Kendaraan Dinas	570.203.171	581.845.581	*Service Vehicle Depreciation Expense*
Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas	3.120.982.274	2.170.461.016	*Service Vehicle Maintenance Expenses*
Beban Penagihan Subrogasi	906.801.752	746.940.975	*Subrogation Billing Expenses*
Beban Penyusutan Rumah Dinas	14.366.819	17.962.450	*Depreciation Home Office Expenses*
Fee Based Income	16.487.772.551	8.154.449.427	*Fee Based Income*
	54.726.286.205	**35.669.702.535**	

17. PERPAJAKAN (Lanjutan) / ***17. TAXES (Continued)***

d. Beban Pajak (Lanjutan) / ***d. Tax Expense (Continued)***

	54.726.286.205	**35.669.702.535**	
Pendapatan yang Dikenakan PPh Final:			***Income which charged by final tax:***
Pendapatan Sewa Gedung	(1.266.570.187)	(3.249.463.338)	*Buildings Rental income*
Penghasilan Investasi	(529.962.599.082)	(289.743.661.635)	*Penghasilan Investasi*
Pendapatan Jasa Giro	(5.125.098.350)	(2.873.678.345)	*Interest Income on Current Account*
IJP *Restated*	(55.749.837.592)	(111.499.675.187)	*Guarantee Service Fee Restated*
Co Guarantee *Restated*	26.815.978.390	53.631.956.781	*Co Guarantee Restated*
Jumlah	**(510.561.840.616)**	**(318.064.819.189)**	***Total***
Laba kena Pajak	**272.532.276.809**	**335.886.421.605**	***Taxable Income***
Laba Kena Pajak (dibulatkan)	**272.532.276.000**	**335.886.421.000**	***Rounded***
Dasar Pengenaan Pajak	272.532.276.000	335.886.421.000	***Taxable Income (Rounded)***
Pajak Penghasilan			*Tax Expense*
25% x Dasar Pengenaan Pajak	68.133.069.000	83.971.605.250	*25% x Taxable Income*
Total Beban Pajak Kini	**68.133.069.000**	**83.971.605.250**	***Total Current Tax Expenses***
Dikurangi Pajak Dibayar Dimuka	(101.653.343.004)	(68.878.712.496)	*Less prepaid Tax*
PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar	**(33.520.274.004)**	**15.092.892.754**	***Income Tax Payable***

Sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, Perum Jaminan Kredit Indonesia menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak terhutang (*self-assesment system*). Direktorat Jenderal Pajak dapat menghitung dan mengubah kewajiban pajak dalam batas 10 tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

In accordance with Indonesia Fiscal Regulation, Company reporting their Income Tax Liability by self assessment system. Tax liability can be recomputed and changed by tax authority in 10 years after tax liability accrued.

e. Pajak Tangguhan / ***e. Deffered Tax***

Entitas Induk
31 Desember 2014 :

Parent Company
December 31, 2014 :

Komponen Aset (Kewajiban) Pajak Tangguhan	**1 Januari 2014 / *January 1, 2014***	**Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan / *Deferred Tax Benefit (Expense)***	**31 Desember 2014 / *December 31, 2014***	**Deferred Tax Assets (Liabilities) Components**
CKPN – Piutang Bagi Hasil	4.330.551.704	(30.301.937)	4.300.249.767	*Allowance of Receivable*
Jasa Produksi	4.876.738.704	(2.517.124.401)	2.359.614.303	*Incentive*
Penyusutan Aset Tetap	1.027.711.514	(5.650.156.900)	(4.622.445.386)	*Fixed Assets deprecation*
Kenaikan (penurunan) cadangan klaim	108.854.082.567	(12.713.536.085)	96.140.546.482	*Increase (Decrease) in Reserve Claim*
Provisi atas Kerugian Klaim Co Guarantee	4.176.409.771	(1.222.225.490)	2.954.184.281	*Provision for Claim Losses Co Guarantee*
CKPN – Piutang Koperasi	58.795.190	33.109.786	91.904.976	*Allowance of Cooperative Receivable*
CKPN – Piutang Co Guarantee	15.221.157.149	0	15.221.157.149	*Allowance of Co Guarantee Receivable*
CKPN – Piutang dalam penyelesaian	2.955.154.751	(0)	2.955.154.751	*Allowance of Receivable in Settlement*
Jumlah	**141.500.601.350**	**(22.100.235.026)**	**119.400.366.323**	***Total***

Entitas Anak
31 Desember 2014 :

Subsidiary
December 31, 2014 :

Komponen Aset (Kewajiban) Pajak Tangguhan	**1 Januari 2014 / *January 1, 2014***	**Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan / *Deferred Tax Benefit (Expense)***	**31 Desember 2014 / *December 31, 2014***	**Deferred Tax Assets (Liabilities) Components**
Penyusutan Aset Tetap	-	9.210.363	9.210.363	*Fixed Assets deprecation*
Kenaikan (penurunan) cadangan klaim	-	(522.710)	(522.710)	*Increase (Decrease) in Reserve Claim*
Kenaikan (penurunan) kerugian dikompensasi	-	(790.896.000)	(790.896.000)	*Increase (Decrease) in Competation Losses*
Cadangan kerugian dikompensasi	-	790.896.000	790.896.000	*Competation Reserve Losses*
Jumlah	**-**	**8.687.653**	**8.687.653**	***Total***

e. Pajak Tangguhan (Lanjutan)

e. *Deffered Tax (Continued)*

Entitas Induk
31 Desember 2013 :

Parent Company
December 31, 2013 :

Komponen Aset (Kewajiban) Pajak Tangguhan	1 Januari 2013 / *January 1, 2013*	Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan / *Deferred Tax Benefit (Expense)*	31 Desember 2013 / *December 31, 2013*	Deferred Tax Assets (Liabilities) Components
CKPN – Piutang Bagi Hasil	4.356.796.263	(26.244.559)	4.330.551.704	*Allowance of Receivable*
Jasa Produksi	6.058.028.570	(1.181.289.866)	4.876.738.704	*Incentive*
Penyusutan Aset Tetap	2.967.859.560	(1.940.148.046)	1.027.711.514	*Fixed Assets deprecation*
Kenaikan (penurunan) cadangan klaim	98.968.707.449	9.885.375.118	108.854.082.567	*Increase (Decrease) in Reserve Claim*
Provisi atas Kerugian Klaim Co Guarantee	-	4.176.409.771	4.176.409.771	*Provision for Claim Losses Co Guarantee*
CKPN – Piutang Koperasi	40.186.416	18.608.774	58.795.190	*Allowance of Cooperative Receivable*
CKPN – Piutang Co Guarantee	10.816.600.347	4.404.556.802	15.221.157.149	*Allowance of Co Guarantee Receivable*
CKPN – Piutang dalam penyelesaian	5.218.777.363	(2.263.622.612)	2.955.154.751	*Allowance of Receivable in Settlement*
Jumlah	**128.426.955.968**	**13.073.645.381**	**141.500.601.350**	***Total***

Jumlah tersebut merupakan jumlah pajak penghasilan yang akan dipulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan sesuai dengan PSAK No.46.

The balance represents amount of income tax will be recovered in the future periods, due to deductible temporary-differencies according to PSAK No.46.

18. IMBALAN PASCA KERJA

18. POST EMPLOYED BENEFIT

Perusahaan telah menyelenggarakan program manfaat pasti (JHT dan THT) maupun program iuran pasti (DPLK) untuk seluruh karyawan tetapnya.

The company have carried out defined benefit plan (JHT) and THT and also defined contribution program (DPLK) for all permanent employees.

Aset program manfaat pasti dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan RI. Program tersebut memberikan manfaat JHT dan THT yang akan dibayarkan kepada karyawan yang berhak pada saat karyawan pensiun atau berhenti, sesuai dengan peraturan dana pensiun yang bersangkutan.

This defined benefit asset program managed by PT Asuransi Jiwasraya which the founding have got endorsement from The Finance Minister RI. The program give JHT and THT benefit which will be paid to employees at the time of employees pension or desist, as according to regulation of the pension fund.

Program Pensiun Manfaat Pasti
Penyelenggaraan program pensiun manfaat pasti dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No.25/KPTS/PKK.3/XI/1987 tanggal 23 Nopember 1987 jo No. 01/DIR/I/2002 tanggal 7 Januari 2002. Program ini terdiri dari Program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Program Tunjangan Hari Tua (THT). Program inidiperuntukkan bagi karyawan yang periode kerjanya dimulai sebelum tahun 1995. Jumlah karyawan yang diikutsertakan program tersebut sebanyak 401 orang.

Defined Benefit Pension Plan
Implementation of defined benefit pension plan is declare in Director decision No.25/KPTS/PKK.3/XI/1987 date of November 23, 1987 jo No. 01/DIR/I/2002 dated January 7, 2002. This Program consist of Program Jaminan Hari Tua (JHT) and Program Tunjangan Hari Tua (THT). This programdestine for employees which time line working is started before 1995. Amount of involveed employeeses is the program counted at 401 people.

Pendanaan program pensiun dilakukan oleh Perusahaan dan karyawan dengan membayar iuran bulanan. Kontribusi pendanaan sebesar 5% oleh karyawan dan sisanya ditanggung Perusahaan.

Funding of pension plan done by employees and corporation with paying monthly fee. Funding contribution equal to 5% by employees and the rest accounted by company.

Manfaat yang diperoleh dari program pensiun manfaat pasti ialah sebagai berikut:

Benefit which obtained from defined benefit pension program is the following:

a. Program Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 30 (tiga puluh) x Gaji Karyawan

a. Program Jaminan Hari Tua (JHT) equal to 30 (thirty times employees salary

b. Program Tunjangan Hari Tua (THT) sebesar 2,5% x Masa Kerja x Gaji karyawan

b. Program Tunjangan Hari Tua (THT) equal to 2,5% x Years of Service x employees salary

Program Pensiun Iuran Pasti
Penyelenggaraan program pensiun iuran pasti dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No.31/DIR/IV/1997 Tanggal 28 April 1997 jo No.14/DIR/V/2002 tanggal 21 Mei 2002. Program ini diperuntukkan bagi karyawan yang periode kerjanya mulai setelah tahun 1995.

Defined Contribution Pension Plan
Implementation of defined contribution pension plan is declared by Director decision No. 31/DIR/IV/1997 dated April 28, 1997 jo No. 14/DIR/V/2002 dated May 21, 2002. This Program destine for employees which time line working is strarting after year 1995.

Pendanaan program pensiun dilakukan oleh Perusahaan dan karyawan dengan membayar iuran bulanan. Kontribusi pendanaan sebesar 4,4% dari gaji pokok karyawan dan sisanya 6,6% ditanggung Perusahaan.

The funding of pension plan done by employees and corporation with paying monthly fee. Funding contribution equal to 4,4% from employees base salary and the rest of 6,6% accounted on company.

Besarnya asumsi hasil investasi untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) ialah 10% per tahun.

The return of investment level assumption for Financial Institution Pension Fund (DPLK) is 10% per year.

Pada tahun 2014 Manajemen menunjuk aktuaris independen PT Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa untuk melakukan perhitungan beban/manfaat pasca kerja sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2010) untuk tahun 2014 dan 2013.

In 2014 management hire independent actuary of PT Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa for calculating post empoyment expense/benefit post according to PSAK 24 (Revision 2010) for 2014 and 2013.

18. IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

Dalam mengestimasi manfaat pensiun per 31 Desember 2014 dan 2013 untuk kedua program tersebut di atas, Aktuaris dalam perhitungannya menggunakan *Projected Unit Credit Actuarial Cost Method*, yang perhitungannya mengacu kepada tingkat pembiayaan yang sebenarnya diperlukan dalam satu periode. Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut :

18. POST EMPLOYED BENEFIT (Continued)

In estimating pension benefit as of December 31, 2014 and 2013 for both programs, Actuary in the calculation use Projected Unit Credit. Actuarial Cost Method the calculation refers to the actual level of financing needed in the period. The key assumptions used in the actuarial calculations are as follows:

	Desember 2014	Desember 2013	
Tingkat Diskonto	8%	8,5%	*Discount Rate*
Kenaikan gaji per tahun	8%	8%	*Salary increase rate*
Tabel Mortalita	TMI 2011	TMI 2011	*Mortalita Table*
Tingkat Cacat	5%	5%	*Disability Rate*
Usia Pensiun Normal	55 tahun	55 tahun	*Normal Pensiun Age*

Program Pensiun
Kewajiban (aset) program pensiun manfaat pasti sebagai berikut:

Pension Program
Defined benefit pension program liability (asset) manfaat pasti is as follows:

Rekonsiliasi Aset/Kewajiban yang diakui di Laporan Posisi Keuangan	**2014**	**2013**	***Reconciliationassets/liabilities which recognized in Statements Of Financial Position***
Nilai Sekarang Kewajiban akhir periode	36.365.983.123	24.665.157.588	*Present value of Obligation ending balance*
Nilai Wajar Aset Program	(14.522.587.169)	(14.510.548.699)	*Fair value of Program Assets*
Status Pendanaan	21.843.395.954	10.154.608.889	*Funding Status*
(Keuntungan)/Kerugian aktuaria yang belum diakui	(21.367.523.323)	(11.083.360.915)	*Unrecognized actuarial gain (loss)*
Biaya Jasa Lalu non-vested yang belum diakui	(5.030.427.186)	(5.660.676.633)	*Unrecognized non-vested past service expenses*
Aset (Kewajiban) yang diakui di Laporan Posisi Keuangan	**(4.554.554.555)**	**(6.589.428.659)**	***Asset (Liabilities) presented in Statement Financial Position***

Rekonsiliasi biaya manfaat yang diakui di Laporan Laba Rugi Komprehensif	**2014**	**2013**	***Reconciliation of employee benefit expenses which recognized in statement of comprehensive income***
Biaya Jasa Kini	3.244.312.466	1.754.600.188	*Current Service Expense*
Biaya Bunga	2.096.538.394	1.607.181.011	*Interest expense*
Pengembalian Aset Program yang diharapkan	(1.233.396.639)	(917.998.510)	*Required rate of return of Program Assets*
Amortisasi Biaya Jasa lalu non-vested yang belum diakui	630.249.447	630.249.447	*Amortization of unrecognized non-vested past service expense*
(Keuntungan) / Kerugian Aktuaria yang Diakui	468.517.614	535.784.237	*Recognized actuarial (gain) / loss*
Total biaya manfaat karyawan	**5.206.221.282**	**3.609.816.373**	***Total employee benefit expenses***

Rekonsiliasi perubahan pada aset/kewajiban yang diakui di Laporan Posisi Keuangan	**2014**	**2013**	***Reconciliation of employee benefit expenses which recognized in statement of income***
(Aset)/Kewajiban pada awal periode	(6.589.428.659)	(6.621.536.911)	*(Asset)/Liabilities at beginning period*
Biaya Jasa Kini	3.244.312.466	1.754.600.188	*Current Service Expense*
Biaya Bunga	2.096.538.394	1.607.181.011	*Interest expense*
Pengembalian Aset Program yang diharapkan	(1.233.396.639)	(917.998.510)	*Required rate of return of Program Assets*
(Keuntungan) / Kerugian Aktuaria yang Diakui	468.517.614	535.784.237	*Recognized actuarial (gain) / loss*
Amortisasi Biaya Jasa lalu non-vested yang belum diakui	630.249.447	630.249.447	*Amortization of unrecognized non-vested past service expense*
Iuran yang dibayarkan	(3.171.347.177)	(3.577.708.121)	*Contribution Paid*
(Aset)/kewajiban pada tanggal di Laporan Posisi Keuangan	**(4.554.554.554)**	**(6.589.428.659)**	***(Asset)/Liabilities on the Statement Of Financial Position***

Batasan Koridor

Dalam paragraph 97 (PSAK 24 Revisi 2010) pengakuan keuntungan dan kerugian aktuaria sebagai penghasilan atau beban adalah akumulasi keuntungan dan kerugian aktuaria bersih yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar antara:

a. 10% dari nilai kini imbalan pasti pada tanggal tersebut (sebelum dikurangi asset program); dan
b. 10% dari nilai wajar asset program pada tanggal tersebut.

The Corridor Limits

In paragraph 97 (SFAS No. 24 Revised 2010) recognition of actuarial gains and losses as income or expense is accumulated net actuarial gains and losses unrecognized at the end of the previous reporting period exceed the greater of:

a. 10% of the present value of the defined benefit obligation at that date (before deducting asset program), and
b. 10% of the fair value of assets at that date.

18. IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

Pengakuan keuntungan (kerugian) aktuaria dalam paragraph 98 (PSAK 24 Revisi 2010), porsi keuntungan (kerugian) actuarial yang dipilih oleh perusahaan adalah kelebihan yang ditetapkan berdasarkan paragraf 97 dibagi dengan rata-rata sisa masa kerja ekspektasi dari para pekerja dalam program tersebut (menggunakan amortisasi).

Karena akumulasi keuntungan dan kerugian aktuaria bersih yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya lebih besar dari batasan koridor, maka bagian keuntungan (kerugian) aktuaria yang dapat diakui per 31 Desember 2012 berjumlah (Rp184.090.977).

18. POST EMPLOYED BENEFIT (Continued)

The recognition of actuarial gains (losses) in paragraph 98 (SFAS No. 24 Revisied 2010), the portion of actuarial gains (losses) are selected by the company's excess assigned based on paragraphs 97 divided by the average remaining working period of expectations of the workers in the program (using amortization).

Due to the accumulated actuarial net gains and losses that have not been recognized at the end of the previous reporting period is larger than the limits of the corridor, then the actuarial gains (losses) that can be recognized per December 31, 2012 amounted (Rp184.090.977).

19. HUTANG LAIN-LAIN

19. OTHER PAYABLE

Saldo Hutang lain-lain per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 terdiri dari:

Other Payable as of December 31, 2014 and 2013 consists of:

	2014	2013	
Bagian Dana Jaminan Ulang yang Belum Disisihkan	395.317.480	395.317.480	*Unappropriate Repeated Guarantee Fund*
Bagian Dana Penampungan KUT yang Belum Disisihkan	389.177.486	389.177.486	*Unappropriate KUT Guarantee Fund*
Bagian DTP yang Belum Disisihkan	474.000	474.000	*Unappropriate TDP*
Cadangan Dana Selish Harga	17.040.000	17.040.000	*Price Difference Fund Reserve*
Hutang Premi Pensiun	1.463.143.663	12.693.299	*Retirement of debt premium*
Hutang Premi Jamsostek	48.420.333	39.549.738	*Jamsostek premiums payable*
Lainnya	9.096.073.718	3.335.141.065	*Others*
Beban Operasi YMH Dibayar	1.896.279.436	991.209.409	*Operational Expense Accrued*
Beban Sistek dan Pengembangan YMH Dibayar	9.029.780.664	2.959.696.465	*Technology System and Development Expenses Accrued*
Beban Pegawai YMH Dibayar	37.470.078.361	31.794.182.705	*Employee Expenses Accrued*
Beban Administrasi dan Umum YMH Dibayar	20.496.364.803	12.649.619.749	*Administrative and General Expenses Accrued*
Security Deposit Penyewa	968.893.765	1.077.476.693	*Tenant Security Deposit*
Jaminan Telepon Penyewa	350.000.000	390.000.000	*Tenant Warranty Deposit*
Dana Titipan IJP	(143.833.596)	(40.075.159)	*Deposits Fund IJP*
Hutang Fee Bank	853.361.970	236.769.640	*Bank Fee Payable*
Hutang Fee Agen	3.309.504.296	2.495.286.196	*Agent Fee Payable*
Penampungan Program Kemitraan & Bina Lingkungan	7.613.906.201	8.041.231.489	*Partnership and Environmental Development Program*
Akun dalam Penyelesaian	44.499.482.751	11.772.811.638	*Other Liabilities in Progress*
Total Hutang Lain-Lain	**137.753.465.331**	**76.557.601.893**	***Total Other Payable***

20. EKUITAS

20. EQUITY

	2014	2013	
Penyertaan Modal Negara	6.638.733.365.160	5.338.733.365.160	*Government Paid-in Capital*
Cadangan-cadangan :			*Reserves:*
Cadangan Modal	904.000.000	904.000.000	*Capital Reserve*
Cadangan Umum	859.700.175.357	408.299.167.373	*General Reserve*
Cadangan Tujuan	186.707.510.860	270.462.458.506	*Purposed Reserve*
Cadangan Dana Teknis	78.274.593.035	78.274.593.035	*Technical Fund Reserve*
Jumlah Cadangan	1.125.586.279.252	757.940.218.914	*Total Reserves*
Komponen Ekuitas Lainnya	(11.219.183.476)	(71.744.405.302)	*Other Components Of Equity*
Saldo Laba Akibat Pengaruh PSAK 50-55 Dan Laba Tahun Berjalan	664.138.955.479	525.209.060.338	*Retained Earnings Effect SFAS 50-55and Current Year Net income*
Jumlah Ekuitas Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	**8.417.239.416.415**	**6.550.138.239.110**	***Net Equity Attributable to Owners of the Parent***
Kepentingan Non Pengendalian	12.512.606	-	
Total Ekuitas	**8.417.251.929.021**	**6.550.138.239.110**	***Total Equity***

a. Penyertaan Modal Negara (PMN)

Pada tahun 2014 terdapat penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp. 1.300.000.000.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014. Pada tahun 2013 terdapat penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp. 1.120.000.000.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

Penambahan modal ini dimaksudkan untuk untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan Perusahaan terkait dengan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

a. Government Paid-in Capital

In the year 2014 there were additional State Capital (PMN) was Rp1.300.000.000.000 stipulated by Government Regulation Number 98 of 2014 dated October 17, 2014. In the year 2013 there were additional State Capital (PMN) was Rp1.120.000.000.000 stipulated by Government Regulation Number 81 of 2013 dated December 10, 2013 on the addition of the Investment of the Republic of Indonesia to the Capital Public Company (Perum) Credit Guarantee Indonesia.

This capital increase is intended to increase the capacity of the business and to strengthen the Company's capital structure associated with the People's Business Credit Guarantee.

20. EKUITAS (Lanjutan)

a. Penyertaan Modal Negara (PMN) (Lanjutan)

Penambahan modal terkait Penjaminan Kredit Usaha Rakyat ini juga dilakukan oleh Pemerintah pada tahun 2012 terdapat penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp. 1.169.000.000.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No 108 tahun 2012 tanggal 24 Desember 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, tahun 2011 sebesar Rp1.200.000.000.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011, tahun 2010 sebesar Rp900.000.000.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010, tahun 2009 sebesar Rp250.000.000.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2009 tanggal 31 Oktober 2009 dan tahun 2007 sebesar Rp600.000.000.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007.

Modal awal Perusahaan adalah sebesar Rp21.000.000.000. Pada tahun 1992 dan 1993 terdapat penambahan modal sebesar Rp22.330.000.000 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1994 tanggal 3 Maret 1994.

Pada tahun 1998, terdapat penambahan modal sebesar Rp56.403.365.160 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor S-33/MK.016/1998 tanggal 22 Januari 1998 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999.

b. Cadangan - cadangan

Saldo cadangan modal merupakan saldo cadangan modal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 383/KMK/011/1982 tanggal 15 Juni 1982 tentang penetapan modal awal Perum Pengembangan Keuangan Koperasi.

Jumlah ini telah dimasukkan sebagai cadangan modal per 31 Desember 1981 sesuai dengan tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1981 tentang pendirian Perum Pengembangan Keuangan Koperasi.

Saldo cadangan umum merupakan saldo pencadangan untuk pemupukan modal kegiatan operasional. Pada tahun buku 2002 telah dilakukan koreksi cadangan umum sebagai akibat diterapkannya PSAK 46 mengenai Akuntansi Pajak Penghasilan yang diberlakukan efektif mulai 1 Januari 2001.

Saldo cadangan tujuan merupakan saldo pencadangan untuk digunakan sebagai sumber dana pembiayaan investasi dan saldo cadangan teknis merupakan saldo pencadangan untuk digunakan sebagai sumber pendanaan jika terjadi klaim.

c. Komponen Ekuitas Lainnya

Merupakan laba rugi belum direalisir atas efek tersedia untuk dijual dengan rincian sebagai berikut:

Per 31 Desember 2014 :

Produk Investasi	Harga Perolehan / Cost	Nilai Wajar / *Fair Value*	Kenaikan (Penurunan) / *Increase (Decrease)*
Reksadana			
Danareksa Mawar Konsumer	5.000.000.000	4.795.294.539	(204.705.461)
RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis	10.000.000.000	9.476.366.919	(523.633.081)
RD Batavia Dana Saham Optimal	20.000.000.000	20.864.836.458	864.836.458
RD OSK Nusadana Alpha Sec. Rotation	25.000.000.000	24.999.999.999	(1)
RD Simas Satu	10.000.000.000	9.922.419.041	(77.580.959)
RD SAM Syariah Berimbang	10.000.000.000	10.659.980.582	659.980.582
RD CIMB-Principal Indo Domestic Equty	20.000.000.000	21.972.853.652	1.972.853.652
RD SAM Sharia Equity Fund	5.000.000.000	5.181.144.369	181.144.369
RD Syailendra Equity Opportunity Fund	5.000.000.000	4.716.949.672	(283.050.328)
RD Panin Dana Maksima	5.000.000.000	4.900.558.352	(99.441.648)
RD BNI-AM Dana Saham Sektoral	60.000.000.000	61.134.662.187	1.134.662.187
RD CIMB Princ. Equity Aggressive	10.000.000.000	10.983.391.392	983.391.392
RD CIMB Princ. Islamic Equity Growth	20.000.000.000	20.862.106.521	862.106.521
RD Milenium Equity	5.000.000.000	5.272.881.822	272.881.822
RD CIMB-P Balanced Growth Syariah	10.000.000.000	10.855.700.000	855.700.000
RD Batavia Dana Saham	25.000.000.000	26.166.461.782	1.166.461.782
RD CIMB-Principal Equity Focus	125.000.000.000	134.752.283.873	9.752.283.873
RD UGM CIMB-Principal Balanced	10.000.000.000	10.258.657.806	258.657.806
	380.000.000.000	**397.776.548.964**	**17.776.548.964**

20. EQUITY (Continued)

a. Government Paid-in Capital (Continued)

Capital increase related to the People's Business Credit Guarantee is also done by the Government in 2012 there were additional State Capital (PMN) was Rp. 1.169.000.000.000 stipulated by Government Regulation No. 108 of 2012 dated December 24, 2012 on the addition of the Investment of the Republic of Indonesia to the Capital Public Company (Perum) Loan Guarantees Indonesia, in 2011 at Rp1.200.000.000.000 stipulated by Government Regulation No. 61 of 2011 dated December 29, 2011, in 2010 amounted Rp900.000.000.000 stipulated by Government Regulation No. 82 of 2010 dated December 20, 2010, in 2009 amounted Rp250.000.000.000 stipulated by Government Regulation 65 of 2009 dated October 31, 2009 and 2007 amounted Rp600.000.000.000 stipulated by Government Regulation No. 67 of 2007 dated December 10, 2007.

Beginning capital of company amounted to Rp21.000.000.000. In 1992 and 1993 there in capital addition amounted to Rp22.330.000.000 and stated with Government regulation No. 5 year 1994 dated Maret 3, 1994.

In 1998, there in capital additon amounted to Rp56.403.365.160 and have been stated with Finance Minister decision No. S-33/MK.016/1998 dated Januari 22, 1998 and Government Regulation of Republik Indonesia No. 11 year 1999 dated Januari 27, 1999.

b. Reserves

Capital reserve balance represent capital reserve balance which specified based on SK Finance Minister decree No. 383/KMK/011/1982 dated June 15, 1982 concerning pegging of start-up capital Perum Pengembangan Keuangan Koperasi.

This amounts have been classified as capital reserves as of December 31, 1981 according to the implementation date of PP Nomor 51 year 1981 concerning establishment of Perum Pengembangan Keuangan Koperasi.

General reserve balance represent reservation balance for capital accummulating of operational activity. In the 2002 general reserve have been adjusted due to effect of PSAK 46 implementaion concerning Income Tax Accounting, which effective since January 1, 2001.

Purposed reserve is reservation balance to be used as source of fund of investment financing and technical reserve is reservation balance to be used as source of funding in case of claim happened.

c. Other Components of Equity

Is unealized profit or loss on securities available for sale with the following details:

As of December 31, 2014 :

Investment Product
Mutual Fund
Danareksa Mawar Konsumer
RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis
RD Batavia Dana Saham Optimal
RD OSK Nusadana Alpha Sec. Rotation
RD Simas Satu
RD SAM Syariah Berimbang
RD CIMB-Principal Indo Domestic Equty
RD SAM Sharia Equity Fund
RD Syailendra Equity Opportunity Fund
RD Panin Dana Maksima
RD BNI-AM Dana Saham Sektoral
RD CIMB Princ. Equity Aggressive
RD CIMB Princ. Islamic Equity Growth
RD Milenium Equity
RD CIMB-P Balanced Growth Syariah
RD Batavia Dana Saham
RD CIMB-Principal Equity Focus
RD UGM CIMB-Principal Balanced

20. EKUITAS (Lanjutan) / *20. EQUITY (Continued)*

Produk Investasi	Harga Perolehan / Cost	Nilai Wajar / *Fair Value*	Kenaikan (Penurunan) / *Increase (Decrease)*	*Investment Product*
	380.000.000.000	**397.776.548.964**	**17.776.548.964**	
Reksadana				***Mutual Fund***
RD AAA Balanced Fund	5.000.000.000	5.075.863.490	75.863.490	*RD AAA Balanced Fund*
RD Simas Syariah Unggulan	10.000.000.000	10.000.000.000	-	*RD Simas Syariah Unggulan*
RD Simas Saham Unggul	10.000.000.000	10.000.000.000	-	*RD Simas Saham Unggul*
RD Insight Support (I-Support)	50.000.000.000	46.345.621.168	(3.654.378.832)	*RD Insight Support (I-Support)*
RD Manulife Saham SMC Plus	5.000.000.000	4.744.335.824	(255.664.176)	*RD Manulife Saham SMC Plus*
RD Insight Wealth (I-Wealth)	10.000.000.000	10.285.510.000	285.510.000	*RD Insight Wealth (I-Wealth)*
Jumlah Reksadana	**470.000.000.000**	**484.227.879.446**	**14.227.879.447**	***Total Mutual Fund***
Obligasi				***Obligasi***
Sarana Multi Griya Finance Tahun 2012 Seri C	25.000.000.000	23.707.500.000	(1.292.500.000)	*Sarana Multi Griya Finance Tahun 2012 Seri C*
Sarana Multi Griya Finance Tahun 2012 Seri B	50.000.000.000	46.225.000.000	(3.775.000.000)	*Sarana Multi Griya Finance Tahun 2012 Seri B*
Astra Sedaya Finance Tahun 2012 Seri B	46.000.000.000	46.000.000.000	-	*Astra Sedaya Finance Tahun 2012 Seri B*
Astra Sedaya Finance Tahun 2012 Seri C	25.000.000.000	24.255.000.000	(745.000.000)	*Astra Sedaya Finance Tahun 2012 Seri C*
Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Tahun 2012	36.000.000.000	35.319.600.000	(680.400.000)	*Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Tahun 2012*
Adira Multifinance Tahun 2012 Seri C	48.932.601.887	48.681.500.000	(251.101.887)	*Adira Multifinance Tahun 2012 Seri C*
Indomobil Finance 2012 Seri C	50.000.000.000	48.750.000.000	(1.250.000.000)	*Indomobil Finance 2012 Seri C*
Indomobil Wahana Trada Tahun 2012 Seri B	21.000.000.000	20.769.000.000	(231.000.000)	*Indomobil Wahana Trada Tahun 2012 Seri B*
Toyota Astra Finance Tahap II Tahun 2012 Seri B	25.981.300.000	26.010.400.000	29.100.000	*Toyota Astra Finance Tahap II Tahun 2012 Seri B*
Bank Cimb Niaga Tahap I 2012	25.000.000.000	23.850.000.000	(1.150.000.000)	*Bank Cimb Niaga Tahap I 2012*
Mitra Adi Perkasa 2012 Seri A	11.000.000.000	11.000.000.000	-	*Mitra Adi Perkasa 2012 Seri A*
Akr Corporindo Thn 2012 Seri A	20.000.000.000	18.750.000.000	(1.250.000.000)	*Akr Corporindo Thn 2012 Seri A*
Btpn Tahap III 2013 Seri B	5.000.000.000	4.750.000.000	(250.000.000)	*Btpn Tahap III 2013 Seri B*
Obligasi II Smf Tahap II 2013 Seri C	20.000.000.000	20.000.000.000	-	*II Smf Tahap II 2013 Seri C*
Obligasi I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013	15.000.000.000	14.052.000.000	(948.000.000)	*I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013*
Antam Seri A Tahun 2011	15.000.000.000	13.597.500.000	(1.402.500.000)	*Antam Seri A Tahun 2011*
Perum Pegadaian Tahun 2012 Seri D	3.926.400.000	4.000.000.000	73.600.000	*Perum Pegadaian Tahun 2012 Seri D*
Negara RI Seri FR0058	3.645.000.000	3.351.000.000	(294.000.000)	*Negara RI Seri FR0058*
Negara RI Seri FR0065	2.090.000.000	1.640.000.000	(450.000.000)	*Negara RI Seri FR0065*
Obligasi I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	10.000.000.000	8.800.000.000	(1.200.000.000)	*Obligasi I Bank BTN Tahap II Tahun 2013*
Obligasi I Adhi Tahap II 2013 Seri B	19.000.000.000	15.775.700.000	(3.224.300.000)	*I Adhi Tahap II 2013 Seri B*
Obligasi I PP Tahap I Tahun 2013	22.000.000.000	19.318.200.000	(2.681.800.000)	*Obligasi I PP Tahap I Tahun 2013*
Prm Pegadaian Thp II 2014 Seri C	10.000.000.000	9.748.000.000	(252.000.000)	*Prm Pegadaian Thp II 2014 Seri C*
Jumlah Obligasi	**509.575.301.887**	**488.350.400.000**	**(21.224.901.887)**	***Total Bond***
Saham				***Shares***
Astra International Indonesia	4.687.749.990	4.677.750.000	(9.999.990)	*Astra International Indonesia*
Bank Rakyat Indonesia	1.742.442.495	1.747.500.000	5.057.505	*Bank Rakyat Indonesia*
Bukit Asam	2.605.744.860	2.500.000.000	(105.744.860)	*Bukit Asam*
Perusahaan Gas Negara	3.238.750.020	3.300.000.000	61.249.980	*Perusahaan Gas Negara*
Indofood Sukses Makmur	3.608.874.990	3.543.750.000	(65.124.990)	*Indofood Sukses Makmur*
United Tractors	5.729.749.994	5.031.500.000	(698.249.994)	*United Tractors*
PP London Sumatra	5.489.424.918	4.592.700.000	(896.724.918)	*PP London Sumatra*
Bank Mandiri	1.599.375.000	1.616.250.000	16.875.000	*Bank Mandiri*
Semen Gresik	22.997.817.937	21.481.200.000	(1.516.617.937)	*Semen Gresik*
Unilever	1.478.469.998	1.524.560.000	46.090.002	*Unilever*
Kalbe Farma	2.098.629.358	2.118.591.000	19.961.642	*Kalbe Farma*
Bumi Serpong Damai	1.291.645.494	1.444.902.500	153.257.006	*Bumi Serpong Damai*
Indocement	4.973.510.000	5.000.000.000	26.490.000	*Indocement*
Bank Tabungan Negara	8.331.175.035	7.216.263.000	(1.114.912.035)	*Bank Tabungan Negara*
Surya Semesta Internusa	7.838.000.100	7.490.000.000	(348.000.100)	*Surya Semesta Internusa*
Telekomunikasi Indonesia	5.995.500	6.016.500	21.000	*Telekomunikasi Indonesia*
Bank Central Asia	2.171.130.298	2.174.812.500	3.682.202	*Bank Central Asia*
AKR Corporindo	3.632.356.008	3.131.200.000	(501.156.008)	*AKR Corporindo*
Semen Baturaja	560.000.000	381.000.000	(179.000.000)	*Semen Baturaja*
Alam Sutera Realty	2.812.587.341	2.381.400.000	(431.187.341)	*Alam Sutera Realty*
Adhi Karya	6.345.627.200	7.656.000.000	1.310.372.800	*Jasa Marga*
Charoen Pokphand Indonesia	1.132.500.000	1.134.000.000	1.500.000	*Indofood CBP Sukses Makmur*
Jumlah Saham	**94.371.556.536**	**90.149.395.500**	**(4.222.161.036)**	***Total Share***
Total Komponen Ekuitas Lainnya	**1.073.946.858.423**	**1.062.727.674.946**	**(11.219.183.476)**	***Total Other Equity Component***
Per 31 Desember 2013 :		*As of December 31, 2013 :*		
Reksadana				***Mutual Fund***
BNI-AM Dana Terencana	25.000.000.000	22.816.396.951	(2.183.603.049)	*BNI-AM Dana Terencana*
PT PNM Pembiayaan Mikro 2012 Seri II	10.000.000.000	10.145.563.712	145.563.712	*PT PNM Pembiayaan Mikro 2012 Seri II*
Danareksa Mawar Konsumer	5.000.000.000	3.780.983.930	(1.219.016.070)	*Danareksa Mawar Konsumer*
RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis	10.000.000.000	7.437.799.742	(2.562.200.258)	*RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis*
RD Batavia Dana Saham Optimal	10.000.000.000	8.845.039.323	(1.154.960.677)	*RD Batavia Dana Saham Optimal*
RD SAM Indonesian Equity Fund	10.000.000.000	8.868.406.839	(1.131.593.161)	*RD SAM Indonesian Equity Fund*
RD OSK Nusadana Alpha Sec. Rotation	10.000.000.000	8.958.689.389	(1.041.310.611)	*RD OSK Nusadana Alpha Sec. Rotation*
RD CIMB Princ. Balanced Strategic Plus	5.000.000.000	4.272.120.882	(727.879.118)	*RD CIMB Princ. Balanced Strategic Plus*
RD AAA Enchanced Strategy Fund	20.000.000.000	18.756.401.041	(1.243.598.959)	*RD AAA Enchanced Strategy Fund*
RD Manulife Saham SMC Plus	5.000.000.000	4.052.464.993	(947.535.007)	*RD Manulife Saham SMC Plus*
	110.000.000.000	**97.933.866.802**	**(12.066.133.198)**	

20. EKUITAS (Lanjutan) / *20. EQUITY (Continued)*

c. Komponen Ekuitas Lainnya (Lanjutan) / *c. Other Components of Equity (Continued)*

Per 31 Desember 2013 : / *As of December 31, 2013 :*

Produk Investasi	Harga Perolehan / Cost	Nilai Wajar / *Fair Value*	Kenaikan (Penurunan) / *Increase (Decrease)*	*Investment Product*
	110.000.000.000	**97.933.866.802**	**(12.066.133.198)**	
Reksadana				***Mutual Fund***
RD Simas Satu	5.000.000.000	4.696.315.848	(303.684.152)	*RD Simas Satu*
RD SAM Syariah Berimbang	5.000.000.000	4.553.226.848	(446.773.152)	*RD SAM Syariah Berimbang*
RD CIMB-Principal Indo Domestic Equty	10.000.000.000	7.817.000.000	(2.183.000.000)	*RD CIMB-Principal Indo Domestic Equty*
RD SAM Sharia Equity Fund	5.000.000.000	3.920.717.388	(1.079.282.612)	*RD SAM Sharia Equity Fund*
RD Syailendra Equity Opportunity Fund	5.000.000.000	3.954.020.995	(1.045.979.005)	*RD Syailendra Equity Opportunity Fund*
RD Panin Dana Maksima	5.000.000.000	3.875.157.093	(1.124.842.907)	*RD Panin Dana Maksima*
RDPT Danareksa Sinergi BUMN II	10.000.000.000	10.135.603.868	135.603.868	*RDPT Danareksa Sinergi BUMN II*
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013	10.000.000.000	10.053.087.782	53.087.782	*RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013*
RDPT AAA Jamkrindo BUMN Fund	25.000.000.000	25.056.849.956	56.849.956	*RDPT AAA Jamkrindo BUMN Fund*
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 Seri II	50.000.000.000	50.042.895.950	42.895.950	*RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 Seri II*
	240.000.000.000	**222.038.742.530**	**(17.961.257.470)**	
Obligasi				***Obligasi***
Sarana Multi Griya Finance Tahun 2012 Seri C	25.000.000.000	23.112.500.000	(1.887.500.000)	*Sarana Multi Griya Finance Tahun 2012 Seri C*
Sarana Multi Griya Finance Tahun 2012 Seri B	50.000.000.000	46.600.000.000	(3.400.000.000)	*Sarana Multi Griya Finance Tahun 2012 Seri B*
Sarana Multi Griya Finance Tahun 2011 Seri C	4.000.000.000	4.000.000.000	-	*Sarana Multi Griya Finance Tahun 2011 Seri C*
Astra Sedaya Finance Tahun 2012 Seri B	50.000.000.000	49.025.000.000	(975.000.000)	*Astra Sedaya Finance Tahun 2012 Seri B*
Astra Sedaya Finance Tahun 2012 Seri C	25.000.000.000	24.500.000.000	(500.000.000)	*Astra Sedaya Finance Tahun 2012 Seri C*
Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Tahun 2012	36.000.000.000	34.380.000.000	(1.620.000.000)	*Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Tahun 2012*
Adira Multifinance Tahun 2012 Seri C	52.927.100.000	50.848.200.000	(2.078.900.000)	*Adira Multifinance Tahun 2012 Seri C*
Adira Multifinance Tahap III Tahun 2012 Seri C	50.000.000.000	48.850.000.000	(1.150.000.000)	*Adira Multifinance Tahap III Tahun 2012 Seri C*
Indomobil Finance 2012 Seri C	50.000.000.000	47.610.000.000	(2.390.000.000)	*Indomobil Finance 2012 Seri C*
Indomobil Wahana Trada Tahun 2012 Seri B	25.000.000.000	24.775.000.000	(225.000.000)	*Indomobil Wahana Trada Tahun 2012 Seri B*
Toyota Astra Finance Tahap II Tahun 2012 Seri B	25.981.300.000	25.337.000.000	(644.300.000)	*Toyota Astra Finance Tahap II Tahun 2012 Seri B*
Bank Cimb Niaga Tahap I 2012	25.000.000.000	22.867.550.000	(2.132.450.000)	*Bank Cimb Niaga Tahap I 2012*
Mitra Adi Perkasa 2012 Seri A	15.000.000.000	15.067.500.000	67.500.000	*Mitra Adi Perkasa 2012 Seri A*
Akr Corporindo Thn 2012 Seri A	20.000.000.000	19.800.000.000	(200.000.000)	*Akr Corporindo Thn 2012 Seri A*
Btpn Tahap III 2013 Seri B	5.000.000.000	4.717.500.000	(282.500.000)	*Btpn Tahap III 2013 Seri B*
II Smf Tahap II 2013 Seri C	20.000.000.000	20.000.000.000	-	*II Smf Tahap II 2013 Seri C*
I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013	15.000.000.000	13.711.500.000	(1.288.500.000)	*I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013*
Antam Seri A Tahun 2011	15.000.000.000	13.923.000.000	(1.077.000.000)	*Antam Seri A Tahun 2011*
Perum Pegadaian Tahun 2012 Seri D	3.926.400.000	3.632.000.000	(294.400.000)	*Perum Pegadaian Tahun 2012 Seri D*
Negara RI Seri FR0058	8.505.000.000	6.702.500.000	(1.802.500.000)	*Negara RI Seri FR0058*
Negara RI Seri FR0059	5.475.000.000	5.200.000.000	(275.000.000)	*Negara RI Seri FR0059*
Negara RI Seri FR0060	5.200.000.000	5.037.454.000	(162.546.000)	*Negara RI Seri FR0060*
Negara RI Seri FR0061	6.750.600.000	5.475.000.000	(1.275.600.000)	*Negara RI Seri FR0061*
Negara RI Seri FR0063	3.060.000.000	2.534.763.300	(525.236.700)	*Negara RI Seri FR0063*
Negara RI Seri FR0064	3.060.000.000	2.887.500.000	(172.500.000)	*Negara RI Seri FR0064*
Negara RI Seri FR0065	2.090.000.000	2.040.000.000	(50.000.000)	*Negara RI Seri FR0065*
Onligasi I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	10.000.000.000	8.795.000.000	(1.205.000.000)	*Onligasi I Bank BTN Tahap II Tahun 2013*
I Adhi Tahap II 2013 Seri B	19.000.000.000	17.708.000.000	(1.292.000.000)	*I Adhi Tahap II 2013 Seri B*
I Pp Tahap I Tahun 2013	22.000.000.000	19.804.400.000	(2.195.600.000)	*I Pp Tahap I Tahun 2013*
I Hutama Karya Tahun 2013	12.000.000.000	12.000.000.000	-	*I Hutama Karya Tahun 2013*
Jumlah Obligasi	**609.975.400.000**	**580.941.367.300**	**(29.034.032.700)**	***Total Bond***
Saham				***Shares***
Astra International Indonesia	19.817.820.000	18.360.000.000	(1.457.820.000)	*Astra International Indonesia*
Bank Rakyat Indonesia	8.366.025.019	7.703.125.000	(662.900.019)	*Bank Rakyat Indonesia*
Bukit Asam	3.670.146.625	2.550.000.000	(1.120.146.625)	*Bukit Asam*
Perusahaan Gas Negara	17.733.594.971	14.460.962.500	(3.272.632.471)	*Perusahaan Gas Negara*
Jasa Marga	9.099.850.680	7.205.625.000	(1.894.225.680)	*Jasa Marga*
Indofood Sukses Makmur	2.380.000.000	2.310.000.000	(70.000.000)	*Indofood Sukses Makmur*
United Tractors	3.742.163.902	3.477.000.000	(265.163.902)	*United Tractors*
Bank Mandiri	22.487.902.898	18.251.250.000	(4.236.652.898)	*Bank Mandiri*
Semen Gresik	22.997.817.937	18.762.900.000	(4.234.917.937)	*Semen Gresik*
Unilever	4.168.089.282	3.445.000.000	(723.089.282)	*Unilever*
Kalbe Farma	2.953.833.338	2.968.750.000	14.916.662	*Kalbe Farma*
Bumi Serpong Damai	2.516.999.925	2.128.500.000	(388.499.925)	*Bumi Serpong Damai*
Indocement	7.832.745.354	6.950.000.000	(882.745.354)	*Indocement*
Bank Tabungan Negara	3.714.250.043	2.022.750.000	(1.691.500.043)	*Bank Tabungan Negara*
Indofood CBP Sukses Makmur	741.249.998	765.000.000	23.750.002	*Indofood CBP Sukses Makmur*
Surya Semesta Internusa	3.561.500.020	1.456.000.000	(2.105.500.020)	*Surya Semesta Internusa*
Telekomunikasi Indonesia	4.576.875.030	4.515.000.000	(61.875.030)	*Telekomunikasi Indonesia*
Bank Central Asia	3.006.249.991	2.904.000.000	(102.249.991)	*Bank Central Asia*
AKR Corporindo	2.611.637.490	2.406.250.000	(205.387.490)	*AKR Corporindo*
Semen Baturaja	560.000.000	330.000.000	(230.000.000)	*Semen Baturaja*
Alam Sutera Realty	2.315.337.643	1.493.175.000	(822.162.643)	*Alam Sutera Realty*
Malindo Feedmill	1.493.837.486	1.374.775.000	(119.062.486)	*Malindo Feedmill*
Wijaya Karya	1.821.250.000	1.580.000.000	(241.250.000)	*Wijaya Karya*
Jumlah Saham	**152.169.177.632**	**127.420.062.500**	**(24.749.115.132)**	***Total Share***
Total Komponen Ekuitas Lainnya	**1.002.144.577.632**	**930.400.172.330**	**(71.744.405.302)**	***Total Other Equity Component***

20. EKUITAS (Lanjutan)

d. Analisis Gearing Ratio

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK. 010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 010/2008 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, Gearing Ratio adalah batasan yang ditetapkan untuk mengukur kemampuan Penjamin dalam melakukan kegiatan Penjaminan.

Gearing Ratio merupakan perbandingan antara total nilai outstanding Penjaminan yang ditanggung sendiri dengan modal sendiri bersih Penjamin pada waktu tertentu. Modal sendiri bersih terdiri dari penempatan modal Pemerintah, cadangan-cadangan, saldo laba, dan komponen ekuitas lainnya dikurangi kerugian.

Gearing Ratio Penjaminan untuk Usaha Produktif ditetapkan paling tinggi sepuluh kali dari ekuitas Perusahaan dan total Gearing Ratio ditetapkan paling tinggi empat puluh kali dari ekuitas Perusahaan.

Pada posisi 31 Desember 2014 , Gearing Ratio Produktif Perum Jamkrindo adalah 4,22 kali, sedangkan total gearing ratio adalah sebesar 10,72 kali.

Karena Gearing Ratio masih berada di bawah ketentuan maksimal yang diperkenankan, maka Perum Jamkrindo masih mempunyai kelonggaran kapasitas untuk melakukan penjaminan. Untuk penjaminan kredit produktif, kelonggaran penjaminan adalah sebesar Rp48,69triliun tanpa memperhitungkan pelunasan dari outstanding tahun berjalan, dengan perhitungan sebagai berikut :

20. EQUITY (Continued)

d. Gearing Ratio Analysis

In accordance with Regulation of the Minister of Finance Number 99/PMK.010/2011 on Amendments to the Minister of Finance Regulation No. 222/PMK.010/2008 About the Company Corporate Credit Guarantee and Credit Guarantee Birthday, Gearing Ratio is the limit set to measure the ability of the Guarantor in theGuarantee activities.

Gearing Ratio is the ratio between the total outstanding value of a self-assurancewith a net worth of Guarantor at any given time. Net worth is total assets minus totalliabilities consist of the placement of government capital, reserves, retained earnings and other equity components of net losses.

Gearing Ratio Guarantee for Productive Enterprises is set at a high of ten times the Company's equity and total gearing ratio is set at a high fourty times the equity of the Company.

On December 31, 2014, the gearing ratio of Perum Jamkrindo was productive to 4.22 times, while the total gearing ratio is to 10.72 times.

Because Gearing Ratio is still below the allowed maximum terms, the Perum Jamkrindo still have given the capacity to do the guarantee. To guarantee the productive credit, guarantee concessions amounted to Rp48.69 trillion without taking into account the repayment of outstanding current year, calculated as follows:

= (10,00 – 4,22) x Rp8,417 triliun = Rp48,69triliun

Untuk penjaminan kredit secara total, kelonggaran penjaminan adalah sebesar Rp246,45 triliun tanpa memperhitungkan pelunasan dari outstanding tahun berjalan, dengan perhitungan sebagai berikut :

For a total credit guarantee, the guarantee allowance amounted to Rp246.45 trillion without taking into account the repayment of outstanding current year, calculated as follows:

= (40,00 – 10,72) x Rp8,417 triliun = Rp246,45 triliun

21. KEPENTINGAN NON PENGENDALI

Bagian yang menjadi hak (beban) pengaruh non pengendali atas laba Entitas Anak adalah sebagai berikut:

21. NON - CONTROLLING INTEREST

The rights part (expense) non controlling influence on subsidiaries profit are as follows:

31 Des 2014 *(Dec 31, 2014)*
Laporan Posisi Keuangan / *Statements of Financial Position*

Entitas Anak	%	Aset Bersih/ *Net Assets*	Kepentingan Non Pengendali *Non-Controlling Interest*	*The Subsidiaries*
PT Perum Jamkrindo Syariah	0,05%	250.252.129.625	12.512.606	*PT Perum Jamkrindo Syariah*

31 Des 2014 *(Dec 31, 2014)*
Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan / *Comprehensive Income Attributable*

Entitas Anak	%	Laba Bersih/ *Net profit*	Kepentingan Non Pengendali *Non-Controlling Interest*	*The Subsidiaries*
PT Perum Jamkrindo Syariah	0,05%	252.129.625	12.606	*PT Perum Jamkrindo Syariah*

22. IMBAL JASA PENJAMINAN

22. GUARANTEE FEE

	2014	2013	
IJP Bruto:			***Gross Guarante Fee***
IJP Kredit Eksisting	496.329.732.242	542.744.081.262	*Guarantee Fee – Existing Credit*
IJP Kredit Usaha Rakyat	1.189.941.289.386	1.058.217.291.025	*Guarantee Fee – KUR*
Pendapatan Komisi Re Asuransi	5.509.491.735	844.526.272	
Jumlah IJP Bruto	**1.691.780.513.363**	**1.601.805.898.559**	***Total Gross Guarantee Fee***
Premi Co Guarantee	(220.685.464.885)	(253.402.175.909)	*Co Guarantee Premium*
Premi Re Asuransi	(24.181.507.239)	(4.204.367.559)	*Re Insurance Premium*
Restitusi IJP	(4.343.792.787)	(4.560.059.814)	*Guarantee Restitution*
Jumlah IJP Bersih	**1.442.569.748.452**	**1.339.639.295.277**	***Total Net Guarantee Fee***

22. IMBAL JASA PENJAMINAN (Lanjutan)

Pendapatan Imbal Jasa penjaminan (IJP) adalah premi yang diterima oleh perusahaan dari terjamin dalam rangka kegiatan usaha penjaminan. Besarnya IJP dihitung dari tarif IJP, plafond kredit dan jangka waktu kredit.

Untuk kredit eksisting, besarnya tarif IJP ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain: produk penjaminan, risiko yang dijamin dan jangka waktu penjaminan. IJP kredit umum dibayar sekaligus di muka.

Tarif IJP Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dan Peraturan Menteri Keuangan No.189/PMK.05/2010 tanggal 2 November 2010. IJP KUR dibayarkan per tahun oleh pemerintah dengan periode penagihan pada bulan Mei dan November.

IJP Kredit Usaha Rakyat sudah memperhitungkan sharing IJP ke dan dari Askrindo dengan proporsi 56% untuk Jamkrindo dan 44 % untuk Askrindo sesuai Perjanjian kerjasama No. 95/Jamkrindo/XII/2011 tanggal 1 Desember 2010 tentang penjaminan kredit/ pembiayaan bersama kredit usaha rakyat (KUR) yang di-addendum dengan perjanjian No. 51/Jamkrindo/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan perjanjian No. 38/Jamkrindo/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012. Sharing IJP KUR dengan Askrindo tidak termasuk IJP KUR dengan pola penjaminan syariah.

Pendapatan komisi reasuransi merupakan komisi yang diterima dari mitra reasuransi dengan prosentase tertentu dari jumlah premi yang dibayar ke mitra reasuransi.

Premi Co Guarantee merupakan premi yang dibebankan kepada terjamin atas kepesertaan asuransi jiwa kredit/ pembiayaan untuk dibayarkan kepada mitra Co Guarantee melalui Penerima Jaminan (bank/ non bank).

Besaran premi Co Guarantee yang menjadi hak mitra Co Guarantee s/d 31 Januari 2013 adalah 60% dan mulai 01 Pebruari 2013 adalah sebesar 54% dari Imbal Jasa Penjaminan yang ditetapkan dalam Sertifikat Penjaminan (SP) yang di dalamnya sudah termasuk biaya administrasi dan biaya lainnya yang terkait dengan Perjanjian Khusus atau yang disetarakan dengan itu. Dengan adanya addendum PKS mitra co bulan Mei 2013, hak mitra co menjadi 38% tanpa dipotong biaya administrasi untuk penerbitan SP yang realisasi kreditnya mulai tanggal 01 Mei 2013. Kemudian dilakukan addendum lagi, hak mitra co menjadi 54% tanpa dipotong biaya administrasi untuk penerbitan SP yang realisasi kreditnya mulai tanggal 01 Januari 2014.

Premi reasuransi merupakan premi yang dibayarkan guna mengalihkan risiko klaim ke mitrea reasuransi. Besaran premi reasuransi yang menjadi hak mitra reasuransi ditentukan berdasarkan jenis produk penjaminan.

22. GUARANTEE FEE (Continued)

Guarantee Fee (IJP) is the premium received by the company of in order to secure underwriting business. The magnitude of the ratecalculated IJP, the credit limit and credit period.

For existing loans, the tarif determined by considering the IJP include: productassurance, risk and term assurance guaranteed. IJP credit generally paid well in advance.

Rates IJP People's Business Credit (KUR) Regulation of the Minister of Finance Number 135/PMK.05/2008 dated September 24, 2008 on the People's BusinessCredit Guarantee facility and the Ministry of Finance No.189/PMK.05/2010 dated November 2, 2010. IJP KUR per year paid by the government by billing period in May and November.

IJP Citizen Business Loan Guarantee has to take into account the sharing IJP andAskrindo with the proportion of 56% and 44% for Jamkrindo Askrindo according tocooperation agreement No. 95/Jamkrindo/XII/2011 dated December 1, 2010 on a credit guarantee / Citizen Business Loan Guarantee (KUR), which is an addendum to the agreement No. 51/Jamkrindo/XII/2011 dated December 29, 2011 on the joint Citizen Business Loan Guarantee (KUR). IJP sharing with Askrindo excluding KUR pattern syariah assurance.

Reinsurance commission income is earned commission from reinsurance partner with a certain percentage of the amount of the premium paid to reinsurance partners.

Guarantee Co-premiums are premiums charged to secure the participation of credit life insurance / financing to be paid to the partners through the receiver Guarantee Insurance Co. (bank / non bank).

The amount of premium Co. Guarantee which are allocated Guarantee Co. s / d January 31, 2013 was 60% and from 01 February 2013 amounted to 54% of the Return Guarantee Services specified in the Certificate of Assurance (SP) which includes all administrative costs and other expenses associated with the Special Agreement or that is synchronized with it. With the addendum PKS co partners in May 2013, the rights of partners to 38% without co cut administrative costs for the issuance of credit unions that realization began on May 1, 2013. Then do the addendum, the right to 54% co partners without cut administrative costs for the issuance of credit unions that realization began on January 1, 2014.

Reinsurance premium is the premium paid for risk transfer reinsurance claims to mitrea. The amount of reinsurance premiums are allocated is determined by the type of products reinsurance underwriting.

23. BEBAN KLAIM / *23. CLAIM EXPENSE*

	2014	2013	
Beban Klaim Kredit Eksisting	157.525.048.530	172.996.971.139	*Claim Expense - Exsisting Credit*
Beban Klaim Kredit Usaha Rakyat	914.386.720.517	725.585.032.638	*KUR's Claim Expenses*
Jumlah Beban Klaim	**1.071.911.769.047**	**898.582.003.777**	***Total Claim Expenses***
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim Kredit Eksisting	(10.265.135.859)	(6.538.373.934)	*Increase (decrease) in Claims Reserve- Existing Credit*
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim Kredit Usaha Rakyat	(40.589.008.482)	46.079.874.405	*Increase (decrease) in Claims Reserve- KUR*
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	**(50.854.144.341)**	**39.541.500.471**	***Total Claim Reserves***
Kerugian Penurunan Nilai Piutang Co Guarantee	-	8.563.736.757	*Impairment Losses- Co Guarantee's receivable*
Provisi Kerugian Klaim Co Guarantee	-	16.705.639.084	*Provision for Claim Losses Co Guarantee*
Total Beban Klaim	**1.021.057.624.706**	**963.392.880.089**	***Total Claim Expenses***

Beban klaim adalah beban yang timbul sebagai akibat macetnya kredit akibat risiko yang ditanggung Perusahaan. Jumlah klaim yang dapat dibayarkan oleh Perusahaan kepada Penerima Jaminan terdiri dari hutang pokok, hutang bunga dan denda yang tidak dapat dipenuhi oleh Terjamin pada saat kredit jatuh tempo dan kredit tidak dapat diperpanjang lagi atau sebelum kredit jatuh tempo sesuai kesepakatan yang ada.

Expense claims are expenses incurred as a result of the breakdown of credit due to the risks covered by the Company. The number of claims that can be paid by the Company to the Recipient Assurance of debt principal, accrued interest and penalties that can not be met by the Guarantee at the time of loan maturity and the credit can not be extended again or before the due credit according to existing agreements

Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim merupakan selisih Cadangan Klaim tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

Increase (Decrease) Claim Reserves Claim reserves represent the difference of the current year with previous year.

24. PENDAPATAN INVESTASI / *24. INVESTMENT INCOME*

	2014	2013	
Bunga Deposito	372.505.116.910	245.948.549.664	*Interest Income*
Bunga Obligasi	95.021.417.453	73.207.255.723	*Time Deposit*
Pendapatan Reksadana	47.684.414.146	16.223.201.393	*Mutual Fund Income*
Capital Gain Saham	17.025.782.495	12.698.678.976	*Capital Gain Bonds*
Dividen	2.896.823.648	2.512.527.512	*Dividend*
Lain-Lain	45.972	389.839.980	*Others*
Jumlah Pendapatan Investasi	**535.133.600.624**	**350.980.053.248**	***Jumlah Investment Fee***
Beban Pajak	(434.523.537)	(376.879.128)	*Tax Expense*
Beban Investasi	(3.335.521.640)	(2.928.903.192)	*Investment Expense*
Jumlah Beban Investasi	**(3.770.045.177)**	**(3.305.782.320)**	***Total Investment Expense***
Total Pendapatan Investasi	**531.363.555.447**	**347.674.270.928**	***Investment Fee - Net***

25. BEBAN USAHA / *25. OPERATING EXPENSES*

Beban usaha periode 1 Januari s/d 31 Desember 2014 dan 1 Januari s/d 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp332.538.636.593 dan Rp260.838.252.388 dengan rincian sebagai berikut:

Operating Expenses for the period January 1 until December 31, 2014 and January 1, until December 31, 2013 are amounted to to Rp332.538.636.593 and Rp260.838.252.388 with the the details are as follow:

	2014	2013	
Beban Operasional	70.562.048.384	44.912.056.035	*Operating Expenses*
Beban SDM	168.091.609.431	115.761.687.179	*Human Resources Expenses*
Beban Adm. Kantor & Umum	70.196.530.879	64.212.211.219	*General and Administrative Expenses*
Beban Sistem, Teknologi, & Pengembangan Usaha	19.573.686.082	4.714.770.785	*Technology, System, & Development Expense*
Total Beban Usaha	**328.423.874.776**	**229.600.725.218**	***Total Operating Expenses***

Rincian total Beban Operasi adalah : / ***Detail of Operating Expenses are as follows:***

	2014	2013	
Fee Based Income	5.376.114.312	4.668.600.023	*Fee Based Income*
Fee Agen	11.113.597.106	3.485.849.403	*Fee Agent*
Beban Pencegahan Klaim	5.677.525	937.683.469	*Claim Prevention Expense*
Beban Perjalanan Dinas	16.558.561.167	13.132.206.813	*Business Travel Expenses*
Beban Pemeliharaan Kendaraan	-	-	*Vehicle Meintenance Expenses*
Beban Promosi	12.195.510.292	6.997.716.135	*Promotional Expenses*
Beban Penagihan Subrogasi	906.801.752	746.940.975	*Subrogation Collection Expenses*
Beban Pengendalian Kredit	-	-	*Controlling Credit Expense*
Beban Pengembalian IJP	-	-	*Refund IJP Expenses*
Beban Hubungan Kelembagaan & Pemasaran	6.636.684.899	4.209.323.935	*Institutional Relation & Marketing Expenses*
Beban Sosialisasi & Rekonsiliasi	1.491.358.031	1.585.072.682	*Socialization & Reconciliation Expenses*
Beban Sewa	13.141.611.651	5.735.986.265	*Rent Expenses*
Beban Eksploitasi	3.136.131.649	3.412.676.335	*Exploitation Expenses*
Total Beban Operasi	**70.562.048.384**	**44.912.056.035**	***Total Operating Expenses***

Rincian total Beban SDM adalah : / ***Detail of Human Resources Expenses are as follows:***

	2014	2013	
Gaji	20.638.420.171	17.443.031.247	*Sallaries*
Tunjangan Jabatan	8.190.536.466	5.042.986.952	*Officer Subsidy*
Lembur	1.124.538.836	975.348.103	*Overtime*
Tunjangan Kesehatan	4.646.150	4.878.035	*Healthcare*
Asuransi Kesehatan	2.647.190.116	2.758.544.309	*Healthcare Insurance*
Pakaian Kerja	1.084.948.200	543.140.490	*Uniform*
Kesejahteraan	21.141.077.714	7.042.752.924	*Wealthfare*
Cuti	2.509.085.920	2.541.190.540	*Leave*
Konsumsi	3.479.559.596	2.326.910.000	*Meal*
Tunjangan Hari Raya	8.236.796.149	6.322.625.923	*Special Day Subsidy*
Tunjangan Transport	4.001.092.465	4.779.081.000	*Transportation Subsidy*
Tunjangan Perumahan	639.700.000	-	*Housing Subsidy*
Tunjangan Kemahalan	128.525.000	209.595.968	*Expensiveness Subsidy*
Premi Asuransi Pensiun	7.057.709.980	6.182.506.750	*Pension Insurance Premiums*
Iuran Jamsostek	650.277.503	530.779.147	*Social Security Premium*
PPh. Pasal 21	14.888.993.520	10.855.863.275	*Income Tax Subsidy (art. 21)*
Tantiem	17.800.356.340	7.500.000.000	*Tantiem*
Insentif	3.278.371.999	1.709.432.795	*Incentive*
Jasa Produksi	33.484.812.633	24.676.864.317	*Production Services*
Tunjangan Komunikasi	529.991.769	320.750.000	*Communication*
Tunjangan Perusahaan	5.132.165.000	9.543.443.429	*Company Benefits*
Tunjangan Wilayah	2.934.152.973	-	*Area Benefits*
Pendidikan dan Pelatihan	8.508.660.931	4.451.961.975	*Education and Training*
Total Beban SDM	**168.091.609.431**	**115.761.687.179**	***Total human resource expenses***

25. BEBAN USAHA (Lanjutan)

Fee Based Income adalah fee yang dibayarkan oleh perusahaan ke bank/ non bank atas transaksi penjaminan kredit yang menjadi beban perusahaan. Besaran Fee Based Income yang diberikan berkisar antara 5% sampai dengan 10% dari nominal IJP yang diterima perusahaan sesuai persetujuan yang tertuang di dalam SP3/PKS/PK antara perusahaan dengan bank/ non bank. Fee Based Income dibebankan selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya Sertifikat Penjaminan (SP).

Fee Agen merupakan komisi yang diberikan kepada agen sebesar 15% dari jumlah IJP, dan fee agen dibebankan selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya Sertifikat Penjaminan (SP).

25. OPERATING EXPENSES (Continued)

Based Income Fee is the fee paid by the company to the bank / non-bank credit guarantee for the transaction to be borne by the company. The amount of the fee based income in the range of 5% to 10% of the nominal IJP received appropriate corporate approvals contained in SP3/PKS/PK between companies and banks / non-banks. Based Income Fee charged for the guarantee period and allocated by the rising moon Assurance Certificate (SP).

Agent fee is the commission given to agents by 15% of the IJP, and agent fees charged during the guarantee period and allocated by the rising moon Assurance Certificate (SP).

Rincian total beban Administrasi Kantor dan Umum adalah :

Detail of Office Administrative and General Expenses are as follows:

	2014	2013	
Beban Pencetakan	2.915.786.742	2.953.477.853	*Printing Expenses*
Beban ATK	3.064.284.789	2.105.659.120	*Suplies Expenses*
Beban Bank	462.334.399	383.871.713	*Bank Expenses*
Beban Konsultasi	61.108.221	3.680.677.008	*Consultant Expenses*
Beban Pajak-Pajak	492.997.084	381.625.427	*Tax Expenses*
Beban Pemeliharaan Kendaraan	6.255.151.075	4.340.922.031	*Vehicle Meintenance Expenses*
Beban Komunikasi dan Energi	8.798.266.358	7.225.166.600	*Communication and Enrgy Expenses*
Beban Pemeliharaan Aset Tetap	14.649.371.010	9.060.010.413	*Vehicle Meintenance Expenses*
Beban Perijinan	60.468.896	324.185.669	*Registration Expenses*
Beban Rapat Kerja	4.149.443.724	3.420.250.964	*Business Meeting Expenses*
Beban Pemeriksaan	513.265.710	432.353.909	*Audit Expenses*
Beban PKBL	11.727.114.495	17.235.282.987	*PKBL Expense*
Beban Lain-lain	8.440.259.083	5.663.131.224	*Other Expenses*
Beban Asosiasi, Iuran OJK, Forkom	106.061.000	826.890.976	*Association Expenses*
Beban Representasi	3.485.142.755	1.982.578.786	*Representation Expenses*
Beban Penyusutan Aset Tetap	5.015.475.538	4.196.126.539	*Fixed Asset Depreciation Expenses*
Total Beban Administrasi & Umum	**70.196.530.879**	**64.212.211.219**	***Total Administrative and General***

Rincian total beban Sistem, Teknologi, & Pengembangan Usaha adalah :

Detail of Technology, System, & Development Expenses are as follows:

	2014	2013	
Beban Pengembangan Usaha	14.840.221.316	2.004.838.785	*Development Expenses*
Beban Sistem dan Teknologi	4.733.464.766	2.709.932.000	*Technology and System Expenses*
Total Beban Sistem, Teknologi, & Pengembangan Usaha	**19.573.686.082**	**4.714.770.785**	***Total Technology, System, & Development Expense***

26. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN

Pendapatan lain-lain bersih merupakan pendapatan diluar usaha setelah dikurangi beban diluar usaha, dengan rincian sebagai berikut:

26. OTHER INCOME AND EXPENSE

Other income is net income after deducting expenses out of business outside the business, the details are as follows:

	2014	2013	
Pendapatan			*Other Income*
Pendapatan Subrogasi	205.827.465.859	126.949.809.855	*Subrogation Income*
Pendapatan Jasa Giro	5.125.098.350	2.873.678.345	*Interest Income*
Pendapatan Jasa Administrasi Penjaminan	517.875.596	23.201.999	*Administration Guarantee Income*
Pendapatan Bagi Hasil	4.560.000	23.041.828	*Profit Sharing Income*
Pendapatan Administrasi BUM	244.380.912	54.587.810	*BUM Administration Income*
Pendapatan Sewa	1.266.570.187	3.249.463.338	*Rental Income*
Pendapatan Lainnya	12.531.341.276	31.924.038.993	*Others*
	225.517.292.180	**165.097.822.168**	
Beban			*Other Expenses*
Beban Komunikasi dan Energi Gedung	(1.238.204.885)	(1.073.601.999)	*Communication and Energy Building Expense*
Beban Pemeliharaan Gedung	(1.655.113.596)	(1.408.191.515)	*Buildings Maintenance Expenses*
Beban CKPN Penyisihan Piutang	(7.718.636)	30.543.140	*Impairment Losses Expense Receivables*
Beban CKPN Piutang Kepada Koperasi Pegawai	(124.720.508)	-	*Impairment Losses Expense Receivables to Employee Cooperative*
Beban Lain-lain	-	-	*Others*
Total Beban Lain-Lain Bersih	**(3.025.757.625)**	**(2.451.250.374)**	*Total Other Expense*
Total Pendapatan Lain-Lain Bersih	**222.491.534.555**	**162.646.571.794**	***Total Other Income - Net***

27. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN / *27. FINANCIAL ASSET AND LIABILITY*

ASET/LIABILITAS KEUANGAN *FINANCIAL ASSET/LIABILITY*	DIMILIKI HINGGA JATUH TEMPO *HELD TO MATURITY*	PIUTANG *RECEIVABLE*	TERSEDIA UNTUK DIJUAL *AVAILABLE FOR SALE*	NILAI WAJAR *FAIR VALUE*
Deposito / *Deposit*	360.615.000.000			360.615.000.000
Obligasi / *Obligee*	537.320.933.889		788.350.400.000	1.325.671.333.889
Reksadana / *Mutual Fund*	414.400.000.000		484.227.879.445	898.627.879.445
Efek Beragun Aset (EBA) / *Asset-Backed Securities*	25.000.000.000			25.000.000.000
Saham / *Share*			90.149.395.500	90.149.395.500
Piutang Penjaminan Ulang / *Reassurance Receivable*		69.936.879.275		69.936.879.275
Piutang Lain-lain / *Other Payables*		132.731.655.583		132.731.655.583
Hutang Klaim / *Claim Payable*	10.197.458.677			10.197.458.677
Hutang Co Guarantee / *Co Guarantee Payable*	35.821.598.160			35.821.598.160

28. PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) / *28. GUARANTING ON CITIZEN BUSINESS LOAN (KUR)*

Tahun 2008, berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM-K, Perusahaan melaksanakan penjaminan terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untuk merealisasikan program KUR tersebut, Pemerintah telah menambah modal Perusahaan sebesar Rp600 milyar tahun 2007, Rp250 milyar tahun 2009, Rp900 milyar tahun 2010, Rp1,2 trilyun tahun 2011 dan Rp1,169 milyar tahun 2012. Imbal Jasa Penjaminan (IJP)/Imbal Jasa Kafalah (IJK) atas KUR tersebut ditanggung oleh pemerintah dan dibayar per tahun. Untuk Sertifikat Penjaminan (SP) yang terbit sebelum 14 Februari 2010 dicatat sebesar Rp 1,5% x 70% dari plafon kredit sedangkan untuk Sertifikat Penjaminan (SP) setelah 14 Februari 2010 dicatat dengan menggunakan tarif 3,25% dengan coverage 70%-80%. Segmentasi operasional penjaminan KUR sebagai berikut:

In 2008, based on President Instruction No. 6 year 2007 dated Juni 8, 2007 concerning Real Sector Acceleration and Strenghtening of UMKM-K Policy, Company provide guarantee to citizen business loan (KUR). To realize the program, in the end of 2009 and 2007 Govermnet have make addition of company capital amounted to Rp600 billion, Rp250 billion in 2009, Rp900 billion in 2010, Rp1,2 trillion in 2011 and Rp1,169 billion in 2012. Guarantee Fee/Kafalah Fee of KUR is borne by the government and paid per year, for the Certificate of Guarantee (SP), which appeared prior to February 14, 2010 recorded at Rp 1.5% x 70% of the credit limit while for Certificate of Assurance (SP) after February 14, 2010 recorded a marginal 3.25% to 70% -80% coverage. Segmentation KUR underwriting operations as follows:

a. Laporan Posisi Dana / *a. Fund Position Report*

	2014	2013	
Giro	32.396.165.036	26.935.655.116	*Current Accounts*
Deposito	4.546.081.959.879	3.764.392.959.879	*Time Deposit*
Obligasi	1.325.671.333.889	1.007.303.597.300	*Bonds*
Saham	90.149.395.500	127.420.062.500	Shares
Reksa dana	898.627.879.445	222.038.742.530	*Mutual Fund*
Efek Beragun Aset (EBA)	25.000.000.000	-	
Sub Jumlah	**6.917.926.733.749**	**5.148.091.017.325**	***Sub Total***
Keuntungan (Kerugian) Belum Direalisir Atas Efek Tersedia Untuk Dijual	(11.219.183.476)	(71.744.405.302)	*Unralized Gain (Loss) of Marketable Securities - Avalaible for Sale*
Jumlah	**6.929.145.917.225**	**5.219.835.422.627**	***Total***

28. PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) (Lanjutan)

28. GUARANTING ON CITIZEN BUSINESS LOAN (KUR) (Continued)

b. Laporan Laba Rugi

b. *Income Statement*

2014	KORPORAT	KUR	2014
PENDAPATAN OPERASIONAL			***Operating Revenue***
Imbal Jasa Penjaminan Bruto	1.686.271.021.628	1.187.293.855.028	*Gross Guarantee Fee*
Pendapatan Komisi Re Asuransi	5.509.491.735	-	*Re Insurance Comission Fee*
Premi Co Guarantee	(220.685.464.885)	-	*Co Guarantee Premium*
Premi Re Asuransi	(24.181.507.239)	-	*Re Insurance Premium*
Restitusi IJP	(4.343.792.787)	-	*Guarantee Restitution*
Imbal Jasa Penjaminan Bersih	**1.442.569.748.452**	**1.187.293.855.028**	***Net Guarante Revenues***
BEBAN KLAIM			***CLAIM EXPENSES***
Beban Klaim	(1.071.911.769.047)	(914.163.088.939)	*Claim Expenses*
Kenaikan (penurunan) Cadangan Klaim	50.854.144.341	40.589.008.482	*Increase (Decrease) in Reserve Claim*
Kerugian Penurunan Nilai Piutang	-	-	*Impairment Losses on Co Guarantee Receivable*
Provisi Kerugian Klaim	-	-	*Provision for Claim Losses Co Guarantee*
Jumlah Beban Klaim	**(1.021.057.624.706)**	**(873.574.080.457)**	***Total Claim Expenses***
PENJAMINAN BERSIH	**421.512.123.746**	**313.719.774.571**	***GUARANTEE FEE NET***
Pendapatan Investasi Bersih	531.363.555.447	462.963.403.306	*Investment Income- Net*
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	222.491.534.555	154.070.769.313	*Other Income (Expenses)*
BEBAN USAHA			***OPERATING EXPENSES***
Beban Operasional	(70.562.048.384)	(41.331.004.439)	*Operating Expenses*
Beban Sumber Daya Manusia	(168.091.609.431)	(117.350.857.556)	*Human Resoursce Expenses*
Beban Administrasi dan Umum	(70.196.530.879)	(44.544.090.801)	*General and Administrative Expenses*
Beban Sistem, Teknologi, & Pengembangan Usaha	(19.573.686.082)	(14.307.596.466)	*Technology, System, & Development Expenses*
Jumlah Beban Usaha	**(328.423.874.776)**	**(217.533.549.262)**	***Total Operating Expenses***
LABA SEBELUM PAJAK	**846.943.338.972**	**713.220.397.928**	***INCOME BEFORE TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			***INCOME TAX EXPENSE***
Beban Pajak Kini	160.695.448.207	135.281.266.234	*Current Income Tax*
Manfaat Pajak Tangguhan	22.108.922.679	18.618.169.487	*Deferred Tax Benefit*
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	**182.804.370.886**	**153.899.435.721**	***Total Income Tax Expense***
LABA TAHUN BERJALAN	**664.138.968.086**	**559.320.962.207**	*Total Tax Expenses*
Pendapatan Komprehensif	60.525.221.825	60.525.221.825	*Comprehensive Income*
LABA KOMPREHENSIF	**724.664.189.911**	**619.846.184.032**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME***

2013	KORPORAT	KUR	2013
PENDAPATAN OPERASIONAL			***Operating Revenue***
Imbal Jasa Penjaminan Bruto	1.600.961.372.287	1.058.217.291.025	*Gross Guarantee Fee*
Pendapatan Komisi Re Asuransi	844.526.272	-	*Re Insurance Comission Fee*
Premi Co Guarantee	(253.402.175.909)	-	*Co Guarantee Premium*
Premi Re Asuransi	(4.204.367.559)	-	*Re Insurance Premium*
Restitusi IJP	(4.560.059.814)	-	*Guarantee Restitution*
Imbal Jasa Penjaminan Bersih	**1.339.639.295.277**	**1.058.217.291.025**	***Net Guarante Revenues***
BEBAN KLAIM			***CLAIM EXPENSES***
Beban Klaim	(898.582.003.777)	(725.585.032.637)	*Claim Expenses*
Kenaikan (penurunan) Cadangan Klaim	(39.541.500.471)	(46.079.874.406)	*Increase (Decrease) in Reserve Claim*
Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(8.563.736.757)	-	*Impairment Losses on Co Guarantee Receivable*
Provisi Kerugian Klaim	(16.705.639.084)	-	*Provision for Claim Losses Co Guarantee*
Jumlah Beban Klaim	**(963.392.880.089)**	**(771.664.907.043)**	***Total Claim Expenses***
PENJAMINAN BERSIH	**376.246.415.188**	**286.552.383.982**	***GUARANTEE FEE NET***
Pendapatan Investasi Bersih	347.674.270.928	290.296.153.119	*Investment Income- Net*
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	162.646.571.794	104.261.519.129	*Other Income (Expenses)*
BEBAN USAHA			***OPERATING EXPENSES***
Beban Operasional	(44.912.056.035)	(23.152.211.569)	*Operating Expenses*
Beban Sumber Daya Manusia	(115.761.687.179)	(81.747.036.009)	*Human Resoursce Expenses*
Beban Administrasi dan Umum	(64.212.211.219)	(40.362.846.299)	*General and Administrative Expenses*
Beban Sistem, Teknologi, & Pengembangan Usaha	(4.714.770.785)	(1.926.388.908)	*Technology, System, & Development Expenses*
Jumlah Beban Usaha	**(229.600.725.218)**	**(147.188.482.785)**	***Total Operating Expenses***
LABA SEBELUM PAJAK	**656.966.532.692**	**533.921.573.445**	***INCOME BEFORE TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			***INCOME TAX EXPENSE***
Beban Pajak Kini	144.831.117.735	118.197.973.890	*Current Income Tax*
Manfaat Pajak Tangguhan	(13.073.645.381)	(10.612.472.323)	*Deferred Tax Benefit*
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	**131.757.472.354**	**107.585.501.567**	***Total Income Tax Expense***
LABA TAHUN BERJALAN	**525.209.060.338**	**426.336.071.878**	*Total Tax Expenses*
Pendapatan Komprehensif	(80.069.355.927)	(80.069.355.927)	*Comprehensive Income*
LABA KOMPREHENSIF	**445.139.704.411**	**346.266.715.951**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME***

29. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, dimana manajemen berpendapat transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga, yang meliputi:

29. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the company conducts certain transactions with parties relate, which management believes relate to dealings conducted by the same terms and conditions with third parties, which include:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan / *Nature of Relationship*	Sifat dari Transaksi / *Nature from The Transaction*	Pihak Berelasi
BPD DKI	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD DKI*
BPD Jabar Banten	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD Jabar Banten*
BPD Jateng	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD Jateng*
BPD Jatim	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD Jatim*
BPD Bali	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD Bali*
BPD NTB	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD NTB*
BPD NTT	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD NTT*
BPD Sumsel	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD Sumsel*
BPD Lampung	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD Lampung*
BPD Aceh	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD Aceh*
BPD Riau	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD Riau*
BPD Sumbar (Nagari)	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD Sumbar (Nagari)*
BPD Jambi	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD Jambi*
BPD Kalbar	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD Kalbar*
BPD Kalteng	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD Kalteng*
BPD Kalsel	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD Kalsel*
BPD Kaltim	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD Kaltim*
BPD Sulsel	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD Sulsel*
BPD Sulut	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD Sulut*
BPD Sulteng	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD Sulteng*
BPD Sultra	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD Sultra*
BPD Maluku	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD Maluku*
BPD Papua	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD Papua*
Bank Rakyat Indonesia	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Mandiri	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*Bank Mandiri*
Bank Negara Indonesia	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*Bank Negara Indonesia*
Bank Tabungan Negara	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*Bank Tabungan Negara*
Bank Bukopin	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*Bank Bukopin*
BPD Syariah Jabar Banten	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD Syariah Jabar Banten*
BPD Syariah Jateng	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD Syariah Jateng*
BPD Syariah DIY	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD Syariah DIY*
BPD Syariah Jatim	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD Syariah Jatim*
BPD Syariah Sumsel	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD Syariah Sumsel*
BPD Syariah Aceh	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD Syariah Aceh*
BPD Syariah Riau	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD Syariah Riau*

29. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

29. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continous)

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan / *Nature of Relationship*	Sifat dari Transaksi / *Nature from The Transaction*	Pihak Berelasi
BPD Syariah Kalbar	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD Syariah Kalbar*
BPD Syariah Kalsel	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD Syariah Kalsel*
BPD Syariah Kaltim	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD Syariah Kaltim*
BPD Syariah Sulsel	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*BPD Syariah Sulsel*
Bank Rakyat Indonesia Syariah	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Syariah Mandiri	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*Bank Syariah Mandiri*
Bank Negara Indonesia Syariah	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*Bank Negara Indonesia Syariah*
Bank Tabungan Negara Syariah	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*Bank Tabungan Negara Syariah*
Bank Bukopin Syariah	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities	*Bank Bukopin Syariah*
Menteri Keuangan	Pemegang Saham	Piutang IJP KUR, pendapatan IJP KUR	*Finance Minister*
Dewan Pengawas dan Direksi	Manajemen Kunci Perusahaan	Gaji dan Tunjangan Dewas	*Supervisory Council Members*

30. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 50 DAN 55 (REVISI 2006)

PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan", berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan pengidentifikasian informasi yang harus diungkapkan. Persyaratan penyajian tersebut diterapkan terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif penerbit, dalam aset keuangan kewajiban keuangan dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan; dan keadaan dimana aset keuangan dan kewajiban keuangan saling hapus. Persyaratan ini mensyaratkan pengungkapan, antara lain, informasi mengenai faktor yang mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas masa datang yang terkait dengan instrumen keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk instrumen tersebut. PSAK No. 50 (Revisi 2006) ini menggantikan PSAK No. 50 "Akuntansi Investasi Efek Tertentu" dan diterapkan prospektif untuk laporan keuangan.

PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran", mengatur prinsip-¬prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan dan kontrak pembelian dan penjualan item non keuangan. Pernyataan ini, antara lain, memberikan definisi dan karakteristik terhadap derivatif, kategori dari instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan dari hubungan lindung nilai. PSAK No. 55 (Revisi 2006) ini menggantikan PSAK No. 55 "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Akuntansi Lindung Nilai", dan diterapkan prospektif untuk laporan keuangan.

Ikatan Akuntan Indonesia melalui surat No. 1705/DSAK/IAI/XII/2008, tanggal 30 Desember 2008, mengumumkan perubahan tanggal efektif PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), dari semula tanggal 1 Januari 2009 menjadi 1· Januari 2010. Penerapan lebih dini diperkenankan dan harus diungkapkan.

30. APPLICATION OF ACCOUNTING STANDARDS NO. 50 AND 55 (REVISED 2006)

PSAK No. 50 (Revised 2006), "Financial Instruments: Presentation and Disclosure", contains the requirements for the presentation of financial instruments and identifies the information that must be disclosed. The presentation requirements apply to the classification of financial instruments, from the perspective of the issuer, into financial assets of financial liabilities and equity instruments; the classification of related interest, dividends, losses and gains; and the circumstances in which financial assets and financial liabilities offset. This requires the disclosure requirements, among other things, information about factors that affect the amount, timing and certainty of future cash flows associated with financial instruments and the accounting policies applied to the instrument. PSAK No. 50 (Revised 2006) supersedes PSAK. 50 "Accounting for Certain Securities Investments" and is applied prospectively for financial statements.

PSAK No. 55 (Revised 2006), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", establishes guiding principles ¬ recognizing and measuring financial assets, financial liabilities and contracts of purchase and sale of non-financial items. This statement, among others, provide the definition and characteristics of a derivative, the categories of financial instruments, recognition and measurement, hedge accounting and determination of hedging relationships. PSAK No. 55 (Revised 2006) supersedes PSAK. 55 "Accounting for Derivative Instruments and Hedging Accounting", and is applied prospectively for financial statements.

Accountants Association of Indonesia through letter No.. 1705/DSAK/IAI/XII/2008, dated December 30, 2008, announced the change of the effective date of PSAK No.. 50 (Revised 2006) and PSAK No. 55 (Revised 2006), from the original date of January 1, 2009 to January 1, 2010. Earlier application is permitted and must be disclosed.

31. REKENING ADMINISTRATIF

31. ADMINISTRATIVE ACCOUNT

Piutang Subrogasi

Piutang subrogasi merupakan tagihan kepada instansi/nasabah yang tidak dapat membayar kredit dan sudah dibayarkan klaimnya kepada bank oleh Perum Jamkrindo.

Subrogation Receivables

Subrogation receivables are receivables from agencies / clients who can not pay the loan and has paid claims to the bank by Perum Jamkrindo.

	2014	2013	
Saldo Awal Tahun	2.233.821.481.737	1.466.093.802.650	*Beginning Balance of The Year*
Pembayaran Klaim Tahun Berjalan	1.071.911.769.047	894.677.488.942	*Claims Payments Current Year*
Pendapatan Subrogasi Tahun Berjalan	(205.827.465.859)	(126.949.809.855)	*Subrogation Revenue Current Year*
Penyesuaian Saldo Awal		-	*Beginning Balance Adjustment*
Saldo Akhir Tahun	**3.099.905.784.926**	**2.233.821.481.737**	***Ending Balance of The Year***

32. MANAJEMEN RISIKO

Beberapa risiko yang relatif signifikan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Risiko Penjaminan Kredit

Risiko Penjaminan Kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajibannya. Risiko tersebut dapat dilihat pada besarnya default risk dan tingkat NPL kredit yang dijamin, serta tingkat pengembalian piutang subrogasi.

Pada tahun 2014, beberapa indikator risiko penjaminan kredit cenderung mengalami kenaikan. Default Rate mengalami peningkatan 37,62% dari tahun 2013, Tingkat NPL meningkat 34,54% dari tahun 2013, Recovery Rate Piutang Subrogasi meningkat menjadi sebesar -8,16% dari tahun 2013. Namun demikian, terdapat satu indikator yaitu tingkat pencapaian pengembalian piutang subrogasi yang mengalami penurunan sebesar 51,36% dari tahun 2013.

32. RISK MANAGEMENT

Some significant relative risks in 2014 are as follows:

1. Risk Credit Guarantee

Credit Guarantee Risk is the risk arising from the failure to fulfill obligations guaranteed. Risk can be seen in the amount of default risk and a guaranteed level of NPL, and returns subrogation receivables.

In 2014, the entire credit guarantee risk indicators increased. Default Rate 37.62% increase from 2013, the NPL rate increased to 34.54% from the year 2013, the level of achievement of return subrogation receivables increased -8.16% from 2013. However, there is one indicator that the achievement level of receivables subrogation recovery rate has decreased 51.36% from 2013.

Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	Pertumbuhan / *Growth*	*Description*
Default risk = (Biaya Klaim)/(Volume Penjaminan)	898.582.003.777 / 46.996.238.461.142 = 1,91%	1.071.911.769.047 / 40.737.617.898.609 = 2,63%	37,62%	*Default risk = (Cost of Claim)/ (Guarantee Volume)*
NPL = (Outstanding Kredit Kol 3+4+5)/(Total Outstanding Kredit)	161.907.452.709 / 97.685.466.719.275 = 0,17%	201.226.082.067 / 90.239.385.918.452 = 0,22%	34,54%	*NPL = (Outstanding Credit Col. 3+4+5)/(Total Outstanding Credit)*
Tingkat Pencapaian Pengembalian Subrogasi = (Realisasi Angsuran Subrogasi)/(Target Angsuran Subrogasi)	126.949.809.855 / 150.645.785.217 = 84,27%	205.645.782.859 / 161.230.209.580 = 127,55%	51,36%	*Return on Subrogation Achievement = (Realization of Subrogation Installment)/(Target of Subrogation Installment)*
Recovery Rate Piutang Subrogasi = (Angsuran Piutang Subrogasi)/(Saldo Piutang Subrogasi)	126.949.809.855 / 2.233.821.481.737 = 5,68%	205.455.471.575 / 3.936.379.708.403 = 5,22%	-8,16%	*Recovery Rate of Subrogation Receivables = (Subrogation Receivables Installment)/(Total Subrogation Receivables)*

Untuk meminimalkan risiko penjaminan, maka pada pada proses penjaminan kredit dilakukan identifikasi risiko menggunakan 4P, yaitu *Prospect*, *Productivity*, *Payment*, dan *Personality*. Item yang harus diperhatikan untuk masing-masing aspek tersebut disesuaikan dengan karakteristik kredit yang akan dijamin, dan dijabarkan di dalam sistem dan prosedur penjaminan yang terkait.

To minimize the risk of underwriting, then on the loan guarantee process to identify risks using the 4Ps, namely Prospect, Productivity, Payment, and Personality. Items that must be considered for each of these aspects are adapted to the characteristics of credit to be secured, and elaborated on in the system and the associated assurance procedures.

Hasil dari proses identifikasi risiko kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan prediksi risiko penjaminan untuk mengetahui besarnya risiko penjaminan. Dalam pelaksanaannya prediksi risiko dapat dilakukan secara kualitatif dan / atau kuantitatif untuk setiap aspek 4P. Prediksi secara kuantitatif dilakukan dengan sistem scoring. Berdasarkan score ditetapkan prediksi risiko penjaminan masing-masing Terjamin atau sekelompok Terjamin, atau suatu produk baru.

The results of the risk identification process and then followed up with the establishment of underwriting risk prediction to determine the amount of risk underwriting. In the implementation of risk prediction can be done qualitatively and / or quantitatively to every aspect of the 4P. Quantitative predictions made by the scoring system. Based on established risk prediction score guarantee each Secured Secured or group, or a new product.

Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan apakah suatu pengajuan penjaminan dapat disetujui atau tidak, dilakukan dalam sebuah rapat komite. Sesuai prinsip kehati-hatian, maka anggota komite tersebut terdiri dari pejabat yang terkait secara langsung dengan kegiatan penjaminan (*risk taker unit*) dan pejabat yang terkait langsung dengan konsekuensi biaya atas potensi risiko (*risk financing unit*). Dengan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan dua pihak atau lebih dari sisi yang berlainan tersebut, maka diharapkan keputusan menjadi lebih obyektif dan potensi risiko karena kesalahan pengambilan keputusan dapat diminimalisasi.

Furthermore, for a filing decision whether insurance can be approved or not, is done in a committee meeting. As per the precautionary principle, the members of the committee consists of officials directly related to underwriting activities (risk taker unit) and officials directly related to the potential cost consequences of risk (risk financing unit). With decision-making mechanism that involves two or more parties from different sides, then the decision is expected to be more objective and potential risks for decision-making errors can be minimized.

Selain digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan penjaminan, hasil analisis risiko yang telah dilakukan juga dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam melakukan pemantauan terhadap kredit yang sedang berjalan. Untuk kredit yang berisiko tinggi, maka pemantauan terhadap kredit dilakukan secara lebih intensif.

Besides being used to aid the decision making process assurance, risk analysis has been done is also used as one of the basic considerations in monitoring the ongoing credit. For credit risk, then the credit monitoring more intensively.

Pada tahun 2014, di samping upaya mitigasi tersebut, perusahaan juga melakukan beberapa mitigasi risiko lainnya yaitu:

- Melakukan pembaharuan perjanjian kerjasama dengan menambahkan klausula yang dapat digunakan untuk meminimalkan risiko.
- Melakukan penyebaran risiko dengan menambah mitra kerja baru dan menambah produk yang dikerjasamakan dengan mitra kerja.
- Menambah produk yang dipasarkan oleh Perusahaan.

In 2014, in addition to mitigation efforts, the company is also doing some other risk mitigation measures are:

- *Reform agreement by adding a clause that can be used to minimize the risk.*
- *Doing spread risk by adding new partners and adding products in cooperation with partners.*
- *Adding products marketed by the Company.*

32. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

1. Risiko Penjaminan Kredit (Lanjutan)

- Melakukan penjajakan penyebaran risiko dengan bekerjasama dengan perusahaan reasuransi
- Memanfaatkan jasa agen yang dapat membantu menyeleksi calon Terjamin untuk Penjaminan Kredit non KUR.
- Melakukan koordinasi dengan Komite Kebijakan terkait dengan pelaksanaan Program KUR untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul.
- Melakukan pembatasan volume penjaminan untuk produk yang berisiko tinggi.
- Melakukan updating data piutang subrogasi termasuk agunan sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan upaya penagihan piutang subrogasi agar upaya tersebut dapat dilakukan secara efektif.
- Mengoptimalkan penagihan piutang subrogasi.

2. Risiko Co-Guarantee

Co-guarantee adalah kerjasama antara Perum Jamkrindo dengan perusahaan penjaminan lain atau asuransi dalam bentuk pentupan risiko tertentu. Terkait dengan kerjasama tersebut, maka Perum Jamkrindo ter-ekspos oleh risiko co-guarantee. Risiko Co-Guarantee merupakan risiko tidak tertagihnya piutang co-guarantee. Sesuai dengan Per-Dir nomor 15 tanggal 29 Desember 2010 tentang Panduan Manajemen Risiko, risiko co-guarantee digolongkan ke dalam kategori risiko operasional dengan sub kategori risiko *counterpart.*

Salah satu indikasi besaran risiko co-guarantee adalah besarnya piutang co-guarantee dibandingkan dengan rata-rata pengajuan klaim co-guarantee dengan mitra co-guarantee yang terkait. Sesuai dengan Per-Dir no. 14 tanggal 22 Desember 2011, piutang co-guarantee dinyatakan wajar apabila saldo piutang co-guarantee yang belum diselesaikan oleh mitra co-guarantee maksimal 3 (tiga) bulan rata-rata pengajuan penggantian pembayaran klaim periode terakhir.

Pada tahun 2014, co-guarantee dilakukan dengan bekerjasama dengan 5 (lima) perusahaan asuransi, yaitu PT. Heksa Eka Life Insurance (PT. Heksa), PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin (PT. AL Amin), PT Mubarakah, PT Jiwasraya, dan PT CAR. Performance mitra co-guarantee Perum Jamkrindo adalah sebagai berikut:

32. RISK MANAGEMENT (Continued)

1. Risk Credit Guarantee (Continued)

Conducting an assessment the spread risk by working with reinsurences.
Utilizing the services of an agent who can help select candidates for the Guarantee Credit Secured non-KUR
Coordinate with the National Committee relating to the implementation of the KUR program to anticipate problems that may arise.
Restricting the volume of guarantees for high-risk products.
Updating of data, including subrogation receivables collateral as one consideration in making subrogation receivables collection efforts so that these efforts can be carried out effectively.
Optimizing subrogation receivables collection.

2 Co Guarantee Risk

Co-guarantee is a collaboration between the Perum Jamkrindo with other underwriting or insurance company in the form of pentupan certain risks. In connection with the agreement, the Perum Jamkrindo most exposed to the risk of co-guarantee. Co-Guarantee Risk is the risk of uncollectible receivables co-guarantee. In accordance with the Per-Dir number 15 dated December 29, 2010 on Risk Management Guide, co-guarantee risk is classified into categories with sub categories of operational risk counterparty risk.

One indication of the amount of co-guarantee risk is the amount of credit co-guarantee compared with the average claim co-guarantee with partners related to co-guarantee. In accordance with the Per-Dir no. 14 dated December 22, 2011, accounts receivable declared co-guarantee fair if co-guarantee outstanding amounts that have not been resolved by co-partners guarantee a maximum of 3 (three) months of the average filing reimbursement claims of the last period.

In 2014, co-guarantee with the cooperation of five (5) insurance companies is PT. Heksa Eka Life Insurance (PT. Heksa), PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin (PT. AL Amin), PT Mubarakah, PT Jiwasraya, dan PT CAR. Co-partners performance guarantee Perum Jamkrindo are as follows:

Mitra Co Guarantee/ *Co-Guarantee Partner*	Saldo Piutang Co Guarantee/ *Co-Guarantee Receivables* (dalam jutaan/*in million*)	Rata-rata Pengajuan Klaim Co Guarantee per Bulan/ *Average Co-Guarantee Claims per Month* (dalam jutaan/*in million*)	Perbandingan Saldo Piutang terhadap 3 bulan Rata-rata Pengajuan/ *Comparative Balance receivable on average 3 months Submissions (%)*
PT Heksa	10.342.004.996	5.096.635.020	2,00
PT AJS Al-Amin	54.813.577.429	9.312.593.750	3,31
PT Mubarakah	60.884.628.596	407.408.497	0,91
PT Jiwasraya	725.937.696	63.565.910	0,91
PT CAR	98.299.208	48.455.435	0,91

Untuk meminimalkan risiko co-guarantee, perusahaan melakukan mitigasi dengan:

- Melakukan evaluasi kinerja mitra co-guarante untuk meminimalisir risiko.
- Melakukan penyempurnaan perjanjian dengan menambahkan klausula untuk meminimalkan risiko.
- Melakukan rekonsiliasi dan penagihan piutang co-guarantee secara berkala.

To minimize the risk of co-guarantee, the company mitigate the:

- *To evaluate the performance of co-partners to minimize risk guarantee.*
- *Improving the agreement by adding clauses to minimize the risk.*
- *Collection of accounts receivable reconciliation and co-guarantee a regular basis.*

3. Risiko Keuangan

Risiko Keuangan dapat tercermin dari risiko likuiditas suatu perusahaan. Sesuai dengan Per-Dir nomor 15 tanggal 29 Desember 2010 tentang Panduan Manajemen Risiko, Risiko Likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu.

Sesuai dengan PMK No. 99/PMK. 010/2011 rasio likuiditas penjamin ditetapkan paling sedikit 150% (seratus lima puluh per seratus). Rasio Likuiditas dihitung dengan menggunakan current ratio yaitu perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar.

3. Financial Risk

Financial risk can be reflected in a company's liquidity risk. In accordance with the Per-Dir number 15 dated December 29, 2010 on Risk Management Guide, Risk Liquidity risk is the risk that partly because the company is not able to fulfill the obligations that have matured.

No. In accordance with the PMK. 99/PMK. 010/2011 established a guarantor liquidity ratio of at least 150% (one hundred and fifty percent). Liquidity ratio is calculated using the current ratio which is the ratio between current assets with debt.

32. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

3. Risiko Keuangan (Lanjutan)

32. RISK MANAGEMENT (Continued)

3. Financial Risk (Continued)

Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	Pertumbuhan / Growth	Description
Risiko Likuiditas = (aset lancar)/(utang lancar)	7.090.379.251.556 / 701.978.838.397 = 1010,06%	8.564.505.632.590 / 614.348.393.013 = 1394,08%	38,02%	*Default risk = (Cost of Claim)/ (Guarantee Volume)*

Berdasarkan indikator tersebut, maka risiko likuiditas Perum Jamkrindo relatif kecil.

Based on these indicators, the Housing Jamkrindo liquidity risk is relatively small.

4. Risiko Pasar

4. Market Risk

Risiko Pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) penjaminan Perum Jamkrindo, yang dapat mengurangi pasar penjaminan (merugikan) Perusahaan serta pergerakan pasar keuangan yang dapat berpotensi menurunnya return dan nilai investasi. Variabel pasar dalam hal ini yang terkait penjaminan adalah tingkat kompetisi, trend kredit perbankan, regulasi pasar. Risiko pasar yang terkait dengan investasi adalah suku bunga, inflasi, dan portofolio investasi.

Market risk is the risk arising from the movement of market variables (adverse movement) Perum Jamkrindo guarantee, which can reduce underwriting market (adverse) and the Company's financial market movements can potentially lower investment returns and value. Market variables in this case is the level of competition associated guarantees, bank credit trends, market regulation. Market risk associated with investing are interest rates, inflation, and investment portfolio.

Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	Pertumbuhan / Growth	Description
Pertumbuhan Penjaminan = ((Vol Penjaminan t-Vol Penjaminan t-1))/(Vol Penjaminan t-1)	-6.546.503.276.353 / 46.996.238.461.142 = -13,93%	(6.258.620.562.533) / 40.737.617.898.609 = -15,36%	10,29%	*Growth Guarantee = ((Vol Guarantee t-Vol Guarantee t-1))/(Vol Guarantee t-1)*
Pencapaian Target Penjaminan = (Realisasi Vol Penjaminan)/ (Target Vol Penjaminan)	46.996.238.461.142 / 53.899.548.546.000 = 87,19%	40.737.617.898.609 / 60.920.162.110.298 = 66,87%	-23,31%	*Achievement of Guarantee Target = (Realization of Vol Guarantee)/ (Target of Vol Guarantee)*
Return Investasi = standard deviasi return investasi		0,56% atau setara 6,75% per tahun		*Return on Investment = deviation of return investment standard*
Pencapaian Pendapatan Investasi = (Realisasi Pendapatan Investasi)/ (Target Pendapatan Investasi)	286.814.758.443 / 281.368.750.000 = 101,94%	531.363.555.447 / 420.050.000.000 = 126,50%	24,10%	*Achieving of Investment Income = (Realization of Investment Income)/ (Target of Investment Income)*

Dari beberapa indikator tersebut di atas, dapat dilihat pertumbuhan penjaminan, pencapaian target penjaminan, dan pencapaian pendapatan invetasi mengalami penurunan.

From some of the indicators mentioned above, can be seen growing assurance, guarantee the achievement of targets and achievement of investing their earnings decline.

Secara nominal, nilai penjaminan Perusahaan mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang ditetapkan dalam RKAP 2014. Oleh karena itu, dalam jangka panjang Perusahaan perlu waspada terhadap risiko tidak tercapainya target volume penjaminan kredit.

In nominal terms, the value of the guarantee the Company has decreased and not exceeded the target set in RKAP 2014. Therefore, the Company's long-term need to guard against the risk of not achieving the target volume of credit guarantee.

Secara nominal, pendapatan investasi Perusahaan mengalami peningkatan, dan pencapaiannya melebihi target yang ditetapkan dalam RKAP 2014. Namun demikian, pertumbuhan pencapaian pendapatan investasi mengalami kenaikan sebesar 24,10%, sehingga dalam jangka panjang Perusahaan harus lebih mengoptimalkan pencapaian target pendapatan investasi sekaligus meminimalisir potensi risiko yang dapat menghambat tercapainya target investasi.

In nominal terms, the Company experienced an increase in investment income, and achievement exceeds the target set in RKAP 2014. However, achieving growth in investment income has increased by 24.10%, so the company needs to be optimize achieving the target of investment income and minimize potential risks which may impede the achievement of the target investment.

Untuk meminimalkan risiko investasi berupa deposito, hal-hal yang dilakukan perusahaan adalah:

To minimize the risk of investment in the form of deposits, the things of the company is:

- Melakukan pemilihan bank untuk penempatan deposito, dimana deposito ditempatkan di bank-bank yang berkinerja baik.
- Nominal penempatan disesuaikan dengan ekuitas bank yang bersangkutan.
- Penempatan dilakukan dengan jangka waktu tertentu yang memungkinkan dilakukan review apabila terjadi perubahan tingkat suku bunga.

- *Conduct elections for placement of bank deposits, where deposits are placed in banks that performed well.*
- *Nominal equity placements tailored to the relevant bank.*
- *Placement is done by a certain time period possible to do a review if there is a change in interest rates.*

Selain risiko atas Deposito, risiko pasar terkait instrumen lainnya adalah sebagaimana terlampir.

In addition to the risk of deposits, other instruments related to market risk is as attached.

32. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

4. Risiko Pasar (Lanjutan)

32. RISK MANAGEMENT (Continued)

4. Market Risk (Continued)

No	Jenis Kegiatan / Transaksi Types of Activities / transactions	Risiko *Risk*	Jenis Resiko Pasar* *Market Risk Type*				Obyek Transaksi* *Object Transaction*				Nilai *Value*	Mitigasi *Mitigation*
			Suku Bunga/ *Interest*	Nilai Tukar/ *Kurs*	Komoditas/ *Comodity*	Ekuitas/ *Equity*	Aset/ *Asset*	Kewajiban *Liability*	Pendapatan *Revenue*	*Arus Kas/* Cash		
1	Deposito / *Deposit*	Mendapatkan suku bunga yang tidak optimal / *Getting the interest rate is not optimal*	✓				✓		✓		5.198.867.959.879	*Mencari informasi suku bunga pada beberapa bank / Looking for information on some bank interest rates*
2	Obligasi / Bond	Risiko turunnya harga pasar obligasi / *The risk of decline in the market price of bonds*	✓				✓		✓		1.350.671.333.889	1. Melakukan analisa kembali faktor-faktor eksternal yang dapat menyebabkan turunnya harga, apabila fundamental emiten masih baik dan tidak ada masalah dalam pembayaran kupon maka tetap di hold / *Back analysis of external factors that can cause a drop in price, if the issuer's fundamentals are still good and there is no problem in the fixed coupon payments on hold* 2. Secara aktif berkomunikasi dengan sekuritas apabila terdapat kondisi fundamental emiten diindikasikan kurang sehat dan dimungkinkan dilakukan penjualan obligasi untuk switching obligasi lain/ *Actively communicate with securities if there is a fundamental condition of the issuer indicated less healthy and made possible the sale of bonds for other bonds switching*
3	Saham / *Share*	Risiko turunnya harga saham / *The risk of decline in stock prices*				✓	✓		✓		90.149.395.500	Melakukan analisa kembali secara fundamental dan teknikal / Fundamental analysis and technical back

32. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan) / ***32. RISK MANAGEMENT (Continued)***

4. Risiko Pasar (Lanjutan) / ***4. Market Risk (Continued)***

No	Jenis Kegiatan / Transaksi	Risiko	Jenis Resiko Pasar* *Market Risk Type*				Obyek Transaksi* *Object Transaction*				Nilai	Mitigasi
	Types of Activities / transactions	*Risk*	Suku Bunga/ *Interest*	Nilai Tukar/ *Kurs*	Komoditas/ *Comodity*	Ekuitas/ *Equity*	Aset/ *Asset*	Kewajiban *Liability*	Pendapatan *Revenue*	*Arus Kas/* Cash	*Value*	*Mitigation*
4	Reksa dana / *Mutual Fund*	Resiko penurunan Nilai Aset Bersih (NAB) reksa dana / *Risk reduction Net Asset Value (NAV) of mutual funds*	✓			✓	✓		✓		898.627.879.445	1.Pembelian reksa dana secara bertahap / *Purchase mutual funds gradually* 2. Membaca prospektus reksa dana dengan batasan investasi khususnya dalam pembelian saham dan obligasi yang akan dimasukkan ke dalam portofolio reksa dana / *Read a mutual fund prospectus with the investment restrictions, especially in the purchase of stocks and bonds that will be included in a portfolio of mutual funds* 3. Melihat track record Manajer Investasi beberapa tahun terakhir dari beberapa sumber / *Look at the track record of the last few years the Investment Manager from several sources* 4. Mengikuti perkembangan harga reksa dana setiap hari / *Following the development of mutual fund prices every day*
5	Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri / *Official Travel Abroad*	Potensi kenaikan nilai tukar terhadap rupiah / *Potential increase in the exchange rate of the rupiah*		✓						✓	48.345,50	*Hedging* nilai tukar / *Hedging exchange rate*

33. INFORMASI TAMBAHAN

SYARIAH

Berdasarkan surat Nomor U-217/DSN-MUI/IX/2006 pada tanggal 15 September 2006 Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI memberikan rekomendasi pendirian Divisi Penjaminan Syariah Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia dalam bekerja sama dengan perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya.

a. Dewan Syariah

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Nomor 37/Kep-Dir/X/2006 pada tanggal 19 Oktober 2006, tentang pengangkatan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Ketua	Prof. DR.H. Hasanudin AF,MA	*Chairman*
Anggota	Ir. H. Muhammad Syakir Sula, AAIJ,FIIS	*Member*
Anggota	M.Gunawan Yasni, SE, MM	*Member*

b. Kafalah Pembiayaan Syariah

Produk penjaminan kredit syariah yang ditawarkan adalah kafalah pembiayaan syariah merupakan suatu kegiatan perlengkapan (accessoir bagi suatu pembiayaan dengan pola syariah yang disalurkan oleh bank umum syariah maupun unit usaha syariah.

Dengan demikian harus terdapat akad/perjanjian pembiayaan antara terjamin (makfuul'anhu) dengan penerima jaminan (makfuul'lahu). Namun demikian, karena kafalah pembiayaan berfungsi sebagai substitusi agunan maka Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia melalui penerbitan surat persetujuan prinsip kafalah dapat menjadi dasar ditandatanganinya suatu perjanjian pembiayaan, seluruh kegiatan penjaminan syariah mengacu pada Fatwa DSN-MUI.

c. Jenis-jenis Produk Penjaminan Syariah

- Kafalah Pembiayaan Umum
- Kafalah Pembiayaan Multiguna
- Kafalah Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa
- Kafalah Pembiayaan Mikro
- Kafalah Pembiayaan Kepada BPRS
- Kafalah Pembiayaan Kontra Bank Garansi

d. Laporan Laba (Rugi) Syariah Tahun 2014 dan 2013

33. INFORMATION ADDITION

SHARIA

Based on letter No. U-217/DSN-MUI/IX/2006 on September 15, 2006 the National Sharia Board-Council of Ulama Indonesia (DSN-MUI Assurance Division provides advice on the establishment of the Credit Guarantee Public Company Sharia Indonesia in cooperation with Islamic banks and financial institutions other sharia.

a. Sharia Council

In accordance with the Decree of the Credit Guarantee Company Directors General of Indonesia Number 37/Kep-Dir/X/2006 on October 19, 2006, on the adoption of the Sharia Supervisory Board is as follows:

b. Kafalah Sharia Financing

Sharia credit insurance products offered are kafalah sharia financing is an activity equipment (accessoir for a pattern of sharia financing extended by sharia banks and of sharia business units.

Thus there must be contract / agreement between the secured financing receiver (makfuul'anhu) assurance (makfuul'lahu). Nevertheless, because kafalah serve as substitute collateral for financing the Public Company Credit Guarantee Indonesia through the issuance of a letter of approval kafalah principles could be the basis of an agreement signed financing, the entire sharia refers to underwriting activities DSN-MUI Fatwa.

c. Types of Product Assurance Sharia

Kafalah Public Financing	-
Financing Kafalah Multipurpose	-
Kafalah Construction Financing and Supplying of Goods / Services	-
Microfinance Kafalah	-
Kafalah Financing To BPRS	-
Kafalah Counter Financing Bank Guarantee	-

d. Income Statement Sharia 2014 dand 2013

	2014	2013	
PENDAPATAN PENJAMINAN			***GUARANTEE REVENUES***
Imbal Jasa Kafalah	121.288.314.170	137.870.511.179	*Gross Guarantee Fee*
Pendapatan Komisi Re Asuransi	483.488.645	59.391.002	*Re Insurance Comission Fee*
Premi Co Guarantee	(21.614.359.301)	(26.299.371.539)	*Co Guarantee Premium*
Premi Re Asuransi	(1.725.847.834)	(282.770.333)	*Re Insurance Premium*
Restitusi IJP	-	(82.688)	*Guarantee Restitution*
Imbal Jasa Kafalah Bersih	**98.431.595.680**	**111.347.677.621**	***Guarantee- Net***
BEBAN KLAIM			***CLAIM EXPENSE***
Beban Klaim	(42.423.385.581)	(38.350.127.573)	*Claim Expense*
Kenaikan (penurunan) cadangan klaim	5.991.328.851	(3.211.141.853)	Increase (Decrease) Reserve claim
Kerugian Penurunan Nilai Piutang Co Guarantee	-	(1.079.495.064)	*Impairment Losses on Co Guarantee Receivable*
Jumlah Beban Klaim	**(36.432.056.730)**	**(42.640.764.490)**	***TOTAL CLAIM EXPENSE***
PENJAMINAN BERSIH	**61.999.538.950**	**68.706.913.131**	***NET GUARANTEE INCOME***
Pendapatan Investasi Bersih	**12.044.639.800**	**6.890.122.170**	***Investment Income - Net***
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	**7.307.963.517**	**8.266.297.496**	***Other Income (Expenses)***
BEBAN USAHA			***OPERATING EXPENSES***
Beban Operasional	(7.988.070.467)	(5.578.890.798)	*Operating Expenses*
Beban Sumber Daya Manusia	(13.583.083.125)	(10.181.651.049)	*Human Resource Expenses*
Beban Administrasi dan Umum	(9.297.179.796)	(7.692.307.937)	*General and Administrative Expenses*
Beban Sistem, Teknologi, & Pengembangan Usaha	(2.081.249.722)	(104.406.400)	*Technology, System, & Development Expense*
Jumlah Beban Usaha	**(32.949.583.110)**	**(23.557.256.184)**	***Total Operating Expenses***
LABA SEBELUM PAJAK	**48.402.559.157**	**60.306.076.613**	***INCOME BEFORE TAX***

34. REKLASIFIKASI AKUN / *34. RECLASSIFICATION ACCOUNT*

Akun / *Account*	31 Desember 2013 / *December 31, 2013* Sebelum Reklasifikasi / *Before Reclassification*	Penambahan / *Addition*	Pengurangan / *Deduction*	Sesudah Reklasifikasi / *After Reclassification*
Investasi Deposito dan Efek - Dimiliki Hingga Jatuh tempo (Reksa dana) *Deposit Investment and Marketable Securities - Held To Maturity*	523.602.230.000	105.434.001.268		629.036.231.268
Investasi Deposito dan Efek - Dimiliki Hingga Jatuh tempo (Reksa dana) *Deposit Investment and Marketable Securities - Available for Sale*	930.400.172.330		105.434.001.268	824.966.171.062
Piutang IJP KUR Kepada Pemerintah *KUR Premium Receivable To The Goverment*	862.234.407.631	343.993.032.160		1.206.227.439.791
Aset Lain-lain *Others Asset*	368.501.660.187	-	343.993.032.160	24.508.628.027
Fee Based *Fee Based*	3.485.849.403	-	3.485.849.403	-
Fee Agen *Fee Agent*	4.668.600.023		4.668.600.023	-
Beban Pencegahan Klaim *Prevention Expense Claims*	937.683.469	-	937.683.469	-
Beban Operasional *Operating Expense*	35.819.923.140	9.092.132.895	-	44.912.056.035
Beban PPh 4 (2) Final *Tax Expense 4 (2) Final*	60.859.512.485	-	60.859.512.485	-
Beban Pajak Final *Tax Benefit (Deffered) Expense*	83.971.605.250	60.859.512.485	-	144.831.117.735
	2.874.481.643.918	**519.378.678.808**	**519.378.678.808**	**2.874.481.643.918**

35. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA / *35 SUBSEQUENT EVENT*

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca sampai dengan laporan ini diterbitkan yang berpengaruh secara signifikan terhadap penyajian Laporan Keuangan Perusahaan.

There were no significant events after the balance sheet date until the report is published that significantly affect the Company's Financial Statements.

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in Full Rupiah)

	31 Desember 2014 / *December 31, 2014*	Catatan/ Notes	31 Desember 2013 / *December 31, 2013* (disajikan kembali/*Restated*)	
ASET				***ASSETS***
Kas dan Setara Kas	5.196.592.537.763	2b, 3	4.711.774.750.747	*Cash and Cash Equivalent*
Investasi Deposito dan Efek		2g, 2n, 4		*Deposit Investment and Marketable Securities*
- Dimiliki Hingga jatuh Tempo	1.337.335.933.889		629.036.231.268	*Held To Maturity* -
- Tersedia untuk Dijual	1.362.727.674.945		824.966.171.062	*Available For Sale* -
Piutang IJP KUR Kepada Pemerintah	1.075.355.409.006	5	1.206.227.439.791	*KUR Premium Receivable To The Goverment*
Piutang Penjaminan Ulang *setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp60.884.628.596 pada 31 Desember 2014 dan Rp60.884.628.595 pada 31 Desember 2013*	69.936.879.275	2i, 2n, 6	120.583.795.519	*Co-Guarantee Receivable Net of Allowance for Impairment Losses Rp60.884.628.596 as of December 31, 2014 and Rp60.884.628.595 December 31, 2013*
Pinjaman Yang Diberikan *setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp17.568.618.974 pada 31 Desember 2014 dan Rp17.557.387.575 pada 31 Desember 2013*	973.438.042	2h, 7	1.297.400.099	*Loans Net of Allowance for Impairment Losses Rp17.568.618.974 as of December 31, 2014 and Rp17.557.387.575 December 31, 2013*
Piutang Lain-Lain	132.731.655.583	8	27.596.443.977	*Other Receivable*
Beban Dibayar Dimuka	598.764.321.798	2j, 9	553.068.468.726	*Prepaid Expenses*
Properti Investasi *setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp17.154.244.806 pada 31 Desember 2014 dan Rp16.763.145.491 pada 31 Desember 2013*	14.590.120.099	2k, 10	14.981.219.414	*Investment Property Net of Accumulated Depreciation of Rp17.154.244.806 as of December 31, 2014 dan Rp16.763.145.491 as of December 31, 2013*
Aset Tetap *setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp44.007.549.306 pada 31 Desember 2014 dan Rp39.459.459.187 pada 31 Desember 2013*	54.425.199.204	2l, 11	37.840.551.952	*Fixed Assets Net of Accumulated Depreciation of Rp44.007.549.306 as of December 31, 2014 dan Rp39.459.459.187 as of December 31. 2013*
Aset Pajak Tangguhan	119.400.366.323	2q, 17	141.500.601.350	*Deferred Tax Assets*
Aset Lain-Lain	57.811.014.608	2m, 12	24.508.628.027	*Other Assets*
JUMLAH ASET	**10.020.644.550.535**		**8.293.381.701.932**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian
The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

Nomor : LEK/GA/BTW/15006
Tanggal : 03 Februari 2015

LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA
PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
TAHUN BUKU 2014

Husni, Mucharam & Rasidi
Registered Public Accountants

Komplek Perkantoran Royal Palace Blok C-18 Jl. Prof. DR. Soepomo. SH, No. 178A, Jakarta 12870
Phone : 62 21 835 1868 Fax : 62 21 835 1978 e-mail : kaphmr@indosat.net.id Izin KAP : 98.2.0082

DAFTAR ISI

LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA	Hal.
BAGIAN I SIMPULAN HASIL EVALUASI KINERJA	
1. PENYUSUNAN RKAP 2014	1
2. PELAKSANAAN RKAP 2014	1
3. TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN	4
4. PERKEMBANGAN USAHA PERUSAHAAN	4
5. EFEKTIVITAS SATUAN PENGAWASAN INTERN	6
6. PERPAJAKAN	6
7. HAL – HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN	6
BAGIAN II EVALUASI KINERJA	
1. PENYUSUNAN & PELAKSANAAN RKAP 2014	7
2. TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN	18
3. PERKEMBANGAN USAHA PERUSAHAAN	24
4. EFEKTIVITAS SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI)	29
5. PERPAJAKAN PERUSAHAAN	31

5. Efektivitas Satuan Pengawasan Intern

Satuan Pengawasan Intern (SPI) membantu manajemen untuk mendorong ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku dan meningkatkan kinerja Perusahaan agar mencapai sasaran yang ditetapkan. Realisasi pelaksanaan tugas SPI adalah menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), mengikuti pelatihan, inventarisasi kebijakan, pendampingan pemeriksaan eksternal, memberikan masukan kepada manajemen, dan sebagainya.

6. Perpajakan

Total kewajiban pajak pada tahun 2014 adalah sebesar Rp94.155.334.686, yang terdiri dari Pajak Penghasilan tahun 2014 sebesar Rp90.975.197.037, Pajak Pertambahan Nilai Rp2.332.896.800, dan Pajak Bumi dan Bangunan Rp492.841.307. Perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan dan menyetor ke kas Negara sebesar Rp115.064.119.527, sehingga kewajiban pajak per 31 Desember 2014 sebesar Rp3.333.691.285.

7. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

a. Verifikasi atas Pengajuan Klaim KUR untuk Menghindarkan Pembayaran Klaim atas *Double* Fasilitas
b. Aplikasi Operasional ICPR perlu disempurnakan
c. Kesalahan Penginputan Data oleh User (*Human Error*)
d. Aspek Perpajakan
e. Perbedaan Perlakuan atas Pemberian Biaya SPPD secara *Lumpsum*
f. Belum Teraturnya Administratif Aset Tetap
g. Kelemahan dalam Administrasi Kas Bon
h. Aktifitas Rekonsiliasi Harus dilakukan secara Periodik
i. Kurangnya Penatalaksanaan Deposito
j. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Kantor Akuntan Publik
Husni, Mucharam, & Rasidi



Budi T. Wibawa, CPA
Izin Praktik : No. AP.0083
Izin KAP : No. KEP-662/KM .17/1998

Jakarta, 3 Februari 2015

2.1.2. Pendapatan Penjaminan

Pendapatan penjaminan terdiri dari pendapatan penjaminan bank dan non bank. Selama tahun 2014 realisasi pendapatan penjaminan sebesar Rp1,686 trilyun atau mencapai 90,39% dari RKAP tahun 2014 dan mencapai 105,33% dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp1,601 trilyun. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh kenaikan imbal jasa penjaminan yang meningkat secara signifikan dari Sektor Agrobisnis, yaitu konvensional Rp193,775 milyar dan syariah Rp6,523 milyar.

2.1.3. Beban Klaim

Realisasi beban klaim tahun 2014 sebesar Rp1,072 trilyun atau mencapai 100,11% dari RKAP tahun 2014 sebesar Rp1,071 trilyun dan mencapai 119,29% dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp898,582 milyar. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan beban klaim sektor jasa dan perdagangan.

2.1.4. Beban Operasional

Realisasi beban operasional tahun 2014 sebesar Rp1,349 trilyun atau mencapai 87,45% dari RKAP tahun 2014 dan mencapai 113,12% dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp1,193 trilyun.

2.1.5. Pendapatan dan Beban Non Operasional

Realisasi pendapatan dan beban non operasional bersih tahun 2014 sebesar Rp222,491 milyar atau mencapai 112,69% dari RKAP 2014 dan mencapai 136,60% dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp162,647 milyar.

2.1.6. Investasi

Total realisasi investasi (belanja modal) tahun 2014 sebesar Rp21,133 milyar atau hanya mencapai 11,71% dari RKAP tahun 2014. Kondisi tersebut disebabkan realisasi investasi perusahaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan operasional tahun berjalan, namun bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 mencapai 379,81% dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp5,564 milyar.

2.1.7. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia (SDM) sebanyak 496 orang karyawan dan 5 orang Direksi. Dalam tahun 2014 terdapat 8 orang pegawai yang pensiun dan 13 orang pegawai *resign* (keluar), dan 11 orang penambahan pegawai baru/cakar (calon karyawan).

2.2. Kredit Usaha Rakyat

Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia sesuai dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2007. Penjaminan KUR diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM-K) dengan sistem penjaminan secara *automatic cover,* dimana Imbalan Jasa Penjaminan (IJP) ditanggung oleh Pemerintah.

Perum Jamkrindo telah melakukan kerjasama penjaminan KUR dengan PT Askrindo sejak tahun 2010 sesuai Perjanjian Kerjasama Nomor:95/Jamkrindo/XII/2010 dan addendum Nomor:51/Jamkrindo/XXI/2011, jumlah prosentase adalah 60% untuk Perum Jamkrindo dan 40% untuk PT Askrindo. Berdasarkan addendum II Perjanjian Kerjasama Nomor:38/Jamkrindo/VII/2012 untuk tahun 2012 dan tahun-tahun selanjutnya, jumlah prosentase penjaminan bersama disesuaikan dengan alokasi Dana PMN setip tahun berdasarkan keputusan Pemerintah.

Evaluasi terhadap pencapaian penjaminan KUR didasarkan pada RKAP tahun 2014 yang telah menetapkan target-target dalam pelaksanaan penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

2.2.1. Hasil Usaha KUR

Total pendapatan usaha sebesar Rp2,218 trilyun, bersumber dari penjaminan KUR sebesar 70,41% atau Rp1,187 trilyun dan dari pendapatan investasi dana KUR sebesar 87,13% atau Rp462,963 milyar. yaitu atau masing-masing 92,45% dan 133,25% dibandingkan dengan RKAP tahun 2014.

2.2.2. Volume Kredit Jasa Penjaminan KUR

Volume KUR yang dijamin tahun 2014 sebesar Rp18,773 trilyun atau 46,08% terhadap total realisasi kredit yang dijamin tahun 2014 sebesar Rp40,738 trilyun dan mencapai 78,06% dari target volume kredit KUR tahun 2014 sebesar Rp24,050 trilyun.

2.2.3. Imbal Jasa Penjaminan KUR

Total Imbal jasa penjaminan KUR sebesar Rp1,187 trilyun atau 70,41% dari total realisasi imbal jasa penjaminan 2014 sebesar Rp1,686 trilyun dan mencapai 92,45% dari target imbal jasa penjaminan KUR tahun 2014 sebesar Rp1,284 trilyun.

2.2.4. Beban Klaim KUR

Total realisasi beban klaim KUR tahun 2014 sebesar Rp914,163 milyar atau sebesar 99,09% dari RKAP tahun 2014 yaitu sebesar Rp922,556 milyar. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, beban klaim mengalami peningkatan sebesar 125,99%. Hal ini dikarenakan besarnya kontribusi klaim KUR pada tahun 2014 di sektor jasa dan perdagangan sebesar Rp863,260 milyar.

2.2.5. Beban Usaha KUR

Total realisasi beban usaha KUR sebesar Rp1,091 trilyun atau 80,85% dari total realisasi beban usaha 2014 sebesar Rp1,349 trilyun dan mencapai 89,34% dari target beban usaha KUR tahun 2014 sebesar Rp1,221 trilyun.

2.2.6. Laba Operasi KUR

Laba bersih KUR sebesar Rp623,958 milyar atau 86,10% terhadap laba bersih termasuk Pendapatan Komprehensif Lainnya Perusahaan tahun 2014 sebesar Rp724,664 milyar dan mencapai 139,58% terhadap target yang ditetapkan tahun 2014 sebesar Rp447,037 milyar.

3. Tingkat Kesehatan Perusahaan

Evaluasi tingkat kesehatan BUMN didasarkan pada Keputusan Menteri Negara BUMN nomor : KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN dan Peraturan Menteri Negara BUMN RI Nomor : PER-04/MBU/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Jaminan. Perum Jamkrindo telah mengaplikasikannya dengan Surat Menteri Negara BUMN Nomor : S-314/MBU.4/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebagai dasar penilaian tingkat kesehatan.

Dari perhitungan tingkat kesehatan Perusahaan, sesuai dengan evaluasi tingkat kesehatan BUMN didasarkan pada Surat Keputusan Menteri BUMN RI Nomor : KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 dan Peraturan Menteri Negara BUMN RI Nomor : PER-04/MBU/2011 tanggal 19 Agustus 2011 disertai dengan Surat Menteri Negara BUMN Nomor : S-314/MBU.4/2011 tanggal 13 Oktober 2011, maka dengan total skor 87,50 Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia berada pada kategori "SEHAT AA" sementara tahun 2013 dengan skor 93,56 Perusahaan masuk dalam kategori "SEHAT AA".

4. Perkembangan Usaha Perusahaan

Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2010 sampai dengan 2014), perkembangan usaha perusahaan adalah sebagai berikut :

a. Perkembangan data keuangan

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, total aset menunjukkan peningkatan. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 terutama pada akun kas dan setara kas sebagai akibat penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,2 trilyun pada tahun 2011, Rp1,169 trilyun pada tahun 2012, Rp1,120 trilyun pada tahun 2013 dan Rp1,300 trilyun pada tahun 2014. Total kewajiban sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 juga menunjukkan peningkatan. Peningkatan kewajiban dikarenakan di tahun 2011 terdapat perubahan pencatatan dan pengakuan imbal jasa penjaminan dari *cash basis* menjadi *accrual basis,* sehingga ada pengakuan premi penjaminan pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya dari tertanggung kepada Perum Jamkrindo yang akan menjadi pendapatan di

tahun-tahun mendatang dan pembentukan cadangan klaim. Ekuitas dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan *tren* yang meningkat. Kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 yang disebabkan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah (PMN).

Pendapatan operasional perusahaan mengalami peningkatan. Peningkatan pendapatan sebagian besar dari peningkatan imbal jasa penjaminan yang diperoleh dari imbal jasa penjaminan baik existing maupun kredit usaha rakyat terutama di sektor jasa dan perdagangan. Di samping itu, pendapatan operasional juga meningkat tajam karena adanya peningkatan pendapatan investasi. Dalam 5 (lima) tahun terakhir beban operasional juga menunjukkan peningkatan. Peningkatan beban operasional ini dipengaruhi oleh peningkatan beban klaim, beban operasi, beban pegawai serta beban umum dan administrasi. Pendapatan non operasional bersih menunjukkan *tren* yang meningkat selama 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini disebabkan peningkatan pendapatan subrogasi.

b. Perkembangan rasio keuangan

Kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*current ratio)* dalam 5 tahun berfluktuatif. Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 terjadi peningkatan sangat signifikan terutama disebabkan penambahan Penyertaan Modal Negara. Rasio hutang perusahaan terhadap ekuitas dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 meningkat dikarenakan adanya pembentukan cadangan klaim dan kenaikan pendapatan diterima dimuka sebagai akibat perubahan pencatatan dan pengakuan IJP dari *cash basis* menjadi *accrual basis. Gross profit margin* dari tahun 2010 sampai dengan 2012 mengalami kenaikan, sementara pada tahun 2013 mengalami penurunan yang disebabkan adanya peningkatan beban klaim.

Rasio *profit margin on sales* atau tingkat laba atas pendapatan operasional mengalami peningkatan pada tahun 2011, 2012 dan 2014, dan mengalami penurunan di tahun 2010 dan 2013. *Return on assets* atau tingkat laba atas aset mengalami peningkatan pada tahun 2011, 2012 dan tahun 2014, dan mengalami penurunan di tahun 2010 dan 2013. *Return on equity* atau tingkat pengembalian terhadap investasi pemegang saham dalam 5 (lima) tahun berfluktuasi. *Return on equity* pada tahun 2011 dan 2012 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Terdapat penambahan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp900 milyar di tahun 2010 dan Rp1,2 trilyun di tahun 2011, Rp1,169 trilyun di tahun 2012, Rp1,120 trilyun di tahun 2013, dan Rp1,300 trilyun yang terjadi pada akhir tahun 2014, sehingga berdampak pada naiknya nilai aset dan ekuitas perusahaan. Perputaran aset dalam 5 (lima) tahun berfluktuasi, namun perusahaan selalu dapat mengelola asetnya untuk memperoleh pendapatan.

Nomor : LEK/GA/BTW/15006
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Kinerja
Perum Jaminan Kredit Indonesia

Kepada Yth.
Dewan Pengawas dan Direksi
Perum Jaminan Kredit Indonesia

BAGIAN I

SIMPULAN HASIL EVALUASI KINERJA

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2014

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2014 disusun berdasarkan realisasi RKAP 2013 (audited) dan prognosa tahun 2013. RKAP tahun buku 2014 telah disahkan oleh Menteri Negara BUMN melalui Surat Menteri BUMN Nomor S-784/MBU/2013 Tanggal 27 Desember 2013 Perihal Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perum Jaminan Kredit Indonesia Tahun 2013.

2. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2014

2.1. Kredit Umum

2.1.1. Hasil Usaha

Pendapatan operasional (pendapatan penjaminan dan pendapatan investasi) tahun 2014 sebesar Rp1,974 trilyun atau mencapai 96,28% dari RKAP 2014 sebesar Rp2,050 trilyun dan mencapai 117,99% dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp1,687 trilyun. Peningkatan yang signifikan terjadi karena peningkatan penjaminan kredit dan pendapatan investasi.

Sejalan dengan peningkatan pendapatan operasional, beban operasional (beban klaim dan beban usaha) meningkat menjadi sebesar Rp1,349 trilyun atau mencapai 87,45% dari RKAP tahun 2014 dan mencapai 113,12% dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp1,193 trilyun. Kenaikan tersebut terutama disebabkan kenaikan beban klaim untuk usaha produktif. Pendapatan non operasional bersih juga mencapai 112,08% dibandingkan dengan target 2014 atau mencapai 136,79% dibandingkan dengan realisasi tahun 2013. Akibatnya, tahun 2014 Perusahaan memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp846,943 milyar atau mencapai 120,02% dari RKAP tahun 2014 dan meningkat sebesar 128,92% dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp656,967 milyar.

The Royal Palace Blok C-18 Jl. Prof. DR. Soepomo. SH, No.178A, Jakarta 12870
Phone : 62 21 835 1868, 62 21 831 3413 Fax : 62 21 835 1978 Website : www.kaphmr.com e-mail : office@kaphmr.com Izin Usaha No. KEP 662/KM.17/1998

BAGIAN II

EVALUASI KINERJA

TAHUN BUKU 2014

1. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2014

1.1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP)

Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia tahun 2014 disusun sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2000, Keputusan Menteri BUMN No. KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan RKAP BUMN, Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Penyusunan RKAP tahun 2014 didasarkan pada hasil analisis pencapaian Perusahaan dalam tahun-tahun sebelumnya serta berdasarkan asumsi-asumsi indikator perekonomian sebagai berikut :

A. Asumsi Eksternal
   1. Tingkat pertumbuhan ekonomi 6,0% per tahun dengan tingkat inflasi 5,5% (RAPBN).
   2. Tingkat suku bunga BI Rate 5,5% bruto (RAPBN).
   3. *Exchange Rate* 1 US $ = Rp10.500,00 (RAPBN).
   4. Adanya tambahan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2 trilyun (untuk Jamkrindo dan Askrindo).
   5. Target Penyaluran KUR sebesar Rp37 trilyun.

B. Asumsi Internal
   1. *Yiel on investment* (YOI) lebih tinggi dari BI rate dengan rata-rata dana kelolaan Rp6 trilyun.
   2. Pengakuan Premi co-guarantee berbasis *accrual* sesuai jangka waktunya kredit.
   3. Cadangan klaim minimal sebesar 0,25 % dari *outstanding* penjaminan (*coverage*).
   4. Penambahan kantor cabang dan kantor unit pelayanan.
   5. Mengalihkan Capex untuk pengadaan kendaraan dinas menjadi Opex (Beban sewa).
   6. Rata-rata IJP Kur 2,275% dan Non KUR sebesar 0,59% (netto). IJP diluar *accrual*.
   7. Suku bunga deposito 6,75% (bruto) per tahun.
   8. Pendapatan subrogasi minimal 14,85% dari beban klaim.

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2014 disusun berdasarkan realisasi RKAP 2013 (audited) dan prognosa tahun 2013. RKAP tahun buku 2014 telah disahkan oleh Menteri Negara BUMN melalui surat Pengesahan RKAP Tahun 2014 dan RKA PKBL Tahun 2014 Nomor : S-784/MBU/2013 tanggal 27 Desember 2013.

1.2. Perbandingan antara Realisasi dan RKAP

1.2.1. Hasil Usaha

Realisasi hasil usaha tahun 2014 dibandingkan dengan RKAP tahun 2014 dan realisasi tahun 2013 menunjukkan kondisi sebagai berikut :

(dalam jutaan)

Uraian	Realisasi 2014 Rp	RKAP 2014 Rp	Realisasi 2013 Rp	% Realisasi 2014	
				(2 : 3)	(2 : 4)
1	2	3	4	5	6
Pendapatan Operasional	1.973.933	2.050.229	1.687.314	96,28%	117,99%
Beban Operasional	(1.349.481)	(1.543.070)	(1.192.994)	87,45%	113,12%
Laba Operasional	**624.452**	**507.159**	**494.320**	**123,13%**	**126,33%**
Pendapatan (Beban) Operasional	222.491	198.517	162.647	112,08%	136,79%
Laba Sebelum Pajak	**846.943**	**705.676**	**656.967**	**120,02%**	**128,92%**

Pendapatan operasional tahun 2014 sebesar Rp1,974 trilyun atau mencapai 96,28% dibandingkan dengan RKAP 2014 atau mencapai 117,99% dari realisasi tahun 2013. Peningkatan yang signifikan terjadi karena peningkatan penjaminan kredit terutama dari sektor jasa dan perdagangan dan peningkatan pada pendapatan investasi.

Meskipun terjadi peningkatan pendapatan operasional, beban operasional masih dibawah anggarannya yaitu mencapai 87,45% dibandingkan RKAP tahun 2014 dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 mencapai 113,12%. Kenaikan tersebut terutama disebabkan kenaikan beban klaim terutama untuk sektor jasa dan perdagangan. Pendapatan non operasional bersih mencapai 112,08% dibandingkan dengan target 2014 atau mencapai 136,79% dibandingkan realisasi tahun 2013. Akibatnya, tahun 2014 Perusahaan memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp846,943 milyar atau mencapai 120,02% dibandingkan RKAP tahun 2014 dan 128,92% dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp656,967 milyar.

1.2.2. Pendapatan Penjaminan

Perincian Pendapatan Penjaminan

a. Volume Kredit Jasa Penjaminan

(dalam jutaan)

Uraian	Realisasi 2014 Rp	RKAP 2014 Rp	Realisasi 2013 Rp	% Realisasi 2014	
				(2 : 3)	(2 : 4)
1	2	3	4	5	6
A. Penjaminan Bank					
1. Penjaminan Konvensional					
- Agrobisnis	4.029.235	4.010.475	3.504.758	100,47%	114,96%
- INKRA	547.496	1.255.165	670.831	43,62%	81,61%
- Jasa dan Perdagangan	31.676.299	47.082.816	36.748.282	67,28%	86,20%
Sub Jumlah	**36.253.030**	**52.348.456**	**40.923.870**	**69,25%**	**88,59%**
2. Penjaminan Syariah					
- Agrobisnis	76.957	336.758	326.638	22,85%	23,56%
- INKRA	24.066	108.548	53.543	22,17%	44,95%
- Jasa dan Perdagangan	2.066.610	4.610.182	3.504.505	44,83%	58,97%
Sub Jumlah	**2.167.633**	**5.055.489**	**3.884.686**	**42,88%**	**55,80%**
Jumlah A	**38.420.662**	**57.403.944**	**44.808.556**	**66,93%**	**85,74%**
B. Penjaminan Bukan Bank					
- Agrobisnis	14.242	-	-	-	-
- INKRA	24.653	-	-	-	-
- Jasa dan Perdagangan	2.278.060	3.516.218	1.034.840	64,79%	220,14%
Jumlah B	**2.316.956**	**3.516.218**	**1.034.840**	**65,89%**	**223,90%**
Total (A + B)	**40.737.618**	**60.920.162**	**45.843.396**	**66,87%**	**88,86%**

Realisasi jumlah kredit yang dijamin tahun 2014 sebesar Rp40,738 trilyun atau mencapai 66,87% dari jumlah yang ditargetkan tahun 2014 sebesar Rp60,920 trilyun dan mencapai 88,86% dibandingkan dengan realisasi tahun 2013. Volume penjaminan pada tahun 2014 sebesar Rp38,421 trilyun dari penjaminan kredit bank dan penjaminan kredit non bank Rp2,317 trilyun.

Dari jumlah kredit bank yang dijamin yang bersumber dari kredit bank konvensional Rp36,253 trilyun atau sebesar 69,25% dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar Rp52,348 trilyun dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 mencapai 88,59%. Pembiayaan bank syariah Rp2,168 trilyun yaitu 42,88% dibandingkan dengan target 2014 sebesar Rp5,055 trilyun dan 55,80% dibandingkan dengan realisasi 2013 realisasi Rp3,885 trilyun.

b. Imbal Jasa Penjaminan

(dalam jutaan)

Uraian	Realisasi 2014 Rp	RKAP 2014 Rp	Realisasi 2013 Rp	% Realisasi 2014	
				(2 : 3)	(2 : 4)
1	2	3	4	5	6
A. Penjaminan Bank					
1. Penjaminan Konvensional					
- Agrobisnis	193.697	180.508	156.827	107,31%	123,51%
- INKRA	31.269	37.933	31.935	82,43%	97,92%
- Jasa dan Perdagangan	1.317.391	1.463.360	1.261.513	89,91%	104,30%
Sub Jumlah	**1.542.357**	**1.681.800**	**1.450.275**	**91,61%**	**106,23%**
2. Penjaminan Syariah					
- Agrobisnis	6.523	14.227	9.569	45,85%	68,17%
- INKRA	2.246	2.351	1.781	95,54%	126,13%
- Jasa dan Perdagangan	110.660	138.777	125.790	78,59%	86,70%
Sub Jumlah	**119.430**	**155.355**	**137.140**	**75,85%**	**85,92%**
Jumlah A	**1.661.787**	**1.837.155**	**1.587.415**	**90,28%**	**104,48%**
B. Penjaminan Bukan Bank					
- Agrobisnis	78	-	38	-	205,90%
- INKRA	21	-	5	-	419,03%
- Jasa dan Perdagangan	24.384	28.329	13.503	86,08%	180,58%
Jumlah B	**24.484**	**28.329**	**13.547**	**86,43%**	**180,74%**
Total (A+B)	**1.686.271**	**1.865.484**	**1.600.961**	**90,39%**	**105,33%**

Total imbal jasa penjaminan yang diperoleh 2014 sebesar Rp1,686 trilyun atau mencapai 105,33% dibandingkan dengan tahun 2013. Imbal jasa penjaminan bank sebesar Rp1,662 trilyun mencapai 90,28% dari RKAP tahun 2014 yang terdiri dari imbal jasa penjaminan konvensional Rp1,542 trilyun atau mencapai 91,61% dibandingkan dengan target 2014 serta mencapai 106,23% dari realisasi 2013 dan imbal jasa penjaminan bank syariah sebesar Rp119,430 milyar atau mencapai 75,85% dibandingkan target 2014 dan mencapai 85,92% dibandingkan realisasi tahun 2013. Imbal jasa penjaminan bank tersebut sangat signifikan diperoleh dari sektor agrobisnis, yaitu konvensional Rp193,697 milyar dan syariah Rp6,523 juta.

Realisasi imbal jasa penjaminan bukan bank tahun 2014 sebesar Rp24,484 milyar atau mencapai 86,43% dari target yang ditetapkan dalam RKAP 2014, dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, maka pendapatan jasa penjaminan bukan bank mencapai 180,74% dibandingkan realisasi tahun 2013. Jumlah kredit dan imbal jasa penjaminan bukan bank didominasi oleh sektor jasa dan perdagangan. Dalam jasa penjaminan bukan bank, Perusahaan bekerja sama dengan Indonesia Eximbank (LPEI), PT. Garuda Indonesia, PT

Permodalan Nasional Madani (PT PNM), PT PNM Syariah, PT Pegadaian (Persero), PT. Hutama Karya, Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia, PT Semen Indonesia dan afiliasinya, PT. Semen Bosowa, PT. Pos Indonesia, PT. Indofarma, PT. Inti, PT. Len, Koperasi Pegawai Bank Indonesia (KOPEBI), Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG), Tripilar Betonmas, Obligee Suretyship dan YKKBI.

1.2.3. Beban Klaim

Ringkasan realisasi beban klaim tahun 2014, dibandingkan dengan anggaran menurut RKAP 2014 dan realisasi tahun 2013 adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan)

Uraian	Realisasi 2014 Rp	RKAP 2014 Rp	Realisasi 2013 Rp	% Realisasi 2014	
				(2 : 3)	(2 : 4)
1	2	3	4	5	6
Konvensional					
Agrobisnis	50.636	49.714	48.709	101,85%	103,96%
INKRA	38	69.600	18.806	0,05%	0,20%
Jasa dan Perdagangan	978.815	874.967	792.717	111,87%	123,48%
Subjumlah	**1.029.802**	**994.280**	**860.232**	**103,54%**	**119,68%**
Syariah					
Agrobisnis	734	3.824	1.161	19,21%	63,24%
INKRA	25	5.353	116	0,46%	21,43%
Jasa dan Perdagangan	41.664	67.295	37.073	61,91%	112,38%
Subjumlah	**42.423**	**76.472**	**38.350**	**55,48%**	**110,62%**
Total Beban Klaim	**1.071.912**	**1.070.752**	**898.582**	**100,11%**	**119,29%**

Realisasi beban klaim tahun 2014 sebesar Rp1,072 trilyun atau sebesar 100,11% dibandingkan RKAP tahun 2014 yaitu sebesar Rp1,071 trilyun sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 119,29%. Hal ini disebabkan meningkatnya beban klaim pada sektor jasa dan perdagangan di tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 yang terdiri dari beban klaim konvensional sebesar 123,48% dan beban klaim syariah sebesar 112,38%.

1.2.4. Beban Operasional

(dalam jutaan)

Uraian	Realisasi 2014 Rp	RKAP 2014 Rp	Realisasi 2013 Rp	% Realisasi 2014	
				(2 : 3)	(2 : 4)
1	2	3	4	5	6
Beban Klaim	1.071.912	1.070.752	898.582	100,11%	119,29%
Beban Kenaikan (penurunan) Cadangan Klaim	(50.854)	43.996	39.541	-115,59%	-128,61%
Beban Operasi	70.562	123.114	61.618	57,31%	114,52%
Beban Sistem, Teknologi, dan Pengembangan Usaha	19.574	43.917	4.715	44,57%	415,14%
Beban Sumber Daya Manusia	168.091	185.668	115.762	90,53%	145,20%
Beban Administrasi Kantor dan Umum	70.196	75.623	64.212	92,82%	109,32%
Kenaikan (Penurunan) Nilai Piutang Co Guarantee	-	-	8.564	-	-
Total Beban Operasional	**1.349.481**	**1.543.069**	**1.192.994**	**87,45%**	**113,12%**

Realisasi beban operasional tahun 2014 sebesar Rp1,349 trilyun atau mencapai 87,45% dari RKAP tahun 2014 dan mencapai 113,12% dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp1,193 trilyun.

1.2.5. Pendapatan (Beban) Non Operasional

(dalam jutaan)

Uraian	Realisasi 2014 Rp	RKAP 2014 Rp	Realisasi 2013 Rp	% Realisasi 2014	
				(2 : 3)	(2 : 4)
1	2	3	4	5	6
Pendapatan Non Operasional	225.517	201.736	165.098	111,79%	136,60%
Beban Non operasional	(3.026)	(4.881)	(2.451)	61,99%	123,46%
Pendapatan (Beban) Non Operasional – bersih	**222.491**	**196.855**	**162.647**	**113,02%**	**136,79%**

Realisasi pendapatan dan beban non operasional bersih tahun 2014 sebesar Rp222,491 milyar atau mencapai 113,02% dari RKAP 2014 dan mencapai 136,79% dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp162,647 milyar.

1.2.6. Investasi

(dalam Jutaan)

Uraian	Realisasi 2014 Rp	RKAP 2014 Rp	Realisasi 2013 Rp	% Realisasi 2014	
				(2 : 3)	(2 : 4)
1	2	3	4	5	6
Tanah dan Bangunan	-	135.300	896	-	-
Gedung	1.192	-	-	-	-
Rumah Dinas	-	10.897	-	-	-
Inventaris Kantor	9.194	16.578	4.599	55.46%	199.91%
Inventaris Dinas	62	-	69	-	89.26%
Kendaraan	10.685	17.630	-	62,96%	-
Jumlah	**21.133**	**180.405**	**5.564**	**11,71%**	**379,81%**

Total realisasi investasi (belanja modal) tahun 2014 sebesar Rp21,133 milyar atau hanya 11,71% dari RKAP tahun 2014. Kondisi tersebut disebabkan realisasi investasi perusahaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan operasional tahun berjalan, namun bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 mencapai 379,81%.

1.2.7. Sumber Daya Manusia

Uraian	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2013
Komposisi menurut unit kerja		
Kantor Pusat	159	178
Kantor Cabang Bandung	31	34
Kantor Cabang Semarang	24	27
Kantor Cabang Surabaya	29	28
Kantor Cabang Pekan Baru	14	19
Kantor Cabang Makassar	17	19
Kantor Cabang Samarinda	13	15
Kantor Cabang Pontianak	15	17
Kantor Cabang Denpasar	18	22
Kantor Cabang Palembang	17	18
Kantor Cabang DKI Jakarta	19	21
Kantor Cabang Medan	14	18
Kantor Cabang Jayapura	7	8
Kantor Cabang Manado	7	11
Kantor Cabang Banjarmasin	10	12
Kantor Cabang Palangkaraya	7	11
Kantor Cabang Kupang	12	14
Kantor Cabang Mataram	12	12
Kantor Cabang Jambi	11	11
Kantor Cabang Jakarta Khusus	10	9

Uraian	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2013
Kantor Cabang Jogyakarta	6	4
Kantor Cabang Bandar Lampung	7	5
Kantor Cabang Aceh	2	-
Kantor Cabang Tanjung Pinang	3	-
Kantor Cabang Padang	2	-
Kantor Cabang Bengkulu	3	-
Kantor Cabang Pangkal Pinang	2	-
Kantor Cabang Serang	3	-
Kantor Cabang Tarakan	1	-
Kantor Cabang Gorontalo	2	-
Kantor Cabang Palu	2	-
Kantor Cabang Mamuju	2	-
Kantor Cabang Kendari	2	-
Kantor Cabang Ambon	2	-
Kantor Cabang Ternate	2	-
Kantor Cabang Manokwari	3	-
Kantor Wilayah 1	2	-
Kantor Wilayah 2	2	-
Kantor Wilayah 3	2	-
Sub Jumlah	496	513
Direksi	**5**	5
Jumlah	**501**	**518**

Jumlah sumber daya manusia (SDM) per tanggal 31 Desember 2014 adalah 496 orang karyawan dan 5 orang Direksi. Dalam tahun 2014 terdapat 8 orang pegawai yang pensiun dan 13 orang pegawai yang keluar (resign) serta 11 orang penambahan pegawai baru.

1.3. Kredit Usaha Rakyat

Jumlah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia sesuai dengan Inpres nomor 6 Tahun 2007. Program penjaminan KUR bekerja sama dengan delapan (8) bank pelaksana yaitu Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Bukopin, BTN Syariah dan BNI Syariah. Sementara sampai tahun 2014 Perum Jamkrindo telah bekerja sama dengan tiga puluh tiga (33) Bank Pembangunan Daerah yang mendapat penugasan untuk penyaluran KUR.

Penjaminan KUR diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K) dengan plafond kredit maksimal Rp 500 juta dengan sistem penjaminan secara *automatic cover,* dimana IJP ditanggung oleh pemerintah.

Perum Jamkrindo telah melakukan kerjasama penjaminan KUR dengan PT Askrindo sejak tahun 2010 sesuai Perjanjian Kerjasama Nomor : 95/Jamkrindo/XII/2010 dan addendum Nomor : 51/Jamkrindo/XI/2011, jumlah prosentase adalah 60% untuk Perum Jamkrindo dan 40% untuk PT Askrindo. Berdasarkan addendum II Perjanjian Kerjasama Nomor : 38/Jamkrindo/VII/2012 untuk tahun 2012 dan tahun-tahun selanjutnya, jumlah prosentase penjaminan bersama disesuaikan dengan alokasi Dana PMN setiap tahun berdasarkan Keputusan Pemerintah. Namun kerjasama ini telah berakhir berdasarkan Surat Perum Jamkrindo Nomor 3564/1/XI/2013 tentang berakhirnya Perjanjian Kerjasama dengan PT. Askrindo per 31 Desember 2013.

Pendapatan IJP atas penjaminan KUR mengikuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.05/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang fasilitas penjaminan KUR dan realisasi imbal jasa penjaminan dan PMK No.189/PMK.05/2010 tanggal 2 November 2010. Sehingga tarif IJP disesuaikan menjadi 3,25% x plafond kredit / pembiayaan x 70% atau sebesar 2,275%.

Evaluasi terhadap pencapaian penjaminan KUR didasarkan pada RKAP tahun 2014 yang telah menetapkan target-target dalam pelaksanaan penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

1.3.1. Hasil Usaha KUR

(dalam jutaan)

Uraian	Total Realisasi (Existing & KUR) 2014 Rp	Realisasi KUR % (4 : 2)	KUR 2014		
			Realisasi Rp	RKAP Rp	% Realisasi (4 : 5)
1	2	3	4	5	6
Pendapatan Jasa Penjamin	1.686.271	70,41%	1.187.294	1.284.323	92,45%
Pendapatan Investasi	531.364	87,13%	462.963	347.450	133,25%
Total	**2.217.635**	**74,42%**	**1.650.257**	**1.631.773**	**101,13%**

Dari total pendapatan usaha sebesar Rp2,218 trilyun atau sebesar 74,42% bersumber dari penjaminan KUR yaitu yang terdiri dari imbal jasa penjaminan KUR sebesar Rp1,187 trilyun dan dari pendapatan investasi dana KUR sebesar Rp462,963 milyar dan mencapai target masing-masing 92,45% dan 133,25% dibandingkan dengan RKAP tahun 2014.

1.3.2. Volume Kredit Jasa Penjaminan KUR

(dalam jutaan)

Uraian	Total Realisasi (Existing & KUR)	Realisasi KUR	KUR 2014		
	2014	%	Realisasi	RKAP	% Realisasi
	Rp	(4 : 2)	Rp	Rp	(4 : 5)
1	2	3	4	5	6
Agrobisnis	4.120.434	97,91%	4.034.265	4.315.720	93,48%
INKRA	596.215	94,47%	563.269	753.655	74,74%
Jasa dan Perdagangan	36.020.969	39,35%	14.175.114	18.980.625	74,68%
Total	**40.737.618**	**46,08%**	**18.772.648**	**24.050.000**	**78,06%**

Volume KUR yang dijamin tahun 2014 sebesar Rp18,773 trilyun atau 46,08% terhadap total realisasi kredit yang dijamin tahun 2014 sebesar Rp40,738 trilyun dan mencapai 78,06% dari target volume kredit KUR tahun 2014 sebesar Rp24,050 trilyun.

1.3.3. Imbal Jasa Penjaminan KUR

(dalam jutaan)

Uraian	Total Realisasi (Existing & KUR)	Realisasi KUR	KUR 2014		
	2014	%	Realisasi	RKAP	% Realisasi
	Rp	(4 : 2)	Rp	Rp	(4 : 5)
1	2	3	4	5	6
Agrobisnis	200.298	99,74%	199.786	193.962	103,00%
INKRA	33.537	99,84%	33.482	39.988	83,73%
Jasa dan Perdagangan	1.452.436	65,68%	954.026	1.050.373	90,83%
Total	**1.686.271**	**70,41%**	**1.187.294**	**1.284.323**	**92,45%**

Total Imbal jasa penjaminan KUR sebesar Rp1,187 trilyun atau 70,41% dari total realisasi imbal jasa penjaminan 2014 sebesar Rp1,686 trilyun dan mencapai 92,45% dari target imbal jasa penjaminan KUR tahun 2014 sebesar Rp1,284 trilyun.

1.3.4. Beban Klaim KUR

(dalam jutaan)

Uraian	Realisasi 2014 Rp	RKAP 2014 Rp	Realisasi 2013 Rp	% Realisasi 2014	
				(2 : 3)	(2 : 4)
1	2	3	4	5	6
Konvensional					
Agrobisnis	50.106	43.338	48.709	115,62%	102,87%
Industri dan Pertambangan	38	60.673	18.806	0,06%	0,20%
Jasa dan Perdagangan	833.176	762.742	632.352	109,23%	131,76%
Subjumlah	**883.320**	**866.753**	**699.867**	**101,91%**	**126,21%**
Syariah					
Agrobisnis	734	2.790	1.161	26,32%	63,24%
Industri dan Pertambangan	25	3.906	116	0,64%	21,43%
Jasa dan Perdagangan	30.084	49.107	24.441	61,26%	123,09%
Subjumlah	**30.843**	**55.803**	**25.718**	**55,27%**	**119,93%**
Total Beban Klaim	**914.163**	**922.556**	**725.585**	**99,09%**	**125,99%**

Beban klaim KUR tahun 2014 sebesar Rp914,163 milyar atau sebesar 99,09% dari RKAP tahun 2014 yaitu sebesar Rp922,556 milyar. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 125,99%. Hal ini dikarenakan besarnya kontribusi klaim KUR pada tahun 2014 terutama di sektor jasa dan perdagangan sebesar Rp863,260 milyar.

1.3.5. Beban Usaha KUR

(dalam jutaan)

Uraian	Total Realisasi (Existing & KUR) 2014 Rp	Realisasi KUR % (4 : 2)	KUR 2014		
			Realisasi Rp	RKAP Rp	% Realisasi (4 : 5)
1	2	3	4	5	6
Beban Klaim	1.071.912	85,28%	914.163	922.556	99,09%
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	(50.854)	79,81%	(40.589)	40.718	-99,68%
Beban Operasional	70.562	58,57%	41.331	59.716	69,21%
Beban Sumber Daya Manusia	168.091	69,81%	117.351	131.870	88,99%
Beban Administrasi Kantor dan Umum	70.196	63,46%	44.544	53.711	82,93%
Beban Sistem, Teknologi, dan Pengembangan Usaha	19.574	73,10%	14.308	12.725	110,32%
Total	**1.349.481**	**80,85%**	**1.091.108**	**1.221.296**	**89,34%**

Total beban usaha KUR sebesar Rp1,091 trilyun atau 80,85% dari total realisasi beban usaha 2014 sebesar Rp1,349 trilyun dan mencapai 89,34% dari target beban usaha KUR tahun 2014 sebesar Rp1,221 trilyun.

1.3.6. Laba Operasi KUR

(dalam jutaan)

Uraian	Total Realisasi (Existing & KUR) 2014 Rp	Realisasi KUR % (4 : 2)	KUR 2014		
			Realisasi Rp	RKAP Rp	% Realisasi (4 : 5)
1	2	3	4	5	6
a. Pendapatan Usaha	1.973.933	79,66%	1.572.379	1.631.773	96,36%
b. Beban Operasional	(1.349.481)	80,85%	(1.091.108)	(1.221.296)	89,34%
Laba Operasional	**624.452**	**77,07%**	**481.272**	**410.477**	**117,25%**
c. Pendapatan (Beban) Bukan Usaha	222.492	68,95%	153.408	111.795	137,22%
d. Beban Pajak Penghasilan	(182.804)	38,97%	(71.246)	(75.236)	94,70%
e. Pendapatan Komprehensif Lainnya	60.525	100,00%	60.525	-	-
Laba Bersih	**724.664**	**86,10%**	**623.958**	**447.037**	**139,58%**

Laba bersih KUR sebesar Rp623,958 milyar atau 86,10% terhadap laba bersih termasuk Pendapatan Komprehensif Lainnya Perusahaan tahun 2014 sebesar Rp724,664 milyar dan mencapai 139,58% terhadap target yang ditetapkan tahun 2014 sebesar Rp 447,037 milyar.

2. Tingkat Kesehatan Perusahaan

Evaluasi tingkat kesehatan BUMN didasarkan pada Keputusan Menteri Negara BUMN nomor : KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN dan Peraturan Menteri Negara BUMN RI nomor : PER-04/MBU/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Jaminan. Perum Jamkrindo telah mengaplikasikannya dengan Surat Menteri Negara BUMN nomor : S-314/MBU.4/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebagai dasar penilaian tingkat kesehatan, yang meliputi aspek penilaian dan bobot maksimal sebagai berikut:

	Bobot maksimal	
	Existing	KUR
- Aspek keuangan	35	30
- Aspek operasional	50	50
- Aspek administrasi	15	20
	100	100

2.1. Laba Operasi

No	Uraian	Nilai (Rp)
	Neraca per 31 Desember 2014	
1	Kas dan Setara Kas	5.196.592.537.763
2	Jumlah Aset Lancar	8.579.463.892.080
3	Total Aset	10.020.644.550.535
4	*Capital Employed*	10.020.644.550.535
5	Jumlah Kewajiban Lancar	613.156.415.098
6	Total Kewajiban	1.603.392.621.514
7	Penyertaan Modal Pemerintah	6.638.733.365.160
8	Cadangan + Saldo Laba tahun berjalan	1.789.725.234.731
9	Komponen Ekuitas Lainnya	(11.219.183.476)
10	Hak Non Pengendali	12.512.606
11	Total Ekuitas dan Kewajiban	10.021.695.920.431
	Laba (Rugi) tahun 2014	
12	Pendapatan Jasa Penjaminan Bersih	1.442.569.748.452
13	Total Pendapatan Usaha	1.973.933.303.899
14	Beban Klaim	1.071.911.769.047
15	Beban Penyusutan	5.015.475.538
16	Kerugian Penurunan Nilai Piutang Co Guarantee	-
17	Pendapatan Subrograsi	205.827.465.858
18	Laba Bersih sebelum Pajak	846.943.338.972
19	Pendapatan Komprehensif Lainnya	60.525.221.825
20	Laba Bersih Setelah Pajak	664.138.968.086

2.2. Aspek Keuangan

Aspek keuangan dihitung berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN RI Nomor : KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 dan Peraturan Menteri Negara BUMN RI nomor : PER-04/MBU/2011 tanggal 19 Agustus 2011 disertai dengan Surat Menteri Negara BUMN nomor : S-314/MBU.4/2011 tanggal 13 Oktober 2011.

Perum Jaminan Kredit Indonesia termasuk dalam kategori non infrastruktur, sehingga skor setiap indikator aspek keuangan sebagai berikut :

A. Existing

No	Uraian	Perhitungan	Bobot	Nilai	Skor
1	Rentabilitas				
	- ROE (%)	Laba Setelah Pajak / Rata-rata Ekuitas	5	27,52%	5
	- ROA (%)	Laba Sebelum Pajak / Rata-rata Total Aset	5	7,36%	3
2	Solvabilitas (%)	Total Aset / Total Kewajiban	15	130,77%	12
3	Likuiditas (%)	Aset Lancar / Hutang Lancar	10	262,70%	10
	Jumlah Aspek Keuangan		**35**		**30**

B. KUR

No	Uraian	Perhitungan	Bobot	Nilai	Skor
1	Gearing Ratio	Jumlah Kredit Yang Dijamin / Jumlah PMN Yang Diterima	10	17,81	10
2	Yield On Invesment (YOI)	Hasil Investasi / Rata-rata Total Ekuitas	10	6,52%	10
3	Rasio Kecukupan Investasi (RKI)	Total Investasi / Cadangan Klaim + Hutang Klaim	10	2743%	10
	Jumlah Aspek Keuangan		**30**		**30**

2.3. Aspek Operasional

Aspek operasional dihitung berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN RI Nomor : KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 dan Peraturan Menteri Negara BUMN RI nomor : PER-04/MBU/2011 tanggal 19 Agustus 2011 disertai dengan Surat Menteri Negara BUMN nomor : S-314/MBU.4/2011 tanggal 13 Oktober 2011.

Perhitungan komponen aspek operasional secara rinci dapat dilihat pada lampiran 2. Rekapitulasi hasil perhitungan komponen aspek operasional adalah sebagai berikut :

A. Existing

No	Uraian	Perhitungan	Bobot	Nilai	Skor
1	YOI (%)	Hasil Investasi / Rata-Rata Investasi	10	8,47%	10
2	BOPO (%)	Biaya Usaha – Klaim / Pendapatan IJP	7,5	22,23%	7,5
3	Pertumbuhan IJP (%)	IJP Tahun Berjalan - IJP Tahun Lalu / IJP Tahun Lalu	7,5	-8,06%	0,0
4	Gearing Ratio (kali)	Outstanding Penjaminan Kredit / Saldo Ekuitas	10	7	0,0
5	Rasio Efektifitas Operasi (%)	Laba Usaha / Pendapatan IJP	7,5	26,85%	7,5
6	Rasio Efektifitas Subrogasi (%)	Pendapatan Subrogasi / Beban Klaim	7,5	36,56%	7,5
	Jumlah Aspek Operasional		**50**		**32,5**

B. KUR

No	Uraian	Perhitungan	Bobot	Nilai	Skor
1	Rasio Pencapaian Penjaminan	Realisasi Nilai Penjaminan / Target Nilai Penjaminan	20	78,06%	10
2	Rasio Pencapaian Jumlah Terjamin	Realisasi Jumlah Terjamin / Target Jumlah Terjamin	15	69,506%	3
3	Efisiensi Usaha	Biaya Operasional / **Pendapatan IJP**	15	18,32%	15
	Jumlah Aspek Operasional		**50**		**28**

2.4. Aspek Administrasi

Perhitungan aspek administrasi mengacu kepada Surat Keputusan Menteri BUMN RI Nomor : KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 dan Peraturan Menteri Negara BUMN RI nomor : PER-04/MBU/2011 tanggal 19 Agustus 2011 disertai dengan Surat Menteri Negara BUMN nomor : S-314/MBU.4/2011 tanggal 13 Oktober 2011.

Rekapitulasi hasil perhitungan komponen aspek administrasi adalah sebagai berikut :

A. Existing

No	Uraian	Perhitungan	Bobot	Nilai	Skor
1	Laporan perhitungan tahunan	Menyampaikan tgl 14 Februari 2014	3	3	3
2	Rancangan RKAP	Menyampaikan tgl 30 Oktober 2014	3	3	3
3	Laporan Periodik (Triwulan)	Terlambat 0 hari	3	3	3
4	Kinerja PKBL	a. Efektifitas Penyaluran	3	80	3
		b. Tingkat Kolektibilitas	3	90	3
	Jumlah Aspek Administrasi		**15**		**15**

B. KUR

No	Uraian	Perhitungan	Bobot	Nilai	Skor
1	Kewajiban Pelaporan	Menyampaikan Tepat Waktu	10	Tepat waktu	10
2	Efektivitas Penagihan IJP	Jumlah IJP Diterima / Jumlah IJP Ditagih	10	98%	8
	Jumlah Aspek Administrasi		**20**		**18**

2.5. Hasil Perhitungan Tingkat Kesehatan Perusahaan

Penilaian	Score	Proporsi Joint Cost	Proporsi Score
1	**2**	**3**	**4 = 2 X 3**
Tingkat Kesehatan Korporasi	77,50	16,40%	12,71
Penugasan (Penjaminan KUR)	76,00	83,60%	63,54
Total Score	**153,50**		**76,25**
PREDIKAT PENILAIAN		**SEHAT**	**A**

Berdasarkan perhitungan tingkat kesehatan perusahaan dengan melakukan penggabungan Existing dan KUR sehingga hanya menghitung tingkat kesehatan berdasarkan kinerja korporasi maka diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

A. Aspek Keuangan

No	Uraian	Perhitungan	Bobot	Nilai	Skor
1	Rentabilitas - ROE (%)	Laba Setelah Pajak Rata-rata Ekuitas	5	9,72%	5
	- ROA (%)	Laba Sebelum Pajak Rata-rata Total Aset	5	9,96%	5
2	Solvabilitas (%)	Total Aset Total Kewajiban	15	624,97%	15
3	Likuiditas (%)	Aset Lancar Hutang Lancar	10	1399,23%	10
	Jumlah Aspek Keuangan		**35**		**35**

B. Aspek Operasional

No	Uraian	Perhitungan	Bobot	Nilai	Skor
1	YOI (%)	Hasil Investasi Rata-Rata Investasi	10	7,80%	10
2	BOPO (%)	Biaya Usaha - Klaim Pendapatan IJP	7,5	19,48%	7,5
3	Pertumbuhan IJP (%)	IJP Tahun Berjalan - IJP Tahun Lalu IJP Tahun Lalu	7,5	5,33%	2,0
4	Gearing Ratio (kali)	Outstanding Penjaminan Kredit Saldo Ekuitas	10	11	3,0
5	Rasio Efektifitas Operasi (%)	Laba Usaha Pendapatan IJP	7,5	50,23%	7,5
6	Rasio Efektifitas Subrogasi (%)	Pendapatan Subrogasi Beban Klaim	7,5	20,14%	7,5
	Jumlah Aspek Operasional		**50**		**37,5**

C. Aspek Administrasi

No	Uraian	Perhitungan	Bobot	Nilai	Skor
1	Laporan perhitungan tahunan	Menyampaikan tgl 14 Februari 2014	3	3	3
2	Rancangan RKAP	Menyampaikan tgl 30 Oktober 2014	3	3	3
3	Laporan Periodik (Triwulan)	Terlambat 0 hari	3	3	3
4	Kinerja PKBL	a. Efektifitas Penyaluran	3	80	3
		b. Tingkat Kolektibilitas	3	90	3
	Jumlah Aspek Administrasi		**15**		**15**
TOTAL			**100**		**87,5**
PREDIKAT PENILAIAN			**SEHAT**		**AA**

Dari perhitungan tingkat kesehatan Perusahaan, sesuai dengan evaluasi tingkat kesehatan BUMN didasarkan pada Surat Keputusan Menteri BUMN RI Nomor : KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 dan Peraturan Menteri Negara BUMN RI nomor : PER-04/MBU/2011 tanggal 19 Agustus 2011 disertai dengan Surat Menteri Negara BUMN nomor : S-314/MBU.4/2011 tanggal 13 Oktober 2011, maka dengan total skor 87,50 Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia berada pada kategori "SEHAT AA" dan tahun 2013 dengan skor 93,56 Perusahaan masuk dalam kategori "SEHAT AA".

3. Perkembangan Usaha Perusahaan

3.1 Perkembangan Data Keuangan

Perbandingan data keuangan selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

(dalam jutaan)

	Uraian	2014 Rp	2013 Rp	2012 Rp	2011 Rp	2010 Rp
I	**POS POS NERACA**					
	Neraca					
	Aset					
A	Aset Lancar	8.579.464	7.090.379	6.060.809	4.680.121	2.890.711
B	Aset Tetap	69.015	37.841	36.141	54.513	53.782
C	Aset Pajak Tangguhan	119.400	141.501	128.427	91.203	47.369
D	Aset lain-lain	1.252.765	1.023.661	435.700	103.338	1.141
E	**Jumlah Aset**	**10.020.645**	**8.293.382**	**6.661.077**	**4.929.175**	**2.993.003**

	Uraian	2014 Rp	2013 Rp	2012 Rp	2011 Rp	2010 Rp
	Kewajiban dan Ekuitas					
F	Kewajiban Lancar	613.156	701.979	633.353	678.197	929.336
G	Kewajiban Jangka Panjang	852.474	964.707	942.618	817.347	167.598
H	Kewajiban Lain-lain	137.762	76.558	35.475	-	22
I	Jumlah kewajiban	1.603.393	1.743.243	1.611.446	1.495.544	1.096.956
J	Ekuitas	8.417.252	6.550.138	5.049.631	3.433.630	1.896.047
K	**Jumlah kewajiban dan Ekuitas**	**10.020.645**	**8.293.382**	**6.661.077**	**4.929.175**	**2.993.003**
II	**POS - POS LABA – RUGI**					
	HASIL USAHA					
L	Pendapatan Operasional	1.973.933	1.618.300	1.371.797	910.987	595.090
M	Beban Operasional	(1.349.481)	(1.184.839)	(919.890)	(597.841)	(452.139)
N	Laba Usaha	624.452	433.460	451.908	313.145	142.951
O	Pendapatan (beban) Non Operasional	222.492	162.647	110.366	65.842	35.910
P	Laba Sebelum Pajak	846.943	596.107	562.274	378.987	178.861
Q	Pajak Penghasilan	182.804	(70.898)	(52.757)	(6.616)	(30.473)
R	Laba Setelah Pajak	664.139	525.209	509.517	372.371	148.388
S	Pendapatan Komprehensif	60.525	(80.069)	8.153	172	-
T	Rata - rata asset	9.157.013	7.477.229	5.795.126	3.961.089	2.327.260

Dari data keuangan 5 (lima) tahun terakhir, perkembangan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia menunjukkan kondisi sebagai berikut:

a. Total Aset

Total aset selama 5 tahun terakhir mempunyai *tren* yang selalu meningkat sejak tahun 2010 dari jumlah aset Rp2,993 trilyun menjadi Rp10,021 trilyun pada tahun 2014. Penambahan terbesar terjadi pada tahun 2011 dikarenakan adanya penambahan Aset Keuangan sebesar Rp1,936 trilyun.

b. Total Kewajiban

Total kewajiban sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan *tren* yang meningkat. Peningkatan kewajiban dikarenakan di tahun 2010 dan 2011 ada perubahan dan penerapan pengakuan IJP dari *cash basis* menjadi *accrual basis,* sehingga ada pengakuan premi penjaminan pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya dari tertanggung kepada Perum Jamkrindo yang kemudian menjadi pendapatan di tahun-tahun mendatang dan terbentuknya cadangan klaim. Sementara pada tahun 2014 terjadi penurunan kewajiban disebabkan oleh penurunan hutang klaim, hutang pajak dan pendapatan ditangguhkan.

c. Ekuitas

Ekuitas dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan *tren* yang meningkat. Kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2010 dan 2011 yang disebabkan penambahan Penyertaan Modal Negara. Di tahun 2012, 2013, dan 2014 penambahan tersebut masing-masing sebesar Rp1,169 trilyun, Rp1,120 trilyun, dan Rp1,300 trilyun.

d. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional Perusahaan mengalami peningkatan dengan *tren* yang meningkat. Peningkatan pendapatan sebagian besar dari peningkatan imbal jasa penjaminan yang diperoleh dari imbal jasa penjaminan baik existing maupun kredit usaha rakyat terutama di sektor jasa dan perdagangan. Di samping itu, pendapatan operasional juga meningkat karena adanya peningkatan pendapatan investasi.

e. Beban Operasional

Dalam 5 (lima) tahun terakhir beban operasional juga menunjukkan peningkatan. Peningkatan beban operasional terutama dipengaruhi oleh peningkatan beban klaim, beban operasi, dan beban pegawai.

f. Pendapatan dan Beban Non Operasi

Pendapatan non operasional bersih menunjukkan *tren* yang meningkat selama 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini disebabkan kenaikan pendapatan subrogasi dan pendapatan jasa giro.

3.2. Rasio Keuangan

Rasio keuangan dalam 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan data keuangan di atas adalah sebagai berikut :

URAIAN	FORMULA	2014	2013	2012	2011	2010
Likuiditas						
Current ratio	(A : F) %	1399,23%	1010,06%	956,94%	690,08%	311,05%
Solvabilitas						
Debt to equity	(I : J) %	19,05%	26,61%	31,91%	43,56%	57,85%
Rentabilitas						
Gross profit margin	(N : L) %	31,63%	26,78%	32,94%	34,37%	24,02%
Profit margin on sales	(P : L) %	42,91%	36,84%	40,99%	41,60%	30,06%
Return on assets	(P : T) %	9,25%	7,97%	9,70%	9,57%	7,69%
Return on equity	(R : J) %	7,89%	8,02%	10,09%	10,84%	7,83%
Aktivitas						
Perputaran aset	(L : T) kali	21,56	21,64	23,67	23	25,57

a. *Current ratio*

Rasio lancar atau *current ratio* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dari gambaran rasio lancar di atas, dilihat bahwa kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya sangat baik. Mulai tahun 2010 terdapat peningkatan pendapatan diterima dimuka (termasuk dalam kelompok kewajiban lancar) karena pengaruh perubahan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan imbal jasa penjaminan dari cash basis menjadi accrual basis, sehingga mempengaruhi perhitungan *current ratio.*

b. *Debt to equity*

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditur) dengan pemilik perusahaan atau dengan kata lain rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang. Rasio hutang perusahaan terhadap ekuitas dalam periode tahun 2011 sampai 2014 terus mengalami penurunan. Hal ini berarti modal sendiri perusahaan yang dijadikan jaminan hutang semakin meningkat.

c. *Gross profit margin*

Gross profit margin berfluktuasi, pada tahun 2010 sampai dengan 2011 mengalami peningkatan selanjutnya menurun di tahun 2012 sampai tahun 2013 karena meningkatnya beban klaim, dan meningkat kembali pada tahun 2014 disebabkan oleh meningkatnya pendapatan terutama dari pendapatan investasi.

d. *Profit margin on sales*

Rasio *profit margin on sales* meningkat pada tahun 2010 sampai dengan 2011 kecuali pada tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan pada tahun 2012 dan 2013 terjadi peningkatan yang signifikan atas beban klaim sehingga mempengaruhi dalam penyajian laba bersih. Pada tahun 2014 Rasio *profit margin on sales* kembali mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pendapatan terutama dari pendapatan investasi.

e. *Return on assets*

Return on assets atau tingkat laba atas aset pada tahun 2011, 2012, dan 2014 mengalami peningkatan namun di tahun 2010 dan 2013 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya penambahan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp900 milyar di tahun 2010, Rp1,2 trilyun di tahun 2011, Rp1,169 trilyun di tahun 2012 dan Rp1,120 trilyun di tahun 2013 dan Rp1,300 trilyun di tahun 2014 rata-rata diterima pada akhir tahun, sehingga berdampak pada naiknya nilai aset namun belum dapat memberikan kontribusi terhadap laba yang dicapai perusahaan pada tahun yang bersangkutan.

f. *Return on equity*

Return on equity atau tingkat pengembalian terhadap investasi pemegang saham dalam 5 (lima) tahun berfluktuasi. *Return on equity* pada tahun 2011 dan 2012 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Terdapat penambahan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp600 milyar di tahun 2007, Rp250 milyar di tahun 2009, Rp900 milyar di tahun 2010, Rp1,2 trilyun di tahun 2011, Rp1,169 trilyun di tahun 2012, Rp1,120 trilyun di tahun 2013, dan Rp1,300 trilyun di tahun 2014 rata-rata diterima pada akhir tahun, sehingga berdampak pada naiknya nilai ekuitas perusahaan.

g. Perputaran aset

Perputaran aset dalam 5 (lima) tahun berfluktuasi, namun Perusahaan selalu dapat mengelola asetnya untuk memperoleh pendapatan.

4. Efektifitas Satuan Pengawasan Intern

Satuan Pengawasan Intern (SPI) membantu Manajemen untuk mendorong ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku dan meningkatkan kinerja perusahaan agar mencapai sasaran yang ditetapkan.

Satuan Pengawasan Intern (SPI) bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. Jumlah personil SPI per 31 Desember 2014 berjumlah berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala SPI, 4 (empat) orang Kepala Bagian, 1 (satu) orang Kepala Seksi, dan 11 (sebelas) orang staf SPI.

Pedoman pelaksanaan yang digunakan SPI dalam melaksanakan tugasnya adalah:

- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2008 tentang Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum).
- Surat Edaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 797/K/1985 tentang Norma Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern.
- Keputusan Direksi Nomor 58/Dir/IX/1998 tanggal 18 September 1998 tentang Pedoman Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern.
- Keputusan Direksi Nomor 04/Kep-Dir/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia.
- Keputusan Direksi Nomor 46/Kep-Dir/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia.
- Keputusan Direksi Nomor 121/Kep-Dir/VII/2014 tanggal 5 Juni 2014 Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaaran (*Whistle Blowing System*) Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia.
- Peraturan Direksi Nomor: 45/Per-Dir/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang Pedoman Audit Internal Berbasis Risiko (Risk Based Internal Audit) Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia.
- Piagam Satuan Pengawasan Intern (SPI Charter).

Sasaran audit SPI sesuai PKPT tahun 2014 meliputi:

1. Kantor Pusat
    a. Divisi Akuntansi dan TI
    b. Divisi Umum
    c. Divisi Pemasaran Penjaminan Non Bank
2. Kantor Cabang
    I. Wilayah I
        a. Kantor Cabang DKI Jakarta
        b. Kantor Cabang Jambi
        c. Kantor Cabang Pekanbaru

d. Kantor Cabang Pontianak

II. Wilayah II

a. Kantor Cabang Surabaya
b. Kantor Cabang Banjarmasin
c. Kantor Cabang Samarinda

III. Wilayah III

a. Kantor Cabang Manado
b. Kantor Cabang Makasar
c. Kantor Cabang Jayapura

Pada tahun 2014, realisasi pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) antara lain meliputi:

1. Kantor Pusat
   a. Divisi Akuntansi dan TI
   b. Divisi Umum
   c. Divisi Pemasaran Penjaminan Non Bank
2. Kantor Cabang
   I. Wilayah I
      a. Kantor Cabang DKI Jakarta
      b. Kantor Cabang Jambi
      c. Kantor Cabang Pekanbaru
      d. Kantor Cabang Pontianak
   II. Wilayah II
      a. Kantor Cabang Surabaya
      b. Kantor Cabang Banjarmasin
      c. Kantor Cabang Samarinda
   III. Wilayah III
      a. Kantor Cabang Manado
      b. Kantor Cabang Makasar
      c. Kantor Cabang Jayapura

5. Perpajakan Perusahaan

Pada tahun 2014 Perusahaan telah melakukan kewajiban perpajakan berupa pemungutan dan penyetoran berbagai jenis pajak dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal Rp	Mutasi Tahun 2014		Saldo Akhir Rp
		Kewajiban Rp	Penyetoran Rp	
I. Uang muka pajak				
Pajak Pertambahan Nilai	-	354.399.542	354.399.542	-
II. Hutang Pajak				
- **Pajak Penghasilan**				
Pajak Penghasilan pasal 21	2.782.854.760	17.546.763.928	17.830.127.828	2.526.490.860
Pajak Penghasilan pasal 23/26	177.763.682	686.543.213	720.497.817	143.809.078
Pajak Penghasilan pasal 25	5.739.892.708	87.442.338.379	93.182.231.087	-
Pajak Penghasilan pasal 4 (2)	67.019.679	392.444.272	398.421.451	61.042.500
Pajak Penghasilan pasal 29	15.092.892.755	(15.092.892.755)	-	-
Total Pajak Penghasilan	**23.860.423.584**	**90.975.197.037**	**112.104.278.183**	**2.731.342.438**
- **Pajak Pertambahan Nilai**				
Pajak Pertambahan Nilai	382.052.542	2.332.896.800	2.112.600.495	602.348.847
Total Pajak Pertambahan Nilai	**382.052.542**	**2.332.896.800**	**2.112.600.495**	**602.348.847**
- **Pajak Bumi dan Bangunan**				
Pajak Bumi dan Bangunan	-	492.841.307	492.841.307	-
Total Pajak Bumi dan Bangunan	**-**	**492.841.307**	**492.841.307**	**-**
Total Hutang Pajak	**24.242.476.126**	**94.155.334.686**	**115.064.119.527**	**3.333.691.285**

5.1 Pajak Penghasilan (PPh)

Jumlah saldo awal Kewajiban Pajak Penghasilan pada tahun 2014 adalah Rp23.860.423.584 dan Kewajiban Pajak Penghasilan selama tahun 2014 adalah sebesar Rp90.975.197.037. Perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan dan menyetor ke kas Negara sebesar Rp112.104.278.183, sehingga hutang PPh per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.731.342.438.

5.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perum Jaminan Kredit Indonesia memiliki saldo awal PPN pada tahun 2014 sebesar Rp382.052.542, dan kewajiban PPN selama tahun 2014 sebesar Rp2.332.896.800. Jumlah PPN yang disetorkan pada tahun 2014 sebesar Rp2.112.600.495 sehingga saldo akhir PPN tahun 2014 Perum Jaminan Kredit Indonesia sebesar Rp602.348.847 .

5.3 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Sebagai wajib pajak, Perum Jaminan Kredit Indonesia telah memenuhi kewajiban membayar PBB sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diterima pada tahun 2014 sebesar Rp 492.841.307 .

Nomor : LA/UU/15006
LA/IC/15006
Tanggal : 3 Februari 2015

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS KEPATUHAN PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENGENDALIAN INTERN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014

Husni, Mucharam & Rasidi
Registered Public Accountants

Komplek Perkantoran Royal Palace Blok C-18 Jl. Prof. DR. Soepomo. SH, No. 178A, Jakarta 12870
Phone : 62 21 835 1868 Fax : 62 21 835 1978 e-mail : kaphmr@indosat.net.id Izin KAP : 98.2.0082

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Nomor : LAI/UU/BTW/15006

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Dewan Pengawas dan Direksi
Perum Jaminan Kredit Indonesia

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan telah menerbitkan laporan kami pada tanggal 03 Februari 2015.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas salah saji material.

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak/perjanjian dan bantuan yang berlaku bagi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari keyakinan untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan pengujian terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak/perjanjian. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Hasil pengujian kami menunjukkan bahwa, berkaitan dengan unsur yang kami uji, Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia mematuhi, dalam semua hal yang material, pasal-pasal yang kami sebut dalam paragraf di atas. Berkaitan dengan unsur yang tidak kami uji, tidak ada satu pun yang kami ketahui yang menyebabkan kami percaya bahwa Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia tidak mematuhi, dalam semua hal yang material, pasal-pasal tersebut.

Namun, kami mencatat masalah-masalah tertentu yang berkaitan dengan ketidakpatuhan yang patut menjadi perhatian manajemen Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia. Catatan dimaksud kami ungkapkan dalam uraian hasil audit terlampir.

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi. Namun, apabila laporan ini merupakan catatan publik distribusinya tidak dibatasi.

Kantor Akuntan Publik
Husni, Mucharam & Rasidi

Budi T. Wibawa, CPA
Izin Praktik : No. AP.0083
Izin KAP : No. KEP-662/KM 17/1998

Jakarta, 03 Februari 2015

Lampiran 1: Uraian Hasil Audit Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan yang Diuji

Peraturan Perundang-undangan yang kami uji dalam rangka audit kepatuhan pada Perum Jaminan Kredit Indonesia tahun buku 2014 ini, mencakup :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

4. Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.2 tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan.

6. Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.010/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.

8. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

9. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang penyusunan RKAP BUMN.

10. Keputusan Menteri Keuangan RI No.740/KMK.00/1989 tanggal 28 Juni 1989 dirubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.826/KMK.013/1992 tentang Sistim Penilaian Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang ditetapkan tanggal 28 Januari 2010

Lampiran 2: Uraian Hasil Audit Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

1. VERIFIKASI ATAS PENGAJUAN KLAIM KUR UNTUK MENGHINDARKAN PEMBAYARAN KLAIM ATAS *DOUBLE* FASILITAS

Kondisi :

Terdapat indikasi pemberian Jaminan kepada debitur bank yang menikmati lebih dari satu fasilitas KUR pada Kantor Cabang Semarang sebanyak 4 nasabah dengan jumlah Imbalan Jasa Penjaminan sebesar Rp57.505.500.

Kriteria :

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang ditetapkan tanggal 28 Januari 2010 memutuskan, Pasal 5 ayat (1.a)

"UMKM-K yang dapat menerima fasilitas Penjaminan KUR adalah merupakan calon debitur yang tidak sedang menerima kredit modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur pada saat Permohonan KUR diajukan.

Akibat:

Pengakuan pendapatan IJP menjadi tidak valid dan berpotensi pembayaran klaim atas *double* fasilitas tersebut.

Tanggapan Manajemen

Sebab:

1. Dalam perkembangannya, dengan terbitnya Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian No: S-98/D.I.M.EKON/09/2013 tanggal 13 September 2013 perihal penegasan debitur yang terkait pasal 5 PMK Nomor: 22/PMK.05/2010, atas fasilitas KUR akad yang ke-2 dinyatakan bukan KUR, sehingga apabila terjadi pengajuan klaim KUR atas fasilitas akad yang ke-2 maka klaimnya tidak diperkenankan dibayar.
2. Terdapat perbedaan waktu antara Verifikasi IJP yang dilakukan oleh BPKP dengan klaim yang diajukan, sehingga terdapat kemungkinan klaim telah dibayar namun verifikasi IJP-nya dilakukan setelah klaim dibayar, sehingga Penjamin dianggap salah membayar klaim karena terjamin dikategorikan tidak memenuhi kriteria KUR.
3. Blokir IJP (baik *blocking* internal maupun *blocking* atas IJP pending) belum dilakukan oleh sistem.
4. Unit kerja tidak meng-*entry* proses klaim dalam sistem terlebih dahulu sehingga status IJP pending belum diketahui dan unit kerja telah menyetujui klaim.

Berdasarkan data yang disampling oleh tim KAP, Perjanjian Kredit (PK) atas nama Terjamin yang disampling ditandatangani pada tahun 2012 atau periode sebelumnya, belum diberlakukan ketentuan larangan *double* fasilitas sebagaimana Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: S-98/D.I.M.EKON/09/2013 tanggal 13 September 2013 perihal penegasan debitur yang terkait pasal 5 PMK Nomor: 22/PMK.05/2010.

Tindakan yang akan diambil oleh manajemen:

Manajemen telah mengambil langkah-langkah untuk menghindari terjadinya *double* fasilitas KUR sebagai berikut:

a. Adanya Surat edaran tentang *blocking* IJP KUR atas debitur KUR yang tidak memenuhi kriteria KUR sesuai parameter BPKP melalui Surat Edaran Nomor: 18/SE-DIR/5/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013.

b. Mengharuskan kepada unit kerja untuk entry pada Aplikasi Operasional sebelum memproses klaim melalui Surat nomor: 4000/P/2/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 perihal Monitoring Beban Klaim dan Surat Nomor: 61/2.2/I/2015 tanggal 8 Januari 2015 perihal Proses Klaim.

c. Secara berkesinambungan menegaskan kembali atas seluruh ketentuan yang berkaitan dengan *double* fasilitas kredit KUR dimaksud, sehingga apabila terdapat pengajuan klaim atas nama terjamin yang termasuk dalam kriteria *double* fasilitas kredit, unit kerja yang bersangkutan dapat mengantisipasi untuk tidak melakukan persetujuan dan pembayaran klaim atas fasilitas yang tidak memenuhi kriteri KUR.

2. ASPEK PERPAJAKAN

Kondisi :

1. PPh 21

Cabang Jayapura :

- Penjurnalan beban pajak PPh 21 dilakukan pada saat pembayaran, bukan pada saat terhutangnya pajak.
- Terdapat pemotongan PPh 21 sebesar 5% dari biaya perjalanan dinas karyawan. Pemotongan pajak atas biaya perjalanan dinas tersebut tidak dicatatat sebagai penerimaan kas atas hutang PPh 21. Pada saat pengeluaraan pembayaran hutang PPh 21 atas pajak dari perjalanan dinas dicatat sebagai beban pajak perusahaan.

2. PPh 23

Pusat :

- Terdapat beberapa transaksi atas sewa kendaraan bulan September yang belum dipotong PPh 23 di Kantor Pusat.
- Terdapat lebih bayar PPh 23 di bulan Maret
- Terdapat kurang bayar PPh 23 di bulan September

3. PPN

Cabang Jayapura :

- Dari sampling transaksi tidak dilakukan pemotongan PPN Wapu atas 10 transaksi.

Kantor Pusat :

- Faktur pajak atas pendapatan sewa gedung diterbitkan tidak sesuai dengan tanggal *invoice* sewa gedung.

4. LAIN-LAIN

Serah terima faktur pajak dari cabang ke pusat tidak terdapat rincian atau rekapan faktur pajak.

Kriteria :

1. Berdasarkan Undang-undang PPh Nomor 36 tahun 2008 pasal 23 yaitu "Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan,dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

2. Faktur Pajak harus dibuat pada:
   a. Saat penyerahan BKP dan/atau JKP;
   b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP;
   c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
   d. saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN.
3. Dalam UU KUP No 28 Tahun 2007 Pasal 14 ayat (4) Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat faktur pajak maupun Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi

tidak tepat waktu atau tidak selengkapnya mengisi faktur pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. Demikian pula bagi Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi melaporkannya tidak tepat waktu, dikenai sanksi yang sama. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak ditagih dengan Surat Tagihan Pajak, sedangkan pajak yang terutang ditagih dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

4. Berdasarkan UU KUP No 28 Tahun 2007 pasal 39A Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai. Demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak.

5. Pencatatan pembayaran beban termasuk pemotongan dan pembayaran pajak penghasilannya seharusnya dilakukan sesuai dengan transaksi yang terjadi. Apabila PPh atas beban perjalanan dinas menjadi beban pegawai yang melakukan perjalanan dinas, maka jurnal standarnya adalah:

(D) Beban perjalanan dinas	sebesar beban PD
(K) Hutang PPh pasal 21	sebesar potongan PPh
(K) Kas	sebesar yang dibayarkan
Pada saat pembayaran PPh:	
(D) Hutang PPh pasal 21	sebesar potongan PPh
(K) Kas	sebesar yang dibayarkan

Akibat:

1. Saldo pajak yang disajikan dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
2. Pelaksanaan belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga berpotensi dikenakan denda.

Tanggapan Manajemen

Sebab:

1. Kurang pengetahuan perpajakan mengenai PPh 21 oleh bagian yang menangani Perpajakan di Kantor Cabang.
2. Kesalahan perhitungan pemotongan PPh Ps 23 yang seharusnya dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) namun dihitung dari Jumlah Bruto setelah PPN. Kelebihan pembayaran PPh Ps 23 Masa Maret 2014 sebesar Rp4.363.636,- (PPh Ps 23 atas PT Cipta Tata Dokumen Indonesia). Pada SPT PPh Ps 23 Masa September 2014, kelebihan pembayaran sebesar Rp6.531.240,- (PPh Ps 23 atas PT Boer Technology dan PT Jamkrindo Tama). Pada SPT PPh Ps 23 Masa September 2014 terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp17.280.000,- (PPh Ps 23 atas PT BNI Multifinance).
3. Tidak semua Kantor Cabang menyerahkan Faktur Pajak dan SSP asli untuk PPN Wapu setiap bulannya serta belum adanya format standar untuk tanda terima Faktur Pajak tersebut.

Tindakan yang akan diambil oleh manajemen:

Manajemen akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Untuk selanjutnya akan dilakukan penjurnalan beban pajak PPh 21 pada saat terhutangnya pajak PPh 21 dan mulai diberlakukan di awal bulan Januari 2015.
2. Terhadap pemotongan PPh 21 sebesar 5% dari biaya perjalanan dinas karyawan akan dicatat sebagai penerimaan kas.
3. Melakukan pembayaran kembali kepada Rekanan yang bersangkutan dan koreksi jurnal akuntansi atas hal tersebut.
4. Melakukan pemindahbukuan kelebihan pembayaran PPh Ps 23 serta pembetulan SPT PPh Ps 23.
5. Untuk selanjutnya akan dilakukan setiap transaksi yang terdapat PPN akan dilakukan pemotongan atas PPN Wapu yang akan disetor ke KPP dan akan dilaporkan melalui kantor pusat.
6. Membuat format standar tanda terima dan mensosialisasikan ke seluruh Kantor Cabang

KEPATUHAN TERHADAP PENGENDALIAN INTERN

No. LAI/IC/BTW/15006

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Dewan Pengawas dan Direksi
Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan telah menerbitkan laporan kami pada tanggal 03 Februari 2015.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit kami atas laporan keuangan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, kami mempertimbangkan pengendalian intern entitas tersebut untuk menentukan prosedur audit yang kami laksanakan untuk menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atas pengendalian intern tersebut.

Manajemen Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aset terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat pemakaian atau pengeluaran yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Untuk tujuan laporan ini, kami menggolongkan pengendalian intern signifikan ke dalam kelompok berikut ini: (a) Operasional, dan (b) Keuangan.

Untuk semua golongan pengendalian intern tersebut di atas, kami memperoleh pemahaman tentang desain pengendalian intern yang relevan dan apakah pengendalian intern tersebut dioperasikan, serta kami menentukan risiko pengendalian.

Pertimbangan kami atas pengendalian intern tidak perlu mengungkapkan semua masalah dalam pengendalian intern yang mungkin merupakan kelemahan material menurut standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu kelemahan material adalah kondisi yang dapat dilaporkan yang didalamnya disain dan operasi satu atau lebih komponen pengendalian intern tidak mengurangi risiko ke tingkat yang relatif rendah tentang terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan dalam jumlah yang akan material dalam hubungannya dengan laporan keuangan auditan dan tidak terdeteksi dalam waktu semestinya oleh karyawan dalam pelaksanaan normal fungsi yang ditugaskan kepadanya. Kami mencatat bahwa tidak ada masalah berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya yang kami pandang memiliki kelemahan material sebagaimana kami definisikan di atas.

Namun, kami mencatat masalah-masalah tertentu yang tidak material berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya disertai saran perbaikannya yang kami kemukakan pada lampiran laporan ini.

Kantor Akuntan Publik
Husni, Mucharam & Rasidi

Budi T. Wibawa, CPA
Izin Praktik : No. AP.0083
Izin KAP : No. KEP-662/KM.17/1998

Jakarta, 03 Februari 2014

Lampiran : Uraian Hasil Audit Kepatuhan terhadap Pengendalian Intern

1. APLIKASI OPERASIONAL PERLU DISEMPURNAKAN

Kondisi :

1. Aplikasi Operasional tidak memiliki fungsi *cut off* data. Angka pada Aplikasi Operasional untuk posisi tanggal yang sama yang dicetak pada tanggal berbeda memberikan angka yang berbeda. Saldo yang harus direkonsiliasi antara data aplikasi operasional dan aplikasi akuntansi, meliputi Beban Co *Guarantee,* Beban Re *Guarantee*, *Fee Agent, Fee Based Income*, Pendapatan IJP KUR, Pendapatan Subrogasi, Pendapatan Komisi Penjaminan.
2. *Input Control* dalam Aplikasi Operasional belum memadai sehingga terdapat 4 nasabah KUR Cabang Jayapura *field* nilai penjaminan yang belum ada datanya (kosong).
3. Aplikasi Operasional saat ini belum memiliki fitur Piutang *Co-Guarantee*, sehingga administrasi masih dilakukan secara manual.
4. Aplikasi Operasional dan Aplikasi Akuntansi belum terintegrasi.
5. *Upgrade* sistem belum berhasil secara penuh sehingga terdapat *field* yang isinya keliru atau kosong.
6. Aplikasi operasional belum memuat seluruh informasi yang diperlukan, misalnya tanggal kelengkapan berkas penjaminan sebanyak 3.945 nasabah dan klaim sebanyak 2 nasabah, tanggal jatuh tempo kredit sebanyak 2 nasabah, nominal piutang *Co-Guarantee*.

Kriteria :

1. *Cut off* dalam program diperlukan agar data dapat dibandingkan dengan bagian lain untuk satu posisi yang sama.
2. *Input control* diperlukan agar data yang dimasukkan ke dalam program dapat diyakini kelengkapan dan keakuratannya.
3. Otomatisasi proses ke dalam sistem yang terintegrasi akan mencegah intervensi, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pekerjaan serta mempermudah analisa.

Akibat:

Salah debet oleh Bank yang menyebabkan lebih bayar klaim KUR dan eksisting mengakibatkan ketidakjelasan peruntukan atas pengeluaran uang giro di Bank.

Tanggapan Manajemen

Sebab:

1. Belum adanya beberapa mekanisme pada aplikasi operasional seperti koreksi/edit data kedepan dan validasi yang lengkap.
2. Belum selesainya proses integrasi antara aplikasi operasional dan akuntansi.
3. Aplikasi operasional saat ini belum memiliki fitur piutang *co-guarantee.*
4. Kegagalan pengembangan aplikasi operasional sebelumnya.
5. Belum adanya informasi atas tanggal kelengkapan berkas penjaminan dan klaim, tanggal jatuh tempo kredit, nominal piutang *co-guarantee* sesuai perjanjian dengan mitra di dalam aplikasi operasional.
6. Tidak *standard*-nya kode akun tiap cabang yang menyebabkan sulitnya pemetaan akun dari aplikasi operasional ke aplikasi akuntansi.
7. Kurangnya pemahaman *user* dalam penggunaan aplikasi.

Tindakan yang akan diambil oleh manajemen:

Manajemen akan melakukan langkah-langkah sebagi berikut:

1. Melakukan pengadaan kembali konsultan pengembangan aplikasi operasional dengan menambahkan fitur validasi yang lebih lengkap didalamnya.
2. Mengembangkan sistem pelaporan terpusat dengan memanfaatkan Data *Warehouse* dan *Business intelligent.*
3. Melanjutkan proses integrasi dengan memanfaatkan *midleware* dan ESB (*enterprise service bus*).

4. Melakukan pengembangan aplikasi operasional dengan menambahkan fitur piutang *co-guarantee,* fitur integrasi, informasi atas tanggal kelengkapan berkas penjaminan dan klaim, tanggal jatuh tempo kredit, nominal piutang *co-guarantee* sesuai perjanjian dengan mitra dan aplikasi akuntansi menambahkan fitur manajemen kode akun.
5. Standardisasi kode akun untuk memudahkan pemetaan.
6. Melakukan sosialisasi tata cara penggunaan aplikasi secara rutin.

2. KESALAHAN PENGINPUTAN DATA OLEH *USER (HUMAN ERROR)*

Kondisi :

1. Kesalahan input oleh *user* pada tanggal penerbitan Sertifikat Penjaminan di Aplikasi Operasional sehingga mendahului Surat Permohonan Sertifikat Penjaminan sebanyak 6 nasabah KUR Cabang Jayapura.
2. Kesalahan input tanggal jatuh tempo sebanyak 2 nasabah KUR dan tanggal pengajuan klaim sebanyak 2 nasabah KUR pada data internal bagian operasional Cabang Semarang.

Kriteria:

Berdasarkan SOP Manual Accounting dari lampiran Peraturan Direksi Nomor: 02/Per-Dir/2012 tanggal 17 Januari 2012 halaman 1 yaitu Laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain."Tujuannya untuk konsistensi dari pencatatan transaksi, agar laporan keuangan yang dihasilkan benar-benar menyatakan suatu keadaan yang sebenarnya, baik pada akhir tahun buku, maupun selama tahun buku yang bersangkutan.

Akibat:

Ketidakakuratan data penjaminan dapat berpotensi menimbulkan *under* atau *overstated* pengakuan pendapatan atau beban.

Tanggapan Manajemen

Sebab:

1. Ketidaktelitian dalam penginputan data penjaminan dan klaim seperti tanggal surat permohonan penerbitan Sertifikat Penjaminan, tanggal jatuh tempo dan tanggal pengajuan klaim pada aplikasi operasional.
2. Aplikasi operasional tidak dapat mendeteksi tanggal penerbitan Sertifikat Penjaminan yang mendahului tanggal surat permohonan penerbitan Sertifikat Penjaminan.

Tindakan yang akan diambil oleh manajemen:

Manajemen akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan koreksi kesalahan input data penjaminan dan klaim tersebut pada aplikasi operasional.
2. Menambahkan fitur *early warning system* pada aplikasi operasional agar dapat meminimalisir adanya kesalahan input tersebut.

3. PERBEDAAN PERLAKUAN ATAS PEMBERIAN BIAYA SPPD SECARA *LUMPSUM*

Kondisi :

Perhitungan biaya perjalanan dinas ke kantor pusat, cabang dan wilayah Perum Jamkrindo sebanyak 21 transaksi yang diberikan secara lumpsum (Uang saku, biaya representasi dan uang makan), dan terjadi juga di Kantor Cabang Banjarmasin sebanyak 9 transaksi, Palembang sebanyak 8 transaksi belum sesuai dengan pedoman perjalanan dinas yang berlaku.

Kriteria:

Berdasarkan Peraturan Direksi Perum Jamkrindo Nomor 06/Per-Dir/VI/2010 point 3 & 4 mengenai satuan bagi karyawan yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri menetapkan bahwa:

a. Karyawan Kantor Cabang atau Kantor Anak Cabang yang melakukan perjalanan dinas ke Kantor Pusat, akomodasi (sesuai table pada butir D. 10) selama di Kantor Pusat menjadi tanggungan Kantor Pusat, sedangkan uang saku dan biaya representasi menjadi tanggungan Kantor Cabang atau Kantor Anak Cabang yang bersangkutan.
b. Karyawan Kantor Cabang atau Kantor Anak Cabang yang melakukan perjalanan dinas ke Kantor Cabang atau Kantor Anak Cabang lainnya, akomodasi (sesuai table pada butir D. 10) selama perjalanan dinas tersebut menjadi tanggungan Kantor Cabang atau Kantor Anak Cabang tujuan, sedangkan uang saku dan biaya representasi menjadi tanggungan Kantor Cabang atau Kantor Anak Cabang yang bersangkutan.

Akibat:

Kesalahan perhitungan pemberian biaya SPPD (kurang/lebih bayar).

Tanggapan Manajemen

Sebab:
Adanya perbedaan pemahaman dalam penerapan ketentuan tersebut.

Tindakan yang akan diambil oleh manajemen:
Manajemen akan menerbitkan Surat Edaran ke Kantor Cabang mengenai hal-hal sebagai berikut:

a. Kantor Cabang tersebut diatas untuk segera mengkoreksi kekeliruan tersebut dengan meminta karyawan yang bersangkutan untuk mengembalikan kelebihan bayar atau membayar kekurangan bayar biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Menegaskan kembali agar pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Direksi Nomor: 06/Per-Dir/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Karyawan.

4. BELUM TERATURNYA ADMINISTRATIF ASET TETAP

Kondisi:

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan kelengkapan dokumen serta daftar aset yang dimiliki oleh Perum Jamkrindo Cabang, ditemukan beberapa hal seperti berikut:

a. Informasi dalam daftar aset tetap tidak lengkap di kantor cabang Makassar dan Banjarmasin.
   - Lokasi penempatan aset tetap
   - Kondisi fisik aset (baik/rusak/tidak ada)
   - Kode inventaris aset tetap.

b. Ketidaksesuaian pemberian kodifikasi aset tetap Kantor Cabang Banjarmasin dan Semarang.

No.	Jenis Inventaris Kantor	Tanggal Perolehan	No. Aset Salah
Banjarmasin			
1	Brand Cash, GALANT SST L 34,4	23-Mei-08	(L.2-0102.001-270802)
2	PABX	21-Des-10	(L.2-0900.001-170108)
Semarang			
3	Almari Sliding Kacs 2 Pt. Throne	22/07/2005	(L.2-05.04.022-280604)
4	Filling Cabinet	31/12/2013	(L.2-05.09.020-010897)

c. Belum dilakukan pemeriksaan fisik secara berkala pada Kantor Cabang Makassar dan Banjarmasin

d. Pencatatan aset tetap tidak sesuai dengan kebijakan kapitalisasi.
Terdapat pengadaan pada tahun 2014 kurang dari Rp3.000.000 dimasukkan ke dalam Aset Tetap pada Kantor cabang Jayapura. Rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Perolehan	Keterangan	Jumlah Unit	Harga Perolehan	Harga Satuan
1	7/5/2014	Kursi Kerja	3	5.610.000	1.870.000
2	13/5/2014	Meja Ka.Unit	2	3.685.000	1.842.500
3	26/5/2014	Meja Kerja	3	6.600.000	2.200.000
4	26/5/2014	Lemari Arsip	2	5.500.000	2.750.000
5	26/5/2014	Kursi Pemimpin	3	2.204.400	734.800
6	26/5/2014	Kursi Staff	1	2.838.000	2.838.000

Kriteria:

1. Menciptakan keseragamaan dan keteraturan dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan di Kantor Pusat dan Kantor Cabang.
2. Aset tetap yang tercatat di dalam Daftar Aset Tetap, secara fisik seharusnya dapat ditemukan keberadannya.
3. Informasi lokasi aset tetap seharusnya dicantumkan dalam daftar aset tetap, sehingga dapat mempermudah petugas dalam proses inventarisasi fisik aset tersebut.
4. Pengalihan aset tetap dari kantor pusat dan kantor cabang lain menggambarkan bahwa terjadi pengalihan tanggung jawab atas aset yang diserahkan terimakan. Dengan demikian, seharusnya pengalihan tersebut diikuti dengan pengalihan dokumen bukti kepemilikan dan berita acara serah terima.
5. Sesuai dengan Peraturan Direksi No. 01/Per-Dir/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 tentang Manual Sistem Akuntansi Bab III Kebijakan Akuntansi Aset Tetap yang menyatakan "Perusahaan memiliki kebijakan kapitalisasi asset tetap dengan nilai minimum sebesar Rp5.000.000,- kecuali untuk inventaris sebesar Rp3.000.000,-".
6. Sesuai dengan Peraturan Direksi No. 01/Per-Dir/I/2013 tentang Pengadaan barang dan jasa Pasal 11 yang menyatakan "Pelaksana Pengadaan Barang/jasa harus melakukan dokumentasi terhadap pengadaan barang dan jasa termasuk menyimpan, mengamankan, dan memelihara dokumen pengadaan barang dan jasa".

7. Aset tetap dalam kondisi rusak seharusnya dilakukan upaya lebih lanjut apakah diperbaiki atau dihapuskan (dijual, disumbangkan) sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila sudah tidak ada manfaat ekomominya, maka nilai buku aset tetap tersebut dibebankan pada laba rugi berjalan.

Akibat:

1. Aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan belum menggambarkan jumlah yang sebenarnya.
2. Kesulitan untuk mengetahui keberadaan aset tetap.

Tanggapan Manajemen

Sebab:

Belum tertib dan disiplinnya kegiatan pemeriksaan fisik aset dan pengadministrasiannya serta kesalahan pencatatan atas kapitalisasi aset tetap.

Tindakan yang akan diambil oleh manajemen:

Manajemen akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Membuat Surat Edaran ke Kantor Cabang mengenai hal-hal sebagai berikut:
   a. Kantor Cabang agar melakukan :
      - inventarisasi aset dan melaporkannya ke Kantor Pusat.
      - cek fisik aset secara berkala.
      - tertib administrasi/pencatatan dan kodifikasi aset.
   b. Menegaskan kembali agar ketentuan klasifikasi/pengelompokan aset Perusahaan dilakukan mengacu Keputusan Direksi Nomor 157/Kep-Dir/VII/2014 Tanggal 16 Juli 2014 Tentang Ketentuan Pengelompokan pengeluran Modal (*Capital Expenditure*), Pengeluaran untuk Penghasilan (*Revenue Expenditure*) dan Penyusutan Aktiva Tetap.
2. Menyusun ketentuan tentang pengelolaan aset Perusahaan.
3. Kesalahan pencatatan kapitalisasi aset tetap akan dilakukan koreksi pembukuan.

5. KELEMAHAN DALAM ADMINISTRASI KAS BON

Kondisi:

Kas Bon Kantor Pusat Yang Belum Dipertanggungjawabkan lebih dari 14 hari :
- Jumlah bon sementara lain-lain Rp745.364.738,-
- Jumlah bon sementara SPJ Rp1.425.000,-

Kriteria :

Berdasarkan Peraturan Direksi Perum Jamkrindo Nomor: 09/Per-Dir/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2014 Tentang SOP Kasir Perum Jamkrindo, bahwa Pertanggungjawaban Kas Sementara dilakukan selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari kerja atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Akibat :

Risiko beban terlalu rendah (*understated*)

Tanggapan Manajemen

Sebab:

Belum tertib dan disiplin dalam mempertanggungjawabkan kasbon.

Tindakan yang akan diambil oleh manajemen:

Manajemen akan menyelesaikan pertanggungjawaban atas kasbon tersebut.

6. AKTIFITAS REKONSILIASI HARUS DILAKUKAN SECARA PERIODIK

Kondisi :

1. Belum dilakukan rekonsiliasi dan ekualisasi rutin antara pembayaran pajak dengan transaksi di buku besar.
2. Belum dilakukan rekonsiliasi rutin pada Utang *Co-Guarantee*, Piutang *Co-Guarantee*, Klaim, Subrogasi antara data operasional dengan data akuntansi.
3. Belum dilakukan rekonsiliasi deposito antara kantor pusat dan kantor cabang.

Kriteria:

Best Practices membandingkan data yang sama dari dua sumber yang berbeda sehingga dapat mempermudah penelusuran apabila terdapat perbedaan.

Akibat :

Jika terdapat selisih antara data akuntansi dengan pihak lain maka akan mempersulit dalam penelusuran.

Tanggapan Manajemen

Sebab:

1. Kurangnya pemahaman mengenai tahapan pekerjaan rekonsiliasi dan ekualisasi antara pembayaran pajak dengan transaksi buku besar.
2. Unit kerja telah melakukan rekonsiliasi beban/utang *Co-Guarantee*, Piutang *Co-Guarantee*, beban/utang Klaim dan pendapatan Subrogasi Antara data Aplikasi Operasional dengan data Aplikasi Akuntansi secara rutin setiap bulan, namun belum secara rutin dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rekonsiliasi.
3. Rekonsiliasi deposito antara Kantor Pusat dan Kantor Cabang sudah berjalan secara periodik setiap bulan untuk keperluan pelaporan. Rekonsiliasi Kantor Pusat dan Kantor Cabang saat ini menggunakan berbagai media komunikasi tidak terbatas melalui surat-menyurat atau tatap muka. Pencocokan posisi deposito dan pendapatannya banyak menggunakan email sesuai dengan filosofi kantor menuju *paperless.*

Tindakan yang akan diambil oleh manajemen:

Manajemen akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai perpajakan ke Kantor Cabang selindo.
2. Telah menyampaikan himbauan rekonsiliasi kepada Unit kerja untuk meminimalkan terjadinya perbedaan data sebagai berikut :
   a. Adanya surat kepada Unit Kerja mengenai rekonsiliasi data klaim dan subrogasi melalui surat Nomor: 3879/2.2/IX/2014 tanggal 29 September 2014 perihal rekonsiliasi data klaim dan subrogasi dan surat Nomor: 733/P/2.2/II/2015 tanggal 2 Februari 2015 perihal Penyesuaian Data Klaim dan Subrogasi GL dan Aplikasi Operasional Tahun 2014.
   b. Menginstruksikan kepada seluruh Unit Kerja untuk melakukan rekonsiliasi antara Aplikasi Akuntansi dan Aplikasi Operasional atas selisih data klaim, subrogasi dan piutang *Co-Guarantee* melalui surat Nomor: 5560/2.2/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014.

   Selain itu, akan menyampaikan surat edaran kepada kantor cabang/ unit kerja untuk melakukan rekonsiliasi beban/utang *Co-Guarantee*, Piutang *Co-Guarantee*, beban/utang Klaim dan pendapatan Subrogasi Antara data Aplikasi Operasional dengan data Aplikasi Akuntansi secara rutin setiap bulan, dan hasil rekonsiliasinya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rekonsiliasi.
4. Akan ditingkatkan dengan memperluas akses komunikasi baik secara email, surat maupun dengan aplikasi *messenger* (BBM dan Whatsapp) untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas rekonsiliasi. Sistem pelaporan deposito sudah dilakukan dengan berbagai media komunikasi, seperti surat dan email maka akan ditingkatkan untuk mengintensitaskan komunikasi antara kantor pusat dan kantor cabang secara efektif dan efisien.

7. KURANGNYA PENATALAKSANAAN DEPOSITO

Kondisi :

1. Bagian keuangan belum melakukan penatalaksanaan atau monitoring deposito yang dimiliki oleh Perum Jamkrindo baik dipusat maupun di cabang secara menyeluruh.
2. Pemegang deposito Perum Jamkrindo tidak pernah meminta laporan posisi deposito setiap akhir bulan yang ditandatangani oleh pimpinan bank
3. Belum dilakukannya rekonsiliasi deposito dan bunga deposito secara periodik antara bank dengan Perum Jamkrindo.

Kriteria :

1. Peraturan Direksi Nomor.18/PerDir/x/2012 Tentang Kebijakan Umum Investasi Perum Jamkrindo, BAB III Pedoman Investasi mengenai monitoring yang perlu dilakukan pada investasi produk pasar uang Deposito berjangka, yaitu :
   - Melakukan verifikasi keaslian bilyet deposito termasuk keaslian tanda tangan.
   - Meminta laporan posisi deposito setiap akhir bulan yang ditandatangani oleh pimpinan bank.
   - Monitor perubahan suku bunga penjaminan
   - Rekonsiliasi secara peridik antara bank dengan Perum Jamkrindo
2. Peraturan Direksi Nomor: 19/Per-Dir/X/2012 Tentang SOP Analisis, penempatan, perpanjangan, pencairan dan pelaporan deposito di kantor pusat pada :
   - Penempatan deposito pada bank :
     a. bagian pengelolaan investasi bertanggung jawab untuk meminta pihak bank mengirimkan bilyet asli maksimum 1 hari setelah penempatan deposito.
     b. melakukan konfirmasi ke kantor pusat atau melalui system bank beesangkutan apabila bilyet tidak diterima.
     c. Melakukan pemeriksaan deposito secara berkala.
   - Pelaporan Posisi Deposito:
     a. Mencatat data deposito dengan teliti (disertai pengecekan ulang dan verifikasi oleh kepala bagian atau divisi)
     b. Koordinasi dan verifikasi data konfirmasi terkait deposito
     c. Verifikasi data konfirmasi terkait deposito
     d. Verifikasi data penerimaan bunga deposito
     e. Meminta bagian treasury untk merekonsiliasi data deposito dari setiap bilyet deposito yang dikirim oleh bank
     f. Meminta laporan penempatan deposito posisi akhir bulan kepada bank penempatan

Akibat :

1. Terjadi kesalahan pencatatan data yang kemudian sulit untuk ditelusuri.
2. Pencatatan saldo setiap akun deposito dan bunga deposito tidak sesuai.

Tanggapan Manajemen

Sebab:

1. Monitoring deposito telah dilakukan namun belum optimal.
2. Rekonsiliasi deposito belum dilakukan atas seluruh bank ataupun seluruh cabang dikarenakan keterbatasan SDM mengingat banyaknya penempatan dana Perusahaan. Oleh karena itu, rekonsiliasi difokuskan ke bank yang komposisi penempatan dananya besar seperti Bank BRI.

Tindakan yang akan diambil oleh manajemen:

Manajemen akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Awal tahun 2015, Divisi Investasi dan Keuangan menggunakan jasa kustodian BRI untuk pengelolaan deposito BRI seluruh Indonesia. Saat ini proses migrasi bilyet deposito sedang dalam proses. Saat proses migrasi pengelolaan deposito selesai ke Jasa *Custody* maka rekonsiliasi akan difokuskan bersama dengan *custody* BRI, Perum Jamkrindo dengan pihak bank atas penempatan dananya.
2. Dalam Perjanjian Kerjasama antara Perum Jamkrindo dengan BRI terkait layanan *custody* telah diatur kewajiban *custody* memberikan laporan berkala setiap akhir bulan untuk mengakomodasi keperluan pelaporan posisi deposito setiap bulan dari bank.

8. PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL)

Kondisi :

Tidak terdapat standar jurnal *entry* untuk penyaluran PKBL khususnya transaksi antara pusat dan cabang.

Selain itu, belum terdapat pengendalian yang memadai dalam proses pencatatan maupun pelaporan PKBL tercermin dari perbedaan dan ketidaksesuaian berikut ini :

a. Saldo Aplikasi PKBL.
Pada Aplikasi PKBL angka Aset Neto di Laporan Posisi Keuangan tidak sama dengan angka Aset Neto di Laporan Aktivitas, dan Angka Aset tidak sama dengan Liabilities ditambah Aset Neto pada Cabang Mataram dan Palangkaraya, dengan rincian sebagai berikut :

CABANG	LAPORAN AKTIVITAS		LAPORAN POSISI KEUANGAN	
	Kenaikan/Penurunan Aset Neto Tidak Terikat	Aset Neto Akhir Tahun	Total Aset & Liabilitas	Total Aset Neto
PALANGKARAYA	99.864.506,85	-	99.864.506,85	-
MATARAM	99.475.088,00	99.475.088,00	99.475.088,00	-

b. Perbedaan antara saldo neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut :

Cabang Makassar

Terdapat Perbedaan Nilai antara Neraca dengan Catatan Atas Laporan Keuangan PKBL.

1. Saldo penyisihan Piutang Pinjaman Mitra Binaan tidak sama antara Neraca sebesar Rp202.255.018 dengan Catatan Atas Laporan Keuangan Rp1.260.496.232 sehingga selisih sebesar Rp1.058.241.214.
2. Nilai Beban Penyisihan tidak sama Antara Laporan Aktivitas sebesar Rp0 dengan Catatan Atas Laporan Keuangan sebesar Rp1.402.391.144 sehingga selisih sebesar Rp1.402.391.144.
3. Perhitungan Beban Penyusutan tidak sama antara CALK sebesar Rp1.402.391.144 dengan perhitungan seharusnya sebesar Rp983.472.217 sehingga selisih sebesar Rp418.918.927.

Cabang Banjarmasin

1. Tidak terdapat saldo Bank PK (Kas dan Setara Kas) pada Laporan Keuangan PKBL. Sementara pada rekening koran tersaji sebesar Rp4.969.173,75.
2. Laporan arus kas saldo akhir per 30 September 2014 sebesar Rp288.580.673, kas dan setara kas di Neraca sebesar Rp1.063.697, saldo di rekening koran sebesar Rp6.032.870,74 seharusnya arus kas saldo akhir sama dengan saldo rekening koran.
3. Terdapat rincian beban penyisihan yang tidak tercantum di Neraca menurut Catatan Atas Laporan Keuangan sejumlah Rp294.500.
4. Pada Laporan Aktivitas tidak terdapat jumlah Penyaluran Dana Kemitraan sebesar Rp95.000.000.
5. Terdapat transfer masuk dari Kantor Pusat atas Dana Bina Lingkungan yang belum ada di Laporan Aktivitas sebesar Rp21.208.100.

Cabang Palembang

Masih ditemukan beberapa kelemahan dalam penyusunan Laporan Keuangan PKBL Cabang seperti:

1. Total Kas dan Setara Kas di form 1 (Laporan Posisi Keuangan) tidak sama dengan saldo dengan form 3 (Laporan Arus Kas).
2. Saldo Kas dan Setara kas di form 3 berjumlah negatif.
3. Alokasi Penyisihan Piutang Pinjaman Mitra Binaan (kontra akun dari akun piutang) tidak diberi tanda negatif dan jumlahnya belum bisa ditelusuri.
4. Pendapatan Lain-lain dan Beban Penyisihan Piutang di form 2 (Laporan Aktivitas) adalah bukan berasal dari rumusan jumlah transaksi melainkan hasil input manual dan jumlahnya belum bisa ditelusuri.
5. Terdapat kesalahan rumus dalam Laporan Arus Kas di akun Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan.
6. Perlu ketegasan mengenai klasifikasi pinjaman atau hibah.

Cabang Jayapura

Masih ditemukan beberapa kelemahan dalam penyusunan Laporan Keuangan PKBL Cabang seperti:

1. Total Kas dan Setara Kas di form 1 (Laporan Posisi Keuangan) sebesar Rp208.741.389 tidak sesuai dengan total saldo Rekening Koran sebesar Rp31.505.202.
2. Total Kas dan Setara Kas di form 1 (Laporan Posisi Keuangan) tidak sama dengan saldo dengan form 3 (Laporan Arus Kas).
3. Saldo alokasi Penyisihan Piutang Pinjaman Mitra Binaan di form 1 (Laporan Posisi Keuangan) tidak sesuai dengan saldo alokasi Penyisihan Piutang Pinjaman Mitra Binaan di form 4 (Catatan Atas Laporan Keuangan).

Cabang Semarang

Masih ditemukan beberapa kelemahan dalam penyusunan Laporan Keuangan PKBL Cabang seperti:

a. Terdapat perbedaan saldo antara kas PK dan BL bank pada Laporan Posisi Keuangan (Form 1) sebesar Rp489.881.006 dan Rp44.062.135 dengan saldo pada rekening koran sebesar Rp491.091.610 dan Rp45.448.641.
b. Terdapat perbedaan total saldo antara Kas dan Setara Kas pada Laporan Posisi Keuangan (Form 1) sebesar Rp536.506.511,20 dengan saldo pada Laporan Arus Kas (Form 3) sebesar Rp1.729.477.254,61
c. Terdapat perbedaan saldo antara Aktiva Bersih Tidak Terikat pada Laporan Posisi Keuangan (Form 1) sebesar Rp932.555.393,54 dengan saldo Aktiva Bersih Akhir Periode pada Laporan Aktivitas (Form 2) sebesar Rp928.326.421,54.

Saldo-saldo yang terdapat di Form 1 (Laporan Posisi Keuangan), From 2 (Laporan Aktivitas) dan From 3 (Laporan Arus Kas) adalah bukan berasal dari rumusan jumlah transaksi melainkan hasil.

Kriteria :

1. Pemberian dana kemitraan (pinjaman) kepada mitra binaan seharusnya diberikan dengan prinsip kehati-hatian, sehingga risiko pinjaman bermasalah dapat dimitigasi.
2. Seharusnya beban penyisihan tahun 2014 dari perhitungan saldo penyisihan tahun 2014 dikurangi saldo penyisihan tahun 2013.
3. Berdasarkan SOP Manual Accounting dari lampiran Per.Dir. Nomor 02/Per-Dir/2012 tanggal 17 Januari 2012 halaman 1 yaitu Laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain."Tujuannya untuk konsistensi dari pencatatan transaksi, agar laporan keuangan yang dihasilkan benar-benar menyatakan suatu keadaan yang sebenarnya, baik pada akhir tahun buku, maupun selama tahun buku yang bersangkutan.
4. Seharusnya Laporan Aktivitas menyajikan jumlah Penyaluran Dana Kemitraan dan Dana Bina Lingkungan.

Akibat :

1. Terdapat potensi kerugian yang harus ditanggung oleh unit PKBL
2. Tidak adanya kesesuaian dalam pencatatan antara rekening Koran PKBL dengan Laporan Keuangan PKBL.
3. Selisih saldo Total Aset & Liabilitas, Total Aset Neto sehingga mengakibatkan tidak balance pada Laporan Aktivitas dan Laporan Posisi Keuangan PKBL Jamkrindo, dan laporan tidak bisa di andalkan.
4. Laporan Keuangan tidak dapat diyakini kewajarannya.
5. Saldo alokasi dana BUMN Pembina menjadi negatif sehingga mempengaruhi kewajaran saldo keseluruhan dalam laporan.

Tanggapan Manajemen

Sebab:

1. Kurangnya pemahaman SDM dalam penyusunan Laporan Keuangan PKBL.
2. Penyajian laporan Keuangan yang bersumber dari ICPR PKBL masih dilakukan secara manual.
3. Terdapat fungsi/prosedur dalam ICPR PKBL yang tidak berjalan dengan baik.
4. Kurangnya monitoring atas pelaksanaan kegiatan PKBL di Kantor Cabang.
5. Terdapat kesalahan pembukuan atas beberapa transaksi PKBL dan kesalahan input pada aplikasi ICPR PKBL

Tindakan yang akan diambil oleh manajemen:

1. Melakukan pelatihan dan sosialisasi ketentuan terkait PKBL dan penggunaan ICPR PKBL.
2. Melakukan penyempurnaan sistem ICPR PKBL, termasuk menambah nomor akun transaksi Rekening Antar Kantor, sehingga pelaporan keuangan dapat disajikan dengan wajar.
3. Melakukan koreksi atas kesalahan pembukuan dan edit input data ICPR PKBL.

laporan tahunan
annual report
2014

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

UMKMK UNTUK INDONESIA HEBAT

2014 laporan tahunan annual report

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

Gedung Jamkrindo
Jl. Angkasa Blok B-9 Kavling 6
Kota Baru Bandar Kemayoran,
Jakarta Pusat 10610 Indonesia
Telp. (62-21)-6540335
Fax. (62-21)-6540344,6540348

www.jamkrindo.com